PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

.Sulsel
Colorful Experience

INDONESIA EMAS 2045

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RANCANGAN AKHIR

# RPJMD

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## PROVINSI SULAWESI SELATAN
## 2025 - 2029

SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER

RANCANGAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
    a. bab I pendahuluan;
    b. bab II gambaran umum daerah;
    c. bab III visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
    d. bab IV program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraaan pemerintah Daerah; dan
    e. bab V penutup.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 5

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
    c. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

JUFRI RAHMAN

# Daftar Isi

**Bab I Pendahuluan ..... I – 1**
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum ..... I – 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I – 6
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I – 8
1.4.1. Maksud ..... I – 8
1.4.2. Tujuan ..... I – 8
1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029 ..... I – 9

**Bab II Gambaran Umum Daerah ..... II – 1**
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II – 1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ..... II – 1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ..... II – 1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ..... II – 10
2.1.1.3. Daya Dukung dan Tata Tampung Lingkungan Hidup ..... II – 17
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan ..... II – 18
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ..... II – 28
2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ..... II – 36
2.1.1.7. Demografi ..... II – 48
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 55
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ..... II – 55
2.1.2.2. Kesejahtraan Untuk Semua ..... II – 72
2.1.2.3. Pendidikan Berkulitas Yang Merata ..... II – 80
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif ..... II – 92
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ..... II – 94
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ..... II – 97
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 105
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ..... II – 105
2.1.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi .. II – 107
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru ..... II – 118
2.1.3.4. Transformasi Digital ..... II – 122
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ..... II – 129
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ..... II – 131
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro ..... II – 142
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ..... II – 147
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang beintegrasi dan Adaptif ..... II – 147
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamana Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial .. II – 151

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ..... II – 155
2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah ..... II – 159
2.1.4.4.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Berdasarkan Urusan Pemerintahan ..... II – 159
2.1.4.4.1.1. Urusan Pendidikan ..... II – 159
2.1.4.4.1.2. Urusan Kesehatan ..... II – 159
2.1.4.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II – 161
2.1.4.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II – 163
2.1.4.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II – 167
2.1.4.4.1.6. Urusan Sosial ..... II – 169
2.1.4.4.1.7. Urusan Tenaga Kerja ..... II – 171
2.1.4.4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 173
2.1.4.4.1.9. Urusan Pangan ..... II – 174
2.1.4.4.1.10. Urusan Pertanahan ..... II – 175
2.1.4.4.1.11. Urusan Lingkungan Hidup ..... II – 176
2.1.4.4.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II – 177
2.1.4.4.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyakat dan Desa ..... II – 178
2.1.4.4.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II – 179
2.1.4.4.1.15. Urusan Perhubungan ..... II – 180
2.1.4.4.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika ..... II – 194
2.1.4.4.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah ..... II – 197
2.1.4.4.1.18. Urusan Penanaman Modal ..... II – 198
2.1.4.4.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..... II – 199
2.1.4.4.1.20. Urusan Statistik ..... II – 201
2.1.4.4.1.21. Urusan Persandian ..... II – 202
2.1.4.4.1.22. Urusan Kebudayaan ..... II – 204
2.1.4.4.1.23. Urusan Perpustakaan ..... II – 205
2.1.4.4.1.24. Urusan Kearsipan ..... II – 206
2.1.4.4.1.25. Urusan Kelautan dan Perikanan ..... II – 208

2.1.4.4.1.26. Urusan Pariwisata ..... II – 211
2.1.4.4.1.27. Urusan Pertanian ..... II – 212
2.1.4.4.1.28. Urusan Kehutanan ..... II – 213
2.1.4.4.1.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II – 217
2.1.4.4.1.30. Urusan Perdagangan ..... II – 218
2.1.4.4.1.31. Urusan Perindustrian ..... II – 220
2.1.4.4.1.32. Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II – 222
2.1.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024 ..... II – 248
2.1.6. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ..... II – 250
2.2. Gambaran Keuangan Daerah ..... II – 281
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... II – 281
2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... II – 281
2.2.1.2. Neraca Daerah ..... II – 287
2.2.1.3. Aset Daerah ..... II – 289
2.2.1.4. Kewajiban ..... II – 289
2.2.1.5. Ekuitas Dana ..... II – 289
2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... II – 289
2.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD ..... II – 290
2.2.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran ..... II – 290
2.2.2.3. Analisis Pembiayaan ..... II – 291
2.2.3. Analisis Keuangan Daerah ..... II – 295
2.2.3.1. Analisis Fiskal Daerah ..... II – 295
2.2.3.2. Analisis Share APBD terhadap Nilai APBD. II – 300
2.2.4. Rasio Keuangan (Likuiditas. Solvabilitas) ..... II – 302
2.2.5. Dana Bagi Hasil (DBH) ..... II – 303
2.2.6. Kerangka Pendanaan ..... II – 304
2.2.6.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah ..... II – 304
2.2.6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah .... II – 305
2.2.6.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah .... II – 305
2.2.6.2.2. Proyeksi Belanja Daerah ..... II – 308
2.2.6.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah .... II – 309
2.2.7. Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... II – 313
2.2.8. Pembiayaan Non Pemerintah ..... II – 315
2.2.8.1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... II – 315
2.2.8.2. Obligasi Pemerintah Daerah ..... II – 317
2.2.8.3. Sistem Resi Gudang ..... II – 317
2.2.8.4. Sukuk ..... II – 318
2.2.8.5. Pinjaman Daerah ..... II – 319
2.2.8.6. Hibah ..... II – 320
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis ..... II – 321
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II – 321

1. Kualitas pendidikan masih rendah dan layanan pendidikan belum merata ..... II – 321
2. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat ..... II – 322
3. Keamanan dan Ketertiban Daerah serta Perwujudan Demokrasi Substansial belum sepenuhnya berjalan baik ..... II – 323
4. Kesadaran Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju Mengalami Pasang Surut dalam Kehidupan Masyarakat ..... II – 323
5. Belum optimalnya perwujudan keluarga dan generasi berkualitas, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial ..... II – 325
6. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif dan Produktif ..... II – 326
7. Integrasi Ekonomi Regional dan Global Masih Lemah ..... II – 328
8. Kapasitas Fiskal Daerah Masih Rendah ..... II – 329
9. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan di Perdesaan ..... II – 329
10. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan ..... II – 330
11. Kesenjangan Kualitas dan Lemahnya Tatakelola Ketenagakerjaan ..... II – 331
12. Transformasi Digital yang Belum Merata dan Belum Optimal ..... II – 332
13. Tata kelola pemerintahan belum adaptif dan tangkas dalam merespons perubahan ..... II – 333
14. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah di Sulawesi Selatan ..... II – 334
15. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ..... II – 335
16. Tingginya Risiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan ..... II – 336
17. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup ..... II – 337
18. Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim ..... II – 338

2.3.2. Isu Strategis RPJMD 2025-2029 ..... II – 339

1. Penguatan Fondasi Sosial dan Kualitas SDM dalam Menghadapi Bonus Demografi serta Tantangan Global ..... II – 339
2. Optimalisasi Stabilitas Sosial, Politik, dan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Daerah .. II – 340
3. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan ..... II – 341
4. Ketimpangan dan Kerentanan Struktur Ekonomi Daerah terhadap Krisis Iklim dan Dinamika Global ..... II – 342

5. Optimalisasi Posisi Strategis Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam mendukung Pemerataan dan Akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia ..... II – 343
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif ..... II – 344
7. Kesiapan Daerah Menghadapi Disrupsi Teknologi dalam Agenda Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan ..... II – 344
8. Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Mengancam Ketahanan Sumber Daya Esensial dan Keberlanjutan Pembangunan ..... II – 345
9. Meningkatnya Ancaman Perubahan Iklim dan Risiko Bencana terhadap Ketahanan Wilayah ..... II – 346
10. Penurunan Daya Saing Daerah ..... II – 347
11. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Daerah yang Berbasis Keberlanjutan dan Berdaya Saing Global ..... II – 348

**BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... III – 1**

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..... III – 1
3.1.1. Visi ..... III – 1
3.1.2. Misi ..... III – 2
3.1.3. Tujuan dan Sasaran ..... III – 6
3.2. Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... III – 14
3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Pembangunan Daerah ..... III – 14
3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... III – 47
3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan ..... III – 68
3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional ..... III – 68
3.3.2. Sasaran, Tema, dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan ..... III – 70
1. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Makassar ..... III – 71
2. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Bulukumba . III – 76
3. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Watampone III – 81
4. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Palopo ..... III – 85
5. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Parepare ..... III – 90

**BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... IV – 1**

4.1. Program Perangkat Daerah ..... IV – 1
4.2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah ..... IV – 37
4.2.1. Indikator Makro ..... IV – 37

4.2.2. Indikator Kinerja Utama ..... IV – 38
4.2.3. Indekator Kinerja Daerah ..... IV – 39

**BAB V Penutup..... V – 1**
1. Konsistensi Perencanaan..... V – 1
2. Pendanaan Pembangunan ..... V – 2
3. Mitigasi Fiskal ..... V – 2
4. Pengendalian dan Evaluasi ..... V – 3
5. Pengarusutamaan Pembangunan..... V – 3
6. Mekanisme Perubahan RPJMD ..... V – 3
7. Komunikasi Publik ..... V – 3
8. Masa Transisi..... V – 4
9. Sistem Insentif..... V – 4
10. Manajemen Risiko..... V – 4

# Daftar Tabel


| | | |
|---|---|---|
| Tabel II. 1 | Distribusi Klasifikasi Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Selatan | II – 6 |
| Tabel II. 2 | Sebaran Cekungan Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan | II – 8 |
| Tabel II. 3 | Komoditas Kopi Unggulan yang Bersertifikat Indikasi Geografis (IG) | II – 11 |
| Tabel II. 4 | Distribusi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan | II – 14 |
| Tabel II. 5 | Kawasan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | II – 16 |
| Tabel II. 6 | Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih, dan Ambang Batas Bahan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | II – 18 |
| Tabel II. 7 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinis Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 | II – 21 |
| Tabel II. 8 | Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 22 |
| Tabel II. 9 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 28 |
| Tabel II. 10 | Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 31 |
| Tabel II. 11 | Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 37 |
| Tabel II. 12 | Kawasan Pantai Yang Rusak/Abrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | II – 38 |
| Tabel II. 13 | Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan | II – 42 |
| Tabel II. 14 | Dampak Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 44 |
| Tabel II. 15 | Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 46 |
| Tabel II. 16 | Kondisi Demografi Tahun 2020 – 2024 | II – 48 |
| Tabel II. 17 | Kepadatan Penduduk Per Km2 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 50 |
| Tabel II. 18 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 51 |
| Tabel II. 19 | Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2030 | II – 52 |
| Tabel II. 20 | Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Hasil proyeksi Tahun 2025-2030 | II – 53 |
| Tabel II. 21 | Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2030 | II – 54 |
| Tabel II. 22 | Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2030 | II – 54 |
| Tabel II. 23 | Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 | II – 55 |
| Tabel II. 24 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 56 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II. 25 | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 57 |
| Tabel II. 26 | Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 | II – 59 |
| Tabel II. 27 | Distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha | II – 59 |
| Tabel II. 28 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024 | II – 62 |
| Tabel II. 29 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 63 |
| Tabel II. 30 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2023 - September 2024 | II – 64 |
| Tabel II. 31 | PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 | II – 65 |
| Tabel II. 32 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Tahun 2020 – 2024 (%) | II – 67 |
| Tabel II. 33 | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulsel Tahun 2020 – 2024 | II – 67 |
| Tabel II. 34 | IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2024 | II – 71 |
| Tabel II. 35 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulsel Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024 | II – 71 |
| Tabel II. 36 | Capaian Indikator Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 72 |
| Tabel II. 37 | Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (%) Tahun 2020-2024 | II – 75 |
| Tabel II. 38 | Rata-rata Lama Sekolah Di Sulawesi Selatan 15 tahun keatas dan 25 tahun keatas (metode perhitungan baru) Tahun 2020-2024 | II – 81 |
| Tabel II. 39 | Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 | II – 81 |
| Tabel II. 40 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Di Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.. | II – 82 |
| Tabel II. 41 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 | II – 83 |
| Tabel II. 42 | Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 | II – 84 |
| Tabel II. 43 | Harapan Lama Sekolah Di Sulawesi Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 | II – 84 |
| Tabel II. 44 | Jumlah Lulusan SMA?SMK yang Diterima di Perguruan Tinggi Tahun 2024 | II – 86 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II. 45 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 | II – 87 |
| Tabel II. 46 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 88 |
| Tabel II. 47 | Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 | II – 90 |
| Tabel II. 48 | Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 | II – 90 |
| Tabel II. 49 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 93 |
| Tabel II. 50 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dimensi Pembentuknya Tahun 2020-2024 | II – 96 |
| Tabel II. 51 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Dimensi Pembentuknya Tahun 2020-2024 | II – 97 |
| Tabel II. 52 | Dispensasi Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 | II – 99 |
| Tabel II. 53 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 | II – 100 |
| Tabel II. 54 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 | II – 102 |
| Tabel II. 55 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 | II – 103 |
| Tabel II. 56 | Tahapan Periode Bonus Demografi Berdasarkan Provinsi | II – 107 |
| Tabel II. 57 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Tahun 2020 – 2024 | II – 108 |
| Tabel II. 58 | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 | II – 111 |
| Tabel II. 59 | Jumlah Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 | II – 111 |
| Tabel II. 60 | Rasio Kewirausahaan di Sulsel Tahun 2020 – 2024 | II – 112 |
| Tabel II. 61 | Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024 | II – 112 |
| Tabel II. 62 | Total Aset dan Laba Bersih BUMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 | II – 113 |
| Tabel II. 63 | Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulsel Tahun 2020 – 2024 | II – 113 |
| Tabel II. 64 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Agustus) Provinsi Sulsel Tahun 2020 – 2024 | II – 115 |
| Tabel II. 65 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 | II – 111 |
| Tabel II. 66 | Jumlah Pekerja Migran Indonesia Asal Sulsel Tahun 2020-2024 | II – 116 |

Tabel II. 67 Indeks Kapabilitas Inovasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 117
Tabel II. 68 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 118
Tabel II. 69 Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 119
Tabel II. 70 Skor IBEI Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 121
Tabel II. 71 Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Government Tahun 2018-2022 ..... II – 123
Tabel II. 72 Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Business Tahun 2018-2022 ..... II – 124
Tabel II. 73 Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Ecosystem Tahun 2018-2022 ..... II – 125
Tabel II. 74 Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Network Tahun 2018-2022 ..... II – 125
Tabel II. 75 Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar People Tahun 2018-2022 ..... II – 126
Tabel II. 76 Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2020−2024 ..... II – 127
Tabel II. 77 Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia berdasarkan Pilar Penyusun Tahun 2024 ..... II – 127
Tabel II. 78 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Tahun 2020-2024 ..... II – 129
Tabel II. 79 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020−2024 ..... II – 130
Tabel II. 80 Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 132
Tabel II. 81 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024 ..... II – 138
Tabel II. 82 Kontribusi PDRB Kota Makassar Tahun 2020-2024 ADHB. II – 139
Tabel II. 83 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) tahun 2020-2024 ..... II – 139
Tabel II. 84 Persentase Desa Mandiri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 140
Tabel II. 85 Status Desa Berdasarkan Kabupaten ..... II – 141
Tabel II. 86 Rasio Pajak ( Tax Ratio) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 142
Tabel II. 87 Inflasi Tahunan Menurut 8 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 143
Tabel II. 88 Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB (%) dan Total Kredit Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 ..... II – 144
Tabel II. 89 Aset Dana Pensiun (Juta Rp) Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 ..... II – 145
Tabel II. 90 Nilai Transaksi Saham Tahun 2020-2024 ..... II – 145

Tabel II. 91 Inklusi Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 146
Tabel II. 92 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 146
Tabel II. 93 Capaian Indikator Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 149
Tabel II. 94 Indeks Integritas Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024 ..... II – 151
Tabel II. 95 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 2020-2024 ..... II – 151
Tabel II. 96 Indeks Daya saing Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 156
Tabel II. 97 Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 157
Tabel II. 98 Indeks Ketahanan Nasional wilayah Sulawesi Selatan Per Periode Tahun 2020-2024 ..... II – 158
Tabel II. 99 Komponen Indeks Ketahanan Nasional ..... II – 158
Tabel II. 100 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II – 159
Tabel II. 101 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024 ..... II – 161
Tabel II. 102 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 ..... II – 162
Tabel II. 103 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 ..... II – 166
Tabel II. 104 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II – 169
Tabel II. 105 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II – 170
Tabel II. 106 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 ..... II – 172
Tabel II. 107 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ..... II – 173
Tabel II. 108 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020-2024 . II – 174
Tabel II. 109 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024 ..... II – 176
Tabel II. 110 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2024 ..... II – 177
Tabel II. 111 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II – 177
Tabel II. 112 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024 ..... II – 178
Tabel II. 113 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 ..... II – 179
Tabel II. 114 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 ..... II – 180
Tabel II. 115 Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 182

Tabel II. 116 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika 2020-2024 ..... II – 196
Tabel II. 117 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 ..... II – 197
Tabel II. 118 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ..... II – 198
Tabel II. 119 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II – 200
Tabel II. 120 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2020-2024 ..... II – 202
Tabel II. 121 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020-2024 ..... II – 203
Tabel II. 122 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 ..... II – 205
Tabel II. 123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II – 206
Tabel II. 124 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II – 207
Tabel II. 125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ..... II – 208
Tabel II. 126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 ..... II – 212
Tabel II. 127 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 ..... II – 213
Tabel II. 128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Tahun 2020-2024 ..... II – 214
Tabel II. 129 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 ..... II – 217
Tabel II. 130 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 ..... II – 219
Tabel II. 131 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 ..... II – 222
Tabel II. 132 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024 ..... II – 224
Tabel II. 133 Jumlah PNS dan PPPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 226
Tabel II. 134 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024 ..... II – 227
Tabel II. 135 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020-2024 Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 231
Tabel II. 136 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024 ..... II – 248
Tabel II. 137 Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 251
Tabel II. 138 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 282
Tabel II. 139 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 288

Tabel II. 140 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... II – 291
Tabel II. 141 Perhitungan Surplus/ Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... II – 292
Tabel II. 142 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 292
Tabel II. 143 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... II – 294
Tabel II. 144 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 296
Tabel II. 145 Ruang Fiskal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 297
Tabel II. 146 Rasio Pajak ( Tax Ratio) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 298
Tabel II. 147 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 298
Tabel II. 148 Rasio Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 299
Tabel II. 149 Rasio Belanja Daerah per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 300
Tabel II. 150 Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... II – 301
Tabel II. 151 Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 301
Tabel II. 152 Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Tahun 2020-2024..... II – 302
Tabel II. 153 Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 .... II – 302
Tabel II. 154 Rasio Total Hutang terhadap Aset Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 303
Tabel II. 155 Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 303
Tabel II. 156 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030..... II – 304
Tabel II. 157 Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 ..... II – 311
Tabel II. 158 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2030 ..... II – 314

Tabel III.1 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029..... III – 2
Tabel III.2 Reformulasi Misi berdasarkan Dokumen Visi Misi Pasangan Kepala Daerah yang diserahkan KPUD..... III – 2
Tabel III.3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMNasional (Asta Cita) Tahun 2025-2029 ..... III – 5
Tabel III.4 Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan terhadap Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| | dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025-2029 | III – 8 |
| Tabel III.5 | Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 Berdasarkan Misi | III – 10 |
| Tabel III.6 | Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2025-2030 | III – 14 |
| Tabel III.7 | Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030 | III – 14 |
| Tabel III.8 | Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 | III – 19 |
| Tabel III.9 | Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 | III – 47 |
| Tabel III.10 | Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah | III – 49 |
| Tabel III.11 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 | III – 49 |
| Tabel III.12 | Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 | III – 51 |
| Tabel III.13 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Makassar Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030 | III – 72 |
| Tabel III.14 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Bulukumba Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030 | III – 77 |
| Tabel III.15 | Sasaran Pembangunan Kabupaten di Kawasan Watampone Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030 | III – 81 |
| Tabel III.16 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030 | III – 85 |
| Tabel III.17 | Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030 | III – 90 |
| Tabel III.18 | Arah Pembangunan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 | III – 95 |
| Tabel IV.1 | V2 Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | IV – 2 |
| Tabel IV.2 | Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2030 | IV – 38 |
| Tabel IV.3 | Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 | IV – 39 |
| Tabel IV.4 | Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 | IV – 40 |
| Tabel IV.5 | Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal | IV – 64 |
| Tabel IV.6 | Indikator *Sustainable Development Goals*Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 | IV – 68 |

# Daftar Grafik


Grafik II. 1 Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 19
Grafik II. 2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... II – 20
Grafik II. 3 Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 22
Grafik II. 4 Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 23
Grafik II. 5 Akses Air Minum Perpipaan Dikelola PDAM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 24
Grafik II. 6 Proporsi Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 25
Grafik II. 7 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 25
Grafik II. 8 Akses Air Minum Aman Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 27
Grafik II. 9 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 27
Grafik II. 10 Nilai IKLH, IKA, IKU, dan IKAL Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 ..... II – 30
Grafik II. 11 Akses Sanitasi Aman Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 31
Grafik II. 12 Persentase Rumah Tangga yang Tangki Septiknya Disedot 5 Tahun Terakhir Menurut Provinsi..... II – 32
Grafik II. 13 Akses Sanitasi Aman Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 33
Grafik II. 14 Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 33
Grafik II. 15 Capaian Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2024 ..... II – 34
Grafik II. 16 Capaian Pengelolaan Sampah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024* ..... II – 35
Grafik II. 17 Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Provinsi Sulawesi Selatan 2024..... II – 36
Grafik II. 18 Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II – 46
Grafik II. 19 Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 ..... II – 47
Grafik II. 20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... II – 48
Grafik II. 21 Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... II – 49

Grafik II. 22 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2030 ..... II – 53
Grafik II. 23 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 58
Grafik II. 24 Jumlah Nelayan Miskin Ekstrem Tahun 2023-2023 ..... II – 65
Grafik II. 25 Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 68
Grafik II. 26 Capaian IMM Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Komponennya Tahun 2023 ..... II – 69
Grafik II. 27 Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 ..... II – 70
Grafik II. 28 Umur Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 73
Grafik II. 29 Umur Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 ..... II – 73
Grafik II. 30 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.... II – 74
Grafik II. 31 Prevalensi Stunting, Underweight, Wasting Dan Overweight Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 ..... II – 76
Grafik II. 32 Cakupan Penemuan Kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 ..... II – 77
Grafik II. 33 Cakupan Penemuan Kasus TBC berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... II – 78
Grafik II. 34 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 79
Grafik II. 35 Tingkat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 80
Grafik II. 36 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023 ..... II – 85
Grafik II. 37 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023-2024 ..... II – 92
Grafik II. 38 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 95
Grafik II. 39 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 96
Grafik II. 40 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023 ..... II – 98
Grafik II. 41 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023 ..... II – 98
Grafik II. 42 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023 ..... II – 105
Grafik II. 43 Angka Ketergantungan Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024..... II – 106
Grafik II. 44 Jumlah Penduduk Sulsel Berdasarkan Kelompok Umur (Ribu Jiwa) ..... II – 106
Grafik II. 45 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020 – 2024 ..... II – 108
Grafik II. 46 Perbandingan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara nasional dengan Sulsel Tahun 2020 – 2024 ..... II – 109

Grafik II. 47 Jumlah Perjalanan Wisatawan Mancanegara ke Sulsel Tahun 2020 – 2024 ..... II – 109
Grafik II. 48 Jumlah Perjalanan Wisatawan Domestik ke Sulsel Tahun 2020 – 2024 ..... II – 110
Grafik II. 49 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 122
Grafik II. 50 Perkembangan Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pilar penyusun Tahun 2018-2022 ..... II – 123
Grafik II. 51 Nilai dan Volume Ekspor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020−2024 ..... II – 131
Grafik II. 52 Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 132
Grafik II. 53 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II – 133
Grafik II. 54 Akses Hunian Layak Berdasarkan Komponen Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2024 ..... II – 134
Grafik II. 55 Aspek Keterjangkauan Hunian Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 135
Grafik II. 56 Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 136
Grafik II. 57 Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024 ..... II – 137
Grafik II. 58 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 ..... II – 147
Grafik II. 59 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024 ..... II – 148
Grafik II. 60 Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulsel Tahun 2022-2024 ..... II – 149
Grafik II. 61 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 152
Grafik II. 62 Jumlah Kasus Kejahatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II – 153
Grafik II. 63 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2023 ..... II – 154

# Daftar Gambar


Gambar I. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunandan Sektoral lainnya ..... I – 7

Gambar II. 1 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 2
Gambar II. 2 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 3
Gambar II. 3 Peta Rata-Rata Curah Hujan Sulawesi Selatan Tahun 1990-2021 ..... II – 4
Gambar II. 4 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 5
Gambar II. 5 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 6
Gambar II. 6 Peta Hidrologi Cekungan Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 8
Gambar II. 7 Peta Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan..... II – 13
Gambar II. 8 Peta Resiko Multi Bahaya Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 45
Gambar II. 9 Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah ..... II – 313

Gambar III. 1. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029..... II – 68
Gambar III. 2. Alur pikir pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Mendukung Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM..... III – 69
Gambar III. 3. Alur pikir pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional..... III – 70
Gambar III. 4. Tema Pembangunan Wilayah Berdasarkan Kawasan Pembangunan Sulawesi Selatan..... III – 71

# BAB I
# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memahami sepenuhnya bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis, terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia dengan wilayah pesisir dan laut yang terbentang sepanjang 1.979,97 km dan luas perairan laut yang tidak kurang dari 48.000 km2 di Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone serta hamparan pulau-pulau kecil yang menyimpan kekayaan hayati dan non hayati, dan bahkan Selat Makassar menjadi salah satu jalur pelayaran internasional dan ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari aspek ekonomi, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan sumberdaya yang komparatif dengan potensi di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, dari sisi sosial budaya, nilai-nilai luhur dan ragam budaya masyarakat Sulawesi Selatan berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Keunggulan posisi strategis, potensi alam dan sosial budaya ini perlu dipadukan secara bijak dan dikelola seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan dengan produktivitas tinggi namun tetap inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan di Sulawesi Selatan selama ini telah dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Sulawesi Selatan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin membaik, sebagai hasil kinerja RPJMD sebelumnya. Namun demikian, keberhasilan yang telah dicapai masih menyisakan pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode 2025 hingga 2029.

Secara umum, gambaran capaian pembangunan selama 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh capaian indikator makro pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan yang telah mencapai 75,18 pada tahun 2024 atau naik sebesar 2,1 poin dari tahun 2020, dan berada diatas nasional. Namun demikian, persebaran capaian IPM antar kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi dan terdapat kesenjangan IPM penduduk laki-laki dan perempuan. Olehnya itu, patut menjadi perhatian pembangunan lima tahun kedepan untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sulawesi Selatan.

Dari aspek kesejahteraan, meskipun jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berfluktuatif, namun terjadi trend penurunan yang sangat signifikan sebesar 1,22 persen selama 4 tahun terakhir; dari 8,99 persen pada tahun 2020 menjadi 7,77 persen pada akhir September 2024. Namun demikian, perlu upaya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan, karena sepanjang periode 2020 hingga 2024 jumlah

penduduk miskin yang tinggal di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan, berkisar pada 70 hingga 80 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan Empat Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun sebelumnya yang hanya mencapai -0,70 persen karena kondisi pandemi Covid-19. Makassar masih menjadi poros ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan PDRB tertinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya. Gini Ratio yang menjadi ukuran ketimpangan pendapatan belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024, karena hanya turun sebesar 0,019 dari angka 0,382 menjadi 0,363 per Maret 2024. Pada sektor ketenagakerjaan, pembangunan di Sulawesi Selatan telah memberi manfaat bagi kesempatan kerja penduduk yang membaik dengan berkurangnya pengangguran terbuka dari tahun 2020 yang mencapai angka 6,31 menjadi 4,19 pada Agustus tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 periode 2025-2030 sebagai dasar dimulainya tahapan penyusunan RPJMD 2025- 2029.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029, dan menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih sebagai wujud pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan. Periode pertama dari pembangunan jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan periode RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada “Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus selaras dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan telah termuat dalam dokumen perencanaan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi. Selain itu, dalam penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan langkah-langkah strategis penanggulangan kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Tahapan penyusunannya dimulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Pusat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD, evaluasi pemerintah Pusat, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJMD, dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287)
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas ((Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340).

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

**Gambar I.1**
**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunandan Sektoral lainnya**

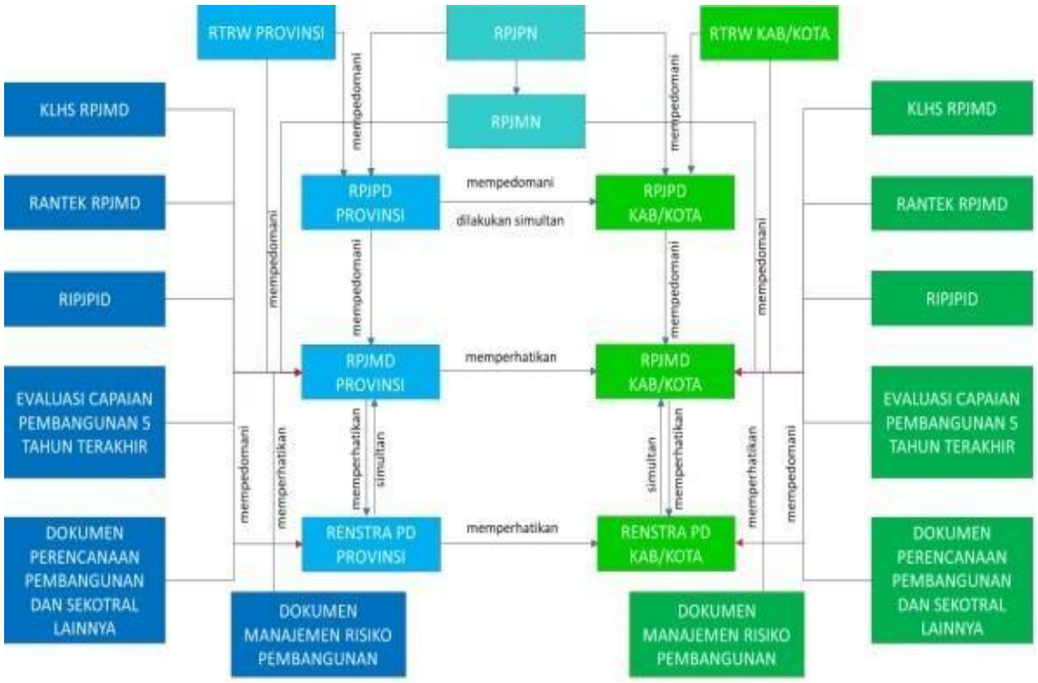


*Sumber : : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. **Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029**. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2025-2029 agar tercipta sinergi pusat dan daerah. Penyelarasan antara RPJMN dengan RPJMD provinsi mencakup penyelarasan visi, misi atau prioritas nasional dengan misi dan prioritas pembangunan provinsi, dan arah pembangunan wilayah serta kebijakan nasional lainnya.
2. **Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045**. RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD untuk periode lima tahunan dan menjadi tahapan operasional dari tujuan dan sasaran jangka panjang. Visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD harus mendukung arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Olehnya itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, khususnya pentahapan periode pertama dari pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diarahkan pada kebijakan "Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi".
3. **Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041**. RTRW mengatur tata ruang suatu wilayah dalam jangka panjang. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menetapkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan penataan ruang yang telah ditetapkan.
4. **Keterkaitan dengan Dokumen KLHS RPJMD**. KLHS adalah prasyarat penyusunan RPJMD, sebagai dasar integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan

Olehnya itu, hasil KLHS harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang secara substantif memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sehingga terdapat keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

5. **Keterkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah**. RPJMD akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra (Rencana Strategis) masing-masing perangkat daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang mendukung capaian RPJMD. Perumusan Tujuan dan sasaran perangkat daerah memperhatikan Sasaran RPJMD. Demikian juga halnya rumusan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah memperhatikan dan menjabarkan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah masing-masing.
6. **Keterkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Infrastruktur Digital.** RPJMD mempedomani RIPJPID sebagai rujukan normatif agar pembangunan digital di daerah tidak parsial dan sejalan dengan strategi nasional, dan menjadi rujukan utama dalam merancang arah kebijakan transformasi digital, baik dari sisi layanan publik, literasi digital, maupun dukungan infrastruktur jaringan.
7. **Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya**. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan sektoral sinkron dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 adalah tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan yang memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 adalah:

a. Menjabarkan tahap pertama periodesasi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045;
b. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024;
c. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan.
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
e. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Provinsi Sulawesi Selatan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
f. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## I.5 Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**,** memuat:

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
   a. Aspek geografi dan demografi, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan meliputi Posisi dan Peran Strategis Daerah, Potensi Sumber Daya Alam, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kondisi energi, air, dan pangan , Kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Kondisi resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dan Kondisi Demografi
   b. Aspek kesejahteraan masyarakat, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan yang menjelaskan karakteristik Kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi, Kondisi kesehatan masyarakat, Kondisi pendidikan masyarakt, Kondisi perlindungan sosial masyarakat, Kondisi keagamaaan dan pemajuan kebudayaan, Kondisi keluarga, kesetaraan gender dan kepemudaan.
   c. Aspek daya saing daerah, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan yang menjelaskan Kondisi daya saing SDM, Kondisi Iptek dan Inovasi, Kondisi produktifitas daerah, Kondisi penerapan ekonomi hijau dan biru, Kondisi pengarusutamaan transformasi digital, Kondisi integrasi ekonomi domestic dan global, Kondisi pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan, serta Kondisi stabilitas ekonomi makro daerah
   d. Aspek pelayanan umum, termasuk Standar Pelayanan Minimal dan Kerjasama daerah, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan yang menjelaskan Kondisi tatakelola pemerintahan, Kondisi pembangunan hukum dan keamanan serta demokrasi, Kondisi ketangguhan diplomasi, serta Capaian Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah kewenangan provinsi

2. Gambaran Keuangan Daerah, memuat :
   Penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

3. Permasalahan Dan Isu Strategis, memuat:
   a. Permasalahan pembangunan daerah, yang dirumuskan dari kondisi umum daerah pada Bab II dan memperhatikan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.
   b. Isu strategis daerah, yang dirumuskan dari permasalahan utama, potensi, isu strategis global, nasional, dan regional serta isu strategis KLHS yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III VISI, MISI,DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat:

1. Visi dan Misi;
2. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
3. Program Prioritas Pembangunan
4. Arah Pembangunan Kewilayahan

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, memuat:

1. Program Perangkat Daerah, Memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP, memuat :

1. Menjelaskan secara singkat substansi muatan RPJMD
2. Menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJMD.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan semenanjung Pulau Sulawesi, yang menjadikannya posisi strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lokasi yang strategis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal nasional maupun internasional. Pada tataran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan terletak kira-kira di tengah bentangan kepulauan Nusantara sehingga aksesibilitas dan jangkauan transportasi Nasional Barat-Timur, Utara-Selatan adalah yang terbaik di wilayah ini. Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 1°52'52,14" sampai 7°45'32,19"S Lintang Selatan dan 117° 2'17,85" sampai 122°13'21,19" Bujur Timur dengan luas daratan mencapai 4.533.055 Ha sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138/2025 dan luas laut 8.347.563,42 Ha yang didasarkan pada peta dasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup pesisir dan pulau dengan garis pantai sepanjang 2.702,81 Km. 45.323,975 km2. Provinsi Sulawesi Selatan dikelilingi oleh laut yang luas, yaitu Laut Flores di selatan, Selat Makassar di barat, dan Teluk Bone di timur. Batas batas geografis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

a. **Wilayah Administrasi**. Secara administrasi, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota, yang terdiri dari 313 kecamatan, 793 kelurahan, dan 2.266 desa, dengan luas wilayah sebesar 4.532,397 Ha.

b. **Topografi.** Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Selatan sangat bervariasi, dengan ketinggian yang berkisar antara 0 mdpl hingga lebih dari 2.500 mdpl. Wilayah dataran rendah mendominasi sebagian besar provinsi ini, terutama di sepanjang garis pantai dan daerah-daerah yang berada di bawah 300 mdpl. Kabupaten Bone memiliki luas terbesar untuk wilayah dengan ketinggian 0-300 mdpl, yaitu sekitar 332.360,16 hektar, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten ini berada di dataran rendah. Secara keseluruhan, wilayah dengan elevasi 0-300 mdpl mencakup sekitar 47,54% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat pula wilayah dengan ketinggian sedang, yang berkisar antara 300-1.500 mdpl, yang meliputi dataran tinggi dan perbukitan. Wilayah ini mencakup sekitar 40,69% dari total luas provinsi. Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara memiliki luas yang cukup signifikan pada ketinggian ini, menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten ini memiliki daerah perbukitan yang cukup luas. Ketinggian antara 500-1000 mdpl dan 1000-1500 mdpl juga tersebar

di beberapa kabupaten lainnya seperti Enrekang, Gowa, dan Sinjai, yang mencerminkan adanya variasi topografi yang signifikan di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.500 mdpl, yang termasuk dalam kategori pegunungan, mencakup sekitar 11,76% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah pegunungan yang signifikan ditemukan di Kabupaten Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara, yang memiliki wilayah luas di atas 1.500 mdpl. Secara keseluruhan, topografi Sulawesi Selatan yang beragam ini menciptakan variasi lingkungan yang luas, dari dataran rendah hingga daerah pegunungan, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Gambar dan tabumkmel berikut ini menunjukan sebaran luas topografi berdasarkan elevasinya per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar II.1.**

**Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan**

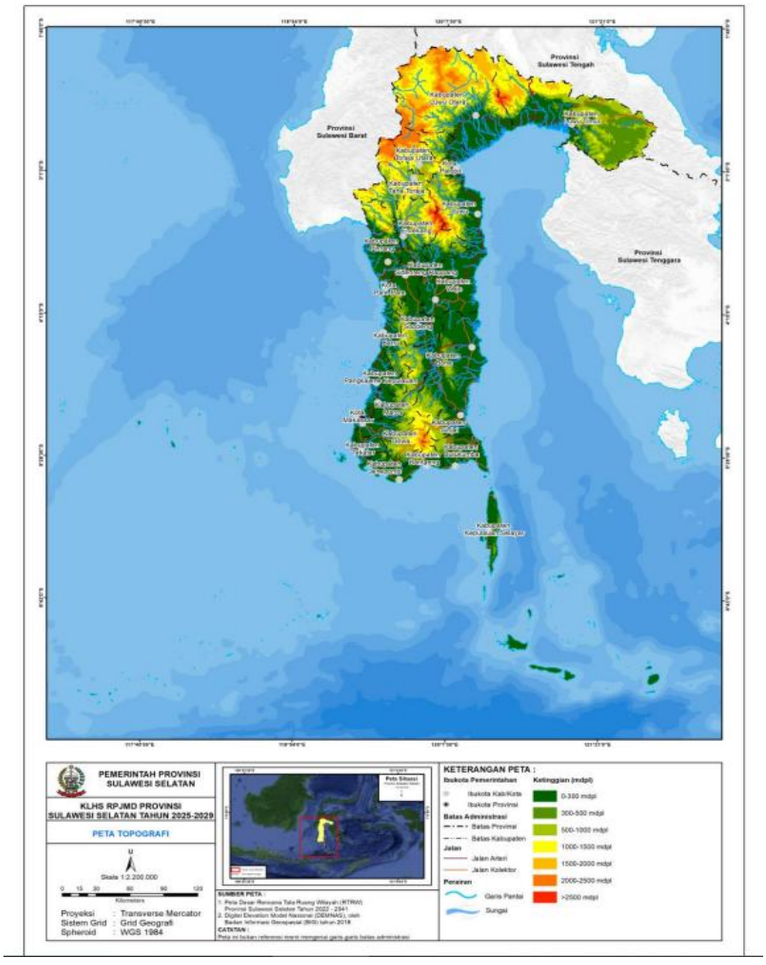


*Sumber: Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS), oleh Badan Informasi Geospasial (BIG Tahun 2018)*

c. **Kemiringan Lereng.** Provinsi Sulawesi Selatan memiliki klasifikasi kemiringan lereng yang beragam yaitu 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-30%, 30-40%, dan >40%. Kelerengan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemiringan lereng 0-2% seluas 1.327.975,89 hektar, kemiringan lereng 2-5% seluas 404.035,25 hektar, kemiringan lereng 5- 15% seluas 1.001.886,66 hektar, kemiringan lereng 15-30% seluas 1.207.395,93 hektar, kemiringan lereng 30-40% seluas 261.878,90 hektar, dan kemiringan lereng >40% seluas 293.097,29 hektar. Kabupaten dengan kemiringan lereng 0-2% terluas berada di Kabupaten Wajo dengan luas 203.078,33 hektar, kemiringan lereng 2-5% terluas berada di Kabupaten Bone

dengan luas 81.131,31 hektar, kemiringan lereng 5-15% terluas berada di Kabupaten Luwu Timur dengan luas 161.589,53 hektar, kemiringan lereng 15-30% terluas berada di Kabupaten Luwu Utara dengan luas 271.344,15 hektar, kemiringan lereng 30-40% terluas berada di Kabupaten Luwu dengan luas 40.203,59 hektar, dan kemiringan lereng >40% terluas berada di Kabupaten Tana Toraja dengan luas 40.290,73 hektar. Dengan variasi kemiringan lereng ini, Sulawesi Selatan menunjukkan topografi yang sangat beragam, dari dataran rendah yang relatif datar hingga daerah perbukitan dan pegunungan yang curam. Kabupaten Wajo dan Bone memiliki wilayah terluas pada lereng yang datar hingga landai, sementara Kabupaten Luwu Utara, Luwu, dan Tana Toraja memiliki wilayah signifikan pada lereng yang lebih curam hingga sangat curam. Variasi ini mencerminkan tantangan dan potensi yang berbeda dalam pengelolaan lahan dan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar II.2.**

**Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan**

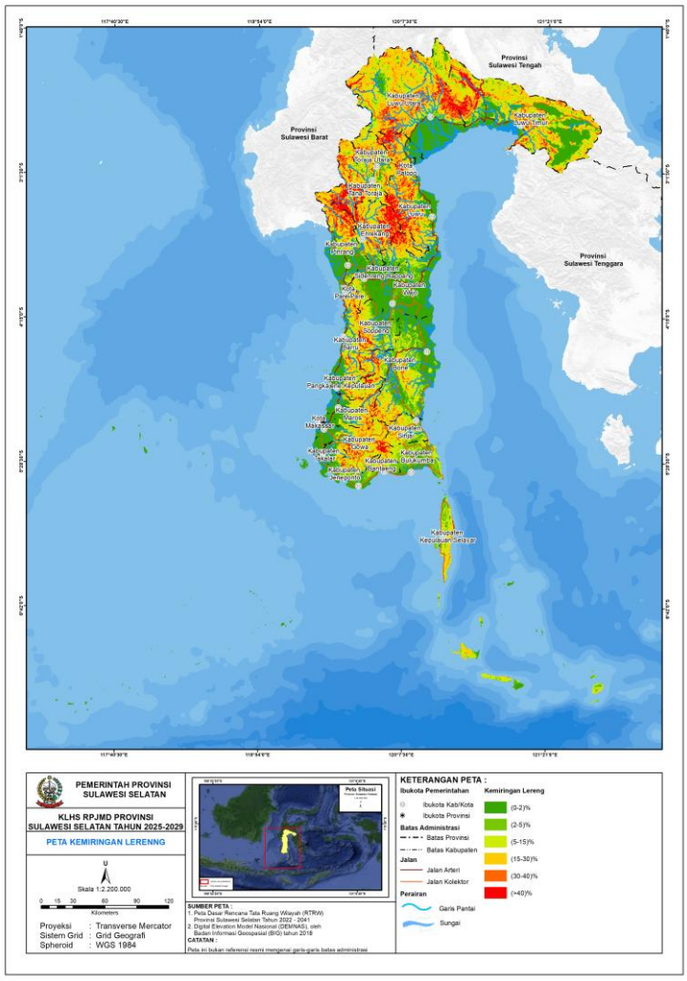


*Sumber: Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS), oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018*

d. **Klimatologi**. Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu:

1) Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.
2) Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 - 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng.
3) Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 - 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros, Jeneponto, Makassar, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar.
4) Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Sinjai, Maros, Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Makassar.
5) Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 - 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Bantaeng, dan Selayar.

Berdasarkan data curah hujan tersebut, maka curah hujan tahunan di Sulawesi Selatan bervariasi dengan kisaran kurang dari 1250 mm/tahun sampai 3500 mm/tahun yang tersebar pada kabupaten/kota dengan rata rata curah hujan tahunan berkisar 1100-3500 mm/tahun yang digambarkan pada peta berikut.

**Gambar II.3.**
**Peta Rata-Rata Curah Hujan Sulawesi Selatan Tahun 1990-2021**

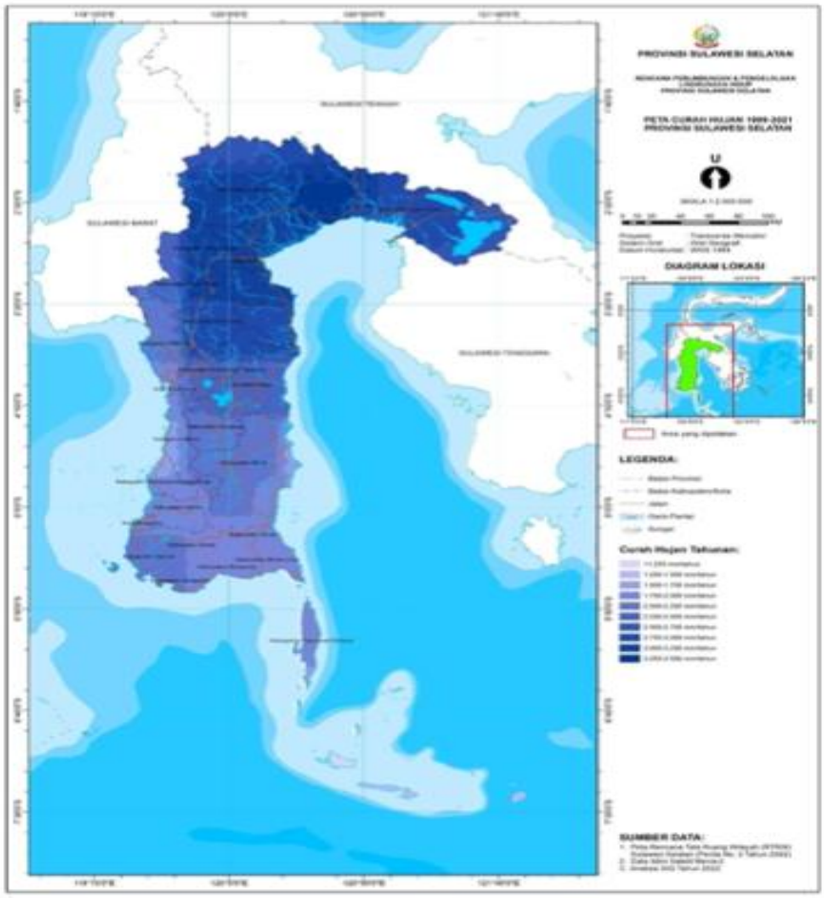


Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Curah hujan tinggi dengan kisaran 2500-3500 mm/tahun didominasi pada bagian Utara Sulawesi Selatan, dikarenakan wilayah ini dikelilingi oleh pengunungan Latimojong yang merupakan ecoregion hutan hujan tropis sehingga berkontribusi sebesar 64,6 persen pada wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan iklim tinggi-sangat tinggi khususnya di kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara sebagaimana tergambarkan pada peta di bawah ini.

**Gambar II.4.**

**Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Provinsi Sulawesi Selatan**

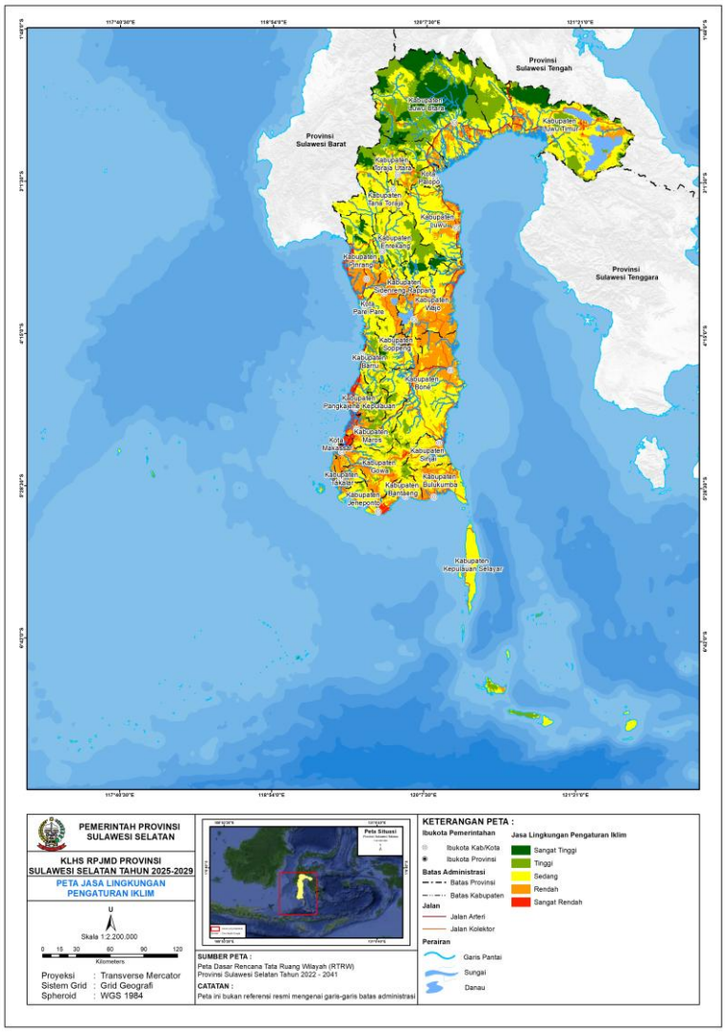


*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

e. **Hidrologi,** Sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari curah hujan, danau, sungai, dan air tanah. Konservasi sumber daya air menjadi bagian yang penting di Sulawesi Selatan untuk menjaga, melindungi dan menggunakan sumber daya air secara berkelanjutan. Salah satu sumber utama sumber daya air Sulawesi Selatan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi empat DAS terbesar yaitu Larona Malili dengan 350.936,38 hektar, Saddang dengan 206.609,25 hektar, Karama dengan 180.417,74 hektar, dan Bila Walanae dengan 156.095,16 hektar sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 yang dikelola oleh 4 (empat) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gambaran DAS di Provinsi Sulawesi Selatan dan klasifikasinya tercantum pada gambar peta dan tabel berikut.

**Gambar II.5.**

**Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Selatan**

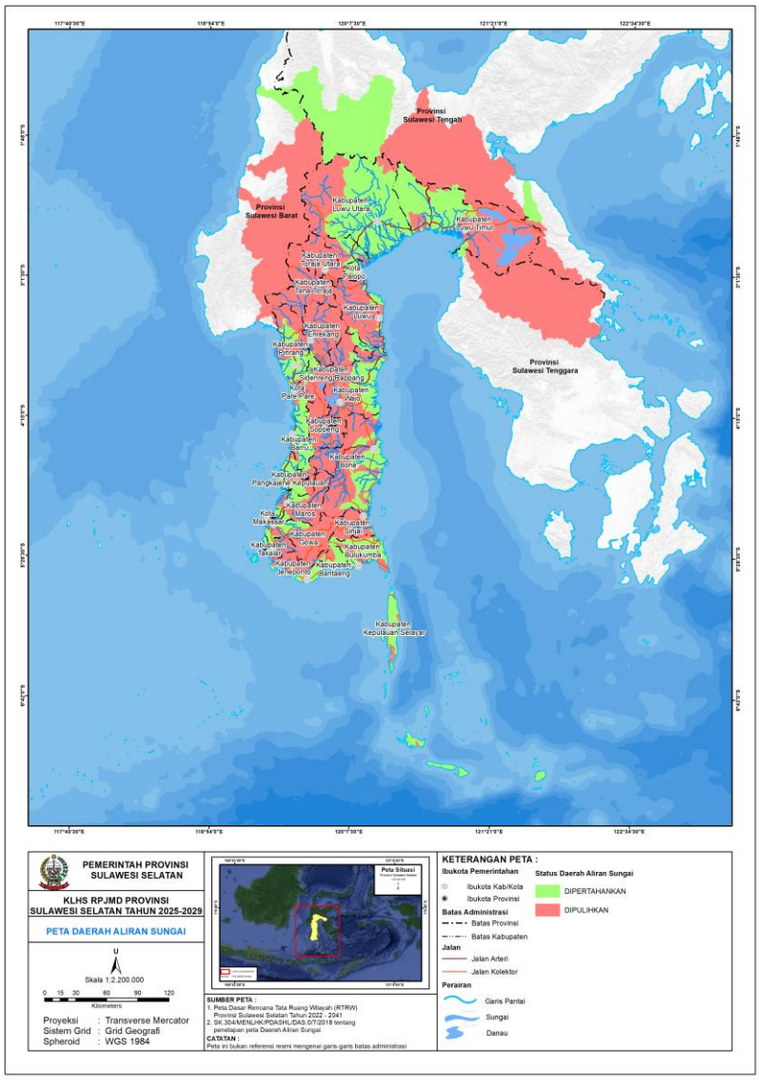


Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029, Tahun 2024

Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Prrovinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 2 kategori yaitu "dipertahankan" dan "dipulihkan". Secara rinci distribusi DAS berdasarkan kategori ini menurut kabupaten/kota disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II. 1**

**Distribusi Klasifikasi Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Selatan**

| BPDASHL | KABUPATEN/KOTA | KLASIFIKASI DAS (HA) | | LUAS TOTAL (HA) |
|---|---|---|---|---|
| | | DIPERTAHANKAN | DIPULIHKAN | |
| JENEBERANG SADDANG | Kabupaten Bantaeng | 29.409,34 | 10.232,73 | 39.642,07 |
| | Kabupaten Barru | 99.320,04 | 21.057,81 | 120.377,85 |
| | Kabupaten Bone | 145.236,93 | 312.499,58 | 457.736,51 |
| | Kabupaten Bulukumba | 84.799,92 | 32.367,56 | 117.167,48 |
| | Kabupaten Enrekang | 2.396,61 | 180.067,89 | 182.464,49 |
| | Kabupaten Gowa | 41.265,55 | 140.134,77 | 181.400,33 |
| | Kabupaten Jeneponto | 29.109,72 | 50.723,78 | 79.833,50 |
| | Kabupaten Kepulauan | 106.965,16 | 11.254,35 | 118.219,52 |

| BPDASHL | KABUPATEN/KOTA | KLASIFIKASI DAS (HA) | | LUAS TOTAL (HA) |
|---|---|---|---|---|
| | | DIPERTAHANKAN | DIPULIHKAN | |
| | Selayar | | | |
| | Kabupaten Luwu | 62.742,05 | 240.188,96 | 302.931,00 |
| | Kabupaten Luwu Timur | 274.529,31 | 375.012,46 | 649.541,78 |
| | Kabupaten Luwu Utara | 378.462,80 | 2.247,98 | 380.710,78 |
| | Kabupaten Maros | 25.554,03 | 118.118,91 | 143.672,93 |
| | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 51.318,99 | 31.123,79 | 82.442,78 |
| | Kabupaten Pinrang | 62.809,83 | 88.464,53 | 151.274,36 |
| | Kabupaten Sidenreng Rappang | 43.077,75 | 136.252,57 | 179.330,32 |
| | Kabupaten Sinjai | 5.436,15 | 81.141,82 | 86.577,97 |
| | Kabupaten Soppeng | 2.797,42 | 134.324,41 | 137.121,83 |
| | Kabupaten Takalar | 18.687,80 | 36.838,96 | 55.526,77 |
| | Kabupaten Tana Toraja | | 209.153,32 | 209.153,32 |
| | Kabupaten Toraja Utara | 28,33 | 103.116,47 | 103.144,79 |
| | Kabupaten Wajo | 115.819,84 | 147.550,41 | 263.370,25 |
| | Kota Makassar | 14.695,72 | 2.795,70 | 17.491,42 |
| | Kota Palopo | 18.820,20 | 8.517,96 | 27.338,16 |
| | Kota Pare Pare | 1.201,31 | 7.776,12 | 8.977,42 |
| GRAND TOTAL | | 1.614.484,80 | 2.480.962,83 | 4.095.447,63 |
| KARAMA | Kabupaten Luwu Utara | | 216.014,75 | 216.014,75 |
| | Kabupaten Pinrang | 29.110,51 | 8.246,98 | 37.357,49 |
| | Kabupaten Tana Toraja | | 34,16 | 34,16 |
| | Kabupaten Toraja Utara | | 16.703,50 | 16.703,50 |
| GRAND TOTAL | | 29.110,51 | 240.999,40 | 270.109,91 |
| PALU POSO | Kabupaten Luwu Timur | 730,75 | 24.110,28 | 24.841,02 |
| | Kabupaten Luwu Utara | 126.168,98 | 18.591,96 | 144.760,94 |
| GRAND TOTAL | | 126.899,73 | 42.702,24 | 169.601,96 |
| SAMPARA | Kabupaten Luwu Timur | 234,40 | 316,90 | 551,30 |
| GRAND TOTAL | | 234,40 | 316,90 | 551,30 |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, Tahun 2024*

Selain DAS, cekungan air tanah (CAT) juga merupakan sumber daya air Sulawesi Selatan yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan air baku, khususnya untuk keperluan sektor pertanian dan kebutuhan domestic meliputi 14 (empat belas) CAT yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana gambar peta dan tabel berikut.

**Gambar II.6.**
**Peta Hidrologi Cekungan Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan**

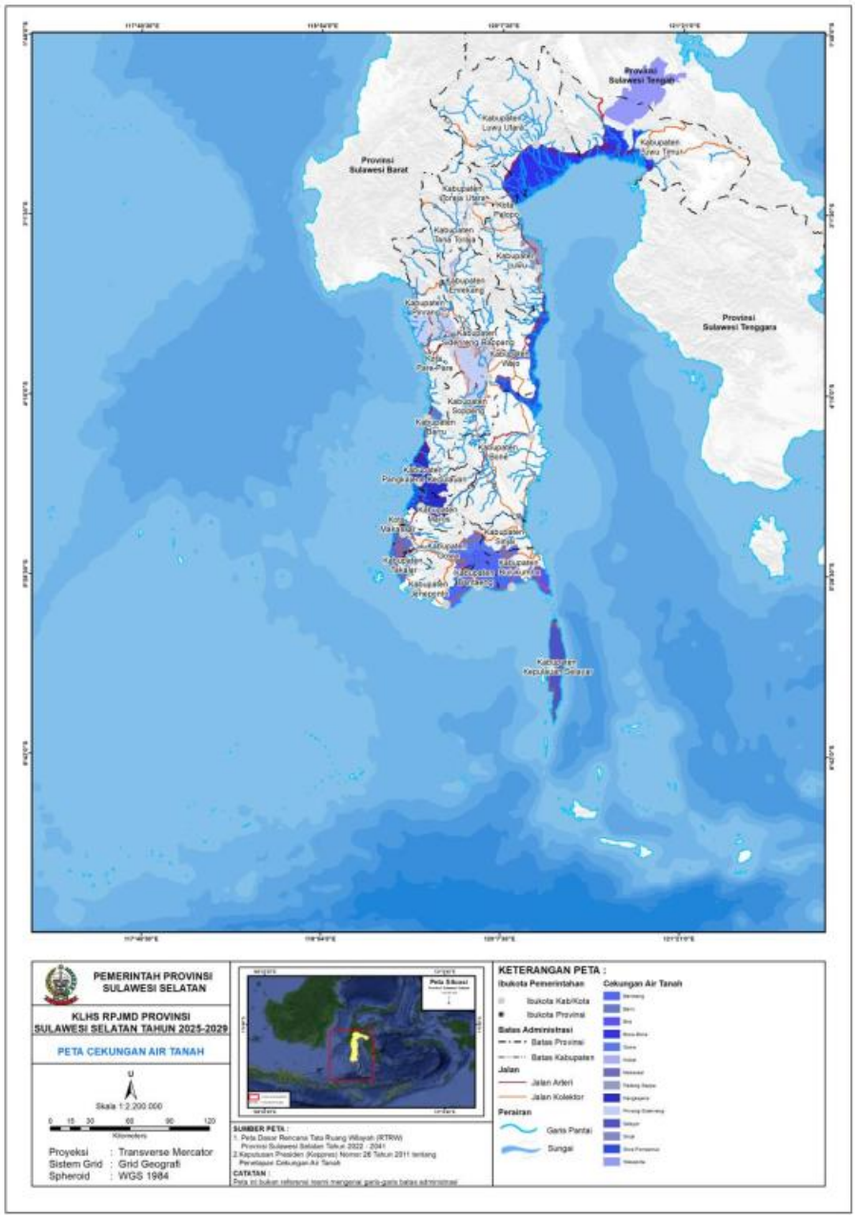


*Sumber: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)*

Rincian 14 (empat belas) CAT yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi CAT Bantaeng, Barru, Bira, Bone-bone, Gowa, Kolosi, Makassar, Padang Sappa, Pangkajene, Pinrang-Sidenreng, Selayar, Sinjai, Siwa-Pompanoa, dan Wasupote yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 2**
**Sebaran Cekungan Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan**

| Cekungan Air Tanah | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| Bantaeng | Kabupaten Bantaeng | 39.672,09 |
| | Kabupaten Bulukumba | 50.794,72 |
| | Kabupaten Gowa | 18.770,33 |
| | Kabupaten Jeneponto | 28.395,43 |
| | Kabupaten Sinjai | 3.449,01 |
| Total Luas | | 141.081,58 |
| Barru | Kabupaten Barru | 13.412,37 |

| Cekungan Air Tanah | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 11,96 |
| Total Luas | | 13.424,34 |
| Bira | Kabupaten Bulukumba | 22.511,38 |
| Total Luas | | 22.511,38 |
| Bone-Bone | Kabupaten Luwu | 22.495,10 |
| | Kabupaten Luwu Timur | 78.662,41 |
| | Kabupaten Luwu Utara | 121.508,46 |
| | Kota Palopo | 3.437,11 |
| Total Luas | | 226.103,09 |
| Gowa | Kabupaten Bulukumba | 8.189,73 |
| | Kabupaten Gowa | 27.464,42 |
| | Kabupaten Sinjai | 11.650,50 |
| Total Luas | | 47.304,66 |
| Kolosi | Kabupaten Enrekang | 4.101,88 |
| Total Luas | | 4.101,88 |
| Makassar | Kabupaten Gowa | 25.828,19 |
| | Kabupaten Takalar | 20.756,08 |
| | Kota Makassar | 8.298,35 |
| Total Luas | | 54.882,62 |
| Padang Sappa | Kabupaten Luwu | 41.412,77 |
| Total Luas | | 41.412,77 |
| Pangkajene | Kabupaten Maros | 44.662,70 |
| | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 55.763,54 |
| Total Luas | | 100.426,24 |
| Pinrang-Sidenreng | Kabupaten Enrekang | 280,83 |
| | Kabupaten Pinrang | 82.642,97 |
| | Kabupaten Sidenreng Rappang | 63.018,03 |
| | Kabupaten Soppeng | 29.224,46 |
| | Kabupaten Wajo | 49.201,71 |
| Total Luas | | 224.368,01 |
| Selayar | Kabupaten Kepulauan Selayar | 64.975,79 |
| Total Luas | | 64.975,79 |
| Sinjai | Kabupaten Bone | 4.512,23 |
| | Kabupaten Sinjai | 3.798,32 |
| Total Luas | | 8.310,55 |
| Siwa-Pompanua | Kabupaten Bone | 18.458,27 |
| | Kabupaten Luwu | 3.002,56 |
| | Kabupaten Wajo | 58.400,55 |
| Total Luas | | 79.861,38 |
| Wasopote | Kabupaten Luwu Timur | 40.922,14 |
| Total Luas | | 40.922,14 |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029, Tahun 2024*

*f.* Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran dan kontribusi strategis yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kontribusi ini mencakup berbagai sektor :

- Pintu Gerbang Ekonomi dan Logistik
  Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya Makassar, berperan sebagai simpul utama logistik dan perdagangan di KTI. Sebagian besar barang dan jasa yang masuk ke wilayah timur, seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi Tenggara, harus melalui pelabuhan dan bandara di Sulawesi Selatan.
  - Pelabuhan Makassar (Pelabuhan Soekarno-Hatta) adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, menjadi hub untuk distribusi barang-barang konsumsi, material konstruksi, dan produk-produk industri ke seluruh KTI.

- Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros menjadi pintu gerbang udara utama. Bandara ini tidak hanya melayani penerbangan domestik, tetapi juga menghubungkan wilayah timur dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dan luar negeri.
- Infrastruktur jalan trans-Sulawesi menghubungkan Sulsel dengan Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

- **Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan**
  Sebagai ibukota provinsi, Makassar sering dijadikan pusat pertemuan regional untuk koordinasi pembangunan kawasan timur Indonesia, Selain itu, juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan kesehatan. Universitas Hasanuddin (Unhas) dan sejumlah perguruan tinggi di Makassar menjadi tujuan utama mahasiswa dari provinsi sekitar, karena kualitas pendidikan tinggi di Sulsel lebih maju dibanding beberapa daerah lain di Kawasan Timur Indonesia. Untuk fasilitas Kesehatan, terdapat Rumah sakit besar seperti RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melayani pasien rujukan dari Sulbar, Sultra, Maluku, hingga Papua.
- Ekonomi & Perdagangan
  - Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung pangan nasional, terutama untuk komoditas beras. Kontribusi ini sangat vital untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah lain. Produksi padi di provinsi ini sering kali surplus, yang kemudian diekspor ke provinsi lain di KTI, seperti Maluku dan Papua, untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain beras, Sulawesi Selatan juga merupakan produsen utama kakao, rumput laut, dan jagung, yang menjadi komoditas penting untuk industri di wilayah timur Indonesia.
  - Makassar sebagai ibu kota Sulsel adalah pusat perdagangan terbesar di kawasan timur Indonesia. Banyak komoditas dari provinsi sekitar (Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua) masuk dan keluar melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
  - Industri perikanan dan hasil laut dari Sulsel juga menyuplai daerah sekitarnya.

### 2.1.1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam diarahkan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.

Gambaran potensi sumber daya alam di Sulawesi Selatan merupakan gambaran keunggulan komparatif Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan sebagai sumber daya pembangunan. Berdasarkan gambaran komoditas unggulan wilayah Sulawesi Selatan yang berkontribusi terhadap perekonomian, maka potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. **Komoditas Pertanian,** komoditas pertanian merupakan salah satu komoditas unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, utamanya komoditas tanaman pangan dan hortikultura, yang pengembangannya diarahkan pada semua kabupaten/kota sebagaimana arahan RTRWP Sulawesi Selatan. Sebagai upaya mengoptimalkan kontribusi komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap perekonomian wilayah, maka

pengembangannya diprioritaskan pada kawasan pertanian nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu komoditas tanaman pangan yang meliputi komoditas tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau serta porang yang akan dikembangkan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi di kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Makassar dan Takalar, Barru, Bone, Gowa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara serta kota Makassar, dan Parepare.

Demikian halnya dengan pengembangan komoditas hortikultura yang meliputi komoditas bawang merah, cabai, kentang, pisang, jeruk termasuk jeruk Pomelo, durian, mangga, alpukat, tanaman obat, sayuran lain, florikultura dan buah lain juga akan dikembangkan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi di kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Luwu Utara, Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara, Bone, Enrekang, Gowa, Pinrang, Maros, Sinjai, Sidenreng Rappang, Enrekang, Takalar, Tana Toraja, Soppeng, Pangkajene dan Kepulauan, Kepulauan Selayar, Barru, Gowa, dan Jeneponto serta kota Palopo;

b. **Komoditas Perkebunan.** pengembangan komoditas perkebunan Sulawesi Selatan diarahkan pada semua kabupaten/kota yang merujuk pada RTRWP Sulawesi Selatan untuk pengembangan perkebunan rakyat, sedangkan pengembangan komoditas perkebunan lainnya yang meliputi komoditas kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, aren, lada, jambu mete, cengkeh, kelapa sawit dan tebu diarahkan akan dikembangkan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi serta penetapan sebagai kawasan pertanian nasional pada beberapa kabupaten yaitu kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Bone, Luwu, Pinrang, Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Bantaeng, Gowa, Sinjai, Toraja Utara, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Wajo, dan Takalar yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian nasional. Selain itu, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, juga akan mengembangkan komoditas unggulan kopi dengan mengacu pada penetapan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) oleh Pemerintah melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, yaitu kopi unggulan dengan karakteristik geografis, reputasi, dan kualitasnya dijaga oleh perundang-undangan perlindungan IG, sebagai berikut:

**Tabel II. 3**
**Komoditas Kopi Unggulan yang Bersertifikat Indikasi Geografis (IG)**

| Nama Kopi | Asal Daerah | Status IG |
|---|---|---|
| **Kopi Arabika Kalosi** | Enrekang | Sudah terdaftar (2012) |
| **Kopi Arabika Toraja** | Toraja | Sudah terdaftar (2013) |
| **Kopi Arabika Bantaeng** | Bantaeng | Sudah terdaftar (2022) |
| **Kopi Arabika Rumbia Jeneponto** | Jeneponto | Sudah terdaftar (2022) |
| **Kopi Arabika Seko** | Luwu Utara | Dalam pemeriksaan substantif (2024) |
| **Kopi Arabika Bawakaraeng** | Sinjai | Dalam proses pendaftaran |
| **Kopi Arabika Latimojong** | Luwu | Dalam proses pendaftaran |
| **Kopi Arabika Kahayya** | Bulukumba | Usulan sedang dibahas/dimulai |

*Sumber: Publikasi Kanwil Kemenkumhan Sulawesi Selatan Tahun 2024*

c. **Komoditas peternakan.** Pengembangan komoditas peternakan sebagai kontributor pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan diarahkan pada semua kabupaten/kota sebagaimana arahan RTRWP Sulawesi Selatan, sedangkan pengembangan beberapa komoditas unggulan peternakan yang meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, babi, ayam buras dan itik akan diarahkan berdasarkan potensi, produksi dan luas areal pengembangan pada kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Gowa, Wajo, Maros, Barru, Enrekang, Pangkajene dan Kepulauan, Soppeng, Pinrang, Sidenreng Rappang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Takalar, dan Kota Palopo yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian nasional komoditas peternakan.

d. **Kawasan hutan** di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik vegetasi alami yang didominasi oleh vegetasi hutan pegunungan bawah yang luasannya mencapai 888.747,84 ha dan vegetasi hutan pamah monsun merangas dengan luasan 739.312,66 ha. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 total luasan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 4.530.216,75 Ha, yang terbagi ke dalam empat kategori utama: kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi dan areal penggunaan lain (APL). Kategori terbesar adalah areal penggunaan lain (APL) yang mencakup 2.551.966,32 Ha, atau sekitar 56% dari total kawasan. APL ini mencakup area yang tidak dikhususkan untuk fungsi kehutanan tertentu dan bisa digunakan untuk kegiatan non-kehutanan.

   Kawasan hutan lindung, yang memiliki fungsi ekologis penting seperti tata air dan keanekaragaman hayati, mencakup 1.106.408,33 Ha atau sekitar 24,4% dari total luas kawasan hutan. Kabupaten dengan luas hutan lindung terbesar adalah Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki 330.578,11 Ha kawasan hutan lindung. Ini menunjukkan peran penting kabupaten ini dalam konservasi sumber daya alam.
   Kawasan hutan produksi, yang difungsikan untuk kegiatan ekonomi seperti penebangan kayu dan hasil hutan lainnya, mencakup 622.042,29 Ha atau sekitar 13,7% dari total luas kawasan hutan. Kabupaten Bone memiliki area hutan produksi yang cukup luas dengan 93.772,85 Ha, diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara yang masing-masing memiliki lebih dari 145.000 Ha dan 160.000 Ha kawasan hutan produksi.
   Kawasan konservasi, yang memiliki fungsi utama untuk melestarikan flora, fauna, dan ekosistem, mencakup 249.799,81 Ha atau sekitar 5,5% dari total luas kawasan. Kawasan konservasi terbesar terdapat di Kabupaten Luwu Timur dengan luas 172.867,42 Ha, menandakan komitmen besar dalam pelestarian lingkungan di daerah tersebut. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Jeneponto dan Takalar memiliki luas kawasan hutan yang relatif kecil, masing-masing kurang dari 80.000 Ha dan 60.000 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kawasan hutan di Sulawesi Selatan tidak merata, dengan beberapa daerah yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan hutan.

**Gambar II.7.**
**Peta Tutupan Lahan Provinsi Sulsel**

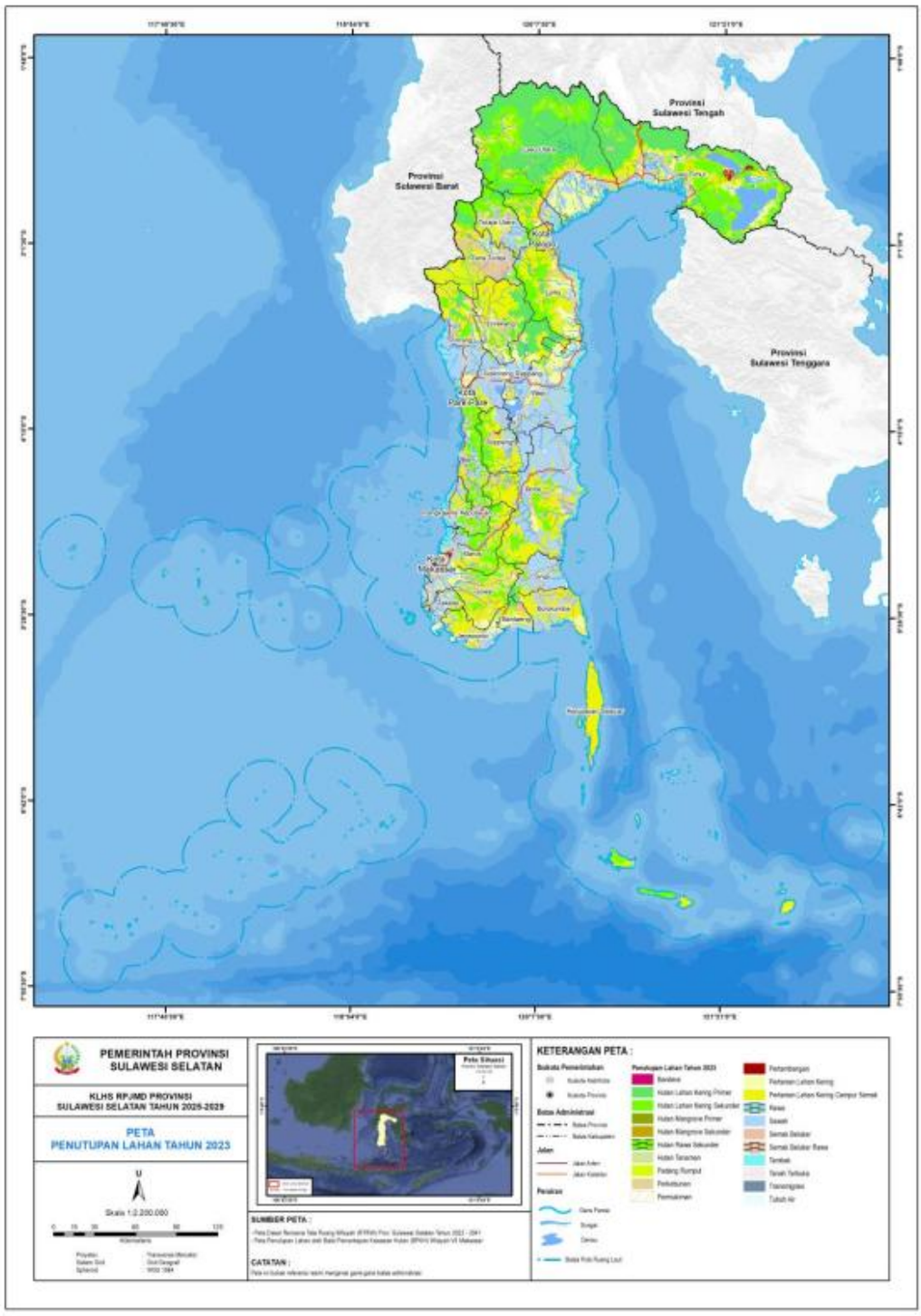


*Sumber: Peta Tutupan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Jeneponto dan Takalar memiliki luas kawasan hutan yang relatif kecil, masing-masing kurang dari 80.000 Ha dan 60.000 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kawasan hutan di Sulawesi Selatan tidak merata, dengan beberapa daerah yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan hutan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II. 4**
**Distribusi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan**

| Kabupaten/Kota | Arahan Fungsi Kawasan Hutan (Ha) | | | | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal Penggunaan Lain | Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Hutan Produksi | Kawasan Konservasi | | |
| Kabupaten Bantaeng | 33.999,45 | 2.684,45 | 2.988,22 | | 39.672,12 | 0,88 |
| Kabupaten Barru | 51.818,38 | 50.574,07 | 17.700,32 | 285,08 | 120.377,85 | 2,66 |
| Kabupaten Bone | 332.148,05 | 28.004,56 | 93.772,85 | 4.180,45 | 458.105,91 | 10,11 |
| Kabupaten Bulukumba | 107.680,97 | 4.565,04 | 1.352,36 | 3.752,40 | 117.350,77 | 2,59 |
| Kabupaten Enrekang | 106.709,05 | 66.641,23 | 9.108,63 | 9,77 | 182.468,68 | 4,03 |
| Kabupaten Gowa | 123.952,99 | 20.568,57 | 29.366,09 | 7.512,73 | 181.400,38 | 4,00 |
| Kabupaten Jeneponto | 70.686,55 | 6.350,74 | 475,69 | 2.344,74 | 79.857,73 | 1,76 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 99.312,55 | 10.027,64 | 8.608,94 | 582,87 | 118.532,00 | 2,62 |
| Kabupaten Luwu | 201.266,39 | 78.240,43 | 23.704,50 | | 303.211,31 | 6,69 |
| Kabupaten Luwu Timur | 150.148,23 | 209.549,96 | 145.178,88 | 172.867,42 | 677.744,48 | 14,96 |
| Kabupaten Luwu Utara | 251.361,38 | 330.578,11 | 160.229,91 | 100,20 | 742.269,60 | 16,38 |
| Kabupaten Maros | 82.308,72 | 13.642,77 | 19.371,64 | 28.349,80 | 143.672,93 | 3,17 |
| Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 61.467,03 | 7.916,59 | 5.371,49 | 14.248,71 | 89.003,82 | 1,96 |
| Kabupaten Pinrang | 117.817,86 | 45.120,51 | 25.692,80 | 0,67 | 188.631,85 | 4,16 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 110.748,03 | 40.334,14 | 23.216,77 | 243,54 | 174.542,47 | 3,85 |
| Kabupaten Sinjai | 69.473,69 | 9.533,92 | 6.884,78 | 770,98 | 86.663,38 | 1,91 |
| Kabupaten Soppeng | 94.441,68 | 28.035,12 | 10.526,79 | 4.122,92 | 137.126,51 | 3,03 |
| Kabupaten Takalar | 48.435,58 | 84,53 | 2.792,14 | 4.214,51 | 55.526,77 | 1,23 |
| Kabupaten Tana Toraja | 97.214,89 | 87.261,05 | 19.535,16 | 5.176,39 | 209.187,49 | 4,62 |
| Kabupaten Toraja Utara | 70.801,15 | 48.474,08 | 429,30 | 145,42 | 119.849,95 | 2,65 |
| Kabupaten Wajo | 228.318,43 | 7.495,71 | 14.999,62 | | 250.813,75 | 5,54 |
| Kota Makassar | 17.804,17 | | | | 17.804,17 | 0,39 |
| Kota Palopo | 17.609,95 | 8.310,98 | 613,29 | 891,18 | 27.425,40 | 0,61 |
| Kota Pare Pare | 6.441,14 | 2.414,15 | 122,13 | | 8.977,42 | 0,20 |
| **Grand Total** | **2.551.966,32** | **1.106.408,33** | **622.042,29** | **249.799,81** | **4.530.216,75** | **100,00** |

*Sumber: SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021*

e. **Pengembangan kawasan perikanan tangkap**. Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan berbasis ekonomi biru. Pengelolaan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. **Pengembangan kawasan perikanan tangkap** di Sulawesi Selatan dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone. Sedangkan di perairan umum daerah tersebar di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang berada pada kabupaten/kota Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Palopo, Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Wajo, Bone, dan Maros.

f. **Pengembangan kawasan perikanan budidaya** meliputi kawasan peruntukan **budidaya laut**, diantaranya rumput laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan **pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau** dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, dan Pinrang.

Selain Kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan **pengembangan komoditas garam** di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Kepulauan Selayar, dan Takalar.

g. **Pengembangan pariwisata** merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.

   Pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan baik kawasan pariwisata di darat maupun kawasan pariwisata laut diarahkan berdasarkan arahan RTRWP yang diprioritaskan pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa pengembangan kawasan eduwisata, kawasan agrowisata, kawasan wisata budaya, dan kawasan wisata alam di kabupaten/kota yang meliputi Kota Makassar, Palopo, dan Parepare, Kabupaten Maros, Gowa, Pangkajene dan Kepulauan, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Wajo, Soppeng, Luwu dan Luwu Timur. Sedangkan pengembangan kawasan pariwisata laut diarahkan pada kawasan perairan Selat Makassar, Teluk Parepare, Laut Flores, Teluk Bone.

   Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang menetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Sulawesi Selatan yaitu KSPN Toraja dan Sekitarnya dan KSPN Takabonerate dan Sekitarnya dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang menetapkan 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) di Sulawesi Selatan yaitu DPD Kawasan Selatan yang meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan Sekitarnya, KSPD Bulukumba dan Sekitarnya, dan KSPD Kepulauan Selayar dan Sekitarnya, DPD Kawasan Tengah yang meliputi KSPD Wajo dan sekitarnya, dan KSPD Parepare dan Sekitarnya, dan DPD Kawasan Utara yang meliputi KSPD Palopo dan sekitarnya dan KSPD Toraja dan sekitarnya. Selain itu Sulawesi Selatan juga memiliki berbagai keanekaragaman yang meliputi keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya sebagai salah satu sumber daya pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan, yaitu Kawasan Taman Bumi Maros-Pangkep yang telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Taman Bumi Global UNESCO Maros - Pangkep yang mencakup wilayah administrasi kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta potensi pengembangan taman bumi lainnya yaitu Taman Bumi Matano dan Sistem Danau Malili di kabupaten Luwu Timur.

h. **Pengembangan Kawasan perindustrian**, pengembangan kawasan perindustrian diarahkan pada kawasan peruntukan industry sebagaimana ditetapkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang terdapat di Kota Makassar, Palopo, dan Parepare, kabupaten Bantaeng, Barru, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Takalar, dan Wajo. Pengembangan Kawasan Industri yang telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tercantum dalam RPJMN meliputi Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri Takalar, dan Kawasan Industri Luwu Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dibagi ke dalam 5 (lima) kawasan pembangunan yang didasarkan pada penetapan Kawasan Andalan Darat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Berdasarkan arahan kebijakan nasional tersebut, maka pembagian kawasan pembangunan berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan digambarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 5**
**Kawasan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**

| NO | KAWASAN PEMBANGUNAN/ KABUPATEN/KOTA/ | SEKTOR UNGGULAN |
|---|---|---|
| I. | KAWASAN MAKASSAR DSK | ▪ Pariwisata<br>▪ Industri<br>▪ Pertanian<br>▪ Agroindustri<br>▪ Perikanan |
| | 1. Makassar | |
| | 2. Gowa | |
| | 3. Maros | |
| | 4. Takalar | |
| | 5. Pangkajene dan Kepulauan | |
| II. | KAWASAN PALOPO DSK | Pariwisata<br>Perkebunan<br>Pertanian<br>Perikanan<br>Pertambangan |
| | 1. Palopo | |
| | 2. Luwu | |
| | 3. Luwu Utara | |
| | 4. Luwu Timur | |
| | 5. Tana Toraja | |
| | 6. Toraja Utara | |
| III. | KAWASAN WATAMPONE | Pertanian<br>Perkebunan<br>Agroindustri<br>Pariwisata<br>Perikanan<br>Perdagangan<br>Industri |
| | 1. Bone | |
| | 2. Soppeng | |
| | 3. Wajo | |
| IV. | KAWASAN BULUKUMBA DSK | Pertanian<br>Perkebunan<br>Agroindustri<br>Pariwisata<br>Perikanan<br>Perdagangan<br>Industri<br>Pertambangan |
| | 1. Bulukumba | |
| | 2. Kepulauan Selayar | |
| | 3. Bantaeng | |
| | 4. Sinjai | |
| | 5. Jeneponto | |
| V. | KAWASAN PAREPARE DSK | Agroindustri<br>Pertanian<br>Perikanan<br>Perkebunan |
| | 1. Parepare | |
| | 2. Barru | |
| | 3. Sidenreng Rappang | |
| | 4. Pinrang | |
| | 5. Enrekang | |

*Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Selatan*

Lebih lanjut terkait potensi daerah, Sulawesi Selatan juga kaya akan budaya yang beragam yang meliputi rumah adat yaitu Tongkonan yang merupakan rumah adat khas Toraja dan Balla atau Bola yang merupakan rumah adat khas Makassar-Bugis dengan ciri khas timpalaja. Kekayaan budaya lainnya adalah pakaian adat, utamanya yang sangat terkenal yaitu baju bodo, tarian tradisional, berbagai upacara adat antara lain Rambu Solo yang merupakan upacara pemakaman adat Toraja, Accera Kalompoang yang merupakan upacara adat suku Makassar untuk membersihkan benda pusaka

kerajaan. Selain itu juga terdapat kekayaan makanan khas diantaranya Pulu Mandoti di kabupaten Enrekang serta kekayaan budaya lainnya berupa warisan budaya diantaranya Perahu Phinisi yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, kain tenun sutra tradisional yang dikenal dengan sebutan Lipa' Sabbe' dari Kabupaten Wajo, dan Songkok Recca dari Kabupaten Bone.

### 2.1.1.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa aspek geografis dan potensi sumber daya alam diatas perlu diperhatikan dan dilengkapi dengan informasi daya dukung dan daya tampung di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Kajian Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masuk kedalam Kuadran II bersama dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, atau berpredikat **Pemulihan Sumber Daya Berkelanjutan**. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) Eksisting dibawah nilai rata-rata nasional yang mengindikasikan bahwa fungsi lingkungan hidup Sulawesi Selatan sudah mengalami penurunan fungsi baik dari sisi pengatur air, penyedia air, penyediaan lahan, dan pendukung keanekaragaman hayati (kehati).

Selain itu, berdasarkan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 diinformasikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan dihitung kapasitasnya melalui aspek ambang batas dan daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan serta aspek ambang batas dan daya dukung lingkungan hidup penyediaan air.

Penentuan status daya dukung wilayah sebagai penyedia pangan dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk dengan ambang batas populasi yang dapat didukung oleh wilayah tersebut. Jika jumlah penduduk melebihi ambang batas, maka wilayah tersebut dianggap telah melampaui daya dukungnya sebagai penyedia pangan, dan sebaliknya. Ambang batas populasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan untuk penyediaan pangan terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yang disebabkan oleh tingginya ketersediaan pangan, serta wilayahnya yang cukup luas.

Berikut disajikan data rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta selisih ketersediaan dan ambang batasnya untuk tahun 2023. Rekapitulasi ini menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mengalami defisit pangan. Hal ini diakibatkan oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa beberapa wilayah, terutama yang memiliki populasi kecil atau tidak ada sama sekali (berdasarkan model), memiliki kebutuhan pangan yang lebih besar daripada ketersediaan pangan yang ada, meskipun kapasitas lingkungan untuk penyediaan pangan masih memadai untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II. 6**
**Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih, dan Ambang Batas Bahan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| Kabupaten | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Ketersediaan Pangan (Kkal) | Kebutuhan Pangan (Kkal) | Selisih (Kkal) | Ambang Batas (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bantaeng | 207.733 | 107.629.862.031 | 163.018.471.776 | -55.388.609.745 | 22.572 |
| Kabupaten Barru | 190.482 | 328.828.796.709 | 149.480.749.498 | 179.348.047.212 | 253.397 |
| Kabupaten Bone | 837.288 | 1.232.478.636.501 | 657.061.758.165 | 575.416.878.336 | 756.246 |
| Kabupaten Bulukumba | 459.151 | 279.665.585.416 | 360.318.747.173 | -80.653.161.757 | 33.790 |
| Kabupaten Enrekang | 241.697 | 445.428.980.467 | 189.671.720.655 | 255.757.259.812 | 333.337 |
| Kabupaten Gowa | 827.245 | 585.401.442.114 | 649.180.513.812 | -63.779.071.698 | 149.398 |
| Kabupaten Jeneponto | 423.518 | 207.091.077.721 | 332.355.750.514 | -125.264.672.793 | 22.252 |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 144.249 | 307.483.454.688 | 113.199.402.515 | 194.284.052.173 | 248.873 |
| Kabupaten Luwu | 389.345 | 899.597.036.464 | 305.538.488.852 | 594.058.547.612 | 761.102 |
| Kabupaten Luwu Timur | 317.010 | 1.724.074.791.658 | 248.773.597.726 | 1.475.301.193.932 | 1.880.481 |
| Kabupaten Luwu Utara | 341.598 | 1.689.769.218.687 | 268.069.030.605 | 1.421.700.188.082 | 1.817.475 |
| Kabupaten Maros | 419.377 | 393.920.472.015 | 329.106.100.715 | 64.814.371.301 | 214.415 |
| Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 362.769 | 297.596.832.383 | 284.682.972.759 | 12.913.859.623 | 172.135 |
| Kabupaten Pinrang | 430.075 | 506.381.462.561 | 337.501.356.437 | 168.880.106.123 | 254.789 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 333.596 | 483.917.258.970 | 261.789.461.048 | 222.127.797.922 | 295.360 |
| Kabupaten Sinjai | 273.365 | 223.522.273.468 | 214.523.183.729 | 8.999.089.738 | 55.581 |
| Kabupaten Soppeng | 240.487 | 360.110.736.219 | 188.722.173.080 | 171.388.563.140 | 225.884 |
| Kabupaten Takalar | 321.327 | 173.483.255.718 | 252.161.363.241 | -78.678.107.523 | 42.986 |
| Kabupaten Tana Toraja | 295.447 | 498.550.651.116 | 231.852.033.331 | 266.698.617.785 | 361.851 |
| Kabupaten Toraja Utara | 282.353 | 402.088.782.088 | 221.576.516.769 | 180.512.265.319 | 253.214 |
| Kabupaten Wajo | 391.587 | 672.070.643.630 | 307.297.898.182 | 364.772.745.448 | 466.274 |
| Kota Makassar | 1.474.480 | 47.198.854.574 | 1.157.098.179.995 | -1.109.899.325.421 | 5.453 |
| Kota Palopo | 198.646 | 80.286.773.176 | 155.887.448.497 | -75.600.675.321 | 43.096 |
| Kota Pare Pare | 163.465 | 24.837.599.587 | 128.279.158.748 | -103.441.559.161 | 8.049 |
| **Provinsi Sulawesi Selatan** | **9.566.290** | **11.971.414.477.961** | **7.507.146.077.821** | **4.464.268.400.140** | **8.678.009** |

*Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

Kemudian, dari aspek daya dukung lingkungan hidup penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Selatan. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air di Provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada data potensi wilayah sungai. Nilai potensi tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk mendistribusikan potensi air pada setiap grid. Untuk status daya dukung penyedia air di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023 sebesar 74,45 persen atau sekitar 3.382.712,05 ha belum melampaui dan 25,55 persen atau sekitar 1.160.907,91 ha sudah melampaui. Terdapat 3 kabupaten/kota dengan status daya dukung air yang melampaui ambang batas diatas 60 persen yaitu Kota Makassar (96,41 %), Parepare (72,69 %), dan Kabupaten Wajo (64,04 %). Kabupaten dengan status daya dukung air yang melampaui dengan capaian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Enrekang, dan Tana Toraja.

### 2.1.1.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Gambaran ketahanan energi, air, dan kemandirian di Sulawesi Selatan ditunjukkan dari a) Indeks Ketahanan Energi dengan indikator antara lain Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) dan Intensitas energi primer; b) Nilai Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer; c) Indeks Ketahanan Pangan; d) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan; e) Indeks Ketahanan Air dengan indikator antara lain Kapasitas Air Baku dan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan; f) Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman; dan g) Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan.

a. **Indeks Ketahanan Energi** merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan energinya secara berkelanjutan, aman, dan terjangkau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, total produksi listrik Sulawesi Selatan Tahun 2024 mencapai 9.216.742.504,09 KWh dari kapasitas daya terpasang sebesar 5.256.511,95 kVA. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan energi di Sulawesi Selatan adalah **Konsumsi Listrik per Kapita** (KWh). Konsumsi listrik per kapita memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita mencapai 46 persen dari total konsumsi listrik per kapita, dan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan peningkatan sebesar 255,3 KWh/kapita. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan 1,50 KWH/kapita dari 914,1 KWh di tahun 2023 menjadi 912,6 KWh tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pentingnya efisiensi energi di sektor rumah tangga, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan edukasi tentang penghematan energi di rumah tangga. Konsumsi listrik terbesar di Sulawesi Selatan setelah rumah tangga adalah sektor industri mencapai 283,09 KWh, kemudian sektor usaha 149,1 KWh, Sosial/Publik 44,5 KWh, gedung pemerintah 18,7 KWh, dan penerangan jalan umum 13,8 KWh pada tahun 2024. Gambaran selengkapnya untuk konsumsi listrik per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut.

**Grafik II.1**
**Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

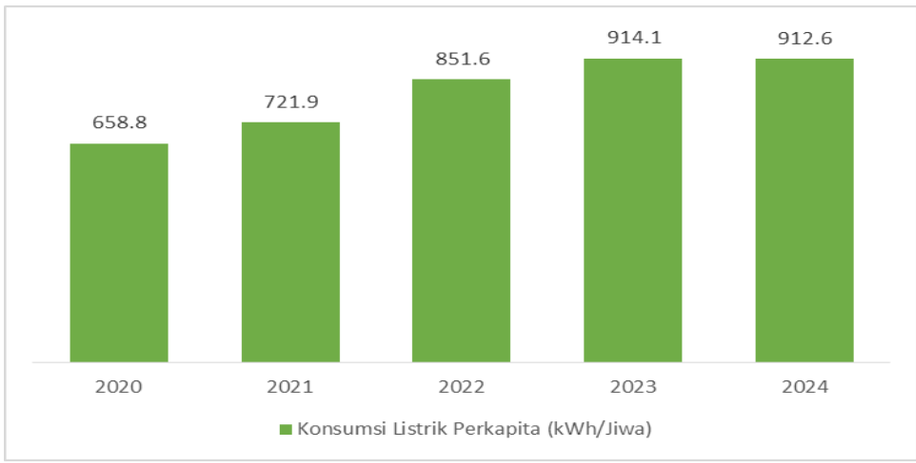


*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah Bappelitbangda, 2024*

Selain konsumsi listrik per kapita, **Intensitas energi primer** menjadi bagian dari gambaran kondisi ketersediaan energi di suatu wilayah. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. Intensitas energi primer merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya intensitas energi menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan energi primer seperti minyak bumi, gas, batubara, dan energi terbarukan untuk menggerakkan roda perekonomian.

Untuk Skala Nasional Realisasi capaian **intensitas energi primer** selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 27 SBM/miliar khususnya dari tahun 2020 hingga 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan 27,9 SBM/miliar. Penurunan intensitas energi primer tersebut menunjukkan bahwa sektor energi

semakin efisien dalam menggunakan energi dari sisi penyedia energi. Target intensitas energi primer pada tahun 2024 adalah sebesar 133,8 SBM/miliar dengan capaian 133,0 SBM/miliar, sedangkan data untuk Sulawesi Selatan belum tersedia dikarenakan penghitungan capaian intensitas energi primer menjadi kewenangan pusat.

b. **Nilai Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer** selama kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami tren peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 28,82 persen, lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya mencapai 13,1 persen yang didukung melalui kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,49 persen menjadi 27,33 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan komitmen dalam pengelolaan energi berkelanjutan dimana pada Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2024, Sulawesi Selatan meraih peringkat ketiga nasional berkat keberhasilannya mendorong transisi energi dan mengoptimalkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Saat ini, tantangan terberat dalam peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer adalah tingginya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan jenis energi hijau, sifatnya intermittent, dan kurangnya tenaga kerja terampil untuk EBT. Selain itu ketidakpastian regulasi dan kebijakan, dan ketergantungan pada sumber energi konvensional juga sangat mempengaruhi capaian kinerja ke depan.

**Grafik II.2**
**Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

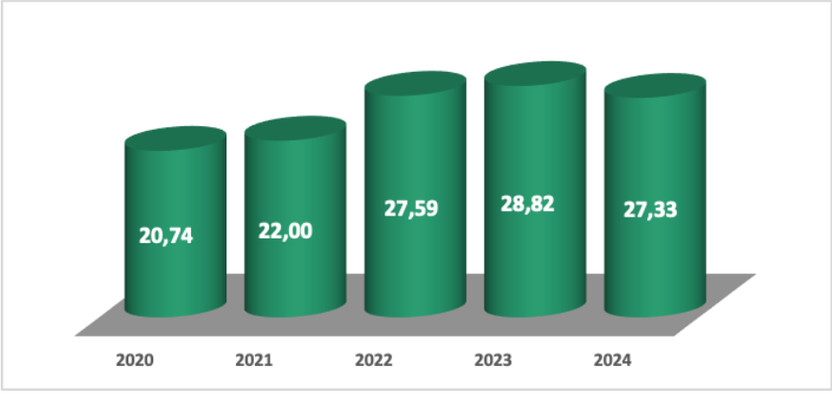


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

c. **Indeks Ketahanan Pangan** adalah ukuran kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang dihasilkan dari beberapa indikator yang meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

Secara keseluruhan indeks ketahanan pangan Sulsel menunjukkan peningkatan, meski berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Daerah dengan Capaian Tinggi Konsisten Bantaeng, Soppeng, Wajo, Barru, Gowa, Pinrang, Luwu Timur, dan Makassar, konsisten di atas 85 pada hampir semua tahun.

Daerah dengan Fluktuasi Signifikan Sidrap: dari 87,16 (2020) turun ke 84,78 (2021) lalu naik lagi ke 87,36 (2024). Takalar: naik-turun tajam, sempat rendah di 80,87 (2022) lalu meningkat ke 84,63 (2024). Jeneponto: stagnan rendah (78,55 – 81,67), menunjukkan perbaikan tetapi masih tertinggal.

Daerah dengan Capaian Rendah Kepulauan Selayar, selalu di bawah rata-rata, meski meningkat dari 62,87 (2020) ke 72,03 (2024). Ini tetap menjadi daerah dengan IKP

terendah di Sulsel. Palopo: relatif rendah meski ada perbaikan, dari 75,23 (2020) menjadi 83,05 (2024). Tana Toraja juga rendah: 76,87 (2020) menjadi 76,88 (2024) (stagnan).

Data pada tabel memberikan gambaran yang jelas bahwa ketahanan pangan di Sulawesi Selatan secara umum membaik. Namun, masih ada perbedaan yang signifikan antar kabupaten/ kota. Diperlukan Langkah Strategis melakukan intervensi pada wilayah dengan IKP rendah (Selayar, Jeneponto, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo), misalnya dengan peningkatan infrastruktur pangan dan aksesibilitas pangan.

**Tabel II. 7**

**Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Nasionan/Provinsi/ Kabupaten/Kota | Indeks Ketahanan Pangan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bantaeng | 87,37 | 85,41 | 82,77 | 85,38 | 86,59 |
| Bone | 82,78 | 81,46 | 81,67 | 83,85 | 85,65 |
| Sinjai | 83,55 | 82,11 | 81,62 | 82,73 | 82,31 |
| Soppeng | 86,15 | 81,49 | 85,26 | 86,35 | 87,89 |
| Wajo | 83,52 | 82,81 | 85,45 | 84,35 | 86,65 |
| Sidrap | 87,16 | 84,78 | 86,19 | 87,51 | 87,92 |
| Gowa | 85,05 | 82,91 | 82,14 | 85,24 | 87,53 |
| Takalar | 82,85 | 83,36 | 80,87 | 84,38 | 84,63 |
| Jeneponto | 81,54 | 78,55 | 79,51 | 79,69 | 81,67 |
| Bulukumba | 83,60 | 82,10 | 82,51 | 83,02 | 83,73 |
| Kepulauan Selayar | 62,87 | 71,01 | 75,27 | 71,86 | 72,03 |
| Maros | 83,10 | 83,12 | 81,82 | 83,74 | 83,73 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 79,16 | 77,61 | 78,64 | 79,47 | 81,00 |
| Barru | 86,61 | 85,31 | 84,94 | 87,70 | 86,67 |
| Pinrang | 83,01 | 83,47 | 85,32 | 87,19 | 86,94 |
| Luwu | 83,20 | 81,27 | 81,88 | 81,60 | 82,23 |
| Luwu Utara | 80,46 | 77,23 | 80,26 | 83,02 | 85,66 |
| Luwu Timur | 86,69 | 86,07 | 86,36 | 87,82 | 87,73 |
| Enrekang | 80,05 | 79,07 | 78,54 | 82,11 | 80,31 |
| Tana Toraja | 76,87 | 73,44 | 76,52 | 77,73 | 76,88 |
| Toraja Utara | 79,59 | 77,86 | 79,17 | 80,43 | 80,25 |
| Makassar | 84,32 | 83,81 | 83,85 | 89,27 | 87,95 |
| Palopo | 75,23 | 75,47 | 73,41 | 82,92 | 83,05 |
| Parepare | 78,56 | 79,79 | 79,11 | 83,06 | 82,76 |
| Sulsel | 81,81 | 80,82 | 81,38 | 83,36 | 83,82 |
| Nasional | | | | | |

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

d. **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%).** Gambaran kondisi pangan di Sulawesi Selatan dapat diketahui dari capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) selama 5 tahun terakhir. Prevalensi ketidakcukupan pangan menggambarkan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar mereka setiap saat. Tahun 2020 hingga 2024 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Sulawesi Selatan fluktuatif pada kisaran angka 6-10 persen, namun pada tahun 2024 memperoleh nilai PoU sebesar 6,99 persen atau mengalami penurunan 0,85 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,84 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses yang memadai terhadap asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar energi dan gizi. Peningkatan ketidakcukupan pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 dan krisis ekonomi sebagai dampak pandemi global. Adapun peningkatan PoU di tahun 2022 lebih disebabkan

oleh terjadinya bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi kecukupan pangan, fluktuasi harga, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan layanan, terutama mereka yang berada dalam kondisi kerentanan sosial atau ekonomi. Provinsi Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Banten adalah tiga provinsi dengan PoU terendah, dan Sulawesi Selatan hanya menempati peringkat ke 10 provinsi dengan PoU terendah.

**Tabel II. 8**
***Prevalence of Undernourishment* (PoU)**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Prevalensi Ketidakcukupan Pangan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tahun** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **PoU Provinsi** | 10,14 | 7.93 | 10,79 | 7,84 | 6,99 |
| **PoU Nasional** | 8,34 | 8,49 | 10,21 | 8,53 | 8,27 |

*Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024*

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, selayaknya memiliki PoU terendah secara nasional. Beberapa hal yang mempengaruhi PoU Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses terhadap pasar, infrastruktur, dan sumber daya yang mendukung ketersediaan pangan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Olehnya itu perlu upaya untuk memperkuat sistem distribusi dan logistik pangan yang efektif sehingga pangan yang dihasilkan dapat tersalurkan ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

e. **Indeks Ketahanan Air.** Kondisi ketahanan air di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari indikator **Kapasitas Air Baku (m3/detik).** Penyediaan air baku untuk pengelolaan air minum penduduk di Sulawesi Selatan yang bersumber dari sungai, mata air, dan waduk pada tahun 2023 berjumlah 1.562 unit SPAM yang memiliki kapasitas 11.721 liter/detik dengan total kapasitas terpasang mencapai 9.926 liter/detik yang dimanfaatkan sejumlah 713.018 rumah tangga.

**Grafik II.3**
**Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

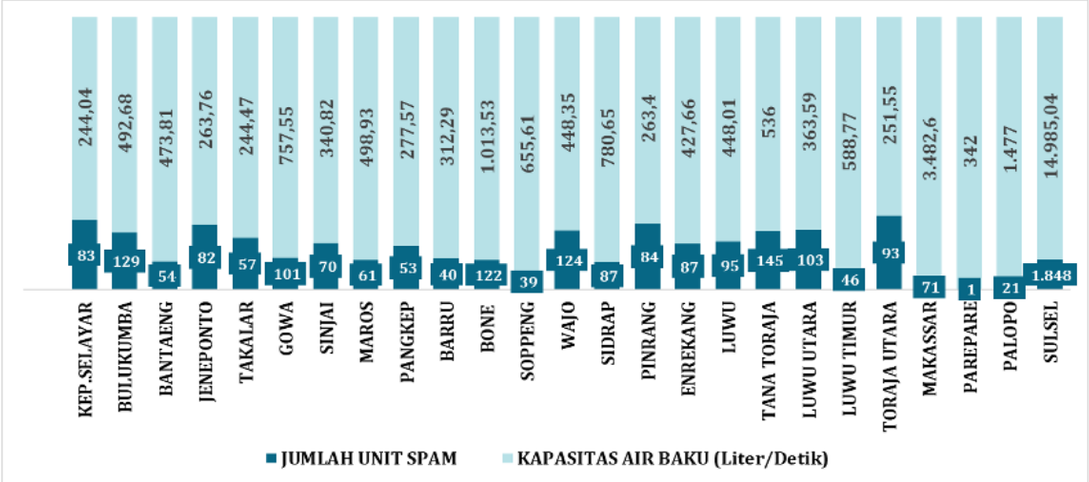


*Sumber: SIMSPAM data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024*

Pada tahun 2024 jumlah unit SPAM terbangun di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 1.848 unit baik yang dikelola oleh

PDAM maupun non PDAM dengan kapasitas air baku yang digunakan sebesar 14.985,04 liter/detik, kapasitas terpasang 11.927,69 liter/detik, kapasitas produksi 10.323,71 liter/detik, kapasitas distribusi 8.964,62 liter/detik, serta jumlah sambungan rumah mencapai 724.529 sambungan rumah. Kapasitas air baku yang digunakan tertinggi di Sulawesi Selatan yaitu di Kota Makassar sebesar 3.482,6 liter/detik pada 71 unit SPAM yang dimanfaatkan oleh 174.725 rumah tangga. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kapasitas air baku yang digunakan sebesar 244,04 liter/detik pada 83 unit SPAM yang dimanfaatkan sejumlah 15.252 rumah tangga (sumber : SIMSPAM).

Indikator lain yang digunakan untuk mengetahui ketahanan air adalah Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%). Selama empat tahun terakhir, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum perpipaan mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2021 terdapat 24,16 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum perpipaan baik yang dikelola PDAM maupun Non PDAM. Angka ini mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tercatat sebesar 34,88 persen pada tahun 2024. Kota Palopo dengan rumah tangga dengan akses air minum perpipaan tertinggi di Sulawesi Selatan mencapai 95 persen atau 42.163 sambungan rumah pada tahun 2024. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Pinrang sebesar 10,36 persen atau 10.734 sambungan rumah (sumber : SIMSPAM).

**Grafik II.4**
**Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

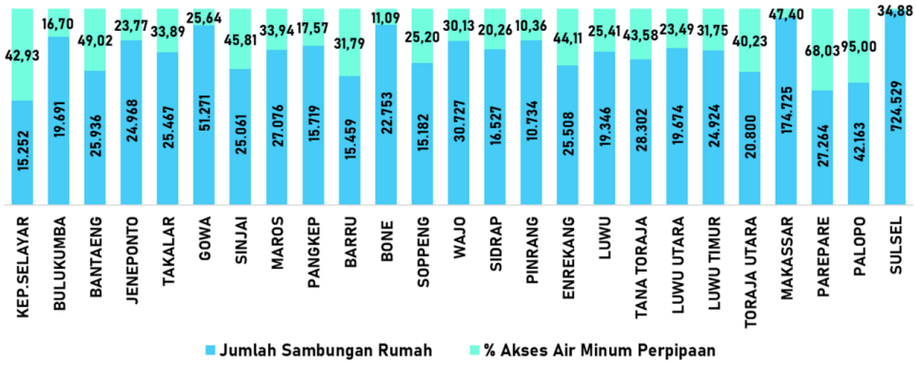


*Sumber: SIMSPAM data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024*

Kondisi ini di indikasikan oleh kinerja BUMD Air Minum di Sulawesi Selatan dari 23 BUMD yang tergolong kategori Sehat hanya berjumlah 12 BUMD, selebihnya kategori Kurang Sehat 7 BUMD dan kategori Sakit 4 BUMD. Kinerja BUMD dapat mempengaruhi jumlah pelanggan yang disebabkan oleh kuantitas dan kualitas air yang didistribusikan. Menurunnya cakupan pelayanan dipengaruhi oleh permasalahan air baku yang semakin jauh dari pusat-pusat pelayanan, sebarannya secara kuantitas tidak merata, dan kapasitas di beberapa lokasi menurun. Rendahnya cakupan layanan perpipaan PDAM menuntut masyarakat memilih akses air minum non perpipaan yang berasal dari sumur dan mata air terlindungi.

**Grafik II.5**
**Akses Air Minum Perpipaan Dikelola PDAM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

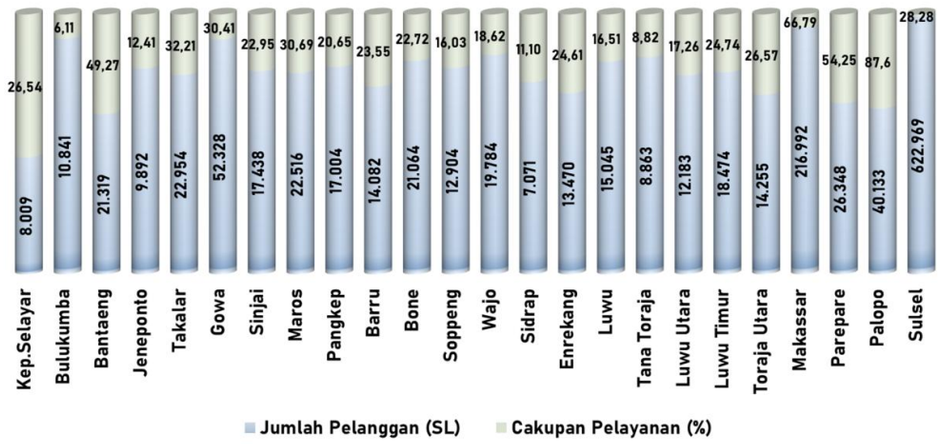


*Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024*

Tahun 2023 akses air minum perpipaan PDAM mencapai 622.969 sambungan langsung dengan cakupan layanan 28,28 persen mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan capaian 597.664 sambungan langsung dengan cakupan layanan 27,74 persen. Jumlah sambungan langsung PDAM tertinggi di Kota Makassar sebesar 216.992 dengan cakupan layanan 66,29 persen, serta yang terendah di Kabupaten Sidrap sejumlah 7.071 dengan cakupan layanan 11,10 persen. Untuk meningkatkan akses air minum perpipaan non PDAM, pemerintah daerah membangun SPAM komunal berbasis masyarakat khususnya pada wilayah rawan air. Selain itu pembangunan SPAM Regional diharapkan mampu meningkatkan akses air minum aman perpipaan yang juga merupakan amanat SPM.

Kewenangan Provinsi dalam pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan hanya terbatas pada pemenuhan air akses air minum jaringan perpipaan lintas kabupaten/kota atau skala regional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai tahun 2025 melaksanakan pembangunan jaringan distribusi utama sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota pada kawasan metropolitan Mamminasata yang melayani rumah tangga yang bermukiman di sebagian wilayah Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Sumber Air Baku SPAM Mamminasata berasal dari bendungan bili-bili yang disalurkan melalui jaringan perpipaan air baku yang terbagi atas jaringan perpipaan distribusi jalur utara dan jalur selatan. SPAM Mamminasata memiliki kapasitas 1000 liter/detik yang pengerjaannya secara bertahap menggunakan sumber dana APBN dengan kapasitas 500 liter/detik untuk Tahap 1 dan menggunakan sumber dana APBD dengan kapasitas 500 liter/detik untuk Tahap 2 yang dapat melayani ± 80.000 sambungan rumah.

f. **Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%).** Berdasarkan Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga proporsi rumah tangga dengan sumber air minum utama di Sulawesi Selatan tertinggi adalah bersumber dari air isi ulang mencapai 30,9 persen dan 17,9 persen bersumber dari sumur bor. Penggunaan air isi ulang oleh sebagian besar rumah tangga khususnya pada wilayah perkotaan disebabkan karena kemudahan dalam mengakses serta dianggap lebih praktis karena tidak perlu dimasak.

**Grafik II.6**
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Utama**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

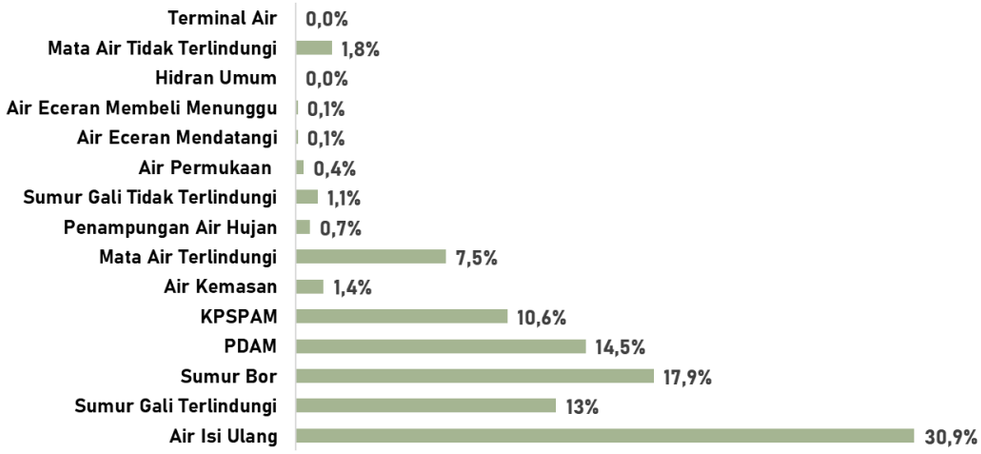


*Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) , 2024*

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) pada seluruh provinsi di Indonesia, sebesar 35,4 persen sumber air minum kemasan dan 45,4 persen sumber air minum isi ulang tercemar E-Coli, sebesar 22 persen air minum kemasan dan 19,8 persen air isi ulang memiliki kandungan mineral/logam yang tinggi, sebesar 10,7 persen air minum kemasan dan 14,2 persen air isi ulang dengan kadar pH melebihi batas normal, sebesar 18,6 persen air minum kemasan dan 19,2 persen dengan kadar nitrit >3mg/L, serta sebesar 19,1 persen air kemasan dan 20,8 persen air isi ulang dengan kadar nitrat >20 mg/L. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber air minum kemasan dan air isi ulang dapat dikategorikan tidak aman untuk menjadi sumber air minum utama rumah tangga.

**Grafik II.7**
**Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman**
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

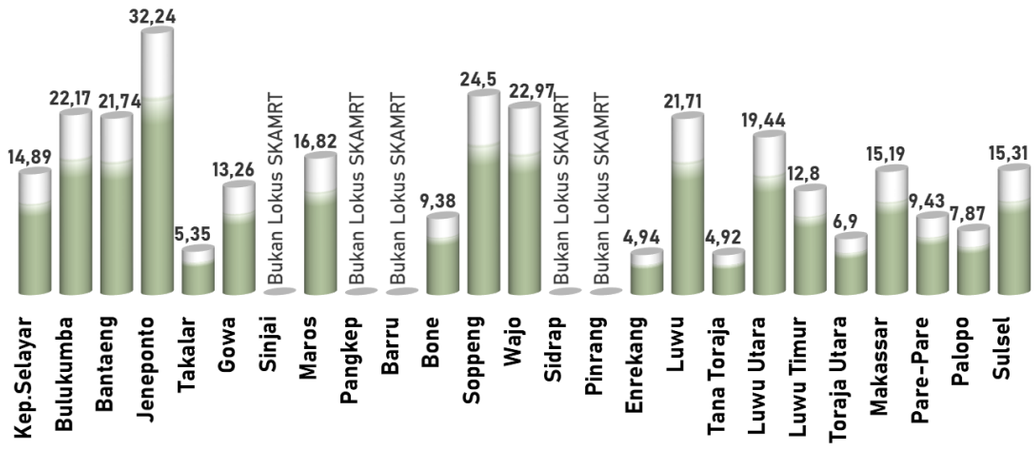


**Persentase Rumah Tangga dengan Kualitas Air Minum Aman (E-Coli, TDS, pH, Nitrat, Nitrit)**

*Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT), 2024*

Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga pada 19 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses air minum aman dengan kandungan E-Coli, Total Dissolved Solid, pH, Nitrit, dan Nitrat yang memenuhi syarat mencapai 15,31 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan capaian 8,3 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang

memiliki akses air minum aman tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto mencapai 32,24 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 4,92 persen. Proporsi rumah tangga yang memenuhi syarat kualitas air minum memenuhi 18 parameter sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 di Sulawesi Selatan hanya sebesar 52,6 persen sumber air minum rumah tangga yang bebas E-Coli, hal ini mengindikasikan masih tingginya pencemaran air oleh bakteri E-Coli yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran air tanah dari tangki septik yang tidak kedap maupun jarak sumber air minum rumah tangga dengan tangki septik yang tidak memenuhi syarat aman dimana berdasarkan data sumber air minum rumah tangga kedua terbesar setelah air isi ulang adalah sumur bor.

g. **Akses Air Minum Aman Perpipaan (%).** Berdasarkan pelaporan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) yang terdiri dari sarana air minum yang dikelola PDAM maupun swasta, sarana air minum perpipaan PAMSIMAS yang dikelola KPSPAM, sarana air minum perpipaan non Pamsimas yang masih aktif, serta sarana air minum non perpipaan bersifat komunal dengan jumlah pengguna 20 rumah tangga atau lebih dengan total sarana 2.504 unit yang diawasi dan diambil/diperiksa sampelnya sesuai standar hanya sejumlah 1.787 unit atau sebesar 71,37 persen mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu 74,36 persen serta tidak mencapai target sebesar 76 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain ketersediaan reagen, SDM, dan perubahan definisi operasional sasaran sarana air minum komunal dari 40 rumah tangga menjadi 20 rumah tangga sehingga sasaran sarana air minum menjadi lebih banyak. Dari 1.787 unit sarana air minum yang dilakukan pengawasan kualitas air minum hanya 1.151 unit sarana air minum yang memenuhi syarat atau 45,97 persen pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 56,37 persen dari 1.694 unit sarana air minum yang diperiksa kualitasnya. Hasil pengawasan kualitas air minum (PKAM) hanya sejumlah 547 sarana air minum dengan jumlah 167.599 sambungan rumah atau 25,51 persen yang dikategorikan sumber air minum aman perpipaan PDAM maupun non PDAM/PAMSIMAS dari total 724.576 sambungan rumah. Capaian tertinggi akses air minum aman perpipaan di Kabupaten Maros sebesar 63,45 persen atau 17.179 sambungan rumah aman. Sedangkan capaian terendah akses air minum aman perpipaan di Kabupaten Barru sebesar 1,19 persen atau 184 sambungan rumah. Layanan PDAM yang belum mencakup seluruh wilayah permukiman serta kinerja layanan BUMD Air Minum (PDAM) menjadi faktor yang menyebabkan akses air minum aman rumah tangga melalui jaringan perpipaan PDAM masih sangat rendah. Hal ini menggambarkan pemenuhan akses air minum rumah tangga masih bertumpu pada akses non perpipaan yang salah satunya disebabkan oleh karakteristik wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari wilayah pesisir dan kepulauan.

**Grafik II.8**
**Akses Air Minum Aman Perpipaan**
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

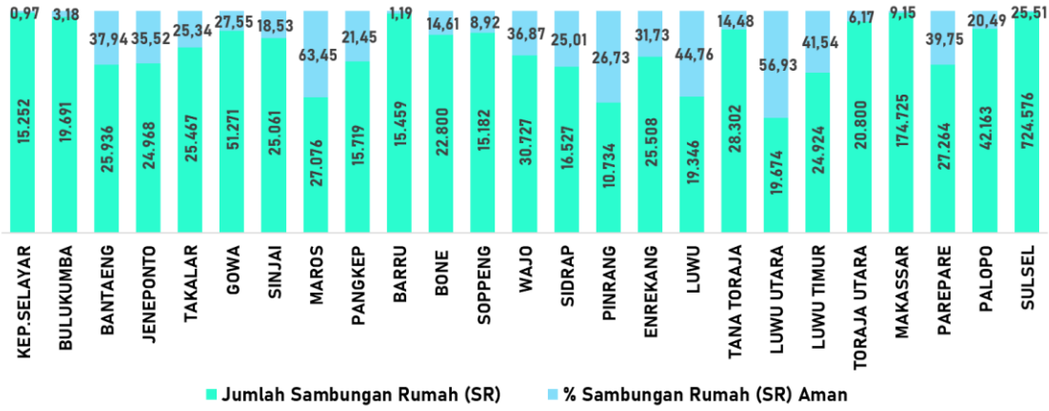


*Sumber : SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel, Tahun 2024*

**h. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan.**

Masih rendahnya penyediaan akses air minum aman perpipaan khususnya bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah perkotaan sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar salah satunya disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakat mengkonsumsi air kemasan bermerk dan air isi ulang karena kemudahan dalam memperolehnya serta tidak perlu dimasak. Berdasarkan data Susenas tahun 2021 hingga 2024 persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum utama mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 40,36 persen pada tahun 2024. Data Susenas 2024 menunjukkan bahwa status ekonomi rumah tangga ternyata memiliki hubungan berkebalikan dengan akses rumah tangga tersebut ke sumber air minum yang dikelola secara aman dimana semakin sejahtera status ekonomi rumah tangga justru akses ke sumber air minum aman semakin kecil. Dengan demikian, akses terhadap sumber ekonomi yang lebih baik justru menutup peluang rumah tangga untuk mengakses sumber-sumber air minum yang dikelola secara lebih aman. Ini merupakan tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan akses rumah tangga ke sumber air minum aman secara lebih merata.

**Grafik II.9**
**Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan**
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

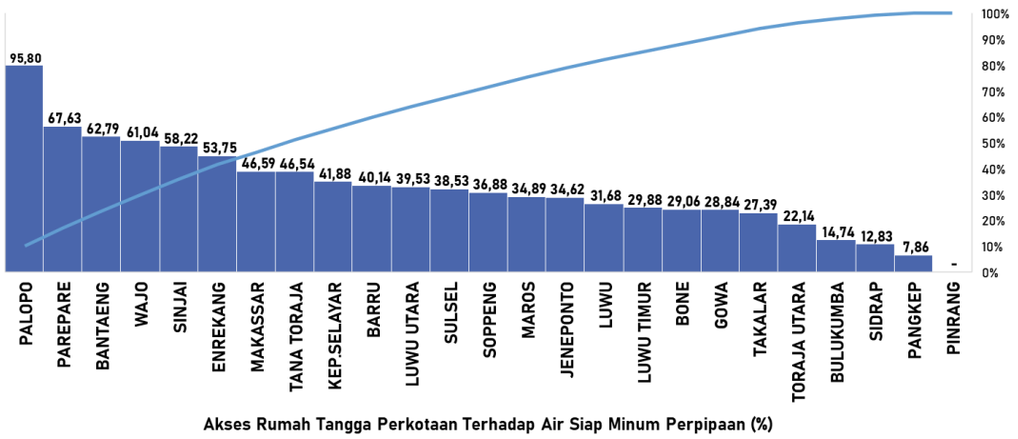


*Sumber : SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel, Tahun 2024*

Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2024 tertinggi di Kota Palopo mencapai 95,80 persen dengan jumlah rumah tangga sebesar 38.254 dari total 39.932 rumah tangga yang bermukim di wilayah perkotaan. Sedangkan di Kabupaten Pinrang tidak ada rumah tangga yang bermukim di wilayah perkotaan yang mengakses air siap minum perpipaan disebabkan karena dari sejumlah 7 (tujuh) unit SPAM IKK di Kabupaten Pinrang yang berfungsi hanya 1 (satu) unit yaitu IKK Manarang di Kecamatan Mattiro Bulu yang melayani rumah tangga di wilayah perdesaan dengan jumlah 625 SR. Sedangkan SPAM IKK Tuppu di Kecamatan Lembang yang melayani rumah tangga di wilayah perkotaan tidak berfungsi sehingga menjadi isu penting dalam pemunahan akses air siap minum perpipaan bagi rumah tangga perkotaan di Kabupaten Pinrang.

### 2.1.1.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Pengelolaan Sampah, Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang, dan Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

a. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),** merupakan gambaran umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan di daerah. Nilai IKLH Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan dan nasional secara umum. Hal ini terlihat dari meningkatnya IKLH Sulawesi Selatan dari 74,3 di tahun 2023 menjadi 75,69 di tahun 2024. Pencapaian target ditahun 2024 ini melampaui target yang ditetapkan oleh nasional untuk Sulawesi Selatan karena hasil perhitungannya berada diatas nilai target yang ditetapkan yaitu 75,69 dari target yang ditetapkan nasional yaitu 74,39. Capaian nilai IKLH di tahun 2024 ini mengalami peningkatan 1,39 poin dari capaian sebelumnya di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perhitungan dan tambahan data kegiatan mandiri dan data dari kabupaten/kota sehingga target tahun ini dapat terpenuhi. Capaian data IKLH 2024 menjadikan Sulawesi Selatan berada di urutan ke 18 dari 38 provinsi di Indonesia.

**Tabel II. 9**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tahun** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **IKLH Sulawesi Selatan** | 70,7 | 73,23 | 74,17 | 74,30 | 75,69 |
| **IKLH Nasional** | 70,27 | 71,45 | 72,42 | 72,54 | 73,53 |

*Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, diolah Bappelitbangda Tahun 2025*

Nilai IKLH tahun 2024 ini merupakan perhitungan komposit dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pencapaian target Indeks Kualitas Air (IKA) di tahun 2024 berada dibawah target yang ditetapkan oleh nasional untuk Sulawesi Selatan karena hasil perhitungannya 58,51 sedangkan nilai target yang ditetapkan nasional adalah 61,3. Penurunan pencapaian target ini disebabkan karena kurangnya anggaran pemantauan pengambilan sampel baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga data hasil uji yang diperoleh tidak terpenuhi dalam perhitungan nilai IKA. Capaian nilai IKA di tahun 2024 ini pun mengalami penurunan dari capaian sebelumnya di tahun 2023 yang yang berada di angka 57,95 dari target yang ditetapkan nasional yaitu 61,20. Meskipun adanya perubahan metode perhitungan di tahun 2024, namun karena data hasil uji yang dibutuhkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak memenuhi sehingga nilai hasil perhitungan IKA berada dibawah target yang ditetapkan nasional. Capaian data IKA 2024 menjadikan Sulawesi Selatan berada di urutan ke 10 dari 38 provinsi di Indonesia dan termasuk pada kategori sedang.

Pencapaian target **Indeks Kualitas Udara (IKU)** ditahun 2024 ini **melampaui target** yang ditetapkan oleh nasional untuk Sulawesi Selatan karena capaian hasil perhitungannya **93,36** sedangkan nilai target yang ditetapkan nasional adalah **87,47.** Capaian nilai IKU di tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari capaian sebelumnya di tahun 2023 yang yang berada di angka **90,58** dari target yang ditetapkan nasional yaitu 87,37. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perhitungan dan tambahan data hasil uji laboratorium dari kegiatan passive sampler yang dilakukan oleh 24 kabupaten/kota sehingga target tahun ini dapat terpenuhi. Capaian data IKU 2024 menjadikan Sulawesi Selatan berada di urutan ke 12 dari 38 provinsi di Indonesia dan termasuk pada kategori sangat baik.

Pencapaian target **Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)** ditahun 2024 ini **melampaui target** yang ditetapkan oleh nasional untuk Sulawesi Selatan karena capaian hasil perhitungannya adalah **84,28** sedangkan nilai target yang ditetapkan nasional adalah **81,64.** Capaian nilai IKAL di tahun 2024 ini mengalami sedikit penurunan dari capaian sebelumnya di tahun 2023 yang berada di angka **84,30** namun nilai ini masih melampaui target yang ditetapkan nasional di tahun 2023 yaitu **80,96.** Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perhitungan dan tambahan data hasil uji laboratorium dari kementerian di beberapa perairan di Sulawesi Selatan sehingga target tahun ini dapat terpenuhi. Capaian data IKAL 2024 menjadikan Sulawesi Selatan berada di urutan ke 14 dari 38 provinsi di Indonesia dan termasuk pada kategori baik.

**Grafik II.10**
**Nilai IKLH, IKA, IKU, dan IKAL**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024**

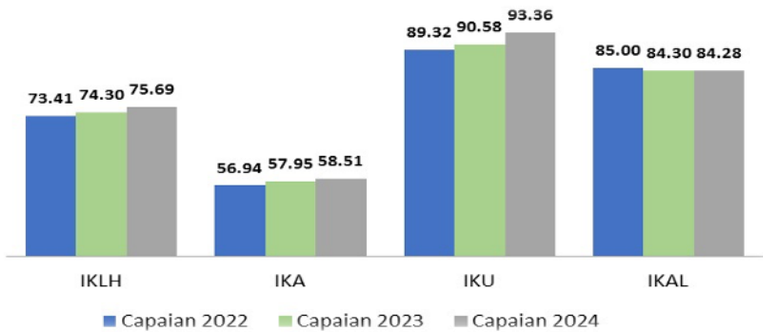


*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulsel, data diolah, 2025*

Kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sangat berhubungan dengan isu menurunnya kualitas air akibat berbagai faktor seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan lingkungan yang memadai, tingginya aktivitas yang merusak lingkungan, degradasi lahan, polusi air, maupun kurangnya pengelolaan limbah. Adapun 3 kabupaten yang memiliki capaian nilai IKLH tertinggi tahun 2024 dengan kategori baik yaitu Kabupaten Luwu Timur (77,93), Toraja Utara (78,25), dan Luwu Utara (77,70) yang menunjukkan komitmen kuat dan efektivitas kebijakan lingkungan di daerah tersebut. Kemudian kabupaten yang memiliki nilai IKLH terendah yaitu Kabupaten Luwu (48,48) yang mengindikasikan adanya berbagai masalah lingkungan yang belum teratasi.

b. **Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD)** merupakan alat ukur aksi dan kinerja (prestasi) dari setiap upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap kehilangan kehati dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. Terdapat dua pilar utama dalam perhitungan IPKD yakni pengurangan ancaman yang merupakan upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik serta pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.

IPKD terdiri dari 14 indikator penyusun yang dibagi menjadi 9 (sembilan) indikator pengurangan ancaman dan 5 (lima) indikator pemanfaatan berkelanjutan. Untuk pengurangan ancaman antara lain : Sektor Kehutanan dan Lahan, Sektor Pertanian dan Perkebunan, dan Sektor Perairan. Sektor Kehutanan dan Lahan terdiri dari beberapa proporsi antara lain proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan, proporsi kawasan lindung terhadap luas daratan provinsi, proporsi rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis, proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan dan proporsi lahan gambut non hutan terhadap total luas gambut. Sektor pertanian dengan proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia dan sektor perairan berupa proporsi luas mangrove dengan keadaan baik, proporsi luas KKPWP3K terhadap luas perairan provinsi dan proporsi desa tepi laut yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan indikator yang berkaitan dengan pemanfaatan berkelanjutan antara lain dari sektor kehutanan dan lahan berupa produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, sektor pertanian berupa produktivitas padi

dan Indeks pertanaman (IP) padi, dan sektor perairan berupa produktivitas akuakultur berbasis tambak dan angka konsumsi ikan.

Capaian Nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD) Sulawesi Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil olehan data dari 14 indikator penyusun yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar **0,528**. Nilai indeks yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Sulawesi Selatan mencerminkan kondisi keanekaragaman yang tinggi dan baik.

c. **Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.** Pada kurun waktu 5 tahun terakhir capaian akses Sanitasi Aman Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 8,09%, khususnya dari tahun 2020 hingga 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan 1,95 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan menurunnya kinerja layanan penyedotan lumpur tinja di beberapa Kabupaten/Kota. Berdasarkan klasifikasi wilayah, akses Sanitasi Aman rumah tangga perkotaan pada tahun 2024 sebesar 17,07 persen mengalami penurunan sebesar 1,69 persen poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan akses Sanitasi Aman rumah tangga yang bermukim di wilayah perdesaan mencapai 5,38 persen mengalami penurunan lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 2,36 persen poin.

**Grafik II.11**
**Akses Sanitasi Aman Berdasarkan Klasifikasi Wilayah**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

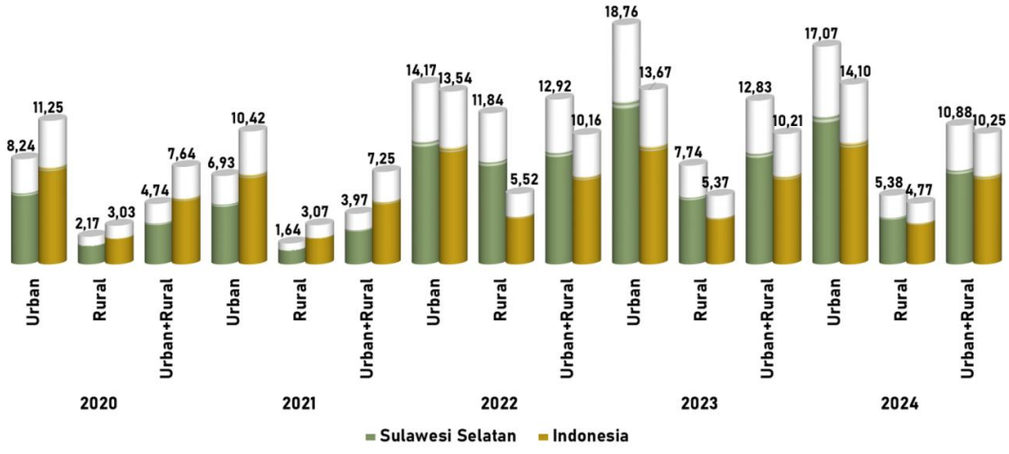


*Sumber : Susenas, BPS data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

Rendahnya sanitasi aman jika dibandingkan dengan akses sanitasi layak yang sudah mencapai 93,83 persen, disebabkan masih terdapat 8 kabupaten belum memiliki IPLT serta banyaknya IPALD yang tidak berfungsi yang menyebabkan target akses sanitasi aman sulit dicapai. Meskipun demikian capaian akses sanitasi layak dan sanitasi aman Sulawesi Selatan masih lebih baik dari capaian Nasional.

**Tabel II. 10**
**Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sulawesi Selatan** | | | | | |
| Akses Sanitasi Layak (%) | 88,96 | 91,57 | 92,24 | 93,69 | 93,83 |
| Akses Sanitasi Aman (%) | 4,74 | 3,97 | 12,92 | 12,83 | 10,88 |

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Indonesia** | | | | | |
| **Akses Sanitasi Layak (%)** | **79,53** | **80,29** | **80,92** | **82,36** | **83,6** |
| **Akses Sanitasi Aman (%)** | **7,64** | **7,25** | **10,16** | **10,21** | **10,25** |

*Sumber : Susenas, BPS- data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

Berdasarkan data Susenas 2024, sejumlah 89,48 persen rumah tangga di Sulawesi Selatan yang menggunakan tangki septik dan 1,62 persen terhubung dengan SPALD-T untuk pengelolaan lumpur tinja. Berdasarkan data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik yang pernah dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan selama kurun waktu 3 tahun terakhir dengan capaian 11,74 persen pada tahun 2024.

**Grafik II.12**
**Persentase Rumah Tangga yang Tangki Septiknya Disedot 5 Tahun Terakhir Menurut Provinsi**

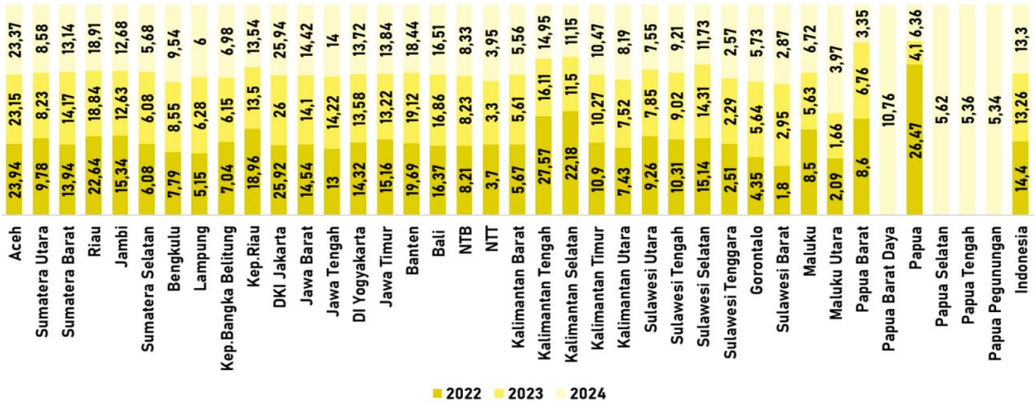


*Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS , data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

Sejalan dengan tren penurunan akses sanitasi aman, hingga tahun 2024 masih terdapat rumah tangga yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 1,83 persen dengan capaian 0,93 persen di wilayah perkotaan dan 2,62 persen di wilayah perdesaan. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan apabila masih terdapat rumah tangga yang masih BABS dan menggunakan tangki septik yang tidak kedap.

Berdasarkan data BPS akses Sanitasi Aman Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tertinggi di Kabupaten Bulukumba dengan capaian 28,84 persen dimana sejumlah 36,61 persen rumah tangga pernah melakukan penyedotan lumpr tinja kurun waktu 5 tahun terakhir. sedangkan yang terendah di Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 1,64 persen dimana hanya 0,98 persen rumah tangga yang tangki septiknya disedot kurun waktu 5 tahun terakhir.

**Grafik II.13**
**Akses Sanitasi Aman Menurut Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

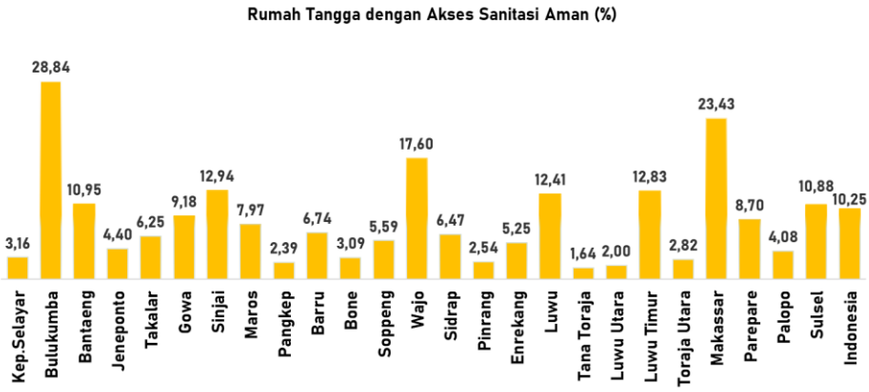


*Sumber: BPS data diolah Tim Penyusun Roadmap Sanitasi Aman Prov.Sulsel Tahun 2025*

Akses Sanitasi Aman melalui SPALD-S yang diukur dari jumlah rumah tangga yang melakukan penyedotan lumpur tinja kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan persentase rumah tangga dengan tempat bab sendiri/bersama/mck komunal dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang pernah dikosongkan/dilakukan penyedotan lima tahun terakhir menurut kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut.

**Grafik II.14**
**Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja**
**Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

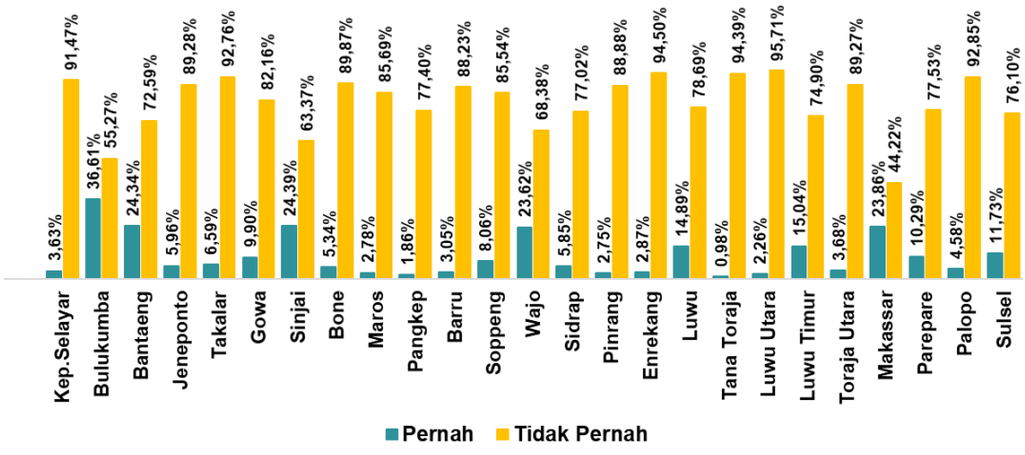


*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

Kewenangan Provinsi terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik hanya terbatas pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota atau Skala Regional, namun hingga saat ini Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki IPLT Regional sehingga intervensi terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik hanya berupa kegiatan pembinaan dpan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola air limbah domestik dan peningkatan kapasitas operator IPLT Kabupaten/Kota, serta pendampingan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

d. **Pengelolaan Sampah,** merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data yang tersedia mulai tahun 2021 hingga 2024 capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah maupun pendaurulangan sampah mengalami tren fluktuasi. Jumlah sarana

pengangkutan dan pengumpulan sampah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang aktif beroperasi belum mampu mencakup seluruh wilayah desa/ kelurahan/ kecamatan. Hal ini disebabkan karena luas wilayah beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang letaknya jauh dari TPA. Selain itu jumlah dan kondisi sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah yang tidak memadai menyebabkan masih banyak rumah tangga yang belum terlayani pengangkutan sampah. Pengelolaan sampah organik dan non organik dari rumah tangga merupakan faktor penting dalam peningkatan akses pengurangan sampah karena mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA. Optimalisasi keberfungsian Bank Sampah dan TPS 3R terbangun diperlukan dalam rangka peningkatan akses pengurangan sampah rumah tangga. Jumlah timbulan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menggambarkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak didaur ulang. Dari tahun 2021 ke tahun 2024 terjadi penambahan timbulan sampah yaitu dari 1.631.632,25 ton menjadi 1.666.833,32 ton di tahun 2024. Sistem pemrosesan TPA kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang ada masih menggunakan sistem open dumping disebabkan karena kapasitas TPA yang telah overload sehingga tidak dapat dilakukan proses penutupan tanah atau dengan metode controlled dan sanitary landfill. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sarana pengelolaan sampah di TPA seperti Excavator dan Bulldozer yang tidak berfungsi optimal. Perluasan lahan dan pembangunan TPA baru menjadi isu utama dalam pengelolaan sampah, mengingat rata-rata usia TPA yang lebih dari 10 tahun serta melebihi kapasitas.

**Grafik II.15**
**Capaian Pengelolaan Sampah**
**Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2024**

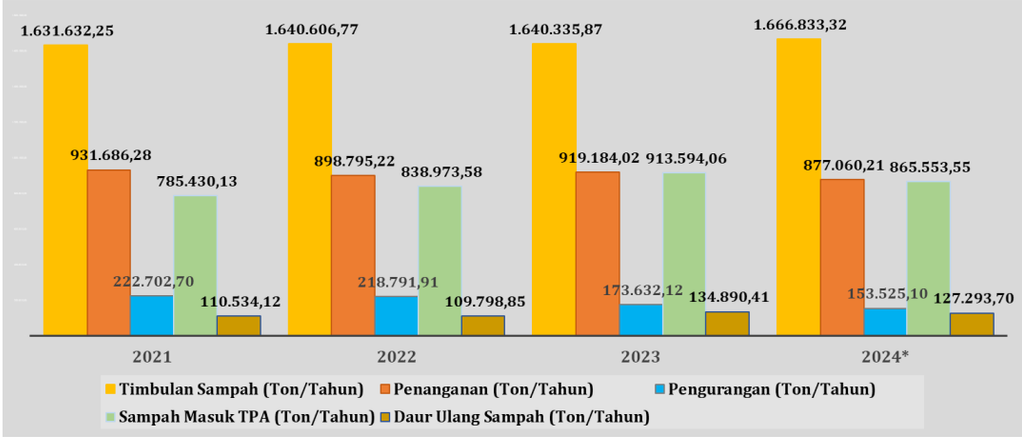


*Sumber: SIPSN data diolah Bappelitbangda Tahun 2025*

e. **Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang**. Berdasarkan data yang tersedia di SIPSN mulai tahun 2021 hingga 2023 persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami tren menurun mencapai 11,19 persen pada tahun 2024 dari 17 persen pada tahun 2021. Sebaliknya sampah yang terdaur ulang mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 4 tahun terakhir mencapai 9,98 persen atau 127.293,70 Ton pada tahun 2024 dari 7,45 persen atau 110.543,12 Ton pada tahun 2021.

**Grafik II.16**
**Capaian Pengelolaan Sampah**
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024***

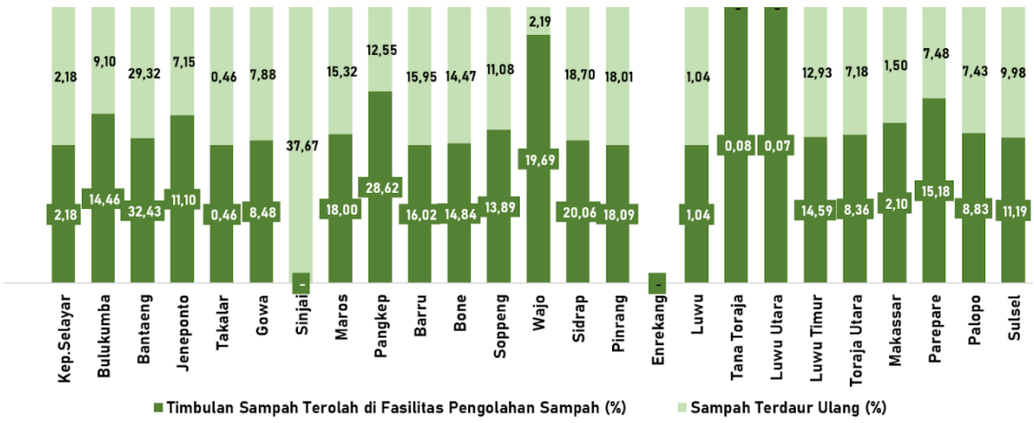


*Sumber: SIPSN data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel Tahun 2025*

Berdasarkan data SIPSN tahun 2024 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah mencapai 11,90 persen termasuk 9,08 persen yang terdaur ulang, data capaian belum termasuk kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang karena belum melakukan penginputan di SIPSN. Meskipun kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yang disebabkan oleh karena penanganan sampah di Sulawesi Selatan masih pada pendekatan angkut dan buang ke TPA sehingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan sampah sangat terbatas pada pengelolaan sampah regional yang menjadi hambatan dalam peningkatan peran provinsi dalam pengelolaan sampah dimana Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki TPA Regional. Selain itu arah kebijakan sektor persampahan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu tidak ada lagi pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) dimana TPA hanya untuk menampung residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang atau diolah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA (Zero Waste) dan mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti pemilahan sampah dari sumbernya dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan sampah, dari yang berbasis kumpul, angkut, dan buang (konvensional) menjadi prinsip ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah berbasis pengurangan dan pemanfaatan. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi dalam pemanfaatan teknologi persampahan melalui skema bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bekerjasama dengan PT.Semen Tonasa sebagai *offtaker* telah membangun *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang menghasilkan bahan bakar alternatif dari pengolahan sampah, terutama sampah non-daur ulang seperti plastik, kertas, tekstil, dan sampah organik yang sulit terurai.

f. **Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.** Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah adalah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, baik dari pintu ke pintu rutin secara berkala maupun melalui penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang jaraknya 200 meter yang dikumpulkan secara terpisah yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Tahun 2024 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Sulawesi Selatan hanya mencapai 3,27 persen dengan layanan tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 11,69

persen atau 10.575 rumah tangga terlayani menyusul Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 10,4 persen atau 8.643 rumah tangga terlayani. Sedangkan layanan pengumpulan sampah terendah di Kabupaten Tana Toraja hanya mencapai 0,08 persen dan Kabupaten Toraja Utara hanya mencapai 0,09 persen rumah tangga terlayani. Total jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah di Sulawesi Selatan sebesar 79.290 rumah tangga yang terdiri dari layanan Bank Sampah 42.358 rumah tangga, TPS3R 18.776 rumah tangga, TPST di Luar TPA 2.261 rumah tangga, Pusat Daur Ulang (PDU) 687 rumah tangga, Rumah Kompos 3.760 rumah tangga, Komposting Skala Kecil atau RT/RW 1.632 rumah tangga, Biodigester 62 rumah tangga, dan Refuse Derived Fuel (RDF) 9.754 rumah tangga khusus di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Grafik II.17**
**Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**
**Provinsi Sulawesi Selatan 2024**

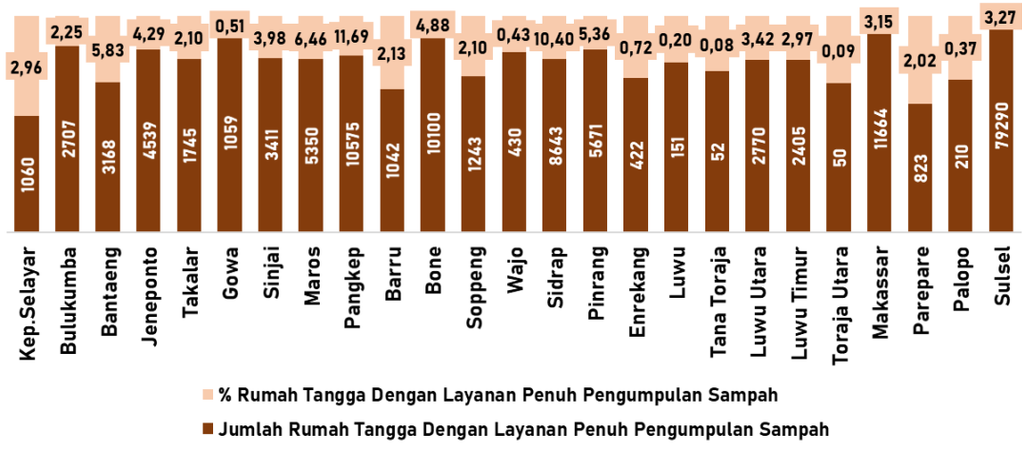


*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel Tahun 2025*

### 2.1.1.6 RESILENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Kondisi geografis seperti letak geografis, topografi, jenis tanah, dan iklim dapat menentukan jenis bencana alam yang mungkin terjadi di suatu wilayah, dan memungkinkan untuk melakukan pemetaan zona-zona rawan bencana. Wilayah Sulawesi memiliki ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuifaksi.

Gambaran Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan indikator Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

a. **Indeks Risiko Bencana.** Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 hingga 2024, nilai Indeks Risiko Bencana Sulawesi Selatan mengalami tren penurunan. Pada tahun 2024 IRB Sulawesi Selatan sebesar 140,76, ada penurunan sebesar 3,7 dari tahun 2023, sudah termasuk dalam kategori risiko sedang terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas.

**Tabel II. 11**

**Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IRB Sulawesi Selatan** | 159,5 | 154,9 | 150,1 | 144,5 | 140,76 |

*Sumber : BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai, dan wilayah sungai serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Perubahan iklim memberi tekanan lebih pada intensitas bencana di Sulawesi Selatan. Kejadian banjir secara konsisten terjadi sepanjang tahun, memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat alih fungsi lahan dan lahan kritis yang diperparah oleh perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim akan mempengaruhi periode musim, dimana musim kemarau akan lebih panjang dan musim hujan semakin pendek atau sebaliknya.

Perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan pesisir. Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki panjang garis pantai sekitar 1.979 km2 dengan luas perairan laut sekitar 48.000 km2 akan sangat rentan terhadap banjir rob, abrasi, peningkatan tinggi permukaan laut dan gelombang pasang.

Kerusakan kawasan pantai di Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, ditandai dengan tingginya laju abrasi di berbagai kabupaten/kota pesisir. Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh Dinas Perikanan dari seluruh kabupaten/kota, abrasi pantai telah terjadi di sedikitnya 16 kabupaten/kota dengan total panjang pantai yang mengalami kerusakan mencapai puluhan kilometer. Beberapa wilayah yang terdampak paling parah meliputi Kabupaten Wajo, Takalar, Pangkep, Luwu, dan Jeneponto.

Di Kabupaten Wajo, abrasi telah terjadi sejak tahun 1980-an dan berdampak pada sejumlah desa seperti Paojepe, Pattirolokka, dan Keera, dengan panjang abrasi mencapai lebih dari 20 kilometer. Takalar juga menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tinggi, terutama di Kecamatan Mangarabombang dan Sanrobone, di mana abrasi telah berlangsung sejak akhir 1990-an. Desa-desa seperti Punaga, Laikang, dan Cikoang tercatat mengalami abrasi hingga lebih dari 4 km. Sementara itu, Kabupaten Pangkep menghadapi tekanan abrasi sejak 1997 dengan dampak merata hampir di seluruh kecamatan pesisirnya seperti Labakkang, Bungoro, dan Mandalle.

Di bagian selatan, Kabupaten Jeneponto memperlihatkan kondisi kerusakan pantai yang cukup masif, terutama di Kecamatan Bangkala dan Tamalatea. Abrasi tidak hanya mengancam pemukiman dan infrastruktur pesisir, namun juga berdampak pada keberlangsungan mata pencaharian masyarakat seperti nelayan dan petambak. Sementara di wilayah utara, seperti Luwu Utara dan Luwu Timur, abrasi terus berlangsung dengan intensitas bervariasi, yang mengancam desa-desa pesisir seperti Waelawi, Harapan, dan Balo-Balo.

Abrasi di Sulawesi Selatan bukan hanya bersifat linier, namun juga sporadis dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Banyak desa yang mengalami abrasi berkepanjangan, tanpa penanganan yang cukup signifikan. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar abrasi telah terjadi sejak dua hingga tiga dekade terakhir,

namun upaya rehabilitasi dan perlindungan kawasan pesisir belum optimal, terbukti dari terus meluasnya dampak yang terekam dari tahun ke tahun.

Fenomena ini menuntut perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pusat, serta perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk melakukan penanganan terpadu. Upaya penguatan infrastruktur hijau seperti penanaman mangrove, pembangunan pemecah gelombang, serta pendekatan berbasis ekosistem perlu segera diprioritaskan demi menjaga keberlanjutan kawasan pesisir dan kesejahteraan masyarakatnya.

**Tabel II. 12**

**Kawasan Pantai Yang Rusak/Abrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| No. | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Kel./Desa/Pulau | Panjang Pantai (Km) | Panjang Abrasi Pantai (Km) | Abrasi Mulai Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Barru | Tanete Rilau | Pulau Puteanging : | 78 | 0,2 | 2015 |
| 2, | Kota Palopo | Wara Selatan | Sampodo | 0,641 | 0,641 (rusak berat) | |
| | | | Songka | 0,9 | 0,602 (rsk berat) 0,293 (rusak ringan) | - |
| | | | Takkalalla | 2,288 | 1,7 rsk berat, 0,588 rsk ringan | - |
| | | Wara Timur | Benteng | 1,293 | 1,093 rsk berat, 0,2 rsk ringan) | |
| | | | Malatunrung | 0,359 | 0,2 rsk berat, 0,159 rsk ringan) | |
| | | | Salekko | 1,143 | 0,643 rsk ringan) | |
| | | | Surutanga | 0,579 | 0,2 rsk berat, 0,379 rsk ringan | |
| | | | Salotellu | 0,704 | 0,504 rsk ringan | |
| | | Telluwanua | Salu Battang | 2,184 | 0,45 rsk berat, 0,8 rsk ringan | |
| | | Bara | Balandai | 1,279 | 0,405 | |
| | | | Temmalebba | 3,195 | 0,362 | |
| 3, | Wajo | Pitumpanua | Tabarakka | 4,58 | 2 | 2000 |
| | | | Banteng | 6,53 | 4 | 2000 |
| | | | Siwa | 5,28 | 3 | 2012 |
| | | | Buriko | | 2 | 2015 |
| | | | Bulete | 4,86 | 3 | 2015 |
| | | Keera | Paojepe | 8,76 | 4 | 1980 |
| | | | Keera | 5,7 | 3,4 | 1980 |
| | | | Pattirolokka | 2,5 | 2,5 | 1980 |
| | | Sajoangin | Akkajeng | 15,15 km | 2,2 | 2008 |
| | | | Akkotengan | 7,2 | 1 | 2016 |
| | | Bola | Pasir Putih | 6,39 | 3 | 1993 |
| | | Takkalalla | Pantai Timur | 7,71 | 3, 6 | 2016 |
| | | | Botto | 5,84 | 2,2 | 2017 |
| 4, | Luwu | Suli | Kel.Suli | 10,13 | 0,267 | 2018 |
| | | | Desa Murante | 9,87 | 0,05 | 2018 |
| | | Larompong Selatan | Desa Babang | 19 | 0,8 | 2019 |
| | | Belopa Utara | Desa Paconne | 2,14 | 0,5 | 2018 |
| | | Ponrang Selatan | Desa To'bia | 7,32 | 1 | 2019 |
| | | Belopa | Desa Senga Selatan | 8 | 0,65 | 2018 |
| | | Ponrang | Desa Tirowali | 13,21 | 0,35 | 2018 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Kel./Desa/Pulau | Panjang Pantai (Km) | Panjang Abrasi Pantai (Km) | Abrasi Mulai Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, | Luwu Timur | Malili | Desa Harapan : | | | |
| | | | Titik I | - | 0,685 | 2015 |
| | | Burau | Mabonta : | | | 2013 |
| | | | Titik I | - | 1,400 | |
| | | | Titik 2 | - | 0,426 | |
| | | | Titik 3 | - | 0,668 | |
| | | Wotu | Balo-Balo : | - | | 2013 |
| | | | Titik I | - | 0,490 | |
| | | | Titik 2 | - | 0,591 | |
| | | | Makar Indah | - | 7 | 2010 |
| | | | Perak | - | 10 | 2000 |
| | | Bontoharu | Bontolebang | - | 3 | 2005 |
| | | Bonto Sikayu | Patikarya | - | 3 | |
| | | | Longolo | - | 2 | 480 |
| | | Bontomatene | Bonelohe | - | 3 | - |
| 7, | Bantaeng | Pajukukang | Borong Loe | - | 2 | 2005 |
| | | | Nipa-Nipa | - | I | 2005 |
| 8.. | Luwu Utara | Tanalili | Desa Poreang Ds.Tanete | - | I | 2009 |
| | | | Desa Munte Ds.Masollo | - | I | 2008 |
| | | Malangke Barat | Waelawi Ds.Lamiko-Miko | - | 0,5 | 2009 |
| | | | Desa Pembakka, Muara Sungai Lasori Baddoa | - | 0,45 | 2009 |
| | | | Desa Pombakka Muara Sungai Lawatu | - | 0,5 | 2008 |
| | | | Desa Pombakka Muara Sungai Lasori Beccu | - | 0,3 | 2008 |
| 9 | Sinjai | Sinjai Timur | Desa Kahu (Dusun Kahu-Kahu) | | I, 5 | |
| | | | Desa Passimarannu | | I | |
| | | Pulau Sembilan | Pulau Harapan : Dusun Kambuno | | 0,5 | |
| | | | Dusun Liang-Liang | | 0,5 | |
| 10, | Bulukumba | Herlang | Bontokamase (Dusun Butung | | 0,2 | |
| | | | Tanuntung (Dusun Paatinoang) | | 0,2 | |
| | | | Gunturu (Dusun Dajo) | | 0,3 | |
| | | Bontotiro | Batu Tanrung/Para-Para (Dusun Ekatiro) | | 0,I | |
| | | | Bogo (Dusun Ekatiro) | | 0,5 | |
| | | Ujung Loe | Garantha (Dusun Namboe) | | I | |
| | | | Salemba (Dusun Lembang | | 0,3 | |
| 11, | Takalar | Galesong Utara | Aeng Batu (Ds.Jonggo Batu) | - | 0,I | - |
| | | | Sampulungan (Dusun.sampulungan Caddi) | - | 0,445 | - |

| No. | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Kel./Desa/Pulau | Panjang Pantai (Km) | Panjang Abrasi Pantai (Km) | Abrasi Mulai Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sampulungan | - | 0,449 | - |
| | | | (Dusun.Sampuluan Beru) | | | |
| | | | Bontosungguh : | | | |
| | | | Dusun Bontosungguh | - | 0,450 | - |
| | | | Dusun Kalongkong | - | 0,3 | - |
| | | | Dusun Tamasongo | - | 0,4 | - |
| | | Galesong Selatan | Desa Mangindara : | | | |
| | | | Dusun Ballaparang | - | 1 | - |
| | | | Dusun Mangindara | - | 1 | - |
| | | | Desa Bontokanang : | | | |
| | | | Dusun Tanringmata | - | 0,6 | - |
| | | | Dusun Kanaeng | - | 0,4 | - |
| | | | Dusun Saro | - | 0,4 | - |
| | | | Dusun Maccini Baji | - | 0,5 | - |
| | | | DusunMakkio Baji | - | 0,4 | - |
| | | | Dusun Galumbaya | - | 0,6 | - |
| | | | Dusun Ujung Lau | - | 0,6 | - |
| | | | Desa Laguruda : | | | |
| | | | Dusun Je'ne | - | 0,7 | |
| | | | Dusun Pappanambea | - | 0,5 | |
| | | | Dusun Parappa | - | 0,5 | |
| | | | Dusun Tandotana | - | 2,2 | |
| | | Mappakasunggu | Kel. Takalar : | | | |
| | | | Dusun Parialau | - | 3 | 2000 |
| | | | Dusun Pattingngang | - | 2 | 2000 |
| | | Mangarabombang | Desa Punaga | 10 | 4 | 2015 |
| | | | Desa Laikang : | | | 1999 |
| | | | Dusun Boddia | - | 2 | |
| | | | Dusun Puntondo | - | 1 | |
| | | | Desa Cikoang | 3 | 1,6 | 1999 |
| | | | Desa Topejawa : | | | 1999 |
| | | | Dusun Lamangkia | | 0,045 | |
| | | | Dusun Topejawa | | 2 | |
| 12 | Pangkep | Pangkaje'ne | Kel.Tekolabbua | 5,19 | 0,5 | 1998 |
| | | Bungoro | Desa Boriappaka | 1,63 | 0,3 | 2000 |
| | | | DesaBulucindea | 1,81 | 0,6 | 2000 |
| | | Labakkang | Desa Borimasunggu | 2,17 | 0,5 | 1998 |
| | | | Desa Pundatabaji | 3,52 | 0,9 | 2000 |
| | | | Desa Bontomanai | 5,52 | 1,7 | 1997 |
| | | | Desa Kanaungan | 3,13 | 0,7 | 2000 |
| | | Ma'rang | Pitue | 5,37 | 0,2 | 1998 |
| | | | Pitusunggu | 1,13 | 0,5 | 2000 |
| | | | Tamangappa | 1,43 | 0,3 | 2000 |
| | | Segeri | Bontomate'ne | 1,89 | 0,7 | 2000 |
| | | | Bawasalo | 2,67 | 0,5 | 1998 |
| | | Mandalle | Tamarupa | 2,13 | 0,3 | 2000 |
| | | | Mandalle | 2,26 | 0,9 | 1990 |
| 13 | Bone | Kajuara | Masangkae | - | 2 | - |
| | | | Angkue | - | 4 | - |
| 14 | Kota | Ujung Pandang | Pulau Lae-Lae | 2,4 | 0,15 | |

| No. | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Kel./Desa/Pulau | Panjang Pantai (Km) | Panjang Abrasi Pantai (Km) | Abrasi Mulai Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makassar | | | | | |
| | | Sangkarrang | Pulau Bonetambung | 0,2 | 0,1 | |
| 15 | Jeneponto | Bangkala Barat | Desa Garassikang | 3,52 | 1,2 | |
| | | | Desa Tuju | 2,5 | 1,2 | |
| | | | Banrimaturung | 1,9 | 0,73 | 2001 |
| | | Bangkala | Desa Mallasoro | 4,75 | 4,5 | |
| | | | Kel.Bontorannu | 3,25 | 2 | |
| | | | Pulau Libukang | 2,5 | 0,5 | |
| | | | Kel.Pantai Bahari | 3,5 | 3 | |
| | | | Kel.Punagayya | 2 | 1,5 | |
| | | Binamu | Kel.Pabiringa | - | 0,972 | |
| | | Tarowang | Desa Tiro | 1 | 0,6 | |
| | | | Desa bonto ujung | 2 | 1,8 | |
| | | | Desa Pao | 1,5 | 0,5 | |
| | | Tamalatea | Desa Bontosunggu | 4 | 0,35 | 2018 |
| | | | Desa Bontojai | 3,5 | 2,6 | 2009 |
| 16 | Pinrang | Mattiro Sompe | Langnga | 2,1 | 2,1 | 1985 |
| | | Cempa | Salipolo | 5 | 4 | 2014 |

*Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel, 2024*

Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vektor melalui air dan peningkatan suhu. Perubahan iklim yang terjadi, berkurangnya tutupan hutan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan mengakibatkan meningkatnya bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil kajian kementerian PPN/Bappenas, bencana hidrometeorologi yang terjadi selama kurun waktu 2020-2024 berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 544 Triliun Rupiah. Untuk itu diperlukan upaya intervensi kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sehingga dapat meminimalkan dampak perubahan iklim dan kerugian ekonomi serta meningkatkan ketahanan (resilience) akibat perubahan iklim.

Berdasarkan hasil kajian kerentanan multibahaya BPBD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa adanya potensi penduduk terpapar dan mengalami kerugian sebagai dampak dari bencana yang mengancam suatu wilayah. Hasil kajian menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luasan potensi multibahaya 3.922.664 Ha, dimana luasan sebaran potensi multibahaya tertinggi berada di Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Bone, dan Wajo. Potensi bahaya hasil kajian dengan tingkat tinggi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang, gelombang pasang dan abrasi, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tanah bergerak, tsunami, gempa bumi perlu untuk diwaspadai dan mendapatkan perhatian serius serta perlu adanya upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi. Meskipun demikian, tingkat bahaya dengan kelas sedang dan rendah juga bukan berarti tidak perlu diperhatikan dan diwaspadai.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten/Kota, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

**Tabel II. 13**

**Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**

| No. | Kabupaten/ Kota | Risiko Bencana | Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Makassar | Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Tsunami | Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo |
| 2 | Kota Parepare | Cuaca Ekstrim<br>Longsor<br>Kebakaran | Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung Sabbang. |
| 3 | Kota Palopo | Banjir<br>Longsor<br>Kebakaran<br>Kekeringan<br>Cuaca Ekstrim | Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wara Selatan, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana |
| 4 | Barru | Longsor<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kebakaran | Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo |
| 5 | Soppeng | Cuaca Ekstrim<br>Gempa<br>Banjir<br>Longsor | Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Keca<br>matan Marioriawa; |
| 6 | Wajo | Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Gempa | Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla |
| 7 | Sidenreng Rappang | Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Gempa | Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang |
| 8 | Enrekang | Longsor<br>Cuaca Ekstrim<br>Banjir<br>Kebakaran | Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja |
| 9 | Pinrang | Longsor<br>Cuaca Ekstrim<br>Banjir<br>Gempa | Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang |
| 10 | Toraja Utara | Longsor<br>Cuaca Ekstrim<br>Kebakaran | Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua |
| 11 | Tana Toraja | Longsor | Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. |

| No. | Kabupaten/ Kota | Risiko Bencana | Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana |
|---|---|---|---|
| | | Cuaca Ekstrim<br>Kebakaran | Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo |
| 12 | Luwu | Longsor<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Abrasi | Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong Selatan, Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli Barat, Kec. Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang Utara, Kec. Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa Utara, Kec. Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec. Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara |
| 13 | Luwu Utara | Banjir<br>Cuaca Ekstrim | Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta; |
| 14 | Luwu Timur | Kekeringan<br>Banjir<br>Longsor<br>Gempa Bumi | Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula |
| 15 | Gowa | Longsor<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kekeringan | Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao |
| 16 | Takalar | Tsunami<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim | Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang |
| 17 | Bantaeng | Longsor<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kekeringan | Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa |
| 18 | Bulukumba | Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kekeringan | Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale |
| 19 | Sinjai | Longsor<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kekeringan | Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan |
| 20 | Bone | Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kebakaran | Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge |
| 21 | Maros | Longsor<br>Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kekeringan | Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa |
| 22 | Pangkajene dan Kepulauan | Banjir<br>Cuaca Ekstrim<br>Kekeringan | Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne |
| 23 | Jeneponto | Banjir | Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu, Kec. |

| No. | Kabupaten/ Kota | Risiko Bencana | Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana |
|---|---|---|---|
| | | Cuaca Ekstrim | Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba |
| | | Angin Putting Beliung | |
| | | Kekeringan | |
| 24 | Kepulauan Selayar | Longsor | Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki |
| | | Banjir | |
| | | Tsunami | |
| | | Kebakaran | |

*Sumber: Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah Bappelitbangda Tahun 2025*

Dari segi dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana, baik jumlah korban hilang/Mati, Luka/Sakit/, dan mengungsi serta sarana yang terdampak akibat terjadinya bencana Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 14**
**Dampak Kejadian Bencana**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Jenis Bencana | Jumlah Kejadian | | | | | Korban Terdampak | | | | | Sarana Terdampak | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Banjir | 321 | 142 | 103 | 73 | 167 | 52637 | 89698 | 62.594 | 724 | 7.214 | 32.503 | 47.206 | 24.426 | 12.335 | 55.054 |
| Gelombang Pasang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tanah Longsor | 73 | 55 | 96 | 90 | 202 | 198 | 39 | 1201 | 122 | 1.570 | 132 | 72 | 658 | 131 | 247 |
| Tanah Bergerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Banjir Bandang | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 48476 | 283 | 117 | 0 | 0 | 9579 | 87 | 1849 | 15 | 905 |
| Cuaca Ekstrim | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 11 |
| Gempa Bumi | 5 | 3 | 135 | 5 | 18 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0 |
| Kebakaran | 54 | 93 | 202 | 350 | 239 | 179 | 469 | 1463 | 122 | 171 | 141 | 372 | 420 | 674 | 501 |
| Angin Kencang | 185 | 63 | 232 | 235 | 205 | 198 | 168 | 616 | 59 | 24 | 2394 | 329 | 1018 | 1.456 | 794 |
| Angin Puting Beliung | 51 | 73 | 64 | 41 | 27 | 253 | 720 | 973 | 10 | 66 | 413 | 566 | 560 | 352 | 253 |
| Abrasi | 7 | 5 | 10 | 7 | 13 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 226 | 0 | 310 | 3 | 11 |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kekeringan | 0 | 1 | 0 | 89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.475 |
| **Total** | **716** | **437** | **856** | **980** | **924** | **101.941** | **91397** | **67.493** | **1.040** | **9.086** | **45.388** | **48.633** | **30.586** | **14.966** | **59.254** |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024*

Pada kurun 5 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan secara signifikan khususnya dari tahun 2020 hingga 2023 dari 716 kejadian menjadi 980 kejadian, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan 56 kejadian dari tahun sebelumnya. Kejadian bencana tersebut meliputi 13 (tiga belas) jenis bencana yaitu, banjir, gelombang pasang, tanah longsor, tanah bergerak, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran, angin kencang, angin puting beliung, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, angin kencang, tanah longsor, dan kebakaran baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni bencana kebakaran, angin kencang, tanah longsor, banjir, kekeringan dan angin puting beliung yang disebabkan El Nino. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada wilayah Kabupaten Sinjai, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Dalam upaya memaksimalkan penanganan korban bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, diperlukan mitigasi bencana yang mencakup tiga tahapan yaitu sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana. Mitigasi sebelum bencana berupa kesiapsiagaan bencana, sedangkan saat bencana berupa evakuasi dan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Terkait dengan upaya penanganan pasca bencana telah dipetakan lokasi potensi relokasi pasca bencana untuk penanganan lebih lanjut sesuai arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK.

**Gambar II.8.**
**Peta Resiko Multi Bahaya Provinsi Sulawesi Selatan**

b. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko

Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Adapun capaian indeks ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 hingga 2024 selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II. 15**
**Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IKD Sulawesi Selatan** | N/A | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,42 |

*Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024*

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 0,06 namun di tahun 2023 dan 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02 dengan nilai 0,42 yang berada dalam kategori sedang. Capaian tersebut telah menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Selatan telah didukung oleh kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana yang terjadi.

Secara keseluruhan capaian indeks ketahanan daerah dan indeks resiko bencana pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tergambar pada grafik berikut.

**Grafik II.18**
**Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

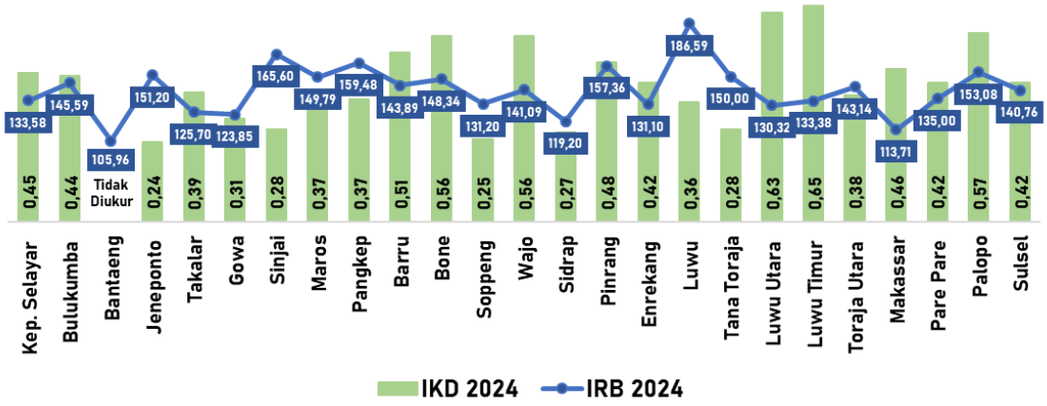


*Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah oleh Bappelitbangda Tahun 2025*

Grafik diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur dengan IKD tertinggi di Sulawesi Selatan mencapai nilai 0,65, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terbaik di Sulawesi Selatan dibanding kabupaten lainnya, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Jeneponto dengan nilai 0,24. Adapun capaian indeks resiko bencana menunjukkan bahwa terdapat 10 kabupaten yang memiliki kelas resiko bencana tinggi dengan skor indeks diatas 144, yaitu Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Maros, Pangkep, Bone, Pinrang, Luwu, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Sedangkan 14 kabupaten kota lainnya berada dalam kelas resiko bencana sedang. Secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kelas resiko sedang dengan nilai 140,76.

c. **Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).** Komitmen pemerintah daerah terkait pengurangan risiko bencana yang terjadi juga perlu memperhatikan dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan dampak dari peningkatan suhu bumi yang disebabkan tingginya tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) akibat deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil dan aktivitas lain yang mengemisikan GRK ke atmosfer. Untuk menekan tingkat emisi GRK, Pemerintah Indonesia telah menetapkan *enhanced Nationally Determined Contributions (eNDC)* untuk menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menindaklanjuti dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target tersebut dengan menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton $CO^2$ eq atau sebesar 5,6 persen terhadap nilai *Business as usual* (BAU). Target tersebut termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 dan menjadi salah satu indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja daerah, indikator potensi penurunan emisi GRK periode tahun 2020-2024 dapat tercapai setiap tahunnya, dengan rata-rata capaian diatas 100%, Capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 169% atau sebesar 3.079.000 ton $CO^2$eq dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan sebanyak 2.873 kegiatan. Keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain disebabkan oleh tingginya dukungan pemerintah kabupaten/kota, akademisi dan para pihak lainnya dalam pelaksanaan program/kegiatan dan aksi mitigasi yang berpotensi menurunkan emisi GRK baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam mengarusutamakan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan pembangunan daerah, berimplikasi pada meningkatnya penganggaran untuk program/kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK di sektor lahan dan hutan, pertanian, transportasi, energi, persampahan dan limbah serta laut dan pesisir.

Adapun capaian potensi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2024 selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

**Grafik II.19**

**Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024**

*Sumber: (Aplikasi Aksara) Tahun 2024 Data Diolah Bappelitbangda Provinsi*

Selain itu peran serta aktif pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi/kegiatan mitigasi melalui aplikasi

AKSARA menjadi kunci keberhasilan dan inovasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian target potensi penurunan emisi GRK. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim ini dilaksanakan oleh OPD teknis terkait sektor bersama Bappeda Bappelitbangda provinsi dan kabupaten/kota secara berkala sejak tahun 2019 hingga saat ini.

### 2.1.1.7 DEMOGRAFI

#### a. Kondisi Demografi Tahun 2020 – 2024

Kondisi demografi atau kependudukan di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk. Dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II. 16**
**Kondisi Demografi Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah penduduk | 9.073.509 | 9.156.860 | 9.260.090 | 9.362.290 | 9.463.390 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | 2,88 | 0,92 | 1,13 | 1,10 | 1,08 |
| Kepadatan penduduk per Km2 | 194 | 196 | 203 | 207 | 209 |
| Rasio Jenis Kelamin | 98,59 | 98,65 | 98,69 | 98,73 | 98,75 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, data direkapitulasi Bappelitbangda Tahun 2025*

1. **Laju Pertumbuhan Penduduk.** Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertambah sekitar 389.881 jiwa selama 5 (lima) tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun dari 2,88 di tahun 2020 menjadi 1,08 pada tahun 2024.

**Grafik II.20**
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

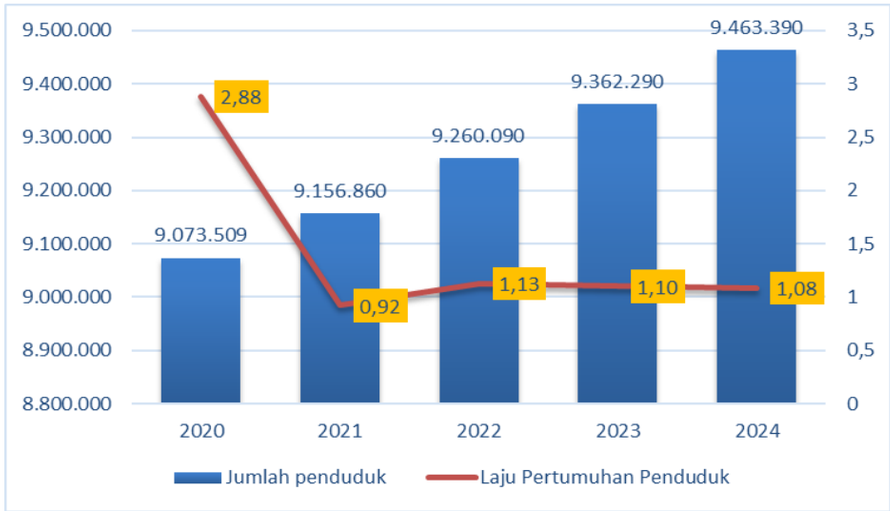


*Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah Bappelitbanga Tahun 2025*

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan di Sulawesi Selatan. BPS Provinsi Sulawesi Selatan mencatat rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2024 sebesar 44,78 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 45 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan beban yang lebih besar bagi populasi usia produktif, karena mereka perlu menyediakan dukungan bagi populasi yang lebih besar dari mereka yang tidak produktif secara ekonomi.

Berdasarkan struktur penduduk di Sulawesi Selatan, bonus demografi telah berlangsung antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahap ini, tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun.

**Grafik II.21**
**Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

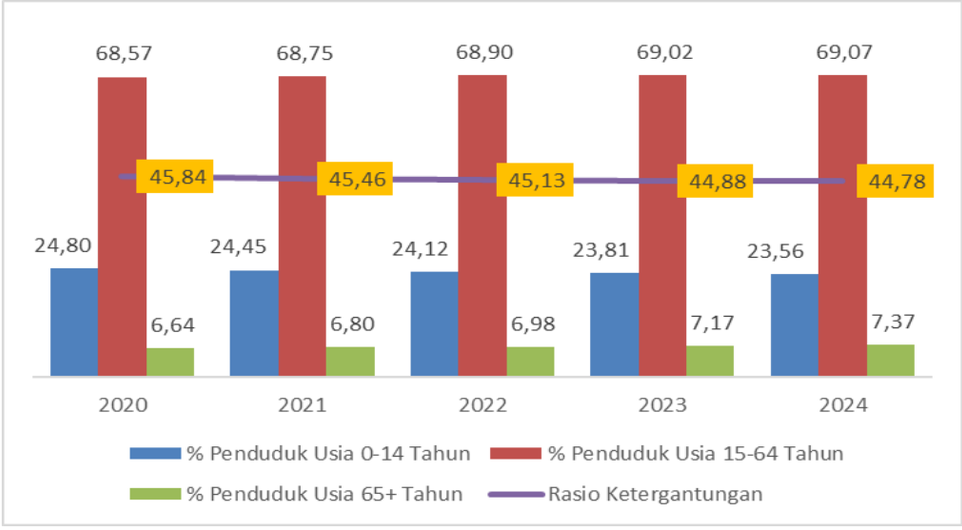


*Sumber : BPS, diolah Bappelitbangda Tahun 2025*

Struktur masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik yang beragam, dipengaruhi oleh keberagaman etnis, budaya, dan kondisi geografis. Rincian struktur penduduk mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kondisi penduduk dengan disabilitas. Angkatan kerja yang sehat dan berpendidikan merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi negara. Sementara tingginya tingkat disabilitas di Indonesia dapat menghambat pencapaian ini. Defenisi Penyandang Disabilitas yang merujuk pada Module UN Washington Group on Disability, dimana seseorang dikategorikan sebagai penduduk dengan disabilitas jika mengalami gradasi/tingkat gangguan sebagai berikut:

a. Mengalami gangguan disabilitas dan sama sekali tidak dapat beraktivitas ((tingkat disabilitas berat), yaitu jika seseorang sama sekali tidak mampu melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari walaupun menggunakan alat bantu dan tergantung penuh terhadap bantuan orang lain serta bergantung penuh pada tersedianya fasilitas khusus penduduk dengan disabilitas.
b. Mengalami disabilitas dan banyak kesulitan (tingkat disabilitas sedang), yaitu bila seseorang tidak mampu melakukan aktivitas atau kegiatan

sehari-hari dan tergantung penuh terhadap bantuan orang lain serta bergantung pada tersedianya fasilitas khusus penduduk dengan disabilitas. Keberadaan alat bantu hanya sedikit sekali membantu.

Hasil sensus penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 memperkirakan ada lebih dari 130 ribu penduduk dengan disabilitas atau 1,66% dari total jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas adalah penduduk dengan dengan disabilitas. Persentase penduduk dengan disabilitas terbanyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun). Secara gender, penduduk dengan disabilitas berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dari 9 jenis kesulitan, penduduk dengan disabilitas usia 5 hingga 14 tahun paling banyak mengalami gangguan bicara, sedangkan pada kelompok usia produktif dan lansia paling sering ditemukan yang mengalami gangguan perilaku atau emosional tingkat sedang dan berat. Lebih dari separuh penduduk dengan disabilitas belum seluruhnya memperoleh hak untuk mengakses pendidikan, namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil juga yang dapat menyelesaikan SMA atau tingkat yang lebih tinggi, serta dapat terserap dalam pasar tenaga kerja dan berkontribusi dalam ekonomi Sulawesi Selatan.

2. **Kepadatan Penduduk**. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 209 jiwa per Km2. Kepadatan penduduk tersebut tidak merata pada semua kabupaten/kota. Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Makassar sebanyak 8.282 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 45 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Makassar antara lain dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk dari kabupaten lain, faktor sosial dan ekonomi yang lebih memadai seperti kesempatan kerja, layanan pendidikan, pusat perdagangan, dan ketersediaan infrastuktur.

**Tabel II. 17**
**Kepadatan Penduduk Per Km2 Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Kab/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Kep. selayar | 101 | 102 | 118 | 122 | 123 |
| Kab. Bulukumba | 341 | 343 | 381 | 383 | 387 |
| Kab. Bantaeng | 497 | 501 | 507 | 520 | 525 |
| Kab. Jeneponto | 568 | 574 | 514 | 521 | 526 |
| Kab. Takalar | 531 | 537 | 556 | 563 | 571 |
| Kab. Gowa | 407 | 412 | 435 | 442 | 449 |
| Kab. Sinjai | 325 | 328 | 306 | 309 | 313 |
| Kab. Bone | 176 | 177 | 679 | 180 | 182 |
| Kab. Maros | 242 | 245 | 88 | 283 | 287 |
| Kab. Pangkajene dan kepulauan | 305 | 308 | 245 | 400 | 404 |
| Kab. Barru | 157 | 158 | 210 | 156 | 157 |
| Kab. Soppeng | 151 | 152 | 173 | 172 | 173 |
| Kab. Wajo | 151 | 152 | 146 | 148 | 149 |
| Kab. Sidenreng rappang | 170 | 171 | 182 | 179 | 181 |
| Kab. Pinrang | 206 | 208 | 220 | 221 | 224 |
| Kab. Enrekang | 126 | 128 | 127 | 130 | 132 |
| Kab. Luwu | 109 | 110 | 123 | 131 | 132 |

| Kab/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Tana toraja | 141 | 142 | 137 | 142 | 143 |
| Kab. Luwu utara | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| Kab. Luwu timur | 43 | 43 | 44 | 46 | 46 |
| Kab. Toraja utara | 215 | 218 | 225 | 212 | 215 |
| Kota Makassar | 7.142 | 7.195 | 8.119 | 8.227 | 8.282 |
| Kota Parepare | 1.525 | 1.544 | 1.738 | 1.767 | 1.795 |
| Kota Palopo | 730 | 739 | 757 | 705 | 716 |
| **Provinsi Sulawesi Selatan** | **194** | **196** | **203** | **207** | **209** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024*

3. **Rasio jenis kelamin** merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Umumnya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan struktur demografi yang seimbang atau tidak, sebagai akibat dari migrasi, perbedaan angka kematian dan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan, dan factor lainnya.

   Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 98,75 atau dengan kata lain terdapat sekitar 99 pria untuk setiap 100 perempuan, Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Toraja sebesar 106,82 dan terendah terdapat di Kabupaten Soppeng sebesar 93,78.

   Rasio penduduk menurut jenis kelamin ini menjadi dasar pengembangan kebijakan pembangunan yang responsive gender dengan memperhatikan peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dn manfaat pembangunan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan spesifik penduduk perempuan dan laki-laki.

**Tabel II. 18**
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Kab/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Kep. selayar | 96,35 | 96,48 | 96,55 | 96,60 | 96,65 |
| Kab. Bulukumba | 95,22 | 95,32 | 95,39 | 95,45 | 95,49 |
| Kab. Bantaeng | 97,86 | 97,85 | 97,80 | 97,75 | 97,68 |
| Kab. Jeneponto | 97,76 | 97,86 | 97,94 | 98,00 | 98,04 |
| Kab. Takalar | 95,51 | 95,66 | 95,78 | 95,87 | 95,95 |
| Kab. Gowa | 98,42 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 98,44 |
| Kab. Sinjai | 97,93 | 98,07 | 98,16 | 98,24 | 98,31 |
| Kab. Bone | 95,51 | 95,4 | 95,59 | 95,76 | 95,92 |
| Kab. Maros | 100,63 | 100,73 | 100,79 | 100,83 | 100,87 |
| Kab. Pangkajene dan kepulauan | 96,11 | 96,26 | 96,37 | 96,46 | 96,55 |
| Kab. Barru | 95,76 | 95,92 | 95,99 | 96,07 | 96,12 |
| Kab. Soppeng | 92,88 | 93,17 | 93,39 | 93,60 | 93,78 |
| Kab. Wajo | 94,37 | 94,52 | 94,62 | 94,70 | 94,78 |
| Kab. Sidenreng rappang | 98,03 | 98,1 | 98,12 | 98,14 | 98,16 |
| Kab. Pinrang | 97,53 | 97,77 | 97,82 | 97,86 | 97,89 |
| Kab. Enrekang | 103,69 | 103,61 | 103,48 | 103,32 | 103,17 |
| Kab. Luwu | 101,5 | 101,67 | 101,81 | 101,92 | 102,03 |

| Kab/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Tana toraja | 107,26 | 106,99 | 106,94 | 106,89 | 106,82 |
| Kab. Luwu utara | 102,14 | 102,04 | 101,91 | 101,78 | 101,64 |
| Kab. Luwu timur | 105,97 | 105,76 | 105,52 | 105,28 | 105,04 |
| Kab. Toraja utara | 104,37 | 104,33 | 104,24 | 104,14 | 104,04 |
| Kota Makassar | 99,19 | 99,22 | 99,19 | 99,16 | 99,13 |
| Kota Parepare | 98,32 | 98,47 | 98,56 | 98,68 | 98,76 |
| Kota Palopo | 100,22 | 100,43 | 100,56 | 100,69 | 100,81 |
| **Provinsi Sulawesi Selatan** | **98,59** | **98,65** | **98,69** | **98,73** | **98,75** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024*

### b. Proyeksi Demografi Tahun 2025 – 2030

Proyeksi demografi memberikan ukuran dan struktur umur penduduk Sulawesi Selatan di masa depan. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan skenario kebijakan. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, terdapat hasil perhitungan parameter penduduk Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II. 19**
**Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2030**

| Parameter | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PENDUDUK** | | | |
| Laki-Laki (000) | 4 494,33 | 4 751,88 | 4 985,06 |
| Perempuan (000) | 4 558,38 | 4 811,25 | 5 048,84 |
| Total (000) | 9 052,71 | 9 563,13 | 10 033,90 |
| *Sex Ratio* (%) | 98,59 | 98,77 | 98,74 |
| Komposisi Umur (%) | | | |
| 0–14 | 24,80 | 23,38 | 23,21 |
| 15–64 | 68,57 | 69,04 | 67,95 |
| 65+ | 6,63 | 7,59 | 8,84 |
| *Dependency Ratio* (%) | 45,84 | 44,85 | 47,17 |
| | | | |
| **FERTILITAS** | | | |
| *Total Fertility Rate* (TFR) | 2,22 | 2,15 | 2,10 |
| | | | |
| **MORTALITAS** | | | |
| *Infant Mortality Rate* (IMR) | 18,20 | 15,88 | 14,09 |

*Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, BPS*

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan mencapai 9,56 juta orang pada tahun 2025, 10,03 juta orang pada tahun 2030.

**Tabel II. 20**
**Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Hasil proyeksi Tahun 2025-2030**

| Penduduk Tahun 2024 (Jiwa) | Proyeksi Penduduk (Jiwa) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9.463.390 | 9.563.130 | 9.661.290 | 9.757.680 | 9.852.060 | 9.944.230 | 10.033.890 |

*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2024 diolah*

Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda. Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2020–2025 sebesar 1,10 persen secara bertahap melambat menjadi 0,97 persen pada periode 2025–2030.

Laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh TFR dan IMR yang diproyeksikan menurun dari tahun 2025 ke tahun 2030. TFR diproyeksikan turun menjadi 2,10 pada tahun 2030, dan IMR diproyeksikan turun hingga 14,09.

Proyeksi Penduduk menurut Umur yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan terjadi peningkatan penduduk di semua kelompok umur dari tahun 2025 hingga 2030 pada kisaran 4,21persen pada umur 0-14 tahun, 3,27 persen pada umur 15-64 tahun, dan 22,23 persen pada umur 65 tahun keatas.

Berdasarkan proyeksi penduduk BPS Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2030 diprediksi rasio ketergantungan di Sulawesi Selatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persentase penduduk usia lanjut dan usia 0-14 tahun, menjadi sebesar 47,17 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 47 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas pada tahun 2030.

**Grafik II.22**
**Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2030**

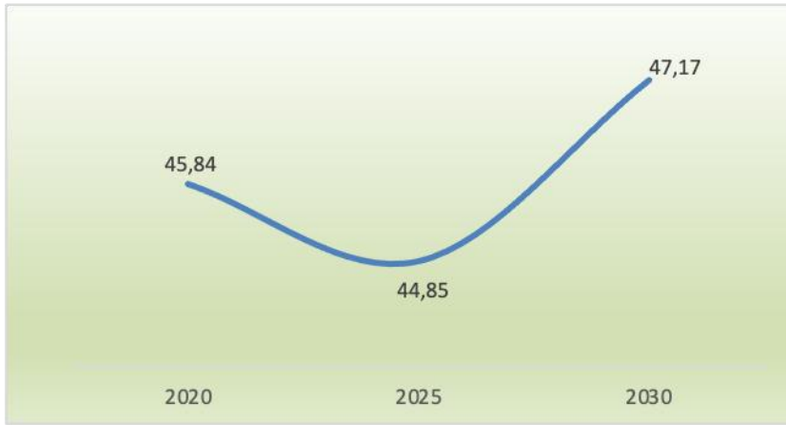


*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2024 diolah*

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk, dikarenakan luas wilayah yang bersifat tetap. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sebesar 45.330,55 $Km^2$ dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 9.463.390 jiwa, sehingga kepadatan penduduk Sulawesi Selatan

Tahun 2024 sebesar 209 jiwa/Km$^2$ dan diproyeksikan pada tahun 2030 menjadi sebesar 221 Jiwa/Km$^2$

**Tabel II. 21**
**Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2030**

| | 2024 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km$^2$) | Kepadatan (Jiwa/Km$^2$) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km$^2$) | Kepadatan (Jiwa/Km$^2$) |
| **Sulawesi Selatan** | 9.463.390 | 45.330,55 | 209 | 10.033.920 | 45.330,55 | 221 |

*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2024 diolah*

Memperhatikan proyeksi dan distribusi penduduk Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota, maka kepadatan penduduk di kota jauh lebih besar dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten.

**Tabel II. 22**
**Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2030**

| | 2024 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km$^2$) | Kepadatan (Jiwa/Km$^2$) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km$^2$) | Kepadatan (Jiwa/Km$^2$) |
| **Kabupaten** | 7.642.160 | 44.790,80 | 171 | 8.132.980 | 44.790,80 | 182 |
| **Kota** | 1.821.230 | 539,76 | 3.374 | 1.900.940 | 539,76 | 3.522 |

*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Bappenas 2024 diolah*

Rasio jenis kelamin Sulawesi Selatan tahun 2030 menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki laki dan jumlah penduduk wanita sebesar 98,74 yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 99 jiwa penduduk laki laki.

DiproyeksikanRasio jenis kelamin di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2030 menurun yang menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki laki yang dapat dipengaruhi oleh rata rata perkiraan Umur Harapan Hidup saat lahir perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dan/atau angka kematian bayi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian bayi laki-laki.

Ketersediaan data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender serta untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin perempuan dengan laki-laki.

**Tabel II. 23**
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030**

| Jenis Kelamin | Penduduk Tahun 2023 (jiwa) | Proyeksi Penduduk (Jiwa) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Laki-Laki | 4.651.190 | 4.751.880 | 4.800.820 | 4.848.720 | 4.895.470 | 4.940.960 | 4.985.060 |
| Perempuan | 4.711.120 | 4.811.250 | 4.860.470 | 4.908.960 | 4.956.590 | 5.003.270 | 5.048.840 |
| Jumlah Laki-laki dan Perempuan | 9.362.310 | 9.563.130 | 9.661.290 | 9.757.680 | 9.852.060 | 9.944.230 | 10.033.900 |
| Rasio | 98,73 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,75 | 98,74 |

*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, 2024*

### 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, serta kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Gambaran kondisi dari aspek kesejahteraan masyarakat ini dijelaskan sebagai berikut :

#### 2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Sulawesi Selatan dicerminkan dari kondisi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks gini,, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia.

**a. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Ketika nilai PDRB meningkat dari tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa suatu negara atau daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang baik mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan produktif, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan. Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kontribusi dari berbagai sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa keuangan, dan sektor lainnya. Masing-masing sektor memiliki peran berbeda dalam menyumbang terhadap total nilai tambah perekonomian daerah.

**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha provinsi Sulawesi Selatan** Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Sulawesi Selatan meningkat, dari 377,21 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 396,14 triliun rupiah pada tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar 18,93 triliun rupiah yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi di semua kategori lapangan

usaha. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Jasa Lainnya merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024, yakni sebesar 14,57 persen. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang disebabkan oleh dibukanya beberapa tempat destinasi wisata di Sulawesi Selatan meningkatkan pertumbuhan signifikan pada sektor ini. Selanjutnya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa pendidikan mengalami pertumbuhan tinggi yakni sebesar 13,62 persen dan 7,62 persen. Peningkatan realisasi belanja pemerintah mendorong tumbuhnya kedua kategori tersebut.

**Tabel II. 24**
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Lapangan Usaha | Nilai PDRB-ADHK (Miliar Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 66.139,90 | 70.357,80 | 72.162,73 | 72.226,30 | 75.166,74 |
| Pertambangan dan Penggalian | 17.330,64 | 17.228,08 | 17.283,69 | 19.639,35 | 20.128,46 |
| Industri Pengolahan | 42.781,92 | 44.075,32 | 48.363,16 | 50.444,82 | 52.887,14 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 318,67 | 353,30 | 405,21 | 440,17 | 446,58 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 394,15 | 410,19 | 436,78 | 449,62 | 471,67 |
| Konstruksi | 41.875,48 | 43.609,99 | 44.303,91 | 46.608,53 | 47.095,05 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 49.799,33 | 53.035,21 | 56.510,16 | 59.195,99 | 62.512,5 |
| Transportasi dan Pergudangan | 9.410,66 | 9.901,00 | 11.999,56 | 13.024,23 | 13.686,73 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.236,64 | 4.361,95 | 5.153,40 | 5.499,48 | 5.847,8 |
| Informasi dan Komunikasi | 25.869,89 | 27.522,34 | 28.966,31 | 30.953,15 | 33.096,88 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 11.457,58 | 11.587,74 | 11.720,73 | 12.061,83 | 12.847,78 |
| Real Estate | 11.703,74 | 12.005,49 | 12.468,89 | 13.094,38 | 13.887,13 |
| Jasa Perusahaan | 1.355,80 | 1.440,27 | 1.644,24 | 1.796,82 | 1.911,83 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 14.416,91 | 14.837,68 | 15.132,58 | 15.641,08 | 16.329,1 |
| Jasa Pendidikan | 19.465,08 | 20.178,62 | 20.750,36 | 21.329,67 | 22.955,66 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7.382,80 | 7.956,36 | 8.643,79 | 9.277,70 | 10.541,17 |
| Jasa Lainnya | 4.215,38 | 4.534,06 | 4.967,33 | 5.524,67 | 6.329,52 |
| **Total PDRB (ADHK)** | **328.154,57** | **343.395,41** | **360.912,82** | **377.207,78** | **396.141,74** |
| **PDB Nasional** | **10.722.999** | **11.120.060** | **11.710.248** | **12.301.394** | **12.920.300** |
| **Kontribusi PDRB Sulsel Terhadap PDB Nasional** | **3,06** | **3,09** | **3,08** | **3,07** | **3,07** |

*Sumber: BPS Sulsel, Badan Pusat Statistik 2020-2024, data diolah Bappelitbangda*

**Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.** Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 696,25 triliun rupiah atau meningkat sebesar 43,60 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar kategori lapangan usaha sekaligus adanya pengaruh perubahan harga. Sulawesi Selatan termasuk 10 besar provinsi yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi PDRB Sulawesi Selatan terhadap PDB Indonesia mencapai 3,15 persen.

Selama tahun 2020–2024, struktur ekonomi Sulawesi Selatan tidak mengalami pergeseran secara signifikan. Selama periode tersebut, struktur ekonomi Sulawesi Selatan didominasi oleh empat lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,84); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (14,80); Konstruksi (13,51); dan Industri Pengolahan (13,02). Keempat lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 63,17 persen terhadap total PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2024.

**Tabel II. 25**
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 109,46 | 122,83 | 133,92 | 141,55 | 152,05 |
| Pertambangan dan Galian | 23,54 | 25,9 | 30,88 | 33,49 | 31,69 |
| Industri Pengolahan | 64,32 | 68,09 | 78,00 | 83,86 | 90,66 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,500 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
| Konstruksi | 72,42 | 78,56 | 85,23 | 92,44 | 94,07 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 72,98 | 79,49 | 88,60 | 95,89 | 103,08 |
| Transportasi dan Pergudangan | 15,48 | 16,76 | 23,91 | 29,17 | 32,22 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,30 | 6,57 | 8,02 | 8,76 | 9,50 |
| Informasi dan Komunikasi | 28,31 | 30,3 | 32,35 | 34,92 | 37,62 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 18,91 | 19,79 | 21,67 | 23,01 | 24,96 |
| Real Estate | 19,21 | 19,75 | 21,12 | 22,52 | 24,35 |
| Jasa Perusahaan | 2,18 | 2,35 | 2,81 | 3,19 | 3,46 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 23,75 | 24,45 | 24,94 | 26,17 | 27,94 |
| Jasa Pendidikan | 28,24 | 29,21 | 30,61 | 32,01 | 35,05 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 11,64 | 12,8 | 14,05 | 15,35 | 17,81 |
| Jasa Lainnya | 6,48 | 7,07 | 8,05 | 9,21 | 10,65 |
| **Total Nilai PDRB (Triliun Rp)** | **504,05** | **544,86** | **605,18** | **652,65** | **696,25** |
| **PDB Nasional (Triliun Rp)** | 15.443,35 | 16.976,75 | 19.588,46 | 20.892,35 | **22.139** |
| **Kontribusi PDRB Sulsel Terhadap PDB Nasional** | 3,26 | **3,21** | **3,09** | **3,12** | **3,15** |

*Sumber: BPS Sulsel, Badan Pusat Statistik 2020-2024, data diolah Bappelitbangda*

Berdasarkan PDRB harga konstan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, Sulawesi Selatan tumbuh 0,70%, jauh di bawah nasional 2,07%. Namun, Sulawesi Selatan mengalami lonjakan pada 2021 menjadi 4,65%, melampaui nasional 3,69%. Tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan keduanya relatif stabil di kisaran 4,5–5,3%. Pada 2022–2024, angka pertumbuhan Sulawesi Selatan sedikit di bawah nasional, namun perbedaannya kecil dan keduanya cenderung meningkat secara konsisten, sebagai mana grafik berikut.

**Grafik II.23**
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**
**Tahun 2020-2024**

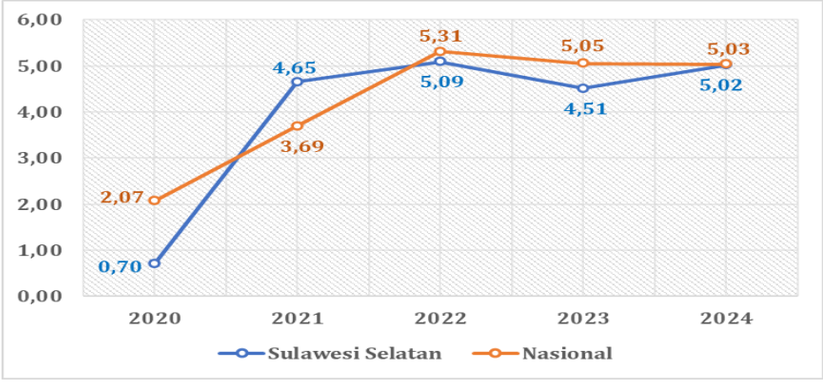


*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional*

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan sektor lapangan usaha selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai sektor. Pada tahun 2020, hampir seluruh sektor mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan ekonomi tercatat negatif sebesar -0,71%. Sektor Transportasi dan Pergudangan (-21,46%) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-13,68%) merupakan sektor yang paling terdampak, sejalan dengan pembatasan mobilitas masyarakat dan penurunan aktivitas pariwisata. Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,65%. Pemulihan ini ditopang oleh pertumbuhan positif di hampir seluruh sektor, terutama Transportasi dan Pergudangan (5,17%) serta Jasa lainnya (7,56%), yang sebelumnya mengalami kontraksi tajam. Industri Pengolahan dan Perdagangan juga mulai bangkit, masing-masing tumbuh 3,03% dan 6,5%.

Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi berlanjut dengan pertumbuhan sebesar 5,09%. Beberapa sektor mencatat pertumbuhan signifikan, seperti Transportasi dan Pergudangan (22,36%) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (17,84%), menandakan peningkatan aktivitas masyarakat dan sektor jasa. Sektor Jasa Perusahaan dan Industri Pengolahan juga tumbuh pesat, menunjukkan kebangkitan sektor produktif. Tahun 2023 menunjukkan sedikit perlambatan dengan pertumbuhan ekonomi 4,51%. Namun, beberapa sektor tetap tumbuh tinggi, seperti Pertambangan dan Penggalian (13,66%) dan Jasa lainnya (11,07%). Hal ini mengindikasikan pergeseran kontribusi dari sektor jasa dan sekunder ke sektor primer dan ekstraktif. Sektor Konstruksi dan Pengadaan Air mengalami perlambatan, menunjukkan perlunya perhatian pada sektor infrastruktur dan utilitas dasar. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,02%. Sektor Jasa masih menjadi motor penggerak, dengan Jasa lainnya tumbuh 14,57%, Jasa Kesehatan 13,62%, dan Jasa Pendidikan 7,62%. Peningkatan signifikan pada sektor-sektor ini mencerminkan peningkatan permintaan atas layanan publik dan sosial. Sektor Pertanian juga menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 4,07%, setelah sempat melambat pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, ekonomi Sulawesi Selatan berhasil bangkit dari tekanan pandemi dengan tren pertumbuhan positif dalam empat tahun terakhir. Namun, ketergantungan pada sektor jasa pasca-pandemi menimbulkan kerentanan struktural, terutama jika sektor-sektor tersebut terganggu. Sektor

Industri Pengolahan dan Pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, menandakan perlunya konsistensi kebijakan dan investasi pada sektor produktif.

Faktor penyebab utama pertumbuhan adalah relaksasi kebijakan pasca-pandemi, peningkatan mobilitas, dan investasi di sektor jasa. Sementara tantangan ke depan meliputi perlunya diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas sektor primer dan sekunder, serta peningkatan kualitas layanan publik untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor dan memperluas basis ekonomi agar tidak hanya bergantung pada sektor tertentu. Secara lengkap dapat dilihat pada table berikut

**Tabel II. 26**
**Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024**

| Kategori/Subkategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0.71 | 6.38 | 2.29 | 0.09 | 4,07 |
| Pertambangan dan Penggalian | 0.54 | -0.59 | 0.3 | 13.66 | 2,49 |
| Industri Pengolahan | -4.57 | 3.03 | 9.85 | 4.28 | 4,84 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 2.59 | 9.83 | 17.14 | 7.32 | 1,46 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.61 | 4.07 | 7.27 | 2.27 | 4,9 |
| Konstruksi | 1.56 | 4.14 | 1.58 | 5.21 | 1,04 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -3.07 | 6.5 | 6.55 | 4.74 | 5,6 |
| Transportasi dan Pergudangan | -21.46 | 5.17 | 22.36 | 8.5 | 5,09 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -13.68 | 2.96 | 17.84 | 6.42 | 6,33 |
| Informasi dan komunikasi | 10.84 | 6.39 | 5.26 | 6.83 | 6,93 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.43 | 1.14 | 1.14 | 2.9 | 6,52 |
| Real Estate | 3.79 | 2.58 | 3.87 | 4.97 | 6,05 |
| Jasa Perusahaan | -10.05 | 6.23 | 13.87 | 9.76 | 6,4 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | -0.04 | 2.92 | 1.97 | 3.37 | 4,4 |
| Jasa Pendidikan | 5.73 | 3.67 | 2.83 | 2.8 | 7,62 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10.06 | 7.77 | 8.59 | 7.41 | 13,62 |
| Jasa lainnya | -12.02 | 7.56 | 9.61 | 11.07 | 14,57 |
| **PERTUMBUHAN EKONOMI** | -0.71 | 4.65 | 5.09 | 4.51 | 5,02 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2020-2024, data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel*

Dari data-data PDRB di atas terlihat distribusi setiap sektor lapangan usaha secara lengkap pada table berikut:

**Tabel II. 27**
**Distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha**

| Kategori Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 21,72 | 22,54 | 22,13 | 21,69 | 21,84 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 4,67 | 4,75 | 5,1 | 5,13 | 4,55 |
| C. Industri Pengolahan | 12,76 | 12,5 | 12,89 | 12,85 | 13,02 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| F. Konstruksi | 14,37 | 14,42 | 14,08 | 14,17 | 13,51 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,48 | 14,59 | 14,64 | 14,69 | 14,8 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 3,07 | 3,08 | 3,95 | 4,47 | 4,63 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,25 | 1,21 | 1,32 | 1,34 | 1,36 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 5,62 | 5,56 | 5,35 | 5,35 | 5,4 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,75 | 3,63 | 3,58 | 3,53 | 3,59 |
| L. Real Estate | 3,81 | 3,62 | 3,49 | 3,45 | 3,5 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,5 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,71 | 4,49 | 4,12 | 4,01 | 4,01 |

| Kategori Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jasa Pendidikan | 5,6 | 5,36 | 5,06 | 4,91 | 5,03 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,31 | 2,35 | 2,32 | 2,35 | 2,56 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 1,29 | 1,3 | 1,33 | 1,41 | 1,53 |
| **Produk Domestik Regional Bruto** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2020-2024, data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel*

Struktur PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika kontribusi antar sektor yang mencerminkan arah perkembangan dan transformasi ekonomi daerah. Sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** secara konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB, meskipun terdapat fluktuasi, yakni dari 21,72% pada 2020, naik ke 22,54% (2021), lalu kembali turun menjadi 21,84% pada 2024. Sektor ini mencerminkan pentingnya ekonomi berbasis sumber daya alam di Sulawesi Selatan. **Perdagangan Besar dan Eceran** menjadi sektor kedua terbesar, menunjukkan tren kenaikan dari 14,48% (2020) menjadi 14,80% (2024), menandakan meningkatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang. Sektor **Industri Pengolahan** juga tumbuh dari 12,76% ke 13,02%, mengindikasikan penguatan sektor hilirisasi dan manufaktur, yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sektor **Konstruksi** yang sempat dominan justru mengalami penurunan kontribusi dari 14,42% (2021) menjadi 13,51% (2024), menunjukkan potensi perlambatan proyek infrastruktur atau realokasi anggaran pemerintah. Sebaliknya, **Transportasi dan Pergudangan** menunjukkan pertumbuhan pesat dari 3,07% (2020) menjadi 4,63% (2024), menandakan pulihnya mobilitas dan logistik pascapandemi. Sektor jasa lainnya seperti **Akomodasi dan Makan Minum**, **Kesehatan**, dan **Jasa Lainnya** juga mengalami peningkatan kontribusi, meskipun secara total masih tergolong kecil. Sedangkan sektor **Administrasi Pemerintahan** dan **Pendidikan** cenderung menurun, seiring dengan penyesuaian belanja pemerintah dan efisiensi anggaran.

Penurunan kontribusi sektor pertanian dan konstruksi menunjukkan adanya tantangan struktural. Di sektor pertanian, penurunan bisa disebabkan oleh cuaca ekstrem, konversi lahan, atau rendahnya inovasi teknologi pertanian. Sementara sektor konstruksi mungkin terdampak oleh penundaan proyek pemerintah atau penurunan investasi swasta. Kenaikan sektor industri pengolahan dan perdagangan mengindikasikan adanya pergeseran ekonomi ke sektor sekunder dan tersier, mencerminkan peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Hal ini juga diperkuat oleh pertumbuhan sektor transportasi yang menjadi penghubung rantai pasok antarwilayah.

Peningkatan sektor jasa, terutama kesehatan dan akomodasi, memperlihatkan respon terhadap kebutuhan pascapandemi serta bertumbuhnya sektor pariwisata dan sosial. Namun demikian, stagnasi di sektor informasi dan komunikasi menunjukkan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama di era digital. Secara umum, ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan pola diversifikasi yang membaik, namun masih tergantung pada sektor primer. Transformasi menuju ekonomi berbasis industri dan jasa perlu terus diperkuat melalui investasi, pengembangan SDM, dan infrastruktur pendukung.

Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren pertumbuhan

positif dalam lima tahun terakhir, dari Rp329,39 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp398,53 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan ekonomi secara agregat di tingkat provinsi, meskipun terdapat variasi kontribusi antar kabupaten/kota.

Secara deskriptif, **Kota Makassar** tetap menjadi pusat perekonomian utama dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB provinsi, yakni sekitar **36,71% pada tahun 2020** menjadi **37,13%** pada tahun 2024. Dominasi ini mengindikasikan peran Makassar sebagai pusat perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi utama di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bone dan Pangkep juga termasuk kontributor besar dengan distribusi masing-masing sekitar 6,7% dan 5,1%, stabil sepanjang tahun. Ini mencerminkan peran sektor pertanian dan industri pengolahan di wilayah tersebut. Kabupaten Gowa, Luwu Timur, dan Maros menyusul sebagai penyumbang signifikan lainnya dengan tren yang juga meningkat.

Di sisi lain, beberapa kabupaten seperti Kepulauan Selayar, Tana Toraja, dan Toraja Utara menunjukkan kontribusi relatif kecil terhadap total PDRB provinsi (di bawah 2%). Ini dapat menunjukkan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi lokal, baik dari segi infrastruktur, konektivitas, maupun basis sektor ekonomi yang terbatas.

Analisis diagnostik terhadap data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020–2024 menunjukkan sejumlah tantangan dan dinamika penting yang perlu dicermati untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pertama, terdapat ketimpangan kontribusi antarwilayah yang cukup signifikan. Kota Makassar secara konsisten menyumbang lebih dari 36% terhadap total PDRB provinsi, bahkan meningkat menjadi 37,13% pada tahun 2024. Ini menandakan dominasi ekonomi yang sangat besar dan memperlihatkan konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Kepulauan Selayar, Tana Toraja, dan Toraja Utara hanya menyumbang sekitar 1–1,5%, mengindikasikan masih rendahnya kapasitas ekonomi wilayah tersebut.

Kedua, meskipun secara umum seluruh wilayah mengalami pertumbuhan PDRB absolut yang positif, namun laju peningkatan kontribusi relatif tidak seragam. Beberapa kabupaten seperti Maros, Luwu Timur, dan Pinrang menunjukkan peningkatan nilai PDRB cukup tinggi, tetapi distribusinya terhadap total PDRB provinsi cenderung stagnan atau sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut belum cukup kuat untuk memperbaiki posisi relatifnya dalam struktur ekonomi provinsi.

Ketiga, terdapat indikasi bahwa struktur ekonomi di sebagian besar kabupaten masih bergantung pada sektor-sektor tradisional, seperti pertanian dan pertambangan, dengan nilai tambah yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum optimal dan kurang berkelanjutan.

Keempat, peran sektor industri pengolahan dan jasa modern masih terkonsentrasi di Makassar dan sekitarnya. Untuk mengurangi disparitas, dibutuhkan kebijakan afirmatif seperti pembangunan kawasan industri baru,

penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.

Dengan diagnosis ini, arah pembangunan ke depan perlu mengarah pada penguatan daya saing daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Sulawesi Selatan.

b. **Tingkat Kemiskinan, s**ecara umum, tren 2020–2024 **cenderung menurun** dari 8,72% menjadi 8,06%. Peningkatan sempat terjadi pada 2021 (kemungkinan efek pandemi Covid-19 yang meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi). Penurunan tajam pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya inflasi atau kenaikan biaya hidup minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Walaupun garis kemiskinan naik, persentase penduduk miskin justru menurun pada 2024. Artinya, pendapatan masyarakat berangsur lebih mampu mengikuti kenaikan biaya hidup.

Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021 dan 2023 menunjukkan peningkatan. Tahun 2024 terjadi penurunan besar hingga 52 ribu jiwa (dari 788,85 ribu ke 736,48 ribu). Hal ini bisa diartikan bahwa program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, atau penciptaan lapangan kerja cukup efektif pada tahun terakhir.

Secara keseluruhan, data menunjukkan perbaikan signifikan dalam kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Meskipun Garis Kemiskinan terus meningkat, persentase dan jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga mencapai titik terendah dalam periode 2020-2024. Ini bisa menjadi indikasi keberhasilan program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, meskipun tantangan terkait kenaikan biaya hidup masih ada. Untuk mempertahankan tren positif, Sulsel perlu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, pengendalian inflasi bahan pokok, serta program pemberdayaan ekonomi produktif.

**Tabel II. 28**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024**

| Persentase Penduduk Miskin - Maret (P0) (Persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulsel | 8,72 | 8,78 | 8,63 | 8,70 | 8,06 |
| Garis Kemiskinan Maret (Rp/Kap/ Bulan) | | | | | |
| Sulsel | 350.264 | 372.491 | 399.755 | 436.025 | 459.226 |
| Jumlah Penduduk Miskin - Maret (Ribu) | | | | | |
| Sulsel | 776,83 | 784,98 | 777,44 | 788,85 | 736,48 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulsel 2020-2024, data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel*

Beberapa kabupaten memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, capaian yang tertinggi di tahun 2024 Kabupaten Pangkajene Kepulauan (12,41%), Jeneponto (11,82%), Luwu (11,70%), Enrekang (11,25%), Enrekang (11,25%). Kemiskinan tinggi banyak terdapat di wilayah pesisir dan pegunungan.

Wilayah dengan Kemiskinan Rendah (di bawah rata-rata provinsi, <8,06% pada 2024) Makassar (4,97%), Sidrap (5,02%), Pare-pare (5,27%). Kota besar dan wilayah dengan

basis industri/perdagangan lebih rendah tingkat kemiskinannya dibanding wilayah pesisir/ agraris tradisional.

Berdasarkan data terlihat disparitas antar daerah cukup besar, Kota besar dengan basis industry/ perdagangan (Makassar, Parepare) jauh lebih rendah kemiskinannya dibanding daerah pesisir/ agraris (Pangkep, Jeneponto, Luwu, Enrekang).

**Tabel II. 29**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Nasionan/Provinsi/ Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin (P0) Maret | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bantaeng | 8,95 | 9,41 | 9,07 | 9,18 | 8,26 |
| Bone | 10,68 | 10,52 | 10,58 | 10,53 | 9,58 |
| Sinjai | 9,00 | 8,84 | 8,80 | 8,55 | 7,82 |
| Soppeng | 7,59 | 7,53 | 7,49 | 7,48 | 6,90 |
| Wajo | 6,95 | 6,46 | 6,57 | 6,73 | 6,47 |
| Sidrap | 5,05 | 5,04 | 5,11 | 5,74 | 5,02 |
| Gowa | 7,38 | 7,54 | 7,36 | 7,41 | 6,85 |
| Takalar | 8,44 | 8,25 | 8,25 | 8,29 | 7,75 |
| Jeneponto | 14,58 | 14,28 | 13,73 | 13,06 | 11,82 |
| Bulukumba | 7,10 | 7,43 | 7,39 | 7,22 | 6,71 |
| Kepulauan Selayar | 12,48 | 12,45 | 12,24 | 12,27 | 10,79 |
| Maros | 9,74 | 9,57 | 9,43 | 9,65 | 9,32 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 13,96 | 14,28 | 13,92 | 13,40 | 12,41 |
| Barru | 8,26 | 8,68 | 8,40 | 8,46 | 8,31 |
| Pinrang | 8,86 | 8,81 | 8,79 | 8,90 | 8,55 |
| Luwu | 12,65 | 12,53 | 12,49 | 12,71 | 11,70 |
| Luwu Utara | 13,41 | 13,59 | 13,22 | 12,66 | 11,24 |
| Luwu Timur | 6,85 | 6,94 | 6,81 | 6,93 | 6,55 |
| Enrekang | 12,17 | 12,47 | 12,39 | 12,69 | 11,25 |
| Tana Toraja | 12,10 | 12,27 | 12,18 | 12,48 | 10,79 |
| Toraja Utara | 12,01 | 11,99 | 11,65 | 12,12 | 10,73 |
| Makassar | 4,54 | 4,82 | 4,58 | 5,07 | 4,97 |
| Palopo | 7,85 | 8,14 | 7,78 | 7,69 | 7,35 |
| Parepare | 5,44 | 5,40 | 5,41 | 5,34 | 5,27 |
| Sulsel | 8,72 | 8,78 | 8,63 | 8,70 | 8,06 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulsel 2020-2024, data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel

Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara Indeks keparahan kemiskinan mencerminkan distribusi pengeluaran. Pada bulan maret sampai september tahun 2024, P1 turun dari 1,393 menjadi 1,384. Sedangkan P2 meningkat dari 0,341 menjadi 0,354. Kemiskinan lebih dalam dan parah di pedesaan dibandingkan perkotaan.

**Tabel II. 30**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan, Maret 2023 - September 2024**

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan | Total |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)** | | | |
| Maret 2023 | 0,712 | 2,310 | 1,566 |
| Maret 2024 | 0,758 | 1,964 | 1,393 |
| September 2024 | 0,863 | 1,862 | 1,384 |
| **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)** | | | |
| Maret 2023 | 0,163 | 0,621 | 0,408 |
| Maret 2024 | 0,165 | 0,499 | 0,341 |
| September 2024 | 0,238 | 0,461 | 0,354 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulsel 2023-2024, data diolah*

Jumlah Penduduk Miskin atau persentase Penduduk Miskin tahun 2020-2024 fluktuatif, Tahun 2020-2021 jumlahnya tinggi akibat Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan besar pada sektor ekonomi informal, pertanian, dan UMKM. Banyak rumah tangga jatuh miskin akibat kehilangan pekerjaan dan turunnya daya beli, Program bansos membantu menahan laju kenaikan, tapi belum cukup menurunkan angka P0. Tahun 2022 P0 menurun seiring dengan pemulihan ekonomi diberbagai sektor. Tahun 2023 Persentase Penduduk Miskin meningkat akibat terjadinya inflasi, harga harga kebutuhan pokok meningkat, terjadi gangguan produksi pertanian akibat cuaca ekstrim. Kenaikan P0 di tahun 2023 dibandingkan 2022 menandakan bahwa pemulihan ekonomi belum inklusif, dan kelompok rentan masih sangat sensitif terhadap guncangan harga dan iklim. Tahun 2024 Persentase Penduduk Miskin menurun menjadi 7,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena pemulihan ekonomi Sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal mulai pulih, perluasan dan efektivitas program perlindungan sosial.

Garis Kemiskinan (GK) adalah nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Data tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang semakin meningkat, mencerminkan beban hidup yang meningkat, terutama akibat inflasi pangan dan kebutuhan dasar non-makanan.

Implikasi Sosial-Ekonomi dari Kenaikan GK adalah Ambang Kemiskinan Lebih Tinggi. Rumah tangga yang sebelumnya nyaris miskin bisa tergelincir di bawah garis kemiskinan meski penghasilannya tetap. Meski jumlah penduduk miskin (P0) bisa turun, standar minimum kelayakan hidup terus naik sehingga dibutuhkan Kebijakan upah minimum, subsidi pangan, dan bansos yang lebih adaptif terhadap biaya hidup.

Dalam perspektif kemiskinan masyarakat nelayan, berdasarkan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dapat dijelaskan bahwa Jumlah nelayan miskin ekstrem pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 dimana pada tahun 2024 jumlah nelayan miskin ekstrem sebanyak 28.664 nelayan, sementara pada tahun 2023 mencapai 36.153 nelayan, penurunan ini dikarenakan adanya upaya pemerintah dengan melakukan intervensi dengan cara memberikan bantuan berupa sarana prasarana usaha perikanan tangkap kepada kelompok nelayan kecil berupa perahu 1-3 GT, mesin dan fasilitasi pemberian asuransi nelayan sebanyak 10.000 ribu pada tahun 2024.

**Grafik II.24**
**Jumlah Nelayan Miskin Ekstrem Tahun 2023-2024**

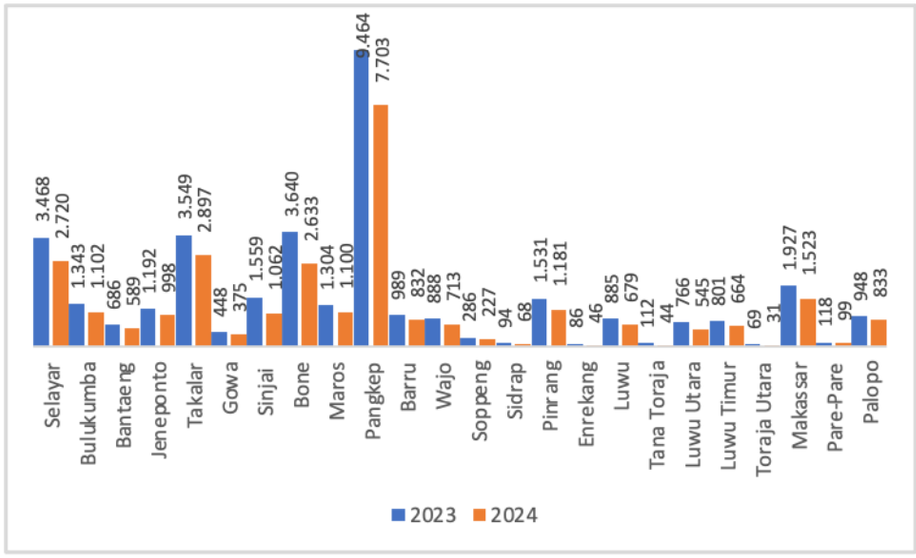


*Sumber : Data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2023-2024*

c. **PDRB per kapita,** adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduknya, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan perkapita diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, distribusi pendapatan, kebijakan fiskal dan moneter, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, kondisi infrastruktur, faktor demografis, dan kondisi politik dan keamanan. Faktor-faktor ini tidak selalu bekerja secara terpisah, tetapi seringkali saling berinteraksi dalam menentukan tingkat pendapatan per kapita.

PDRB Perkapita Sulawesi Selatan periode 2020-2024 terus meningkat, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar Rp 73,57 juta, lebih rendah jika dibandingkan PDB Nasional sebesar Rp 78,62 juta. Dalam lingkup regional Sulawesi pada Tahun 2024, posisi Sulawesi Selatan berada dibawah Sulawesi Tengah (Rp 120,75 juta).

**Tabel II. 31**
**PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024**

| PDRB/PDB PERKAPITA (juta rupiah) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Provinsi** | 55,68 | 59,50 | 65,35 | 69,71 | 73,57 |
| **Nasional** | 56,2 | 61,3 | 70,3 | 74,3 | 78,62* |
| **Nasional** | 3.854 USD | 4.287 USD | 4.731 USD | 4.876 USD | 4.960* USD |

*Sumber: BPS Sulsel, Badan Pusat Statistik 2020-2024, data diolah*

d. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan selalu berada di bawah rata-rata nasional selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT Sulsel tercatat 6,31%, lebih rendah dibanding nasional sebesar 7,07%. Tren ini terus berlanjut hingga 2024, di mana TPT Sulsel turun menjadi 4,19%, sementara nasional masih 4,91%. Hal ini mencerminkan kinerja positif daerah dalam menekan pengangguran, menunjukkan bahwa Sulsel relatif lebih berhasil dalam

menyerap tenaga kerja dibandingkan rata-rata nasional. TPT di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, yaitu penurunan angka pengangguran secara konsisten, meskipun terdapat sedikit fluktuasi antar kelompok jenis kelamin pada tahun-tahun tertentu. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana jumlah penduduk yang bekerja meningkat signifikan dari 4.006.620 orang pada tahun 2020 menjadi 4.680.928 orang pada tahun 2024. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah penganggur berkurang dari 269.817 menjadi 204.760 orang, meskipun secara jumlah sempat mengalami kenaikan kecil pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 TPT berjumlah 203.500 orang menjadi menjadi 204.760 orang pada tahun 2024.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki turun dari 6,68% pada tahun 2020 menjadi 3,76% pada tahun 2024. Penurunan ini cukup signifikan, menunjukkan bahwa lapangan kerja bagi laki-laki semakin terbuka, dengan peningkatan jumlah pekerja laki-laki dari 2.426.579 orang menjadi 2.836.724 orang selama periode tersebut. Sementara itu, TPT perempuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPT perempuan tercatat sebesar 5,74%, sempat menurun tajam menjadi 3,90% pada 2022, namun kemudian naik kembali menjadi 4,85% pada tahun 2024. Kenaikan TPT perempuan pada dua tahun terakhir dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang inklusif bagi perempuan, atau meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tanpa diiringi peningkatan lapangan pekerjaan yang setara.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di **perkotaan** tetap lebih tinggi dibandingkan **perdesaan**. TPT perkotaan menurun tipis dari **6,24 persen menjadi 6,20 persen**, sedangkan perdesaan turun dari **2,80 persen menjadi 2,44 persen**. Artinya, tantangan pengangguran di perkotaan masih relatif tinggi, meskipun terdapat penurunan, karena sektor informal dan padat karya di desa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Jika dilihat berdasarkan **pendidikan tertinggi yang ditamatkan**, pengangguran tertinggi secara konsisten terjadi pada lulusan **pendidikan menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK)**. Walaupun mengalami penurunan signifikan dari **7,44 persen menjadi 5,86 persen** (SMA), TPT SMK justru meningkat dari **6,99 persen menjadi 7,61 persen**. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK masih belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja, kemungkinan karena ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan industri. Yang paling mencolok adalah kenaikan drastis pengangguran pada lulusan **Diploma I/II/III**, dari **5,19 persen pada 2023** menjadi **9,01 persen pada 2024**, atau naik **3,82 poin**. Ini menjadi sinyal kuat bahwa program vokasi pada jenjang tersebut perlu dievaluasi, baik dari sisi kualitas, relevansi kurikulum, maupun koneksi dengan dunia kerja. Kenaikan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3), meskipun lebih moderat yaitu naik **0,47 poin**.

Sebaliknya, pengangguran pada penduduk dengan pendidikan rendah, seperti **SD ke bawah** dan **SMP**, terus menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh partisipasi mereka dalam sektor informal atau pekerjaan dengan keterampilan rendah yang tetap tersedia di masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan TPT di Sulawesi Selatan menunjukkan arah yang baik, terutama pada kelompok laki-laki, dengan semakin menurunnya

proporsi pengangguran. Namun, perhatian lebih perlu diberikan pada pengangguran perempuan yang menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang responsif terhadap gender sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 32**

**Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Tahun 2020 – 2024 (%)**

| No. | Karakteristik Pengangguran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** | 6,31 | 5,72 | 4,51 | 4,33 | 4,19 |
| 2 | **TPT Menurut Jenis Kelamin:** | | | | | |
| | - Laki-laki | 6,68 | 5,71 | 4,91 | 4,39 | 3,76 |
| | - Perempuan | 5,74 | 5,73 | 3,9 | 4,25 | 4,85 |
| 3 | **TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal:** | | | | | |
| | - Perkotaan | 10,39 | 9,59 | 7,84 | 6,24 | 6,2 |
| | - Perdesaan | 3,33 | 2,76 | 1,91 | 2,8 | 2,44 |
| 4 | **TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:** | | | | | |
| | - SD ke Bawah | 3,19 | 2,48 | 2,34 | 1,89 | 1,65 |
| | - Sekolah Menengah Pertama | 4,34 | 5,19 | 4,05 | 2,52 | 2,44 |
| | - Sekolah Menengah Atas | 10,83 | 8,64 | 8,19 | 7,44 | 5,86 |
| | - Sekolah Menengah Kejuruan | 10,96 | 11,34 | 6,04 | 6,99 | 7,61 |
| | - Diploma I/II/III | 7,54 | 6,66 | 3,15 | 5,19 | 9,01 |
| | - Diploma IV, S1, S2, S3 | 7,38 | 7,38 | 4,33 | 5,82 | 6,29 |

*Sumber: BPS 2020-2024 Data diolah*

Provinsi Sulsel secara umum berhasil menekan TPT dari 6,31% (2020) ke 4,19% (2024). Tantangan terbesar ada di kota-kota (Makassar, Palopo, Parepare) yang menghadapi urbanisasi dan persaingan kerja tinggi. Daerah basis pertanian dan perikanan (Sinjai, Enrekang, Bone, Selayar) relatif lebih baik dalam penyerapan tenaga kerja. Beberapa strategi yang dapat dilakukan : untuk kota besar perlu memperluas sektor industri kreatif, jasa, dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Pada wilayah Kabupaten dengan basis pertanian perlu ditingkatkan nilai tambah produk (agroindustri). Diperlukan pemerataan investasi agar tidak bterkonsentrasi hanya di kota.

**Tabel II. 33**

**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulsel Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kepulauan Selayar | 2.44 | 2.81 | 1.49 | 1.98 | 2.05 |
| Bulukumba | 3.42 | 3.14 | 1.26 | 1.31 | 2.23 |
| Bantaeng | 4.27 | 4.07 | 2.72 | 3.71 | 2.57 |
| Jeneponto | 2.31 | 2.38 | 2.21 | 2.13 | 2.47 |
| Takalar | 4.16 | 3.93 | 2.63 | 3.58 | 3.84 |
| Gowa | 6.44 | 4.3 | 3.26 | 3.43 | 3.91 |
| Sinjai | 2.65 | 2.61 | 1.8 | 1.69 | 1.52 |
| Maros | 6.28 | 6.3 | 5.04 | 3.64 | 4.34 |
| Pangkep | 5.18 | 5.86 | 5.23 | 5.05 | 3.99 |
| Barru | 6.39 | 6.74 | 5.32 | 5.89 | 6.42 |
| Bone | 3.2 | 4.15 | 2.27 | 2.88 | 2.28 |

| Kabupaten/Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Soppeng | 4.42 | 3.92 | 3.4 | 4.34 | 3.33 |
| Wajo | 4.33 | 4.32 | 2.54 | 2.1 | 2.31 |
| Sidrap | 5.91 | 4.93 | 3.56 | 3.29 | 3.02 |
| Pinrang | 4.19 | 4.06 | 2.79 | 3.64 | 3.12 |
| Enrekang | 2.44 | 2.34 | 0.58 | 1.53 | 1.51 |
| Luwu | 4.94 | 4.8 | 3.85 | 3.7 | 4.14 |
| Tana Toraja | 2.6 | 3.09 | 2.32 | 3.37 | 3.98 |
| Luwu Utara | 3.01 | 3.91 | 2.81 | 2.63 | 2.39 |
| Luwu Timur | 4.46 | 4.96 | 4.48 | 5.42 | 4.58 |
| Toraja Utara | 3.17 | 2.61 | 1.99 | 2.6 | 2.44 |
| Makassar | 15.92 | 13.18 | 11.82 | 10.6 | 9.71 |
| Pare Pare | 7.14 | 6.72 | 5.6 | 5.86 | 5.23 |
| Palopo | 10.37 | 8.83 | 8.2 | 7.81 | 7.64 |
| Sulsel | 6.31 | 5.72 | 4.51 | 4.33 | 4.19 |

*Sumber BPS Sulsel 2024, diolah*

g. **Gini Rasio** Sulawesi Selatan mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun, data per September 2024 tercatat sebesar 0,360. Jika di lihat menurut perdesaan dan perkotaan nampak bahwa kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesan. Hal ini dapat di lihat dari data per September 2024 dimana Gini Ratio di daerah perkotaan mencapai 0,369 dan di perdesaan hanya berkisar pada angka 0,330.

Dalam lingkup regional Sulawesi, Gini Ratio Sulawesi Selatan berada lebih rendah dibandingkan Gorontalo (0,413), Sulawesi Tenggara (0,365) dan lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Utara (0,347), Sulawesi Barat (0,330), Sulawesi Tengah (0,309) sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional (0,381) capaian Sulawesi Selatan lebih baik.

**Grafik II.25**
**Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**
**Tahun 2020-2024**

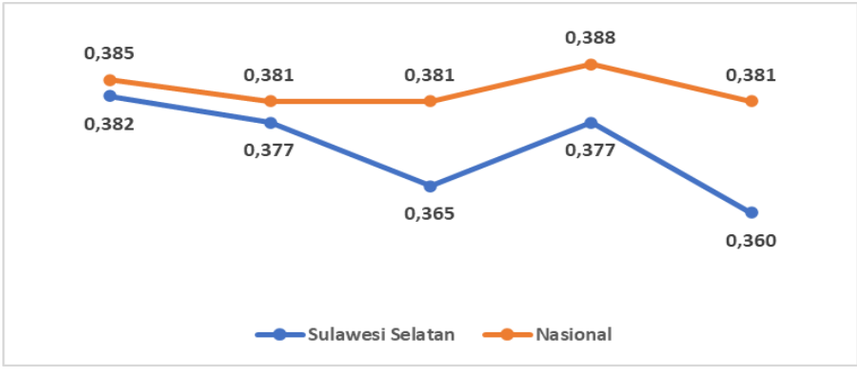


*Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024*

Ketimpangan pedapatan antar kelompok masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya gini ratio disebabkan oleh perbedaan upah, kepemilikan asset, atau akses terhadap pekerjaan produktif. Selain itu, aksess dan kualitas Pendidikan yang belum merata berpengaruh pula terhadap kesempatan atas pekerjaan yang layak dan distribusi pendapatan.

**h. Indeks Modal Manusia**

Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) adalah indikator yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kontribusi pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas ekonomi suatu negara. Indeks ini menunjukkan seberapa besar potensi ekonomi yang dapat dicapai oleh anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa dibandingkan dengan potensi maksimal mereka.. Indeks ini membantu negara menilai potensi ekonomi mereka berdasarkan kualitas sumber daya manusia dan mengidentifikasi area yang memerlukan investasi untuk meningkatkan hasil pembangunan manusia.

Komponen Utama Indeks Modal Manusia:

1. Tingkat kelangsungan hidup anak (probabilitas bertahan hidup sampai usia 5 tahun), yang diukur dengan *Survival Index*.
2. Lama sekolah yang disesuaikan dengan kualitas (jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dengan mempertimbangkan mutu pembelajaran), dan Hasil belajar yang disesuaikan (mengukur capaian belajar bukan hanya berdasarkan lama sekolah, tapi juga kualitas pendidikan), yang diukur dengan *School Index*.
3. Tingkat kelangsungan hidup dewasa muda (peluang bertahan hidup dari usia 15 hingga 60 tahun) dan Stunting (persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan), yang diukur dengan *Health Index*.

Data capaian IMM Provinsi Sulsel Tahun 2023 sebesar 0,51, berada pada urutan ke 24 dari 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023 sebagaimana gambar dibawah, capaian IMM Provinsi Sulawesi Selatan ini dikontribusi oleh capaian Survival Index sebesar 0,98, School Index sebesar 0,57, dan Health Index sebesar 0,91. Indeks ini merupakan alat ukur yang baru digunakan di seluruh Provinsi Indonesia mulai tahun 2025, sehingga tahun 2020-2024 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Grafik II.26**
**Capaian IMM Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Komponennya Tahun 2023**

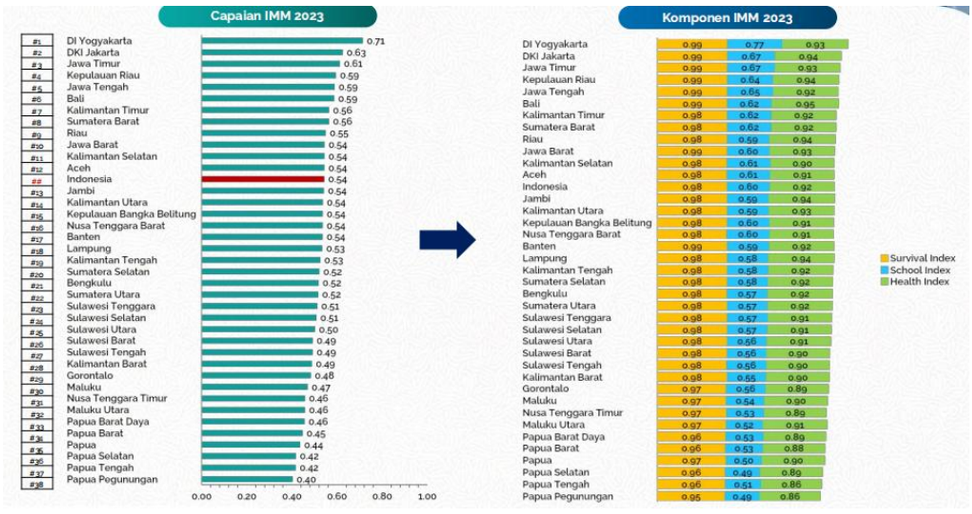


*Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2024*

**i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

IPM mengukur tiga dimensi utama:

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat: Diukur melalui angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan: Diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
3. Standar Hidup Layak: Diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun IPM dan HCI memiliki perbedaan dalam komponen dan metode pengukuran, keduanya sama-sama bertujuan menilai kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 75,18 (menggunakan UHH hasil SP2020 LF), meningkat 0,58 poin (0,78%) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,60). Capaian ini termasuk kategori tinggi, karena berada pada rentang nilai 70≤IPM<80. Selama 2020-2024, IPM meningkat antara 0,3-0,64 poin atau rata-rata 0,71 persen per tahun.

**Grafik II.27**
**Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024**

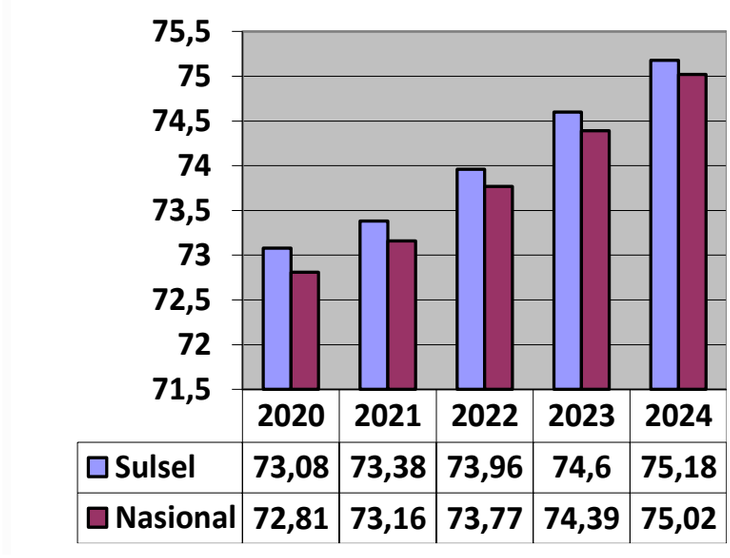


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulsel | 73,08 | 73,38 | 73,96 | 74,6 | 75,18 |
| Nasional | 72,81 | 73,16 | 73,77 | 74,39 | 75,02 |

*Sumber: Berita Resmi Statistik-BPS Tahun 2024*

Dalam lingkup regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Capaian IPM Sulawesi Utara di tahun 2024 sebesar 75,68, lebih tinggi 0,50 poin dibandingkan IPM Sulawesi Selatan. Apabila dibandingkan dengan IPM Sulawesi Barat terlihat adanya perbedaannya yang cukup besar yaitu 5,22 poin lebih tinggi. Peningkatan pada tahun ini membuat status pembangunan manusia di Pulau Sulawesi berada pada level yang sama, karena IPM Provinsi Sulawesi Barat telah berubah statusnya dari yang semula "sedang" menjadi "tinggi" di tahun 2024. Perbedaan capaian IPM di pulau Sulawesi disebabkan oleh perbedaan capaian masing-masing komponen pembentuknya. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terdapat beberapa komponen seperti Pengeluaran Rill per Kapita yang Disesuaikan dan Harapan Lama Sekolah yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Capaian IPM Sulsel tahun 2020-2024 lebih tinggi. Peningkatan IPM Sulawesi Selatan 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak.

**Tabel II. 34**
**IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2024**

| Provinsi | UHH LF SP2020 (Tahun) | HLS (Tahun) | RLS (Tahun) | Pengeluaran Rill Per Kapita (Ribu Rupiah PPP) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sulawesi Utara | 74,08 | 12,97 | 9,84 | 11.998 | 75,68 |
| Sulawesi Tengah | 70,84 | 13,34 | 9,04 | 10.536 | 72,24 |
| Sulawesi Selatan | 73,83 | 13,55 | 8,86 | 12.275 | 75,18 |
| Sulawesi Tenggara | 71,88 | 13,71 | 9,42 | 10.606 | 73,62 |
| Gorontalo | 70,73 | 13,17 | 8,29 | 11.539 | 72,01 |
| Sulawesi Barat | 71,03 | 12,89 | 8,15 | 10.208 | 70,46 |
| **Indonesia** | **74,15** | **13,21** | **8,85** | **12.341** | **75,02** |

*Sumber: Berita Resmi Statistik-BPS Tahun 2024*

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat dari 11.841 (ribu) pada tahun 2023 menjadi 12.275 (ribu) tahun 2024, meningkat 434 ribu rupiah atau meningkat dari 3,60 persen menjadi 3,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,83 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,31 persen menjadi 0,27 persen.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,54 tahun menjadi 13,55 tahun, pertumbuhannya masih sama seperti tahun lalu sebesar 0,07 persen. Untuk rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 8,76 tahun menjadi 8,86 tahun pada 2024, tetapi pertumbuhannya lambat dari 1,51 persen menjadi menjadi 1,14 persen.

**Tabel II. 35**
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulsel Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024**

| Komponen | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **Umur Panjang dan Hidup Sehat** | | | | | | |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 73,02 | 73,11 | 73,40 | 73,63 | 73,83 |
| **Pengetahuan** | | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,45 | 13,52 | 13,53 | 13,54 | 13,55 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,38 | 8,46 | 8,63 | 8,76 | 8,86 |
| **Standar Hidup Layak** | | | | | | |
| Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) | Rp 000 | 11.079 | 11.184 | 11.430 | 11.841 | 12.275 |
| **IPM** | | **73,08** | **73,38** | **73,96** | **74.60** | **75,18** |

*Sumber: Berita Resmi Statistik-BPS, IPM Sulsel Tahun 2024*

### 2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

Gambaran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan, selain dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi, juga dilihat dari kondisi Kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 75,18, meningkat 0,58 poin (0,78 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,60). Selama 2020-2024, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun Peningkatan IPM pada tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan di sektor kesehatan terutama terkait dengan akses terhadap sanitasi dasar dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Upaya peningkatan akses sanitasi yang layak tetap diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, masalah gizi pada balita, seperti stunting dan wasting, masih menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah terus berupaya menurunkan prevalensi masalah gizi melalui berbagai program intervensi gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Provinsi Sulawesi Selatan meskipun secara keseluruhan terdapat kemajuan dalam beberapa indikator Kesehatan, masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk terus meningkatkan derajat kesehatan di wilayah ini. Kondisi kesehatan masyarakat seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu, prevalensi stunting, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Gambaran kondisi kesehatan di Sulawesi Selatan diwakili oleh beberapa indikator dengan capaian dari tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II. 36**

**Capaian Indikator Bidang Kesehatan**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| UHH Provinsi (Thn) | 73,02 | 73,11 | 73,40 | 73,63 | 73,83 |
| UHH Laki-laki (Thn) | 71,02 | 71,08 | 71,27 | 71,41 | 71,55 |
| UHH Perempuan (Thn) | 75,12 | 75,25 | 75,64 | 75,96 | 76,23 |
| Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | 86 | 129 | 119 | 133 | 134 |
| Prevalensi Stunting pada Balita (%) | N/A | 27,4 | 27,2 | 27,4 | 23,30 |
| Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 40,0 | 48,8 | 60,1 | 57,7 | 66,6 |
| Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | 87 | 87 | 86 | 83 | N/A |
| Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 86,48 | 92,97 | 97,03 | 101,19 | 100,51 |

*Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024, data diolah*

a. **Umur Harapan Hidup**. Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup**,** selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* didefinisikan sebagai rata-rata

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,83 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

**Grafik II.28**
**Umur Harapan Hidup**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

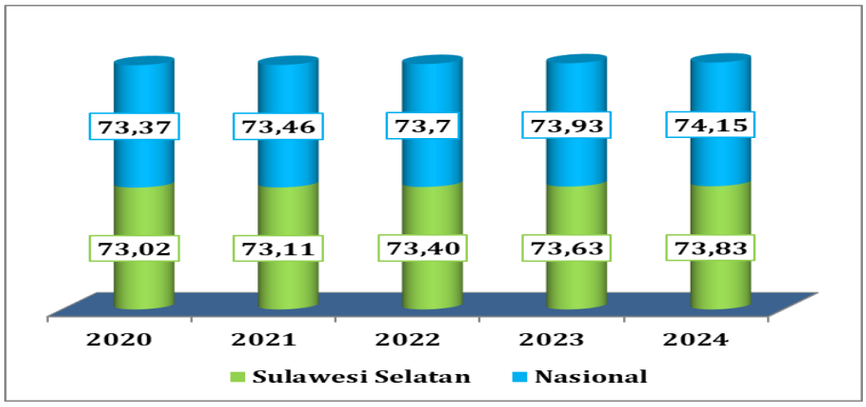


*Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024*

UHH penduduk perempuan sebesar 76,23 lebih tinggi dibandingkan UHH penduduk laki-laki yang hanya sebesar 71,55. Penting untuk dicatat bahwa umur harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan dapat mencerminkan perbaikan secara keseluruhan dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka, tetapi juga dapat menyoroti kesenjangan kesehatan antara jenis kelamin yang memerlukan perhatian dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat dan program intervensi yang lebih baik..

**Grafik II.29**
**Umur Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

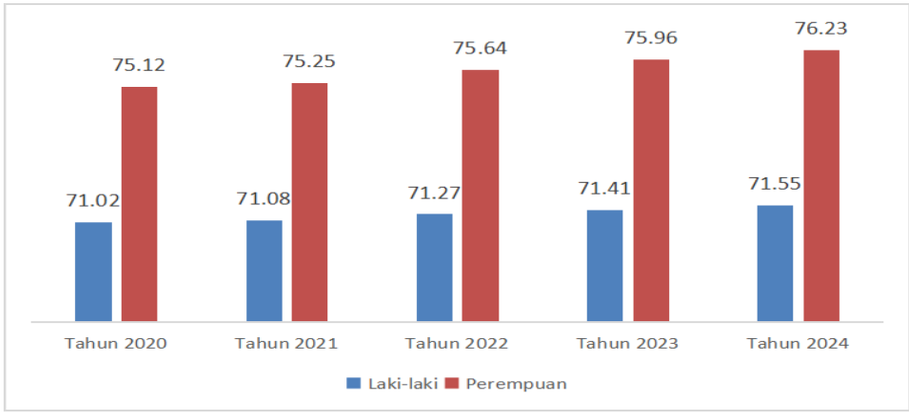


*Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024*

b. **Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)** merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan maternal dalam suatu wilayah. Tingginya AKI dapat mencerminkan beberapa kondisi atau masalah dalam sistem pelayanan kesehatan dan kondisi masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas termasuk pelayanan kegawatdaruratan, kualitas perawatan kesehatan, faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, kesehatan umum

populasi termasuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular serta akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan gizi yang memadai, serta efektivitas pengaturan kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan.

Menurunkan jumlah kematian ibu merupakan salah satu target utama dari target pembangunan berkelanjutan (SDGs-Sustainable Development Goals). Sensus Penduduk 2020 memberikan informasi bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki AKI sebesar 192 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari angka nasional yang berada di angka 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Hasil SP 2020 juga menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan kematian ibu di pedesaan yang jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yakni 67,06 persen banding 32,94 persen. Angka kematian ibu (AKI) di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 133 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kasus kematian ibu sebesar 184. Perhitungan angka kematian ibu (AKI) di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebesar 134 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kasus kematian ibu sebesar 172.

Ketimpangan kematian ibu yang terjadi di pedesaan atau wilayah sulit akses dan perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ketersediaan tenaga kesehatan, sarana/prasarana deteksi dini, dan penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang masih kurang dan rendahnya kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan ketika terjadi komplikasi persalinan atau darurat medis, sedangkan di perkotaan memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang banyak. SP 2020 mencatat sebesar 57 persen kematian maternal dialami oleh rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan terakhirnya pendidikan dasar. Pembangunan kualitas remaja menjadi isu penting dikarenakan berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2021, persentase perempuan berumur dibawah 19 tahun yang pernah melahirkan di Sulawesi Selatan (23,35 persen) lebih tinggi dari nasional (21,36 persen). Tingkat fertilitas remaja yang tinggi tidak hanya berakibat pada aspek fisik namun juga pada aspek sosial. Berbagai penelitian terkait fertilitas remaja menyebutkan bahwa tingkat fertilitas yang tinggi akan berakibat pada peningkatan angka kematian ibu, tingkat pendidikan yang rendah, dan meningkatkan kemiskinan (UNFPA, 2022).

**Grafik II.30**
**Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

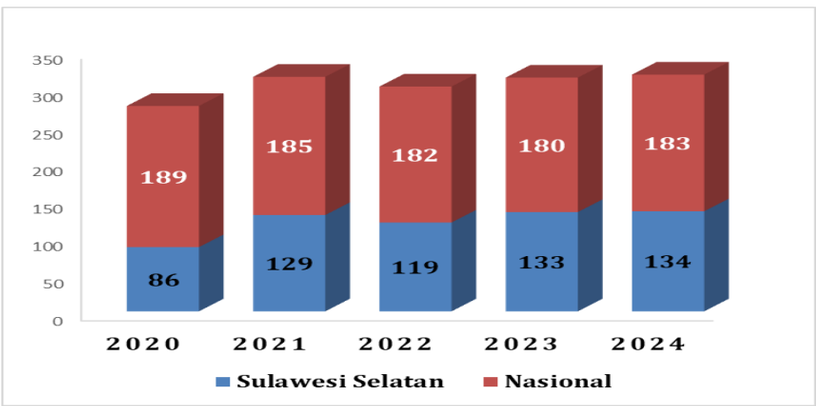


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024*

c. **Prevalensi Stunting** menjadi indikator untuk memperoleh gambaran kesejahteraan sosial masyarakat**.** Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan gambaran status gizi balita (*stunting, wasting, underweight, overweight*) yang

determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Meskipun prevalensi stunting menurun, tapi terbilang masih cukup lambat. 2 tahun terakhir hanya turun 0,20 persen. Angka ini juga masih diatas rata-rata nasional (21,60) persen dan jika bandingkan dengan provinsi lainnya pada regional Sulawesi masih lebih tinggi dari Gorontalo (23,80) persen dan Sulawesi Utara (20,50) persen. Tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 23,30%. Meskipun demikian angka ini masih tinggi dan berada diatas rata-rata nasional (19,8%).

Beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit. Kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi yang berulang bagi bayi, baduta hingga balita. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata.

**Tabel II. 37**

**Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (%) Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2019/2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulsel | 30 | 27,40 | 27,20 | 27,40 | 23,30 |
| Nasional | 27,70 | 24,40 | 21,60 | 21,50 | 19,8 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, SKI 2023, SSGI 2024*

Prevalensi stunting dipengaruhi pula oleh seberapa besar upaya penanganan wasting dan underweight. Wasting dan underweight merupakan indikator penting dalam status gizi anak balita yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat berkontribusi pada terjadinya stunting. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa prevalensi wasting mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2021, prevalensi berada di angka 6,2%, meningkat tajam menjadi 8,3% pada 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 9,1%. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 8%. Peningkatan wasting pada 2022 dan 2023 disebabkan oleh beberapa faktor seperti; Masih rendahnya cakupan pelayanan gizi spesifik dan sensitif, Kurangnya akses terhadap pangan bergizi dan air bersih, Tingginya angka penyakit infeksi seperti diare dan ISPA pada balita, dan Dampak sisa pandemi COVID-19 yang mengganggu pelayanan kesehatan dasar dan menurunkan ketahanan pangan keluarga. Penurunan pada 2024 dapat menjadi indikasi bahwa beberapa intervensi seperti peningkatan program pemberian makanan tambahan (PMT), penyuluhan gizi, serta perbaikan sanitasi mulai menunjukkan hasil, meskipun capaian tersebut belum optimal.

Sementara itu, underweight juga menunjukkan pola perubahan yang dinamis. Dari 2,9% pada 2021, angka ini sedikit menurun menjadi 2,7% di tahun 2022, lalu meningkat cukup signifikan menjadi 3,9% pada 2023 sebelum kembali menurun ke angka 3% pada 2024. Naik turunnya angka underweight dapat dihubungkan dengan kondisi ekonomi rumah tangga terutama di wilayah kumuh dan miskin, kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi seimbang, serta kurangnya

pemantauan tumbuh kembang secara berkala di posyandu. Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penanganan, prevalensi wasting dan underweight masih menjadi tantangan serius yang dapat memperburuk angka stunting. Terlebih, stunting sendiri berada pada angka tinggi meskipun menunjukkan penurunan signifikan dari 27,4% (2021–2023) menjadi 23,3% pada tahun 2024. Selain permasalahan kekurangan gizi, masalah gizi lebih (overweight) juga perlu mendapat perhatian. Prevalensi overweight yang sempat meningkat dari 2,9% (2021) ke 3,9% (2023) kemudian turun ke 3% pada 2024, menunjukkan bahwa pola konsumsi yang tidak seimbang juga mulai memengaruhi balita di wilayah ini.

**Grafik II.31**
**Prevalensi Stunting, Underweight, Wasting Dan Overweight**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024**

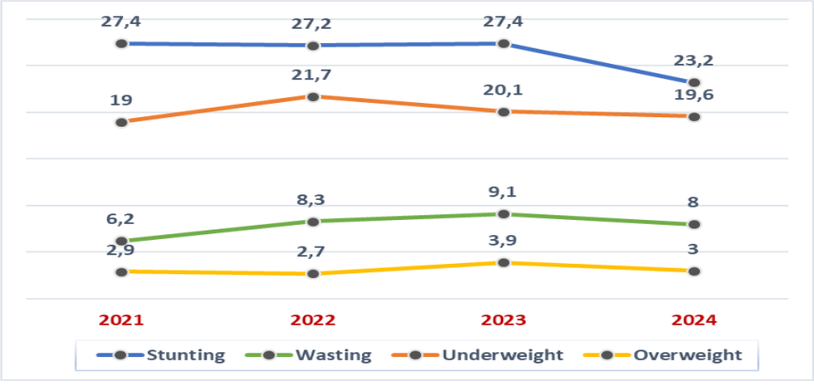


*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2024*

Faktor utama yang menjadi penyebab stunting adalah buruknya asupan gizi dan rendahnya status kesehatan. Pemicu dari kedua faktor penyebab stunting ini adalah: praktek pengasuhan anak yang kurang baik; tidak tersedianya makanan bergizi bagi rumah tangga, Belum optimalnya layanan kesehatan untuk ibu terutama selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk balita serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

d. **Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** dilakukan melalui program DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) yaitu pendekatan terstandar dalam pengobatan tuberkulosis (TB) yang direkomendasikan oleh WHO. Program penanggulangan TBC memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima pengobatan yang tepat dan diawasi dengan baik melalui pendekatan DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Program ini menitikberatkan pada deteksi aktif, diagnosis, serta penanganan kasus TBC secara menyeluruh dan terintegrasi.

Berdasarkan data grafik, jumlah kasus TBC yang ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah notifikasi kasus TBC meningkat dari 12.419 kasus pada tahun 2020 menjadi 30.322 kasus pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, persentase Treatment Coverage (TC) atau cakupan penemuan kasus juga mengalami peningkatan dari 40% pada 2020 menjadi 66,6% pada 2024. Secara rinci, TC meningkat dari 40% (2020), menjadi 48,8% (2021), lalu melonjak ke 60,1% pada 2022. Namun, pada tahun 2023 sempat menurun menjadi 58% meskipun jumlah kasus TBC yang ditemukan meningkat menjadi 27.321 kasus. Penurunan ini terjadi di tengah peningkatan estimasi jumlah kasus TBC nasional, sehingga target estimasi untuk Sulawesi Selatan turut meningkat menjadi 47.075 kasus. Hal ini

menyebabkan masih terdapat 42% kasus yang belum ternotifikasi, yang diduga berasal dari pasien yang belum terjangkau, belum terdeteksi, atau tidak terlaporkan terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta seperti rumah sakit, klinik, dan Tenaga Pelaksana Mandiri Dokter (TPMD).

Pada tahun 2024, performa program kembali menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya TC menjadi 66,6% dan jumlah kasus yang ditemukan naik menjadi 30.322 kasus. Peningkatan ini merupakan indikasi bahwa program DOTS mulai kembali berada di jalur yang benar dalam mengendalikan penyebaran TBC di Sulawesi Selatan.

**Grafik II.32**
**Cakupan Penemuan Kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

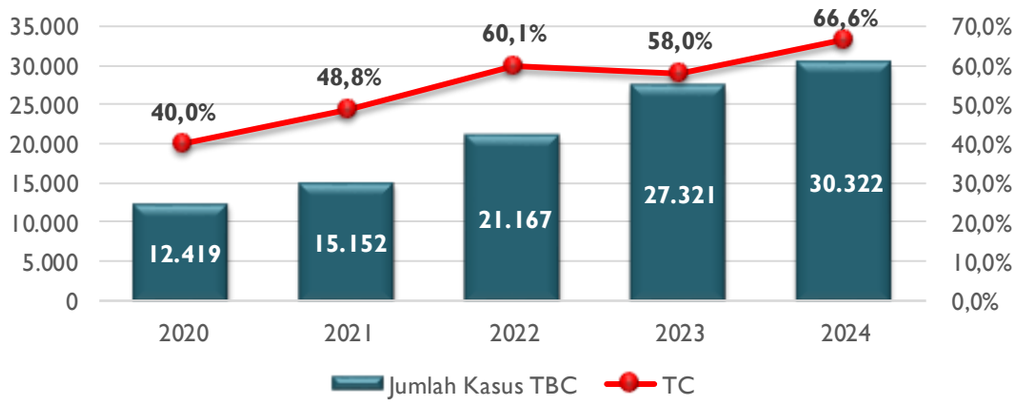


*Sumber Data : Sistem Informasi Tuberkulosis, 2024*

Cakupan Penemuan Kasus TBC berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan upaya deteksi dan pelaporan kasus TBC di sejumlah wilayah. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa 3 Kota di Sulawesi Selatan telah melampaui target nasional ≥90%, yaitu: Kota Palopo (144%), Makassar (127%), dan Parepare (121%). Keempat wilayah tersebut masuk dalam kategori hijau, yang menandakan kinerja optimal dalam pelaksanaan program penemuan dan notifikasi kasus TBC sesuai target nasional sebesar 90%. Selain itu, terdapat 10 Kabupaten yang masuk dalam kategori kuning, yaitu daerah dengan cakupan antara 50% hingga <90%, yakni: Kabupaten Bantaeng (89%), Takalar (78%), Pangkep (65), Kep. Selayar (65%), Gowa (64%), Wajo (64%), dan Jeneponto (55%), Maros (54%), Barru (51%) dan Sinjai (51%). Sementara itu, 11 kabupaten lainnya masih berada di bawah 50% (kategori merah) dan memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan cakupan penemuan kasus. Tiga wilayah dengan capaian terendah pada tahun 2024 adalah: Kabupaten Toraja Utara (32%), Enrekang (29%), dan Tana Toraja (24%).

**Grafik II.33**
**Cakupan Penemuan Kasus TBC berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024**

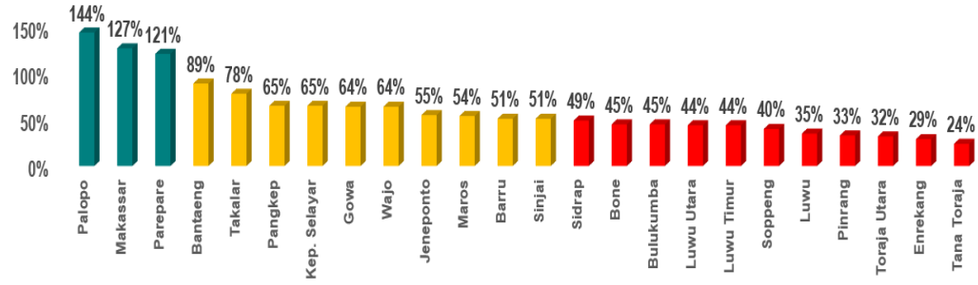


*Sumber : Sistem Informasi Tuberkulosis, 2024*

Penemuan Kasus TBC berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024 menunjukkan adanya variasi kinerja antarwilayah yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Peningkatan cakupan penemuan kasus di beberapa kota seperti Kota Palopo, Kota Makassar, dan Kota Parepare mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program deteksi dan notifikasi kasus TBC. Keberhasilan ini umumnya didukung oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas sumber daya kesehatan yang memadai, tersedianya fasilitas layanan TBC yang lengkap, pelibatan aktif fasilitas kesehatan swasta, serta sistem pelaporan yang tertib dan terintegrasi. Dukungan kebijakan daerah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini TBC juga berkontribusi dalam meningkatkan cakupan penemuan kasus di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, cakupan penemuan kasus yang berada pada kategori kuning (50–89%) di 10 kabupaten seperti Bantaeng, Takalar, Pangkep, dan Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa meskipun capaian belum optimal, terdapat upaya dan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program TBC. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan akses geografis, terbatasnya tenaga kesehatan terlatih, serta belum optimalnya pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan non-pemerintah.

Adapun wilayah dengan cakupan terendah (kategori merah, <50%), seperti Kabupaten Toraja Utara, Enrekang, dan Tana Toraja, menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang harus diatasi. Penurunan capaian di wilayah-wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan deteksi aktif, minimnya pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TBC, serta belum optimalnya pengawasan dan evaluasi program di tingkat lokal. Selain itu, perubahan estimasi target penemuan kasus yang meningkat secara signifikan di tahun 2024 turut mempengaruhi capaian persen, karena jumlah kasus yang harus ditemukan bertambah, sementara kapasitas deteksi belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Dengan demikian, untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC secara merata, diperlukan penguatan sistem surveilans, peningkatan kapasitas layanan di seluruh kabupaten/kota, serta optimalisasi pelibatan seluruh jejaring layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.

**e. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**.

Indikator lainnya yang menjadi gambaran kondisi pada aspek kesejahteraan sosial dari sektor kesehatan adalah Insidensi Tuberkulosis. Insidensi Tuberkulosis merujuk pada jumlah kasus baru TB yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam jumlah kasus per 100.000 orang per tahun. Insidensi merupakan indikator penting dalam epidemiologi

untuk memahami tingkat penyebaran dan risiko terkena TB dalam suatu populasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, Sulawesi Selatan merupakan satu dari delapan provinsi penyumbang Tuberkulosis (TB) di Indonesia. Pada tahun 2023, angka penyakit tuberkulosis (TBC) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami peningkatan. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa terdapat sekitar 47.075 kasus TBC yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Perbandingannya dengan tahun sebelumnya (2022), estimasi kasus TBC di Sulsel meningkat dari 35.210 menjadi 47.075 kasus. Rinciannya, pasien yang ternotifikasi TBC meningkat dari 21.167 menjadi 25.378, sementara kasus TBC pada anak naik dari 1.238 menjadi 1.477 kasus. Peningkatan jumlah kasus TB pada anak disebabkan adanya kontak serumah dengan pengidap TB. Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk di Sulawesi Selatan cenderung menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2021, namun meningkat di tahun 2022 dan mencapai 291 di tahun 2023.

**Grafik II.34**
**Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

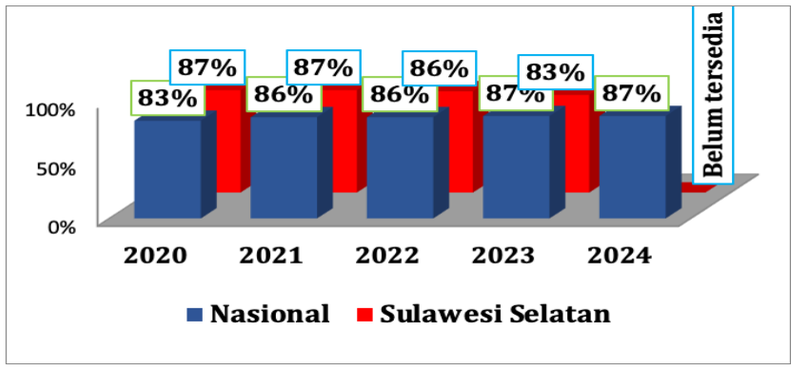


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024, data diolah*

Angka persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 87% hingga tahun 2023 menjadi 83%. Hal ini disebabkan oleh pasien DO pengobatan, meninggal, dan pasien rujukan yg tidak dievaluasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu peningkatan komunitas kader dan keluarga dalam pendampingan pasien tuberkulosis.

f. **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional** menjadi salah satu indikasi gambaran kondisi aspek kesejahteraan sosial. Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap penduduk indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan *(promotif),* pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Kepesertaan jaminan Kesehatan nasional penduduk Sulawesi Selatan meningkat dari 86,48 persen di tahun 2020 menjadi 97,03 pada tahun 2022 kemudian mengalami kenaikan hingga melebihi 100 persen, yaitu 101,19 persen pada tahun 2023 dan 100,51 persen di tahun 2024. Persentase melebihi 100% disebabkan : duplikasi kepesertaan, di mana individu tercatat lebih dari satu kali dalam basis data JKN akibat perubahan identitas, migrasi, atau perbedaan data administratif

antar instansi; keterlambatan pembaruan data peserta yang telah meninggal, sehingga masih tercatat sebagai peserta aktif; penduduk dengan domisili ganda atau tidak valid, yang menyebabkan pencatatan ganda antar wilayah; kepesertaan sementara dari penduduk luar provinsi yang tercatat dalam sistem Sulawesi Selatan karena lokasi kerja, studi, atau kunjungan jangka Panjang; ketidaksesuaian antara data JKN dengan basis data kependudukan (Dukcapil) yang belum terintegrasi sepenuhnya secara *real-time*.

Peningkatan persentase kepesertaan JKN dari tahun ke tahun hingga dapat mencapai 100 persen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah meningkatnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, aksesibilitas terhadap fasilitas pendaftaran dan pelayanan kesehatan termasuk di daerah pedesaan atau terpencil, implementasi kebijakan pemerintah yang mendukung untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menjelaskan lonjakan signifikan dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam upaya untuk memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial bagi penduduk Sulawesi Selatan.

**Grafik II.35**
**Tingkat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

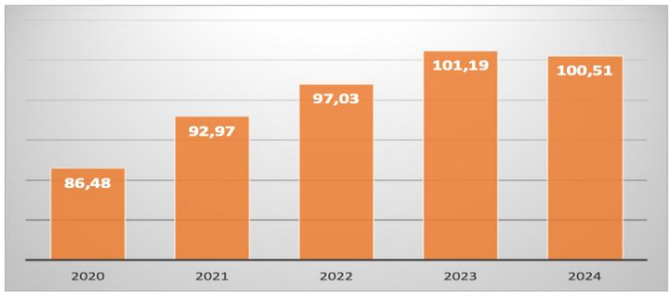


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024*

### 2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

Gambaran pendidikan berkualitas yang merata di Sulawesi Selatan dicerminkan dari beberapa indikator pendidikan yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi, Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Indeks Literasi Digital (ILD), Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi, Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dan Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

a. **Rata-Rata Lama Sekolah**, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. Dalam perhitungan RLS yang lama, batas usia yang digunakan adalah 15 tahun ke atas. Namun dalam metode baru, batas usia dinaikkan menjadi 25 tahun ke atas. Perubahan ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia 25 tahun, sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan formal mereka. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan dalam nilai RLS yang dihitung, karena cakupan penduduk yang dihitung menjadi lebih kecil (dari 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas).

Perubahan batas usia dalam perhitungan RLS merupakan bagian dari pembaruan metode perhitungan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat pendidikan masyarakat.

**Tabel II. 38**
**Rata-rata Lama Sekolah Di Sulawesi Selatan**
**15 tahun keatas dan 25 tahun keatas (metode perhitungan baru)**
**Tahun 2020-2024**

| Tahun | Usia 15+ | | | | | | Usia 25+ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulsel | 8.86 | 8.95 | 9.09 | 9.12 | 9.22 | 8.38 | 8.46 | 8.63 | 8.76 | 8.86 |
| Nasional | 8.9 | 8.97 | 9.08 | 9.13 | 9.22 | 8.48 | 8.54 | 8.69 | 8.77 | 8.85 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020-2024, data diolah*

Berdasarkan data capaian tahun 2020–2024, rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan usia 15+ terus meningkat dengan capaian tahun 2024 sebesar 9,22. Rata-rata capaian Sulsel lebih rendah dari pada nasional tetapi tahun 2024, capaian nasional sama dengan sulsel sebesar 9,22. Untuk rata-rata lama sekolah usia 25+ (metode baru), capaian sulsel Tahun 2024 sebesar 8,86 terus meningkat sejak tahun 2020. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian Sulsel sedikit lebih rendah, tetapi tahun 2024, capaian Sulsel lebih tinggi.

Karena adanya perubahan cakupan batas usia perhitungan rata-rata lama sekolah, menyebabkan perubahan dalam nilai RLS yang dihitung, karena cakupan penduduk yang dihitung menjadi lebih kecil (dari 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas). Perubahan batas usia dalam perhitungan RLS merupakan bagian dari pembaruan metode perhitungan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat pendidikan masyarakat (mengurangi bias akibat pendidikan yang belum selesai), juga kesesuaian dengan standar internasional.

**Tabel II. 39**
**Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024**

| | Laki-laki | | | | | Perempuan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulsel | 8.63 | 8.74 | 8.77 | 8.96 | 8.99 | 8.15 | 8.2 | 8.48 | 8.59 | 8.74 |
| Nasional | 8,90 | 8,92 | 8,99 | 9,07 | 9,17 | 8,07 | 8,17 | 8,39 | 8,48 | 8,54 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020-2024, data diolah*

Berdasarkan data BPS angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan baik perempuan maupun laki-laki mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka rata-rata lama sekolah laki-laki berada diatas angka rata-rata lama sekolah perempuan. Demikian pula untuk skala nasional angka rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun, dan laki-laki angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan

b. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan. Pada setiap kelompok umur

menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Untuk usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sampai 2024. Sedangkan Angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir dan kembali meningkat pada tahun 2024.

**Tabel II. 40**
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Di Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

| Jenjang Usia | Satuan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Sulawesi Selatan** | | | | | | |
| Penduduk Usia 7-12 Tahun | % | 99,25 | 99,29 | 99,43 | 99,49 | 99,50 |
| Penduduk Usia 13-15 Tahun | % | 93,34 | 93,55 | 93,2 | 93,22 | 93,41 |
| Penduduk Usia 16-18 Tahun | % | 70,89 | 71,21 | 70,81 | 71,00 | 73,17 |
| Penduduk Usia 19-24 Tahun | % | 34,51 | 35,08 | 35,07 | 34,47 | 37,02 |
| **Nasional** | | | | | | |
| Penduduk Usia 7-12 Tahun | % | 99,26 | 99,19 | 99,1 | 99,16 | 99,19 |
| Penduduk Usia 13-15 Tahun | % | 95,74 | 95,99 | 95,92 | 96,10 | 96,17 |
| Penduduk Usia 16-18 Tahun | % | 72,72 | 73,09 | 73,51 | 73,42 | 74,64 |
| Penduduk Usia 19-24 Tahun | % | 25,56 | 26,01 | 25,99 | 26,85 | 29,01 |

*Sumber : BPS, 2020-2024, data diolah*

Pada tahun 2024 Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia sekolah 16-18 tahun mengalami peningkatan sebesar 2,17% persen dari capaian tahun 2023. Tahun 2020 hingga 2024 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan masih lebih rendah dari capaian Nasional, dimana dimensi angka partisipasi sekolah yaitu terdiri dari anak usia 7-18 tahun yang masih sekolah, tidak/belum pernah sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Berdasarkan data Susenas tahun 2020 hingga 2022, persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah untuk anak laki-laki usia 7-18 tahun lebih besar daripada anak perempuan usia 7-18 tahun. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa persentase siswa lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA selama 5 tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun dengan capaian tahun 2024 hanya sebesar 85,41 persen, setelah tahun sebelumnya mencapai 99,25 persen. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah Anak Tidak sekolah di Sulawesi Selatan, dimana pada tahun 2024 masih terdapat 7,86 % ATS pada kelompok usia 13 - 15 tahun dan pada kelompok usia 16 - 18 tahun sekitar 20,44 % ATS, yang berarti anak-anak ini tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

c. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah indikator sederhana yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. APK tidak mempertimbangkan kesesuaian usia dengan jenjang pendidikan.

APK menunjukkan penurunan sebesar 1,01 dari Tahun 2020 hingga 2024 pada jenjang pendidikan SD/MI, walaupun Angka Partisipasi Kasar tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan SD/MI. Adapun jenjang dengan APK terendah adalah jenjang pendidikan PAUD baik di Sulawesi Selatan maupun nasional.

Secara kewenangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,85 persen dari tahun 2023. Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2024 masih diatas capaian nasional.

APK untuk jenjang Pendidikan Tinggi Sulsel capaiannya fluktuatif cenderung menurun dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 41,83 persen. Sedangkan pada skala nasional terus meningkat, dengan capaian tahun 2024 sebesar 32,00 persen. Capaian APK jenjang pendidikan Perguruan Tinggi Sulsel cenderung menurun periode 2020-2024 tetapi capaiannya lebih tinggi daripada nasional. Perlu perhatian semua pemangku kepentingan terkait semakin menurunnya persentase peserta didik jenjang PT. dari segi daya tampung Perguruan Tinggi di Sulsel sangat memadai, baik PTN maupun PTS bahkan tersebar hampir di setiap kabupaten di Sulsel. Di samping itu, fasilitas beasiswa KIP kuliah juga makin bertambah. Bahkan secara regulasi sudah memungkinkan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran campuran antara tatap muka dengan daring. Diprediksi APM/ APK akan terus menurun seiring makin rendahnya motivasi "Generasi Z" untuk belajar. Ditambah lagi makin banyaknya profesi yang dapat menghasilkan pendapatan tanpa perlu ijazah sarjana. Padahal daya saing daerah mutlak membutuhkan SDM yang memiliki *high order thinking skills* yang terbangun melalui pendidikan di Perguruan Tinggi.

**Tabel II. 41**
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan**
**Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2024**

| Jenjang Pendidikan | Satuan | Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Sulawesi Selatan** | | | | | | |
| PAUD | % | 31,79 | 29,41 | 30,56 | 31,58 | 31,41 |
| SD/MI | % | 106,99 | 106,85 | 106,71 | 106,65 | 105,98 |
| SMP/MTs | % | 86,97 | 86,82 | 86,19 | 87,15 | 86,57 |
| SMA/SMK/MA | % | 86,44 | 87,07 | 86,49 | 88,04 | 90,49 |
| Perguruan Tinggi (PT) | % | 42,69 | 42,35 | 42,63 | 42,02 | 41,83 |
| **Nasional** | | | | | | |
| PAUD | % | 37,52 | 35,59 | 35,28 | 36,36 | 36,03 |
| SD/MI | % | 106,32 | 106,20 | 106,27 | 105,62 | 104,82 |
| SMP/MTs | % | 92,06 | 92,80 | 92,11 | 92,51 | 92,21 |
| SMA/SMK/MA | % | 84,53 | 85,23 | 85,49 | 86,34 | 87,29 |
| Perguruan Tinggi (PT) | % | 30,85 | 31,19 | 31,16 | 31,45 | 32,00 |

*Sumber : BPS 2020-2024, data diolah*

d. **Angka Partisipasi Murni (APM)** menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya penurunan pada jenjang SD dan SMP tahun

2024, dan jika dibandingkan dengan APM Nasional masih dibawah capaian nasional.

Secara kewenangan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMA sederajat yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,14 persen dari tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan di tahun 2024 namun masih berada di bawah capaian nasional.

**Tabel II. 42**
**Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan**
**Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

| Jenjang Pendidikan | Satuan | Angka Partisipasi Murni (APM) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Sulawesi Selatan** | | | | | | |
| SD Sederajat | % | 97,98 | 98,26 | 98,41 | 98,41 | 97,81 |
| SMP Sederajat | % | 76,17 | 77,20 | 77,42 | 77,98 | 76,84 |
| SM Sederajat | % | 60,32 | 60,35 | 60,44 | 60,57 | 62,71 |
| **Nasional** | | | | | | |
| SD Sederajat | % | 97,69 | 97,80 | 97,88 | 97,89 | 97,94 |
| SMP Sederajat | % | 80,12 | 80,59 | 80,89 | 81,35 | 81,73 |
| SM Sederajat | % | 61,25 | 61,65 | 61,97 | 62,53 | 64,32 |

*Sumber : BPS 2020-2024, data diolah*

e. **Harapan Lama Sekolah,** selama periode 2020 hingga 2024 meningkat menjadi 13,55 di tahun 2024, harapan lama sekolah Sulawesi Selatan rata-rata meningkat 0,19 persen pertahun. Harapan lama sekolah Sulawesi Selatan 2024 meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2023. Secara umum, harapan lama sekolah yang mencapai 13,55 tahun dapat diinterpretasikan sebagai target atau tujuan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat atau individu di Sulawesi Selatan. Angka ini menunjukkan ekspektasi bahwa individu diharapkan untuk menghabiskan sekitar 13,55 tahun dalam sistem pendidikan formal. Semakin tinggi harapan lama sekolah, semakin tinggi pula kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas hidup melalui investasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, angka 13,55 tahun menunjukkan tingkat ambisi yang signifikan terhadap pendidikan di Sulawesi Selatan yang berada di urutan ke-13 dari 38 provinsi dan sudah berada di atas capaian nasional. Untuk skala regional Sulawesi, posisi Sulawesi Selatan berada di urutan ke-2 setelah Sulawesi Tenggara (13,71), dan berdasarkan Kabupaten/Kota yang tertinggi, berada di Kota Makassar dan terendah di Kabupaten Jeneponto.

**Tabel II. 43**
**Harapan Lama Sekolah Di Sulawesi Selatan**
**Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Selayar | 12,65 | 12,66 | 12,67 | 12,69 | 12,84 |
| Bulukumba | 13,17 | 13,41 | 13,42 | 13,43 | 13,45 |
| Bantaeng | 12,04 | 12,05 | 12,30 | 12,53 | 12,79 |
| Jeneponto | 11,98 | 12,10 | 12,11 | 12,12 | 12,14 |

| Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Takalar | 12,41 | 12,42 | 12,48 | 12,49 | 12,50 |
| Gowa | 13,64 | 13,65 | 13,66 | 13,70 | 13,71 |
| Sinjai | 13,05 | 13,06 | 13,25 | 13,26 | 13,27 |
| Maros | 13,04 | 13,16 | 13,30 | 13,50 | 13,51 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 12,76 | 12,77 | 12,78 | 12,80 | 12,81 |
| Barru | 13,58 | 13,59 | 13,61 | 13,62 | 13,63 |
| Bone | 12,88 | 12,98 | 12,99 | 13,00 | 13,02 |
| Soppeng | 12,90 | 13,05 | 13,20 | 13,21 | 13,22 |
| Wajo | 13,14 | 13,15 | 13,30 | 13,31 | 13,32 |
| Sindereng Rappang | 12,94 | 12,95 | 13,01 | 13,02 | 13,03 |
| Pinrang | 13,23 | 13,24 | 13,25 | 13,27 | 13,28 |
| Enrekang | 13,70 | 13,71 | 13,86 | 13,87 | 13,88 |
| Luwu | 13,33 | 13,39 | 13,40 | 13,41 | 13,43 |
| Tana Toraja | 13,80 | 13,86 | 13,87 | 13,88 | 14,10 |
| Luwu Utara | 12,43 | 12,57 | 12,58 | 12,59 | 12,61 |
| Luwu Timur | 12,83 | 12,84 | 13,00 | 13,01 | 13,18 |
| Toraja Utara | 13,38 | 13,39 | 13,41 | 13,42 | 13,43 |
| Makassar | 15,57 | 15,58 | 15,59 | 15,61 | 15,62 |
| Parepare | 14,50 | 14,51 | 14,52 | 14,54 | 14,55 |
| Palopo | 15,08 | 15,09 | 15,10 | 15,12 | 15,13 |
| **Sulawesi Selatan** | **13,45** | **13,52** | **13,53** | **13,54** | **13,55** |
| **Nasional** | **12,98** | **13,08** | **13,10** | **13,15** | **13,21** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020-2024*

Data Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan baik perempuan maupun laki-laki mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Angka harapan lama sekolah perempuan berada diatas angka rata-rata lama sekolah laki-laki.

**Grafik II.36**
**Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024**

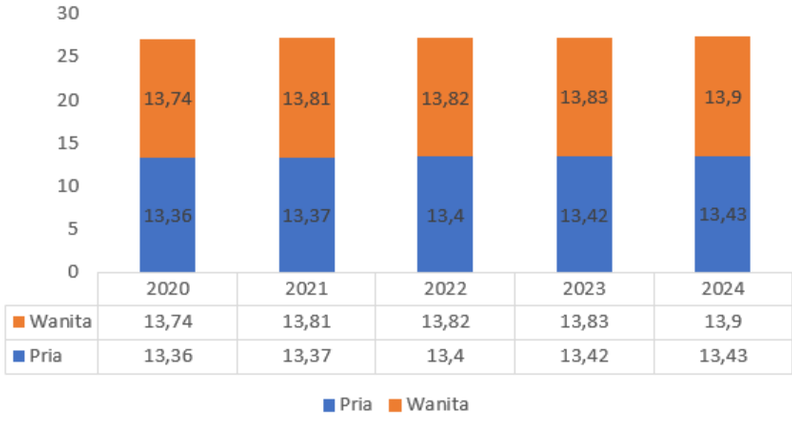


*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020-2024*

f. **Persentase Siswa Yang Terserap Di Perguruan Tinggi**, menggambarkan sejauh mana lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) dapat melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja. indikator ini merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong kemajuan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2024 persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan sebesar 13,22 persen atau sejumlah 13.788 siswa dari total lulusan SMA/SMK sebanyak 104.260. Siswa yang berhasil diterima di perguruan tinggi melalui UTBK SNBT meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel II. 44**
**Jumlah Lulusan SMA/SMK yang Diterima di Perguruan Tinggi Tahun 2024**

| NO | WILAYAH | SNPB | SNBT | MANDIRI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | I | 1.020 | 1.567 | 382 | **2.969** |
| **2** | II | 296 | 411 | 289 | **996** |
| **3** | III | 488 | 446 | 185 | **1.119** |
| **4** | IV | 596 | 397 | 322 | **1.315** |
| **5** | V | 433 | 523 | 267 | **1.223** |
| **6** | VI | 42 | 182 | 80 | **304** |
| **7** | VII | 280 | 298 | 151 | **729** |
| **8** | VIII | 572 | 6 | 293 | **871** |
| **9** | IX | 250 | 296 | 129 | **675** |
| **10** | X | 738 | 1.206 | 366 | **2.310** |
| **11** | XI | 223 | 297 | 49 | **569** |
| **12** | XII | 278 | 309 | 121 | **708** |
| | | **5.216** | **5.938** | **2.634** | **13.788** |

*Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024*

Tantangan keterbatasan akses pendidikan tinggi di daerah terpencil dan biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi hambatan bagi sebagian besar siswa. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pembangunan perguruan tinggi di daerah, dan peningkatan kualitas pendidikan menengah sangat penting untuk lebih meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan.

g. **Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**, di Sulawesi Selatan memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan pendidikan di daerah. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren peningkatan penduduk Sulawesi Selatan yang berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan masih konsisten bertahan diatas angka rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan, akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas akibat faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih terpadu untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan peningkatan

program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perlu juga diperhatikan peningkatan kualitas pendidikan tinggi itu sendiri.

Dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam hal ini, perguruan tinggi di Sulawesi Selatan perlu terus berinovasi dalam kurikulum dan metode pengajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Kabupaten dengan penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi yaitu Kota Palopo dan yang terendah berada pada kabupaten Maros.

**Tabel II. 45**
**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Selayar | 13,58 | 13,08 | 12,68 | 16,28 | 15,09 |
| Bulukumba | 11,71 | 10,03 | 11,57 | 11,61 | 11,06 |
| Bantaeng | 10,06 | 8,38 | 11,64 | 11,88 | 12,72 |
| Jeneponto | 9,25 | 6,70 | 7,04 | 8,19 | 8,36 |
| Takalar | 9,34 | 6,98 | 9,19 | 8,69 | 9,33 |
| Gowa | 11,27 | 8,29 | 11,58 | 11,23 | 11,82 |
| Sinjai | 12,71 | 10,93 | 10,38 | 10,16 | 10,66 |
| Maros | 10,35 | 10,97 | 9,34 | 8,51 | 8,32 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 9,50 | 10,95 | 10,85 | 10,89 | 12,17 |
| Barru | 15,89 | 11,41 | 13,06 | 13,58 | 14,83 |
| Bone | 8,09 | 8,40 | 7,89 | 9,35 | 9,70 |
| Soppeng | 11,49 | 10,39 | 13,12 | 14,25 | 13,51 |
| Wajo | 9,69 | 9,08 | 9,06 | 10,00 | 8,50 |
| Sindereng Rappang | 9,22 | 8,70 | 9,09 | 9,79 | 9,56 |
| Pinrang | 8,49 | 9,05 | 10,70 | 11,38 | 12,07 |
| Enrekang | 13,92 | 11,53 | 12,92 | 15,47 | 14,46 |
| Luwu | 10,28 | 7,67 | 7,44 | 9,11 | 8,85 |
| Tana Toraja | 11,81 | 11,12 | 10,06 | 10,77 | 10,84 |
| Luwu Utara | 6,70 | 7,82 | 8,70 | 9,03 | 8,76 |
| Luwu Timur | 12,74 | 11,02 | 10,23 | 10,03 | 9,45 |
| Toraja Utara | 12,16 | 13,27 | 11,27 | 10,67 | 12,13 |
| Makassar | 19,82 | 20,68 | 22,24 | 19,57 | 19,09 |
| Parepare | 15,65 | 19,73 | 17,43 | 19,40 | 19,71 |
| Palopo | 16,52 | 18,35 | 21,60 | 19,32 | 20,10 |
| **Sulawesi Selatan** | **12,33** | **11,74** | **12,53** | **12,51** | **12,53** |
| **Nasional** | **9,50** | **9,67** | **10,16** | **10,15** | **10,20** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024*

h. **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi,** menggambarkan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Melalui indikator ini, dapat diukur kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut.

Jumlah total pekerja di Sulawesi Selatan mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 1.743.090 menjadi 1.945.487 orang. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 1.938.366 orang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi atau perubahan pasar tenaga kerja.

Jumlah pekerja dengan keahlian menengah secara konsisten menjadi yang terbanyak selama periode 2020-2023, diikuti oleh keahlian tinggi dan keahlian dasar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menengah.

Jumlah pekerja dengan keahlian dasar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama dari tahun 2022 ke 2023, di mana angkanya melonjak dari 458.037 menjadi 549.102. Peningkatan ini bisa menjadi indikasi adanya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang tidak memerlukan pendidikan formal tinggi atau adanya pergeseran struktural dalam pekerjaan yang tersedia.

Jumlah pekerja dengan keahlian tinggi mengalami fluktuasi. Setelah menurun dari 2020 ke 2021, angkanya melonjak tajam pada 2022, sebelum kembali turun pada 2023. Fluktuasi ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor pendorongnya, seperti kebijakan investasi atau kondisi ekonomi spesifik.

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi mengalami penurunan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Penurunan drastis dari 76,46% pada tahun 2022 menjadi 70,20% pada tahun 2023 sangat mengkhawatirkan. Ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan (*mismatch*) yang semakin besar antara lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan ketersediaan pekerjaan yang sesuai di bidang keahlian tersebut. Data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang melebar antara ketersediaan tenaga kerja terdidik dengan pekerjaan yang relevan di Sulawesi Selatan. Banyak lulusan pendidikan menengah dan tinggi tampaknya terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka, atau bahkan di sektor keahlian dasar.

Penurunan persentase ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Perlu ada upaya untuk : Menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, Meningkatkan investasi di sektor-sektor padat keahlian menengah dan tinggi, Mendorong pertumbuhan wirausaha di kalangan lulusan.

**Tabel II. 46**
**Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Keahlian Tinggi | Keahlian Menengah | Keahlian Dasar | Total (0-9) | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020** | 450.934 | 896.624 | 372.315 | 1.743.090 | 77,31 |
| **2021** | 439.744 | 933.246 | 389.762 | 1.788.820 | 76,75 |
| **2022** | 497.029 | 990.421 | 458.037 | 1.945.487 | 76,46 |
| **2023** | 483.603 | 877.141 | 549.102 | 1.938.366 | 70,20 |
| **2024** | Blm rilis | Blm rilis | Blm rilis | Blm rilis | Blm rilis |

Sumber : Sakernas 2017-2023; KBJI 2014, diolah

i. **Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.** Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas adalah hasil pembelajaran melalui capaian literasi membaca dan numerasi suatu daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

   Secara umum, terjadi peningkatan yang signifikan pada persentase satuan pendidikan di Sulawesi Selatan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) baik untuk numerasi maupun literasi membaca pada Asesmen Tingkat Nasional dari tahun 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan adanya upaya dan kemajuan dalam peningkatan kualitas pendidikan di provinsi tersebut, khususnya dalam aspek literasi dan numerasi.

   Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 5,08% di tahun 2021 menjadi 36,00% di tahun 2024. Peningkatan terbesar terlihat dari tahun 2022 (8,95%) ke 2023 (25,30%), dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat. Ini menunjukkan adanya intervensi atau program yang efektif pada periode tersebut. Meskipun ada peningkatan yang tinggi, pada tahun 2024, masih ada 64% satuan pendidikan yang belum mencapai SKM untuk numerasi. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk memastikan mayoritas satuan pendidikan memenuhi standar ini.

   Sama halnya dengan numerasi, literasi membaca juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan, dari 12,85% di tahun 2021 menjadi 39,09% di tahun 2024. Sepanjang periode 2021-2024, persentase satuan pendidikan yang mencapai SKM untuk literasi membaca selalu lebih tinggi dibandingkan dengan numerasi. Ini menunjukkan bahwa relatif, kemampuan literasi membaca satuan pendidikan di Sulawesi Selatan lebih baik atau program peningkatannya lebih efektif dibandingkan numerasi. Seperti halnya numerasi, meskipun peningkatannya positif, pada tahun 2024 masih ada sekitar 60,91% satuan pendidikan yang belum mencapai SKM untuk literasi membaca.

   Meskipun ada peningkatan, numerasi masih tertinggal dibandingkan literasi membaca. Program-program yang lebih intensif dan terfokus mungkin diperlukan untuk menutup kesenjangan ini dan mempercepat pencapaian SKM di bidang numerasi. Penting untuk mengidentifikasi program atau kebijakan yang diterapkan antara tahun 2022 dan 2023 yang menyebabkan lonjakan signifikan pada numerasi (dan juga literasi membaca), untuk kemudian mereplikasi dan memperkuat program-program tersebut.

**Tabel II. 47**
**Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi | na | 5,08 | 8,95 | 25.30 | 36,00 |
| Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca | na | 12,85 | 19,73 | 31,61 | 39,09 |

*Sumber: Mendikdasmen Tahun 2025, diolah*

Hampir semua daerah menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2024, baik di literasi membaca maupun numerasi. Hal tersebut menunjukkan program peningkatan kualitas pembelajaran dasar menunjukkan dampak positif.

Capaian Literasi Membaca tahun 2024 tertinggi Soppeng (60,47%), Enrekang (57,53%), Makassar (50,42%), Parepare (49,15%). Terendah 2024 Jeneponto (12,84%), Takalar (23,23%), Maros (26,25%).

Capaian Numerasi Membaca tahun 2024 tertinggi Soppeng (58,66%), Enrekang (51,51%), Luwu Timur (44,79%), Makassar (42,94%). Terendah 2024: Jeneponto (13,58%), Maros (23,54%), Takalar (22,49%).

Secara umum, literasi lebih tinggi daripada numerasi di hampir semua kabupaten/kota. Terjadi disparitas besar yang mana Soppeng, Enrekang, dan Makassar sudah cukup tinggi, sedangkan Jeneponto, Maros, Takalar tertinggal jauh. Meskipun capaian standar kompetensi minimum satuan Pendidikan meningkat signifikan, secara umum capaian tersebut belum merata di seluruh satuan pendidikan dalam wilayah kabupaten/kota tertentu. Penjaminan dan Peningkatan mutu Pendidikan, bisa dilakukan melalui upaya perbaikan mutu mencakup pembelajaran, tata kelola satuan pendidikan, mutu guru dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana pendidikan, serta partisipasi orangtua yang berorientasi dan berpusat pada peserta didik.

**Tabel II. 48**
**Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024**

| Kabupaten/Kota | Literasi Membaca | | | | Numerasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bantaeng | 7,25 | 5,70 | 20,39 | 29,13 | 3,82 | 3,02 | 19,74 | 24,60 |
| Bone | 10,17 | 24,77 | 32,58 | 46,69 | 3,26 | 13,75 | 28,43 | 47,14 |
| Sinjai | 12,63 | 28,10 | 43,12 | 47,66 | 4,55 | 8,90 | 33,10 | 40,53 |
| Soppeng | 27,25 | 32,41 | 52,17 | 60,47 | 6,27 | 14,94 | 38,11 | 58,66 |
| Wajo | 18,89 | 22,70 | 34,90 | 43,38 | 9,63 | 12,46 | 26,85 | 39,53 |
| Sidrap | 15,19 | 21,64 | 30,40 | 39,52 | 6,59 | 7,65 | 24,27 | 36,07 |

| Kabupaten/Kota | Literasi Membaca | | | | Numerasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gowa | 11,21 | 13,53 | 26,98 | 33,76 | 4,37 | 4,80 | 21,70 | 28,71 |
| Takalar | 6,09 | 14,10 | 18,91 | 23,23 | 3,32 | 8,21 | 15,67 | 22,49 |
| Jeneponto | 1,19 | 2,38 | 7,36 | 12,84 | 0,59 | 1,46 | 7,54 | 13,58 |
| Bulukumba | 10,93 | 14,93 | 27,38 | 34,46 | 3,52 | 7,30 | 22,06 | 31,57 |
| Kepulauan Selayar | 15,53 | 17,21 | 26,27 | 28,69 | 7,77 | 8,61 | 17,37 | 25,41 |
| Maros | 10,60 | 15,37 | 20,26 | 26,25 | 2,17 | 3,44 | 12,58 | 23,54 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 10,40 | 17,14 | 31,03 | 35,03 | 7,01 | 8,16 | 29,01 | 35,42 |
| Barru | 12,62 | 17,67 | 36,98 | 43,67 | 6,15 | 11,67 | 33,76 | 47,15 |
| Pinrang | 8,85 | 12,87 | 25,10 | 29,24 | 5,03 | 5,94 | 18,43 | 27,29 |
| Luwu | 10,49 | 17,36 | 24,77 | 34,55 | 5,43 | 11,03 | 27,34 | 35,27 |
| Luwu Utara | 7,29 | 20,91 | 32,70 | 34,91 | 6,12 | 14,09 | 31,74 | 31,53 |
| Luwu Timur | 11,90 | 20,49 | 34,01 | 51,42 | 7,82 | 6,94 | 25,59 | 44,79 |
| Enrekang | 16,91 | 25,43 | 47,47 | 57,53 | 6,71 | 9,25 | 36,52 | 51,51 |
| Tana Toraja | 12,71 | 21,84 | 36,80 | 44,44 | 3,39 | 8,42 | 27,20 | 38,36 |
| Toraja Utara | 7,40 | 12,62 | 37,03 | 36,66 | 2,57 | 4,73 | 29,11 | 36,66 |
| Makassar | 25,18 | 34,07 | 45,25 | 50,42 | 7,59 | 13,13 | 31,35 | 42,94 |
| Palopo | 21,64 | 19,18 | 32,21 | 44,74 | 5,22 | 4,11 | 17,45 | 28,95 |
| Parepare | 16,31 | 22,16 | 33,92 | 49,15 | 3,55 | 8,38 | 25,73 | 42,37 |

*Sumber: Mendikdasmen Tahun 2025, diolah*

j. **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** digunakan untuk mengukur tingkat literasi di berbagai wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Untuk data IPLM tahun 2020 hingga 2022, informasi spesifik belum tersedia, namun tren peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam pembangunan literasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2023 Sulawesi Selatan mencapai skor IPLM sebesar 86,74 tertinggi di Indonesia, dan pada Tahun 2024 Sulawesi Selatan kembali meraih peringkat pertama dengan skor IPLM sebesar 88,24, ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta pada urutan kedua dengan skor 86,39 kemudian Kepulauan Bangka Belitung di urutan ketiga dengan skor 84,59.

Peningkatan skor IPLM ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan dalam meningkatkan literasi melalui pengembangan perpustakaan dan program literasi yang efektif. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.

**Grafik II.37**
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023-2024**

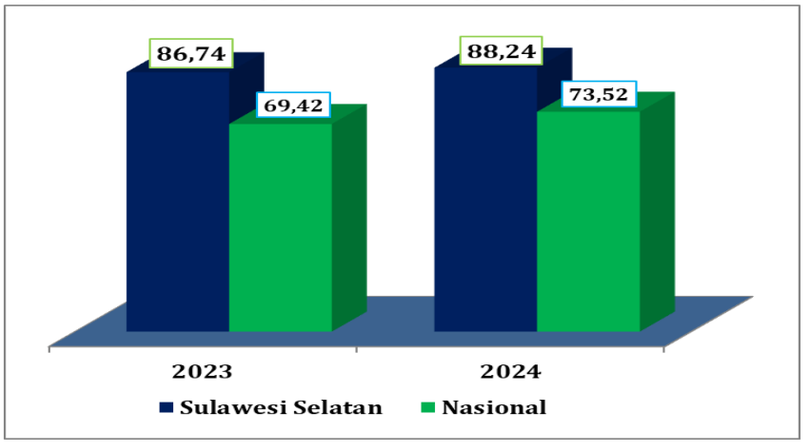


*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024*

k. **Indeks Literasi Digital (ILD)** merupakan indikator untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Data ILD untuk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu; Tahun 2020, data spesifik mengenai ILD untuk Sulawesi Selatan tidak tersedia. Tahun 2021 Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ILD Sulawesi Selatan berada pada kategori "sedang" dengan skor 3,47, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 3,49. Pengukuran ini mencakup empat pilar yaitu (1) Keterampilan Digital dengan Skor 3,45; (2) Etika Digital dengan Skor 3,37; (3) Keamanan Digital dengan Skor 3,16; (4) Budaya Digital dengan Skor 3,92. Tahun 2022, data spesifik untuk Sulawesi Selatan tidak tersedia. Namun secara nasional, ILD Indonesia tetap pada kategori "sedang" dengan skor 3,54, menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan Tahun 2024, data spesifik untuk Sulawesi Selatan belum tersedia. Berdasarkan data yang tersedia, tren yang ada menunjukkan bahwa literasi digital di Sulawesi Selatan berada pada kategori "sedang". Upaya peningkatan literasi digital terus dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga terkait.

### 2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

Gambaran perlindungan sosial yang adaptif di Sulawesi Selatan dapat dicerminkan dari kondisi sosial dan ekonomi dengan indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

a. **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** di Sulawesi Selatan berfluktuasi pada tahun 2020 sampai 2024, meskipun masih menghadapi tantangan dalam memperluas cakupan, terutama di sektor informal. Informasi terkait Cakupan Kepesertaan yaitu; (1) Tahun 2020, Fokus pada perluasan program untuk sektor formal, terutama pekerja kantoran dan perusahaan. Sebagian besar pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, dan pekerja lepas belum banyak terjangkau; (2) Tahun 2021, Penyesuaian program dilakukan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan insentif agar pekerja yang terdampak pandemi tetap terdaftar dalam program jaminan sosial; (3) Tahun 2022, Cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 1 juta pekerja, baik formal maupun informal, seperti petani dan nelayan; (4) Tahun 2023, Kepesertaan meningkat menjadi sekitar 1,2 juta tenaga kerja; (5) Tahun 2024, Hingga pertengahan tahun, cakupan mencapai sekitar 1,3 juta tenaga kerja atau

sekitar 47% dari total tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Fokus ditingkatkan pada sektor informal, dengan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk membantu pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial.

Kabupaten dengan cakupan tertinggi yaitu Luwu, dan cakupan yang terendah berada di kabupaten Takalar. Masih ada sekitar 1,6 juta pekerja di Sulawesi Selatan yang belum menjadi peserta, terutama dari sektor informal. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial masih perlu ditingkatkan. Beberapa daerah dengan tingkat partisipasi rendah memerlukan pendekatan yang lebih inklusif. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penganggaran APBD untuk subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga lain untuk memperluas edukasi dan sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial.

**Tabel II. 49**
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**
**Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kepulauan Selayar | 70,06 | 68,07 | 68,71 | 75,98 | 67,66 |
| Bulukumba | 68,22 | 67,10 | 70,32 | 53,96 | 62,13 |
| Bantaeng | 80,26 | 81,20 | 80,21 | 56,84 | 54,88 |
| Jeneponto | 68,24 | 68,68 | 68,94 | 33,51 | 38,53 |
| Takalar | 68,78 | 70,67 | 73,39 | 28,55 | 33,21 |
| Gowa | 77,97 | 79,71 | 78,35 | 28,25 | 34,17 |
| Sinjai | 73,46 | 73,59 | 73,78 | 48,76 | 47,11 |
| Maros | 72,43 | 72,38 | 71,63 | 50,11 | 55,65 |
| Pangkep | 59,44 | 59,94 | 64,12 | 49,37 | 49,06 |
| Barru | 63,96 | 63,98 | 65,24 | 47,23 | 54,64 |
| Bone | 56,86 | 57,55 | 59,09 | 34,60 | 34,26 |
| Soppeng | 71,15 | 70,54 | 71,07 | 56,35 | 55,64 |
| Wajo | 56,24 | 56,30 | 55,83 | 40,32 | 48,05 |
| Sidenreng Rappang | 56,86 | 56,39 | 56,71 | 36,73 | 40,23 |
| Pinrang | 68,11 | 68,43 | 65,12 | 48,21 | 56,91 |
| Enrekang | 60,32 | 56,51 | 62,98 | 70,73 | 60,30 |
| Luwu | 57,15 | 57,29 | 58,03 | 74,06 | 79,98 |
| Tana Toraja | 68,50 | 68,77 | 70,68 | 55,75 | 65,24 |
| Luwu Utara | 38,11 | 41,11 | 43,96 | 61,75 | 58,93 |
| Luwu Timur | 50,76 | 54,09 | 55,4 | 64,79 | 70,00 |
| Toraja Utara | 60,98 | 62,75 | 64,21 | 62,54 | 58,14 |
| Kota Makassar | 77,61 | 76,59 | 78,15 | 46,65 | 56,19 |
| Kota Pare-Pare | 74,06 | 70,86 | 71,21 | 51,62 | 53,67 |
| Kota Palopo | 77,47 | 73,10 | 79,10 | 61,55 | 62,17 |
| **Sulawesi Selatan** | **76,32** | **74,76** | **76,37** | **47,91** | **52,08** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Tahun 2020-2024*

b. **Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal,** Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, persentase tenaga kerja formal di Sulawesi Selatan adalah 39,50 persen. Data pada Kabupaten Maros menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal meningkat dari 2 orang pada tahun 2020 menjadi 12 orang pada tahun 2023. Selain itu, data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 9 penyandang disabilitas yang ditempatkan di sektor formal melalui lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Meskipun angka ini memberikan gambaran mengenai penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, data spesifik mengenai persentase penyandang disabilitas yang bekerja dalam sektor formal di seluruh Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 belum tersedia.

   Upaya Pemerintah terkait peningkatan partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal digambarkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan bahwa perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota 1% dari jumlah tenaga kerja di sektor swasta dan 2% di instansi pemerintah. Atas dasar kebijakan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong inklusi disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan dan bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi masyarakat untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas melalui job fair inklusif dan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Sulawesi Selatan, termasuk keterampilan teknologi, menjahit, dan layanan pelanggan agar mereka dapat bersaing di pasar kerja formal.

### 2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Gambaran kondisi Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju di Sulawesi Selatan ditunjukkan melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

a. **Indeks Kerukunan Umat Beragama.** Konsep kerukunan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

   Komponen IKUB terbentuk atas 3 dimensi utama yaitu Toleransi Antar umat Beragama, Kesetaraan Antar Umat Beragama, dan Kerjasama Antarumat Beragama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi erjas, ekonomi, budaya dan keagamaan.

**Grafik II.38**
**Indeks Kerukunan Umat Beragama**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

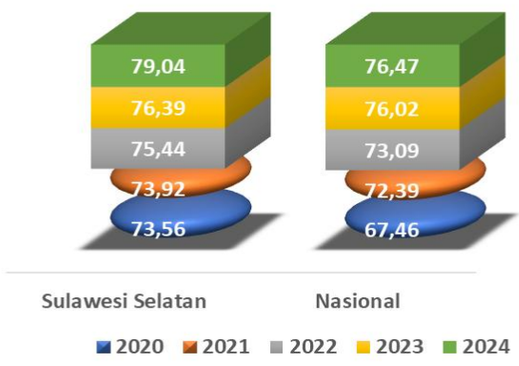


*Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Tahun 2024*

Berdasarkan data Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 hingga 2024 secara konsisten terus meningkat. IKUB Sulawesi Selatan tahun 2024 naik 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini menggambarkan bahwa kerukunan antar umat beragama cenderung membaik. Berdasarkan komponen IKUB di Sulawesi Selatan, dimensi kesetaraan mencapai nilai paling tinggi dibandingkan dimensi toleransi dan kerjasama. Dimensi toleransi memiliki nilai paling rendah yang hanya mencapai 74,84. Semenjak dilakukannya perhitungan IKUB, capaian Sulawesi Selatan terus meningkat. Capaian IKUB Sulawesi Selatan tahun 2024 masih konsisten berada diatas rata-rata nasional dan pada skala pulau Sulawesi berada pada urutan kedua di bawah Sulawesi Utara (81,33).

b. **Indeks Pembangunan Kebudayaan,** dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Dari ke tujuh dimensi tersebut, terdapat 4 dimensi yang capaiannya pada tahun 2023 dibawah nasional yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya dan Budaya Literasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan jaringan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari, intensitas pertunjukkan seni, penggunaan produk tradisional, dan peningkatan keterlibatan penduduk dalam pertunjukkan seni maupun upacara adat, serta peningkatan sinergitas antara instansi untuk pemajuan kebudayaan. Salah satu warisan budaya di Sulsel yang perlu dilestarikan adalah keberadaan lukisan Tertua dan Kebudayaan Prasejarah ditemukan di Kabupaten Maros, khususnya di Leang Tedongnge dan Leang Bulu Sipong 4, merupakan salah satu penemuan arkeologi paling signifikan di dunia. Penemuan ini tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang awal mula seni dan pemikiran simbolis manusia, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kebudayaan prasejarah di Sulawesi Selatan. Data Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 belum dirilis pada website Kemenbud.

**Grafik II.39**
**Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023**

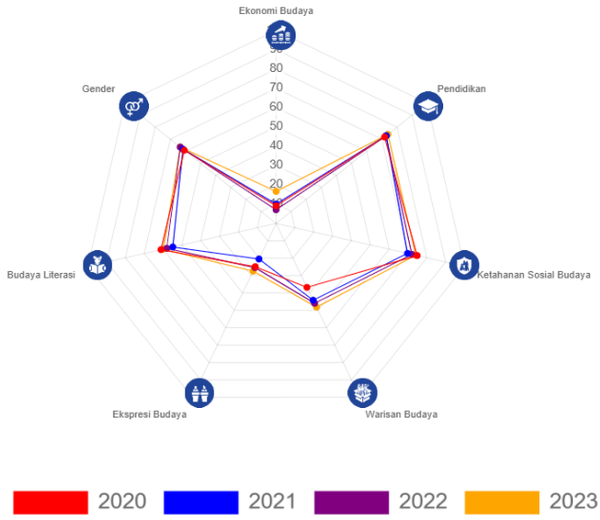


*Sumber: Sumber : https://ipk.kemenbud.go.id/provinsi/73 (Data Hasil Perhitungan IPK Provinsi Sulsel)*

Dua indikator pada dimensi warisan budaya yang merupakan capaian output, dan di masa pandemi tidak terdampak adanya pandemi covid-19, yaitu persentase cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran, angkanya tumbuh sebesar 0,59 poin berbeda dengan persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatannya, yang menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 1,47 poin. jika dianalogikan, hanya terdapat 3 dari 100 objek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang ditetapkan sebagai cagar budaya, dan terdapat 13 dari 100 objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB).

Capaian IPK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 55,26 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun pada skala regional Sulawesi berada pada urutan kedua setelah Sulawesi Utara sebesar 55,39 dan masih berada dibawah angka rata-rata Nasional sebesar 57,13.

**Tabel II. 50**
**Indeks Pembangunan Kebudayaan**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Dimensi Pembentuknya Tahun 2020-2024**

| Nama Dimensi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi Budaya | 9.13 | 10,03 | 7.08 | 16,59 | Blm rilis |
| Pendidikan | 71.83 | 72,94 | 72.75 | 74,02 | Blm rilis |
| Ketahanan Sosial Budaya | 74.92 | 69,79 | 72.09 | 74,17 | Blm rilis |
| Warisan Budaya | 36.79 | 44,20 | 45.95 | 48,18 | Blm rilis |
| Ekspresi Budaya | 24.89 | 20,46 | 25.37 | 27,48 | Blm rilis |
| Budaya Literasi | 61.12 | 54,85 | 58.05 | 60,01 | Blm rilis |
| Gender | 60.82 | 61,69 | 63.46 | 63,48 | Blm rilis |
| IPK Sulsel | 51.10 | 51,21 | 52.68 | 55,26 | Blm rilis |
| IPK Nasional | 54,65 | 51,90 | 55.13 | 57,13 | Blm rilis |

*Sumber: Sumber : https://ipk.kemenbud.go.id/provinsi/73 (Data Hasil Perhitungan IPK Provinsi Sulsel)*

**Tabel II. 51**
**Indeks Pembangunan Kebudayaan**
**Nasional dan Dimensi Pembentuknya Tahun 2020-2024**

| Nama Dimensi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi Budaya | 26.96 | 20.69 | 26.88 | 29,50 | Blm rilis |
| Pendidikan | 71.26 | 68.71 | 72.53 | 73,35 | Blm rilis |
| Ketahanan Sosial Budaya | 74.01 | 66.83 | 69.25 | 70,73 | Blm rilis |
| Warisan Budaya | 41.00 | 46.63 | 48.92 | 51,54 | Blm rilis |
| Ekspresi Budaya | 35.82 | 27.13 | 31.48 | 34,91 | Blm rilis |
| Budaya Literasi | 61.63 | 54.29 | 57.40 | 60,49 | Blm rilis |
| Gender | 58.01 | 58.55 | 59.30 | 58,71 | Blm rilis |
| IPK Nasional | 54,65 | 51,90 | 55.13 | 57,13 | Blm rilis |

*Sumber: Sumber : https://ipk.kemenbud.go.id/provinsi/73 (Data Hasil Perhitungan IPK Nasional)*

### 2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Gambaran kondisi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Sulawesi Selatan ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak, dan Indeks Pembangunan Pemuda.

a. **Indeks Perlindungan Anak,** merupakan alat untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketersediaan data IPA tahun 2020 sampai 2023, capaian indeks di Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif. Setelah pandemi Covid-19 mereda, terjadi peningkatan capaian IPA pada tahun 2022 dan 2023, meskipun belum bisa mencapai kondisi pada tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi covid 19. Jika dilihat dalam skala regional Sulawesi, posisi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke dua di bawah Sulawesi Utara (62,71). Dalam skala Indonesia IPA Sulawesi Selatan masih dibawah nasional, dan berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, IPA tertinggi berada di Kota Parepare (66,67) dan terendah di Kabupaten Tana Toraja (48,87).

   Salah satu pencapaian utama IPA dalam tahun 2024 adalah peningkatan jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah yang menyediakan program-program pendidikan yang inklusif dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu, program kesehatan anak juga ditingkatkan dengan penyediaan vaksinasi dan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal keamanan, pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan anak. Program-program sosialisasi dan pendidikan masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Meskipun ada banyak pencapaian yang telah dicapai, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti disparitas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil, serta kekurangan sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan anak. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah,

masyarakat, dan organisasi swadaya masyarakat, diharapkan indeks perlindungan anak di Sulawesi Selatan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

**Grafik II.40**
**Indeks Perlindungan Anak**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023**

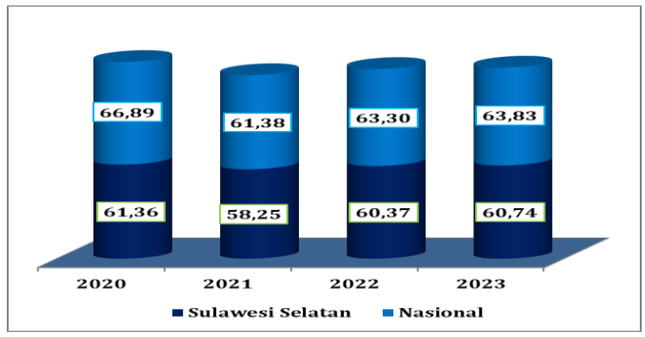


*Sumber : Kemen PPPA dan BPS, Tahun 2020-2023*

**b. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga,** mengukur kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi, data yang dapat disajikan hingga tahun 2023. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks ini merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh Bappenas dari Indeks Pembangunan Keluarga yang digunakan oleh BKKBN dan Indeks Kualitas Keluarga yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada bagian ini disajikan Indeks Kualitas Keluarga sebagai informasi dasar.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Sulawesi Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,12 poin dari tahun 2022. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga yang berada dalam kategori responsif gender dan hak anak.

**Grafik II.41**
**Indeks Kualitas Keluarga (IKK)**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023**

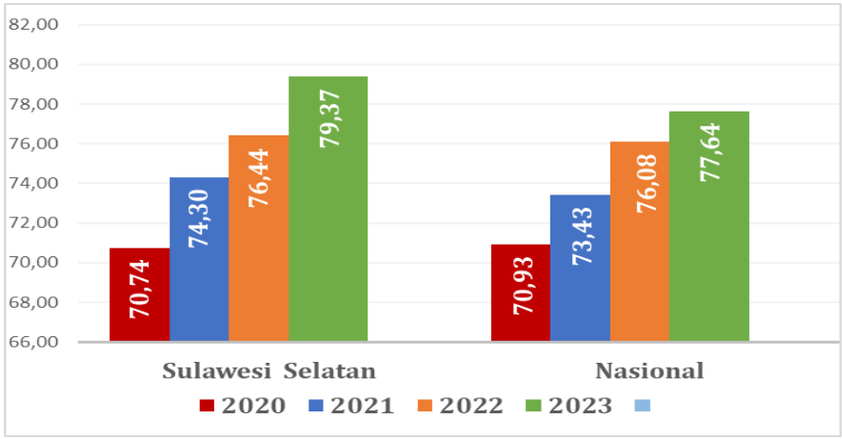


*Sumber: KPPPA dan BPS, Tahun 2023*

Dimensi penyusun IKK pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu dimensi kualitas ketahanan sosial budaya yang meningkat sebesar 2,50 poin dari 64,63 persen pada tahun 2022 menjadi 67,13 persen pada tahun 2023.

Dibandingkan dengan provinsi lain pada regional Sulawesi, IKK Sulawesi Selatan tertinggi bahkan berada diatas nilai rata-rata IKK Nasional. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Keluarga di Sulawesi Selatan, diantaranya angka perkawinan anak, termasuk perkawinan siri'. Pada tahun 2023, angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan mencapai 7,48 persen, masih berada di atas rata-rata nasional yang telah mencapai 6,94 persen. Meskipun demikian, kasus dispensasi perkawinan bagi anak (di bawah 18 tahun) di Sulawesi Selatan cenderung turun. Data dispensasi perkawinan anak Provinsi Sulawesi Selatan 2022, sebanyak 2.572 kasus, mengalami penurunan di tahun 2023, menjadi 1.482 kasus turun sebesar 58%. Namun, jika dibandingkan dengan data kehamilan dan kelahiran bagi usia anak, ternyata terdapat selisih data yang cukup tinggi, dimana jumlah kehamilan dan kelahiran yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah dispensasi.

**Tabel II. 52**
**Dispensasi Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Agama Sidenreng Rappang | 626 | 687 | 530 | 401 | 280 |
| 2 | Pengadilan Agama Watansoppeng | 318 | 341 | 278 | 158 | 77 |
| 3 | Pengadilan Agama Enrekang | 138 | 122 | 94 | 70 | 73 |
| 4 | Pengadilan Agama Pare-Pare | 115 | 148 | 123 | 55 | 59 |
| 5 | Pengadilan Agama Sengkang | 633 | 745 | 336 | 64 | 54 |
| 6 | Pengadilan Agama Barru | 106 | 143 | 78 | 76 | 53 |
| 7 | Pengadilan Agama Sinjai | 209 | 292 | 181 | 56 | 51 |
| 8 | Pengadilan Agama Pinrang | 386 | 342 | 227 | 34 | 51 |
| 9 | Pengadilan Agama Masamba | 95 | 83 | 54 | 29 | 32 |
| 10 | Pengadilan Agama Bulukumba | 199 | 183 | 61 | 55 | 24 |
| 11 | Pengadilan Agama Malili | 126 | 108 | 66 | 50 | 24 |
| 12 | Pengadilan Agama Sungguhminasa | 56 | 73 | 48 | 20 | 22 |
| 13 | Pengadilan Agama Watampone | 172 | 65 | 34 | 28 | 16 |
| 14 | Pengadilan Agama Pangkajene | 224 | 223 | 179 | 67 | 15 |
| 15 | Pengadilan Agama Makassar | 52 | 44 | 22 | 11 | 15 |
| 16 | Pengadilan Agama Jeneponto | 33 | 53 | 116 | 49 | 14 |
| 17 | Pengadilan Agama Palopo | 37 | 27 | 18 | 19 | 14 |
| 18 | Pengadilan Agama Makale | 17 | 20 | 17 | 6 | 13 |
| 19 | Pengadilan Agama Belopa | 74 | 67 | 35 | 28 | 11 |
| 20 | Pengadilan Agama Maros | 219 | 164 | 62 | 9 | 3 |
| 21 | Pengadilan Agama Bantaeng | 30 | 22 | 10 | 6 | 2 |
| 22 | Pengadilan Agama Selayar | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Pengadilan Agama Takalar | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | | **3871** | **3964** | **2572** | **1295** | **903** |

*Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan , 2025*

c. **Indeks Ketimpangan Gender,** menunjukkan ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja**.** Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 hingga 2024 secara konsisten menurun. IKG Sulawesi Selatan tahun 2020 turun 0,062 poin pada tahun 2024, dari 0,427 menjadi 0,365. Hal ini mengindikasikan menurunnya ketimpangan

gender di Sulawesi Selatan, dan bahkan masih lebih baik jika dibandingkan nasional, sedangkan berdasarkan Kabupaten/Kota IKG tertinggi di Kabupaten Tana Toraja dan terendah di Kota Pare-pare. Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Sulawesi selatan terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi pemberdayaan dan kesehatan reproduksi.

Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan yang sedikit meningkat dari 4,20 persen tahun 2023 menjadi 4,40 persen pada tahun 2024. Selain itu indikator wanita melahirkan anak lahir hidup pertama kurang dari usia 20 tahun juga menurun dari yang semula 27,90 persen menjadi 27,10 persen di tahun 2024.

Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas, meningkat dari 40,59 persen menjadi 40,98 persen, sedangkan persentase laki-laki meningkat dari 43,64 persen menjadi 44,38 persen. Sedangkan indikator keterwakilan di parlemen pada tahun 2024 menunjukkan penurunan persentase perempuan dari 25,88 persen menjadi 25,00 persen di tahun 2024. Adapun kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan di tahun 2023 semakin mengecil terlihat dari peningkatan TPAK perempuan yang lebih besar daripada peningkatan TPAK laki-laki.

**Tabel II. 53**
**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kepulauan Selayar | 0,431 | 0,400 | 0,379 | 0,377 | 0,379 |
| Bulukumba | 0,492 | 0,432 | 0,368 | 0,258 | 0,356 |
| Bantaeng | 0,490 | 0,465 | 0,392 | 0,348 | 0,416 |
| Jeneponto | 0,486 | 0,288 | 0,426 | 0,410 | 0,217 |
| Takalar | 0,411 | 0,276 | 0,396 | 0,192 | 0,329 |
| Gowa | 0,283 | 0,332 | 0,285 | 0,359 | 0,308 |
| Sinjai | 0,348 | 0,393 | 0,417 | 0,379 | 0,382 |
| Maros | 0,426 | 0,457 | 0,396 | 0,353 | 0,236 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 0,499 | 0,513 | 0,456 | 0,440 | 0,424 |
| Barru | 0,418 | 0,349 | 0,400 | 0,224 | 0,330 |
| Bone | 0,537 | 0,511 | 0,483 | 0,496 | 0,501 |
| Soppeng | 0,350 | 0,421 | 0,260 | 0,267 | 0,265 |
| Wajo | 0,467 | 0,391 | 0,428 | 0,475 | 0,419 |
| Sindereng Rappang | 0,591 | 0,564 | 0,543 | 0,452 | 0,397 |
| Pinrang | 0,393 | 0,474 | 0,501 | 0,250 | 0,280 |
| Enrekang | 0,471 | 0,471 | 0,445 | 0,276 | 0,318 |
| Luwu | 0,565 | 0,545 | 0,540 | 0,535 | 0,393 |
| Tana Toraja | 0,430 | 0,476 | 0,504 | 0,501 | 0,523 |
| Luwu Utara | 0,831 | 0,606 | 0,582 | 0,512 | 0,443 |

| Kabupaten/Kota | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Luwu Timur | 0,510 | 0,440 | 0,447 | 0,431 | 0,465 |
| Toraja Utara | 0,454 | 0,482 | 0,473 | 0,454 | 0,225 |
| Makassar | 0,330 | 0,198 | 0,188 | 0,186 | 0,356 |
| Parepare | 0,215 | 0,184 | 0,210 | 0,207 | 0,166 |
| Palopo | 0,329 | 0,286 | 0,289 | 0,273 | 0,204 |
| **Sulawesi Selatan** | **0,427** | **0,410** | **0,390** | **0,366** | **0,365** |
| **Nasional** | **0,472** | **0,465** | **0,459** | **0,447** | **0,421** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2020-2023*

**d. Indeks Pembangunan Gender,** di Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang meningkat, dari 92,86 pada tahun 2020 menjadi 93,53 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, meskipun capaian pembangunan perempuan secara keseluruhan masih belum setara (karena IPG < 100). Pada tahun 2024, capaian IPG Provinsi Sulawesi Selatan (93,53) berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 91,85. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki kinerja pembangunan gender yang lebih baik dibandingkan rata-rata capaian nasional. Dalam skala regional Sulawesi, Sulawesi Selatan menempati posisi kedua tertinggi setelah Sulawesi Utara, yang mencatat IPG sebesar 95,06 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan berbasis kesetaraan gender di Sulawesi Selatan cukup berhasil dan berkesinambungan serta mampu bersaing secara regional.

Peningkatan IPG Sulawesi Selatan didukung oleh perkembangan positif di tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan, yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan IPG. Perempuan umumnya memiliki daya tahan tubuh dan perilaku hidup sehat yang lebih baik, yang berdampak pada rata-rata pertumbuhan UHH perempuan yang lebih tinggi (0,37%) dibanding laki-laki (0,18%). Selain itu, partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi juga menunjukkan peningkatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kesetaraan kesempatan kerja dan pendapatan.

Berdasarkan data per kabupaten/kota tahun 2024, Kabupaten Sinjai mencatat capaian IPG tertinggi dengan nilai 98,3 diikuti oleh Kabupaten Enrekang (98,14) dan Kota Palopo (97,58). Capaian tinggi di wilayah ini mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi ekonomi bagi perempuan. Sebaliknya, capaian IPG terendah tercatat di Kabupaten Takalar (88,24) dan Kabupaten Toraja Utara (88,43), meskipun keduanya mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun IPG di kedua daerah tersebut mengindikasikan masih terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, kesempatan kerja formal, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel II. 54**
**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023**

| Kabupaten/Kota | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kepulauan Selayar | 91,63 | 91,50 | 91,73 | 91,94 | 92,39 |
| Bulukumba | 96,29 | 95,80 | 95,95 | 95,83 | 96,00 |
| Bantaeng | 95,78 | 95,76 | 95,35 | 95,31 | 95,33 |
| Jeneponto | 91,46 | 91,60 | 92,00 | 92,28 | 92,39 |
| Takalar | 87,56 | 87,45 | 87,66 | 87,8 | 88,24 |
| Gowa | 87,17 | 87,37 | 87,83 | 88,37 | 88,91 |
| Sinjai | 98,02 | 97,81 | 98,13 | 98,21 | 98,30 |
| Maros | 89,23 | 89,20 | 89,46 | 89,5 | 89,61 |
| Pangkep | 89,85 | 89,97 | 90,61 | 90,76 | 91,35 |
| Barru | 95,52 | 95,51 | 95,64 | 95,65 | 95,74 |
| Bone | 92,89 | 92,71 | 93,34 | 93,27 | 93,63 |
| Soppeng | 97,26 | 97,25 | 97,06 | 97,16 | 97,34 |
| Wajo | 90,25 | 90,44 | 90,33 | 90,65 | 90,65 |
| Sidenreng Rappang | 92,06 | 92,20 | 92,57 | 92,53 | 92,6 |
| Pinrang | 95,16 | 95,11 | 95,36 | 95,61 | 95,86 |
| Enrekang | 97,41 | 97,40 | 97,91 | 97,93 | 98,14 |
| Luwu | 92,16 | 92,58 | 92,79 | 92,79 | 92,83 |
| Tana Toraja | 87,97 | 88,46 | 88,48 | 88,54 | 89,05 |
| Luwu Utara | 89,20 | 89,44 | 90,00 | 90,2 | 90,33 |
| Luwu Timur | 89,71 | 89,80 | 90,34 | 90,34 | 90,44 |
| Toraja Utara | 86,83 | 86,80 | 87,32 | 87,8 | 88,43 |
| Kota Makassar | 94,47 | 94,44 | 94,52 | 94,65 | 94,99 |
| Kota Pare-Pare | 96,88 | 96,73 | 96,76 | 97,06 | 97,24 |
| Kota Palopo | 97,32 | 97,31 | 97,58 | 97,61 | 97,58 |
| **Sulawesi Selatan** | **92,86** | **92,85** | **93,14** | **93,19** | **93,53** |
| **Nasional** | **91,06** | **91,27** | **91,63** | **91,85** | **93,19** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional*

e. **Indeks Pemberdayaan Gender,** diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Salah satu indikator makro dalam melihat keberhasilan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan adalah melihat peran aktif perempuan dalam bidang

politik dan ekonomi, yang tercermin melalui nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Selatan fluktuatif dengan capaian Tahun 2024 mencapai 75,25, berada dibawah capaian nasional sebesar 77,62. Meskipun masih berada di bawah capaian nasional, angka ini mencerminkan adanya kemajuan relatif stabil dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan berbasis kesetaraan gender di wilayah Sulawesi Selatan. capaian Sulawesi Selatan termasuk salah satu yang tertinggi, khususnya jika disandingkan dengan beberapa provinsi tetangga seperti Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang memiliki capaian di bawah 74 tahun 2024.

Pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terdapat kesenjangan capaian yang cukup mencolok. Kabupaten dengan capaian tertinggi tahun 2024 adalah Kabupaten Gowa dengan nilai 81,66, disusul oleh Kabupaten Jeneponto (76,18) dan Kota Parepare (75,17). Capaian tinggi di wilayah ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ketersediaan layanan kesehatan yang responsif gender, dukungan program pemberdayaan ekonomi perempuan, dan implementasi kebijakan afirmatif di level daerah. Sebaliknya, dua kabupaten dengan capaian terendah adalah Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 54,02 dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 57,11. Angka ini menunjukkan masih besarnya tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Rendahnya capaian ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, minimnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi formal, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan tingginya disparitas geografis dan sosial. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel II. 55**
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023**

| Kabupaten/Kota | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kepulauan Selayar | 70,06 | 68,07 | 68,71 | 70,29 | 69,07 |
| Bulukumba | 68,22 | 67,10 | 70,32 | 69,74 | 74,29 |
| Bantaeng | 80,26 | 81,20 | 80,21 | 79,28 | 78,79 |
| Jeneponto | 68,24 | 68,68 | 68,94 | 70,73 | 76,18 |
| Takalar | 68,78 | 70,67 | 73,39 | 74,45 | 73,63 |
| Gowa | 77,97 | 79,71 | 78,35 | 79,70 | 81,66 |
| Sinjai | 73,46 | 73,59 | 73,78 | 71,09 | 67,08 |
| Maros | 72,43 | 72,38 | 71,63 | 71,85 | 71,86 |
| Pangkep | 59,44 | 59,94 | 64,12 | 66,38 | 58,4 |
| Barru | 63,96 | 63,98 | 65,24 | 64,91 | 65,09 |
| Bone | 56,86 | 57,55 | 59,09 | 58,61 | 63,08 |
| Soppeng | 71,15 | 70,54 | 71,07 | 74,60 | 69,91 |
| Wajo | 56,24 | 56,30 | 55,83 | 57,90 | 57,91 |
| Sidenreng Rappang | 56,86 | 56,39 | 56,71 | 60,37 | 57,11 |

| Kabupaten/Kota | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pinrang | 68,11 | 68,43 | 65,12 | 68,92 | 63,06 |
| Enrekang | 60,32 | 56,51 | 62,98 | 64,68 | 71,41 |
| Luwu | 57,15 | 57,29 | 58,03 | 55,34 | 65,77 |
| Tana Toraja | 68,50 | 68,77 | 70,68 | 70,29 | 61,66 |
| Luwu Utara | 38,11 | 41,11 | 43,96 | 47,63 | 54,02 |
| Luwu Timur | 50,76 | 54,09 | 55,4 | 53,38 | 56,12 |
| Toraja Utara | 60,98 | 62,75 | 64,21 | 62,23 | 66,57 |
| Kota Makassar | 77,61 | 76,59 | 78,15 | 78,13 | 71,04 |
| Kota Pare-Pare | 74,06 | 70,86 | 71,21 | 71,85 | 75,17 |
| Kota Palopo | 77,47 | 73,10 | 79,10 | 78,19 | 73,74 |
| **Sulawesi Selatan** | **76,32** | **74,76** | **76,37** | **75,24** | **75,25** |
| **Nasional** | **75,57** | **76,26** | **76,59** | **76,90** | **77,62** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2020-2023*

f. **Indeks Pembangunan Pemuda,** data yang dapat disajikan hingga tahun 2023. Di Sulawesi Selatan Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 meningkat 3 poin dari tahun sebelumnya, peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dari 65 pada tahun 2022 menjadi 75 pada tahun 2023. Disisi lain domain lapangan dan kesempatan kerja juga mengalami peningkatan dari 40 meningkatan menjadi 45 pada tahun 2023. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami peningkatan dari 36,67 menjadi 40. Sedangkan domain gender dan diskriminasi mengalami penurunan sebesar 3 poin dari 53 menjadi 50 pada tahun 2023. Domain pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami stagnasi dengan nilai sebesar 73,33.

   Pada tahun 2023 IPP Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan lebih tinggi dari rata-rata IPP Nasional. Sedangkan pada skala regional Sulawesi berada pada urutan ke tiga di bawah Sulawesi Tengah sebesar 60,00 dan Gorontalo sebesar 57,83. Kenaikan nilai IPP Sulawesi Selatan menjadi ukuran pembangunan kepemudaan untuk menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing terlebih lagi adanya peluang bonus demografi menuntut pemuda-pemuda untuk cerdas dalam mengambil peran dan peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pemuda diharapkan menjadi energi pembangunan yang dapat bertransformasi menjadi maju dan sejahtera dalam menuju Indonesia emas 2045.

**Grafik II.42**
**Indeks Pembangunan Pemuda**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023**

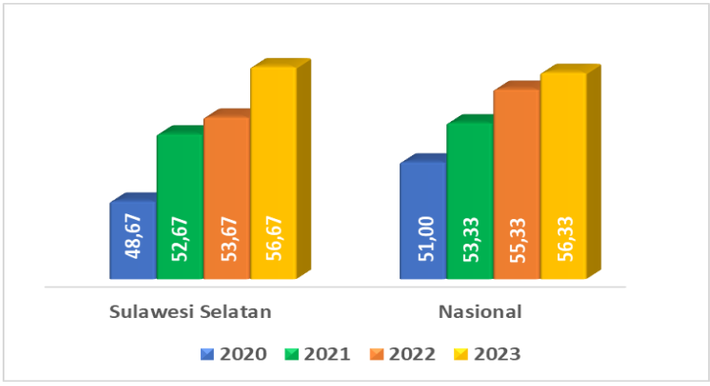


*Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023*

### 2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk mensinergikan antara *input, output dan outcome* yang ada di daerahnya secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan perubahan teknologi dan institusi yang ada di daerah tersebut, agar dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi".

Penyajian gambaran kondisi daerah terkait aspek daya saing dibagi dalam 7 aspek yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia, Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Ekonomi Makro.

#### 2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya Saing sumberdaya mausia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia suatu negara atau daerah.

a. **Angka Ketergantungan.** Angka ketergantungan penduduk merupakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 Tahun dan 65 Tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Angka ini menjadi parameter penting untuk mengukur seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif. Semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Demikian pula sebaliknya jika angka ketergantungan yang semakin rendah.

   Daya saing sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh Angka Ketergantungan penduduk, karena mencerminkan struktur demografi yang mempengaruhi produktivitas, kemandirian ekonomi dan kualitas tenaga kerja suatu wilayah. Ketika angka ketergantungan tinggi penduduk usia produktif harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk mendukung usia non

produktif, sehingga dapat mengurangi kemampuan investasi pada pendidikan, pelatihan dan pengembangan diri.

**Grafik II.43**
**Angka Ketergantungan Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024**

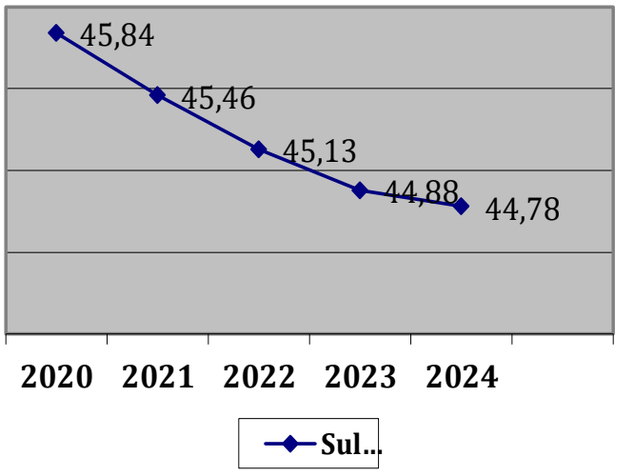


*Sumber: BPS Sulsel*

Angka ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren menurun. Angka ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 45,84 terus menurun hingga tahun 2024 sebesar 44,78 yang artinya pada tahun 2024 setiap 100 penduduk usia produktif, selain menanggung dirinya sendiri juga harus menanggung 44-45 orang usia tidak produktif. Penurunan rasio ketergantungan ini salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya jumlah kelahiran sehingga proporsi jumlah penduduk non produktif semakin berkurang.

Dari angka ketergantungan yang semakin menurun mengindikasikan Sulsel sudah memasuki bonus demografi yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Bonus demografi merupakan momen langka yang terjadi di suatu negara. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan negara jika jumlah usia produktif bisa dikelola dengan baik. Kondisi ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, usaha, bisnis, dan industri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Grafik II.44**
**Jumlah Penduduk Sulsel Berdasarkan Kelompok Umur (Ribu Jiwa)**

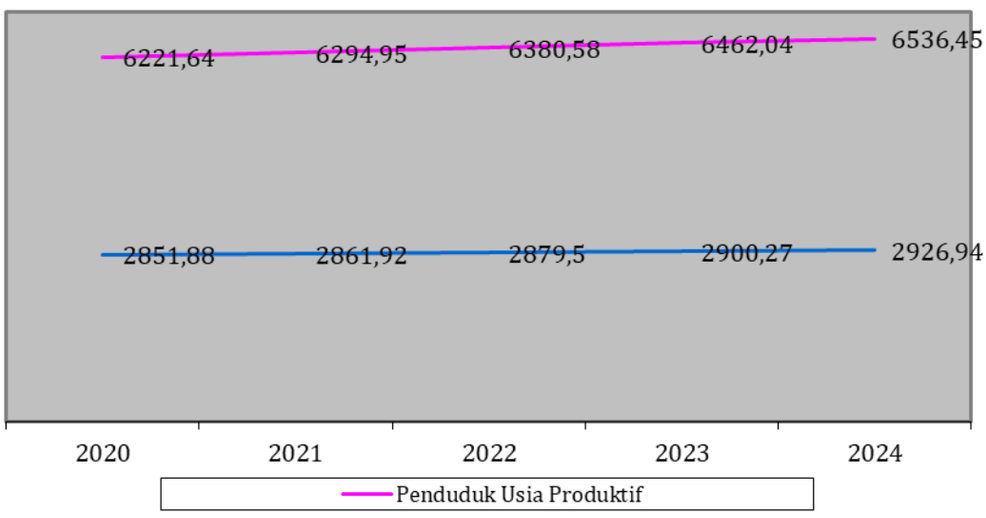


*Sumber: BPS Sulsel, diolah*

Dari grafik diatas terlihat bahwa Tahun 2020-2024 Sulsel sudah dalam periode bonus demografi. Berdasarkan data BKKBN dalam Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024, puncak bonus demografi di Sulsel Tahun 2025 dan akhir periode tahun 2039. Sulsel harus mengelola dengan baik momen ini, karena syarat kesuksesan bonus demografi adalah kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, produktivitas dan daya saing yang tinggi.

**Tabel II. 56**
**Tahapan Periode Bonus Demografi Berdasarkan Provinsi**

| PROVINSI | AWAL PERIODE BONDEM | PUNCAK BONDEM | AKHIR PERIODE BONDEM | TAHAPAN PERIODE BONDEM |
|---|---|---|---|---|
| DKI JAKARTA | 1991 | 2000 | 2039 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| BALI | 1996 | 2020 | 2033 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| DI YOGYAKARTA | 1996 | 2005 | 2033 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| JAWA TIMUR | 1997 | 2020 | 2034 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| JAWA TENGAH | 2005 | 2020 | 2034 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| BANTEN | 2009 | 2025 | 2046 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| JAWA BARAT | 2012 | 2020 | 2043 | Periode Bonus Demografi Lanjut |
| KALIMANTAN UTARA | 2000 | 2025 | 2046 | Periode Bonus Demografi |
| KALIMANTAN TIMUR | 2001 | 2030 | >2050 | Periode Bonus Demografi |
| KALIMANTAN SELATAN | 2004 | 2020 | 2039 | Periode Bonus Demografi |
| SULAWESI UTARA | 2008 | 2020 | 2036 | Periode Bonus Demografi |
| KEPULAUAN RIAU | 2008 | 2022 | 2043 | Periode Bonus Demografi |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2009 | 2020 | 2042 | Periode Bonus Demografi |
| BENGKULU | 2012 | 2020 | 2040 | Periode Bonus Demografi |
| INDONESIA | 2012 | 2020 | 2040 | Periode Bonus Demografi |
| JAMBI | 2012 | 2020 | 2041 | Periode Bonus Demografi |
| KALIMANTAN TENGAH | 2012 | 2025 | 2044 | Periode Bonus Demografi |
| LAMPUNG | 2015 | 2020 | 2039 | Periode Bonus Demografi |
| SUMATERA SELATAN | 2015 | 2030 | 2042 | Periode Bonus Demografi |
| GORONTALO | 2015 | 2025 | 2044 | Periode Bonus Demografi |
| PAPUA | 2016 | 2020 | 2042 | Periode Bonus Demografi |
| PAPUA BARAT | 2016 | 2020 | 2048 | Periode Bonus Demografi |
| RIAU | 2017 | 2030 | 2044 | Periode Bonus Demografi |
| SULAWESI TENGAH | 2017 | 2030 | 2045 | Periode Bonus Demografi |
| SULAWESI SELATAN | 2017 | 2025 | 2039 | Periode Bonus Demografi |
| KALIMANTAN BARAT | 2017 | 2025 | 2045 | Periode Bonus Demografi |
| SUMATERA BARAT | 2018 | 2020 | 2030 | Periode Bonus Demografi |
| SUMATERA UTARA | 2019 | 2020 | 2037 | Periode Bonus Demografi |
| ACEH | 2019 | 2025 | 2043 | Periode Bonus Demografi |
| NUSA TENGGARA BARAT | 2019 | 2030 | 2043 | Periode Bonus Demografi |
| MALUKU UTARA | 2019 | 2035 | 2048 | Periode Bonus Demografi |
| MALUKU | 2019 | 2025 | 2049 | Periode Bonus Demografi |
| SULAWESI TENGGARA | 2020 | 2030 | 2045 | Periode Bonus Demografi |
| SULAWESI BARAT | 2022 | 2025 | 2033 | Periode Bonus Demografi |
| NUSA TENGGARA TIMUR | - | - | - | Periode Sebelum Bonus Demografi |

*Sumber : BKKBN, Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024*

### 2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

IPTEK dan Inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi dalam jangka Panjang. Beberapa indikator berikut memberikan gambaran kondisi kemajuan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan.

a. **Rasio PDRB Industri Pengolahan,** menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Sulsel. Perkembangan industri pengolahan selama periode 2020-2024 cenderung meningkat, hal tersebut didorong oleh tiga sub sektor dengan tingkat pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri dari sub sektor Industri Makanan dan Minuman, sub sektor Industri Barang Galian bukan Logam, dan Industri Logam Dasar. Peningkatan kontribusi industry pengolahan

terhadap PDRB selama lima tahun terakhir mencapai 0,26 persen, yaitu dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 13,02 di tahun 2024.

**Tabel II. 57**
**Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**
**Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi Sulawesi Selatan** | 12,76 | 12,49 | 12,76 | 12,85 | 13,02 |
| **Nasional** | 19,87 | 19,24 | 18,34 | 18,67 | 18,98 |

*Sumber : BPS SULSEL dan Nasional*

b. **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**. Salah satu yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah Sektor pariwisata terutama pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Pada tabel dibawah memperlihatkan bahwa rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Sulsel periode 2020-2024 fluktuatif cenderung meningkat dengan capaian di tahun 2024 sebesar 1,36, demikian juga dengan rasio PDB penyediaan akomodasi makan dan minum Nasional periode 2020-2024 juga berfluktuatif, dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 2,64 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

**Grafik II.45**
**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**
**Tahun 2020 – 2024**

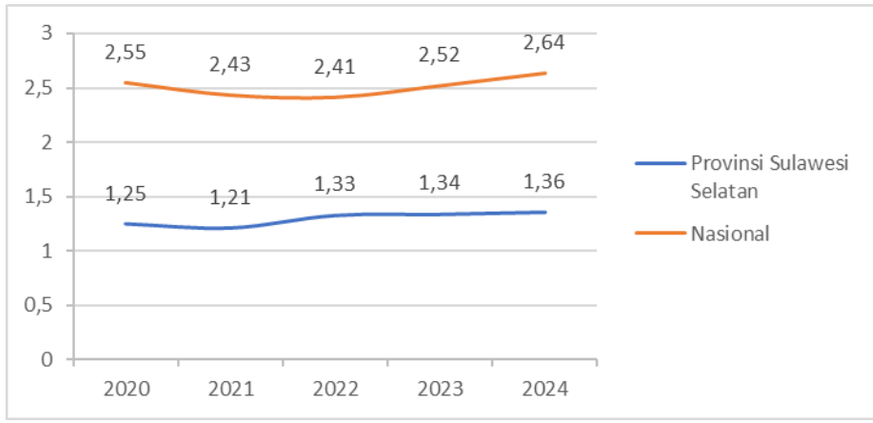


*Sumber : BPS SULSEL dan Nasional*

c. **Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara.** Pada masa pandemi Covid 19 terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebagai dampak pemberlakukan pembatasan penerbangan, larangan perjalanan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB), sehingga jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Sulsel tidak ada pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2024 menurun cukup signifikan sebesar 13.697. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya jumlah wisatawan antara lain cuaca ekstrem (hujan berkepanjangan, banjir di daerah tujuan wisata), persaingan dengan destinasi Lain, promosi pariwisata yang belum optimal di pasar internasional dibandingkan provinsi lain seperti Bali atau Yogyakarta, tahun politik di Indonesia turut memengaruhi stabilitas promosi dan fokus kebijakan.

**Grafik II.46**
**Perbandingan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara nasional dengan Sulsel Tahun 2020 – 2024**

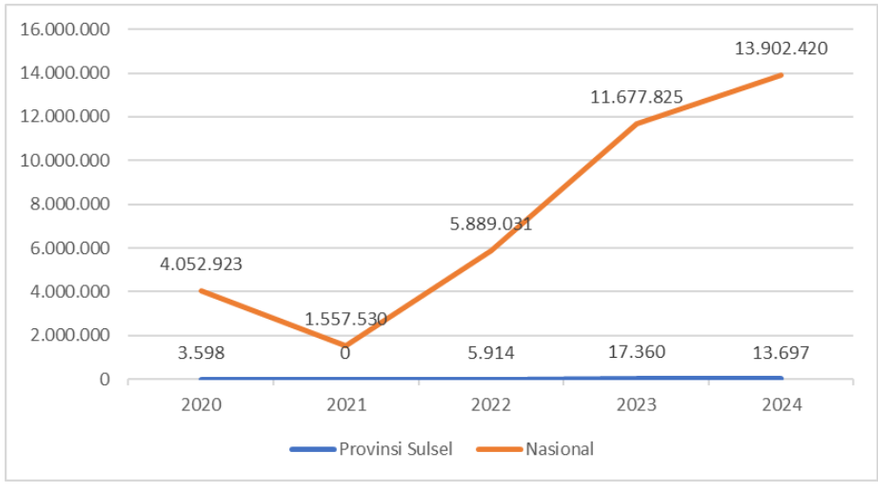


*Sumber : BPS Nasional*

Seperti halnya dengan Sulsel, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Tahun 2021 menurun drastis akibat covid-19. Tahun 2022-2024 jumlah wisatawan mancanegara kembali meningkat dengan capaian Tahun 2024 sebanyak 13.902.420 orang.

Meskipun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan cenderung meningkat, namun pariwisata unggulan Sulawesi Selatan masih perlu lebih dioptimalkan karena masih terbatas ragam atraksi, aksesibilitas dan cara promosi perlu ditingkatkan serta perbaikan kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan.

**Grafik II.47**
**Jumlah Perjalanan Wisatawan Mancanegara ke Sulsel**
**Tahun 2020 – 2024**

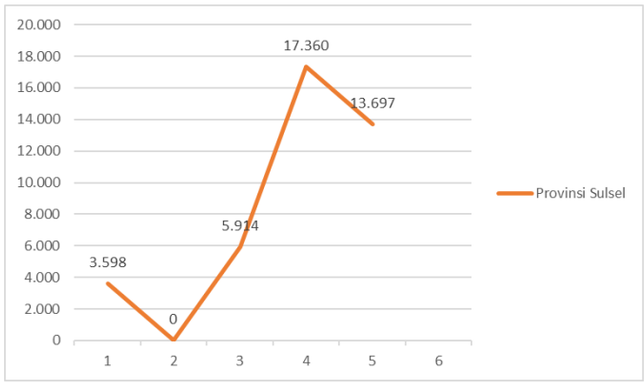


*Sumber : BPS Nasional*

Sulawesi Selatan mengalami tren pemulihan positif pasca-pandemi, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dalam hal Promosi internasional; infrastruktur pariwisata (akses, SDM, layanan); Pemetaan pasar wisatawan luar negeri. Perlu strategi terpadu untuk meningkatkan kunjungan di tahun mendatang, seperti peningkatan konektivitas udara, promosi digital, dan kolaborasi pariwisata lintas daerah.

d. **Jumlah Perjalanan Wisatawan Domestik.** Tahun 2020 dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah perjalanan wisatawan nusantara memberi pengaruh yang signifikan, sama halnya dengan Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara,

meskipun tidak sampai nol jumlahnya, karena dengan adanya pembatasan perjalanan udara, sehingga masyarakat memilih melakukan wisata lokal terbatas. Pembatasan mobilitas, PPKM, dan penutupan destinasi menyebabkan jumlah wisatawan nusantara turun drastis. Mulai Tahun 2021-2024 Jumlah kunjungan wisatawan domestik kembali meningkat dengan jumlah kunjungan di tahun 2024 mencapai 36.518.290. Hanya tahun 2023 sempat menurun sebesar menjadi 25.426.960. Penurunan yang terjadi pada tahun 2023, bukan karena daya tarik wisata menurun, tetapi karena: Efek pembanding dari lonjakan sementara di 2022, karena "ledakan" wisatawan setelah dua tahun pandemi. Banyak orang melakukan perjalanan secara impulsif. Kenaikan harga BBM dan inflasi membuat biaya liburan ke Sulsel menjadi mahal. Selain itu persaingan ketat dari destinasi lain diluar Sulsel yang gencar melakukan promosi wisata domestiknya.

**Grafik II.48**
**Jumlah Perjalanan Wisatawan Domestik ke Sulsel**
**Tahun 2020 – 2024**

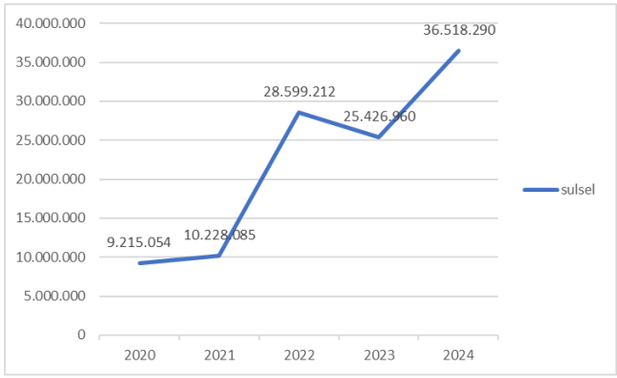


*Sumber : BPS Sulsel*

e. **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%). Ekonomi Kreatif** adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Ini mencakup berbagai industri dan aktivitas ekonomi seperti seni pertunjukan, media, desain, periklanan, mode, arsitektur, dan lainnya yang menghasilkan nilai tambah dari ide-ide dan ekspresi kreatif.

Berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kemenparekraf, pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin, laki-laki sebesar 63,52 persen perempuan sebesar 36,48 persen. Sub sektor ekonomi kreatif terbanyak di bidang kuliner sebesar 24,59 persen, seni pertunjukkan sebesar 15,83 persen, dan musik sebesar 14,62 persen, serta di bidang lainnya sebesar 44,96 persen. Jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak berada di Kota Makassar mencapai 60,44 persen, 13,03 persen di Gowa dan di Maros sebesar 3,08 persen. Terkait data PDRB Ekonomi Kreatif provinsi tidak tersedia datanya pada Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.

f. **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Tingkat Provinsi.** Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah. UKM tidak termasuk anak perusahaan, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan skala besar. UKM dapat berupa usaha mikro, kecil, dan menengah. UKM lebih fokus pada penjualan

dengan omset lebih besar dari IKM. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian di level provinsi dapat berupa usaha kuliner, fashion, dagang, rumah makan, industri pengolahan, bangunan/konstruksi, persewaan, jasa.

Berdasarkan tabel berikut dan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro dari tahun 2020 ke tahun 2024 meningkat sebesar 507.533 unit usaha atau 44,37 persen. Namun peningkatan usaha kecil hanya mencapai 1.502 unit usaha atau sebesar 1,31 persen. Perkembangan yang sangat pesat terjadi pada usaha menengah, yang peningkatannya mencapai hingga 978 persen atau dari 3.185 unit usaha di tahun 2020 menjadi 34.349 di tahun 2024.

**Tabel II. 58**
**Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 (Feb) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Sulsel | Mikro | Kecil | Menengah | Mikro | Kecil | Menengah | Mikro | Kecil | Menengah | Mikro | Kecil | Menengah | Mikro | Kecil | Menengah |
| Jumlah | 1.143.740 | 114.718 | 3.185 | NA | NA | NA | 1.456.543 | 114.718 | 3.185 | 194.750 | 1.502 | 31.164 | 1.651.273 | 116.220 | 34.349 |
| Total | 1.261.643 | | | NA | | | 1.574.446 | | | 227.396 | | | 1.801.842 | | |

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan*

g. **Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Tingkat Provinsi.** Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah kegiatan usaha yang berfokus pada produksi bahan baku dari sebuah usaha dan dapat menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Omset IKM lebih kecil dari Usaha Kecil dan Menengah **(**UKM).

Perkembangan jumlah industri kecil dan menengah selama 5 tahun terakhir mencapai 59,69persen, yaitu dari 25.502 unit menjadi 40.725. peningkatan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan dinamika positif dalam sektor industri skala kecil hingga menengah yang mencerminkan tumbuhnya semangat kewirausahaan penyerapan tenaga kerja, serta pemanfaatan potensi lokal. Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif ini perlu diimbangi dengan penguatan aspek kualitas, daya saing dan keberlanjutan usaha agar IKM mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan inklusif dan berdaya saing.

**Tabel II. 59**
**Jumlah Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IKM** | 25.502 | 22.959 | 36.563 | 40.510 | 40.725 |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan*

h. **Rasio Kewirausahaan.** Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha dengan total angkatan kerja. Kondisi kewirausahaan di Sulawesi Selatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan meskipun demikian rasio kewirausahaan Sulawesi Selatan pada tahun 2022 baru mencapai 3,25 persen, kemudian tahun 2024 meningkat menjdi 3,50 persen dibawah capaian Nasional yang mencapai sebesar 3,95 persen. Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan perlu didukung dengan program pelatihan bagi wirausaha, akses pembiayaan, serta pendampingan untuk UMKM naik kelas. Secara umum, kewirausahaan di Sulawesi Selatan cukup dinamis dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kewirausahaan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah

pengembangan infrastruktur untuk pengembangan usaha, peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, insentif kepada pelaku usaha, perluasan akses permodalan, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang lebih intensif kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

**Tabel II. 60**
**Rasio Kewirausahaan di Sulsel Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulsel | 2.9 | 3.0 | 3.25 | na | 3,50 |

*Sumber: Data Sektoral Provinsim, Kementerian PPN/ Bappenas 2024*

i. **Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB**. Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat dalam satuan rupiah.
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB tahun 2020-2021 meningkat, kemudian turun drastis pada tahun 2022, kemudian Kembali meningkat dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 0,90 persen.

Tahun 2024 menunjukkan kinerja terbaik koperasi dalam 5 tahun, baik dari segi volume usaha maupun kontribusi terhadap PDRB. Kenaikan rasio di 2023 dan 2024 menunjukkan pemulihan dan penguatan peran koperasi dalam perekonomian.

**Tabel II. 61**
**Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Koperasi Aktif (Unit)** | 5.201 | 4,528 | 4.417 | 4.977 | 4.607 |
| **Volume Usaha (A)** | 3.492.230.937.764 | 4.050.608.059.112 | 2.343.465.793.613 | 3.802.591.182.529 | 6.269.154.061.136 |
| **PDRB Sulsel (B)** | 504.052.526.560.000 | 544.857.139.630.000 | 605.148.862.500.000 | 652.574.052.400.000 | 696.250.000.000.000 |
| **Rasio A terhadap B** | 0,69 | 0,74 | 0,39 | 0,58 | 0,90 |

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan*

j. **RoA (*Return on Assets*) BUMD,** mencerminkan seberapa efektif BUMD dalam menghasilkan keuntungan (laba bersih) dari total aset yang dimilikinya. RoA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. RoA yang lebih rendah bisa mengindikasikan bahwa BUMD mungkin perlu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. RoA BUMD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 2,34, turun menjadi 2,15 di tahun 2023. Kenaikan laba bersih dari tahun 2021 ke tahun 2023 hanya sebesar 2 persen, sementara kenaikan total aset mencapai 11 persen.

BUMD Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam laporan keuangan BUMD adalah PT. Sulsel Citra Indonesia (PT. SCI), PT. Jamkrida Sulsel, PT. Bank Sulselbar, PT. Sulsel Andalan Energi, dan Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 5 BUMD ini, perolehan laba bersih tertinggi dicapai PT Bank Sulselbar sebesar RP. 651.826.055.112 dan PT Sulsel Andalan Energi laba bersihnya paling rendah (Rp. -6.643.238). BUMD dengan total aset terbesar dicapai oleh PT Bank Sulselbar sebesar Rp. 30.799.458.215.010 dan Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tidak memiliki asset yang tercatat atau total asetnya 0.

**Tabel II. 62**
**Total Aset dan Laba Bersih BUMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023**

| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Aset BUMD (Rp) | 28.140.903.504.716 | 30.005.771.679.628 | 31.150.786.587.564 | Menunggu Perhitungan Data Dari OPD |
| Laba Bersih BUMD (Rp) | 659.446.348.948,99 | 660.114.664.580,59 | 670.926.810.102,06 | Menunggu Perhitungan Data Dari OPD |
| RoA BUMD | 2,34 | 2,19 | 2,15 | Menunggu Perhitungan Data Dari OPD |

*Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited, Biro Ekbang Provinsi*

k. **Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).** Nilai Tukar Petani/ Nelayan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani/nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan (IB), yang dinyatakan dalam persentase.

NTP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 terus meningkat. Capaian Tahun 2024 sebesar 117,87 atau naik 9,94 persen dibandingkan dengan NTP Tahun 2023 sebesar 107,93. Jika dibandingkan dengan Nasional, NTP Sulsel masih lebih rendah.

Untuk NTN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 terus meningkat, dengan capaian Tahun 2024 sebesar 111,92, meningkat sedikit 0,22 persen dari tahun sebelumnya.

**Tabel II. 63**
**Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulsel**
**Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **NTP Sulsel (%)** | 96,97 | 98,55 | 100,39 | 107,93 | 117,87 |
| **NTP Nasional** | 101.65 | 104.64 | 109.73 | 112.46 | 119.62 |
| **Nilai Tukar Nelayan (%)** | 99,64 | 107,43 | 109,29 | 111,70 | 111,92 |

*Sumber: BPS diolah Pusdatin; Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel*

l. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK** adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sedangkan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja.. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS TPAK di Sulsel periode 2020-2024 cenderung meningkat, hanya tahun 2023 menurun 0,52 persen dari tahun 2022. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,38 persen, naik 1,71 persen poin dibanding Agustus 2023. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah peningkatan dalam berbagai sektor usaha seperti perdagangan, industri pengolahan dan sektor jasa yang menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan, serta pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi yang telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dan juga adanya program pendidikan dan

pelatihan vokasional yang ditingkatkan yang telah memberikan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK Perempuan periode 2020-2022 meningkat, hanya tahun 2023 menurun 0,84 persen dari tahun 2022, kemudian meningkat lagi tahun 2024 sebesar 52,68. Meskipun partisipasi perempuan dalam dunia kerja cenderung meningkat tiap tahun namun jumlahnya masih jauh dibanding pria. Adanya paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga menjadi salah satu penyebab besarnya perbedaan TPAK Laki-laki dengan perempuan juga adanya pemikiran bahwa jenis pekerjaan tertentu hanya bisa dilakukan oleh pria.

**Tabel II. 64**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Agustus) Provinsi Sulsel Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TPAK** | 63,40 | 64,73 | 66,18 | 65,66 | 67,38 |
| **TPAK Perempuan** | 48,16 | 49,42 | 50,46 | 49,62 | 52,68 |
| **TPAK Laki-laki** | 79,66 | 81,03 | 82,91 | 82,22 | 82,52 |

*Sumber: BPS Sulsel*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berfluktuasi di berbagai Kabupaten/Kota di Sulsel misalnya Kepulauan Selayar, tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,93 persen pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 71,88 persen tahun 2023, namun turun menjadi 67,19 persen pada tahun 2024. Sementara di Kota Makassar, angka partisipasi relatif stabil dengan peningkatan dari 59,27 persen tahun 2022 menjadi 62,04 persen pada tahun 2024. Diantara 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2024, capaian tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Tana Toraja.

Dalam skala regional Sulawesi, Posisi Sulawesi Selatan berada dibawah Sulawesi Tenggara (72,81), Sulawesi Barat (71,4), Sulawesi Tengah (71,1) dan Gorontalo (69,95), sedangkan posisi Sulawesi Utara (66,07) berada dibawah Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, masih berada dibawah rata-rata Nasional (70,63) persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK diantaranya adalah pendidikan, Penduduk Usia Kerja, Upah yang lebih tinggi dapat mendorong lebih banyak orang untuk memasuki angkatan kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi yang positif dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan TPAK.

**Tabel II. 65**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | Agustus 2020 persen | Agustus 2021 persen | Agustus 2022 persen | Agustus 2023 persen | Agustus 2024 persen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Selayar | 68,18 | 69,07 | 69,93 | 71,88 | 67,19 |
| Bulukumba | 68,26 | 65,46 | 65,27 | 70,78 | 72,39 |
| Bantaeng | 73,14 | 74,32 | 75,36 | 75,58 | 78,39 |
| Jeneponto | 68,87 | 67,39 | 75,26 | 66,44 | 67,48 |
| Takalar | 62,80 | 65,84 | 64,46 | 65,86 | 64,43 |
| Gowa | 67,62 | 68,89 | 73,16 | 69,63 | 72,8 |
| Sinjai | 69,90 | 71,91 | 63,34 | 67,16 | 72,87 |
| Maros | 62,43 | 59,61 | 61,37 | 61,45 | 61,55 |
| Pangkajene dan Kepulauan | 63,85 | 64,43 | 74,66 | 69,98 | 71,17 |
| Barru | 57,18 | 58,14 | 62,36 | 62,26 | 59,32 |
| Bone | 60,67 | 65,67 | 67,48 | 62,69 | 64,23 |
| Soppeng | 57,05 | 58,94 | 61,9 | 59,44 | 62,49 |
| Wajo | 65,99 | 64,58 | 61,13 | 65,78 | 67,75 |
| Sindereng Rappang | 56,92 | 58,70 | 57,63 | 55,49 | 61,19 |
| Pinrang | 59,11 | 57,78 | 57,72 | 60,51 | 64,17 |
| Enrekang | 70,80 | 72,64 | 72,05 | 68,09 | 75,35 |
| Luwu | 61,02 | 64,22 | 67,74 | 68,61 | 68,31 |
| Tana Toraja | 73,25 | 77,99 | 85,11 | 82,35 | 76,41 |
| Luwu Utara | 58,61 | 63,07 | 72,23 | 66,98 | 69,23 |
| Luwu Timur | 72,36 | 73,14 | 71,51 | 69,25 | 70,18 |
| Toraja Utara | 67,50 | 71,56 | 68,84 | 77,5 | 72,53 |
| Makassar | 58,05 | 59,70 | 59,27 | 58,72 | 62,04 |
| Parepare | 65,53 | 66,94 | 63,62 | 65,52 | 69,67 |
| Palopo | 61,23 | 59,95 | 63,65 | 65,75 | 66,19 |
| **Sulawesi Selatan** | **63,40** | **64,73** | **66,18** | **65,66** | **67,38** |
| **Nasional** | **67,77** | **67,80** | **68,63** | **69,48** | **70,63** |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional*

Keterbukaan ekonomi dan globalisasi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja tidak hanya datang dari pasar domestik tetapi juga pasar internasional. Permintaan yang datang dari pasar tenaga kerja internasional kemudian memperluas lapangan pekerjaan dan pada akhirnya dapat membantu menurunkan angka pengangguran. Memfasilitasi proses mobilisasi calon pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari upaya mempertemukan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan. Fasilitasi pekerja migran memberikan salah satu implikasi kebijakan yang penting untuk mengurangi angka pengangguran.

**Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, baik di sektor formal maupun informal. PMI berperan penting sebagai penyumbang devisa negara melalui remitansi (pengiriman uang ke tanah air) sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Istilah "PMI" secara resmi menggantikan sebutan lama "Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)" untuk menghilangkan stigma negatif dan menegaskan hak-hak pekerja migran yang setara, sesuai dengan prinsip perlindungan dan martabat manusia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam ekonomi domestik dan luar negeri, masuk dalam 16 provinsi dengan penempatan PMI tertinggi. Pemprov Sulsel juga aktif dalam melindungi PMI, termasuk menangani kasus PMI sakit dan PMI ilegal.

**Tabel II. 66**
**Jumlah Pekerja Migran Indonesia Asal Sulsel**
**Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PMI Asal Sulsel (org)** | 300 | 147 | 663 | 2.090 | 2.341 |
| PMI (org) | 113.436 | 72.624 | 200.717 | 297.108 | 89.127 |
| % PMI Asal Sulsel | 0,26 | 0,20 | 0,33 | 0,70 | 2,6 |

*Sumber : Laporan Publikasi Data PMI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); * Data Periode Jan-Apr 2025 (ditarik per 1 Mei 2025)*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel cenderung meningkat setiap tahun dengan capaian pada tahun 2024 sebanyak 2.341 orang.

Jika dibandingkan dengan total jumlah Pekerja Migran Indonesia, persentase jumlah PMI Sulsel masih sangat kecil.

Untuk skala nasional, Jumlah Pekerja Migran Indonesia fluktuatif dengan capaian hingga bulan April tahun 2024 sejumlah 89.127 orang. Terjadi penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2023 yang berjumlah 297.108 orang. Penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor utama :

- Penutupan Sektor Tenaga Kerja Asing di Malaysia. Malaysia, sebagai salah satu tujuan utama penempatan PMI, menutup sektor manufaktur, konstruksi, dan perladangan untuk tenaga kerja asing pada periode Maret hingga Mei 2024. Kebijakan ini mengakibatkan penurunan jumlah penempatan PMI di negara tersebut. Pada 2024, tercatat 50.917 PMI ditempatkan di Malaysia, sementara pada 2023 jumlahnya mencapai 63.000 orang.
- Tingginya Minat Berwirausaha di Dalam Negeri. Di beberapa daerah, terjadi penurunan jumlah PMI karena meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Banyak warga yang memilih untuk membuka usaha mikro kecil di kampung halaman, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri.
- Peningkatan Peluang Kerja Domestik. Sektor bisnis online dan peluang kerja lainnya di dalam negeri semakin berkembang, menarik minat calon PMI untuk bekerja di dalam negeri.
- Kebijakan Negara Tujuan Penempatan. Beberapa negara tujuan penempatan PMI, seperti negara-negara di Timur Tengah, menutup peluang kerja bagi

tenaga kerja asal Indonesia. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah PMI yang berangkat ke negara-negara tersebut.

- Kondisi Ekonomi Lokal yang Meningkat

m. **Indeks Kapabilitas Inovasi.** Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran mengenai kuantitas dan kualitas riset serta inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, pilar ini menunjukkan sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Kapabilitas Inovasi merupakan salah satu pilar dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu pilar 12.

Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang untuk merekombinasi pengetahuan, sehingga menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.Parameter yang digunakan untuk menghitung Nilai Kapabilitas Inovasi :

1. Keanekaragaman Tenaga Kerja (sumber data BPS)
2. Pengembangan Klaster (untuk Provinsi ) (sumber data BPS, Kementerian Perindustrian, Dinas Perdagangan)
3. Publikasi Ilmiah (sumber data Kemendikbud Ristek)
4. Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI) (sumber data KemenkumHAM, Kementerian Pertanian)
5. Belanja Riset (sumber data Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, BRIN)
6. Indeks Keunggulan Lembaga Riset (sumber data Kemendikbud Ristek)
7. Aplikasi Merek Dagang (sumber data Kemendikbud Ristek, KemenkumHAM).

**Tabel II. 67**
**Indeks Kapabilitas Inovasi Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulawesi Selatan | % | NA | NA | 3,48 | 3,7 | 3,68 |
| Nasional | % | NA | NA | 2,62 | 3,02 | 3,13 |

*Sumber: Data IDSD Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, diolah*

Nilai Kapabilitas Inovasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 3,68 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi masih berada diatas nilai nasional (3,13), dan menempati urutan ke 9 tertinggi secara nasional, dibawah DI Yogyakarta (4,72), Jawa Tengah (4,64), Jawa Barat (4,63), Jawa Timur (4,63), Bali (4,06), Sumatera Barat (4,03), Sumatera Utara (3,84), DKI Jakarta (3,77).

**n. Indeks Inovasi Daerah.** Inovasi di tingkat daerah memiliki peran yang signifikan dalam konteks pembangunan dan kemajuan suatu wilayah dan merupakan gambaran kekuatan kondisi institusi di daerah. Indeks Inovasi Daerah, merupakan sejumlah inovasi daerah sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya.

Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 nilai IID Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 2.530 poin yang menggunakan metode perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) skala 0-1000. Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode perhitungan IID dengan menggunaan skala 0-100, dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat pada kurun waktu tahun 2021 dan 2022 (49,24 menjadi 55,43), namun pada tahun 2023 turun 2,34 poin atau sebesar 53,09 poin.. IID Sulawesi Selatan tahun 2024 sebesar 59,66 termasuk kategori inovatif. Capaian ini menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi dengan nilai IID tertinggi untuk wilayah regional Sulawesi; dan mencapai peringkat ke 12 dari seluruh provinsi di Indonesia.

**Tabel II. 68**
**Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulawesi Selatan | % | 2.530 | 49,24 | 55,43 | 53,09 | 59,66 |

*Sumber: Data IDSD Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional*

### 2.1.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

Daya saing ekonomi yang ditunjukkan oleh beberapa indikator, dibangun dalam kerangka keberlanjutan dalam ekosistem **ekonomi hijau dan ekonomi biru**.

a. **Indeks Ekonomi Hijau** mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan dan iklim, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Data yang dapat disajikan hingga tahun 2023, karena untuk data tahun 2024 belum rilis karena masih ada komponen pilar Indeks ini belum selesai perhitungannya. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

**Tabel II. 69**
**Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya**
**di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Pilar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor Pilar Lingkungan | 35,54 | 54,47 | 54,42 | 55,47 | Blm rilis |
| Skor Pilar Ekonomi | 74,27 | 72,61 | 86,03 | 85,78 | Blm rilis |
| Skor Pilar Sosial | 59,49 | 62,06 | 65,37 | 66,22 | Blm rilis |
| Skor Indeks Ekonomi Hijau Sulsel | 57,42 | 63,75 | 69,99 | 70,46 | Blm rilis |

*Sumber: Bappenas*

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan skor komposit dari 57,42 pada tahun 2020 menjadi 70,46 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan menuju ekonomi hijau. Naiknya capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2023, salah satunya dipengaruhi oleh pilar ekonomi, utamanya pada indikator intensitas energi final, produktivitas perikanan budidaya, dan produktivitas tenaga kerja sektor industri. Meskipun demikian, Sulawesi Selatan perlu meningkatkan perhatian pada pilar lingkungan (indikator tutupan hutan dan penurunan emisi kumulatif dari *baseline*) dan pilar ekonomi (indikator tingkat kemiskinan). Pendetailan strategi dan intervensi untuk meningkatkan capaian indeks ekonomi hijau telah dituangkan dalam rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sulawesi Selatan.

b. **Indeks Ekonomi Biru.** Pada konteks paradigma keberlanjutan (sustainability paradigm), terminologi "**Ekonomi Biru**" dapat melengkapi konsep Ekonomi Hijau karena Indeks Ekonomi Biru Indonesia juga dibangun dengan 3 pilar yang menjadi komponen utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan).

Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Saat ini, IBEI dihitung di tingkat provinsi dan dirata-ratakan untuk mendapatkan angka nasional.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perhitungan terhadap IBEI provinsi dan rata-rata nasional, dimana rata-rata IBEI di tingkat nasional sebesar 43,98 pada tahun 2023, naik dari posisi tahun 2022 sebesar 41,28. Nilai IBEI standardisasi antara 1 hingga 100, dimana semakin tinggi skor menunjukkan kinerja yang semakin baik. Jika dilihat per pilar, nilai rata-rata untuk pilar sosial adalah 53,21, pilar lingkungan sebesar 28,94, dan pilar ekonomi sebesar 20,15. Hal ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan skor yang cukup signifikan antara pilar IBEI. Lebih lanjut, rendahnya skor pada pilar ekonomi mengindikasikan belum optimalnya penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya perairan. Begitupun dengan rendahnya skor pada pilar lingkungan menunjukkan pengelolaan ekonomi biru yang belum ramah terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun kontribusi tinggi dari

pilar sosial berasal dari tingginya kinerja sub-pilar kesehatan, terutama konsumsi protein dan ikan.

Secara regional, Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi tertinggi dengan nilai IBEI sebesar 80,86 pada tahun 2023, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor IBEI masing-masing sebesar 71,63 dan 68,50. Berdasarkan pilar, capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan signifikan lebih tinggi pada pilar sosial, yaitu sebesar 85,5, sedangkan pilar ekonomi dan lingkungan masing-masing hanya sebesar 52,0 dan 50,2. Selain menunjukkan ketimpangan antar pilar, kondisi ini juga menandakan relatif belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem perairan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, skor pilar ekonomi mencapai 74,3 atau yang tertinggi di Indonesia, terutama karena ditopang oleh sub-pilar manufaktur berbasis kelautan. Artinya, hilirisasi produk perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif tertinggal dibanding Provinsi Jawa Timur.

Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan IBEI hanya di level provinsi, sedangkan indikator di level kabupaten/kota belum tersedia. Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang diterapkan di level provinsi dan nasional, disajikan perhitungan IBEI level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Hasil perhitungan menunjukkan Kabupaten Sinjai menempati skor paling tinggi, yaitu sebesar 86,0 di tahun 2023. Di urutan kedua dan ketiga terdapat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kepaluan Selayar dengan skor IBEI masing-masing sebesar 85,3 dan 83,6. Adapun daerah dengan skor IBEI terendah ditempati oleh Kabupaten Soppeng (53,2), Tana Toraja (53,9), dan Gowa (54,1). Kinerja IBEI Kabupaten Sinjai terutama ditopang oleh Pilar Lingkungan, terutama yang terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah kepulauan. Sementara itu, kinerja IBEI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama ditopang oleh Pilar Sosial, di antaranya adalah jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan tangkap yang menempati kategori tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada aspek lingkungan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga relatif tinggi pada indikator jumlah desa pesisir dengan tempat pembuangan sampah dan indikator jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar dan saluran air limbah. Tabel dibawah menyajikan skor IBEI kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023.

**Tabel II. 70**
**Skor IBEI Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | Pilar 1: Ekonomi | Pilar 2: Lingkungan | Pilar 3: Sosial | IBEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinjai | 64,7 | 95,0 | 61,2 | 86,0 |
| 2 | Pangkajene dan Kepulauan | 68,2 | 72,8 | 73,9 | 85,3 |
| 3 | Kepulauan Selayar | 77,3 | 56,6 | 73,7 | 83,6 |
| 4 | Jeneponto | 67,1 | 48,9 | 81,6 | 79,9 |
| 5 | Palopo | 54,6 | 65,4 | 80,2 | 79,6 |
| 6 | Luwu | 69,7 | 51,6 | 75,8 | 79,5 |
| 7 | Makassar | 57,3 | 55,8 | 81,5 | 78,0 |
| 8 | Luwu Utara | 64,8 | 67,1 | 62,5 | 77,1 |
| 9 | Bone | 65,2 | 45,9 | 79,2 | 77,1 |
| 10 | Pinrang | 57,5 | 54,5 | 77,1 | 75,8 |
| 11 | Takalar | 66,8 | 53,2 | 68,3 | 75,6 |
| 12 | Sindereng Rappang | 49,9 | 73,0 | 65,9 | 74,1 |
| 13 | Luwu Timur | 59,7 | 51,7 | 60,5 | 68,8 |
| 14 | Bulukumba | 55,9 | 51,6 | 58,1 | 66,1 |
| 15 | Maros | 49,5 | 46,6 | 67,3 | 65,6 |
| 16 | Wajo | 62,2 | 48,1 | 48,4 | 63,6 |
| 17 | Parepare | 56,1 | 49,9 | 51,3 | 62,7 |
| 18 | Barru | 57,3 | 51,4 | 46,3 | 61,7 |
| 19 | Enrekang | 46,8 | 44,6 | 54,0 | 58,1 |
| 20 | Toraja Utara | 46,8 | 44,6 | 53,6 | 57,9 |
| 21 | Bantaeng | 49,9 | 44,8 | 45,5 | 55,9 |
| 22 | Gowa | 47,9 | 44,6 | 43,3 | 54,1 |
| 23 | Tana Toraja | 46,8 | 44,6 | 44,1 | 53,9 |
| 24 | Soppeng | 47,6 | 44,6 | 41,5 | 53,2 |

*Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulsel*

- Skor 78,7 – 86,0 kategori tinggi
- Skor 71,5 – 78,7 kategori agak tinggi
- Skor 59,9 – 71,5 kategori sedang
- Skor 53,2 – 59,9 kategori rendah

c. **Nilai Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer,** selama kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami tren peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 28,82 persen, lebih tinggi dari capaian Nasional yang hanya mencapai 12,30 persen yang didukung melalui kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tetapi tahun 2024 turun menjadi 27,33 persen. Tantangan terberat dalam peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer adalah tingginya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan jenis energi hijau, sifatnya *intermittent*, dan kurangnya tenaga kerja terampil untuk EBT. Kurangnya pembangunan infrastruktur EBT sementara di sisi lain infrastruktur EBT yang ada banyak yg sudah tidak berfungsi dan tidak dapat dilakukan pemeliharaan karena pengadaannya dilakukan melalui belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Selain itu ketidakpastian regulasi dan kebijakan, serta konsumsi energi fosil yang masih tinggi khusus pada sektor industri dan rumah tangga, sangat mempengaruhi capaian kinerja ke depannya.

**Grafik II.49**
**Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

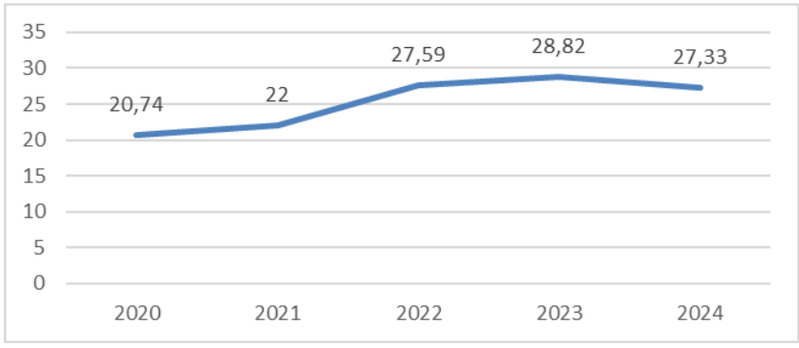


*Sumber: Dinas ESDM*

### 2.1.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital tidak hanya sekadar proses adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih luas pada pola pikir, cara kerja, dan interaksi Masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik. Sebagai bangsa yang tengah beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan diri menuju Visi Indonesia Digital 2045, yang berfokus pada pembangunan masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya.

a. **Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)**, digunakan untuk mengukur kemajuan digitalisasi di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Pengukuran TDN dilakukan dalam tiga tahapan: fondasi, adaptasi, dan akselerasi. TDN menilai kemajuan digital melalui 104 indikator yang mencakup 5 pilar utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan ekosistem digital. Dengan TDN, dapat diketahui posisi Sulawesi Selatan dalam transformasi digital dan mendapatkan rekomendasi strategis untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor.

   Dalam menyusun perencanaan nasional ke depan yang sinergis akan memerlukan acuan ukuran yang bisa dimonitor bersama. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

   Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kondisi transformasi digital yang terus mengalami perkembangan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil Indeks Transformasi Digital Nasional di Sulawesi Selatan yang menunjukkan peningkatan dari skor 50,64 pada tahun 2018 menjadi 54.43 (baik) pada tahun 2022. Untuk penilaian 2023 dan 2024 terkait pengukuran setiap tahunnya Kementerian Komdigi akan menghitung menjadi indikator utama di tiap Provinsi.

**Grafik II.50**
**Perkembangan Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan**
**Berdasarkan Pilar penyusun Tahun 2018-2022**

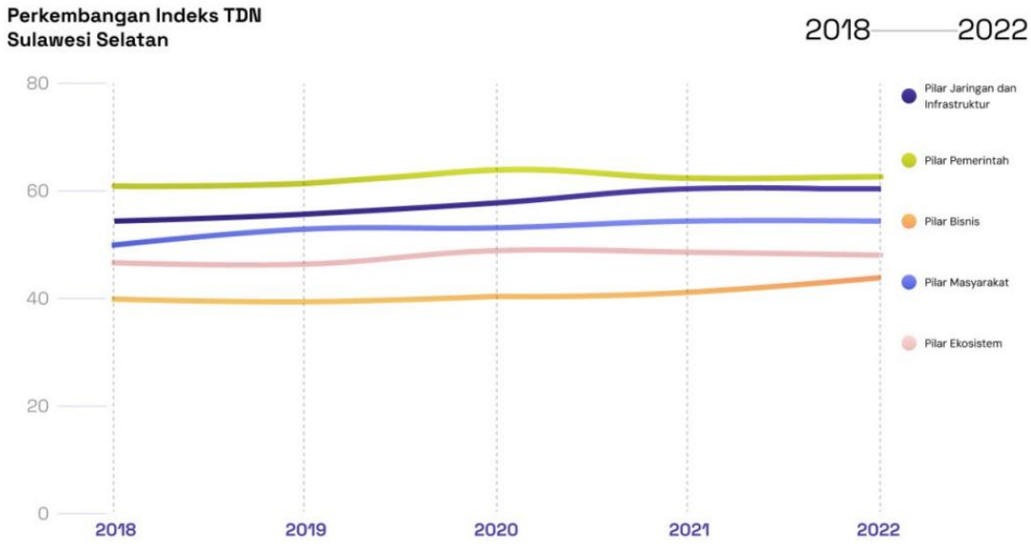


*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Pocket Book Indeks TDN*

Berdasarkan hasil indeks per pilar, pilar pemerintah menempati skor paling tinggi di antara pilar lainnya, yaitu sebesar 62,38 dan masuk dalam klasifikasi B. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari skor 60,50 di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Sulawesi Selatan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

**Tabel II. 71**
**Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Government Tahun 2018-2022**

| Provinsi | Kode | Tahun | Government | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | **10** | **2018** | **41,86** | **47,09** | **39,68** | **43,30** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2018 | 64,38 | 67,57 | 47,20 | **60,50** |
| **Nasional** | **10** | **2019** | **43,28** | **49,06** | **41,52** | **45,06** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2019 | 60,35 | 70,74 | 48,14 | **60,84** |
| **Nasional** | **10** | **2020** | **43,09** | **51,89** | **45,86** | **47,44** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2020 | 62,56 | 75,29 | 48,41 | **63,41** |
| **Nasional** | **10** | **2021** | **45,30** | **53,25** | **49,02** | **49,59** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2021 | 63,72 | 70,21 | 49,12 | **61,93** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2022 | 65,28 | 69,20 | 50,40 | **62,38** |
| **Nasional** | **10** | **2022** | **45,98** | **54,19** | **52,20** | **51,13** |

*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Pocket Book Indeks TDN*

Upaya tersebut terlihat dari aspek efektivitas pemerintahan dan e-government index yang terus menunjukkan perbaikan sejak tahun 2018 hingga 2022. Sejalan dengan hasil Indeks TDN, peningkatan kinerja juga ditunjukkan pada Indeks SPBE Sulawesi Selatan yang terus memberikan tren positif tiap tahunnya. Selain pilar pemerintah, pilar jaringan dan infrastruktur juga memiliki kinerja yang cukup baik dengan skor 59,93 dan masuk ke dalam klasifikasi B.

Hal ini didorong oleh kecepatan unduh mobile broadband maupun fixed broadband yang sudah diatas 20 Mbps. Meskipun demikian, cakupan 4G di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan melihat penetrasinya yang baru sekitar 77%. Hal ini menjadi faktor penting mengingat saat ini pemerintah juga tengah mendorong kawasan aglomerasi Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) untuk menjadi penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

**Tabel II. 72**
**Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Business**
**Tahun 2018-2022**

| Provinsi | Kode | Tahun | Business | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | **10** | **2018** | **37,65** | **37,59** | **30,66** | **35,53** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2018 | 39,36 | 50,10 | 26,30 | **39,73** |
| **Nasional** | **10** | **2019** | **38,99** | **37,72** | **30,64** | **35,98** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2019 | 36,62 | 49,46 | 28,02 | **39,18** |
| **Nasional** | **10** | **2020** | **36,65** | **42,51** | **31,47** | **37,44** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2020 | 29,73 | 56,76 | 28,65 | **40,22** |
| **Nasional** | **10** | **2021** | **37,46** | **44,39** | **31,58** | **38,47** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2021 | 27,88 | 59,90 | 28,40 | **40,84** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2022 | 27,99 | 65,01 | 30,97 | **43,69** |
| **Nasional** | **10** | **2022** | **37,30** | **45,10** | **32,96** | **39,12** |

*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Pocket Book Indeks TDN*

Selanjutnya, pilar bisnis merupakan pilar yang perlu difokuskan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan digital yang ada. Jika dilihat lebih jauh, indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah pertumbuhan perusahaan yang inovatif dan lingkungan startup. Meskipun telah bermunculan beberapa startup lokal di Provinsi Sulawesi Selatan, namun dukungan dari pertumbuhan startup lokal masih perlu dikembangkan. Perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan startup guna mendorong adopsi berbagai teknologi baru yang dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.

Pembangunan dan perluasan infrastruktur konektivitas, termasuk infrastruktur telekomunikasi, menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung potensi aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Kemenkomdigi, 37,12% (1.136 dari 3.060) desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan masih termasuk dalam daerah sinyal lemah/*blank spot*. Menambahkan data dari Kemenkes, 94,92% (448 unit) puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan sudah terfasilitasi akses internet, dan pada layanan pendidikan berdasarkan data dari Kemendikdasmen sebanyak 70,58% ( 6.465 dari 9.160) sekolah sudah terfasilitasi akses internet.

**Tabel II. 73**
**Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Ecosystem**
**Tahun 2018-2022**

| Provinsi | Kode | Tahun | Ecosystem | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | **10** | **2018** | **62,75** | **35,45** | **42,12** | **45,64** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2018 | 63,50 | 38,94 | 39,46 | **46,46** |
| **Nasional** | **10** | **2019** | **62,78** | **35,73** | **41,83** | **45,67** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2019 | 64,28 | 38,99 | 37,08 | **46,00** |
| **Nasional** | **10** | **2020** | **60,74** | **38,91** | **43,50** | **46,83** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2020 | 61,40 | 43,53 | 41,94 | **48,42** |
| **Nasional** | **10** | **2021** | **62,34** | **37,26** | **43,14** | **46,55** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2021 | 65,83 | 39,54 | 40,73 | **47,78** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2022 | 63,20 | 40,71 | 41,44 | **47,68** |
| **Nasional** | **10** | **2022** | **59,51** | **39,21** | **43,79** | **46,68** |

*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Pocket Book Indeks TDN*

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan meningkatkan daya saing Provinsi Sulawesi Selatan, pemberdayaan terhadap SDM digital di Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan untuk dapat secara maksimal mengambil manfaat dari transformasi digital. Berdasarkan hasil Indeks TDN pilar masyarakat, peningkatan keterampilan digital, literasi digital, dan sekolah berbasis digital merupakan aspek yang memerlukan optimasi dan penguatan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan digital yang menyeluruh bagi seluruh segmentasi masyarakat, penyediaan akses pembelajaran digital di sekolah, serta kolaborasi antar sektor pendidikan, industri, dan pemerintah.

**Tabel II. 74**
**Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar Network**
**Tahun 2018-2022**

| Provinsi | Kode | Tahun | Network | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | **10** | **2018** | **56,75** | **38,18** | **48,15** | **46,74** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2018 | 61,10 | 33,18 | 74,87 | **54,06** |
| **Nasional** | **10** | **2019** | **57,84** | **41,12** | **48,90** | **48,47** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2019 | 58,20 | 38,08 | 75,05 | **55,21** |
| **Nasional** | **10** | **2020** | **62,70** | **44,42** | **50,89** | **51,85** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2020 | 60,16 | 39,92 | 77,05 | **57,13** |
| **Nasional** | **10** | **2021** | **64,91** | **45,98** | **52,80** | **53,70** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2021 | 66,29 | 41,28 | 77,83 | **59,75** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2022 | 64,24 | 43,16 | 77,99 | **59,93** |
| **Nasional** | **10** | **2022** | **65,97** | **46,55** | **54,05** | **54,63** |

*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Pocket Book Indeks TDN*

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 belum tersedia secara rinci

dan terpisah dalam publikasi resmi seperti BPS atau Satudata Sulsel. Namun yang tersedia berupa data karakteritik penduduk yang bekeja. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,17 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,54 persen.

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi selama Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2024 mengalami tren peningkatan, yaitu dari 20.073.000 Orang (0,52 %) menjadi 31.075.000 Orang (0,68%). Namun pada Agustus 2023 sempat menurun sebesar 1,25 persen poin dari Agustus 2022. Hal ini disebabkan oleh otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan cloud computing bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional.; Perubahan model bisnis; Efisiensi operasional, dimana perusahaan mungkin melakukan restrukturisasi termasuk pengurangan staf atau penggabungan divisi serta terjadinya persaingan global. Industri TIK sangat kompetitif, dan perusahaan lokal bisa terdampak oleh dominasi pemain global.

**Tabel II. 75**
**Skor Indeks TDN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pilar People**
**Tahun 2018-2022**

| Provinsi | Kode | Tahun | People | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nasional** | **10** | **2018** | **62,01** | **42,62** | **37,55** | **46,91** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2018 | 60,86 | 47,17 | 40,75 | **49,35** |
| **Nasional** | **10** | **2019** | **63,05** | **43,92** | **39,12** | **48,22** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2019 | 62,46 | 53,30 | 40,95 | **52,34** |
| **Nasional** | **10** | **2020** | **63,43** | **46,89** | **42,64** | **50,57** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2020 | 62,78 | 53,63 | 40,52 | **52,44** |
| **Nasional** | **10** | **2021** | **63,68** | **48,20** | **42,97** | **51,28** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2021 | 63,44 | 53,91 | 44,39 | **53,91** |
| Sulawesi Selatan | 73 | 2022 | 62,36 | 54,03 | 45,35 | **53,92** |
| **Nasional** | **10** | **2022** | **62,09** | **49,02** | **45,06** | **51,75** |

*Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Pocket Book Indeks TDN*

b. **Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI).** Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang. Dengan memahami posisi Indonesia dalam lanskap digital global, kita dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan efektif untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata. IMDI 11 adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menilai tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia. IMDI

bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat Indonesia siap dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. IMDI disusun berdasarkan G20 Toolkit for Measuring Digital Literacy and Digital Skills, dan memiliki empat pilar utama: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, Pekerjaan. Untuk membandingkan tingkat digitalisasi antar wilayah secara lebih mendalam, nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dikategorikan. Kategorisasi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat digitalisasi tinggi, cukup dan rendah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas intervensi untuk meningkatkan digitalisasi masyarakat. Kriteria kategorisasi IMDI ditentukan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari nilai IMDI seluruh wilayah selama periode 2022-2024. Kategori IMDI terbagi menjadi lima kelompok, yaitu : Sangat Rendah (lebih kecil dari 30.88), Rendah (30.88 - 36.27), Cukup (36.28 - 47.06), Tinggi (47.07 - 52.47) dan Sangat Tinggi (lebih besar dari 52.47).

**Tabel II. 76**
**Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia**
**Tahun 2020–2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sulsel** | NA | NA | 32,13 | 41,57 | 42,26 |
| **Nasional** | NA | NA | 37,80 | 43,18 | 43,34 |

*Sumber : Buku Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024*

Skor IMDI Sulsel meningkat setiap tahunnya, meskipun laju pertumbuhan melambat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan skor IMDI Nasional yang meningkat setiap tahunnya, meskipun laju pertumbuhannya melambat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, peningkatan skor IMDI menunjukkan adanya kemajuan dalam kesiapan digital masyarakat Indonesia, tetapi tantangan dalam pemerataan dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal masih perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan transformasi digital di Indonesia.

**Tabel II. 77**
**Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia berdasarkan Pilar Penyusun**
**Tahun 2024**

| Pilar | Infrastruktur Dan Ekosistem | Keterampilan Digital | Pemberdayaan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| **Sulsel** | 52,93 | 57,10 | 24,27 | 35,69 |
| **Nasional** | 52,70 | 58,25 | 25,66 | 38,09 |

*Sumber : Buku Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024*

IMDI Sulsel Tahun 2024 berada pada 42,26. Berdasarkan pilar-pilar pembentuknya, pilar keterampilan digital merupakan pilar dengan nilai tertinggi, Sedangkan pilar dengan nilai terendah adalah pilar pemberdayaan, dengan nilai 24,27. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Sulsel Cakap Teknologi, namun belum optimal dalam pemanfaatannya ke arah yang produktif secara ekonomi.

IMDI Nasional Tahun 2024 berada pada 43,34. Berdasarkan pilar-pilar pembentuknya, pilar keterampilan digital merupakan pilar dengan nilai tertinggi, yaitu 58,25. Sedangkan pilar dengan nilai terendah diperoleh oleh pilar pemberdayaan, dengan nilai 25,66. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat

digital Indonesia sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum, namun belum optimal dalam pemanfaatannya ke arah yang produktif secara ekonomi.

Adanya ketimpangan pada pilar pemberdayaan dan pekerjaan membutuhkan upaya untuk mendorong pemberdayaan melalui pelatihan berbasis aplikasi nyata (misalnya e-commerce, pertanian digital) dan menghubungkan keterampilan yang ada dengan pasar kerja digital.

c. **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi** (IP-TIK). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bermanfaat untuk mempercepat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Manfaat konektivitas terhadap TIK dan internet sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Terlebih pada era digital saat ini, internet semakin berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat di dunia untuk memperoleh berbagai informasi. Seiring pesatnya perkembangan TIK tersebut, semakin berkembang pula ketersediaan infrastruktur (perangkat dan jaringan) TIK serta kecepatan akses terhadap internet (ITU, 2009). TIK merupakan katalis dalam perkembangan sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus berperan sebagai game changer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat penting. Transformasi digital sangat mempengaruhi gaya berjualan pelaku usaha yang tadinya berjualan secara konvensional beralih dengan strategi baru dalam berbisnis. Pada akhirnya terbentuk kebiasaan baru dalam melakukan transaksi bisnis, seperti berbelanja secara online, pembayaran menggunakan dompet digital, mengiklankan produk di media sosial dan lain sebagainya. Perubahan masyarakat ke arah digitalisasi tersebut menimbulkan kebiasaan baru sehingga menjadi budaya digital.

Kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah dapat dilihat dari peningkatan **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi** (IP-TIK) yang merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Indeks Pembangunan TIK disusun oleh tiga sub indeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK.

Posisi pembangunan TIK dapat diklasifikasikan menjadi tinggi (7,51-10,00), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), dan sangat rendah (0 - 2,50). Nilai IP-TIK Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 berada di kategori sedang. Capaian di tahun 2023 berada di posisi 6,01, di atas angka nasional (5,90). IP-TIK tertinggi berada di DKI Jakarta (7,73) dan angka terendah di Provinsi Papua (3,44).

**Tabel II. 78**
**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)**
**Tahun 2020-2024**

| Wilayah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulawesi Selatan | 5,59 | 5,80 | 5,92 | 6,01 | Belum rilis |
| Nasional | 5,59 | 5,76 | 5,85 | 5,90 | Belum rilis |

Sumber data : BPS Indonesia, Sulsel.

Meskipun memiliki tren positif, peningkatan nilai indeks nasional cenderung mengecil, dari 0,17 poin dari tahun 2020 ke 2021 menjadi 0,05 poin dari tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan gambaran ini, berbagai kebijakan masih perlu diterapkan untuk mencapai pembangunan TIK yang optimal. Karena Data IP-TIK dihitung tiap 2 tahun, maka data tahun 2024 belum tersedia.

### 2.1.3.5 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Posisi geostrategis Sulawesi Selatan merupakan potensi besar untuk menjadi hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia sekaligus Nasional. Olehnya itu perekonomian daerah Sulawesi Selatan perlu memperhatikan penguatan integrasi dan keterkaitan ekonomi domestik dengan ekonomi global. Kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang belum menetapkan Sulawesi Selatan khususnya Pelabuhan Makassar sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor-impor Indonesia, khususnya produk-produk unggulan ekspor dari KTI, perlu disikapi dengan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif industri pengolahan yang berorientasi ekspor di Sulawesi Selatan. *Backward and forward linkage* kegiatan industri pengolahan yang berorientasi ekspor perlu ditingkatkan, sehingga integrasi ekonomi domestik dan global di Sulawesi Selatan akan semakin membaik, baik pada pasar *output* dan apalagi pada pasar *input* internasional.

Untuk mengetahui daya saing ekonomi daerah di ranah global ditunjukkan dengan Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan Ekspor Barang dan Jasa.

a. **Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi,** menjadi salah satu indikator utama yang menggambarkan sejauh mana kesenjangan harga barang dan jasa antar wilayah dapat diminimalkan. Kesenjangan harga yang tinggi menunjukkan adanya kendala distribusi dan infrastruktur yang belum merata, sementara kesenjangan yang rendah mencerminkan konektivitas ekonomi domestik yang lebih baik. Dalam konteks Sulawesi Selatan, penurunan koefisien variasi harga antar wilayah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pasar dan daya saing lokal, sehingga mendukung integrasi ekonomi domestik yang kuat.

b. **Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB).** Perubahan struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020 s.d 2024, tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

   Data yang ada menunjukan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Selatan sebagian besar digunakan untuk

memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Berdasarkan data andil PMTB terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020-2024, terlihat adanya penurunan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB secara keseluruhan, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II. 79**
**Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020–2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PMTB (dalam juta Rp)** | 198,850,090 | 211,613,910 | 226,106,917 | 246,718,869 | 255,144,257 |
| **PDRB (dalam juta Rp)** | 504,052,530 | 544,857,140 | 605,175,944 | 652,648,093 | 696,252,765 |
| **Andil (%)** | 39.45 | 38.84 | 37.36 | 37.80 | 36.65 |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Pada tahun 2020, andil PMTB terhadap PDRB mencapai 39,45%, namun mengalami penurunan menjadi 38,84% pada tahun 2021 dan mencapai 37,36% pada tahun 2022. Kondisi perekonomian Sulawesi Selatan 2023 semakin membaik Pasca Pandemi Covid-19 mencapai 37,80% meskipun perkembangannya tidak lebih pesat dibanding tahun sebelumnya. Adanya bencana banjir di awal tahun 2023 dan el nino yang berkepanjangan di tahun 2023 menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahun sebelumnya, khususnya dari sisi kegiatan produksi pertanian. Demikian pula yang terjadi pada sisi pengeluaran, kelesuan iklim usaha pertanian berefek pada penghasilan dan pengeluaran masyarakat. Pada tahun 2024 menurun menjadi 36,65%, secara keseluruhan tren penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun sektor PMTB (yang mencakup investasi dalam infrastruktur dan modal tetap seperti bangunan dan peralatan produksi) masih memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Penurunan ini ditengarai bersumber dari penurunan investasi pemerintah maupun swasta dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, penurunan kontribusi PMTB terhadap PDRB ini perlu menjadi perhatian mengingat *multiplier effect* yang dihasilkan oleh PMTB terhadap perekonomian lebih tinggi ketimbang konsumsi

c. **Ekspor Barang dan Jasa.** Secara kumulatif, nilai ekspor Sulawesi Selatan Januari-Desember 2024 sebesar US$2.038,97 juta atau turun 8,09 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya ekspor beberapa komoditas utama, seperti nikel US$278,06 juta (22,57 persen), biji-bijian berminyak US$47,46 juta (23,77 persen), dan garam, belerang dan kapur US$ 19,31 juta (30,05 persen).

Perkembangan volume ekspor Sulawesi Selatan Januari-Desember 2024 sebesar 2.013,02 ribu ton atau turun sebesar 15,23 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Berdasarkan negara tujuan ekspor, volume ekspor yang tertinggi pada Januari-Desember 2024 berada pada Taiwan dengan volume 772,80 ribu ton, Tiongkok dengan volume 480,82 ribu ton, dan Australia dengan volume 173,13 ribu ton.

Menurut kelompok komoditas perkembangan volume ekspor Sulawesi Selatan pada Januari-Desember 2024 sebesar 2.013,02 ribu ton lebih rendah dibanding

periode yang sama tahun 2023 sebesar 2.374,65 ribu ton atau sebesar 15,23 persen. Komoditi tertinggi berupa garam, belerang dan kapur sebesar 1.241,56 ribu ton, dilanjutkan oleh komoditi besi dan baja sebesar 307,41 ribu ton dan biji-bijian berminyak sebesar 166,01 ribu ton. Gambaran nilai dan volume ekspor Sulawesi Selatan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

**Grafik II.51**
**Nilai dan Volume Ekspor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024**

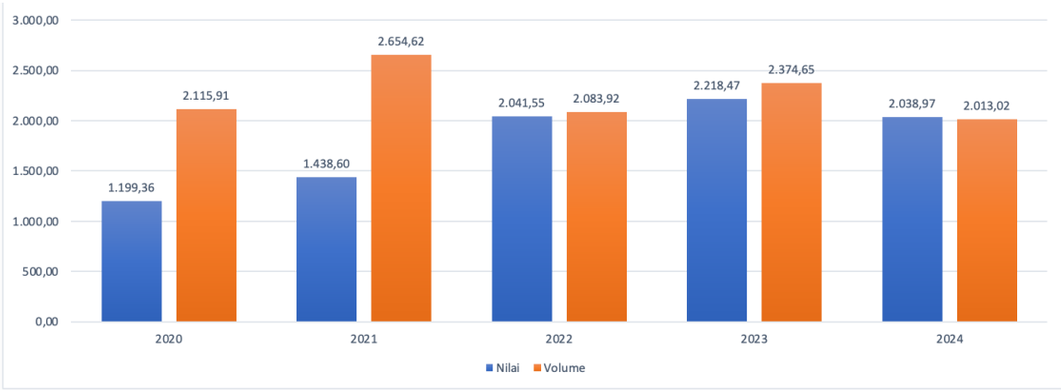


*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Beberapa tantangan untuk meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa diantaranya: a) peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia pelaku ekspor UMKM; b) identifikasi pengembangan produk unggulan dan potensial ekspor di kabupaten/kota; c) peningkatan fasilitasi aksesibilitas angkutan ekspor cargo laut dan udara secara langsung ke negara tujuan; d) konektivitas akses pasar melalui jalur laut dan udara; serta f) optimalisasi ekspor ke negara mitra dagang yang menjalin kerjasama perdagangan FTA dengan Pemerintah.

### 2.1.3.6 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan adalah meletakan perkotaan dan perdesaan sebagai spektrum pembangunan yang setara, agar pertumbuhan ekonomi perdesaan tetap dapat mempertahankan karakteristik, lokalitas dan prinsip keberlanjutan lingkungan di desa. Beberapa indikator yang mewakili gambaran perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Layanan Infrastruktur, Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional, Rumah tangga dengan akses hunian layak, dan persentase desa mandiri.

a. **Indeks Williamson.** Indeks Williamson merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu provinsi. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 0 berarti ketimpangan rendah yang menandakan pembangunan lebih merata antar wilayah, dan sebaliknya, semakin mendekati angka 1 berarti ketimpangan tinggi yang menandakan bahwa pembangunan tidak merata. Penyajian data ini menjadi dasar dalam analisis untuk memahami dinamika dan tantangan pemerataan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan. Adapun Indeks Williamson provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 80**
**Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Williamson | 0,573 | 0,566 | 0,564 | 0,571 | 0,573 |

*Sumber : BPS diolah Bappelitbangda Provinsi Tahun 2024*

Berdasarkan data Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terlihat bahwa nilai indeks fluktuatif namun cenderung meningkat selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sehingga ketimpangan Sulawesi Selatan berada pada kategori **ketimpangan tinggi**.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketimpangan Sulawesi Selatan pada tahun 2024 disumbang oleh 10 (sepuluh) kabupaten kota yaitu kota Makassar yang menyumbang hampir 74 persen ketimpangan serta daerah lainnya yaitu kabupaten Gowa, Jeneponto, Tana Toraja, Bulukumba, Takalar, Enrekang, Toraja Utara, Pangkajene dan Kepulauan, dan Luwu Timur. Selain itu dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi kabupaten terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan maka kabupaten/kota dapat diklasifikasikan bahwa hanya kota Makassar, kabupaten Gowa dan kabupaten Maros yang masuk kategori daerah maju dan berkembang cepat, kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Bone termasuk kategori daerah maju namun sedang melambat sedangkan kabupaten/kota lainnya berkembang cepat tetapi berkontribusi kecil.

Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan sektor jasa dan industry di Kota Makassar yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan di wilayah dan penyebaran investasi yang tidak tersebar merata dikarenakan tidak meratanya cakupan, akses dan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar.

b. **Indeks Infrastruktur** merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur dalam suatu wilayah. Indeks ini dapat mencakup berbagai aspek infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, sanitasi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana infrastruktur mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gambaran capaian Indeks Infrastruktur Sulawesi Selatan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut.

**Grafik II.52**
**Indeks Infrastruktur**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

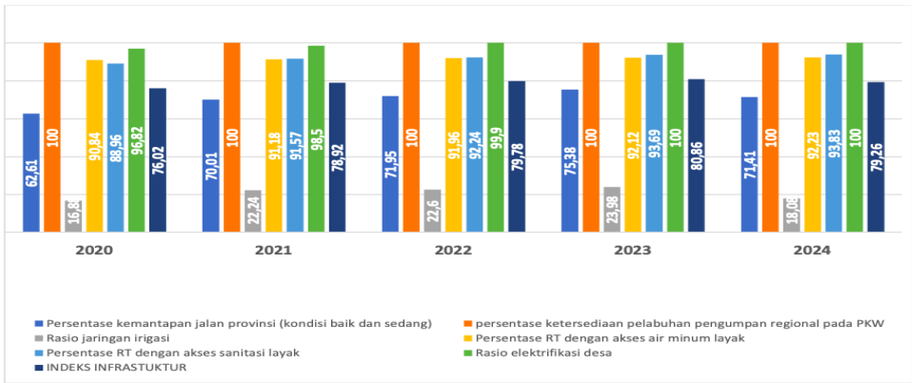


*Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024*

Indeks Infrastruktur Sulawesi Selatan diukur berdasarkan 6 (enam) komponen pembentuknya yaitu kemantapan jalan, ketersediaan pelabuhan pengumpan

regional, rasio jaringan irigasi, rasio elektrifikasi desa, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Nilai Indeks Infrastruktur Sulawesi Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 3,11 poin dari 80,86 poin pada tahun 2023 menjadi 79,26 poin. Penurunan Indeks Infrastruktur Tahun 2024 dikontribusi oleh penurunan kemantapan jalan provinsi dari 75,38 persen pada tahun 2023 menjadi 71,41 persen pada tahun 2024 dan penurunan rasio jaringan irigasi dari 23,98 persen pada tahun 2023 menjadi 18,08 persen pada tahun 2024.

Penurunan kemantapan jalan provinsi antara lain disebabkan karena kurangnya pengendalian terhadap pembatasan tonase kendaraan yang menyebabkan berkurangnya umur pakai jalan, dan bencana hidrometeorologi yang menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi rusak berat. Sedangkan penurunan rasio irigasi dikarenakan meningkatnya luas lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang belum diimbangi dengan penambahan jaringan irigasi yang fungsional.

c. **Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.** Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk mendapat perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Untuk itu, pentingnya rumah memenuhi persyaratan yang mencakup aspek ketahanan bangunan, kecukupan luas perkapita, akses air minum dan sanitasi layak agar menjadi layak untuk dihuni. Tahun 2020 hingga 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak mengalami tren peningkatan serta lebih baik dari capaian nasional. Namun pada tahun 2024 meskipun lebih baik dari capaian Nasional sebesar 65,25 persen, akses rumah tangga terhadap hunian layak di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,02 persen poin yaitu mencapai 71,88 persen pada tahun 2023 menjadi 71,86 persen pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan hanya sekitar 71 dari 100 rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak di Sulawesi Selatan.

**Grafik II.53**
**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**

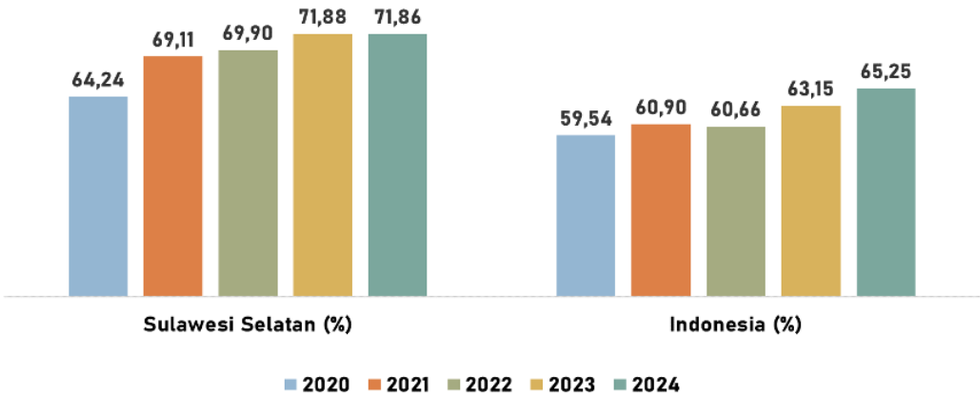


*Sumber : SUSENAS/BPS*

Menurunnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak disebabkan karena indikator yang menjadi syarat hunian layak yaitu kecukupan luas perkapita, akses air minum layak dan akses sanitasi layak pada wilayah perkotaan (urban) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Komponen

kecukupan luas perkapita pada wilayah perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 92,69 persen menurun sebesar 0,05 persen poin menjadi 92,64 persen pada tahun 2024. Komponen akses air minum layak pada wilayah perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 96,55 persen menurun 0,85 persen poin menjadi 95,7 persen pada tahun 2024. Sedangkan komponen akses sanitasi layak pada wilayah perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 92,93 persen menurun 0,7 persen poin menjadi 92,23 persen pada tahun 2024.

Kepadatan penduduk dan urbanisasi menjadi salah satu penyebab rumah tangga perkotaan (urban) yang menempati hunian dengan luasan ≥ 7m2 m2 perkapita mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dari tahun 2023 yang menggambarkan jumlah anggota keluarga dalam rumah melebihi kapasitas luas rumah yang dipersyaratkan. Kepadatan Penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 209 orang/km2 mengalami peningkatan 2 orang/km2 dari tahun 2023 dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Makassar sebesar 8.282 orang/km2. Sedangkan rata-rata jumlah jiwa dalam rumah tangga di Sulawesi Selatan yang menempati hunian sebesar 46,82 persen dihuni sejumlah 4-5 jiwa dan 19,32 persen dihuni sejumlah 6 jiwa.

Apabila dilihat menurut klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan, akses rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan terhadap hunian layak lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di wilayah perdesaan untuk komponen ketahanan bangunan, akses air minum dan sanitasi layak. Namun untuk komponen kecukupan luas perkapita, rumah tangga yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki kecukupan luas hunian yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan.

**Grafik II.54**
**Akses Hunian Layak Berdasarkan Komponen**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2024**

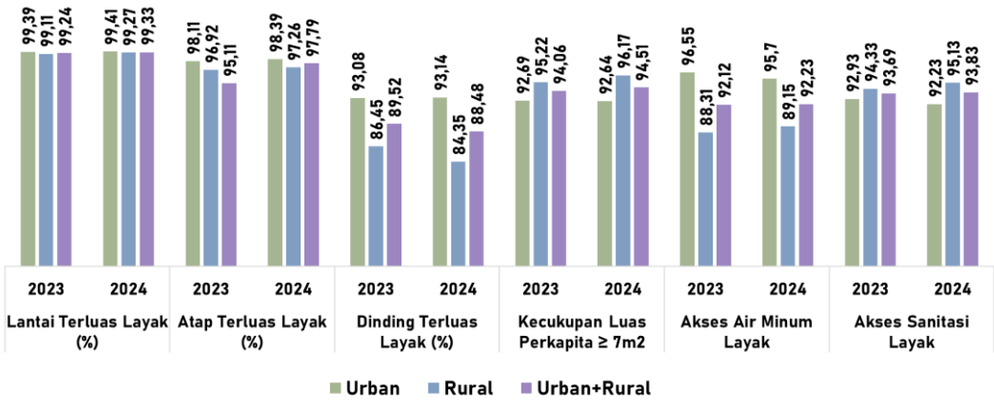


*Sumber : SUSENAS/BPS*

Selama periode 2022–2024, kondisi kecukupan luas lantai per kapita di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita minimal 7,2 m² meningkat dari 93,16 persen pada tahun 2022 menjadi 94,51 persen pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan peningkatan kecukupan luas perkapita hunian di wilayah perdesaan yang mengalami peningkatan, namun pada wilayah perkotaan mengalami penurunan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Sulawesi Selatan telah memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kecukupan ruang berdasarkan indikator

SDGs. Hingga tahun 2024 rumah tangga yang memiliki hunian dengan luasan ≥ 7m2 perkapita atau ≥ 36m2 jika dihuni 5 jiwa di wilayah perdesaan mencapai 96,17 persen lebih tinggi 3,53 persen poin dibandingkan rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan.

Pertumbuhan jumlah penduduk khususnya di wilayah perkotaan sebagai pusat perekonomian berdampak pada tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat perkotaan disisi lain ketersediaan lahan semakin berkurang. Berdasarkan aspek keterjangkauan yang diukur dari pengeluaran perkapita sebulan untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami tren fluktuasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 27,31 persen pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,67 persen poin dari tahun 2023 dengan capaian 27,98 persen. Pengeluaran konsumsi bukan makanan untuk wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan yang tertinggi pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah yaitu sebesar Rp.451.174 di wilayah perkotaan dan sebesar Rp.259.837 di wilayah perdesaan dari total rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga di Sulawesi Selatan yaitu Rp.350.355 pada tahun 2024. Menurunnya rata-rata pengeluaran perkapita untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga di Sulawesi Selatan disebabkan menurunnya pengeluaran pada 18 kabupaten/kota kecuali Kabupaten Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Parepare.

**Grafik II.55**
**Aspek Keterjangkauan Hunian Layak dan Terjangkau**
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

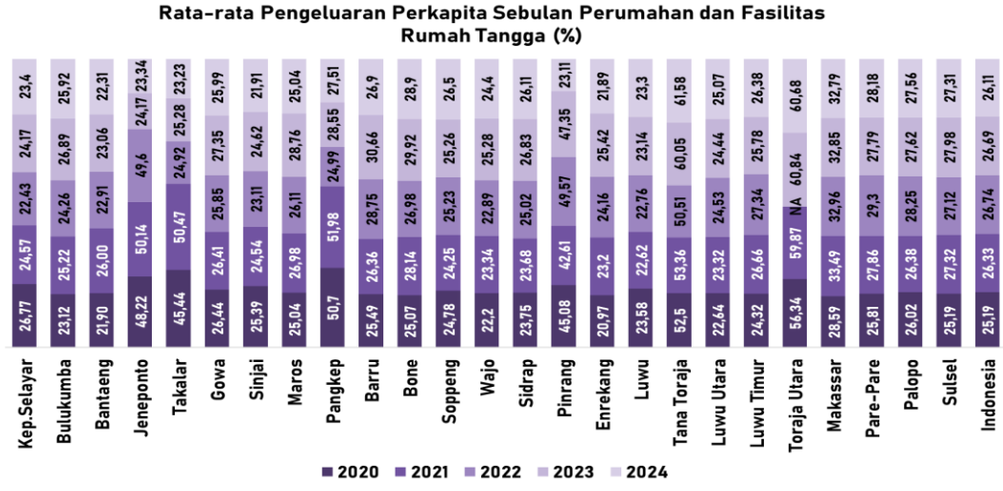


*Sumber : Sulsel Dalam Angka dan Kabupaten/Kota Dalam Angka*

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, , atau status kepemilikan lainnya (bebas sewa, rumah dinas atau lainnya). Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka kebutuhan akan perumahan turut meningkat. Oleh karenanya, dalam merencanakan penyediaan perumahan yang efektif dibutuhkan data mengenai penguasaan rumah/bangunan tempat tinggal kondisi terkini.

Tahun 2024 persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati milik sendiri mengalami peningkatan sebesar 88,25 persen dibanding tahun 2023 sebesar 87,68 persen. Rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati kontrak/sewa di Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar 2,09 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya.. Sedangkan status kepemilikan lainnya (bebas sewa, rumah dinas atau lainnya) Tahun 2024 sebesar 9,66, menurun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal milik sendiri mengindikasi semakin meningkatnya kemampuan penduduk Sulawesi Selatan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kepemilikan rumah, kepemilikan rumah berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, karena rumah yang aman dan terjangkau meskipun angkanya terus menunjukkan peningkatan, tantangan untuk mencapai target kepemilikan rumah masih cukup besar.

**Grafik II.56**
**Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

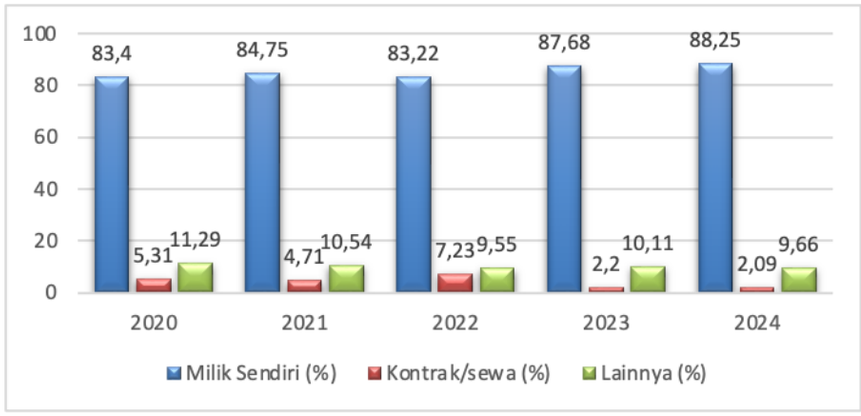


*Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Indonesia*

Kewenangan provinsi dalam pemenuhan akses hunian layak hanya terbatas pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Namun demikian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Total kawasan kumuh kewenangan provinsi: 1.187,79 Ha, Luas yang sudah tertangani (dari 2020–2024) baru mencapai 319,72 Ha (26,9%), sehingga Luas yang belum tertangani hingga 2024 sebesar 864,07 Ha (73,1%). Tahun 2024 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Kawasan kumuh.

**Grafik II.57**
**Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024**

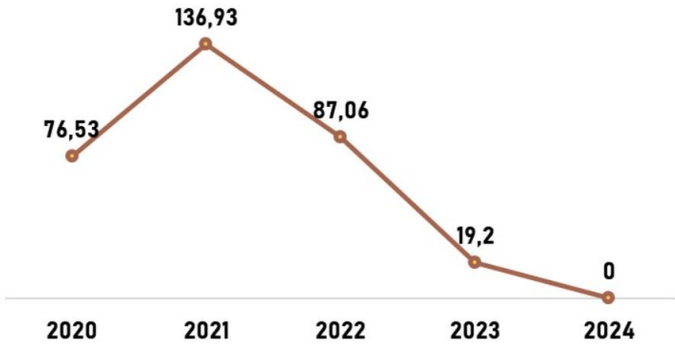


Kewenangan provinsi dalam pemenuhan akses hunian layak khususnya untuk mendukung Program Pemerintah yaitu Pembangunan 3 Juta Rumah hanya terbatas pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Namun demikian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berupa penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sejumlah 50 Unit, serta bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit.

Pada tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 160 meter dan Jalan Lingkungan sepanjang 106 meter di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan panjang jaringan air bersih 13.180 meter serta cakupan rumah tangga terlayani sebesar 1.577 rumah tangga.

Tahun 2022 telah terbangun sejumlah 44 unit rumah layak huni untuk korban bencana masing-masing 11 unit di Kabupaten Jeneponto, Luwu Utara, Soppeng, dan Wajo. Selain itu untuk mendukung penyediaan PSU untuk mendukung daerah rawan bencana, maka dilaksanakan pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 575 meter di Kabupaten Pangkep, Maros, Barru, dan Kota Makassar, serta pembangunan 2 unit Jaringan Air Bersih dengan kapasitas masing-masing sebesar 3.000 liter/hari yang melayani sejumlah 80 rumah tangga di Kabupaten Pangkep. Tahun 2023 dilaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana sejumlah 17 unit berupa pembangunan rumah sejumlah 6 unit di Desa Tarowang dan Desa

Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto dan rehabilitasi rumah di Desa Beringin Jaya dan Desa Sumpiria Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sejumlah 11 unit rumah.

Hingga tahun 2024 telah tertangani kawasan kumuh seluas 319,72 Ha dari total 1.187,79 Ha luas kawasan kumuh kewenangan provinsi berupa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase lingkungan, serta penyediaan air bersih. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh kewenangan provinsi dilaksanakan untuk menuntaskan kawasan kumuh dengan luasan 517,69 Ha hingga mencapai 0 Ha atau tidak ada lagi kawasan kumuh kewenangan provinsi yang belum tertangani.

**Tabel II. 81**
**Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kabupaten/ Kota**
**Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah RTLH (Unit) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kepulauan Selayar | 1.356 | 2.059 | 1.591 | 1.721 | 2.190 |
| 2 | Bulukumba | 1.775 | 3.960 | 5.044 | 5.569 | 6.204 |
| 3 | Bantaeng | 3.135 | 3.794 | 1.627 | 1.455 | 2.271 |
| 4 | Jeneponto | 19.568 | 21.313 | 22.089 | 21.698 | 22.020 |
| 5 | Takalar | 8.395 | 10.132 | 6.088 | 5.799 | 7.660 |
| 6 | Gowa | 9.319 | 6.488 | 7.940 | 7.115 | 10.584 |
| 7 | Sinjai | 947 | 611 | 982 | 930 | 698 |
| 8 | Bone | 7.016 | 6.085 | 5.489 | 1.159 | 3.679 |
| 9 | Maros | 8.607 | 36.032 | 35.657 | 73.785 | 38.447 |
| 10 | Pangkajene Kepulauan | 11.521 | 15.731 | 11.032 | 11.540 | 11.377 |
| 11 | Barru | 5.278 | 4.948 | 2.834 | 5.782 | 3.857 |
| 12 | Soppeng | 7.482 | 6.741 | 5.353 | 4.623 | 6.137 |
| 13 | Wajo | 3.103 | 2.664 | 3.416 | 3.303 | 2.427 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 5.068 | 4.799 | 3.110 | 2.827 | 4.716 |
| 15 | Pinrang | 6.297 | 7.230 | 7.816 | 6.328 | 5.360 |
| 16 | Enrekang | 697 | 1.390 | 1.297 | 826 | 901 |
| 17 | Luwu | 2.729 | 3.753 | 4.064 | 2.266 | 2.071 |
| 18 | Tana Toraja | 1.475 | 1.287 | 1.344 | 1.393 | 1.205 |
| 19 | Luwu Utara | 3.776 | 2.892 | 2.904 | 1.663 | 1.125 |
| 20 | Luwu Timur | 2.233 | 1.384 | 2.849 | 1.360 | 1.899 |
| 21 | Toraja Utara | 1.052 | 819 | 1.342 | 516 | 499 |
| 22 | Kota Makassar | 12.263 | 2.489 | 7.532 | 8.142 | 7.865 |
| 23 | Kota Pare pare | 2.892 | 3.075 | 674 | 1.207 | 2.723 |
| 24 | Kota Palopo | 704 | 1.065 | 718 | 847 | 803 |
| | **Sulawesi Selatan** | **126.688** | **150.741** | **142.793** | **171.853** | **146.718** |

*Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

d. **Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap provinsi**. Gambaran terkait perkembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan antara lain diindikasikan oleh Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap provinsi. Kontribusi PDRB Kota Makassar selama 5 tahun terakhir berada di atas 30 persen. Pada tahun 2023 sebesar 34,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 34,47 persen dan tahun 2024 (Tw III) sebesar 33,87 persen dimana kontribusi lapangan usaha terbesar berasal dari perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, industri pengolahan dan informasi dan komunikasi.

**Tabel II. 82**
**Kontribusi PDRB Kota Makassar Tahun 2020-2024 ADHB**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tw III) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar | 35,23 | 34,86 | 34,47 | 34,67 | 33,87 |

*Sumber : BPS Tahun 2024*

Selain Kota Makassar, 4 Kabupaten lain yang memberi kontribusi terhadap PDRB ADHB (TW III) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone sebesar 7,62 persen, Kabupaten Pangkep sebesar 4,84 persen, Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,23 persen dan Kabupaten Gowa sebesar 4,34 persen.

**Tabel II. 83**
**Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha(%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tw III) |
| Kepulauan Selayar | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,22 | 1,27 |
| Bulukumba | 2,88 | 2,91 | 2,84 | 2,88 | 2,98 |
| Bantaeng | 1,77 | 1,85 | 2,01 | 1,95 | 1,89 |
| Jeneponto | 2,03 | 2,02 | 1,94 | 1,86 | 2,02 |
| Takalar | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 1,97 | 1,89 |
| Gowa | 4,25 | 4,31 | 4,23 | 4,35 | 4,34 |
| Sinjai | 2,24 | 2,25 | 2,23 | 2,26 | 2,39 |
| Maros | 3,68 | 3,48 | 3,88 | 4,03 | 4,12 |
| Pangkep | 5,07 | 5,05 | 5,03 | 4,99 | 4,84 |
| Barru | 1,47 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | 1,44 |
| Bone | 7,22 | 7,21 | 7,2 | 7,17 | 7,62 |
| Soppeng | 2,25 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | 2,46 |
| Wajo | 3,91 | 4,09 | 4,02 | 3,76 | 3,73 |
| Sidrap | 2,78 | 2,79 | 2,76 | 2,78 | 2,89 |
| Pinrang | 3,97 | 3,99 | 3,92 | 3,84 | 3,61 |
| Enrekang | 1,49 | 1,5 | 1,49 | 1,47 | 1,47 |
| Luwu | 3,17 | 3,27 | 3,3 | 3,32 | 3,5 |
| Tana Toraja | 1,5 | 1,48 | 1,44 | 1,43 | 1,45 |
| Luwu Utara | 2,62 | 2,64 | 2,65 | 2,73 | 3,08 |
| Luwu Timur | 4,25 | 4,33 | 4,69 | 4,69 | 4,23 |
| Toraja Utara | 1,92 | 1,89 | 1,87 | 1,88 | 1,93 |
| Makassar | 35,23 | 34,86 | 34,47 | 34,67 | 33,87 |
| Pare Pare | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 |
| Palopo | 1,59 | 1,6 | 1,61 | 1,6 | 1,58 |
| **SULAWESI SELATAN** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber BPS Tahun 2024*

e. **Persentase Desa Mandiri**. Pembangunan perdesaan memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing ekonomi daerah karena perdesaan merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi suatu daerah. Pembangunan perdesaan yang terarah dan terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi disparitas antara perkotaan dan perdesaan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Gambaran Pembangunan perdesaan di Sulawesi Selatan diukur dengan Persentase Desa Mandiri. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota.

Desa mandiri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa secara keseluruhan.

**Tabel II. 84**
**Persentase Desa Mandiri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Status Desa | Jumlah (Desa) | | | | | Persentase (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Mandiri** | 25 | 112 | 235 | 471 | 745 | 1,1 | 5 | 10,4 | 20,8 | 32,9 |
| **Maju** | 311 | 483 | 786 | 873 | 813 | 13,8 | 21,4 | 34,9 | 38,5 | 35,9 |
| **Berkembang** | 1473 | 1.354 | 1.028 | 757 | 568 | 65,3 | 60 | 45,6 | 33,4 | 25 |
| **Tertinggal** | 386 | 268 | 195 | 162 | 138 | 17,1 | 11,9 | 8,6 | 7,2 | 6,1 |
| **Sangat Tertinggal** | 60 | 38 | 11 | 3 | 2 | 2,7 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 2255 | 2255 | 2255 | 2266 | 2266 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang signifikan dalam transformasi status desa, yang menjadi indikator penting dari kemajuan pembangunan wilayah perdesaan. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya perubahan yang sangat positif dalam struktur klasifikasi desa, dari yang sebelumnya didominasi oleh desa berkembang dan tertinggal, kini bergerak menuju dominasi desa maju dan mandiri. Pada tahun 2020, desa-desa di Sulawesi Selatan sebagian besar berada dalam kategori berkembang, yaitu sebanyak 1.473 desa atau 65,3% dari total desa yang ada. Desa mandiri saat itu masih tergolong sedikit, hanya 25 desa (5%). Sementara itu, desa maju berjumlah 311 desa (13,8%), desa tertinggal sebanyak 386 desa (17,1%), dan desa sangat tertinggal tercatat sebanyak 60 desa (2,7%).

Namun dalam empat tahun terakhir, terjadi lonjakan yang signifikan dalam jumlah desa mandiri dan desa maju. Pada tahun 2024, desa mandiri meningkat drastis menjadi 745 desa (32,9%), dan desa maju menjadi 813 desa (35,9%). Ini menandakan bahwa lebih dari dua pertiga desa di Sulawesi Selatan kini telah masuk dalam kategori maju dan mandiri. Sebaliknya, jumlah desa berkembang mengalami penurunan tajam menjadi hanya 568 desa (25%), menunjukkan bahwa sebagian besar desa yang sebelumnya berada dalam tahap berkembang telah berhasil naik status menjadi desa maju atau bahkan mandiri. Lebih menggembirakan lagi, desa tertinggal yang pada 2020 berjumlah 386 desa, kini hanya tersisa 138 desa (6,1%) pada tahun 2024. Desa sangat tertinggal hanya 2 desa (0,1%) yaitu Desa Bolu Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu dan Desa Baruppu Parodo Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara. Penurunan ini menunjukkan efektivitas intervensi pembangunan desa, baik melalui alokasi Dana Desa, program pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan kelembagaan dan infrastruktur desa.

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan desa yang terintegrasi, mulai dari perencanaan partisipatif, pemanfaatan dana berbasis kebutuhan riil masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan desa. Kemajuan ini juga menunjukkan bahwa berbagai program nasional dan daerah seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Program Inovasi Desa, dan dukungan teknis dari berbagai OPD terkait telah berjalan secara sinergis.

Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat terlena. Masih ada lebih dari seratus desa yang berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Desa-desa ini memerlukan perhatian khusus, dengan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lokal. Selain itu, perlu diantisipasi risiko kemunduran status desa jika keberlanjutan program pembangunan tidak dijaga.

**Tabel II. 85**
**Status Desa Berdasarkan Kabupaten**

| No | Kabupaten | Status Desa | | | | | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal | |
| 1 | Kepulauan selayar | 22 | 17 | 36 | 6 | 0 | 81 |
| 2 | Bulukumba | 59 | 46 | 4 | 0 | 0 | 109 |
| 3 | Bantaeng | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 4 | Jeneponto | 34 | 42 | 6 | 0 | 0 | 82 |
| 5 | Takalar | 16 | 40 | 25 | 5 | 0 | 86 |
| 6 | Gowa | 76 | 42 | 3 | 0 | 0 | 121 |
| 7 | Sinjai | 42 | 16 | 9 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Bone | 130 | 136 | 62 | 0 | 0 | 328 |
| 9 | Maros | 55 | 17 | 7 | 1 | 0 | 80 |
| 10 | Pangkep | 13 | 42 | 10 | 0 | 0 | 65 |
| 11 | Barru | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | Soppeng | 11 | 34 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | Wajo | 24 | 61 | 57 | 0 | 0 | 142 |
| 14 | Sidenreng rappang | 33 | 29 | 5 | 1 | 0 | 68 |
| 15 | Pinrang | 36 | 15 | 11 | 7 | 0 | 69 |
| 16 | Enrekang | 7 | 24 | 80 | 1 | 0 | 112 |
| 17 | Luwu | 30 | 81 | 54 | 41 | 1 | 207 |
| 18 | Tana toraja | 0 | 12 | 72 | 28 | 0 | 112 |
| 19 | Luwu utara | 64 | 65 | 33 | 4 | 0 | 166 |
| 20 | Luwu timur | 37 | 60 | 28 | 0 | 0 | 125 |
| 21 | Toraja utara | 0 | 4 | 62 | 44 | 1 | 111 |
| Jumlah | | 745 | 813 | 568 | 138 | 2 | 2266 |

Sumber : Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel, 2024

Secara spasial, Kabupaten Bone menempati posisi tertinggi dengan jumlah desa mandiri terbanyak yaitu 130 desa, diikuti oleh Gowa (76 desa) dan Luwu Utara (64 desa). Kabupaten Luwu juga menunjukkan jumlah desa maju yang tinggi yaitu 81 desa, bersamaan dengan Enrekang (80 desa) dan Wajo (61 desa). Sebaliknya, status desa berkembang masih dominan di beberapa daerah seperti Enrekang (80 desa) dan Tana Toraja (72 desa). Dari sisi desa tertinggal dan sangat tertinggal, konsentrasi utama masih terdapat di wilayah pegunungan dan terisolasi seperti Tana Toraja dengan 28 desa tertinggal, serta Toraja Utara dengan 44 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal, disusul oleh Luwu yang mencatat 41 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal.

Pencapaian ini tidak terlepas dari keberhasilan implementasi berbagai program pembangunan desa, seperti Dana Desa, Program Inovasi Desa, Program Ketahanan Pangan, serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Desa-desa yang berhasil meningkatkan statusnya umumnya ditunjang oleh kepemimpinan kepala desa yang inovatif, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelayanan desa. Namun, tantangan utama saat ini adalah menjaga keberlanjutan status desa yang telah mandiri dan maju

agar tidak kembali menurun akibat lemahnya kelembagaan, ketergantungan pada dana eksternal, atau rendahnya kapasitas pengelolaan. Sementara itu, strategi percepatan untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal harus disesuaikan dengan karakteristik lokal melalui pendekatan afirmatif, berbasis wilayah, dan fokus pada penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

### 2.1.3.7 STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro adalah suatu kondisi di mana indikator-indikator ekonomi makro, seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan tingkat pengangguran, berada pada tingkat yang terkendali dan tidak bergejolak. Stabilitas ekonomi makro penting karena menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi, baik investor maupun konsumen, dalam mengambil keputusan ekonomi.

Daya saing daerah dan stabilitas ekonomi makro memiliki hubungan yang erat. Daerah yang memiliki daya saing tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menciptakan stabilitas ekonomi makro. Sebaliknya, stabilitas ekonomi makro yang terjaga akan menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran stabilitas ekonomi makro daerah di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari kondisi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Tingkat Inflasi.

a. **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yang semula 0,67 Persen menjadi 0,69 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pajak di Provinsi Sulawesi Selatan semakin meningkat dan kecenderungan tingkat kesadaran pajak semakin membaik dengan melihat trend peningkatan tersebut.

   Tax Rasio sebesar 0,67 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistis sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah provinsi. Perhitungan rasio pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak air permukaan, pajak rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat diperlukan untuk mendorong rasio pajak yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan potensi daerah serta sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mengetahui gambaran rasio pajak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II. 86**
**Rasio Pajak ( Tax Ratio) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Pajak Daerah | Nilai PDRB | Rasio Pajak |
|---|---|---|---|
| **2020** | 3.362.622.269.609,00 | 504.052.526.560.000 | 0,67 |
| **2021** | 3.846.736.206.985,26 | 544.857.139.630.000 | 0,71 |
| **2022** | 4.304.408.133.491,08 | 605.148.862.500.000 | 0,71 |
| **2023** | 4.643.444.800.691,78 | 652.574.052.400.000 | 0,71 |
| **2024** | 4.815.223.564.573,74 | 696.250.000.000.000 | 0,69 |

*Sumber: BAPENDA & BPS Tahun 2024, data diolah*

**b. Tingkat Inflasi,** adalah ukuran yang penting untuk memahami tingkat perubahan daya beli uang dan stabilitas ekonomi yang mengacu pada tingkat pertumbuhan harga-harga umum barang dan jasa di suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengetahui gambaran Inflasi Tahunan Menurut 8 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pada tahun 2024 inflasi di Sulawesi Selatan mengalami perubahan signifikan dengan bertambahnya 3 kabupaten menjadi bagian dari pengkuran inflasi, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu Timur. Penambahan 3 kabupaten tersebut menunjukkan upaya untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi daerah.

Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,23 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,81 persen, dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali dari rata-rata nasional dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,26. Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan barang dan jasa. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur 2,02 persen dengan IHK sebesar 106,78 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 0,68 persen dengan IHK sebesar 106,41.

**Tabel II. 87**
**Inflasi Tahunan Menurut 8 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Wilayah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bulukumba | 2,3 | 2,16 | 4,12 | 2,78 | 0,91 |
| Watampone | 1,89 | 2,26 | 5,52 | 2,84 | 1,11 |
| Makassar | 2,13 | 2,26 | 5,81 | 2,89 | 1,19 |
| Pare-Pare | 1,61 | 4,09 | 6,66 | 2,22 | 1,73 |
| Palopo | 1,21 | 2,96 | 5,13 | 2,21 | 1,87 |
| Wajo | - | - | - | - | 0,68 |
| Sidenreng Rappang | - | - | - | - | 1,03 |
| Luwu Timur | - | - | - | - | 2,02 |
| Gabungan 5 Kota | 2,04 | 2,4 | 5,77 | 2,81 | - |
| Provinsi | | | | | 1,23 |
| Nasional | | | | | 1,57 |

*Sumber : BPS*

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,69 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,66 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,39 persen. Adapun kelompok transportasi; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,28 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain : tomat, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, ikan layang/ikan benggol, ikan cakalang/ikan sisik, kangkung, ayam goreng dan ikan bandeng/ikan bolu

c. **Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB (%) dan Total Kredit Terhadap PDRB.** Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah provinsi.

Total Kredit per Provinsi adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB dan Total Kredit Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 88**
**Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB (%) dan Total Kredit Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024**

| Tahun | PDRB ADHB (dalam juta Rp) | Kredit (dalam juta Rp) | | | Rasio Total Kredit thd. PDRB | DPK (dalam juta Rp) | | | Rasio Total DPK thd. PDRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bank Umum | Bank Syariah | Total | | Bank Umum | Bank Syariah | Total | |
| 2020 | 504.050.000 | 135.319.536 | 8.672.881 | 143.992.417 | 28,6% | 103.249.405 | 6.146.838 | 109.396.243 | 21,7% |
| 2021 | 545.170.000 | 141.302.828 | 9.576.564 | 150.879.392 | 27,7% | 109.598.359 | 7.238.631 | 116.836.990 | 21,4% |
| 2022 | 605.180.000 | 151.070.441 | 11.391.346 | 162.461.787 | 26,8% | 112.137.757 | 7.661.137 | 119.798.894 | 19,8% |
| 2023 | 652.650.000 | 167.978.849 | 12.872.943 | 180.851.792 | 27,7% | 120.912.654 | 9.207.354 | 130.120.008 | 19,9% |
| 2024 | 696.250.000 | 177.056.585 | 15.431.300 | 192.487.885 | 27,6% | 126.713.133 | 10.732.887 | 137.446.020 | 19,7% |

*Sumber : Bank Indonesia*

Rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan yang semakin menguat seiring dengan pemulihan pasca COVID-19. Total kredit yang disalurkan oleh perbankan juga mengalami kenaikan walaupun rasio total kredit terhadap PDRB relatif mengalami sedikit penurunan selama 5 tahun terakhir, yaitu 28,6% pada 2020 menjadi 27,6% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit tidak secepat pertumbuhan PDRB yang dapat diperkirakan terjadi karena adanya perbaikan dalam struktur pembiayaan/ alternatif sumber pendanaan lain di luar kredit perbankan. Adapun total DPK selama 5 tahun terakhir juga menguat, namun rasio total DPK terhadap PDRB mengalami penurunan dari 21,7% pada 2020 menjadi 19,7% pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah simpanan nasabah meningkat, laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan dana yang tersimpan di bank.

Di sisi lain, kredit yang disalurkan oleh bank syariah mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir seiring dengan peningkatan dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan dalam periode yang sama. Meskipun demikian, pangsa bank syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan bank umum.

d. **Aset dana pensiun terhadap PDRB.** Aset dana pensiun menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun. Pertumbuhan aset dana pensiun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 20,88%, namun

pada tahun 2024 total aset dana pensiun tumbuh melambat sebesar 3,77%. Aset dana pensiun terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 89**
**Aset Dana Pensiun (Juta Rp) Terhadap PDRB Tahun 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aset Dana Pensiun | 1.132.905 | 1.177.454 | 1.279.687 | 1.546.376 | 1.604.744 |
| Growth | - | 3,93% | 8,68% | 20,84% | 3,77% |

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Sulselbar*

e. **Nilai transaksi saham per provinsi,** adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Tren nilai transaksi saham selama 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021 (91,22%), kemudian terjadi penurunan tajam pada tahun 2022 (-43,88%) dan 2023 (-14,04%), sebelum akhirnya mengalami pemulihan pada 2024 (+20,19%) Pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2021 diindikasikan dipengaruhi oleh peningkatan minat investor ritel selama masa pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari peningkatan SID pada portofolio saham yang signifikan meningkat pada tahun 2021 sebesar 108%. Gambaran nilai transaksi saham dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 90**
**Nilai Transaksi Saham Tahun 2020-2024**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Transaksi Saham | 20.419.543 | 39.046.595 | 21.912.694 | 18.836.591 | 22.639.579 |
| Growth | - | 91,22% | -43,88% | -14,04% | 20,19% |

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Sulselbar*

f. **Inklusi Keuangan** adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Mulai Tahun 2024, Survei nasional yang dilakukan OJK melibatkan BPS.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,02% artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, hanya sebanyak 75 orang yang ter inklusi keuangan. Lebih lanjut, indeks inklusi keuangan konvensional Indonesia sebesar 73,55% dan indeks literasi keuangan syariah sebesar 12,88%. Adapun total responden SNLIK tahun 2024 adalah sebanyak 10.690 responden, terdapat 6.352 responden (59,42%) yang berada di wilayah perkotaan dan 4.338 responden (40,58%) yang berada di wilayah perdesaan. Setelah dilakukan perhitungan penimbang, responden yang berada di wilayah perkotaan mewakili 124.803 ribu penduduk umur 15-79 tahun (59,09%) dan responden yang berada di wilayah perdesaan mewakili 86.391 ribu penduduk umur 15-79 tahun (40,91%). Angka inklusi keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, Tren ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di Sulawesi Selatan berhasil. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk Sulsel yang memiliki akses dan menggunakan layanan

keuangan formal. . Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan inklusi keuangan, bahkan melampaui rata-rata nasional. Peningkatan yang stabil dan berkelanjutan di Sulsel mencerminkan keberhasilan inisiatif lokal dalam memfasilitasi akses masyarakat ke layanan keuangan. Sementara itu, penurunan tajam pada tingkat nasional di tahun 2024 menjadi poin penting yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya.

**Tabel II. 91**
**Inklusi Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sulsel (%)** | NA | NA | 88,57 | 89,45 | 90,34 |
| **Nasional (%)** | 81,4 | 83,6 | 85,1 | 88,7 | 75,02 |

*Sumber: Kemenko Perekonomian, OJK, Bappenas (SNLIK)*

g. **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)** adalah indeks komposit yang dikembangkan untuk mengukur dan memetakan kondisi akses keuangan di berbagai wilayah di Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai seberapa jauh masyarakat di suatu daerah dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal. Indikator inklusi keuangan hanya sampai level provinsi karena data berupa survey. Maka dari itu, IKAD diperlukan sebagai indicator proxy dari inklusi keuangan yang dapat diturunkan ke level Kabupaten/Kota untuk mengukur kinerja TPAKD dan inklusi keuangan. Indeks komposit IKAD dapat memetakan akses keuangan daerah yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja inklusi keuangan Kabupaten/Kota. Salah satu indikator penyusun IKAD adalah jumlah kepemilikan rekening. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kepemilikan rekening. IKAD dapat digunakan sebagai alat yang mendukung pengembangan strategi inklusi keuangan daerah.

Data capaian IKAD Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan nilai IKAD ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Sulawesi Selatan terus membaik. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Peningkatan infrastruktur keuangan, seperti penambahan kantor cabang, ATM, atau agen layanan perbankan tanpa kantor (Laku Pandai). Literasi keuangan yang lebih baik di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami dan mau menggunakan produk-produk keuangan. Inisiatif pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah-daerah pedesaan.

**Tabel II. 92**
**Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sulsel** | NA | NA | 4,06 | 4,24 | 4,5 |

Sumber : Bappenas, 2025

## 2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Secara keseluruhan, pelayanan umum yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil. Aspek pelayanan umum memiliki peran yang sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta efektivitas pemerintahan, Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan aspek pelayanan umum dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan yang efektif. Gambaran terkait aspek pelayanan umum di Sulawesi Selatan tergambar pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif tercerminkan pada pencapaian indikator-indikator pelayanan pemerintahan.

a. **Indeks Reformasi Birokrasi**. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap roadmap nasional. **Indeks Reformasi Birokrasi** menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 secara umum meningkat dari tahun 2020 sebesar 60,07 poin menjadi sebesar 81,74 poin pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 21,67 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Namun demikian koordinasi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram sebagai berikut.

**Grafik II.58**

**Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020 – 2024**

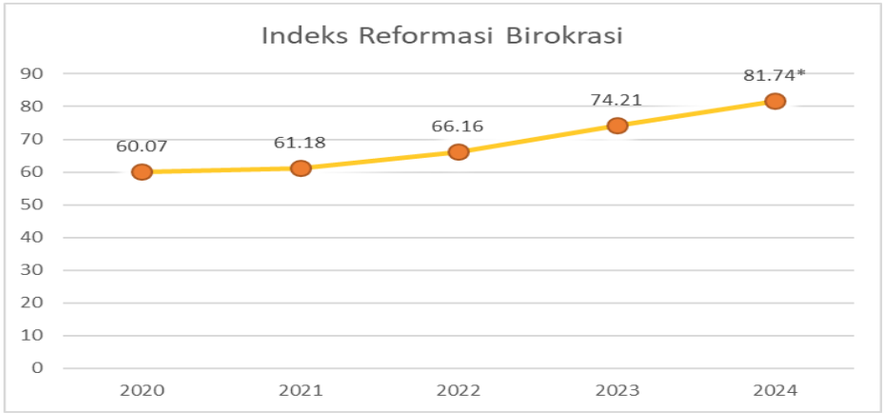


*Sumber: Kemenpan RB, Data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, 2025*

Selain dari sisi pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerja pemerintah dalam pelayanan umum juga tercermin pada kinerja pemerintah dalam administrasi publik dan pemerintahan yang diukur pada indikator -indikator sebagai berikut:

b. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Indeks SPBE Sebagai tolok ukur Tren positif yang mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Peningkatan yang signifikan, terutama dari tahun 2023 ke 2024, menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang

diterapkan semakin efektif dalam meningkatkan nilai SPBE. Meski demikian, diperlukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan untuk memastikan capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan nilai indeks SPBE cenderung menunjukkan peningkatan dimana capaian Nilai Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,94 atau **kategori sangat baik,** meningkat poin dari capaian tahun 2019 yang baru mencapai 2,90 poin.

Hal ini didukung oleh keunggulan pada penerapan Aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan Strategis, Penyelenggara SPBE, Audit TIK, Layanan Publik Berbasis Elektronik. Berdasarkan data capaian kinerja indikator nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai SPBE tercatat sebesar 2,05 (cukup), kemudian meningkat menjadi 2,35 (cukup) pada tahun 2022. Peningkatan ini terus berlanjut secara konsisten hingga mencapai 3,09 (baik) pada tahun 2023 dan 3,94 pada tahun 2024 dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang berkesinambungan dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Grafik II.59**
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024**

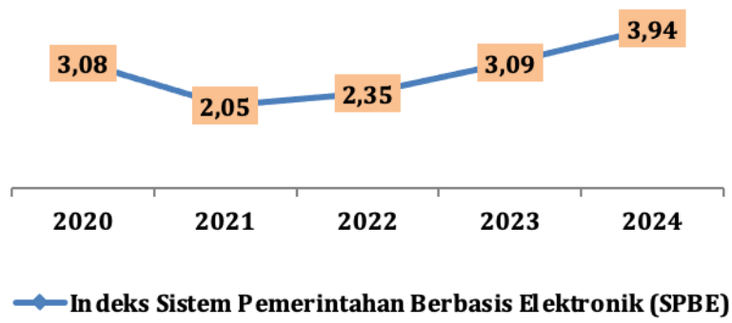


*Sumber : data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2025*

c. **Indeks Pelayanan Publik,** merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nilai Indeks Nilai Pelayanan Publik mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat, dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin dibandingkan tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 0.24 poin serta stagnan pada tahun 2023. Peningkatan nilai IPP ini diperoleh melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada 2 Unit Pelayanan Publik (UPP), yaitu DPM-PTSP dan Sistem Manunggal Satu Atap/ SAMSAT Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik yang meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, penyediaan sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan. Akan tetapi pada tahun 2024 menurun sebesar 0,22 poin, yang disebabkan oleh berdasarkan hasil tinjaun langsung lapangan oleh tim Kemenpan

ditemukan bahwa tidak terdapatnya bukti dukung fasilitas wifi beserta passwordnya diruang tunggu dan masih kurangnya sarana dan prasarana ramah kaum rentan (toilet disabilitas, parkir disabilitas, jalur landai, dsb).

Peningkatan Indeks Pelayanan Publik selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan capaian 4,00 poin pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,12 poin pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 0,12 poin. Namun capaian tersebut turun sebesar 0,22 poin jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023..

**Tabel II. 93**
**Capaian Indikator Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Indikator Pelayanan Publik** | 4,02 | 4,10 | 4,34 | 4,34 | 4,12 |

*Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2025*

d. **Indeks Reformasi Hukum**. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022, **Indeks Reformasi Hukum** adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.

**Grafik II.60**
**Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulsel Tahun 2022-2024**

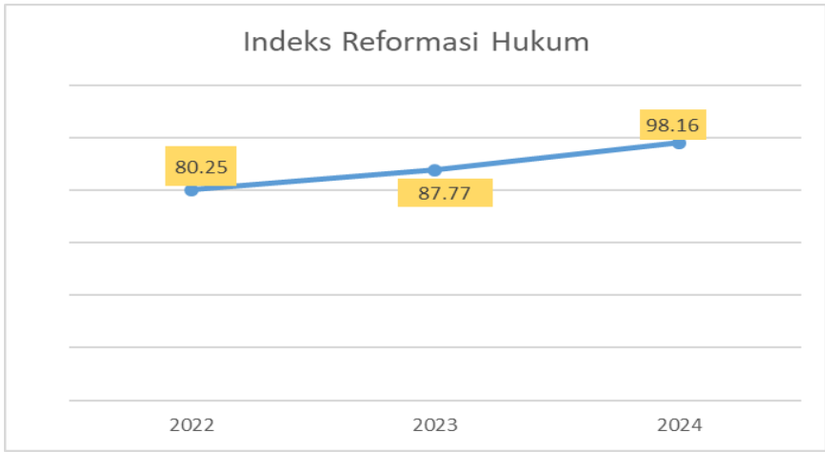


*Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2024*

Kinerja Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang tercermin pada indeks reformasi hukum, pada tahun 2023 berada pada angka 87,77 poin (Sangat Baik ) atau meningkat 7,52 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang hanya 80,25 poin. Peningkatan ini dikarenakan adanya dukungan kesesuaian tahapan pembentukan Perda dengan Perkada sesuai dengan peraturan perundangan terkait pembentukan Peraturan Daerah. Tahun 2024 meningkat 98,16 poin (Istimewa) meningkat 10,39 poin dibandingkan capaian tahun 2023.

e. **Indeks Integritas Nasional**. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat evaluasi strategis yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk mengukur tingkat integritas dan pencegahan korupsi di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Pelaksanaan survei dilakukan dengan pendekatan kuesioner elektronik yang diisi secara **self-administered**, baik melalui pengiriman digital (*WhatsApp dan email blast*) maupun secara tatap muka menggunakan perangkat *enumerator* (CAPI).

Perkembangan Nilai SPI Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 1). **Tahun 2021** Pada tahun ini, nilai SPI untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar **70,61**, dengan rata-rata SPI nasional berada di angka **71,94**. Hasil ini mencerminkan bahwa upaya menjaga integritas masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. 2). **Tahun 2022** Pada 2022, nilai SPI Provinsi Sulawesi Selatan mengalami sedikit peningkatan koreksi menjadi **65,89**, namun secara nasional rata-rata nilai SPI turun menjadi **70,97**. Hal ini menunjukkan bahwa integritas di Sulawesi Selatan relatif stabil tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek tata kelola dan pengawasan. 3). **Tahun 2023** mencatatkan pencapaian yang cukup signifikan dengan nilai SPI sebesar **70,76**, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2021. Namun, ini masih lebih rendah dari rata-rata nasional **70,97**. Pelaksanaan survei dan penilaian tetap dilakukan dengan metode serupa menggunakan sistem elektronik dan tatap muka. 4). **Tahun 2024** Nilai SPI Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turun cukup tajam menjadi **64,75**, menandai penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, termasuk tingkat partisipasi, efektivitas program penguatan integritas, serta pengelolaan pelaporan dugaan korupsi.

**Analisis dan Perbandingan** Dari data yang tersedia, terlihat bahwa nilai SPI Sulawesi Selatan memiliki tren fluktuatif stabil di angka 70-an pada 2021 dan 2023, namun mengalami penurunan signifikan pada 2022 dan 2024. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan di 2024 adalah:

- Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi internal.
- Minimnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.
- Kurangnya edukasi dan kampanye anti-korupsi yang berkesinambungan.

Adapun penyebabnya sesuai substansi diadakan survey ke seluruh perangkat daerah, lembaga/mitra kerja, secara umum yang memberikan survey menganggap; 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Kurang Optimal. Sistem tata kelola yang belum memenuhi standar integritas, termasuk kelemahan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia, seringkali menjadi faktor penurunan nilai SPI. Masalah ini mencerminkan perlunya reformasi dan pengawasan. 2) Risiko Korupsi yang Meningkat. Indeks SPI secara umum juga menunjukkan tren penurunan di beberapa wilayah, yang sering dikaitkan dengan konflik kepentingan, misalnya melalui pengaruh sponsor politik dalam pengelolaan proyek pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kualitas layanan publik dan persepsi masyarakat. 3) Kepatuhan Pegawai terhadap Aturan. Penelitian SPI juga mencatat bahwa banyak pegawai yang melanggar aturan dalam pelaksanaan tugas, termasuk penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Pelanggaran ini menunjukkan masih rendahnya budaya integritas dalam beberapa sektor. 4) Partisipasi dan Transparansi. Penurunan angka ini mungkin juga terkait dengan rendahnya partisipasi responden dalam pengisian survei dan tingkat keterbukaan

instansi terkait. Semakin rendah partisipasi dan kejujuran dalam pengisian survei, semakin sulit menggambarkan tingkat integritas.

**Tabel II. 94**
**Indeks Integritas Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2021-2024**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Integritas Nasional | 72,43 | 71,94 | 70,97 | 71,53 |
| Indeks Integritas Provinsi Sulawesi Selatan | 70,61 | 65,89 | 70,76 | 64,75 |

*Sumber: KPK, diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2025*

### 2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat

a. **Persentase Penegakan Perda.** Kegiatan penegakan perda/perkada dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara humanis sehingga tidak ada warga yang terkena dampak baik dampak ganti rugi maupun pengobatan. Setiap kegiatan dimulai dengan melakukan deteksi dini dengan cermat guna meminimalisir dampak dari penegakan perda. Rincian Kegiatan penegakan perda yang dilakukan antara lain berupa penertiban sebanyak 2 kegiatan, pengawasan perda/perkada sebanyak 70 kegiatan, penegakan perda/perkada sebanyak 31 kegiatan, pelaksanaan patroli sebanyak 58 kegiatan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 42 kegiatan, pengamanan sebanyak 295 kegiatan (kegiatan VIP/VVIP dan terhadap 7 aset provinsi), pelaksanaan deteksi dini/cegah dini sejumlah 205 kegiatan dan pembinaan sumber daya aparatur berupa pelatihan sebanyak 69 kegiatan.

**Tabel II. 95**
**Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 2020-2024**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | % | 100 | 100 | 99,67 | 100 | 100 |

*Sumber: diolah Satpol Prov. Sulsel, Tahun 2025*

b. **Rasa aman** adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas.

**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya,** adalah seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa

aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dan mampu menggambarkan pembangunan bidang keamanan terutama dalam mengukur rasa aman bagi masyarakat.

Berdasarkan data Susenas Modul Hansos proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Hasil Modul Hansos tahun 2020 proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya di Sulawesi Selatan menunjukkan 64,6 persen masyarakat merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya lebih tinggi dari capaian Nasional. Jika kita bandingkan menurut wilayah tempat tinggal, rumah tangga di perdesaan merasa lebih aman saat beraktivitas dibandingkan perkotaan. Rasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di perkotaan lebih rendah dibandingkan di pedesaan, untuk wilayah perkotaan sebesar 62,07 persen dan untuk wilayah perdesaan sebesar 66,5 persen.

**Grafik II.61**

**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Selatan**

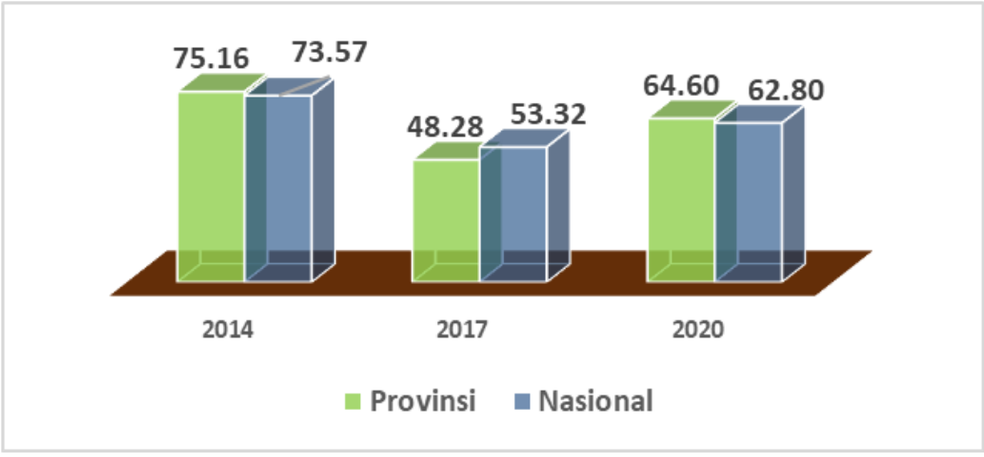


*Sumber: Statistik Ketahanan Sosial (Susenas Modul Hansos)*

Kejadian tindak kriminal merupakan salah satu kriminal untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu.

Data tindak kriminal di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan. Kondisi ini kurang mendukung iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi di Sulawesi Selatan. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 3.321 pada tahun 2020 kasus dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Enrekang sebesar 67 kasus dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2020. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 4,718 pada tahun 2021 kasus dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Enrekang sebesar 60 kasus dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2021. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 10,951 pada tahun 2022 kasus dan jumlah

kasus terendah tercatat di Kabupaten Bantaeng sebesar 127 kasus dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 8,993 pada tahun 2023 kasus dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Enrekang sebesar 207 kasus dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2023. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 7,671 pada tahun 2024 kasus dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Enrekang sebesar 117 kasus dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2024. Capaian penyelesaian tindak pidana pada tahun 2020 sebesar 61,34 persen mengalami peningkatan tahun 2024 sebesar 83,32 persen.

**Grafik II.62**

**Jumlah Kasus Kejahatan di Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

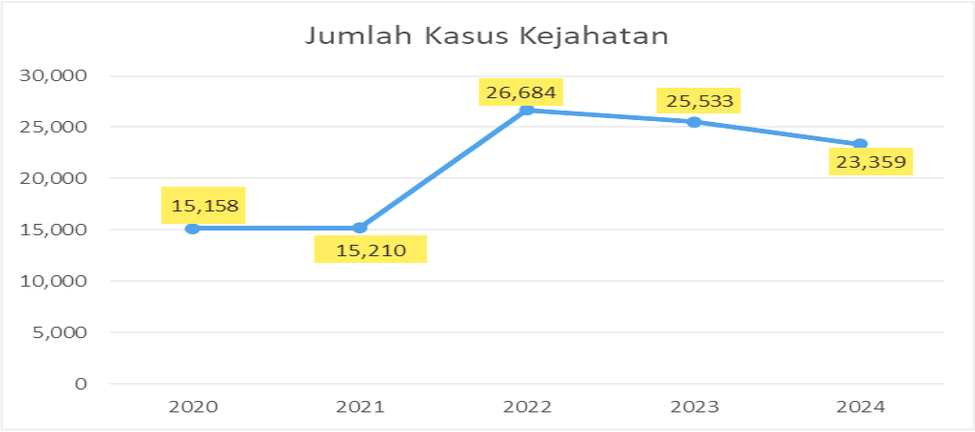


*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

c. **Indeks Demokrasi Indonesia,** merupakan indeks komposit yang mengukur asesmen kondisi demokrasi di provinsi, baik dari sisi sistem, mekanisme dan prosedurnya (*aspek procedural democracy*) maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif. Aspek yang diukur meliputi Aspek kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Lembaga Demokrasi).

Keterkaitan antara penanaman modal dan indeks Demokrasi; iklim demokrasi yang sehat mendorong investasi masuk ke daerah dengan stabilitas politik, transparansi kebijakan, dan partisipasi publik yang kuat. Demokrasi yang sehat mengurangi risiko korupsi, mempermudah perizinan, dan menciptakan kepastian hukum; Investasi Meningkat, Dorongan untuk Demokrasi Lebih Baik dengan kehadiran investor (terutama asing) menuntut akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan Persaingan ekonomi mendorong reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi dan Risiko Jika Demokrasi Lemah, Investasi bisa terhambat jika ada konflik sosial, dominasi elit lokal, atau lemahnya penegakan hukum, Ketimpangan dan eksploitasi sumber daya bisa terjadi jika masyarakat tidak punya ruang partisipasi.

Gambaran penanaman modal di Sulawesi Selatan dan kaitannya dengan Indeks Demokrasi dapat digambarkan dari dua sisi utama: iklim investasi dan kondisi demokrasi yang saling mempengaruhi dimana Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi tinggi di Indonesia bagian timur. Poin penting terkait penanaman modal: yaitu a). **sector unggulan**; 1). **Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan**: Wilayah ini kaya sumber daya alam; 2).

**Pariwisata**: Destinasi seperti Toraja dan pantai di Bulukumba menarik investor. 3). **Industri Pengolahan dan Infrastruktur**: Termasuk pembangunan kawasan industri dan pelabuhan. b**). Investasi Domestik dan Asing**; 1). Daya tarik penanaman modal cukup besar, terutama di Makassar dan sekitarnya. 2). Investor asing (PMA) mulai masuk dalam sektor industri, energi, dan logistik. c). **Dukungan Pemerintah;** 1). Pemerintah daerah aktif mempromosikan investasi melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan PTSP). 2). Dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan proyek strategis nasional mempercepat arus investasi.

Penanaman modal di Sulawesi Selatan cukup menjanjikan karena potensi ekonominya besar. Namun, keberlanjutan dan kualitas investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi demokrasi. Demokrasi yang sehat menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan sebaliknya, arus investasi yang baik dapat memperkuat praktik demokratis melalui dorongan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif. Gambaran capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 6 tahun terakhir berfluktuatif sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi di Sulawesi Selatan berkisar pada angka 67 hingga 80. Pada tahun 2023 turun 3,66 poin menjadi 76,43, berada pada tingkat demokrasi kategori "Sedang" (Indeks 60-80), dan dibawah capaian nasional sedangkan data tahun 2024 menunggu rilis data dari Badan Pusat Statistik. Peningkatan nilai Indeks Demokrasi di Sulawesi Selatan didukung oleh peningkatan variabel aspek kebebasan yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, dan peran DPRD, disajikan pada grafik berikut.

**Grafik II.63**
**Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020 – 2023**

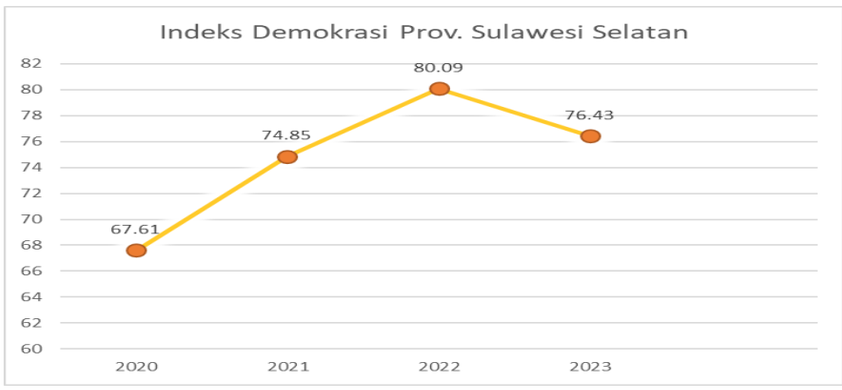


*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2025*

Indeks demokrasi yang semakin membaik secara signifikan akan mempengaruhi daya saing investasi di Sulawesi Selatan, karena indeks demokrasi yang tinggi berhubungan dengan stabilitas politik dan hukum yang lebih baik. Stabilitas ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih prediktif dan aman bagi investor, karena mereka dapat memproyeksikan risiko politik yang lebih rendah dalam jangka panjang. Selain itu, indeks demokrasi yang baik juga dapat mendorong partisipasi

masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovasi dari berbagai lapisan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing investasi daerah.

### 2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan**.**

a. **Indeks Daya saing Daerah,** merupakan alat ukur untuk menilai produktivitas suatu daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2018 hingga 2021 dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) secara partisipatif, di mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengisi sendiri data indikator penilaian. Pada tahun 2020 dan 2021, karena bersifat partisipatif, terdapat sejumlah daerah yang tidak menyampaikan data sehingga tidak memperoleh skor IDSD Nasional. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, penilaian IDSD dilanjutkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan pendekatan terpusat, di mana seluruh proses penilaian dilakukan oleh BRIN.

   Capaian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 3,61 menurun 0,09 poin dari tahun 2023 dan lebih tinggi dari skor nasional yang hanya mencapai 3,43. Tahun 2023 mencapai 3,7 meningkat 0,35 poin dari tahun 2022, dan lebih tinggi dari skor nasional yang hanya mencapai 3,44. Pada Tahun 2024 Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan skor IDSD tertinggi pada regional Sulawesi, skala nasional menempati urutan 10 provinsi tertinggi setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

   Dari 12 pilar pembangun indeks daya saing daerah, capaian pilar yang paling rendah adalah pilar ke 7 (Pasar produk yang mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing bisnis di suatu wilayah) dengan skor sebesar 2,41 tahun 2024 menurun dari tahun 2023 dengan skor 2.61, diikuti pilar ke 8 (Pasar tenaga kerja yang mendorong efisiensi pasar tenaga kerja dan kebijakan yang responsif berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja serta daya saing ekonomi) dengan skor 2,66, dan pilar ke 9 (Sistem keuangan mendorong melalui pengelolaan yang efektif dan mitigasi risiko yang tepat, sistem keuangan mendorong dunia usaha agar tumbuh secara produktif dan berkelanjutan) skor 2,80 . Adapun capaian tertinggi pada pilar ke 10 (yang mendorong ukuran pasar yang luas dapat meningkatkan produktivitas bisnis melalui optimalisasi keekonomian skala) tahun 2024 mencapai skor 4,71 meningkat 0,03 poin dari tahun 2023 sebesar 4,68 poin, sebagaimana pada tabel berikut;

**Tabel II. 96**
**Indeks Daya saing Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Wilayah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Sulsel** | 3,24 | 3,14 | 3,35 | 3,70 | 3,61 |
| **Nasional** | na | na | 3,26 | 3,44 | 3,43 |

*Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

**b. Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten /Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City).** Pada pencapain Kerjasama dengan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengukuran terhadap tiga aspek utama dalam pelaksanaan kerjasama yakni: 1). Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain pengukurannya sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 ini terdapat 310 kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, secara jumlah pencapaian tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 113 kerjasama dengan jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dalam hal pembangunan daerah di berbagai sektor antara lain Perindustrian, pendidikan, pariwisata, perdagangan koperasi UMKM, Pertanian, dst sesuai dengan kebutuhan daerah. 2). Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga, untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga perjanjian kerjasama dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 255 jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain kerjasama terkait Nota Kesepahaman antara energy equity epic (sengkang) pty.ltd. dengan Perusda Sulawesi Selatan serta beberapa Nota Kesepakatan Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terkait pendidikan tentang pengembangan penelitian di berbagai sektor dalam pelaksanaan pembangunan di daerah terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk aspek yang ke 3). Kerjasama terkait Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini masih pada 6 jumlah kerjasama. antara lain: sinergitas program pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pangan Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nota Kesepakatan Sinergitas terkait penggunaan aplikasi Stunting melalui sistem informasi manajemen data stunting, serta sinergitas dalam bidang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan di Provinsi Sulawesi Selatan antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). secara rekapitulasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini;

**Tabel II. 97**
**Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Jumlah Kerjasama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total Kerjasama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain | 113 | 36 | 73 | 50 | 38 | 310 |
| Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga | 143 | 44 | 30 | 27 | 11 | 255 |
| Kerjasama Sinergitas Program Daerah dan Pusat | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |

*Sumber: diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel,Tahun 2025*

c. **Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Sulawesi Selatan,** adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai **tingkat ketahanan suatu wilayah** dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan, seperti geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, social budya dan pertahanan dan keamanan. Tahun 2020 pada bulan desember dengan skor 2,92 rank 21 dimana geografi demografi, ekonomi dan pertanahan dan keamanan cukup Tangguh artinya wilayah Sulawesi selatan memiliki ketahanan yang sedang, namun masih rentan terhadap guncangan ekonomi, social, politik dan kemampuan wilayah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjuan pembangunan perlu diperkuat. Tahun 2021 pada bulan desember dengan skor 2,92 rank 21 seperti tahun 2020 yang sebelumnya pada gatra demografi dengan skor 3,04 menjadi skor 3,10.

Tahun 2022 pada bulan desember dengan skor 2,94 rank 21 pada tahun ini skor gatra geografi, demografi, dan politik naik dan menurun pada gatra sosial budaya yang sebelumnya skor 2,68 menjadi skor 2,67. Tahun 2023 pada bulan desember dengan skor 2,95 rank 22 pada tahun 2023 gatra demografi naik menjadi 3,35, tetapi sumber kekayaan alam turun menjadi 2,68 yang sebelumnya 2,71 begitu juga di gatra ideologi turun menjadi skor 2,72 yang sebelumnya 2,73 dan gatra ekonomi turun dari 3,14 menjadi 3.08 tetapi digatra politik naik skor 2,90 bersamaan dengan gatra social budaya skor 2,72. Tahun 2024 pada bulan desember dengan skor 2,92 rank 21, gatra ideologi mengalami kenaikan dari skor 2,72 menjadi skor 2,76 gatra politik dari skor 2,90 menjadi 2,92, di tahun 2024 Penurunan skor **Gatra Pertahanan dan Keamanan** dari **3,18 menjadi 2,91** dalam Indeks Ketahanan Nasional Wilayah (IKN Wilayah) menunjukkan **penurunan ketahanan wilayah dalam aspek pertahanan dan keamanan.** Skor ini turun dari kategori **tangguh ke cukup Tangguh beberapa faktor yang penyebab penurunan skor pada gatra ini yaitu peningkatan ancaman keamanan, kelemahan aparat keamanan, menurunnya ketahan social dan kewaspadaan masyarakat, ketidaksiapan menghadapi bencana dan ancaman Non-Militer lemahnya Pendidikan dan pembinaan ideologi**

Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Sulawesi Selatan menurun menjadi 2,92, turunnya Indeks Ketahanan Nasional Indonesia saat ini tentu tidak terlepas dari beragam sebab. Satu diantaranya karena munculnya fenomena *strategic surprises,* seperti pandemi Covid-19, yang menimbulkan pengaruh tidak hanya pada sektor

kesehatan, tetapi juga ke berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung cukup lama tentu telah menimbulkan kecemasan karena memberikan dampak yang cukup banyak dan merambah ke semua sektor, sehingga menurunkan Ketahanan Nasional. Khususnya pada gatra ideologi, ekonomi, budaya dan sosial, maka menjadi tugas Polri untuk dapat menciptakan, memelihara dan menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif bagi berlangsungnya upaya-upaya pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang dihadapi Polri dalam mewujudkan hal tersebut adalah adanya transisi sosial-budaya yang telah bergerak ke era digital.

Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Sulawesi Selatan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan ke depan. Indeks ketahanan nasional Wilayah Sulawesi Selatan yang ini akan semakin baik jika didukung dengan kerja sama atau kolaborasi antarpemangku kepentingan. Indeks ketahanan nasional Wilayah Sulawesi Selatan ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan visi-misi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dapat terwujud.

**Tabel II. 98**
**Indeks Ketahanan Nasional wilayah Sulawesi Selatan Per Periode Tahun 2020-2024**

| Indeks Ketahanan Nasional | Desember 2020 | | Desember 2021 | | Desember 2022 | | Desember 2023 | | Desember 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank |
| Indeks Ketahanan Nasional | 2,92 | 21 | 2,92 | 21 | 2,94 | 21 | 2,95 | 22 | 2,92 | 21 |

**Tabel II. 99**
**Komponen Indeks Ketahanan Nasional**

| GATRA | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank |
| Geografi | 3,02 | 20 | 3,02 | 16 | 3,14 | 18 | 3,14 | 18 | 3,14 | 15 |
| Demografi | 3,04 | 17 | 3,10 | 18 | 3,18 | 14 | 3,35 | 5 | 3,35 | 7 |
| Sumber Kekayaan Alam | 2,71 | 5 | 2,71 | 5 | 2,71 | 5 | 2,68 | 6 | 2,68 | 7 |
| Ideologi | 2,73 | 14 | 2,73 | 14 | 2,73 | 15 | 2,72 | 17 | 2,76 | 19 |
| Politik | 2,86 | 24 | 2,86 | 24 | 2,87 | 24 | 2,90 | 22 | 2,92 | 20 |
| Ekonomi | 3,14 | 7 | 3,14 | 7 | 3,14 | 7 | 3,08 | 12 | 306 | 12 |
| Sosial Budaya | 2,68 | 14 | 2,68 | 13 | 2,67 | 17 | 2,72 | 14 | 2,73 | 15 |
| Pertahanan dan Keamanan | 3,18 | 14 | 3,18 | 14 | 3,18 | 15 | 3,18 | 14 | 2,91 | 14 |

*Sumber: Lemhanas RI Tahun 2025*

### 2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

### 2.1.4.4.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

#### 2.1.4.4.1.1. Urusan Pendidikan

**Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah** adalah indikator statistik yang mengukur persentase dari total populasi usia 16-18 tahun yang secara aktif terdaftar atau sedang mengikuti pendidikan menengah, seperti SMA, SMK, atau sederajat. Indikator ini menunjukkan sejauh mana akses pendidikan menengah tercapai di kalangan kelompok usia tersebut, sekaligus mencerminkan keterlibatan mereka dalam sistem pendidikan formal di jenjang tertentu.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, capaian Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 – 18 Tahun di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2020-2023 data menunjukkan adanya peningkatan namun pada 2024 menurun sebesar 3,7 persen. Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2024 belum mencapai target nasional terkait pencapaian SPM Pendidikan sebesar 100 persen, dengan capaian 86,81 persen atau sejumlah 408.193 penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dari total 470.234 penduduk usia 16-18 tahun.

Indikator kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pendidikan lainnya yaitu Persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan, dimana capaian tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 sebesar 0,26 persen dengan capaian 85,20 persen namun belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Berikut capaian kinerja Program Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel II. 100**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PENDIDIKAN** | | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah | % | 76,62 | 80,55 | 83,68 | 90,52 | 86,81 |
| 2 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | % | 80,06 | 80,84 | 82,73 | 84,94 | 85,20 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

#### 2.1.4.4.1.2. Urusan Kesehatan

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan adalah perbandingan antara jumlah tempat tidur atau kapasitas rumah sakit rujukan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana rumah sakit rujukan dapat mengakomodasi jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan layanan medis lebih

lanjut, terutama dalam konteks rumah sakit rujukan yang menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Berdasarkan data dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio daya tampung rumah sakit rujukan menunjukan penurunan yaitu pada tahun 2024 berada pada 1,77/1000 penduduk. kejadian ini disebabkan adanya regulasi implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional dimana terdapat pembatasan jumlah maksimal TT dalam suatu kamar rawat inap menyebabkan terjadinya pengurangan atas jumlah TT di beberapa Rumah Sakit. Terdapat 3 (tiga) Kota yang melebihi target BAPPENAS 1,9/1000 penduduk yaitu Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Parepare. Keadaan ini memberikan sumbangsih capaian rasio daya tampung rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

Akreditasi rumah sakit adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa rumah sakit memenuhi standar mutu layanan dan keselamatan pasien. Rumah sakit wajib melakukan akreditasi paling lambat dua tahun setelah operasional dan reakreditasi dilakukan setiap 4 (empat) tahun setelah akreditasi. Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yaitu 95,24 % dari total 126 RS telah terakreditas. Sebanyak 81,7% dari RS yang terakreditasi mendapat strata paripurna, 10,3% starata Utama dan 3,1 % strata madya. Adapun RS yang belum terakreditasi terkendala beberapa hal diantaranya diantaranya RS baru beroperasional di tahun 2024, 2 (dua) RSIA merencanakan dan dalam proses penurunan fungsi yaitu dari RS menjadi Klinik dan 1 RSIA direncanakan kembali berfungsi sebagai Puskesmas.

Terkait pemenuhan standar pelayanan minimal yaitu Untuk peningkatan kapasitas tim kesehatan telah dilakukan pembentukan Disaster Medical Tim (DMT) yang beranggotakan masing-masing dari Rumah Sakit pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dan Rumah Sakit TNI/Polri Sebanyak yang diharapkan menjadi tim siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana dan krisis kesehatan bagi penduduk yang terdampak bencana, dimana pada tahun 2024 sejumlah 623.505 penduduk terdampak akibat bencana Kebakaran, Angin Puting Beliung, Kekeringan, Tanah Longsor, Banjir, Kecelakaan Transportasi, KLB dan Pohon Tumbang. Frekuensi kejadian krisis kesehatan adalah 652 kejadian dengan jumlah pengungsi sebanyak 8866 orang. Pada kejadian krisis kesehatan dilaporkan luka ringan 5937 orang, luka berat 184 orang dan korban meninggal 75 orang. Jenis kejadian bencana tertinggi yaitu Banjir dengan frekuensi kejadian sebanyak 260 dan total penduduk terdampak sebanyak 420.088 orang, 3.573 orang pengungsi, 1.895 orang luka ringan, 14 orang luka berat dan 1 orang meninggal dunia. Untuk peningkatan kapasitas tim kesehatan telah dilakukan pembentukan Emergency Medical Tim (EMT) yang beranggotakan masing-masing dari Rumah Sakit pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dan Rumah Sakit TNI/Polri yang diharapkan menjadi tim siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana dan krisis kesehatan. Selain itu dilakukan peningkatan jejaring di 24 Kabupaten/kota dalam rangka pemantauan dan pelaporan kejadian bencana/krisis Kesehatan. Sebagai bentuk kesiapsiagaan telah dilakukannya beberapa simulasi penanggulangan Krisis Kesehatan seperti : Table Top Exercise (TTX) Dinkes Disaster Plan, dan Table Top Exercise (TTX) Health Emergency Operation Center (HEOC). Upaya lainnya melalui keterlibatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan dokumen Rencana Kontijensi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan serta koordinasi penanggulangan krisis Kesehatan dengan tim satgas dan emt Pusat Krisis Kesehatan Regional Sulawesi Selatan.

Untuk pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) telah dilakukan 100% pada semua sasaran. Total penduduk yang

terdampak KLB dan sudah dilayani di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 adalah 815 orang. Beberapa kejadian penyakit atau masalah kesehatan yang menjadi KLB adalah Leptospirosis, DBD, Campak, Rabies, Diare, Difteri, Typhoid dan Keracunan Pangan. Untuk deteksi dini terkait KLB telah diimplementasikan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) sebagai tools dalam menilai peningkatan kasus serta respon alert/sinyal terjadinya KLB pada kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas juga sudah tersedia Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan KLB yang diharapkan melakukan penanggulangan dibawah 24 jam.

**Tabel II. 101**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KESEHATAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | /1000 Penduduk | 0,20 | 1,69 | 1,83 | 1,78 | 1,77 |
| 2 | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | % | 100 | 41,80 | 80 | 86,4 | 95,24 |
| 3 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan beberapa indicator, namun terdapat beberapa indicator yang tidak dilakukan pengukuran dikarenakan indicator tersebut tidak menjadi kinerja pemerintah Sulawesi Selatan antara lain penanganan sungai dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 tergambarkan berdasarkan beberapa outcome antara lain terlayaninya daerah irigasi (DI) kewenangan provinsi oleh jaringan irigasi yang kinerja selama kurun waktu tersebut terus menurun sejak tahun 2022 yang capaiannya 72,84 persen menjadi sebesar 60,51 persen di tahun 2024 dikarenakan menurunnya kualitas jaringan irigasi akibat bencana banjir pada beberapa DI kewenangan provinsi serta rendahnya kapasitas pelaksana dan kualitas pekerjaan penanganan jaringan irigasi. Kinerja berikutnya adalah pelayanan air minum lintas kabupaten/kota yang sampai tahun 2024 belum dapat memenuhi kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota dikarenakan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata belum selesai dibangun. Demikian halnya dengan pelayanan pengolahan limbah domestic oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang sampai Tahun 2024 belum melakukan pengelolaan limbah dikarenakan

pembangunan jaringan perpipaan limbah SPALD Losari yang direncanakan akan melayani regional Mamminasata dan difasilitasi pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum berfungsi secara regional.

Kinerja penyelenggaraan jalan provinsi diukur dari kemantapan jalan yang merupakan akumulasi dari kondisi jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Dalam kurun waktu tahun 2020-2023 kemantapan jalan provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan kemantapan dari 75,38 persen pada tahun 2023 menjadi 71,42 persen. Menurunnya kemantapan jalan diakibatkan karena jalan dalam kondisi baik menurun dari 948,73 Km pada tahun 2024 menjadi sepanjang 928,13 Km dan kondisi sedang dari 569,51 pada tahun 2023 menjadi sepanjang 510,31 Km. Sedangkan kondisi jalan dalam kondisi rusak baik rusak berat dan rusak ringan bertambah yaitu kondisi jalan rusak berat dari sepanjang 319,34 Km pada tahun 2023 meningkat menjadi sepanjang 355,84 Km dan rusak ringan dari sepanjang 176,65 Km bertambah menjadi sepanjang 219,95 Km pada tahun 2024. Kinerja berikutnya yang menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah penyelenggaraan jasa konstruksi yang tergambarkan pada jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat pelatihan ahli yang menunjukkan peningkatan signifikan dan memberikan gambaran bahwa pada tahun 2024 dari 200 orang tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan kesemuanya telah memiliki sertifikat ahli telah sesuai dengan kebutuhan yang pencapaiannya didukung oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Tabel II. 102**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | |
| 1 | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | % | - | - | - | - | - | Tidak dilakukan pengukuran dikarenakan bukan kewenangan daerah |
| 2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | % | - | - | - | - | - | Tidak dilakukan pengukuran dikarenakan bukan kewenangan daerah |
| 3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 60,06 | 60,33 | 72,84 | 63,43 | 60,513 | |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4 | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rasio kemantapan jalan | % | 66,62 | 70,01 | 71,95 | 75,38 | 71,42 | |
| 7 | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | % | N/A | 2,74 | 2,19 | 38,58 | 100 | |

*Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sulsel Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanganan Bencana Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit. Tahun 2021 telah tertangani **warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni** berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan

sejumlah 8 Miliar rupiah untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 160 meter dan Jalan Lingkungan sepanjang 106 meter di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan panjang jaringan air bersih 13.180 meter serta cakupan rumah tangga terlayani sebesar 1.577 rumah tangga. Tahun 2022 telah terbangun sejumlah 44 unit rumah layak huni untuk korban bencana masing-masing 11 unit di Kabupaten Jeneponto, Luwu Utara, Soppeng, dan Wajo. Selain itu untuk mendukung penyediaan PSU untuk mendukung daerah rawan bencana, maka dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 575 meter di Kabupaten Pangkep, Maros, Barru, dan Kota Makassar, serta pembangunan 2 unit jaringan air bersih dengan kapasitas masing-masing sebesar 3.000 liter/hari yang melayani sejumlah 80 rumah tangga di Kabupaten Pangkep. Tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran Pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk rehabilitasi rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, disebabkan refocusing sehingga target indikator outcome tidak tercapai.

**Capaian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni** kewenangan provinsi hanya sebesar 30 persen disebabkan karena tidak terdapatnya program provinsi yang mengharuskan warga untuk direlokasi. Tahun 2023 telah terbangun rumah bagi korban bencana sebanyak 17 unit berupa pembangunan Rumah sebanyak 6 unit di Desa Tarowang dan Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana di Selatan Desa Beringin Jaya dan Desa Sumpiria Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara sebanyak 11 unit. Pada periode 2020-2024 tidak dilakukan relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi, sehingga target indikator outcome tidak tercapai.

**Capaian kinerja Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani.** Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha mendukung pencapaian penurunan luas Kawasan Kumuh pada tahun 2021 sebesar 18,03 persen atau 152,51 Ha pada kawasan kumuh kewenangan provinsi. Tahun 2021 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.757,4 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 1.729,37 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Luwu Timur, Pinrang, dan Soppeng; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit di Kabupaten Bantaeng. Tahun 2022 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.258 meter di Kabupaten Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Sinjai, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.225 meter di Kabupaten Enrekang, Gowa, Soppeng, Wajo, Jeneponto, Takalar, Maros, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit yang melayani 845 rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2023 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui:

Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kelurahan Barrang Lompo, Kec. Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar sebanyak 13 unit, selain itu juga terbangun jalan lingkungan dengan panjang 407,2 meter yang berlokasi di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Capaian kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi dari tahun 2020 hingga 2023 sebesar 319,72 Ha atau 27,01 persen dari total luas kawasan kumuh sebesar 1.183,79 Ha yang tersebar di 20 kabupaten/kota, 52 kecamatan, 91 kelurahan, 97 kawasan melalui pendanaan APBD Provinsi, Program KOTAKU Kemen PUPR, dan CSR. Pada Tahun 2023 penentuan Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi kembali diperbaharui melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 969/VI/Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan seluas 1.151,97 Ha yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi disebabkan refocusing sehingga target indikator outcome tidak tercapai.

**Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**. OPD yang menangani baru terbentuk sekitar tahun 2021, sehingga tidak tersedia data periode 2020-2021. Tahun 2022 hingga 2024 capaiannya mengalami tren meningkat dengan jumlah satuan perumahan mencapai 48,25 persen pada tahun 2024. Untuk mendukung fungsi hunian pada kawasan permukiman pada tahun 2022 telah dibangun PSU pada kawasan permukiman meliputi : a) Drainase Lingkungan sepanjang 3.576 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo; b) Jalan Lingkungan sepanjang 1.788 meter di Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Pada tahun 2022 telah dibangun PSU kawasan permukiman yang meliputi: a) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.401 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.236 meter di Kabupaten Luwu, Bone, Toraja Utara, Takalar, dan Luwu Utara; c) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan permukiman berupa reservoir beton kapasitas 9.500 liter dengan panjang pipa distribusi 1.995 meter di Kabupaten Sinjai serta tandon kapasitas masing-masing 2.000 liter dengan total panjang pipa distribusi 4.427 meter di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bone, dan Kota Makassar; d) Pembangunan PSU lainnya berupa pembangunan toilet 2 unit di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar serta Rehabilitasi Masjid di Kota Makassar. Selain itu dalam rangka peningkatan penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya, telah dibangun sejumlah 10 unit instalasi air siap minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, dan Sinjai. Pemenuhan air minum layak/ARSINUM di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya sejalan dengan amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun

2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukang Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantarang dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT. Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar sehingga pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah tangga. Tahun 2023 pembangunan PSU permukiman di wilayah provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26 Kawasan. Diantaranya Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di 11 (Sebelas) Kawasan yang tersebar di 7 kabupaten, yaitu kabupaten selayar sebanyak 4 kawasan, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Maros sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Pangkep sebanyak 2 Kawasan, Kabupaten Pinrang sebanyak 1 Kawasan. Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 2.210,72 meter di 14 Kawasan yang tersebar 3 Kab/Kota, diantaranya Kota Makassar sebanyak 9 Kawasan, Kota Pare-Pare 1 Kawasan, Kabupaten Bone 4 Kawasan. Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 174,16 meter di 1 (satu) Kawasan yang berlokasi di Kota Makassar.

**Tabel II. 103**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | | |
| 1 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100 | 100 | 100 | 100 | NA |
| 2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | % | 6,46 | 18,03 | 25,39 | 27,01 | NA |
| 4 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | % | NA | NA | 35,46 | 48,13 | 48,25 |

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025*

#### 2.1.4.4.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan data dan informasi dari yang himpun dari kab/kota bahwa Penanganan atas gangguan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan di kabupaten/kota tahun 2024 sebanyak 1.403 kasus pelanggaran maupun pengaduan. dan penanganan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan secara keseluruhan, sehingga target yg semula diterapkan 100 % dan tercapai 100% atau dengan kriteria sangat tinggi.

**Persentase Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban** yang dilaksanakan satuan polisi pamong praja provinsi sulawesi selatan berdasarkan laporan/pengaduan pelanggaran yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 95 pengaduan dan dapat diselesaikan juga sebanyak 95 pengaduan sehingga capaian 100%. diantaranya 40 penanganan pengendalian massa/ unjuk rasa, dan 55 penanganan gangguan trantibum di berbagai lokasi di antaranya jln A.P. pettarani, jln urip sumoharjo, lego lego/cpi.

**Penanganan perda/perkada yang ditegakkan** pada tahun 2024 dari keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan sebanyak 28 dan dapat direalisasikan atau ditegakkan sebanyak 28 sehingga capaian 100%.

**Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal** Tahun 2020: Badan Penanggulangan Bencana Daerah merampungkan dokumen Kajian Risiko Bencana untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pada tahun 2021 dan berlaku sampai dengan tahun 2025. Dokumen ini merupakan dasar untuk menjamin keselarasan dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat menjadi lebih efektif. Dalam dokumen ini juga terdapat beberapa peta antara lain Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas.

Tahun 2021 telah BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang mana sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 dan 36 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana. RPB merupakan sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada ruang lingkup pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana yang dapat diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu. RPB ini ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2025.

Tahun 2022 telah tersusun Dokumen Rencana Kontijensi untuk jenis Bencana banjir yang berlaku pada tahun 2022-2025. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 17, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut, Rencana

Penanggulangan Kedaruratan Bencana kemudian diperlengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi untuk setiap ancaman bencana.

Tahun 2023 telah tersusun dokumen Rencana Kontijensi untuk jenis bencana Tanah Longsor dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1790/XII/Tahun 2023 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kontijensi Tanah Longsor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026. Rencana Kontijensi Tanah Longsor Sulawesi Selatan 2023-2026 yang telah ditindaklanjuti melalui Penetapan Keputusan Gubernur sebagai legacy dan acuan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun 2024 telah tersusun dokumen Rencana Kontijensi untuk jenis bencana Kekeringan yang mana Dokumen Rencana Kontijensi Kekeringan (selanjutnya disebut Renkon Kekeringan) merupakan salah satu dari sekumpulan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirancang untuk melakukan pengaturan-pengaturan kesiapsiagaan untuk mempersiapkan segala kemungkinan sehubungan dengan risiko luar biasa yang berpeluang untuk mengakibatkan bencana, dan dapat mencakup kebijakan, strategi dan operasi untuk mengurangi potensi dampak bencana. Dokumen ini merupakan suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana untuk mencegah dan atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

**Persentase penanganan pra bencana** Tahun 2020 Telah Melakukan peningkatan kapasitas personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana sebanyak 100 orang yang tersebar di 24 Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan TRC dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Tahun 2021 Telah Melaksanakan kegiatan Table Top Exercise yang merupakan gladi ruang aparatur penanganan bencana dalam menghadapi situasi darurat bencana. Tahun 2022 Telah melaksanakan kegiatan Simulasi Bencana Banjir di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait kebencanaan Kota Pare-Pare dan juga melibatkan siswa/siswi SMA lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2023 Telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Simulasi bencana di Beberapa Kabupaten/Kota seperti, Barru, Gowa, Takalar, Bulukumba, Pare-Pare, Soppeng dalam rangka melakukan edukasi kepada aparatur maupun masyarakat yang tinggal pada wilayah yang rawan terhadap bencana sesuai dengan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2024 Telah melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana bagi sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada SMP Muhammadiyah Rappang Kabupaten Sidrap, UPT SMKN 8 Pinrang, SMA 5 Kota Pare-pare, dan SMA 1 Kabupaten Maros.

**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**, Provinsi Sulawesi Selatan dalam Indeks risiko Bencana Indonesia masih dalam kelas risiko tinggi, akan tetapi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan penurunan poin secara signifikan. Tercatat Indeks Risiko Bencana Sulawesi Selatan telah masuk dalam kategori sedang pada tahun 2024 dengan nilai risiko 140,76, dapat dilihat dari 24 kab/kota yang ada di Sulawesi Selatan 13 diantaranya berisiko tinggi terhadap bencana dan 11 Kab/Kota dengan kelas risiko sedang. Penurunan Indeks Risiko Bencana ini ditopang oleh baiknya antisipasi pemerintah terhadap mitigasi bencana alam yang terjadi. Salah satu ukuran kapasitas daerah dalam

penanggulangan bencana adalah bagaimana kesiapan personil dang juga kesiapan logistik yang digunakan sebagai buffer stock Kabupaten/Kota jika terjadi ancaman bencana. Tercatat anggaran pengadaan logistik oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.045.000.000 yang terdiri dari logistik pangan, perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga dan shelter kit. Sementara untuk Tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp. 1.619.000.000 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.604.000.000., untuk tahun tahun 2024 sebesar Rp. 692.160.600,-.

**Tabel II. 104**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 28,57 | 40,00 | 53,33 | 93,33 | 100 |
| 3 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase penanganan pra bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.6. Urusan Sosial

**Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti** Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdapat pada LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sudah terealisasi 100%

**Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.** Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar yang terdapat pada 4 UPT Dinas Sosial (PPRSA Inang Matutu Makassar, UPT PPRSA Seroja Bone, UPT PPSBR Makkareso Maros dan UPT PPSBK Nirannuang Bulukumba) sudah terealisasi 100% sesuai dengan target yaitu pada Tahun 2020 sebanyak 425 Anak, Tahun 2021 sebanyak 425 Anak, Tahun 2022 sebanyak 425 Anak, Tahun 2023 Sebanyak 215 Anak dan Tahun 2024 sebanyak 215 Anak.

**Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia dalam panti.** Pada Tahun 2020–2022 jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi di dalam panti Mappakasunggu Parepare yaitu sebanyak 75 orang dan terealisasi sesuai target yang ditentukan. Dan pada Tahun 2023-2024 jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi di dalam panti Mappakasunggu Parepare yaitu sebanyak 60 orang dan terealisasi sesuai target yang ditentukan.

**Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila di dalam panti.** Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis yang terdapat pada LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sudah terealisasi 100%.

**Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.** Tahun 2020 Jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 38.246 Orang dengan jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sebanyak 5.979 Orang, Tahun 2021 Jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 9.494 Orang dan semua Korban bencana pada tahun ini mendapatkan bantuan, Tahun 2022 Jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 26.921 Orang dan semua Korban bencana pada tahun ini mendapatkan bantuan, Tahun 2023 Jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 74.159 Orang dan semua Korban bencana pada tahun ini mendapatkan bantuan dan Tahun 2024 Jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 18.403 Orang dan semua Korban bencana pada tahun ini mendapatkan bantuan sebagaimana pada tabel sebagai berikut;

**Tabel II. 105**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | SOSIAL | | | | | | |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 35,12 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 3,88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 | NA | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase korban bencana alam dan | % | 15,63 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | | | | | | |

*Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.7. Urusan Tenaga Kerja

**Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja** adalah jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah dan masih berlaku dibagi dengan jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yaitu 24 Kabupaten/Kota, kemudian dikali 100%. Masa berlaku RTKD bervariasi di setiap Kabupaten/Kota, sehingga setiap tahun ada beberapa yang masa berlakunya habis. Berikut adalah jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RTKD yang masih berlaku pada tahun-tahun tertentu. Tahun 2020 sebanyak 23 Kabupaten/Kota, Tahun 2021 sebanyak 22 Kabupaten/Kota, Tahun 2022 sebanyak 16 Kabupaten/Kota, Tahun 2023 sebanyak 18 Kabupaten/Kota dan Tahun 2024 sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi** adalah Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan, kemudian dikali 100%. Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Berikut rinciannya: tahun 2020 sebanyak 111 orang, tahun 2021 sebanyak 2.001 orang, tahun 2022 sebanyak 55.058 orang, tahun 2023 sebanyak 594 orang, dan tahun 2024 sebanyak 33.646 orang. Perubahan definisi data saat verifikasi dan pemeriksaan yang berbeda pada setiap tahun menjadi faktor penyebab fluktuasi tersebut.

**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** adalah PDRB Tahun berjalan berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif tenaga kerja dalam menghasilkan output (barang atau jasa). Produktivitas tenaga kerja mencerminkan kontribusi ekonomi pekerja terhadap pendapatan atau nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau negara antara lain, pada tahun 2020 adalah Rp 81.864.923, pada tahun 2021 adalah Rp 82.539.486, pada tahun 2022 adalah Rp 82.540.089, pada tahun 2023 adalah Rp 82.890.030, dan pada tahun 2024 adalah Rp 84.628.518.

**Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS** adalah Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi dengan jumlah perusahaan, kemudian dikali 100%. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2020 adalah 12.208 Perusahaan, pada tahun 2021 adalah 38.228 Perusahaan, pada tahun 2022 adalah 21.597 Perusahaan, pada tahun 2023 adalah 21.603, dan pada tahun 2024 adalah 3.033 Perusahaan. Terjadi perubahan data pada tahun 2021 dan 2024 dikarena definisi data berubah sesuai hasil verifikasi dan pemeriksaan.

**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi** adalah Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja terdaftar, kemudian dikali 100%.

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah 8.867 Orang, pada tahun 2021 adalah 17.424 Orang, pada tahun 2022 adalah 31.650 Orang, pada tahun 2023 adalah 33.216 Orang, pada tahun 2024 adalah 33.221 Orang.

**Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan** adalah Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n dibagi dengan Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n, kemudian dikali 100%. Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2020 adalah 7.297, pada tahun 2021 adalah 20.189, pada tahun 2022 adalah 9.592, pada tahun 2023 adalah 10.710, pada tahun 2024 adalah 3.137. Pada lima tahun terakhir terdapat perubahan definisi data sesuai hasil verifikasi dan pemeriksaan, sehingga total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan di setiap tahun naik/turun.

**Tabel II. 106**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | TENAGA KERJA | | | | | | |
| 1 | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 95,83 | 91,67 | 66,67 | 75,00 | 45,83 |
| 2 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 0,003 | 0,048 | 1,26 | 0,04 | 17,27 |
| 3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rupiah | 81.864.923 | 82.539.486 | 82.540.089 | 82.890.030 | 84.628.518 |
| 4 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 60,47 | 47,07 | 93,33 | 93,35 | 88,45 |
| 5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | % | 3,30 | 5,60 | 79,77 | 80,81 | 71,86 |
| 6 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | % | 160,15 | 100 | 63,38 | 68,95 | 91,48 |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tren ARG (Anggaran Responsif Gender) mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 , nilai ARG (Anggaran Responsif Gender) Provinsi Sulawesi Selatan capaian realisasinya melebihi target yaitu 40,64% sementara target 38%.

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi di atas, dapat dilihat bahwa rasio kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 sebesar 21,33 per 100.000 yang berarti bahwa penurunan rasio angka kekerasan terhadap perempuan sudah lebih baik daripada target 2024 dengan persentase capaian sebesar 137,41 persen. Adapun jumlah korban kekerasan terhadap perempuan untuk tahun 2024 sebanyak 1017 korban. Namun, untuk rasio kekerasan terhadap anak ternyata belum melampaui target 2024 dengan rasio 3,68 per 10.000 korban dengan total korban kekerasan terhadap anak sebesar 1057 korban. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja di atas dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa rasio penurunan kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2020 hingga 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, begitu pula untuk rasio kekerasan terhadap anak juga mengalami fluktuasi.

**Tabel II. 107**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | |
| 1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 22,05 | 41,89 | 36,64 | 32,92 | 40,64 |
| 2 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | % | 3,10 | 6,41 | 2,74 | 0,025 | 3,68 |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan | % | 34,51 | 31,79 | 25,83 | 0,03 | 21,33 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dalduk dan KB, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.9. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang telah diakui secara internasional di The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat dan produktif secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Cadangan pangan diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Capaian persentase cadangan pangan mengalami fluktuatif setiap tahunnya karena cadangan pangan pemerintah sangat

dipengaruhi oleh wilayah terdampak bencana, prevalensi kerawanan pangan, jumlah penduduk dan konsumsi cadangan pangan pemerintah provinsi yang tersedia pada akhir tahun 2024 sebanyak 109,37 ton (26,49 %) dari jumlah ideal 412,92 ton (berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah).

Capaian persentase cadangan pangan provinsi setiap tahun mulai tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuasi. tetapai jumlah cadangan pangan provinsi tahun 2020 - 2023 sebanyak 140 ton dan tahun 2024 berkurang menjadi 109,37 ton karena pada tahun 2024, cadangan pangan provinsi disalurkan untuk penanganan bencana di Kabupaten Luwu, Tana Toraja dan Sidrap sebanyak 30,63 ton. Fluktuasi capaian disebabkan oleh pendekatan perhitungan capaian kinerja yang berubah, dimana pada tahun 2020 menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan Peraturan Kementrian Pertanian No. 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018, tahun 2021-2022 menggunakan pendekatan rumus ketersediaan pangan dibagi dengan kebutuhan konsumsi berdasarkan form IKK LPPD sesuai permendagri 18 tahun 2020 sedangkan tahun 2024 menggunakan pendekatan perhitungan cadangan pangan berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi sangat tergantung pada kemampuan fiskal daerah, namun terkait dengan kebutuhan ideal cadangan pangan suatu wilayah sangat tergantung pada jumlah penduduk, konsumsi perkapita, wilayah terdampak bencana, prevelensi kerawanan pangan dan indeks kerawanan bencana.

**Tabel II. 108**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PANGAN** | | | | | | |
| 1 | Persentase Cadangan Pangan | % | 15,19 | 411,04 | 102,61 | 255,167 | 26,49 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.10. Urusan Pertanahan

**Capaian persentase pemanfaatan tanah** yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 100 persen pada tahun 2024 dengan 2.546,54 Ha luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi terhadap seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi.

**Capaian pengadaan tanah** untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu tahun 2020 mengalami penurunan dari 95,45 persen hingga 0 persen pada tahun 2024. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) pengadaan tanah dan 4 (empat) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Tahun 2018 fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 6 (enam) jenis pengadaan tanah dan diantaranya ada 1 (satu) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis

nasional. Untuk tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) pengadaan tanah yang beberapa diantaranya hanya dilakukan perpanjangan penetapan lokasi, sedangkan tahun 2020 sejumlah 5 (lima) pengadaan tanah. Berdasarkan Perpres Nomor 190 Tahun 2020 bahwa Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan Perpanjangan dan Pembaruan Penetapan Lokasi jika Pengadaan tanahnya masih terus berjalan. Pada tahun 2021 regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengalami perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi sejumlah 8 kegiatan pengadaan tanah antara lain proyek prioritas provinsi dan proyek strategis Nasional yang permohonannya diajukan pada akhir tahun 2021 tetapi dilakukan perpanjangan dan penetapan lokasinya pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 Perencanaan Pengadaan Tanah yang difasilitasi sebanyak 3 (tiga) lokasi yaitu: 1) Pengadaan tanah pembangunan bendungan jenelata kab. Gowa seluas ± 1.590,67 Ha; 2) Pengadaan tanah pembangunan Bandara Wisata kab. Bulukumba seluas ± 79,93 Ha; 3) Pengadaan tanah Pembangunan Overpass Tonasa 2 Kab. Pangkep dan Jalan Ongkoe Kab. Maros, Jalur Kereta Api Makassar-Parepare seluas ± 5,28 Ha. Dari 3 lokasi pengadaan tanah yang direncanakan, telah diterbitkan sebanyak 1 (Satu) SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yakni Pengadaan tanah pembangunan bendungan jenelata kab. Gowa. Adapun pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Wisata Bulukumba belum dilakukan penetapan lokasi karena masih dilakukan perbaikan pada Dokumen FS (Feasibility Study), sedangkan Pengadaan tanah Pembangunan Overpass Tonasa 2 Kab. Pangkep dan Jalan Ongkoe Kab. Maros, Jalur Kereta Api Makassar-Parepare, masih dalam penyempurnaan dokumen terkait luasan tanah yang akan dibebaskan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan tepat waktu didorong oleh pelaksanaan sosialisasi yang masif, koordinasi semua pihak yang berkepentingan serta transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Faktor penghambat diantaranya alas hak pemilik lahan yang tidak lengkap atau terjadi sengketa kepemilikan, terjadi penolakan dan gugatan terkait dengan nilai yang ditetapkan oleh Appraisal, pemilik tidak diketahui keberadaannya dan adanya provokasi dari pihak yang berkepentingan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala yang besar dilaksanakan secara multiyears karena luasnya lahan yang diperlukan, banyaknya pemilik bidang tanah serta anggaran yang diperlukan. Tahun 2024 definisi operasional yang menyebutkan kegiatan menyediakan luas tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat selesai tepat waktu, sedangkan pemberian ganti kerugian layak berdasarkan penetapan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)/Appraisal dan bukan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ketersediaan lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren fluktuasi dimana hingga tahun 2023 tidak terdapat surat izin lintas wilayah yang diterbitkan. Sementara capaian tahun 2024 masih menunggu hasil olahan data Balai Perkeretaapian terkait pembebasan lahan kereta api di Sulawesi Selatan.

**Tabel II. 109**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | PERTANAHAN | | | | | | |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | 99,60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | % | 94,5 | 73,63 | 50,39 | 44,74 | - |
| 3 | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota | % | 100 | 93,76 | 100 | - | - |

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja kunci dalam urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi menunjukkan tren peningkatan pada **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH**), yang mengalami kenaikan dari 71,74% pada tahun 2020 menjadi 75,69% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup, terutama setelah penggabungan dengan urusan kehutanan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kegiatan substansial yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Setelah mengalami peningkatan dari 18,46% pada tahun 2020 menjadi 44,60% pada tahun 2023, angka ini justru menurun menjadi 26,00% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam kepatuhan di beberapa tahun sebelumnya, tantangan dalam pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Rendahnya anggaran yang tersedia turut mempengaruhi efektivitas program pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan.

**Tabel II. 110**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | % | 71,74 | 73,23 | 74,14 | 74,3 | 75,69 |
| 2 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | 18,46 | 18,46 | 29,57 | 44,60 | 26,00 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ialah Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah sesuai yang tertuang dalam Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, peran penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah memastikan Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan hak nya itu memiliki dokumen kependudukan yang valid yang kedepannya dapat dipergunakan dalam memenuhi pelayanan publik, selain itu, manfaat data kependudukan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, adapun capaian 5 tahun terakhir indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 111**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | |
| 1 | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pemanfaatan data kependudukan | % | 12,82 | 15,38 | 55,56 | 55,56 | 21,05 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

Pada tabel capaian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dapat dilihat pada indikator Penyajian Data **Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun di 5 (lima) tahun** terakhir capaiannya rata-rata 100%, yang mana output dari indikator ini ialah penerbitan Buku Data Konsolidasi Bersih (DBK) Persemester dan Buku Profil Kependudukan yang berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan dalam setahun.

Adapun untuk Indikator **Pemanfaatan Data Kependudukan** dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat penurunan di tahun 2024 yang mana indikator tersebut outputnya iala jumlah Perangkat Daerah (PD) khususnya yang melakukan pelayanan publik yang diharapkan dapat memanfaatkan Data Kependudukan yang bermanfaat dapat membantu peningkatan dan kualitas data yang valid, adapun penyebab penurunan capaian dai tahun 2024 yaitu masih rendahnya partisipasi/minat Perangkat Daerah untuk dapat memanfaatkan data kependudukan ini sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

### 2.1.4.4.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Capaian Persentase pengentasan desa tertinggal** tahun 2024 sebesar 6,09% atau tersisa 138 Desa tertinggal, terdapat 24 Desa yang naik status dibandingkan kondisi tahun sebelumnya dengan jumlah 162 Desa tertinggal.

**Tabel II. 112**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | |
| 1 | Persentase pengentasan desa tertinggal | % | 47,41 | 36,27 | 35,45 | 25,13 | 6,09 |
| 2 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | % | 100 | 17,58 | 31,09 | 32,78 | 32,88 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

**Capaian Persentase peningkatan status desa mandiri** tahun 2024 sebesar 32,88% atau sebanyak 745 Desa Mandiri dari jumlah desa keseluruhan sebanyak 2266 mengalami peningkatan sebanyak 274 Desa dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 471 Desa Mandiri.

### 2.1.4.4.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Realisasi nilai TFR (Total Fertility Rate)** tahun 2024 sebesar 2,15. Capaian realisasinya melebihi target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan di tahun 2024 yaitu 2,65. Sehingga berdasarkan data capaian tersebut, nilai TFR (Total Fertility Rate) tahun 2024 dikategorikan ST (Sangat Tinggi). Sedangkan nilai ASFR (Age Specific Fertility Rate) juga lebih baik daripada target sebesar 26,4/1000 Kelahiran Hidup dengan kategori ST.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren nilai TFR (Total Fertility Rate) dari tahun 2022 hingga 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan secara konsisten dan cukup signifikan, namun nilai TFR (Total Fertility Rate) kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 2,15. Begitu pula dengan nilai ASFR (Age Specific Fertility Rate) yang menunjukkan tren penurunan kurun waktu 2022-2023 namun meningkat di tahun 2024 di angka 26,2/1000 Kelahiran Hidup. Hal ini berarti bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan upaya yang lebih melalui program/kegiatan terkait untuk menekan angka kelahiran.

Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimal. RPJMN Indonesia tahun 2020-2024 menargetkan adanya penurunan TFR hingga mencapai 2,1 anak per perempuan pada tahun 2024. Angka tersebut dianggap ideal karena merupakan angka

yang menunjukkan terjadinya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Data diatas juga menunjukkan bahwa Capaian TFR Provinsi sangat mendekati capaian TFR Nasional. Kondisi TFR ini diharapkan dapat mendukung PTS di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mencapai PTS, kondisi ini diharapkan dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang agar dapat memperpanjang atau mempertahankan periode bonus demografi yang saat ini terjadi di Sulawesi Selatan. Setelah mencapai TFR di angka 2,15 maka fokus pembangunan kependudukan kedepannya bukan lagi pada penurunan TFR, melainkan ke arah peningkatan kualitas penduduk di Sulawesi Selatan.

Penurunan TFR ini sangat didukung oleh peningkatan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR). Data menunjukkan bahwa Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) di Sulawesi Selatan dari tahun 2022-2024 adalah 56,62 di tahun 2022, 66,84 tahun 2023 dan 68,39 di tahun 2024**.** Selain itu kondisi kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi juga mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 12,00%.

**Tabel II. 113**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | |
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Nilai | 2,13 | 2,29 | 2,29 | 2,13 | 2,15 |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | % | 78,47 | 71,66 | 56,62 | 66,84 | 68,39 |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 8,86 | 14,26 | 26,13 | 12,08 | 12,00 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk KB, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.15. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran mobilitas masyarakat serta barang. Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Rasio konektivitas yang dinilai berdasarkan rasio konektivitas transportasi darat daerah dengan membandingkan jumlah pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan daerah yang terlayani angkutan umum dan angkutan penyeberangan. Selain rasio konektivitas, kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan juga tergambarkan pada *Volume to Capacity Ratio* (V/C Ratio) yang menggambarkan tingkat pelayanan jalan yang membandingkan volume kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan dibandingkan dengan kapasitas jalan tersebut.

**Tabel II. 114**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERHUBUNGAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio konektivitas provinsi | Rasio | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 |
| 2 | V/C Ratio di Jalan Provinsi | Rasio | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

*Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa rasio konektivitas provinsi yang diukur berdasarkan konektivitas angkutan jalan dan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) pada tahun 2024 mencapai 0,94 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan pada konektivitas angkutan jalan melalui Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) telah melayani 21 trayek AKDP dengan frekuensi 7 kali seminggu dari 23 trayek AKDP yang dibutuhkan di Sulawesi Selatan. Adapun trayek yang belum terlayani AKDP adalah trayek yang menghubungkan kabupaten Gowa-kabupaten Banteng-kabupaten Kepulauan Selayar dan trayek yang menghubungkan kabupaten Gowa-kabupaten Banteng-kabupaten Sinjai. Sedangkan pada konektivitas ASDP dari 12 (dua belas) lintasan seluruhnya telah terlayani oleh ASDP walaupun dengan frekuensi yang berbeda dimana hanya terdapat 3 (tiga) lintasan dengan frekuensi tinggi yaitu lebih dari 5 kali seminggu yaitu pada jalur Bira-Pamatata, Bone-Kolaka, dan Siwa-Lasusua, sedangkan 9 lintasan lainnya yang menghubungkan kabupaten Kepulauan Selayar dengan provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten Bulukumba dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten Barru dengan provinsi Kalimantan Selatan terlayani dengan frekuensi rendah yaitu kurang dari 3 kali seminggu.

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pelayanan yang diukur berdasarkan *Volume to Capacity Ratio* (V/C Ratio) menunjukkan bahwa nilai V/C Ratio pada 104 (seratus empat) ruas jalan kewenangan provinsi selama kurun waktu lima tahun terakhir relative stagnan yang jika dirata-ratakan sebesar 0,3. Namun hal tidak menggambarkan tingkat pelayanan yang bagus dikarenakan tingkat pelayanan pada ruas jalan provinsi yang sangat bervariasi mulai dari nilai terendah sebesar 0,05 pada beberapa ruas jalan provinsi yang belum tembus dan dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang sangat rendah di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Barru, dan Bantaeng, sampai dengan nilai tertinggi sebesar 0,60-065 pada ruas jalan provinsi dengan perkerasan hotmix dan perkerasan beton serta LHR tinggi di kabupaten Gowa dan kota Makassar.

**Tabel II. 115**
**KondisiJalan Provinsi Tahun 2024**

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 001.11K | Jalan Jenderal Sudirman | Makassar | 1,70 | 18,82 | 1,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 5.841 | 0,25 |
| 2 | 001.12K | Jalan Dr. Ratulangi | Makassar | 2,14 | 16,21 | 2,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 7.765 | 0,45 |
| 3 | 001.13K | Jalan Kumala | Makassar | 1,37 | 8,53 | 1,10 | 94,89 | 0,27 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 17.593 | 0,45 |
| 4 | 001.14K | Jalan Daeng Ngeppe | Makassar | 0,38 | 8,00 | 0,18 | 47,37 | 0,20 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 15.642 | 0,47 |
| 5 | 001.15K | Jalan Daeng Tata | Makassar | 1,38 | 8,00 | 1,08 | 78,26 | 0,30 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 16.071 | 0,50 |
| 6 | 001.16K | Jalan Malengkeri | Makassar | 1,61 | 8,14 | 1,21 | 75,16 | 0,40 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 15.595 | 0,60 |
| 7 | 002.11K | Jl. Letjen. Hertasning | Makassar | 1,80 | 19,00 | 1,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 19.983 | 0,60 |
| 8 | 002.12K | Jl. Aroepala | Makassar | 1,80 | 14,09 | 0,40 | 38,89 | 0,90 | 61,11 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | Hotmix | 19.789 | 0,60 |
| 9 | 002.13K | Jl. Tun Abdul Razak | Gowa | 3,68 | 14,33 | 3,08 | 83,70 | 0,60 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 19.151 | 0,50 |
| 10 | 003 | Jalan H.M. Yasin Limpo | Gowa | 7,85 | 6,69 | 4,65 | 69,43 | 2,70 | 30,57 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 17.099 | 0,50 |
| 11 | 004.11K | Jalan Dr. Laimena | Makassar | 1,86 | 7,02 | 0,50 | 26,88 | 1,36 | 73,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 18.979 | 0,65 |
| 12 | 004.12K | Jalan Antang Raya | Makassar | 1,50 | 7,23 | 1,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 12.689 | 0,60 |
| 13 | 004.13K | Jalan | Makassar | 3,49 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 10.953 | 0,50 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Tamangapa Raya | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 004.14K | Jalan Abd. Kadir Dg. Suro | Gowa | 1,18 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 5.337 | 0,50 |
| 15 | 004.15K | Jalan Mustafa Dg. Bunga | Gowa | 2,07 | 6,05 | 0,67 | 32,37 | 1,30 | 62,80 | 0,10 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 7.326 | 0,60 |
| 16 | 004.16K | Jalan Muttalib Dg. Narang | Gowa | 1,43 | 7,00 | 1,30 | 90,91 | 0,13 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 7.480 | 0,60 |
| 17 | 004.17K | Jalan Kacong Dg. Lalang | Gowa | 0,96 | 6,00 | 0,66 | 68,75 | 0,20 | 20,83 | 0,10 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 7.896 | 0,60 |
| 18 | 004.18K | Jalan Syech Yusuf | Gowa | 1,44 | 6,00 | 0,60 | 41,67 | 0,64 | 44,44 | 0,20 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | Perkerasan Beton | 9.084 | 0,60 |
| 19 | 005 | Panciro - Bts. Kota Makassar | Gowa | 4,18 | 7,00 | 0,98 | 30,62 | 2,00 | 64,59 | 1,10 | 0,00 | 0,10 | 4,78 | Hotmix+Perkerasan Beton | 11.580 | 0,20 |
| 20 | 006 | Bts. Kab. Gowa - Barombong - Bts. Kab. Takalar | Gowa | 2,32 | 6,60 | 1,62 | 69,83 | 0,20 | 30,17 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 14.760 | 0,30 |
| 21 | 007 | Bts. Kota Makassar - Bonto Ramba (Bts. Kab. Gowa) | Gowa | 19,62 | 7,00 | 15,72 | 80,12 | 3,50 | 17,84 | 0,20 | 1,02 | 0,20 | 1,02 | Hotmix | 14.295 | 0,22 |
| 22 | 008 | Bonto Ramba - Galesong - | Takalar | 11,06 | 7,00 | 9,66 | 87,34 | 1,20 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,81 | Hotmix | 7.059 | 0,35 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Pattallasang | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 009 | Pallangga - Salekoa - Bts. Kab. Takalar | Gowa | 14,20 | 5,42 | 3,90 | 31,69 | 6,60 | 55,63 | 1,50 | 9,15 | 2,20 | 3,52 | Hotmix | 3.247 | 0,22 |
| 24 | 010 | Bts. Kab. Gowa (Salekoa) - Tanakaraeng | Takalar | 6,80 | 4,00 | 0,80 | 14,71 | 1,60 | 61,76 | 1,80 | 13,24 | 2,60 | 10,29 | | 947 | 0,21 |
| 25 | 011 | Tanakaraeng - Sapaya - Bts. Kab. Jeneponto | Jeneponto | 72,09 | 4,07 | 48,19 | 66,85 | 20,30 | 28,16 | 0,40 | 0,55 | 3,20 | 4,44 | Hotmix+Perkerasan Beton | 1.763 | 0,10 |
| 26 | 012 | Bts. Kab. Gowa (Boro) - Rumbia - Jeneponto | Gowa | 34,41 | 4,94 | 12,70 | 37,78 | 14,11 | 61,93 | 7,10 | 0,29 | 0,50 | 0,00 | Hotmix | 4.325 | 0,05 |
| 27 | 013 | Sungguminasa - Malino | Gowa | 61,40 | 6,36 | 38,30 | 62,38 | 19,30 | 31,43 | 3,70 | 6,03 | 0,10 | 0,16 | Hotmix+Perkerasan Beton | 13.076 | 0,25 |
| 28 | 014 | Malino - Bts. Kab. Sinjai | Gowa | 37,60 | 4,72 | 28,40 | 75,53 | 7,50 | 19,95 | 1,40 | 3,72 | 0,30 | 0,80 | Hotmix | 2.874 | 0,10 |
| 29 | 015 | Bts. Kab. Gowa - Tondong | Sinjai | 49,82 | 4,03 | 16,92 | 33,96 | 28,80 | 57,81 | 3,50 | 7,03 | 0,60 | 1,20 | Hotmix | 926 | 0,05 |
| 30 | 016 | Parang Loe - Tamalanrea Raya - Bts. Kab. Maros | Makassar | 6,27 | 17,81 | 6,00 | 95,69 | 0,27 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 6.729 | 0,45 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 31 | 017 | Bts. Kota Makassar - Pamanjengan - Benteng Gajah | Maros | 9,37 | 5,29 | 8,77 | 93,60 | 0,30 | 3,20 | 0,20 | 2,13 | 0,10 | 1,07 | Hotmix | 9.491 | 0,10 |
| 32 | 018 | Palekko - Towata | Takalar | 10,93 | 4,53 | 0,10 | 0,91 | 9,83 | 89,94 | 0,20 | 1,83 | 0,80 | 7,32 | Perkerasan Beton | 637 | 0,15 |
| 33 | 019 | Burung Burung - Bili Bili | Gowa | 6,95 | 6,91 | 1,35 | 28,06 | 3,60 | 71,94 | 1,80 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 9.491 | 0,47 |
| 34 | 020 | Burung Burung - Bts. Kab. Maros | Gowa | 7,97 | 7,00 | 5,17 | 64,87 | 2,70 | 33,88 | 0,10 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 506 | 0,21 |
| 35 | 021 | Bts. Kab. Gowa - Benteng Gajah - Carangki - Bantimurung | Maros | 24,46 | 4,62 | 21,36 | 87,33 | 2,60 | 10,63 | 0,10 | 0,41 | 0,40 | 1,64 | Hotmix+Perkerasan Beton | 1.705 | 0,10 |
| 36 | 022 | Pangkep (Male'leng) - Tondongkura - Bts. Kab. Bone | Pangkajene Kepulauan | 34,10 | 6,42 | 12,50 | 36,66 | 19,50 | 57,18 | 0,40 | 1,17 | 1,70 | 4,99 | Hotmix+Perkerasan Beton | 599 | 0,05 |
| 37 | 023 | Bts. Kab. Pangkep - Tondong Bua - Bts. Kab. Barru | Pangkajene Kepulauan | 10,40 | 4,10 | 6,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,62 | 2,90 | 27,88 | Hotmix+Perkerasan Beton | - | 0,05 |
| 38 | 024 | Bts. Kab. Bone - Bacuapie - | Pangkajene Kepulauan | 9,55 | 5,80 | 0,95 | 9,95 | 8,60 | 90,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | - | 0,07 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Balangbaru | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 025 | Bts. Kab. Barru (Samaenre) - Parigi | Pangkajene Kepulauan | 25,80 | 4,05 | 16,80 | 65,12 | 5,00 | 19,38 | 1,50 | 5,81 | 2,50 | 9,69 | Hotmix + Telford | - | 0,10 |
| 40 | 026 | Tuppu - Pao - Pamulungan - Bts. Kab. Tana Toraja | Pinrang | 48,64 | 4,81 | 1,00 | 2,06 | 18,00 | 37,01 | 7,00 | 14,39 | 22,64 | 46,55 | Perkerasan Beton+Telford + Belum Tembus | 216 | 0,20 |
| 41 | 027 | Takkalasi - Bainange - Bts. Soppeng | Barru | 18,70 | 6,50 | 15,70 | 83,96 | 2,20 | 11,76 | 0,80 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 957 | 0,05 |
| 42 | 028 | Bts. Barru - Lompotiang - Lawo | Soppeng | 18,22 | 6,16 | 12,10 | 66,41 | 1,60 | 8,78 | 0,72 | 3,95 | 3,80 | 20,86 | Hotmix + Telford + Belum Tembus | 239 | 0,10 |
| 43 | 029 | Pekkae - Bts. Kab. Soppeng | Barru | 33,30 | 5,65 | 17,90 | 53,75 | 14,20 | 42,64 | 1,00 | 3,00 | 0,20 | 0,60 | Hotmix+Perkerasan Beton | 2.203 | 0,25 |
| 44 | 030 | Bts. Kab. Barru-Takalala | Soppeng | 25,82 | 5,44 | 15,42 | 60,11 | 6,00 | 32,53 | 3,50 | 4,26 | 0,90 | 3,10 | Hotmix | 2.222 | 0,10 |
| 45 | 031 | Pinrang - Bts. Rappang | Pinrang | 11,10 | 6,64 | 7,50 | 67,57 | 3,60 | 32,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 5.839 | 0,20 |
| 46 | 032 | Bts. Kab. Pinrang - Rappang | Sidenreng Rappang | 8,40 | 6,82 | 4,50 | 53,57 | 3,70 | 44,05 | 0,20 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 4.419 | 0,40 |
| 47 | 033 | Paleteang - Malimpung - Bts. Kab. | Pinrang | 19,00 | 6,00 | 9,10 | 47,89 | 7,10 | 37,37 | 2,20 | 11,58 | 0,60 | 3,16 | Hotmix | 1.739 | 0,30 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Enrenkang | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 034 | Bts. Kab. Pinrang - Kabere | Enrekang | 4,56 | 6,00 | 2,56 | 56,14 | 1,80 | 39,47 | 0,20 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 1.032 | 0,40 |
| 49 | 035 | Sapaya - Malino | Gowa | 33,77 | 4,04 | 11,07 | 32,78 | 7,80 | 23,10 | 13,70 | 40,57 | 1,20 | 3,55 | Hotmix+Perkerasan Beton | 426 | 0,20 |
| 50 | 036 | Boro - Bts. Kab Bantaeng (Loka) | Bantaeng | 6,67 | 4,00 | 0,90 | 13,49 | 5,57 | 83,51 | 0,10 | 1,50 | 0,10 | 1,50 | Hotmix | 203 | 0,05 |
| 51 | 037 | Bts. Kab. Jeneponto (Loka) - Sinoa - Bantaeng | Bantaeng | 18,74 | 4,14 | 6,40 | 34,15 | 12,14 | 64,78 | 0,20 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 453 | 0,07 |
| 52 | 038 | Kotu - Masale - Baroko - Bts. Kab. Tana Toraja | Enrekang | 43,46 | 4,02 | 1,96 | 4,51 | 12,20 | 28,07 | 28,70 | 66,04 | 0,60 | 1,38 | Hotmix+Perkerasan Beton | 1.018 | 0,25 |
| 53 | 039 | Bts. Kab. Enrekang (Kaduaja) - Mebali | Enrekang | 17,02 | 4,06 | 5,42 | 31,84 | 10,70 | 62,87 | 0,10 | 0,59 | 0,80 | 4,70 | Hotmix+Perkerasan Beton | 725 | 0,22 |
| 54 | 040 | Passobo - Matangli - Masuppu | Tana Toraja | 27,98 | 5,00 | 13,30 | 47,53 | 8,10 | 28,95 | 0,20 | 0,71 | 6,38 | 22,80 | Hotmix+Perkerasan Beton | 511 | 0,31 |
| 55 | 041 | Masuppu - Bts. Kab. Pinrang | Tana Toraja | 73,73 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 44,08 | 41,23 | 55,92 | Perkerasan Beton+Telford + Belum Tembus | 404 | 0,23 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 56 | 042 | Salokarajae - Bts. Kab. Sidrap | Enrekang | 9,02 | 4,57 | 1,72 | 19,07 | 2,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 58,76 | Hotmix | 1.069 | 0,25 |
| 57 | 043 | Bts. Kab. Enrekang - Anabannae - Dongi - Tanrutedong | Sidenreng Rappang | 20,87 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 33,40 | 10,90 | 51,75 | 7,10 | 14,85 | Hotmix | 2.475 | 0,40 |
| 58 | 044 | Mario - Binabaru - Bts. Kab. Pinrang | Sidenreng Rappang | 12,61 | 5,79 | 10,71 | 84,93 | 1,60 | 12,69 | 0,20 | 1,59 | 0,10 | 0,79 | Hotmix+Perkerasan Beton | 555 | 0,30 |
| 59 | 045 | Bts. Kab. Sidrap - Malimpung | Pinrang | 4,90 | 6,00 | 0,70 | 14,29 | 3,70 | 75,51 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,20 | Hotmix | 547 | 0,44 |
| 60 | 046 | Cabenge - Soppeng | Soppeng | 11,81 | 7,30 | 8,81 | 74,60 | 2,30 | 19,48 | 0,20 | 1,69 | 0,50 | 4,23 | Hotmix | 5.728 | 0,45 |
| 61 | 047 | Soppeng - Bts. Kab. Sidrap | Soppeng | 34,94 | 6,56 | 26,04 | 74,53 | 5,80 | 16,60 | 3,10 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 3.077 | 0,44 |
| 62 | 048 | Bts. Kab. Soppeng - Pangkajene Sidrap | Sidenreng Rappang | 22,75 | 5,76 | 15,45 | 67,91 | 4,00 | 17,58 | 1,00 | 4,40 | 2,30 | 10,11 | Hotmix+Perkerasan Beton | 6.717 | 0,50 |
| 63 | 049 | Pangkajene Sidrap - Rappang | Sidenreng Rappang | 9,30 | 7,64 | 5,50 | 59,14 | 3,60 | 38,71 | 0,10 | 1,08 | 0,10 | 1,08 | Hotmix+Perkerasan Beton | 3.850 | 0,50 |
| 64 | 050 | Takalala - | Soppeng | 18,17 | 5,48 | 4,90 | 26,97 | 6,70 | 51,73 | 3,80 | 5,50 | 2,77 | 15,80 | Hotmix | 2.155 | 0,30 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Cabenge - Salaonro | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 051 | Salaonro - Bts. Kab. Wajo | Soppeng | 8,23 | 5,53 | 2,10 | 25,52 | 5,93 | 72,05 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,43 | Hotmix | 1.803 | 0,45 |
| 66 | 052 | Bts. Kab. Soppeng - Ulugalung | Wajo | 12,16 | 5,91 | 6,46 | 53,13 | 3,90 | 32,07 | 0,30 | 2,47 | 1,50 | 12,34 | Hotmix | 5.155 | 0,30 |
| 67 | 053 | Salaonro - Bts. Kab. Bone | Soppeng | 11,00 | 6,14 | 6,70 | 60,91 | 4,20 | 38,18 | 0,10 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 1.443 | 0,40 |
| 68 | 054 | Bts. Kab. Soppeng - Pompanua | Wajo | 11,73 | 5,17 | 5,13 | 43,73 | 3,70 | 31,54 | 0,80 | 6,82 | 2,10 | 17,90 | Hotmix | 1.926 | 0,45 |
| 69 | 055 | Lajoa - Pacongkang - Citta - Bts. Bone | Soppeng | 19,27 | 4,32 | 11,20 | 58,12 | 5,67 | 29,42 | 0,30 | 1,56 | 2,10 | 10,90 | Hotmix+Lapen+Perkerasan Beton | 1.851 | 0,21 |
| 70 | 056 | Bts. Kab. Soppeng - Tobenteng | Wajo | 5,33 | 5,32 | 5,03 | 94,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,63 | Hotmix | 461 | 0,25 |
| 71 | 057 | Batupapan - Bandara Pongtiku - Bts. Kab. Toraja Utara | Tana Toraja | 9,02 | 4,02 | 6,12 | 67,85 | 1,90 | 21,06 | 0,40 | 4,43 | 0,60 | 6,65 | Hotmix | 887 | 0,44 |
| 72 | 058 | Bts. Kab. Tana Toraja | Toraja Utara | 12,85 | 4,32 | 10,85 | 84,44 | 2,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 1.025 | 0,35 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | (Madandan) - Alang Alang - Rantepao | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 059 | Rantepao - Sadan - Bts. Kab. Luwu | Toraja Utara | 19,05 | 5,86 | 10,70 | 56,17 | 4,95 | 25,98 | 1,70 | 8,92 | 1,70 | 8,92 | Hotmix+Perkerasan Beton | 744 | 0,20 |
| 74 | 060 | Bts. Kab. Toraja Utara - Sangkaropi - Batusitanduk | Luwu | 27,48 | 4,66 | 10,28 | 37,41 | 0,40 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 61,14 | Hotmix+Perkerasan Beton | 516 | 0,30 |
| 75 | 061 | Tedong Bonga - Buntao - Bts. Kab. Luwu | Toraja Utara | 25,96 | 4,87 | 23,96 | 92,30 | 0,80 | 3,08 | 0,30 | 1,16 | 0,90 | 3,47 | Hotmix | 666 | 0,45 |
| 76 | 062 | Bts. Kab. Toraja Utara - Pantilang - Bua | Luwu | 38,94 | 6,23 | 23,20 | 59,58 | 1,00 | 2,57 | 1,90 | 4,88 | 12,84 | 32,97 | Hotmix+Perkerasan Beton | 1.280 | 0,30 |
| 77 | 063 | Rantepao - Pangala - Baruppu - Bts. Prov. Sulbar | Toraja Utara | 70,21 | 5,09 | 16,90 | 24,07 | 13,30 | 18,94 | 7,10 | 10,11 | 32,91 | 46,87 | Hotmix+Perkerasan Beton | 1.510 | 0,40 |
| 78 | 064 | Botolempangan - Batubelerang - Bts. Kab. Bulukumba (Munte) | Sinjai | 24,30 | 5,15 | 15,70 | 64,61 | 2,40 | 13,99 | 2,60 | 6,58 | 3,60 | 14,81 | Hotmix | 704 | 0,20 |
| 79 | 065 | Bts. Kab. Sinjai | Bulukumba | 15,86 | 4,45 | 7,96 | 50,19 | 4,60 | 29,00 | 3,20 | 20,18 | 0,10 | 0,63 | Hotmix | 1.079 | 0,20 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | (Munte) - Bonto Matene - Palampang | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 066 | Impa Impa - Anabanua | Wajo | 16,90 | 6,17 | 12,90 | 91,72 | 0,70 | 4,73 | 3,20 | 3,55 | 0,10 | 0,00 | Hotmix | 8.311 | 0,10 |
| 81 | 067 | Tanabatue - Sanrego - Palattae | Bone | 31,34 | 5,36 | 11,84 | 50,54 | 10,60 | 45,63 | 7,10 | 3,83 | 1,80 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 2.206 | 0,40 |
| 82 | 068 | Ujung Lamuru - Bts. Kab. Soppeng | Soppeng | 19,63 | 6,27 | 9,30 | 47,38 | 4,90 | 24,96 | 1,33 | 6,78 | 4,10 | 20,89 | Hotmix | 5.613 | 0,35 |
| 83 | 069 | Bts. Kab. Bone - Takalala | Soppeng | 11,18 | 5,54 | 7,78 | 69,59 | 1,90 | 16,99 | 0,60 | 5,37 | 0,90 | 8,05 | Hotmix | 6.505 | 0,30 |
| 84 | 070 | Ujung Lamuru - Palattae | Bone | 44,22 | 6,43 | 25,82 | 61,78 | 7,00 | 35,50 | 10,30 | 2,71 | 1,10 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 2.644 | 0,25 |
| 85 | 071 | Palattae - Bojo | Bone | 23,43 | 6,27 | 11,70 | 54,20 | 6,60 | 36,71 | 3,10 | 4,69 | 2,03 | 4,40 | Hotmix+Perkerasan Beton | 3.168 | 0,25 |
| 86 | 072 | Bakunge - Solo - Sampie | Bone | 9,10 | 4,33 | 8,50 | 93,41 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | Hotmix+Perkerasan Beton | 128 | 0,10 |
| 87 | 073 | Anabanua - Malake - Bts. Kab. Sidrap | Wajo | 28,60 | 6,11 | 6,00 | 20,98 | 6,90 | 24,13 | 5,40 | 18,88 | 10,30 | 36,01 | Hotmix+Perkerasan Beton | 2.510 | 0,20 |
| 88 | 074 | Bts. Kab. Wajo - Bilokka | Sidenreng Rappang | 8,90 | 4,58 | 7,10 | 79,78 | 1,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 8,99 | Hotmix+Perkerasan Beton | 2.121 | 0,35 |
| 89 | 075 | Pantilang - Bonglo - Bts. Kota Palopo | Luwu | 17,43 | 4,47 | 15,73 | 90,25 | 0,60 | 3,44 | 0,20 | 1,15 | 0,90 | 5,16 | Hotmix | 1.436 | 0,50 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 90 | 076 | Bts. Kab. Luwu - Latuppa | Luwu | 5,17 | 5,96 | 3,77 | 72,92 | 0,90 | 17,41 | 0,40 | 7,74 | 0,10 | 1,93 | Hotmix | 307 | 0,45 |
| 91 | 077.11K | Jl. Samiun | Palopo | 0,25 | 7,00 | 0,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 1.040 | 0,50 |
| 92 | 077.12K | Jl. Opu Tosappaile | Palopo | 1,35 | 7,00 | 1,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 271 | 0,50 |
| 93 | 077.13K | Jl. Pong Simpin | Palopo | 4,82 | 7,00 | 4,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hotmix | 596 | 0,45 |
| 94 | 078 | Waempubbu - Pompanua | Bone | 22,79 | 5,31 | 9,09 | 39,89 | 10,90 | 47,83 | 1,70 | 7,46 | 1,10 | 4,83 | Hotmix | 1.221 | 0,20 |
| 95 | 079 | Doping - Atapange | Wajo | 15,82 | 5,07 | 4,72 | 29,84 | 1,00 | 31,61 | 6,10 | 36,03 | 4,00 | 2,53 | Hotmix | 2.373 | 0,25 |
| 96 | 080 | Solo - Peneki - Kulampu | Wajo | 45,87 | 4,68 | 25,47 | 62,28 | 9,90 | 26,60 | 7,20 | 9,16 | 3,30 | 1,96 | Hotmix+Perkerasan Beton | 2.302 | 0,20 |
| 97 | 081 | Sabbang - Tallang | Luwu Utara | 59,20 | 3,98 | 30,40 | 51,35 | 22,00 | 37,16 | 4,00 | 6,76 | 2,80 | 4,73 | Hotmix+Perkerasan Beton | 330 | 0,10 |
| 98 | 082 | Tallang - Sae | Luwu Utara | 48,40 | 4,00 | 13,00 | 36,36 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 36,78 | Hotmix + Belum Tembus | 24 | 0,05 |
| 99 | 083 | Sae - Bts. Prov. Sulbar | Luwu Utara | 34,20 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 100,00 | Belum Tembus | - | 0,02 |
| 100 | 084 | Kalimporo - Sumalaya - Bts. Kab.Sinjai (Lolisang) | Bulukumba | 10,52 | 4,00 | 0,20 | 1,90 | 8,92 | 84,79 | 1,30 | 12,36 | 0,10 | 0,95 | Hotmix+Perkerasan Beton | 543 | 0,25 |
| 101 | 085 | Bts. Kab. Bulukumba (Lolisang) - Sanjai - Sinjai | Sinjai | 21,78 | 5,28 | 15,30 | 70,25 | 4,28 | 19,65 | 0,30 | 1,38 | 1,90 | 8,72 | Hotmix | 602 | 0,30 |

| NO | | NAMA RUAS JALAN | KAB/KOTA YANG DILALUI | PANJANG RUAS (Km) | LEBAR RUAS (M) | PANJANG TIAP KONDISI | | | | | | | | JENIS PERKERASAN | LHR | V/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | | | | |
| No | NO RUAS | | | | | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | KM | (%) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 102 | 086 | Tanete - Tanaberu | Bulukumba | 56,88 | 4,49 | 25,68 | 45,15 | 27,80 | 48,87 | 2,60 | 4,57 | 0,80 | 1,41 | Hotmix | 1.110 | 0,35 |
| 103 | 087 | Tanabau - Ngapaloka - Patumbukang | Kepulauan Selayar | 42,64 | 3,95 | 17,50 | 41,04 | 1,30 | 3,05 | 2,50 | 5,86 | 21,34 | 50,05 | Hotmix + Lapen + Perkerasan Beton+Belum tembus | 345 | 0,20 |
| 104 | 088 | Ussu - Nuha - Bts. Prov. Sulteng | Luwu Timur | 72,00 | 4,52 | 19,70 | 27,92 | 9,90 | 16,25 | 5,50 | 4,86 | 36,90 | 50,97 | Perkerasan Beton+Telford + Belum Tembus | 104 | 0,15 |
| **TOTAL** | | | | **2.014,23** | | **928,13** | | **510,31** | | **219,95** | | **355,84** | | | **4.365** | **0,31** |
| **Persentase** | | | | | | **46,08%** | | **25,34%** | | **10,92%** | | **17,67%** | | | | |

*Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perhubungan Tahun 2024, Diolah Bappelitbangda*

### 2.1.4.4.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP) Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menyediakan akses internet yang andal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akses internet yang stabil dan terintegrasi menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan sasaran pemerintah untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo** menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat konektivitas mencapai **97,83%**, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi **97,44%**. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi aspek teknis dan administratif dalam pengelolaan jaringan. Meskipun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024, persentase keterhubungan OPD dengan jaringan internet yang dikelola DISKOMINFO SP mengalami peningkatan signifikan, mencapai **100%**. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan strategis yang diterapkan melalui Surat Edaran Nomor 555/9191/DISKOMINFO-SP Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Sulawesi Selatan. Dalam kebijakan tersebut, untuk pengamanan dan pengembangan jaringan internet internal OPD hanya dapat dilakukan melalui persetujuan DISKOMINFO-SP Provinsi Sulawesi Selatan maka setiap OPD tidak diperkenankan melakukan pengembangan jaringan LAN di internal OPD melalui Pihak Kedua. Langkah ini bertujuan untuk memastikan standar keamanan siber yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mencegah potensi risiko gangguan atau kebocoran data.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat DISKOMINFO-SP dalam menjamin ketersediaan infrastruktur digital yang merata bagi seluruh OPD. Dengan konektivitas yang optimal, berbagai aspek pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan jaringan internet yang stabil berperan penting dalam mendukung digitalisasi berbagai sektor pemerintahan, termasuk sistem administrasi berbasis elektronik, pengelolaan data terpadu, serta pengembangan layanan digital yang lebih inklusif. DISKOMINFO-SP juga terus berupaya meningkatkan stabilitas serta kualitas layanan internet yang diberikan kepada OPD. Penguatan sistem keamanan siber, optimalisasi kapasitas jaringan, serta penerapan inovasi teknologi akan menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan layanan yang lebih baik. Dengan adanya infrastruktur digital yang semakin kuat, diharapkan transformasi digital di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan secara optimal, selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis digital.

Dalam lima tahun terakhir, indikator **Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi** di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian layanan publik berbasis digital berada pada angka **55,56%**, namun mengalami penurunan drastis menjadi **35,48%** pada tahun 2021. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan persentase **24,11%**, sebelum sedikit mengalami peningkatan pada

tahun 2023 menjadi **27,93%**, namun kembali turun menjadi **21,62%** pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan digitalisasi layanan publik di daerah tersebut.

Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi kendala utama, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan internet yang stabil dan berkualitas. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), masih terdapat kesenjangan digital di berbagai daerah di Indonesia, di mana sekitar 12.500 desa/kelurahan masih mengalami keterbatasan akses internet yang memadai pada tahun 2023. Selain itu, kurangnya integrasi sistem antarinstansi turut memperlambat proses digitalisasi layanan. Perbedaan platform, kebijakan, dan prosedur antar lembaga pemerintahan seringkali menghambat interoperabilitas sistem, sehingga layanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dalam ekosistem digital yang terintegrasi.

Tantangan lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan ini adalah tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat dan aparatur pemerintah. Digitalisasi layanan publik tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya. Survei World Bank (2022) menunjukkan bahwa 40% dari pegawai pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi sistem digital karena kurangnya pelatihan dan literasi teknologi. Hal ini semakin diperparah dengan terbatasnya sumber daya finansial dan teknis dalam mengembangkan layanan digital yang berkelanjutan, terutama di tingkat pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk investasi dalam penguatan sistem digital dan keamanan siber.

Meskipun demikian, kondisi ini harus menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi kembali strategi transformasi digital dalam pelayanan publik. Langkah strategis yang dapat ditempuh mencakup beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penguatan jaringan internet di wilayah terpencil serta penyediaan perangkat yang mendukung layanan digital yang lebih efisien. Kedua, penguatan regulasi dan kebijakan digitalisasi layanan publik, yang mencakup standarisasi sistem antarinstansi guna memastikan interoperabilitas yang lebih baik. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat, melalui pelatihan literasi digital serta penguatan budaya kerja berbasis teknologi.

Tanpa adanya langkah konkret dan kebijakan yang berorientasi pada solusi jangka panjang, capaian digitalisasi layanan publik di Sulawesi Selatan dapat terus mengalami stagnasi atau bahkan penurunan lebih lanjut. Oleh karena itu, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, sinergi antar pemangku kepentingan, serta investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, diharapkan layanan publik berbasis online dan terintegrasi dapat kembali meningkat. Hal ini tidak hanya akan mempercepat efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel di era digital saat ini.

Capaian **indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik serta mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan** menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir, menandakan semakin efektifnya upaya pemerintah dalam menyebarluaskan informasi strategis kepada masyarakat. Pada tahun 2020, indikator

ini tercatat sebesar **70,78%**, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi **79,97%** pada tahun 2021. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan capaian mencapai **90,94%**, yang mencerminkan efektivitas strategi komunikasi publik yang diterapkan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, perluasan kanal informasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam berbagai forum komunikasi kebijakan.

Namun, pada tahun 2023, angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 79%, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin beragam, di mana tantangan dalam memastikan konsistensi penyebaran informasi yang akurat dan mudah diakses menjadi lebih kompleks. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika sosial-politik, disinformation, serta keterbatasan akses ke kanal informasi di daerah tertentu juga dapat berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Kendati demikian, respon cepat pemerintah dalam menyesuaikan strategi komunikasi menghasilkan peningkatan signifikan pada tahun 2024, di mana persentase masyarakat yang mendapatkan dan memahami informasi kebijakan pemerintah melonjak tajam hingga 96,31%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pendekatan komunikasi berbasis inklusivitas dan teknologi.

Peningkatan drastis ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif strategis, seperti penguatan peran media digital, pemanfaatan platform media sosial, pengembangan layanan informasi berbasis teknologi, serta penyelenggaraan forum komunikasi publik secara rutin. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, media, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil turut berkontribusi dalam meningkatkan distribusi informasi yang kredibel dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan yang diimplementasikan.

**Tabel II. 116**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 97,83 | 97,44 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi | % | 55,56 | 35,48 | 24,11 | 27,93 | 21,62 |
| 3 | Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi | % | 70,78 | 79,97 | 90,94 | 100 | 96,31 |

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas koperasi serta mendorong usaha kecil untuk berkembang menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing. Dalam empat tahun terakhir, indikator kinerja menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut ini kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 117**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Koprasi yang berkualitas | % | 7,59 | 28,69 | 22,73 | 14,91 | 20,79 |
| 2 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | % | 20,43 | 7,62 | 45 | 74,19 | 74,85 |

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

Kinerja dalam meningkatkan koperasi berkualitas yang tercermin dari data pada tabel di atas diukur melalui formulasi perhitungan persentase jumlah koperasi sehat dan jumlah koperasi cukup sehat berbanding jumlah koperasi yang ada. Berdasarkan tabel di asta menunjukkan perubahan capaian yang naik turun yang tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Untuk itu kami mengelaborasi faktor-faktor tersebut menjadi; Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan,Dukungan Program dan Kebijakan: Peningkatan signifikan pada tahun 2021 (28,69%) didorong oleh berbagai program seperti reformasi regulasi koperasi, digitalisasi sistem koperasi, dan pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi, Pemulihan Pasca Pandemi: Setelah pandemi COVID-19, berbagai kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan modal usaha membantu koperasi bertahan dan meningkatkan kualitas layanan serta pengelolaan **keuangan, Pendampingan dan Akses Pembiayaan: Program pendampingan koperasi serta peningkatan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan** lainnya turut mendorong pertumbuhan koperasi yang berkualitas.

Faktor yang Mempengaruhi Penurunan; Dinamika Pasca Pertumbuhan Tinggi: Setelah lonjakan di tahun 2021, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 (22,73%) dan lebih signifikan pada tahun 2023 (14,91%). Hal ini bisa disebabkan oleh proses seleksi alami, di mana hanya koperasi yang benar-benar mampu bersaing yang dapat mempertahankan kualitasnya. Tantangan dalam Tata Kelola: Tidak semua koperasi yang mengalami pertumbuhan mampu mempertahankan standar akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah koperasi berkualitas. Adaptasi terhadap Digitalisasi: Koperasi yang tidak mampu mengadopsi teknologi dan sistem digital menghadapi kesulitan dalam mempertahankan efisiensi dan daya saingnya.

Usaha kecil memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Sulawesi Selatan. Transformasi usaha kecil menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing menjadi salah satu indikator keberhasilan

pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan tabel di atas, dalam beberapa tahun terakhir trend perkembangan usaha kecil yang berhasil bertransformasi menjadi wirausaha di Sulawesi Selatan menunjukkan dinamika yang menarik. Berikut ini penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan capaian kinerja meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha;

Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan. Dukungan Program Inkubasi dan Pelatihan:Lonjakan signifikan pada tahun 2022 (45%) dan 2023 (74,19%) terjadi akibat program inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha kecil yang lebih intensif. Akses Permodalan yang Lebih Mudah: Program bantuan permodalan dari pemerintah serta kemudahan akses ke kredit usaha turut berkontribusi terhadap percepatan transformasi usaha kecil menjadi wirausaha. Perkembangan Ekosistem Digital dan Pasar Online: Banyak pelaku usaha kecil mulai memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk mengembangkan bisnis mereka, sehingga mempercepat pertumbuhan wirausaha baru.

Faktor yang Mempengaruhi Penurunan; Dampak Pandemi COVID-19: Pada tahun 2021, penurunan drastis menjadi 7,62% disebabkan oleh dampak pandemi yang masih terasa, di mana banyak usaha kecil mengalami kendala operasional dan penurunan daya beli masyarakat. Keterbatasan Akses Pasar dan Sumber Daya:Tidak semua usaha kecil memiliki akses yang cukup terhadap jaringan pemasaran, bahan baku, serta tenaga kerja yang terampil, sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan wirausaha baru. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Manajemen Usaha: Masih ada pelaku usaha kecil yang belum memiliki kesiapan dalam aspek manajemen bisnis, keuangan, serta inovasi produk, yang menjadi kendala dalam transformasi mereka menjadi wirausaha yang berkelanjutan.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan koperasi berkualitas dan usaha kecil yang menjadi wirausaha menunjukkan hasil yang cukup positif meskipun masih mengalami fluktuasi. Peningkatan yang signifikan dalam wirausaha kecil pada tahun 2022 dan 2023 menjadi indikator bahwa berbagai program yang diterapkan mulai membuahkan hasil. Tahun 2024 mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya pelaku usaha kecil sebesar 59.018 unit usaha. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kualitas koperasi, meningkatkan akses pasar bagi wirausaha baru, serta memastikan keberlanjutan usaha kecil dalam jangka panjang. Dengan strategi yang lebih adaptif, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta optimalisasi teknologi, diharapkan pertumbuhan koperasi berkualitas dan wirausaha di Sulawesi Selatan dapat terus meningkat secara konsisten.

### 2.1.4.4.1.18. Urusan Penanaman Modal

**Tabel II. 118**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di provinsi | % | 22,81 | 32,37 | -14,11 | 15,38 | -14,68 |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa tren **Persentase Peningkatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan** mengalami fluktuasi selama 5 Tahun terakhir. Pada Tahun 2020 Persentase Peningkatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan 22,81% dan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 32,37%, kenaikan tersebut karena adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Makassar New Port (MNP) dan Proyek pembangunan jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3, pada Tahun 2022-2024 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh tidak adanya investasi baru yang masuk ke Sulawesi Selatan, dan hanya mengandalkan investor eksisting yang melakukan ekspansi perluasan tempat usaha dan pengadaan mesin dan peralatan tambahan, dan juga tidak adanya proyek strategis nasional yang seyogyanya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada realisasi investasi Sulawesi Selatan. Lebih jauh lagi, untuk tahun 2022, penurunan pertumbuhan investasi dipicu oleh berkurangnya realisasi investasi pada sektor tersier sebesar 45,52%, khususnya terkait dengan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran; sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi; sektor listrik, gas dan air; serta jasa lainnya. Sedangkan penurunan pertumbuhan investasi pada tahun 2024 didorong oleh berkurangnya realisasi investasi pada sektor primer terutama di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang turun sebesar 95,73% dan sektor perikanan sebesar 87,69%. Selanjutnya, pada sektor sekunder juga terjadi penurunan khususnya di sektor industri kimia dan farmasi sebesar 87,4% serta di sektor industri lainnya sebesar 74,54%. Selain sektor primer dan sekunder, juga terjadi penurunan realisasi investasi pada sektor tersier terutama di sektor hotel dan restoran sebesar 57,12% dan sektor konstruksi sebesar 48,12%.

#### 2.1.4.4.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena dapat membantu meningkatkan potensi pemuda, membangun karakter bangsa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan prestasi bangsa. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat ditentukan pada pembinaan pemuda saat ini. Pembinaan pemuda dilakukan dengan melibatkan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam pembangunan. **Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandir**i dan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan didukung melalui kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda. Tingkat partisipasi pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan terutama dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial serta dalam kegiatan ekonomi mandiri dari tahun 2020-2024 berfluktuasi. Untuk tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial meningkat di tahun 2020 sebesar 0,09 persen selanjutnya di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,21persen dan pada tahun 2022 meningfkat menjadi 0,24 persen, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,41 persen, dan tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan capaian 0,35. Pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah pemuda yang dibina/difasilitasi pada kegiatan kepemudaan Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dan akumulasi dari jumlah pemuda yang berorganisasi di 24 kabupaten/kota, Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Pembinaan organisasi pramuka di Sulawesi Selatan dilakukan melalui program pengembangan kapasitas

kepramukaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Organisasi gerakan Pramuka telah terbentuk dan aktif mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Capaian indikator organisasi pramuka yang aktif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

**Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam orgnisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan** mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. capaian pada tahun 2020 sebesar 2,34 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 4,07, selanjutnya pada tahun 2022 mengalaim penuruna sebesar 3,71 persen, begitupun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 2,35 persen, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 6,65 persen, peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. seperti jumlah anggota, kegiatan yang dilakukan, dan dampak yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran, minat, dan kemampuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat pemuda dalam berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata antara lain ketersediaan sumber daya, seperti dana, fasilitas, dan infrastruktur, untuk mendukung partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Peningkatan prestasi olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 tidak ada penyelenggaraan event olahraga di tingkat regional dan nasional karena adanya virus covid, tahun 2021 mengalami diperoleh 52 medali dan Pada tahun 2022 peningkatan prestasi olahraga kembali mengalami peningkatan dengan capaian sejumlah 108 medali diperoleh pada tahun 2022, tahun 2023 meraih prestasi sebanyak 105 medali dan pada tahun 2024 meraih prestasi sebanyak 154 medali. perolehan 154 medali pada tahun 2024 diraih dari event Pekan Olahraga Nasional (PON) sebanyak 61 medali, Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) sebanyak 17 medali, Kejuaraan Nasional Antar Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebanyak 8 medali dan Oven Turnamen antar yang diikuti atlet PPLP dan SKO sebanyak 68 medali. Sementara untuk jumlah atlet berprestasi juga mengalami fluktuasi, tahun 2020 karena tidak adanya event olahraga, tahun 2021 sebanyak 84 atlet yang berprestasi, tahun 2022 meningkat sebanyak 119 atlet, pada tahun 2023 menjadi 141 orang, dan pada tahun 2024 terdapat 165 atlet.

**Tabel II. 119**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,09 | 0,21 | 0,24 | 0,41 | 0,35 |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 2,34 | 4,07 | 3,71 | 2,35 | 6,65 |
| 3 | Peningkatan prestasi olahraga | Medali | - | 52 | 108 | 105 | 154 |

*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

### 2.1.4.4.1.20. Urusan Statistik

Penggunaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Terkait capaian indikator **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah** di Provinsi Sulawesi Selatan, Organisasi Perangkat Daerah secara konsisten memanfaatkan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan capaian sebesar 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh OPD di Sulawesi Selatan dalam mengintegrasikan data statistik sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan. Dengan penggunaan data yang optimal, proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Keberhasilan mempertahankan angka 100% selama lima tahun berturut-turut mencerminkan adanya sistem yang sudah mapan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat OPD. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa koordinasi antara instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS), telah berjalan dengan baik dalam menyediakan data yang relevan dan berkualitas bagi penyusunan kebijakan daerah. Konsistensi dalam penggunaan data statistik ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan memastikan ketersediaan data yang lebih luas, terkini, dan komprehensif. Langkah-langkah inovatif, seperti pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi yang lebih terintegrasi, juga perlu dikembangkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome mengenai **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah** di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang sangat baik selama lima tahun terakhir. Sejak tahun 2020 hingga 2024, seluruh OPD di Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten telah memanfaatkan data statistik dalam proses evaluasi pembangunan daerah dengan tingkat penggunaan yang mencapai 100% setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kesadaran OPD dalam menggunakan data statistik telah terbangun dengan baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang berbasis data memiliki potensi lebih besar dalam menghasilkan keputusan yang efektif serta mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan. Selain itu, penggunaan data statistik yang optimal juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tantangan pembangunan secara lebih akurat, mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat, serta melakukan intervensi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini turut mencerminkan meningkatnya akses dan kualitas data yang tersedia bagi OPD, baik melalui sumber resmi seperti BPS maupun sistem informasi internal pemerintah daerah.

**Tabel II. 120**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **STATISTIK PROVINSI** | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistika & Persandian*

### 2.1.4.4.1.21. Urusan Persandian

Sulselprov CSIRT merupakan Tim Tanggap Insiden Siber telah teregistrasi sejak 29 Juni 2021 oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan nomor registrasi 017/CSIRT.01.01/BSSN/06/2021. Sulselprov CSIRT dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2143/XII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan Province - Computer Security Incident Response Team). Saat ini sedang dilakukan verifikasi ulang terkait sertifikasi Tim Tanggap Insiden Siber oleh BSSN.

Kondisi saat ini, operasionalisasi Sulselprov CSIRT tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai yakni tidak adanya sistem monitoring jaringan dan aplikasi, SDM yang berkompetensi terkait Incident Handling, SOC Operator dan Analyst Siber Security pada tim tersebut sehingga penanganan insiden terkesan sangat lambat ataupun bisa dikatakan tidak ada penanganan dari internal karena mengandalkan pihak eksternal dalam melakukan investigasi forensik pada suatu insiden siber. Selain itu kurangnya sosialiasi Sulselprov CSIRT terkait layanan penanganan insiden siber sehingga jika terjadi insiden siber di perangkat daerah, mereka melakukan troubleshooting sendiri tanpa melakukan laporan insiden kepada Sulselprov CSIRT. Berdasarkan kondisi di atas maka diperlukan beberapa langkah untuk optimalisasi peran dan kinerja Sulselprov CSIRT antara lain : 1). Dukungan Infrastruktur Sistem Monitoring dan Deteksi Dini; 2). Pengadaan Tenaga Ahli yang berkompeten Incident Handling, SOC Operator dan Analyst Siber Security; 3). Pelatihan terkait Incident Handling, SOC Operator dan Analyst Siber Security bagi ASN (Operator Sistem Elektronik pada OPD Lingkup Kantor Gubernur; 4). Literasi Keamanan Siber dan Sosialisasi Layanan Keamanan Informasi.

Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan peningkatan dalam capaian indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan data yang dihimpun, tingkat keamanan informasi mengalami tren pertumbuhan yang konsisten, dimulai dari 19,07% pada tahun 2020 hingga mencapai 50,07% pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan dalam memperkuat sistem keamanan siber, tetapi juga menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks. Pada tahun 2021, tingkat keamanan informasi meningkat menjadi 24,65%, menandakan adanya langkah awal yang lebih serius dalam membangun infrastruktur keamanan informasi yang kokoh. Upaya ini diperkuat pada tahun 2022 dengan capaian 32,71%, yang sejalan dengan meningkatnya investasi pemerintah dalam sistem pengamanan data serta penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan informasi sensitif. Tren positif ini terus berlanjut dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebesar 46,66%, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang telah diterapkan mulai memberikan hasil yang nyata. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 50,07%, yang berarti bahwa setengah dari target keamanan informasi telah terpenuhi, sebuah pencapaian yang mencerminkan efektivitas strategi yang telah diterapkan.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu langkah utama adalah implementasi kebijakan keamanan informasi yang lebih ketat, termasuk penerapan standar keamanan siber berbasis regulasi nasional serta pedoman dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber melalui pelatihan, sertifikasi, serta kerja sama dengan lembaga akademik dan sektor swasta turut berperan dalam mendorong penguatan sistem keamanan informasi. Lebih lanjut, sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, akademisi, serta industri teknologi, telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Kolaborasi dengan lembaga riset dan sektor swasta memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan adopsi teknologi mutakhir untuk meningkatkan ketahanan siber di tingkat daerah. Menurut laporan BSSN (2023), serangan siber terhadap sektor pemerintahan di Indonesia meningkat lebih dari 40% dalam tiga tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa penguatan keamanan informasi bukan sekadar kebutuhan, tetapi sebuah urgensi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan digital.

Meskipun telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna mencapai standar keamanan informasi yang lebih optimal. Tantangan utama yang perlu dihadapi meliputi peningkatan jumlah serangan siber yang semakin canggih, kurangnya kesadaran sebagian aparatur negara terhadap pentingnya keamanan informasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap ancaman digital, meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan siber, serta membangun ekosistem digital yang lebih tangguh dan responsif terhadap risiko siber.

**Tabel II. 121**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERSANDIAN PROVINSI** | | | | | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 19,07 | 24,65 | 32,71 | 46,66 | 50,07 |

*Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistika & Persandian*

### 2.1.4.4.1.22. Urusan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan urusan kebudayaan, capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome yang terkait dengan **Terlestarikannya Cagar Budaya** menunjukkan tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, capaian pelestarian cagar budaya mencapai 33,36% dan angka ini bertahan pada tahun 2021 dengan capaian yang hampir sama sebesar 33,33%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 16,67%, yang menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya pelestarian cagar budaya di Sulawesi selatan.

Meskipun pada tahun 2023 terdapat sedikit peningkatan dengan capaian 20%, angka ini masih belum kembali ke level capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, capaian kembali mengalami penurunan menjadi 14,29% yang menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program pelestarian cagar budaya. Fluktuasi capaian pelestarian cagar budaya di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa alasan utama yang umum terjadi: a) Kurangnya Anggaran dan Prioritas Pemerintah, Pelestarian cagar budaya sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam anggaran daerah, sehingga dana yang dialokasikan untuk perawatan, konservasi, atau pemugaran sangat terbatas. b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya cagar budaya sebagai warisan sejarah. Akibatnya, ada yang tidak peduli, atau bahkan ikut merusak, seperti dengan vandalisme atau alih fungsi lahan. c) Alih Fungsi Lahan dan Pembangunan Modern, Proyek pembangunan, seperti jalan, pusat perbelanjaan, atau pemukiman, kerap mengorbankan situs bersejarah, karena dianggap menghambat kemajuan atau dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. d) Minimnya Tenaga Ahli dan Sumber Daya Manusia, Kekurangan arkeolog, sejarawan, atau ahli konservasi di tingkat daerah membuat proses pelestarian tidak maksimal. e) Kurangnya Penegakan Hukum, Peraturan mengenai pelestarian cagar budaya mungkin sudah ada, tetapi penegakan hukumnya lemah, sehingga pelanggaran terhadap situs budaya jarang ditindak tegas. f) Bencana Alam dan Cuaca Ekstrem, Faktor alam seperti banjir, gempa bumi, atau erosi juga dapat merusak cagar budaya jika tidak ada upaya mitigasi yang serius.

Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan tahun 2020-2024 cukup baik jika dilihat dari teknis pengelolaan pelestarian cagar budaya yang terus dilaksanakan setiap tahun. Hanya saja jika melihat data tersebut di atas akan mengalami distorsi pengambilan kesimpulan yang kecenderungannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran pengambilan data perhitungan yang berpedoman pada permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 s/d 2021 penafsiran terhadap penyebut Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan adalah cagar budaya yang ditetapkan pada tahun berjalan (N), sedangkan untuk tahun 2022 s/d 2023 penafsiran akan penyebut diubah menjadi cagar budaya yang ditetapkan secara akumulatif (s/d tahun N), dan untuk tahun 2024 diubah lagi penafsirannya menjadi cagar budaya yang telah memiliki nomor registrasi secara nasional pada DAPOBUD (data pokok kebudayaan).

Perbedaan penafsiran tersebut menyebabkan persentase capaian indikator terlestarikannya cagar budaya terlihat fluktuatif. Sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaian kinerjanya dari tahun ke tahun. Secara umum, pencapaian kinerja indicator terlestarikannya cagar budaya tersebut cukup baik, hanya saja belum

terlaksana secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menjadi permasalahan dalam proses pencapaian indikator kinerja tersebut.

Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan terkait dengan indicator terlestarikannya cagar budaya yaitu Proses penetapan cagar budaya yang membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Penetapan cagar budaya membutuhkan beberapa tahapan yang panjang yang dimulai dari proses identifikasi pengumpulan data awal objek diduga cagar budaya, registrasi objek, kajian Tim Ahli Cagar Budaya yang dilakukan secara mendalam dari segi Sejarah, arkeologi, arsitektur dan nilai penting lainnya. Perlu juga adanya survey dan analisis yang seksama hingga tahap sidang penetapan cagar budaya. Masih kurangnya tenaga ahli cagar budaya yang tersertifikasi, khususnya di kab./kota. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya cagar budaya sebagai warisan sejarah, dimana sebagian besar masyarakat yang dimaksud adalah generasi muda. Generasi muda saat ini cenderung lebih tertarik pada budaya populer global dibandingkan dengan budaya lokal. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk menggiatkan kembali literasi budaya di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan strategi dalam rangka pencapaian kinerja, serta akan dilakukan identifikasi objek diduga cagar budaya (ODCB) yang lebih akurat khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang tekait dengan objek cagar budaya.

**Tabel II. 122**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KEBUDAYAAN** | | | | | | |
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | % | 33,36 | 33,33 | 16,67 | 20 | 14,29 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan & Kepariwisataan*

### 2.1.4.4.1.23. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. urusan Perpustakaan terdapat dua Indikator Kinerja kunci yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) merupakan pengukuran terhadap dampak perpustakaan maupun penyedia bahan bacaan lainnya dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, selain itu dapat membantu dalam penyusunan kebijakan, rencana aksi dan strategi serta pencapaian target dan sasaran dari suatu program/kegiatan. Tingkat Kegemaran membaca ini fokus pada pengembangn Budaya baca, kegemaran membaca dan literasi masyarakat. dalam mendapatkan hasil capaian Tingkat Kegemaran membaca (TGM) melalui dengan cara mengukur perorangan dengan menggunakan data primer, data sampling dengan mengisi Kuesioner yang mencakup lima dimensi yakni, Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Buku dibaca, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, IPLM ini terfokus pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan Infrastruktur perpustakaan. dalam mendapatkan hasil capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan cara mengukur Kelembagaan Perpustakaan dengan menggunakan data sekunder yang valid, data seluruh jenis perpustakaan dengan 7 indikator antara lain, Pemerataan Layanan perpustakaan, Ketercukupan Koleksi perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan masyarakat per hari di perpustakaan, perpustakaan dibina sesuai standar Perpustakaan, Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi/kegiatan di perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan.

**Tabel II. 123**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERPUSTAKAAN PROVINSI** | | | | | | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 58,90 | 63,10 | 67,21 | 68,20 | 74,46 |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 11,93 | 13,28 | 78,49 | 86,74 | 88,24 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan & Kepariwisataan*

Analisis Capaian Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat Sulawesi selatan dari tahun 2020 dengan capaian 58,90 dan mengalami peningkatan di Tahun 2021 sebanyak 4,20 dengan capaian 63,10, tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebanyak 4,52 dengan capaian 67,62, tahun 2023 juga sedikit mengalami peningkatan sebanyak 0,50 dengan capaian 68,20 serta ditahun 2024 meningkat sebanyak 6,26 dengan nilai capaian sebanyak 74,46 dengan kategori tinggi,

Sedangkan hasil capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari Tahun 2020 dengan nilai 58,64, selanjutnya di tahun 2021 mengalami penurunan diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga turun sebanyak 1,95 dengan capaian 56,69, tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebanyak 21,8 dengan capaian 78,49, tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebanyak 8,25 dengan capaian 86,74 hasil ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai Provinsi peringkat pertama se Indonesia pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebanyak 1,5 dengan capaian 88,24 dari hasil ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai Provinsi peringkat pertama se Indonesia pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) selama dari Tahun 2023 dan Tahun 2024.

### 2.1.4.4.1.24. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan Identitas dan Jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dikelola dan diselamatkan melalui penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan baku sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip merupakan referensi utama bagi masyarakat ilmiah, sebagai sumber sejarah, sebagai bukti autentik dan sebagai sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen. adapun Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan yakni Tingkat Ketersediaan arsip, dan tingkat Keberadaan dan Keutuhan

Arsip. Indikator ini mengukur sejauh mana arsip tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdokumentasi dan tersedia sesuai dengan standar kearsipan.

Indeks ketersediaan arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip baik kelengkapan, ketepatan, kecepatan penyediaan arsip yang autentik dan terpercaya dan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi, Akuisisi arsip, Penataan dan pengelolaan arsip dan Preservasi arsip.

Sedangkan tingkat keberadaan arsip adalah ukuran jumlah arsip yang ada dan keutuhannya, tingkat keberadaan arsip dapat diukur dalam persentase. manfaat tingkat keberadaan arsip untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat.

**Tabel II. 124**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KEARSIPAN PROVINSI** | | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | % | - | 73.995 | 46,05 | 45,10 | 54.82 |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaba n setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | - | 100 | 100 | 66,66 | 66.66 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan*

Analisis Capaian Ketersediaan Arsip pada Tahun 2021 mencatat capaian yang cukup tinggi, yaitu 73,99%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar arsip yang tercipta telah didokumentasikan dan dibuatkan daftar secara sistematis. Namun, capaian ini mengalami penurunan tajam pada 2022, sebesar 27,94 poin, menjadi 46,05%. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya volume arsip aktif dan arsip statis menjelang akhir tahun, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan daftar arsip. Ini merupakan konsekuensi langsung dari beban kerja yang meningkat secara drastis tanpa diimbangi dengan sumber daya atau waktu yang cukup untuk pengelolaan arsip yang optimal. Pada tahun 2023, capaian kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 0,95 poin, menjadi 45,10%. Penurunan ini relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan adanya stagnasi dalam upaya perbaikan tata kelola ketersediaan arsip. Hal ini kemungkinan menandakan

bahwa tantangan struktural, seperti kurangnya tenaga arsiparis, keterbatasan waktu, atau belum optimalnya sistem digitalisasi arsip, masih belum sepenuhnya teratasi.

Analisis capaian keberadaan dan keutuhan arsip berada pada tingkat maksimal (100%) selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2021 dan 2022. Ini menunjukkan bahwa arsip yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tersebut telah memenuhi unsur keaslian, integritas, dan kelengkapan secara menyeluruh. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa upaya pelestarian arsip telah berjalan efektif dan sesuai standar kearsipan nasional. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan sebesar 33,34 poin, menurunkan capaian menjadi 66,66%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terjadinya kerusakan fisik atau hilangnya sebagian arsip, baik karena keterbatasan tempat penyimpanan, bencana, atau faktor teknis lainnya, belum terverifikasinya sejumlah arsip sebagai arsip autentik akibat keterlambatan dalam klasifikasi dan penataan, kelemahan dalam sistem pelestarian digital atau fisik, termasuk keamanan arsip dan pengawasan berkala yang belum optimal.

Tren capaian menunjukkan peningkatan konsisten dalam tiga tahun terakhir. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan arsip secara menyeluruh, terutama dalam memastikan keaslian dan keabsahan arsip sebagai bukti kegiatan pemerintahan. Peningkatan ini juga merupakan hasil dari sinergi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, OPD teknis, serta dukungan regulasi dan pembinaan dari ANRI.

### 2.1.4.4.1.25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Kunci (*IKK*) *Urusan Kelautan dan Perikanan* Provinsi terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu a) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi, b) Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian indikator sebagai berikut ;

**Tabel II. 125**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Ton | 4.051.291,9 | 4.817.918,6 | 4.532.552,5 | 4.620.291.8 | 4.869.692.2 |
| 2 | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan | % | 63,07 | 63,87 | 94,01 | 56,35 | 48,97 |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | perundangan yang berlaku | | | | | | |

*Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan*

Untuk mengukur keberhasilan produksi perikanan tahun 2020- 2024 terdiri atas produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, maka berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target produksi perikanan adalah 4,092,881.40 ton telah dicapai 100,23%, tahun 2021 dengan target **Produksi Perikanan** sebesar 4,342,259.80 ton telah dicapai 103,60%, tahun 2022 dengan target produksi perikanan sebesar 4.546.138 ton telah dicapai 99,70%, tahun 2023 dengan target produksi perikanan sebesar 4,759,871.9 ton telah dicapai 97,06%, tahun 2024 dengan target produksi perikanan sebesar 4.779.259,3 ton telah dicapai 101,89%. Dalam melaksanakan penyelenggaraan indikator produksi perikanan melalui; 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi peningkatan produksi, nilai produksi, jumlah pembudidaya yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah dan peningkatan produksi benih berkualitas. 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi peningkatan produksi, nilai produksi, pengembangan pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional, cakupan bina kelompok nelayan.

Produksi perikanan yang tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi sumber daya, teknologi, regulasi, maupun aspek sosial-ekonomi. Adapun penyebab utama sehingga tidak tercapainya peningkatan produksi yaitu; Perubahan Iklim dan cuaca ekstrim, penggunaan sarana alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tradisional, kurangnya teknologi perikanan modern, terbatasnya infrastruktur perikanan, masalah pakan dan hama penyakit pada perikanan budidaya dan rendahnya modal usaha.

Adapun solusi untuk meningkatkan Produksi Perikanan yaitu; a) Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan (melarang alat tangkap merusak, memperketat pengawasan illegal fishing, serta rehabilitasi ekosistem perairan). b) Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur (modernisasi alat tangkap, budidaya dengan teknologi terbaru, serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan). c) Dukungan Kebijakan dan Insentif (kemudahan akses permodalan, penyederhanaan izin usaha, dan subsidi pakan bagi pembudidaya). d) Peningkatan Keterampilan SDM Perikanan (pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha). e) Penguatan Rantai Pasok dan Akses Pasar (pengembangan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas jaringan pemasaran).

Dengan strategi yang tepat, diharapkan produksi perikanan dapat meningkat secara berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kemudian Untuk mengukur keberhasilan persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, berikut beberapa indikator yang digunakan adalah 1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, 2) Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, 3)Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil, 4) Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi sesuai kewenangannya, 5) Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan

lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai kewenangannya, 6) Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan indikator persentase 1) Pelaku Usaha yang Memiliki Izin: Jumlah pelaku usaha perikanan yang memiliki izin dibandingkan dengan total jumlah pelaku usaha perikanan, 2. Persentase Pelaku Usaha yang Mematuhi Standar: Jumlah pelaku usaha perikanan yang mematuhi standar kualitas, keselamatan, dan lingkungan dibandingkan dengan total jumlah pelaku usaha perikanan. 3. Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Aktivitas: Jumlah pelaku usaha perikanan yang melaporkan aktivitasnya secara teratur dibandingkan dengan total jumlah pelaku usaha perikanan.

Untuk indikator **Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku** pada tabel menunjukkan capaian kinerja yang fluktuatif, pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan pengawasan untuk memeriksa dokumen perijinan pelaku usaha perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 sebelum perubahan. pada tahun 2020 kegiatan pengawasan untuk memeriksa dokumen perijinan pelaku usaha perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 sebelum perubahan. Pada tahun 2021 dengan adanya perubahan RPJMD 2018-2023 maka kegiatan pengawasan dokumen perijinan pelaku usaha perikanan mulai dilaksanakan secara intensif untuk mendukung indikator persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2022 rata-rata persentase kepatuhan pelaku dari 5 komponen pelaku usaha yang diawasi tinggi karena didukung kepatuhan dari 3 pelaku usaha yaitu pelaku pembudidaya laut, perikanan tangkap di PUD lintas kab/kota, perikanan budidaya PUD lintas kab/kota yang mencapai 100 % sementra 2 komponen pelaku usaha yaitu pelaku usaha perikanan tangkap 12 mil dan pelaku usaha masih di rata-rata 80 an persen. Tahun 2023 – 2024 rata-rata persentase kepatuhan pelaku usaha KP dari 6 komponen pelaku usaha kategori rendah karena dominasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses dokumen perizinan online khsususnya Nomor Induk Berusaha (NIB)

Berdasarkan data tabel capaian kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha KP berfluktuasi hingga tahun 2024 hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi pelaku usaha, regulasi, maupun sistem pengawasan. Berikut beberapa penyebab utamanya; a) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Regulasi, Banyak pelaku usaha belum memahami peraturan terkait izin usaha, alat tangkap ramah lingkungan, dan sertifikasi produk. Minimnya sosialisasi regulasi menyebabkan kurangnya kepatuhan. b) Biaya Pengurusan Perizinan, Pengurusan izin, sertifikasi, dan penerapan standar operasional yang sesuai regulasi memerlukan biaya tinggi. Pelaku usaha skala kecil cenderung menghindari biaya tambahan yang dianggap membebani usaha mereka;. c) Adanya Praktik Illegal Fishing dan IUU Fishing, Sebagian pelaku usaha lebih memilih cara instan seperti penggunaan alat tangkap ilegal (pukat harimau, bom ikan, dll.) untuk meningkatkan hasil tangkapan. Keinginan mendapatkan keuntungan cepat membuat sebagian usaha perikanan tidak mematuhi ketentuan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. d) Rantai Pasok yang Tidak Transparan, Beberapa pelaku usaha lebih memilih menjual hasil tangkapan atau produk mereka ke pasar gelap atau tanpa mengikuti standar yang ditetapkan, Ketidakterbukaan dalam rantai pasok membuat sulitnya pengawasan terhadap kepatuhan usaha perikanan. e) Keterbatasan

kapasitas pemerintah (SDM, anggaran) untuk melakukan pendampingan atau monitoring serta Regulasi yang kompleks atau sulit diakses oleh usaha kecil.

Solusi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan, Sosialisasi dan Edukasi Regulasi secara Berkelanjutan, Penyederhanaan Proses Perizinan dan Standarisasi, Pemberian Insentif bagi Pelaku Usaha yang Patuh, Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tegas, Pengembangan Program Kemitraan dengan Pelaku Usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat meningkat, sehingga sektor perikanan menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian.

#### 2.1.4.4.1.26. Urusan Pariwisata

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome dalam sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dalam periode 2020-2024. Hal ini mencerminkan dampak dari berbagai faktor, termasuk pandemi Covid-19 dan pemulihan sektor pariwisata.

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dengan angka -96,23%, yang menunjukkan dampak pandemi terhadap sektor pariwisata. Tahun 2021, masih mengalami penurunan sebesar -44,76%, meskipun lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan signifikan dengan capaian 176,41%, yang merupakan lonjakan besar akibat dibukanya kembali akses perjalanan setelah pembatasan pandemi. Pada tahun 2023, angka pertumbuhan tercatat 37,68% dan 21,10% di tahun 2024. Penurunan angka persentase ini bukan berarti terjadi penurunan jumlah wisatawan, melainkan karena perbandinganya dengan tahun 2022 yang mengalami lonjakan ekstrim akibat efek pemulihan Covid-19. Setelah lonjakan besar pada 2022, tren pertumbuhan kembali ke pola yang lebih normal pada tahun 2023 dan 2024.

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara/domestik juga berdampak cukup signifikan pada tahun 2020 dengan penurunan -96,00%. Namun, pada tahun 2021, sektor ini mengalami lonjakan drastis dengan peningkatan 338,33%, yang kemudian melambat di tahun 2022 dengan capaian 60,44%. Pada tahun 2023, angka ini turun cukup tajam menjadi 6,95%, sebelum kembali meningkat pesat pada tahun 2024 dengan capaian 256%. Sama halnya dengan wisatawan mancanegara, persentase pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengikuti pola yang lebih stabil sesuai dengan tren pariwisata yang mulai normal.

Tingkat hunian akomodasi pada tahun 2020 hanya sebesar 16,00% mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 27,94% kemudian sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 26,62%. Pada tahun 2023, angka ini kembali turun ke 18,00% sebelum melonjak signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 49,64%. Hal ini menunjukkan pemulihan sektor perhotelan dan penginapan yang semakin membaik pada tahun 2024.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun dalam skala yang kecil. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 1,22%, mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 1,18%, lalu meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 1,38%. Tahun 2023 sedikit turun ke 1,33% dan pada tahun 2024 kembali naik ke 1,36%.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mengalami pukulan berat akibat pandemi, tetapi secara bertahap mulai pulih dalam beberapa tahun terakhir. Tren positif yang terlihat pada tahun 2024 menunjukkan adanya potensi pemulihan yang lebih kuat jika didukung oleh kebijakan yang tepat, seperti

peningkatan promosi pariwisata, pengembangan destinasi unggulan serta perbaikan infrstruktur dan layanan wisata.

**Tabel II. 126**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PARIWISATA** | | | | | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | -96,23 | -44,76 | 176,41 | 37,68 | 21,10 |
| 2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | % | -96,00 | 338,33 | 60,44 | 6,95 | 256,00 |
| 3 | Tingkat hunian akomodasi | % | 16,00 | 27,94 | 26,62 | 18,00 | 49,64 |
| 4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 1,22 | 1,18 | 1,38 | 1,33 | 1,36 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata*

### 2.1.4.4.1.27. Urusan Pertanian

Produktivitas pertanian adalah kemampuan tanaman untuk menghasilkan hasil yang optmal dalam kondisi yang diberikan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti genetika tanaman, faktor lingkungan dan manajemen pertanian. **Produktivitas Pertanian** Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari 529,57% ke angka 523,97% dengan penurunan sebesar 5,6%, kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 12,27% yaitu 536,24%, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,84% yaitu 528,40%. Peningkatan produktivitas tanaman adalah tujuan penting dalam pertanian, akan tetapi ada banyak tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, hal tersebut yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi peningkatan produksi pertanian dan salah satunya adalah adanya perubahan iklim seperti suhu yang lebih tinggi, curah hujan yang tidak teratur dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman, penurunan kualitas lahan pertanian, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sehingga produktivitas mengalami penurunan.

**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular.** Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, jumlah kasus penyakit hewan menular di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020, jumlah kasus penyakit hewan menular mengalami lonjakan sebesar 231,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2020 sebanyak 36.689 kasus lebih besar dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2019 sebanyak 11.071 kasus. peningkatan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2020 disebabkan adanya kontribusi peningkatan

jumlah kasus penyakit avian influenza (AI) sebanyak 31.368 kasus. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang tajam sebesar 66,36%, dengan jumlah kasus penyakit hewan menjadi 12.341 kasus. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 89,21% atau jumlah kasus penyakit hewan menular hanya 1.331 kasus. Pada tahun 2023, jumlah kasus semakin menurun hingga 570 kasus atau mengalami penurunan sebesar 57,18% dibandingkan dengan tahun 2022.

Tahun 2024, jumlah jenis kasus penyakit hewan yang dimonitoring dalam pengukuran kinerja persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular bertambah dari 9 (sembilan) jenis kasus penyakit hewan menjadi 16 (enam belas) jenis kasus penyakit. Tahun 2024, jumlah kasus penyakit hewan menular mengalami penurunan sebesar 70,13% atau jumlah kasus penyakit hewan menular hanya 236 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 790 kasus, sebagaimana pada tabel berikut;

**Tabel II. 127**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERTANIAN** | | | | | | |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 3,42 | 529,57 | 523,97 | 536,24 | 528,40 |
| 2 | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | % | 231,40 | -66,36 | -89,21 | -57,18 | -70,13 |

*Sumber : Dinas TPHBun & Dinas Peternakan dan Keswan*

### 2.1.4.4.1.28. Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemda tersebut, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi sedangkan Kabupaten/Kota hanya berwenang dalam pengelolaan taman hutan raya. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi sedangkan Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung antara lain berupa Perhutanan Sosial dimana Perhutanan Sosial ini adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejateraannya, keseimbangan lingkungan

dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Realisasi Penyelenggaraan urusan Kehutanan pada tahun 2020 - 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian indikator sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel II. 128**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KEHUTANAN** | | | | | | |
| 1 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | % | 15,80 | 24,04 | 26,8 | 3,87 | 28,76 |
| 2 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) | % | 0,70 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi | % | 29,43 | 65,61 | 71,14 | 73,25 | 0,05 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan*

**Akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial,** Pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial merupakan kebijakan yang memberikan akses legal kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan, untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Melalui perhutanan sosial, masyarakat diberikan hak kelola atas kawasan hutan, usaha hutan, dan kelembagaan dalam berbagai skema, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Skema ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan, baik dalam bentuk budidaya hasil hutan non-kayu, ekowisata, maupun pengolahan produk berbasis hutan secara berkelanjutan.

Dalam periode 2020 hingga 2024, akses legal pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial menunjukkan tren yang terus meningkat utamanya pada tahun 2023 dengan persentase hingga mencapai 30,67% yang mana capaian di tahun 2020 hanya sebesar 15,80%. Pada tahun 2020, terdapat 400 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang memperoleh akses legal untuk mengelola hutan, dengan luas pengelolaan perhutanan sosial mencapai 161.133,22 hektare. Angka ini meningkat pada tahun 2021, dengan 428 KPS dan luas pengelolaan mencapai 175.802,42 hectare. Pada tahun 2022, jumlah KPS meningkat menjadi 505 dengan luas pengelolaan mencapai 196.745,33 hektare. Pada tahun 2023, jumlah KPS semakin bertambah menjadi 553 dengan luas pengelolaan mencapai 206.793 hektar. Pada tahun 2024, jumlah KPS kembali meningkat menjadi 597, yang terdiri dari 509 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan 88 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dengan luas pengelolaan mencapai 221.535,43 hectare.

Persentase capaian indikator pada tahun 2024 mengalami penurunan walaupun jumlah KPS dan pemberian akses legal pengelolaan hutan melalui Perhutanan sosial meningkat hal ini disebabkan adanya perubahan dalam penghitungan indikator capaian

yang hanya membatasi pada Kelompok Tani Hutan sebagai pembilang tidak termasuk LPHD (Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Skema terbesar dalam pengelolaan perhutanan sosial pada tahun 2024 adalah Hutan Kemasyarakatan, yang mencakup 23 kabupaten dengan luas mencapai 99.416,76 hektare atau 44,87% dari total luas pengelolaan. Sementara itu, skema terkecil adalah Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Bulukumba dan Enrekang, dengan luas mencapai 4.636,99 hektare atau 2,09%.

Capaian akses perhutanan sosial di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 terhadap alokasi PIAPS Revisi IX menunjukkan angka yang signifikan, yakni telah mencapai 42,70%. Hal ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.

**Kerusakan hutan per tahun (deforestasi),** Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, dan Kawasan Konservasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan, luas total kawasan hutan di Sulawesi Selatan mencapai 2.610.060 hektare. Kawasan tersebut terdiri atas Hutan Lindung seluas 1.144.899 hektare, Hutan Produksi (HP) seluas 144.267 hektare, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 14.844 hektare, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 476.019 hektare, Kawasan Konservasi (KK) seluas 298.456 hektare, dan Taman Nasional Laut (TNL) seluas 531.574 hektare.

Tanggung jawab terkait perlindungan dan pengendalian kawasan hutan terbagi antara pemerintah provinsi dan Kementerian Kehutanan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sementara kawasan konservasi berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Secara keseluruhan, kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Sulawesi Selatan mencakup 68,20% atau sekitar 1.780.029 hektare dari total luas kawasan hutan.

Namun, kawasan hutan di Sulawesi Selatan menghadapi sejumlah ancaman serius, seperti kebakaran hutan, perambahan hutan, dan illegal logging, yang secara signifikan merusak potensi sumber daya hutan. Kejadian-kejadian ini sering kali terulang setiap tahun, dengan kebakaran hutan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Kebakaran hutan biasanya disebabkan oleh adanya tiga unsur penting: sumber panas (api), bahan bakar (serasah, ranting, dan rumput), serta oksigen. Keberadaan titik api (hotspot) yang terbanyak biasanya terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober, saat suhu permukaan bumi meningkat. Kebakaran sering kali disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian dengan cara membakar serasah, yang terkait langsung dengan perambahan hutan. Perambahan hutan sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan pendudukan atau penguasaan kawasan hutan secara ilegal untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan.

Kerusakan hutan di Sulawesi Selatan antara tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, kerusakan hutan tercatat mencapai 12.440 hektar, namun jumlah tersebut menurun drastis pada tahun 2021 hingga 88,49%, menjadi hanya 1.431,99 hektare. Tahun 2022 juga menunjukkan penurunan sebesar 59,44%, dengan kerusakan hutan yang tercatat hanya 580,79 hektare. Dalam kurun waktu 2020 hingga

2022, penyebab kerusakan terbesar adalah perambahan hutan, dengan luas mencapai 14.331,43 hectare.

Namun, kondisi ini berubah pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, tingkat kerusakan hutan meningkat sebesar 58,24% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 919,10 hektar. Kerusakan terbesar pada tahun tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, yang mencapai 910,70 hektare. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan suhu bumi naik dan memicu kemarau panjang serta berkurangnya curah hujan, yang pada gilirannya memperburuk jumlah hotspot dan meningkatkan kebakaran hutan. Pada tahun 2024, kerusakan hutan kembali meningkat sebesar 11,14% dari tahun 2023, dengan perambahan hutan tercatat sebagai penyebab utama kerusakan, seluas 931,93 hektare. Perambahan hutan terbesar terjadi di daerah Luwu Utara, di mana pembukaan lahan untuk perkebunan sawit menjadi faktor utama.

Dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah jumlah personel pengamanan hutan, sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta kesadaran masyarakat sekitar hutan. Pada tahun 2024, jumlah polisi kehutanan di Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 207 orang yang memiliki tugas untuk melakukan tindakan pre-emtif, preventif, dan represif, termasuk patroli daratan dan perairan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Namun, jumlah ini sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi. Dengan luas kawasan hutan provinsi yang mencapai 1.780.029 hektare, rasio polisi kehutanan terhadap luas hutan adalah 1: 8.599 hektare, jauh di atas standar ideal yang seharusnya 1:3.000 hektare. Kekurangan jumlah personel ini membuat pengawasan menjadi sangat sulit, yang pada gilirannya memungkinkan praktik illegal logging, kebakaran hutan, dan perusakan hutan lainnya semakin marak.

Selain itu, kekurangan sarana dan prasarana patroli yang memadai, seperti kendaraan roda empat atau roda dua, juga menghambat kemampuan polisi kehutanan untuk menjangkau wilayah hutan yang luas dan sulit diakses. Kondisi ini tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga berdampak buruk pada hilangnya keanekaragaman hayati dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, peningkatan jumlah personel, sarana prasarana, serta kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan di Sulawesi Selatan.

**Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi,** Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan melibatkan masyarakat, pemerintah pusat (KLHK), pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi dan pihak lainnya. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020 hingga 2023 merupakan rehabilitasi yang dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan luas penanaman 51.290,20 ha. Tahun 2020 rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 20.508 ha, tahun 2021 rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 13.023 ha, tahun 2022 rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 13.003,20 ha dan tahun 2023 rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 4.756 ha. Capaian rata-rata rehabilitasi hutan dan lahan kurun waktu 2020 hingga 2023 mencapai 12.822,55 hektar/tahun.

Terkait pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan kewenangan konkuren sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara, merupakan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah pusat. Upaya rehabilitasi di luar kawasan hutan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024 dilakukan dalam bentuk pembangunan hutan rakyat,

penghijauan dan pembuatan hutan mangrove. Capaian rehabilitasi lahan tahun 2021 seluas 233 hektar (hutan rakyat dan mangrove), tahun 2022 seluas 470 hektar (hutan rakyat dan mangrove), tahun 2023 seluas 20 hektar (penghijauan), tahun 2024 seluas 81,36 ha (hutan rakyat, mangrove, penghijauan). Rehabilitasi lahan tahun 2021 hingga 2024 melalui APBD dan DAK masih sangat rendah dengan rata-rata pinjaman per tahun berkisar 200 hektar.

Sejak tahun 2020 hingga 2023, terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam capaian persentase luas lahan kritis yang telah direhabilitasi di Sulawesi Selatan. Namun, pada tahun 2024, capaian tersebut menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam metode penghitungan capaian indikator, di mana sebelumnya mencakup realisasi rehabilitasi baik di dalam maupun luar kawasan hutan, namun kini hanya mencakup realisasi rehabilitasi di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data capaian rehabilitasi lahan dari tahun 2020 hingga 2024, upaya rehabilitasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan turut mendukung penurunan luas lahan kritis. Hingga tahun 2024, luas lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 172.511,16 hektar, sementara di dalam kawasan hutan mencapai 193.043,08 hektar. Meski berbagai upaya rehabilitasi telah dilakukan, potensi degradasi lahan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lahan masih rentan terhadap kerusakan, sehingga penanganan terhadap lahan kritis perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak agar mempercepat perbaikan kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di Sulawesi Selatan.

### 2.1.4.4.1.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan. 5 sub urusan pemerintahan yang berada dalam lingkup bidang energi dan sumber daya mineral sebagian besar dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun Pemerintah Kab/ Kota hanya melaksanakan sub urusan energi baru terbarukan terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/ Kota. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka terdapat 2 IKK Outcome yang capaiannya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

**Tabel II. 129**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | |
| 1 | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | % | 100 | 100 | 1,05 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase perusahaan | % | 98,18 | 98,49 | 98,8 | 100 | 100 |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota | | | | | | |
| 3 | Persentase desa yang teraliri listrik | % | 98,18 | 98,49 | 98,8 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Energi & Sumber Daya Mineral*

Selanjutnya dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian kinerja indikator 1 berupa **"Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda"** pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 secara konsisten tercapai sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang maksimal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan bersama instansi terkait lainnya baik Pusat maupun Kab/ Kota untuk terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar tetap melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai kaidah yang baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun pada tahun 2021, realisasinya 0% dikarenakan pada tahun ini kewenangan pengelolaan pertambangan pada tingkat daerah Provinsi seluruhnya ditarik ke Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun capaian kinerja indikator ke-2 yaitu **"Persentase daerah yang Teraliri Listrik"** pada 3 tahun pertama yaitu tahun 2020, 2021, 2022 belum mencapai 100% dikarenakan masih terdapat beberapa desa yang belum terjangkau jaringan listrik baik PLN maupun Non PLN. Selanjutnya barulah pada tahun 2023 dan 2024 seluruh desa yang berjumlah sebanyak 2266 desa sudah teraliri listrik baik yang bersumber dari PLN maupun Non PLN.

### 2.1.4.4.1.30. Urusan Perdagangan

Capaian kinerja **Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas**, Rumus yang digunakan yaitu Nilai ekspor non migas tahun berjalan - nilai ekspor non migas tahun sebelumnya : Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya x 100 %. Capaian realisasi nilai ekspor Tahun 2024 yaitu USD 1.877.517.425,- atau 90,70% dari target ekspor Tahun 2024 sebesar USD 2.070.082.702,-., Realisasi nilai ekspor tahun 2023 sebesar USD 2.156.183.887. Realisasi nilai ekspor Sulawesi Selatan berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di tahun 2024 yaitu USD 1.877.517.425, mengalami penurunan sebesar -12,92% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2023 (USD 2.156.183.887,-). Hal ini disebabkan karena volume ekspor produk industri Sulawesi Selatan mengalami penurunan dan terjadinya fluktuasi harga beberapa komoditas ekspor non migas utama di pasar global yang berkontribusi terhadap menurunnya nilai ekspor.

Capaian **Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**, Rumus yang digunakan jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan adalah jumlah pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang diterima, ditangani dan diselesaikan dengan menerbitkan berita acara klarifikasi/fasilitasi penyesuaian pengaduan konsumen yang diterima oleh Dinas atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun berjalan : jumlah

pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan adalah seluruh pengaduan konsumen pemakai barang atau jasa yang diterima oleh Dinas atau BPSK baik yang sudah ditangani dan diselesaikan maupun yang belum ditangani dan belum diselesaikan pada tahun berjalan. Realisasi persentase penanganan pengaduan konsumen pada tahun 2024 adalah 50 %, dimana jumlah kasus yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan adalah 30 kasus sesuai dengan target Renstra OPD sedangkan kasus yang diselesaikan sebanyak 15 kasus.

Capaian Kinerja Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku, Rumus yang digunakan Jumlah sampel yang sesuai ketentuan adalah keseluruhan jumlah sampel Komoditi potensial yang sudah diuji dan mendapatkan sertifikat kesesuaian mutu atau sertifikat produk : jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun adalah keseluruhan jumlah sampel komoditi potensial yang sudah diuji (baik yang sudah mendapatkan sertifikat maupun belum). Realisasi Capaian kinerja komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku tahun 2024 sebesar 38,11 %. Jumlah komoditi potensial yang diuji sebanyak 1241 sampel komoditi, yang terdiri dari 477 biji kakao,59 biji kopi, 97 mete kupas, 608 rumput laut. Komoditi yang lulus uji dan sesuai dengan standar sebanyak 473 sampel komoditi, yang terdiri dari 59 biji kopi, 97 mete kupas dan 317 rumput laut.

Capaian Kinerja Tertib Usaha, untuk mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, rumus yang digunakan jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat penimbunan barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu : jumlah pelaku usaha MB adalah TBB keseluruhan jumlah pelaku usaha minuman beralkohol baik yang sudah maupun belum memiliki surat izin toko bebas bea.daerah yang tidak memiliki pelaku usaha MB TBB untuk memberikan surat keterangan resmi (pengisian data pada SIPPD 0/1 dengan status reviu APIP OK). Realisasi Capaian kinerja tingkat tertib usaha pelaku usaha Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea sebesar 100 %. Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB sebanyak 2 Pelaku usaha dengan status izin terbit.

Capaian kinerja Persentase Kinerja Realisasi Pupuk untuk mengukur persentase kinerja pupuk, rumus yang digunakan Realisasi : RDKK , yaitu Keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

**Tabel II. 130**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERDAGANGAN** | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | % | -5,37 | 21,15 | 40,63 | -8,59 | -12,92 |
| 2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 81,69 | 64,04 | 100 | 58,33 | 50 |
| 3 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | % | 80,60 | 49,34 | 258,6 | 27,41 | 38,11 |
| 4 | Tertib Usaha | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentasi kinerja | % | 30,00 | 78,52 | 93,3 | 78,01 | NA |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | realisasi pupuk | | | | | | |
| 6 | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | % | 24,01 | 59,15 | 88 | 81,02 | 73,23 |
| 7 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | % | - | - | 24,95 | 28 | 30 |

*Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan*

### 2.1.4.4.1.31. Urusan Perindustrian

Capaian kinerja perindustrian mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sektor Perindustrian di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2020 hingga 2024 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sektor Perindustrian. 1) Sumber Daya Alam yang Melimpah; a) Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti mineral, pertanian, dan kelautan. Sumber daya ini memberikan peluang besar bagi pengembangan industri pengolahan, seperti industri pertambangan, makanan dan minuman, serta industri pengolahan hasil laut. b) Infrastruktur yang Meningkat, Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara yang lebih baik telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang. Hal ini sangat mendukung kegiatan industri, terutama bagi pelaku usaha yang ingin memasuki pasar lokal dan internasional. c) Dukungan Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah yang pro-industri, termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, dan program pelatihan tenaga kerja, telah memberikan dorongan bagi pengusaha untuk berinvestasi di sektor industri. Program-program ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor. d) Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil, Meskipun terdapat tantangan global, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan relatif stabil. Pertumbuhan ini menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk industri, yang pada gilirannya mendorong pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. e) Inovasi dan Teknologi, Adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Banyak perusahaan di Sulawesi Selatan yang mulai menerapkan teknologi informasi dan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas. f) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Dengan adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan industri, Sulawesi Selatan memiliki tenaga kerja yang semakin terampil dan siap pakai. Hal ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan industri yang berkembang. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sektor Perindustrian; a) Keterbatasan Modal, Meskipun ada dukungan dari pemerintah, tidak semua pelaku industri memiliki akses yang mudah terhadap modal. Keterbatasan ini sering kali menjadi penghambat bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar. b) Persaingan yang Ketat Dengan semakin banyaknya pelaku industri yang masuk ke dalam pasar, persaingan menjadi semakin ketat. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar dapat

bertahan di pasar. c) Masalah Lingkungan, Aktivitas industri seringkali berdampak pada lingkungan. Isu-isu seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem dapat menimbulkan konflik antara industri dan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak lingkungan dapat menghambat perkembangan industri. d) Kurangnya Infrastruktur di Daerah Terpencil, Meskipun infrastruktur di pusat-pusat industri telah mengalami perbaikan, daerah-daerah terpencil di Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan. Keterbatasan akses jalan dan transportasi dapat menghambat distribusi produk dan meningkatkan biaya operasional. e) Regulasi yang Rumit, Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang lambat sering kali menjadi penghambat bagi pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Ketidakpastian dalam regulasi juga dapat menakut-nakuti investor. f) Krisis Global dan Dampaknya, Ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi kinerja sektor industri di Sulawesi Selatan. Krisis seperti pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa rentannya sektor industri terhadap guncangan eksternal.

Analisis Kinerja Sektor Perindustrian, Dalam periode 2020 hingga 2024, kinerja sektor perindustrian di Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di atas. Data statistik menunjukkan bahwa beberapa sub sektor, seperti industri makanan dan minuman, mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara sub sektor lain, seperti industri tekstil, menghadapi tantangan yang lebih berat. 1) Industri Makanan dan Minuman, Pertumbuhan industri makanan dan minuman di Sulawesi Selatan didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen baik di pasar lokal maupun internasional. Produk-produk khas daerah, seperti kopi Toraja dan ikan tuna, telah mendapatkan pengakuan di pasar global. 2) Industri Pertambangan, Meskipun memiliki potensi yang besar, industri pertambangan di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan dan dampak lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor ini perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan untuk memastikan kelangsungan usaha mereka. 3) Industri Pengolahan Hasil Laut, Dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, industri pengolahan hasil laut di Sulawesi Selatan memiliki peluang yang besar. Namun, tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian, Untuk meningkatkan kinerja sektor perindustrian di Sulawesi Selatan, beberapa langkah strategis perlu diambil; 1) Meningkatkan Akses Pembiayaan Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menciptakan program-program yang memudahkan pelaku industri, terutama IKM, untuk mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini bisa dilakukan melalui pinjaman dengan suku bunga rendah atau program hibah. 2) Memperbaiki Sistem Perizinan, Penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan birokrasi yang rumit akan membantu menarik lebih banyak investor dan mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. 3) Pengembangan Infrastruktur yang Merata, Investasi dalam infrastruktur di daerah terpencil perlu ditingkatkan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pelaku industri. Hal ini akan membantu dalam distribusi produk dan menurunkan biaya operasional. 4) Mendorong Inovasi dan Riset, Kerjasama antara industri dan lembaga pendidikan dalam hal riset dan pengembangan sangat penting. Ini akan membantu menciptakan produk-produk baru dan meningkatkan daya saing industri. 5) Peningkatan Kesadaran Lingkungan, Pelaku industri perlu didorong untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih ramah

lingkungan. Program-program pelatihan dan sertifikasi lingkungan dapat membantu dalam hal ini. 6) Diversifikasi Produk dan Pasar, Pelaku industri sebaiknya tidak hanya fokus pada satu jenis produk atau pasar. Diversifikasi produk dan pasar akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan industri terhadap guncangan eksternal.

**Tabel II. 131**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satua | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | |
| 1 | Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi | % | -0,013 | NA | -48 | 32 | 4.95 |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | % | 75 | 75 | 110,33 | 75 | 105,38 |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 50 | 100 | 100 | 100 | NA |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | NA | 100 | NA | NA | NA |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | 65 |

*Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan*

### 2.1.4.4.1.32. Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam mendukung kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, perencanaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting yakni Alokasi Anggaran untuk Fungsi Penunjang, Sinergi dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran, Pengawasan dan Akuntabilitas dan Penyusunan Anggaran yang Responsif. Fungsi penunjang urusan pemerintahan mencakup berbagai kegiatan yang mendukung jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien, seperti administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia,

pelayanan publik, dan pengawasan. Tingkat Capaian terkait IKK Bidang Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 dengan indikator, sebagai berikut;

**Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan**, pada Tahun 2020 capaian sebanyak 9,14 %, Tahun 2021 capaian sebanyak 10,05 %, Tahun 2022 capaian sebanyak 10,37%, tahun 2023 capaian sebanyak 11,09 % dan di Tahun 2024 capaian sementara 0,81 %.

**Rasio PAD,** pada indikator IKK outcome untuk Rasio PAD tahun 2020-2024 dapat dijelaskan bahwa Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/ dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka- angkanya. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Rasio PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan tren positif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlebih dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Rasio PAD berada diatas 50% yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah Sulawesi Selatan semakin membaik.

**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum**, pada Tahun 2020 capaian sebanyak 46,95 %, Tahun 2021 capaian sebanyak 52,21 %, Tahun 2022 capaian sebanyak 58,34 %, tahun 2023 capaian sebanyak 57,16 % dan di Tahun 2024 capaian sementara 60,21 %.

**Opini Laporan Keuangan**, Pada Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap laporan Keuanagan Pemerintbawah Daerah di Tahun 2020 mendapat Opini WDP selanjutnya di tahun 2021, tahun 2023 mendapat Opini WTP dan hingga tahun 2024 mendapatkan Opini WTP.

**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),** Dalam rangka memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta menilai tingkat kematangan (maturitas) penerapannya di lingkungan pemerintah, dilakukan proses Pengujian Kualitas atas Maturitas SPIP. Pengujian ini bertujuan untuk menilai keandalan hasil penilaian maturitas SPIP yang telah dilakukan oleh instansi, serta memberikan keyakinan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan secara memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Indikator nilai hasil Penjaminan Kualitas (PK) atas penilaian Maturitas SPIP merupakan proses penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian dapat diandalkan. Dengan adanya PK, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas SPIP. Tahun Hasil evaluasi atas penilaian SPIP Tahun 2024 berada level 3. Upaya meningkatkan nilai maturitas SPIP, yang telah dilakukan adalah

meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan dan pendampingan dari BPKP khususnya terkait dengan manajemen risiko, memperbaiki sistem dokumentasi agar semua bukti pelaksanaan pengendalian internal terdokumentasi dengan baik, meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan SPIP dan penguatan pengawasan internal, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas keuangan negara, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Untuk mengukur efektivitas dan kualitas peran pengawasan intern, APIP dikategorikan ke dalam beberapa level kapabilitas. Level ini mencerminkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan pengawasan intern secara efektif dan berkelanjutan. Untuk saat ini, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berada pada level 2 Level 2/berkembang. APIP pada level ini sudah memiliki prosedur yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugasnya. Struktur organisasi dan sumber daya sudah lebih tertata, serta mulai mengadopsi standar audit yang lebih sistematis. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi dan integrasi dengan manajemen risiko instansi yang diawasi. Sedangkan target level 3/terdefinisi, APIP telah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih matang dan mulai berperan dalam memberikan konsultasi serta rekomendasi strategis bagi organisasi yang diawasi. Proses pengawasan sudah berbasis risiko, dan manajemen organisasi mulai memanfaatkan hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2020, target level kapabilitas APIP adalah Level 2, dan meningkat menjadi Level 3 sejak tahun 2021 hingga 2024 dan realisasi di tahun 2023 masih berada di Level 2, tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi mencapai Level 3, sesuai dengan target. Dalam mencapai level tersebut, upaya yang dilakukan meningkatan SDM dan kompetensi auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis, penguatan sistem pengawasan internal dengan menerapkan standar audit yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penguatan tata kelola dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sedangkan dalam implementasinya kendala yang dihadapi adalah pendokumentasian terkait pengawasan belum sepenuhnya optimal.

**Tabel II. 132**
**Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**
**Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PERENCANAAN DAN KEUANGAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 9,14 | 10,05 | 10,37 | 11,09 | 11,35 |
| 2 | Rasio PAD | % | 41,54 | 44,65 | 54,11 | 54,40 | 53,79 |
| 3 | Rasio belanja urusan pemerintahan umum | % | 46,95 | 52,21 | 58,34 | 57,16 | 60,21 |
| 4 | Opini Laporan Keuangan | Opini | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 3 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah/Bapenda/Inspektorat*

Berdasarkan capaian indicator **Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama.** Proyek konstruksi yang diselesaikan dalam 1 tahun anggaran (tidak terdapat paket pekerjaan konstruksi tahun jamak) dan hanya terdapat pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Capaian kinerja **Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif.** Terdapat peningkatan pengadaan dengan metode kompetitif karena keterbukaan terhadap informasi paket pengadaan, para penyedia barang/jasa pemerintah dapat bersaing secara terbuka dalam memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah.

**Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan,** hal ini jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan sebesar Rp. 1.690.026.250.952 dibagi Total belanja operasi dan modal sebesar Rp. 4.110.298.497.648,96 dikali 100 maka hasil yang didapat sebesar 41,12%.

**Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan Barang dan Jasa**, senantiasa mengalami penurunan akibat menurunnya nilai belanja barang dan jasa disebabkan dampak dari pembayaran utang tahun sebelumnya. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini baru dimasukkan dalam LPPD mulai tahun 2022, sehingga tidak dapat dihitung capaian tahun sebelumnya.

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **PENGADAAN** | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama | % | - | 100 | 1,2 | - | - |
| 2 | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif | % | 53,67 | 6,03 | 4,18 | 22,59 | 85,57 |
| 3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 83,39 | 44,47 | 27,19 | 23,95 | 41,12 |
| 4 | Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dab Koperasi pada | % | NA | NA | 8,15 | 4,30 | 98,31 |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | pelaksanaan Barang dan Jasa | | | | | | |

*Sumber : Biro Pengadaan Barang & Jasa*

Kepegawaian merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan bahwa ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kompetensi yang memadai, berintegritas, serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik guna mendapatkan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mendukung kebijakan penataan pegawai Non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun kebutuhan dan menyiapkan formasi khusus bagi tenaga Non-ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ASN yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan dari 23.983 orang pada tahun 2020 menjadi 19.862 orang pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meningkat signifikan dari 0 pada tahun 2020 menjadi 9.349 orang pada tahun 2024. Per Juli 2025, jumlah PPPK telah mencapai 9.865 orang. Peningkatan jumlah PPPK ini mencerminkan transformasi struktur kepegawaian daerah yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan profesionalisme aparatur.

**Tabel II. 133**
**Jumlah PNS dan PPPK**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Uraian | Satuan | Jumlah Pegawai | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PNS | Orang | 23.983 | 22.957 | 22.083 | 21.043 | 19.862 |
| PPPK | Orang | 0 | 3.453 | 4.183 | 2.351 | 9.349 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian integral dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN merupakan aset penting dalam pembangunan daerah, sehingga perhatian terhadap aspek kesejahteraan, motivasi, dan profesionalisme mereka akan terus menjadi prioritas.

Dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, Pemprov selalu berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang proporsional bagi tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai, dengan memperhatikan kinerja, beban kerja, dan capaian kinerja organisasi. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang berimbang antara penghargaan terhadap kinerja dan tata kelola keuangan yang sehat. Namun demikian, Pemprov Sulawesi Selatan juga dihadapkan pada tantangan struktural, khususnya terkait dengan batasan

belanja pegawai dalam APBD yang, sesuai regulasi nasional, mulai tahun 2027 ke depan harus ditekan hingga maksimal 30% dari total belanja daerah. Batasan ini bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi belanja publik lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, namun juga menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Menyikapi hal ini, Pemprov akan terus mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk optimalisasi tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi birokrasi, serta pengembangan kapasitas ASN agar produktivitas dapat meningkat tanpa harus selalu tergantung pada penambahan anggaran belanja pegawai. Dengan strategi yang terukur dan akuntabel, Pemprov Sulawesi Selatan optimis bahwa upaya peningkatan kesejahteraan ASN tetap dapat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi fiskal yang berlaku. Adapun tingkat capaian terkait IKK Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024 dengan indikator, sebagai berikut;

**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) diluar tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan,** menunjukkan peningkatan signifikan, dari 2,58% menjadi 79,92% dalam lima tahun terakhir yang terdiri dari jumlah 7.526 Orang. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas SDM aparatur, yang diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih profesional.

**Rasio Pegawai Fungsional (%) diluar tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan** mengalami peningkatan dari 16,28% menjadi 29,16% dalam empat tahun terakhir, meskipun sedikit menurun menjadi 28,94% di tahun terakhir yang terdiri dari 2.178 Orang pejabat fungsional diluar tenaga guru dan kesehatan dari total 7.526 Orang jumlah pegawai. Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah struktur kepegawaian yang lebih profesional dan berbasis kompetensi, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi. Peningkatan proporsi jabatan fungsional ini diharapkan dapat mendorong kinerja aparatur yang lebih terukur dan produktif.

**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%),** tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan mengalami fluktuasi signifikan. Setelah meningkat tajam dari 16,28% menjadi 100% pada dua tahun berturut-turut dikarenakan adanya penyetaraan jabatan fungsional oleh pejabat struktural, kemudian angka tersebut menurun menjadi 77,09% dan kembali turun menjadi 70,11% pada tahun terakhir dikarenakan penyesuaian pejabat penyetaraan yang harus mengikuti dan memiliki sertifikasi.

**Tabel II. 134**
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024**

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 2,58 | 73,59 | 75,43 | 78,31 | 79,92 |

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 16,28 | 20,91 | 28,5 | 29,16 | 28,94 |
| 3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 16,28 | 100 | 100 | 77,09 | 70,11 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik Pemerintah Sulawesi Selatan tetap berkomitmen dalam poin penting terkait manajemen keuangan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 Seperti Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Perencanaan anggaran dilakukan melalui dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Penyusunan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, APBD harus disusun berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan potensi daerah, Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk serta lembaga pengawasan eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Penerimaan dan Pengeluaran dan Pengelolaan Kas Daerah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dimana Laporan keuangan wajib harus diaudit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK. Selain itu, evaluasi atas hasil pengelolaan keuangan dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, serta Pengelolaan Aset Daerah dimna Pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengelola aset daerah dengan baik, termasuk melakukan pencatatan, pengawasan, dan pemanfaatan aset yang ada untuk mendukung pembangunan daerah. Beberapa IKK Bidang Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024.

**Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD,** pada Tahun 2020 capaian sebanyak 93,05 %, Tahun 2021 capaian sebanyak 83,83 %, Tahun 2022 capaian sebanyak 1,66 %, tahun 2023 capaian sebanyak 7,54 % dan di Tahun 2024 capaian sementara 5,20 %.

**Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD,** pada Tahun 2020 capaian sebanyak 86,52 %, Tahun 2021 capaian sebanyak 96,51 %, Tahun 2022 capaian sebanyak 2,79 %, tahun 2023 capaian sebanyak 10,16 %, dan di Tahun 2024 capaian sementara 1,40 %.

**Assets Management**, dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan sesuai standar yang berlaku pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen dalam penyiapan data dan memungkinkan fungsi penunjang

pemerintahan dapat berjalan dengan optimal dengan aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.

**Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya,** pada Tahun 2020 capaian sebanyak 0,76 %, Tahun 2021 capaian sebanyak 3,24%, Tahun 2022 capaian sebanyak 2,59 %, tahun 2023 capaian sebanyak 3,01 % dan di Tahun 2024 capaian sementara 2,95 %.

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Dengan mengacu pada peraturan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa fungsi penunjang pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan secara keseluruhan.

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **MANAJEMEN KEUANGAN** | | | | | | |
| 1 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 6,95 | 29,93 | 1,65 | 7,54 | 5,20 |
| 2 | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 13,48 | 8,28 | 2,79 | 10,16 | 1,40 |
| 3 | Assets Management | Data | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | % | 0,76 | 3,24 | 2,59 | 3,01 | 2,95 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah*

| No | IKK Outcome | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK** | | | | | | |
| | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | % | 33,55 | 92,02 | 95,3 | 91,88 | 95,29 |
| | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | % | 21,82 | 24,85 | 17,09 | 100 | 100 |

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah*

**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup Aspek Geografi dan Demografi meliputi; Posisi dan Peran Strategis Daerah, Potensi Sumber Daya Alam, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, Lingkungan hidup Berkualitas, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Demografi. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi; Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan Untuk Semua, Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Perlindungan Sosial Yang Adaptif, Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif. Aspek Daya Saing Daerah meliputi; Daya Saing Sumber Daya Manusia, Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Ekonomi Makro. Aspek Pelayanan Umum Meliputi; Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial, Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2020-2024 atau capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel ini dimana terdapat beberapa indicator yang tidak relevan lagi digunakan sehingga data capaian kinerja perangkat daerah tidak dapat diukur sehingga nilainya kosong.

**Tabel II. 135**
**Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020-2024**
**Provinsi Sulawesi Selatan**

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| | **KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI** | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | -0.71 | 4.64 | 5.09 | 4.51 | 5.18 |
| 2 | Laju Inflasi | % | 2.04 | 2.4 | 5.77 | 2.81 | 1.23 |
| 3 | PDRB Perkapita (ADHB) | Triliun Rp | 55.68 | 59.66 | 65.59 | 69.7 | 73.57 |
| 4 | Indeks Gini | Angka | 0.382 | 0.377 | 0.365 | 0.377 | 0.363 |
| 5 | Indeks Wiliamson | Indeks | 0.62 | 0.568 | 0.567 | 0.57 | 555 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan | % | 8.99 | 8.53 | 8.66 | 8.7 | 7.77 |
| | · Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Jiwa | 776.84 | 784.98 | 782.32 | 788.85 | 711.77 |
| | · Indeks Kedalaman Kemiskinan | Angka | 1.65 | 1.4 | 1.5 | 1.57 | 1.38 |
| | · Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan | % | 91.01 | 91.47 | 91.34 | 91.3 | 92.23 |
| 7 | Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB | % | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.22 | 1.32 |
| 8 | Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB | % | 6.5 | 6.35 | 5.91 | 6.12 | 6.21 |
| 9 | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB | % | 3.94 | 4.07 | 4.05 | 4.12 | 4.9 |
| 10 | Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB | % | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.26 | 1.30 |
| 11 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | % | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 12 | Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB | % | 4.67 | 4.75 | 5.1 | 5.13 | 4.55 |
| 13 | Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB | % | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 7.75 |
| 14 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 14.48 | 14.58 | 14.64 | 14.69 | 14.8 |
| 15 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | % | 12.76 | 12.49 | 12.9 | 12.85 | 13.02 |
| 16 | Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri | % | 7.35 | 8.91 | 9.31 | 7.41 | 7.59 |
| 17 | Pertumbuhan PDRB Industri | % | -4.57 | 3.02 | 9.86 | 4.26 | 4.84 |
| | **KESEJAHTERAAN SOSIAL** | | | | | | |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 71,93 | 72,24 | 72,82 | 74.6 | 75.18 |
| | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 70,57 | 70,66 | 70,97 | 71.22 | 73.83 |
| | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,38 | 8,46 | 8,63 | 8.76 | 8.86 |
| | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,45 | 13,52 | 13,53 | 13.54 | 13.55 |
| | Pengeluaran Perkapita | Ribu Rupiah | 11,079 | 11,184 | 11,430 | 11,840 | 12,275 |
| 2 | Indeks Pendidikan | Angka | 65,29 | 65,76 | 66,34 | 66.88 | 74.7 |
| 3 | Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas | Tahun | 92,56 | 92,49 | 93,31 | 93.83 | 94,11 |
| 4 | Indeks Kesehatan | Angka | 77,80 | 77,94 | 78,41 | 78.8 | 81.38 |
| 5 | Prevalensi Balita Stunting | % | Tidak ada Survey | 27,4 | 27,2 | 27.4 | 23,3 |
| 6 | Tingkat Partispasi Angkatan Kerja | % | 63,4 | 64,73 | 66,18 | 63.6 | 67.38 |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,31 | 5,72 | 4,51 | 4.33 | 4.19 |
| | · Jumlah Penganggur | Ribu Jiwa | 269,817 | 252,349 | 205,725 | 203,500 | 204,760 |
| 8 | Rasio Penduduk yang Bekerja | % | 93,69 | 94,28 | 95,49 | 95.67 | 95.81 |
| 9 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | % | 36,9 | 37,32 | 39,81 | 40.41 | 38.43 |
| | **SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA** | | | | | | |
| 1 | Jumlah lembaga sanggar kesenian per 10.000 penduduk | Per 10.000 penduduk | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| 2 | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk | Per 10.000 penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk | Per 10.000 penduduk | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| | **PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR** | | | | | | |
| | **Pendidikan** | | | | | | |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK | % | 86,44 | 87,07 | 86,49 | 88.04 | 90,49 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | % | 60,32 | 60,35 | 60,44 | 70.11 | 62,71 |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun | % | 70,89 | 71,21 | 70,81 | 71.00 | 73,17 |
| 4 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | % | 1,35 | 1,02 | 3,62 | 0.41 | 3,13 |
| 5 | Angka Kelulusan (AL) | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99.99 | 99,99 |
| 6 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 92,07 | 93,82 | 95,34 | 99.25 | 85,41 |
| 7 | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | Angka | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 1:12 | 1 : 12 |
| 8 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun | % | 93,58 | 94,16 | 94,54 | 94.91 | Belum Rilis |
| 9 | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 98,84 | 94,83 | 99,16 | 98.65 | 99,69 |
| | **Kesehatan** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu | Orang | 791 | 844 | 1.117 | 1,438 | 1305 |
| 2 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita) | Orang | 843 | 892 | 1.176 | 1,474 | 1340 |
| 3 | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal) | Orang | 623 | 681 | 954 | 1,274 | 1152 |
| 4 | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1000 KH) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 5 | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1000 KH) | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 6 | Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup | Angka (per 1000 KH) | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 7 | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Angka (per 100.000 KH) | 86 | 129 | 119 | 133 | 134 |
| 8 | Rasio Posyandu persatuan Balita | Angka per 1000 balita | 12,64 | 16,6 | 14,42 | 14.71 | Belum Rilis |
| 9 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Angka per 1000 Penduduk | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 1.3 | 1,78 |
| 10 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | Angka per 1.000 Penduduk | 18 | 23 | 22 | 27 | 50 |
| 11 | Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk | Angka per 1.000 Penduduk | 43 | 60 | 60 | 66 | 93 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | % | 81,9 | 99,76 | 93,86 | 19,17 (terdapat perubahan DO, sebelumnya denominator 20% dari sasaran bumil, juknis baru denominator seluruh total bumil | 11,16 |
| 13 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 92,44 | 95,04 | 94,8 | 91.52 | 73,09 |
| 14 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 73,82 | 83,51 | 94,3 | 95.7 | 84,4 |
| 15 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan | % | 100 | 99,6 | 91,8 | 98.3 | 93,66 |
| 16 | Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak | % | 63,3 | 102,9 | 99,6 | 112.5 | 87,2 |
| 17 | NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk | Per 100.000 Penduduk | 0,9 | 1,72 | 2,9 | 3.4 | 3,28 |
| 18 | Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani | % | 71,59 | 69,43 | 78,29 | 88.34 | 95,98 |
| 19 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | % | 45 | 49 | 59,6 | 58 | 66,6 |
| 20 | Tingkat Prevalensi Tuberkolosis | Per 100.000 Penduduk | 160 | 169 | 228 | 288 | 323 |
| 21 | Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis | Per 100.000 Penduduk | 6 | 7,8 | 9,8 | 11 | 13 |
| 22 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 50 | 61 | 71 | 58 | 98,7 |
| 23 | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS | % | 89 | 87 | 87 | 86 | 83 |
| 24 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Penderita Diare yang ditangani | Orang | 28.228 | 5.168 | 87.402 | 110,774 | 126,156 |
| 26 | Angka Kejadian Malaria | Per 1000 penduduk | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0.20 | 0.20 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 27 | Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi | % | 0,02 | 0,026 | 0,26 | 0.27 | 0,4 |
| 28 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Cakupan Kunjungan Bayi | % | 88,63 | 98,4 | 98,57 | 100.18 | 60,03 |
| 30 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 86,58 | 88,65 | 88,15 | 86.52 | 80,12 |
| 31 | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 91,91 | 91,33 | 91,1 | 88.72 | 77,63 |
| 32 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | % | 59,08 | 60,23 | 58,56 | 8,67 (terdapat perubahan DO, sebelumnya denominator 15% dari sasaran bayi resiko tinggi, juknis baru denominator seluruh sasaran bayi | 7,11 |
| 33 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | % | 65,52 | 75,25 | 83,75 | 82.4 | 87,75 |
| 34 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 91,10 | 93,4 | 87,4 | 91 | 86,6 |
| 35 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | |
| 1 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | % | 34,78 | 38,98 | 40 | 47.1 | 45.87 |
| 2 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk | Km/jiwa | 0,00341 | 0,00319 | 0,00319 | 0.00328 | 0.00021 |
| 3 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 93,79 | 93,98 | 97,36 | 97.37 | 93.83 |
| 4 | Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik | % | 72,5 | 76 | 77,86 | 72.86 | 56.39 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Rasio Jaringan Irigasi | M/Ha | 12,65 | 13,03 | 52,31 | 59.33 | 56.39 |
| 6 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak | % | 90,84 | 91,18 | 91,96 | 92.12 | 92.23 |
| 7 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman | % | 44,39 | 46,22 | 46,39 | 45.07 | 42.66 |
| 8 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan | % | 25,53 | 23,15 | 25,15 | 25.64 | 34,88* |
| 9 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak | % | 88,96 | 91,57 | 92,24 | 93.69 | 93.83 |
| 10 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman | % | 4,74 | 3,97 | 12,92 | 12.83 | 10.88 |
| 11 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 75 | 80 | 86 | 86 | 86 |
| 12 | Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk | Unit/Jiwa | 2,53 | 2,16 | 2,23 | 2.27 | 2.25 |
| 13 | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan | % | 25 | 21,87 | 25 | 25 | 25 |
| | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | |
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni | % | 0,219 | 0,216 | 0,217 | 0.215 | 0.217 |
| 2 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | % | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0.139 | 0.140 |
| | **Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | per 10.000 penduduk | 42,27 | 47,69 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 100 | 100 | 99,59 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Penegakan PERDA | % | 100 | 100 | 99,67 | 100 | 100 |
| | **Sosial** | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 77 | 88,22 | 95,95 | 78 | 40.04 |
| 2 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 77,3 | 90,71 | 94,6 | 96 | 46,20 |
| 3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 100 | 88,29 | 87,98 | 78 | 40.11 |
| 4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 100 | - | - | - | - |
| 6 | Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | - | - | - | - | - |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun | % | 15,63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 13,94 | 17,3 | 48,8 | - | - |
| 9 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
| | **PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | | |
| | **Tenaga Kerja** | | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 63,40 | 64,73 | 66,18 | 63.6 | 67.38 |
| 2 | Rasio Penduduk yang Bekerja | % | 93,69 | 94,21 | 95,49 | 95.67 | 95.81 |
| 3 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 2,23 | 0 | 1,24 | 1.44 | 1.21 |
| 4 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 57,33 | 60,98 | 30,6 | 23.81 | 34.16 |
| 5 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 3,29 | 5,6 | 9,49 | 9.69 | 71.9 |
| 6 | Keselamatan dan perlindungan | % | 59,99 | 30 | 48,73 | 87.16 | 23.82 |
| 7 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 29,34 | 16,35 | 47,55 | 84.29 | 21 |
| 9 | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | % | 13,50 | 12,35 | 60 | 60.72 | 100 |
| 10 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| 11 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 80 | 81,25 | 85 | 100 | - |
| 12 | Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | % | 93,69 | 94,28 | 95,49 | 95.67 | 95.81 |
| 13 | Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ketas | % | 45,14 | 46,61 | 46,35 | 48.14 | 50.91 |
| 14 | Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja | % | 21,18 | 37,32 | 39,81 | 40.41 | 38.43 |
| | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 48,16 | 54,38 | 54,8 | - | - |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 28.40 | 25.88 | 27.06 | 25.88 | 25,88* |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | % | 74 | 72 | 74 | - | - |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Rasio KDRT | % | 0,0065 | 0,07* | 0,07* | 0.56 | 0.52 |
| 5 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | % | 4.4 | 3.71 | 3.15 | 3.16 | 3,16* |
| 6 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 48,16 | 49 | 50 | - | - |
| 7 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 35 | 22 | 23 | 56 | 17 |
| 9 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat | % | 99,58 | 100,18 | 99.53 | 98.41 | 97.81 |
| 10 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat | % | 97,24 | 102,03 | 100.93 | 77.98 | 76.84 |
| 11 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat | % | 102,46 | 97,03 | 99.67 | 60.57 | 62.71 |
| 12 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | % | 118.94 | 125.47 | 121.95 | 30.41 | 29.45 |
| 13 | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | % | 92.56 | 92.49 | 93.31 | 99.87 | 99.87 |
| | **Pangan** | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | % | 332,21 | 363,8 | 367,91 | 334.94 | 316,47* |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) | % | 53,27 | 61,83 | 55,04 | 202.72 | 83,27* |
| 3 | Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai) | % | 13,66 | 13,62 | 18,23 | 27.55 | 1,29* |
| 4 | Ketersediaan Energi Perkapita | Kkal/Kapita/Hari | 3.168 | 3.484,4 | 3.593 | 3916 | 3835* |
| 5 | Ketersediaan Protein Perkapita | Gr/Kapita/Hari | 86,16 | 94,78 | 171,65 | 159.04 | 128* |
| 6 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Indeks Ketahanan Pangan | Poin | 81.81 | 80.92 | 81.83 | 83.36 | 83.82 |
| 8 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Poin | 80.4 | 80.1 | 83.1 | 85.3 | 87.74 |
| 9 | Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang) | % | 22.72 | 25 | 74,07 | 26.66 | NA |
| 10 | Angka Kecukupan Energi | Kkal/Orang/Hari | - | - | - | - | 2064 |
| 11 | Angka Kecukupan Protein | Gr/Orang/Hari | - | - | - | - | 63.6 |
| 12 | Persentase Cadangan Pangan | % | - | - | - | - | 0.01 |
| 13 | Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Data Timpang) | % | 14.98 | 14.86 | 14.54 | 29.59 | - |
| 13 | Persentase Lumbung Pangan yang Aktif | % | - | - | - | - | 71.25 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 14 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | % | - | - | - | - | 1.29 |
| | **Pertanahan** | | | | | | |
| 1 | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 25.94 | 27.51 | 29.61 | 31.51 | 33.58 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah Negara | % | 67 | 50 | 66,67 | 50 | 50 |
| 3 | Penyelesaian izin lokasi pertanahan | % | 49 | 42 | 121 | 118 | 58.56 |
| | **Lingkungan Hidup** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersusunnya RPPLH Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi | Ada / Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada |
| 4 | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada |
| 6 | Indeks Kualitas Air | % | 54,00 | 56,82 | 57,79 | 57.95 | 58.51 |
| 7 | Indeks Kualitas Udara | % | 88,73 | 89,13 | 90,35 | 90.58 | 93.36 |
| 8 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | % | 63,56 | 55,4 | 55,46 | 56.22 | 56.34 |
| 9 | Indeks Kualitas Air Laut | % | 70,22 | 84,82 | 85,59 | 84.3 | 84.28 |
| 10 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 71,74 | 73,23 | 74,17 | 74.3 | 75.69 |
| 11 | Laporan Inventarisasi GRK | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 12 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 13 | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Ton | 3.500.000 | 589.007,56 | 4.934.631 | 39,362.67 | 18,834.14 |
| 14 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | 18,46 | 18,46 | 29,6 | 44.6 | 26 |
| 15 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada / Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Ada | Ada |
| 16 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan | Kasus | 12 | 16 | 18 | 20 | 15 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | | | | | | |
| 17 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 18 | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi | % | 72,83 | 51,12 | 54,48 | 74 | 57.26 |
| | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Angka | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0.98 | 0,98 |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran | Angka | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | Angka | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,48 | 0,52 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 94,00 | 95,43 | 99,42 | 98 | 97.72 |
| 7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 46,00 | 47,79 | 96,51 | 54.18 | 56.04 |
| | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | |
| 1 | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik | % | 17,83 | 98,89 | 99,42 | 99.42 | - |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Kelompok | 23 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 45 | 95 | 96 | 97 | - |
| 4 | Persentase LPM Berprestasi | % | 24,33 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Posyandu aktif | % | 99,89 | 99,91 | 97,06 | 99.98 | 85.45 |
| | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 2,51 | 1,04 | 1,04* | 1.15 | 1.13 |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,45 | 2,29 | 2,22 | 2.13 | 2.15 |
| 3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | anak/keluarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Rasio Akseptor KB | % | 71,07 | 71,07 | 71,7* | 71.7 | 68.4 |
| 5 | Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 71,86 | 71,66 | 61,2 | 59.5 | 60.3 |
| 6 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 | Angka | 29,07 | 27,4 | 27,4 | 24.4 | 26.2 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | tahun (ASFR 15-19) | | | | | | |
| 7 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | % | 35 | 22 | 22* | 25.5 | 22.14 |
| 8 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 13,05 | 20 | 26,1 | 11.7 | 12 |
| 9 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 24,24 | 23,1 | 13 | 26 | 28.3 |
| 10 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 17,24 | 18,4* | 18,45* | 20.4 | 21.1 |
| 11 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 78,75 | 74,5* | 72,5* | 100 | 100 |
| 12 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 70,54 | 70,21* | 70* | 78.2 | 81.7 |
| 13 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 71,49 | 70,8* | 70* | 72.9 | 76.5 |
| 14 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 23 | 23* | 23* | 163 | 294 |
| 15 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | % | 18,00 | 78,5 | 78,5* | 75 | 75.5 |
| 16 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100,41 | 98,64* | 98,64* | 98.6 | 100 |
| 17 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 76,07 | 76,98* | 75,98* | 87.1 | 84.8 |
| 18 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | % | 0,02 | 0,04* | 0,04* | NA | NA |
| 19 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 71,01 | 71,01* | 65,4 | 95.25 | 94.99 |
| 20 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | % | 44,21 | 75 | 75* | 64.69 | 70.89 |
| 21 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0,13 | 1,5 | 1,5* | NA | NA |
| | **Perhubungan** | | | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Juta Jiwa | 7,143 | 8,514 | 14,005 | 14,925 | 15,146 |
| 2 | Rasio ijin trayek | Rasio | 1,99 | 0,26 | 0,2 | 0.22 | - |
| 3 | Persentase layanan angkutan darat | % | 90 | 94 | 97 | 97 | 100 |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS | Unit | 89 | 127 | 127 | 132 | 135 |
| 5 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Km/Kendaraan | 0,09 | 0,1 | 0,108 | 0.006 | 0.11 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum | Ton | 11.067.590 | 11.531.427 | 12.702.231 | 16,232,937 | 11,351,901 |
| | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | |
| 1 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 85,30 | 87,17 | 87,52 | 86.16 | 85.52 |
| 2 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet (dirumah sendiri) | % | 49,59 | 59,69 | 94,24 | 96.51 | 97.62 |
| 3 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | % | 21,93 | 31,44 | 13,48 | 20.51 | 22.13 |
| | **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | |
| 1 | Persentase koperasi aktif | % | 64,22 | 55,66 | 50 | 53.46 | 54.38 |
| 2 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 99,40 | 99,71 | 99,71 | 98.09 | 98.93 |
| | **Penanaman Modal dan Investasi** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Triliun rupiah | 12,54 | 16,6 | 14,25 | 16.45 | 14.035 |
| 2 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Proyek | 2.506 | 4.506 | 5.748 | 15,389 | 23,476 |
| 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | Orang/proyek | 3 | 3,69 | 2,26 | 1.25 | 1.01 |
| 4 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | Milyar Rupiah | 6,1 | 1,2 | 1,6 | 3.94 | -3.05 |
| | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 8,17 | 8,17 | 8,73 | 8.73 | 9.01 |
| 2 | Persentase wirausaha muda | % | 13,80 | 17,24 | 31,3 | 35.30 | 35.33 |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | % | 64 | 64 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi | % | 24,57 | 24,68 | 28,16 | 30.07 | 33.35 |
| 5 | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 6,70 | 9,07 | 9,34 | 9.51 | 9.87 |
| 6 | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 0 | 84 | 119 | 160 | 215 |
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | Medali | 0 | 52 | 217 | 105 | 154 |
| | **Statistik** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka" | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Buku PDRB | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | **Persandian** | | | | | | |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **Kebudayaan** | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 5 | - | 10 | - | - |
| 2 | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Buah | 3 | 11 | 2 | 3 | 9 |
| | **Perpustakaan** | | | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 106.933 | 154.913 | 1.325.445 | 6.765.152 | 11.038.896 |
| | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Laki-Laki | Orang | 52.037 | 69.376 | 669.359 | 2.862.696 | 4.748.547 |
| | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perempuan | Orang | 54.896 | 85.537 | 656.086 | 3.902.456 | 6.290.349 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Exp. | 10.028.442 | 9.256.186 | 10.348.732 | 12.311.053 | 13.858.914 |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Unit/Jiwa | 0,035 | 0,035 | 0,23 | 0,56 | 0,54 |
| 4 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 66.408 | 45.256 | 45.91 | 83.640 | 98.564 |
| 5 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 2.35 | 4.032 | 31.098 | 39.341 | 39.841 |
| 6 | **Kearsipan** | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 40 | 33,3 | 79,49 | 92 | 94 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 1.313 | 1.433 | 1.865 | 1500 | 1550 |
| | **PELAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | |
| | **Pariwisata** | | | | | | |
| 1 | Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) | kunjungan | 367.926 | 1.612.737 | 7.590.063 | 10.262.660 | 36.518.290 |
| 2 | Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) | Kunjungan | 6.598 | 3.654 | 70.997 | 110.892 | 13.697 |
| 3 | Lama kunjungan Wisata | Hari | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2 |
| 4 | PAD Sektor Pariwisata | Rupiah | 60.200.000 | 66.500.000 | 299.770.000 | 395.675.201 | 522.233.567 |
| | **Pertanian** | | | | | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB | % | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1.22 | 1.32 |
| 2 | Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB | % | 6,50 | 6,33 | 5,91 | 6.12 | 6.21 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB | % | 3,94 | 4,07 | 4,05 | 4.12 | 4.9 |
| 4 | Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB | % | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1.26 | 1,30 |
| 5 | Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Ton | 121.244 | 136.039 | 138,882 | 150,842 | 151,176 |
| 6 | Produktivitas Hasil Peternakan (Telur) | Ton | 235.801 | 237.898 | 258,388 | 228,775 | 323,080 |
| 7 | Produktivitas Hasil Peternakan (Susu) | Ton | 2.302 | 2,523 | 1,940 | 1,185 | 1,328 |
| | **Kehutanan** | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | % | 60,42 | 65,61 | 71,14 | 73.26 | 0,05 Ket : (sesuai kewenangan di luar kawasan hutan) |
| 2 | Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0,7 | 0,08 | 0,03 | 0.05 | 0.06 |
| 3 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | % | 75,67 | 75,67 | 75,67 | 75,67 | 75,67 |
| | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | |
| 1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik | % | 97,53 | 98,2 | 99,89 | 99.88 | 99.65 |
| 2 | Rasio ketersediaan daya listrik | % | 90,00 | 101 | 99,41 | 99.65 | 110.28 |
| 3 | Persentase pertambangan tanpa ijin | % | 16,6 | - | 34,79 | - | - |
| | **Perdagangan** | | | | | | |
| 1 | Ekspor Bersih Perdagangan | US$1000 | 1.384.609.057 | 1.677.394.840 | 2.358.937.318 | 2.214.847.000 | 2.038.970.000 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal | % | 0,98 | 1,08 | Tidak diukur | 5,75 | 6,35 |
| | **Perindustrian** | | | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Kelompok | 1.062 | 1.635 | 2.103 | 2913 | 3273 |
| | **Transmigrasi** | | | | | | |
| 1 | Persentase transmigran umum | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Produksi perikanan | % | 101,34 | 110,98 | 99,70 | 99.48 | 100.99 |
| 2 | Cakupan bina kelompok nelayan | % | 10,51 | 19,11 | 27,39 | 22,93 | 4,46 |
| | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah | Kelompok | 21 | 60 | 86 | 72 | 14 |
| | Jumlah kelompok nelayan | Kelompok | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 3 | Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 12,89 | 18,11 | 29,43 | 34.69 | 0.18 |
| | Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan | Ton | 50.174,24 | 77.770,07 | 128.535,41 | 184.168,31 | 129.63 |
| | Jumlah produksi ikan di daerah | Ton | 389.208,2 | 429.431,2 | 436.749,6 | 504.709 | 511.455,20 |
| 4 | Nilai Tukar Nelayan | % | 99,65 | 107,43 | 109,29 | 111,07 | 111,92 |
| 5 | Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 47.73 | 50.53 | 52.61 | 61.96 | 62.52 |
| 6 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial | Angka | 1,57 | 1,57 | 1.34 | 1.34 | - |
| 7 | Volume produksi perikanan tangkap | Ton | 389.208,2 | 429.431,2 | 436.749,6 | 504.709 | 511.455,20 |
| 8 | Konsumsi Ikan | % | 119,09 | 114,45 | 110,85 | 107.89 | 100.17 |
| | **Penunjang Urusan** | | | | | | |
| | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 |
| 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional | Nilai/Indeks | - | - | - | - | 78.49 |
| | **Keuangan** | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Hasil Opini | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 41,54 | 44,65 | 54,1 | 56,63 | 54,30 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 0,64 | 3,61 | 2,29 | 1,18 | 0,27 |
| 4 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 41,69 | 38,92 | 31,08 | 32,01 | 36,13 |
| 5 | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 13,11 | 10,63 | 10,1 | 11,42 | 13,17 |
| 6 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | Rasio | 32,19 : 67,81 | 0 (PMDN 77/2020) | 0 (PMDN 77/2020) | 0 (PMDN 77/2020) | 0 (PMDN 77/2020) |
| 7 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 14,47 | 16,19 | 20,37 | 23,33 | 16,19 |
| 8 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | **Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP/ Tahun | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,01 | 0,12 |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 0,6 | 0,17 | 0,48 | 0,11 | 0,38 |
| 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Jabatan | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 |
| 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 7.907 | 13.781 | 12.906 | 5.659 | 5.365 |
| 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 16.03 | 16.16 | 16.147 | 15.402 | 14.514 |
| | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 46 | 50 | 94,44 | 100 | - |
| 3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 50 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 0 | 50 | 41,86 | 38.1 | - |
| 5 | Indeks Inovasi daerah | Predikat | - | - | - | - | Inovatif (59,66) |
| | **Pengawasan** | | | | | | |
| 1 | Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaaan APIP | % | 64,56 | 73,93 | 76,29 | 74.23 | 69.87 |
| 2 | Persentase penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis | % | 68,1 | 70,04 | 69,55 | 68.74 | 66.93 |
| 3 | Jumlah temuan BPK | Kasus | 18 | 21 | 18 | 25 | 24 |

| NO. | ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **Sekretariat Dewan** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan.Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | **ASPEK DAYA SAING** | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita | Rp.Juta/Ruta | 0,509 | 0,527 | 0,541 | 0.553 | 0 |
| 2 | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita | % | 51,21 | 51,68 | 50,44 | 52.32 | 50.38 |
| 3 | Nilai Tukar Petani | Ribu Rupiah | 96,97 | 98,55 | 100,39 | 107.39 | 117.87 |
| 4 | Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa | % | 3,28 | 4,62 | 3,7 | 3.7 | 0 |
| 5 | Produktivitas Total Daerah | Rp/Angkatan Kerja | 76.746,81 | 77.819,96 | 79.149,92 | 0 | 0 |
| 6 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) | % | 65,8 | 68,13 | 154,28 | 149.09 | 0 |
| 7 | Rasio Ketergantungan | Angka | 46,14 | 45,36 | 44,93 | 44.88 | 44.78 |
| 8 | Angka Kriminalitas | Angka | 15.158 | 15.21 | 26.684 | 25.533 | 23.359 |

### 2.1.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024

**Tabel II. 136**
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024**

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Capaian SPM | | | | | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Pendidikan** | | | | | | | |
| **Pendidikan Menengah** | | | | | | | |
| Persantase Warga Negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 100 | 76,62 | 80,55 | 83,68 | 86,2 | 86,81 | |
| **Pendidikan Khusus** | | | | | | | |
| Persantase Warga Negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus | 100 | 81 | 80,84 | 82,73 | 84,94 | 85,20 | |
| **Kesehatan** | | | | | | | |
| **Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi** | | | | | | | |
| Persantase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Pekerjaan Umum** | | | | | | | |
| **Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pegolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| **Perumahan Rakyat** | | | | | | | |
| **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi** | | | | | | | |

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Capaian SPM | | | | | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah yang layak huni | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 0 | |
| **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | |
| **Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Sosial** | | | | | | | |
| **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | 100 | 35,12 | 7,4 | 100 | 100 | 100 | |
| **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar | 100 | 3,88 | 15,22 | 15,22 | 17,30 | 100 | |
| **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjutan usai di dalam panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti** | | | | | | | |
| Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi** | | | | | | | |

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Capaian SPM | | | | | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Persentase Warga Negara Korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | 100 | 15,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

### 2.1.6. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Selama periode 2020–2024, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Beberapa indikator prioritas mencatat pencapaian yang melebihi target, seperti pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), di mana persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berhasil diturunkan dari 8,99% pada tahun 2020 menjadi 7,77% pada tahun 2024. Selain itu, proporsi peserta jaminan sosial dan kesehatan juga mengalami peningkatan substansial. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis data, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai aktor non-pemerintah. Pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan lembaga filantropi, termasuk UNICEF, memainkan peran penting dalam mendukung intervensi pembangunan yang menyasar kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. UNICEF secara konsisten memberikan dukungan teknis dan programatik dalam isu-isu strategis seperti pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan data sektoral yang berkontribusi terhadap peningkatan indikator SDGs di tingkat daerah. Kemitraan multipihak ini memperkuat prinsip "no one left behind" dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan pencapaian nyata tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dianugerahi penghargaan **SDGs Award Tahun 2024 melalui Inovasi Pasti Beraksi Penanganan Anak Tidak Sekolah** dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas. Penghargaan ini menegaskan bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam upaya pencapaian target SDGs secara holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Prestasi ini juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang responsif terhadap tantangan global dan lokal. Capaian ini akan menjadi landasan penting dalam perumusan strategi pembangunan lima tahun ke depan melalui RPJMD 2025–2030.

**Tabel II. 137**
**Capaian Target Indikator TPB/SDGs**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN | | | | | | |
| 1.1 | **1.2.1*** | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | 8,99 | 8,53 | 8,63 | 8,70 | 7,77 |
| 2 | **1.3.1.(a)** | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | 86,5 | 92,97 | 100 | 101,19 | 100 |
| 2.1 | **1.3.1(b)** | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | 78,0 | 47.12 | 49.43 | 29,83 | 32,09 |
| 3 | **1.3.1.(c)** | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | 0,4 | 7.4 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | **1.3.1.(d)** | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | 313,4 | 365.669 | 364.414 | 304,632 | 351.900 |
| 4 | **1.4.1.(a)** | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | 92,7 | 94.35 (95.44 BPS) | 94,32 | 96,61 (BPS) | 96,26 (BPS) |
| 4.1 | **1.4.1.(b)** | Persentase anak umur 12-23 | NA | 98,3 | NA | 108,4 | 87,81 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah) | | | | | |
| 5 | **1.4.1.(c)** | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 73,7 | 73.41 (59,66 BPS) | 73,01 | 74,10 | 70,06 |
| 5.1 | **1.4.1.(d)** | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | 44,4 | 91.18 (BPS) | 91,96(BPS) | 92,12 (BPS) | 92,23 (BPS) |
| 6 | **1.4.1.(e)** | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | 89,0 | 86,75 | 92,94 (BPS) | 92,94 (BPS) | 93,83 (BPS) |
| 6.1 | **1.4.1.(f)** | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah) | 11,6 | 22,79 | 3,82 (BPS) | 3,97 (BPS) | **Tidak diukur lagi oleh BPS** |
| 7 | **1.4.1.(i)** | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. | 60,3 | 67.4 (60.35) | NA | 70,11 (dapodik) | 72,14 |
| 7.1 | **1.4.1.(j)** | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | 0,9 | 84.5 (91.47) | 96,51 | 97.62 | 94.82 |
| 8 | **1.4.1.(k)** | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan | NA | 99,41 | 97,36 | 99,9 | NA |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah) | | | | | |
| 8.1 | **1.5.1*** | Jumlah korban meninggal,dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | NA | "Meninggal : 27 Terdampak : 21.470" | Meninggal : 32 Terdampak : 2,312 | Meninggal : 19 Terdampak : 1,040 | Meninggal : 73 Terdampak : 9.086 |
| 9 | | Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang | Meninggal : 78 Terdampak : 70.854 | 27 | 32 | 19 | 73 |
| 9.1 | | Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang | - | 4 | 6 | 19 | 0 |
| 10 | | Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang | - | 76 | 46 | 31 | 68 |
| 10.1 | | Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang | - | 21.470 | 2.312 | 990 | 8.945 |
| 11 | **1.5.1.(a)** | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | 24,0 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 11.1 | **1.5.1.(b)** | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial | 1414,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | **1.5.1.(c)** | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | 1414,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.1 | **1.5.1.(e)** | Indeks risiko bencana pada pusat- | 157,6 | 154,87 | 150,07 | 144,47 | 140,76 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | | | | | |
| 13 | **1.5.2.(a)** | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | 620 Milyar | 119.458.523.000 | 89.974.412.500 | 168.875.255.940 | 135.250.570.000 |
| 13.1 | **1.5.3*** | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 2** | | | | | | |
| 14.1 | **2.1.1*** | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | 10,1 | 10,79 (BPS) | 10,79 (BPS) | 7,84 (BPS) | 6,99 |
| 15 | **2.1.1.(a)** | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | 23,0 | 19 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia) | 21,7 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia) | 20,1% (SKI 2023) | 19,6 (SSGI 2024) |
| 15.1 | **2.1.2*** | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | 4,3 | 4,79 | 3,78 (BPS) | 3,63 (BPS) | 2,82 |
| 16 | **2.1.2.(a)** | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | 8.12* | 10.7* | Menunggu Rilis BPS | NA | NA |
| 16.1 | **2.2.1*** | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | 30,59 | 27.4 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia) | 27.2 (SSGI, Survey Status Gizi Indonesia) | 27,4 % (SKI 2023) | 23.3 (SSGI 2024) |
| 17 | **2.2.1.(a)** | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | NA | Tidak Ada Survei | Tidak Ada Survei | 17,2 %(SKI 2023) | NA |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.1 | **2.2.2*** | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | NA | 6,2% (SSGI, Survei Status Gizi Indonesia) | 8,3% (SSGI, Survei Status Gizi Indonesia) | 9,1% (SKI 2023) | 8 % (SSGI 2024) |
| 18 | **2.2.2.(a)** | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | 0,1 | 9,94 | 8,50 | 7,13 | 7,03 |
| 18.1 | **2.2.2.(b)** | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | 0,7 | 74,60 | 72,20 | 77,20 (BPS) | 77,58 |
| 19 | **2.2.2.(c)** | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | 84.9** | 80,1 | 83,1 | 85,3 | 87,74 |
| 19.1 | | Konsumsi ikan | 65,5 | 65,5 | 69,5 | 71,1 | 72,3 |
| 20 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 3** | | | | | | |
| 20.1 | **3.1.2*** | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | 97,7 | 95,04 | 94,8 | 98,82 (BPS) | 98,69 |
| 21 | **3.1.1*** | Angka Kematian Ibu (AKI). | 86,0 | 129/100.000KH | 174 kasus | 133/100.000 KH | 172 Kasus , 134/100.000 KH |
| 21.1 | **3.1.2.(a)** | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | 92,7 | 94.35 (95.44 BPS) | 94,32 | 96,61 (BPS) | 96,26 |
| 22 | **3.2.1*** | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | 5,0 | 6/1000 KH | 1176 kasus | 11/1.000KH | 1340 Kasus, 10/1.000 KH |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.1 | **3.2.2*** | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | 5,0 | 4/1000 KH | 954 kasus | 9/1.000KH | 1152 Kasus, 9/1.000 KH |
| 23 | **3.2.2.(a)** | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | 5,0 | 5/1000 KH | 1117 kasus | 10/1.000KH | 1305 Kasus, 10/1.000 KH |
| 23.1 | **3.2.2.(b)** | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | 73,8 | 91,67 | 100 | 100 | 41,7 |
| 24 | **3.3.3*** | Kejadian Malaria per 1000 orang | 103,0 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| 24.1 | **3.3.1.(a)** | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | 0,0 | 0,028 | 0,26 (RPD) | 0,27 | 0,4 |
| 25 | **3.3.2.(a)** | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | 160/100.000 Penduduk | 161/100.000 Penduduk | 228/100.000 Penduduk | 240/100000 penduduk | 324/100.000 penduduk |
| 25.1 | **3.3.3.(a)** | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | 21,0 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 26 | **3.3.4.(a)** | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | NA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.1 | **3.3.5*** | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | NA | 51,114 | NA | Filariasis : 56 Orang | Filariasis : 36 orang |
| 27 | | | 696 | | | | |
| 27.1 | **3.3.5.(a)** | Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta | 17,0 | 18 | 17 | 13 | 18 Kab/Kota |
| 28 | **3.3.5.(b)** | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi | NA | 0 Kab/Kota (Bukan Tahap Evaluasi/Survei) | NA | Eliminasi : 2 Kab./Kota | Eliminasi : 2 Kab./Kota |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | tahap I). | | | | | |
| 28.1 | **3.4.1.(a)** | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | 3,4 | 4.1 (20.47 BPS) | 2,35 | 7,87 | 11,28 |
| 29 | **3.4.1.(b)** | Prevalensi tekanan darah tinggi. | 3,5 | 9,06 | 25,18 | 4,19 | 6,97 |
| 29.1 | **3.4.1.(c)** | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | 2,8 | 2,33 | 3,40 | 10,03 | 29,79 |
| 30 | **3.4.2.(a)** | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | 22,0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 30.1 | **3.5.1.(e)** | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31 | **3.7.1.(a)** | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 73,7 | 73.41 (59.66 BPS) | 73,01 | 74,10 | 24,36 |
| 31.1 | **3.7.1.(b)** | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | 19,0 | 21,11 | 23,14 | 19,93 | 1.005 jiwa |
| 32 | **3.7.2*** | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | 29,0 | 27,4 | 29,50 | 24,40 | 29,5 |
| 1.2 | **3.7.2.(a)** | Total Fertility Rate (TFR) | 2,4 | 2,29 | 2,22 | 2 | 2,56 |
| 33 | **3.8.1(a)** | Unmet need pelayanan kesehatan | 5,7 | 4,22 | 7,15(BPS) | 4,92 | 5,34 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | **3.8.2*** | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk | 795 Jiwa | 8.484 Jiwa (786 Jiwa BPS) | 920 Jiwa | 1.000 Jiwa | 1.005 jiwa |
| 34 | **3.8.2.(a)** | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | 86,48% | 92.97 (76.39 BPS) | 97,03% | 101,19% | 100,51% |
| 3.2 | **3.a.1*** | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun | 24,9 | 21.11 (20.47 BPS) | 29,04 | 24,24 | 24,66 |
| 35 | **3.b.1.(a)** | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | 0,9 | 90% | 90% | 95% | 95% |
| 4.2 | **3.c.1*** | Rasio Tenaga Kesehatan | 23.4/100.000 penduduk | 24/100.000 Penduduk | 23,97/100.000 Penduduk (RPD) | 27,86/100.000 penduduk | 52,94/100.000 Penduduk (RPD) |
| 36 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 4** | | | | | | |
| 5.2 | **4.1.1.(c)** | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B | 88,5 | 88,09 | 76,15 | 76,64 | 79,93 |
| 37 | **4.1.1.(f)** | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat | 86,4 | 90.05 (87.07) | 101,02 | 88,04 | 90,94 |
| 6.2 | **4.1.1.(g)** | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | 8,9 | 8,46 | 8,63 | 8,76 | 9,22 |
| 38 | **4.3.1.(a)** | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat | 86,4 | 87,07 | 101,02 | 88,04 | 90,94 |
| 7.2 | **4.4.1*** | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | 88,8 | 94,10 | 73,16 (BPS) | 96,15 (BPS) | 96,49 (BPS) |
| 39 | **4.5.1*** | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) | 102,4 | 97.03 (60.32 BPS) | 99,67 | 101,01 | 110.47 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | | | | | |
| 8.2 | **4.6.1.(a)** | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | 92,6 | 92,48 | 93,31 | 93,83 | 94.11 |
| 40 | **4.6.1.(b)** | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | 99,7 | 99,78 | 96,55 | 99,87 (BPS) | 99,87 (BPS) |
| 41 | **4.c.1*** | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik | | 54,15 | 49,77 | 49,77 | 52,7 |
| 10.2 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 5** | | | | | | |
| 42 | **5.1.1*** | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | 4,0 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 11.2 | **5.2.1*** | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | 0,0 | 0,033 | 0,030 | 0,26 | NA |
| 43 | **5.2.1.(a)** | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | 0,0860 | 0,092 | 0,11 | 0,11 | NA |
| 12.2 | **5.2.2.(a)** | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | mendapat layanan komprehensif | | | | | |
| 44 | **5.2.2*** | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | 0,0 | 0,033 | 0,030 | 0,26 | NA |
| 13.2 | **5.3.1*** | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | 11,3 | 9,25 | 9,33 (BPS) | 9,33 | 8,09 |
| 45 | **5.3.1.(a)** | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | 20,0 | 21,5 | 21,5 | 22,3 | 22,3 |
| 14.2 | **5.3.1.(b)** | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | 29,1 | 27,4 | 29,50 | 24,40 | 26,2 |
| 46 | **5.3.1.(c)** | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat | 86,4 | 87,07 | 101,02 | 88,04 | 90,94 |
| 15.2 | **5.5.1*** | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah | 25,9 | 25,88 | 25,88 | 25,88 (BPS) | 25,88* |
| 47 | **5.5.2*** | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | 26,4 | 32,14 | 72* | 44,79 (BPS) | 44,79 |
| 16.2 | **5.6.1.(a)** | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang | 13,1 | 20 | 26,10 | 12,08 | 12,00 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | tidak terpenuhi). | | | | | |
| 48 | **5.b.1*** | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | 59,2 | 69,13 | 71,10 (BPS) | 69,83 (BPS) | 70,36 (BPS) |
| 17.2 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 6** | | | | | | |
| 49 | **6.1.1.(a)** | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | 44,4 | 91,18 (BPS) | 91,96 (BPS) | 92,12 (BPS) | 92,23 (BPS) |
| 18.2 | **6.1.1.(b)** | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | 9,00 | 8,83 | 11.509 | NA | NA |
| 50 | **6.1.1.(C)** | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | 18,8 | 15,13 | 91,96 | 92,12 | NA |
| 19.2 | **6.2.1.(a)** | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | 88,7 | 89,08 | 87,22 (BPS) | 85,82 | 85,66 (BPS) |
| 51 | **6.2.1.(b)** | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | 89,0 | 91,57 | 92,24 (BPS) | 85,03 | 93,83 (BPS) |
| 20.2 | **6.2.1.(c)** | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | 3,0 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | NA |
| 52 | **6.2.1.(d)** | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop | 2,7 | 2,863 | 3,013 | 3,047 | NA |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | | | | | |
| 21.2 | **6.2.1.(e)** | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | 24,0 | 24,00 | 16 | 3,00 | NA |
| 53 | **6.3.1.(a)** | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | 15,0 | 15,00 | 16 | 13,00 | NA |
| 22.2 | **6.3.2.(a)** | kualitas air danau | 0,0 | NA | NA | NA | NA |
| 54 | **6.3.2.(b)** | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku | 0,0 | NA | NA | 57,95 | NA |
| 23.2 | **6.5.1.(a)** | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | 0 RPDAST | 2 | 4 RPDAST | 4 RPDAST | 0 |
| 55 | **6.5.1.(c)** | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | 4 | 24 | 16 | 16 | NA |
| 24.2 | **6.5.1.(e)** | Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. | 90.425.79 | 175.507,49 | 196.745,33 | 206.793,00 | 221.535,43 |
| 56 | **6.5.1.(f)** | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat | 4 | 4 | 4 | 4 | NA |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | | | | | |
| 25.2 | **6.5.1.(g)** | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | 5 | 5 | 5 | 4 | NA |
| 57 | **6.6.1.(d)** | Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi. | 12,5 | 13.023 | 12.678,2 | 4.756 | 12.678,20 |
| 26.2 | **6.6.1.(e)** | Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | 4,0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 7** | | | | | | |
| 27.2 | **7.1.1*** | Rasio elektrifikasi | 98,4 | 98,72 (97.24 BPS) | 99,89 | 99,99 | 99,65 |
| 59 | **7.1.1.(a)** | Konsumsi listrik per kapita | 743,6 | NA | 848,93 | NA | 922,7 |
| 28.2 | **7.1.2.(b)** | Rasio penggunaan gas rumah tangga. | 89,98 | 91,67 (91,53 BPS) | 93,38 | 93,53 | 95,37 |
| 60 | **7.2.1*** | Bauran energi terbarukan | 20,7 | 22 | 27,59 | 28,82 | 27,33 |
| 1.3 | **7.3.1*** | Intensitas energi primer | NA | NA | NA | NA | NA |
| 61 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 8** | | | | | | |
| 2.3 | **8.1.1*** | Laju pertumbuhan PDRB per kapita | minus 1.55 | 3,66 (7.15 BPS) | 4,11 (BPS) | 6,66 (BPS) | 3,9 (BPS) |
| 62 | **8.1.1.(a)** | PDRB per kapita | 56,5 | 56.81 (59.66 BPS) | 39,12 (BPS) | 69,70 | 73,57 |
| 3.3 | **8.3.1*** | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | 43,2 | 46,27 | 35,17 | 46,11 | 44,11 |
| 63 | **8.3.1.(a)** | Persentase tenaga kerja formal. | 35,8 | 36,76 | 36,45 | 37,23 | 39,50 (BPS) |
| 4.3 | **8.3.1.(b)** | Persentase tenaga kerja informal | 91,7 | 33.24 (91.61 BPS) | 93,33 (BPS) | 92,59 | 90,41 (BPS) |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | sektor pertanian. | | | | | |
| 64 | **8.3.1.(c)** | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | 29,0 | 30,96379278 | 39,22 | NA | 16,53 |
| 5.3 | **8.5.1*** | Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam) | 19,2 | 19 217 | 15196 | 17.776 (BPS) | 17.776 (BPS) |
| 65 | **8.5.2*** | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | 6,3 | 5,72 | 4,51 (BPS) | 4,33 | 4,19 |
| 6.3 | **8.5.2(a)** | Tingkat setengah pengangguran | 10,0 | 7,42 | 6,23 (BPS) | 7,09 | 7,93 (BPS) |
| 66 | **8.6.1*** | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | 25,5 | 23,78 | 22,61 | 22,24 | 21,65 |
| 7.3 | **8.9.1*** | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | 2,8 | 1,18 | 1,32 | 1,34 | 1,36 |
| 67 | **8.9.1.(a)** | Jumlah wisatawan mancanegara | 6,6 | 3.641 | 70.997 | 110.892 | 141.034 |
| 8.3 | **8.9.1.(b)** | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | 8828147,0 | 9.858.971 | 7.590.063 | 23.913,021 (BPS) | 36.518.290 |
| 68 | **8.9.2*** | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | 3,7 | Tidak ada Survey | Tidak ada Survey | Tidak ada Survey | 17.860.502 |
| 9.3 | **8.10.1.(b)** | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | 30,0 | 30,41 | 35,76 | NA | 90,11 |
| 69 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 9** | | | | | | |
| 10.3 | **9.1.1.(c)** | Panjang jalur kereta api | 42,7 | 61 | 116 | 120,9 | 120,9 |
| 70 | **9.1.2.(b)** | Jumlah dermaga penyeberangan | 1,0 | 2 | 2 | 8 | 8 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.3 | **9.2.1*** | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita | 13,1 | 12,47 (12,5 BPS) | 13,42 (BPS) | 12,85 (BPS) | 13,02 |
| 71 | **9.2.1.(a)** | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | minus 4.42 | -0,27 (3,02 BPS) | 9,86 (BPS) | 4,26 (BPS) | 4,84 |
| 12.3 | **9.2.2*** | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | 8,2 | 16.35 (8.47 BPS) | 15,45 | 11,48 | 16,70 |
| 72 | **9.3.1*** | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri | 9,1 | 8,91 | 65 | 54,00 | 30,26 |
| 13.3 | **9.4.1(a)** | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | 3,0 | 3,88 | 7,85 | NA | 1,96 |
| 73 | **9.c.1*** | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband | 73,4 | NA | NA | 66,95 | NA |
| 14.3 | **9.c.1.(a)** | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | 85,3 | 86.75 (69.13 BPS) | 71,10 (BPS) | 69,83 (BPS) | 70,36 |
| 74 | **9.c.1.(b)** | Proporsi individu yang menggunakan internet | 49,6 | 59,69 (OPD) (BPS) | 64,14 | 66,95 | 70,1 |
| 15.3 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 10** | | | | | | |
| 75 | **10.1.1*** | Koefisien Gini | 0,4 | 0,382 | 0,377 | 0,377 (BPS) | 0,369 |
| 16.3 | **10.1.1.(a)** | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | 8,72 | 8,78 | 8,63 | 8,70 | 8,06 |
| 76 | **10.1.1.(b)** | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan | - | - | - | - | - |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.3 | **10.3.1.(a)** | Indeks Kebebasan Sipil | 68,4 | 88,18 | 83,39 | 81,70 | 81,7 |
| 77 | **10.4.1.(b)** | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | 78,0 | 47,12 | 49,43 | 29,83 | 52,07 |
| 18.3 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 11** | | | | | | |
| 78 | **11.1.1.(a)** | Proporsi rumah tangga yang memiliki akases terhadap hunian yang layak dan terjangkau | 64,2 | 69,11 | 69,90 (BPS) | 71,88 (BPS) | 71,86 (BPS) |
| 19.3 | **11.1.1.(b)** | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | 1 | 1 | 1 | 1 | NA |
| 79 | **11.1.1.(c)** | Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. | 10 | 10 | 10 | 2 | NA |
| 20.3 | **11.2.1.(a)** | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | 66,5 | NA | 7,83 | 34,32 | NA |
| 80 | **11.3.1.(a)** | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | 7 | 7 | 3 | 3 | NA |
| 21.3 | **11.3.1.(b)** | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | NA |
| 81 | **11.3.2.(a)** | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota | NA | NA | 21 | 51,00 | NA |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Berkelanjutan. | | | | | |
| 22.3 | **11.4.1.(a)** | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | 2 | 2 | 2 | 2 | NA |
| 82 | **11.5.1*** | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | | "Meninggal : 27 Terdampak : 21.470" | Meninggal : 32 Terdampak : 2312 | Meninggal : 19 Terdampak : 1,040 | Meninggal : 73 Terdampak : 9.086 |
| 23.3 | | Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang | Meninggal : 78 Terdampak : 70.854 | 27 | 32 | 19 | 73 |
| 83 | | Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang | - | 4 | 6 | 19 | 0 |
| 24.3 | | Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang | - | 76 | 46 | 31 | 68 |
| 84 | | Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang | - | 21.470 | 2.312 | 990 | 8.945 |
| 25.3 | **11.5.1.(a)** | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | 157,6 | 154,87 | 150,07 | 144,47 | 140,76 |
| 85 | **11.5.1.(b)** | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | 1,0 | - | NA | NA | NA |
| 26.3 | **11.5.1.(c)** | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | - | - | NA | NA | NA |
| 86 | **11.5.2.(a)** | Jumlah kerugian ekonomi | 620 Milyar | 119.458.623.000 | 89.974.412.500 | 168.875.255.940 | 135.250.570.000 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | langsung akibat bencana | | | | | |
| 27.3 | **11.b.2*** | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | **11.6.1.(a)** | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | 30,0 | 82,32 | 54,48 | 79 | 57,26 |
| 28.3 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 12** | | | | | | |
| 88 | **12.4.2.(a)** | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | 3.500.000 ton | 589007,56 Ton | 5.557.493.578 | 2.360.790,497 | NA |
| 29.3 | **12.5.1.(a)** | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | 20,0 | 31,82 Ton/Hari | 174,375 | 266,013951 | 366,09 |
| 89 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 13** | | | | | | |
| 30.3 | **13.1.1*** | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | **13.1.2*** | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Meninggal : 78 Terdampak : 70.854 | "Meninggal : 27 Terdampak : 21.470" | Meninggal : 32 Terdampak : 2,312 | Meninggal : 19 Terdampak : 1,040 | Meninggal : 73 Terdampak : 9.086 |
| 31.3 | | Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | 27 | 32 | 19 | 73 |
| 91 | | Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | 4 | 6 | 19 | 0 |
| 1.4 | | Jumlah korban terluka terkena | NA | 76 | 46 | 31 | 68 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | dampak bencana per 100.000 orang | | | | | |
| 92 | | Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang | NA | 21.470 | 2.312 | 990 | 8.945 |
| 2.4 | **13.2.1.(a)** | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 14** | | | | | | |
| 3.4 | 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha | 87,5 | 63,87 | 94,01 | 67,72 | 48,97 |
| 94 | **14.b.1*** | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4.4 | **14.b.1.(a)** | Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan | 19,0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 95 | **14.b.1.(b)** | Jumlah nelayan yang terlindungi. | NA | 660 | 0 | 0 | 10,000 |
| 5.4 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 15** | | | | | | |
| 96 | **15.1.1.(a)** | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | 56,6 | 31,56 | 31,56 | 32,53 | 32,43 |
| 6.4 | **15.2.1.(a)** | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya | 100,0 | NA | 55,46 | NA | - |
| 97 | **15.2.1.(b)** | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem | 12.000 Ha | - | - | 82.085,45 | - |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.4 | **15.2.1.(d)** | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | 16,0 | 16 | 24 | 24 | 4 |
| 98 | **15.3.1.(a)** | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | 0,3 | 0,73 | 0,71 | 73,26 | 0,002 |
| 8.4 | **15.9.1.(a)** | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| 99 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 16** | | | | | | |
| 9.4 | **16.1.1.(a)** | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | 71,0 | NA | - | 110 (KESBANGPOL) | NA |
| 100 | **16.1.4*** | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | NA | NA | - | NA | NA |
| 10.4 | **16.2.3.(a)** | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | 0,1 | 0,091 | 0,11 | 0,04 | NA |
| 101 | **16.2.1.(b)** | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | 0,0530 | 0,038 | 0,020 | 0,10 | NA |
| 11.4 | **16.2.1.(a)** | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | 51,3 | NA | NA | NA | NA |
| 102 | **16.6.1*** | Proporsi pengeluaran utama | NA | 98,44 | 98,62 | 93,54 | 95,34 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | | | | | |
| 12.4 | **16.6.1.(a)** | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | NA | WTP | WTP | 100 | 100 |
| 103 | **16.6.2.(a)** | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | 4.01 (A-) | 4,01 (A-) | 4,34 (A-) | 73,38 (C) | 90,00 (A) |
| 13.4 | **16.6.1.(b)** | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | 63.02 (B) | 63,02 (B) | 68,08 (B) | 68,78(B) | 69,02 (B) |
| 104 | **16.6.1.(c)** | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | 83,4 | 28,33 | 28.33 * | 50,01 | NA |
| 14.4 | **16.6.1.(d)** | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | 60.07 (B) | 60.07 (B) | 66,16 (B) | 74,21(BB) | 81,74 (BB) |
| 105 | **16.7.2.(a)** | Indeks Lembaga Demokrasi | 70,8 | 63,85 | 69,66 | 67,53 (BPS) | 67,53 (BPS) |
| 15.4 | **16.7.2.(b)** | Indeks Kebebasan Sipil | 68,4 | 88,18 | 83,39 | 81,7 (BPS) | 81,7 (BPS) |
| 106 | **16.7.2.(c)** | Indeks Hak-hak Politik | 65,0 | 73,06 | 86,09 | 79,52 (BPS) | 79,52 (BPS) |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.4 | **16.9.1.(a)** | Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran | 87,9 | 89,00 | 89,35 (BPS) | 92,68 (BPS) | 92,68 |
| 107 | **MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 17** | | | | | | |
| 17.4 | **17.1.1*** | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya. | 0,7 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,77 |
| 108 | **17.1.1.(a)** | Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB | 0,6 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,69 |
| 18.4 | **17.1.2*** | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik | 44,0 | 45,57 | 65,08 | 60,00 | 60,94 |
| 109 | **17.6.2.(c)** | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | 73,4 | NA | NA | 66,95 | NA |
| 19.4 | **17.8.1*** | Proporsi individu yang menggunakan internet. | 49,6 | 59,69 | 64,14 | 66,95 | 70,1 |
| 110 | **17.8.1.(a)** | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20.4 | **17.18.1.(a)** | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | 98,6 | NA | 92,01 | 98,45 | 98,48 |
| 111 | **17.18.1.(b)** | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan | 93,5 | 98,72 | 98,8 | 97,56 (BPS) | 100 |

| NO | Kode Indikator | Indikator | Capaian TPB/SDGs | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | utama. | | | | | |
| 21.4 | **17.18.1.(c)** | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | 11,0 | 75 | NA | 17 Metadata | 0 |
| 112 | **17.19.2.(b)** | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 22.4 | **17.19.2.(c)** | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | 100933,0 | 109.937,00 | NA | 176,03 | 178,30 |
| 113 | **17.19.2.(d)** | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | 92,7 | 96,3 | 98,8 | 90,20 | 100 |

### Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Pada Indikator 1.2.1 yang mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menunjukkan tren yang cukup fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan berada di angka 8,99 persen dan mengalami penurunan hingga mencapai 8,63 persen pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan tipis pada tahun 2023 menjadi 8,70 persen, tren secara umum tetap mencerminkan arah yang positif dengan proyeksi penurunan kembali di tahun 2024 sebesar 7,77 persen. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengurangan kemiskinan yang menjadi fokus utama Tujuan 1 SDGs, terutama melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi menandakan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan masih signifikan dan perlu diantisipasi secara sistematis. Faktor-faktor seperti dampak pandemi COVID-19, inflasi, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi determinan penting yang mempengaruhi capaian indikator ini. Oleh karena itu, pelaksanaan TPB/SDGs perlu terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor non-pemerintah dan masyarakat sipil, guna memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tren penurunan kemiskinan secara konsisten dari 8,72% di tahun 2020 menjadi 7,95% pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

### Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Pada Indikator 2.1.1(a) mengukur prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita sebagai bagian dari upaya menghapus kelaparan dan menjamin akses terhadap pangan yang bergizi. Berdasarkan data, prevalensi underweight mengalami tren penurunan dari 23,0 persen pada tahun 2020 menjadi 19,6 persen pada tahun 2024 (proyeksi SSGI 2024). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan status gizi anak-anak di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencerminkan keberhasilan intervensi di bidang ketahanan pangan, layanan kesehatan ibu dan anak, serta program pemberdayaan masyarakat di sektor gizi. Meskipun demikian, angka kekurangan gizi pada balita masih berada di atas ambang batas yang menjadi perhatian nasional dan global. Variasi data dari berbagai sumber seperti SSGI dan SKI juga menunjukkan pentingnya validasi dan harmonisasi data gizi secara berkala. Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan 2 SDGs, pemerintah daerah perlu terus mengintensifkan kolaborasi lintas sektor—termasuk dengan lembaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat sipil—untuk memastikan bahwa setiap anak balita mendapatkan asupan gizi yang cukup, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Hal ini krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Tren penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 23,0% di tahun 2020 menjadi 19,6% pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan status gizi anak secara bertahap meskipun sempat mengalami fluktuasi.

### Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Pada Indikator 3.2.2(a) mengukur Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup sebagai salah satu ukuran kunci dari kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di Provinsi Sulawesi Selatan, AKB tercatat sebesar 5,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 10 per 1.000 pada tahun 2023 dan 2024,

dengan jumlah kasus mencapai 1.305 pada 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, berdasarkan data BPS dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), AKB nasional pada tahun 2022 berada di angka sekitar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian Sulawesi Selatan yang tetap berada di bawah rata-rata nasional ini menunjukkan bahwa provinsi telah melakukan upaya yang relatif baik, meskipun tren peningkatan pada tahun-tahun terakhir tetap menjadi peringatan penting untuk peningkatan intervensi. Kenaikan AKB di Sulawesi Selatan perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan kualitas layanan antenatal dan neonatal, pemerataan akses fasilitas kesehatan, serta penanganan kondisi gizi ibu dan bayi. Faktor lain seperti keterlambatan penanganan komplikasi neonatal, kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil, dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat juga turut memengaruhi. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, diperlukan penguatan kemitraan lintas sektor, termasuk optimalisasi program Puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta kolaborasi dengan sektor non-pemerintah untuk mendukung pencapaian target nasional menurunkan AKB menjadi di bawah 10 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Aksi Nasional SDGs.

Tren peningkatan angka kematian bayi dari 5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020–2022 menjadi 10 per 1000 pada tahun 2023 dan 2024, menandakan perlunya perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

**Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

Indikator 4.3.1(a) yang mengukur Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/sederajat) merupakan cerminan dari seberapa luas akses pendidikan menengah bagi seluruh penduduk usia sekolah, termasuk mereka yang belajar di luar kelompok usia ideal. Berdasarkan data capaian, APK pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, APK tercatat sebesar 86,4 persen dan meningkat menjadi 87,07 persen pada tahun 2021. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan nilai 101,02 persen, yang mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi dari luar kelompok usia resmi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 88,04 persen (2023) dan 70,94 persen (2024), yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan pendidikan menengah ke depan.

Penurunan APK dalam dua tahun terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya angka putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, atau pergeseran minat siswa ke dunia kerja lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pencapaian sempat melebihi target pada 2022, tantangan keberlanjutan dan pemerataan akses pendidikan masih tinggi. Untuk mencapai target Tujuan 4 SDGs, dibutuhkan strategi yang lebih inklusif dan adaptif, seperti penguatan program beasiswa, penyediaan pendidikan berbasis vokasi, perluasan sekolah inklusif, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah menengah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Tren positif dalam partisipasi pendidikan menengah atas selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, APK berada di angka 86,4%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 87,07% pada 2021. Lonjakan signifikan terjadi di tahun 2022 dengan capaian 101,02%, yang mengindikasikan bahwa jumlah peserta didik melebihi usia ideal untuk jenjang tersebut. Namun, pada 2023 terjadi penurunan menjadi 88,04%, sebelum kembali meningkat ke 90,94% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan stabilitas dalam akses pendidikan menengah.

### Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Indikator 5.1.1 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang responsif gender sebagai bagian dari upaya mendorong kesetaraan serta pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data, jumlah kebijakan responsif gender di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 4 kebijakan pada tahun 2020 menjadi 8 kebijakan pada tahun 2022. Walaupun terjadi sedikit penurunan menjadi 7 kebijakan pada tahun 2023, tren keseluruhan tetap menunjukkan arah yang positif, dengan target pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 6 kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesetaraan gender secara bertahap telah diarusutamakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. Peningkatan jumlah kebijakan responsif gender menunjukkan bahwa upaya institusionalisasi pengarusutamaan gender (PUG) mulai menunjukkan hasil konkret, baik dalam bentuk regulasi, peraturan daerah, maupun program lintas sektor yang melibatkan perempuan secara aktif. Meski demikian, tantangan dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih perlu mendapatkan perhatian, seperti pada aspek penganggaran responsif gender, peningkatan kapasitas aparatur, dan mekanisme monitoring yang lebih inklusif. Untuk memperkuat pencapaian Tujuan 5 SDGs, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kesetaraan gender bukan hanya tujuan, tetapi juga prinsip dasar dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Jumlah kebijakan yang responsif gender di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 4 kebijakan menjadi 8 kebijakan, atau naik sebesar 100%. Namun, setelah mencapai puncak pada tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 7 kebijakan pada tahun 2022 Meskipun mengalami fluktuasi, secara keseluruhan tren menunjukkan bahwa upaya untuk mendukung pemberdayaan perempuan melalui kebijakan masih terus dipertahankan.

### Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi

Indikator 6.1.1(a) mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan. Berdasarkan data, capaian di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, hanya 44,4 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, namun capaian tersebut melonjak tajam menjadi 91,96 persen pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 92,12 persen pada tahun 2023. Target pada tahun 2024 pun tetap berada dalam kisaran tinggi, yakni 92,23 persen, menunjukkan konsistensi dalam pencapaian layanan dasar air bersih.

Kenaikan drastis dalam akses air minum layak mencerminkan keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik melalui program penyediaan infrastruktur air bersih, perluasan jaringan PDAM, maupun penyuluhan sanitasi berbasis masyarakat. Capaian ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup, pengurangan penyakit berbasis air, serta pemenuhan hak dasar masyarakat. Namun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan kualitas air sesuai standar kesehatan, keberlanjutan pasokan, serta pemerataan layanan ke wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan. Untuk menjamin capaian Tujuan 6 SDGs secara menyeluruh, dibutuhkan integrasi program lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Tren peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dari 44,4% pada tahun 2020 menjadi lebih dari 91% mulai tahun 2021 hingga mencapai 92,23% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam penyediaan layanan air bersih, namun tetap perlu dijaga keberlanjutannya agar seluruh masyarakat memperoleh akses merata.

**Tujuan 7 Energi Terjangkau dan Bersih**

Indikator 7.1.1 (a) mengukur konsumsi listrik per kapita sebagai representasi penting dari tingkat akses energi modern dan keterjangkauan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Sulawesi Selatan, data menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 743,6 kWh per kapita pada tahun 2020 menjadi 848,93 kWh di tahun 2022, dan kembali melonjak tajam menjadi 922,7 kWh pada tahun 2024. Meskipun data pada tahun 2021 dan 2023 tidak tersedia (NA), tren umum yang tampak jelas adalah adanya pertumbuhan positif konsumsi listrik per kapita, yang mencerminkan ekspansi jaringan listrik, pertumbuhan ekonomi rumah tangga, serta peningkatan aktivitas sosial dan produktif yang bergantung pada energi. Ketiadaan data pada tahun 2021 dan 2023 tidak serta merta mengaburkan gambaran capaian. Justru, lonjakan signifikan pada tahun-tahun dengan data yang tersedia menunjukkan adanya percepatan pemenuhan kebutuhan energi di tengah tantangan pemulihan pascapandemi dan peningkatan kebutuhan listrik di sektor rumah tangga dan UMKM. Hal ini juga memperlihatkan bahwa ketersediaan listrik tidak hanya menjadi komoditas, tetapi telah menjadi penopang utama pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Meski demikian, ketersediaan data yang konsisten perlu ditingkatkan untuk mendukung analisis yang lebih presisi dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam pelaksanaan SDGs Tujuan 7. Ke depan, Pemerintah Daerah perlu memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan energi, khususnya melalui sinergi dengan lembaga statistik dan penyedia energi, agar indikator ini tidak hanya terukur secara kuantitatif tetapi juga dimaknai secara strategis dalam konteks keadilan energi.

Tren peningkatan konsumsi listrik per kapita dari 743,6 kWh pada tahun 2020 menjadi 848,93 kWh di tahun 2022 dan mencapai 922,7 kWh pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan tumbuhnya kebutuhan energi seiring dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator 8.5.2* menggambarkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan disaggregasi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, yang berfungsi sebagai ukuran penting untuk menilai efektivitas pasar tenaga kerja dan kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja. Di Provinsi Sulawesi Selatan, data menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun: dari 6,3% pada tahun 2020 menjadi 5,72% (2021), 4,51% (2022), 4,33% (2023), dan mencapai 4,19% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan kinerja positif dalam pengurangan pengangguran terbuka, yang dapat dikaitkan dengan perbaikan iklim usaha, peningkatan partisipasi tenaga kerja produktif, serta kebijakan intervensi seperti pelatihan vokasi, perluasan akses lapangan kerja, dan pemberdayaan sektor informal dan UMKM. Meskipun demikian, angka TPT tersebut tetap harus dianalisis secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda yang secara historis memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap pengangguran. Perbaikan indikator ini juga mengisyaratkan bahwa pasar kerja di Sulawesi Selatan cenderung semakin inklusif, namun tetap dibutuhkan kebijakan afirmatif dan program peningkatan keterampilan yang berkelanjutan, agar penurunan TPT benar-benar mencerminkan kesempatan kerja yang layak dan merata, bukan sekadar pergeseran ke sektor informal

atau pekerja setengah pengangguran. Data ini juga perlu ditindaklanjuti dengan pemantauan ketenagakerjaan yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa penurunan pengangguran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dari 6,3% pada tahun 2020 menjadi 4,19% pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara bertahap, meskipun tetap diperlukan intervensi kebijakan untuk menjaga tren positif ini.

**Tujuan 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur**

Indikator 9.4.1(a) mengukur persentase emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor industri dan konstruksi terhadap total emisi, sebagai salah satu indikator penting untuk menilai komitmen terhadap pembangunan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu 2020–2024. Tercatat bahwa pada tahun 2020, kontribusi emisi GRK dari sektor ini berada di angka 3,0%, kemudian meningkat menjadi 3,88% pada tahun 2021, dan melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi 7,85%. Kenaikan tajam ini berpotensi mencerminkan peningkatan aktivitas industri dan konstruksi tanpa diimbangi dengan efisiensi energi atau teknologi rendah karbon yang memadai. Sayangnya, tidak terdapat data pada tahun 2023 (NA), sehingga sulit untuk melihat tren transisi di tahun tersebut. Namun pada tahun 2024, persentase emisi GRK justru mengalami penurunan drastis ke 1,96%, yang dapat mengindikasikan adanya intervensi kebijakan mitigasi emisi, penerapan teknologi hijau, atau perlambatan sektor industri. Fluktuasi tajam ini mengisyaratkan perlunya konsistensi kebijakan dan penguatan regulasi terhadap emisi industri, termasuk insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan teknologi bersih. Penurunan pada tahun 2024 harus ditindaklanjuti secara strategis agar menjadi tren berkelanjutan, bukan sekadar anomali atau dampak dari penurunan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi GRK di sektor industri dan konstruksi perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemantauan, pelaporan berbasis data, dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mendukung target penurunan emisi nasional dan komitmen global terhadap perubahan iklim.

Fluktuasi persentase perubahan emisi $CO_2$ dari tahun 2020 hingga 2024. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,85%, kemudian menurun tajam menjadi 1,96% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang perlu terus diperkuat.

**Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra – dan Antarnegara**

Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi nilai Indeks Kebebasan Sipil, yang pada awalnya 68,4 di tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 88,18 di tahun 2021, meskipun sedikit menurun ke 83,39 pada 2022 dan 81,70 pada 2023, namun tetap stabil di angka 81,7 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan akses demokratis, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan hak-hak sipil demi masyarakat yang inklusif dan setara. Keberlanjutan upaya ini krusial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi publik, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu terus memperkuat kerangka regulasi dan implementasi kebijakan guna menjamin kebebasan sipil sebagai fondasi pembangunan yang adil dan merata.

### Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan indikator 11.1.1(a), menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 64,2% pada 2020 menjadi 71,88% pada 2023, meskipun sedikit menurun marginal ke 71,86% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam menyediakan perumahan layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pembangunan perumahan subsidi, fasilitas dasar permukiman, dan regulasi yang inklusif. Capaian ini krusial untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup, namun upaya perbaikan kualitas permukiman perlu terus diperkuat, terutama di perkotaan padat dan wilayah pinggiran, demi pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif.

### Tujuan 12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Peningkatan Daur Ulang Sampah sebagai Wujud Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan di Sulawesi Selatan secara progresif telah mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan indikator Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan pada jumlah sampah yang berhasil didaur ulang selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah yang didaur ulang baru mencapai 20,0 ton/hari, kemudian meningkat menjadi 31,82 ton/hari pada tahun 2021. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan capaian sebesar 174.375 ton dan 266.013.951 ton, yang kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 366,09 ton pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini mencerminkan keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penguatan kebijakan 3R, serta peningkatan infrastruktur dan teknologi, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan sektor informal. Meskipun demikian, konsistensi data, standarisasi satuan, dan pengawasan kualitas pengolahan masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi multipihak, edukasi publik, dan integrasi sistem pengelolaan sampah berbasis digital untuk keberlanjutan dan dampak yang lebih luas.

### Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon, yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan seperti Program Kampung Iklim (Proklim) dari KLHK, apresiasi di bidang ekonomi hijau dari Bappenas, dan penghargaan khusus sebagai provinsi pertama yang menandatangani Nota Kesepahaman Pembangunan Rendah Karbon. Komitmen ini selaras dengan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, didukung oleh implementasi program FOLU Net Sink 2030 dan regulasi seperti Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi GRK. Pada bagan Indikator "Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)" mengkorfirmasi konsistensi ini, menunjukkan bahwa setelah tahun 2020 tanpa laporan, dokumen pelaporan telah tersedia secara berkelanjutan dari tahun 2021 hingga 2024, menegaskan keberlanjutan upaya pelaporan emisi di wilayah tersebut sebagai bagian dari capaian TPB/SDGs.

### Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan pencapaian yang konsisten dan stabil dalam SDG 14 (Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan) melalui indikator jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan, yang tercatat sebanyak 19 kabupaten/kota setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Konsistensi ini

menandakan keberhasilan daerah dalam mempertahankan dukungan finansial bagi sektor perikanan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong praktik perikanan yang lebih berkelanjutan.

### Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Upaya Pelestarian Ekosistem Daratan melalui Pengelolaan Tutupan Hutan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai upaya pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati. Pada indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian tutupan hutan tercatat sebesar 56,6%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 31,56%, dan hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 32,53% pada tahun 2023 serta 32,43% pada tahun 2024. Penurunan tajam dari tahun 2020 ke 2021 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari revisi metode pengukuran atau pembaruan data spasial yang lebih akurat, serta tekanan dari aktivitas alih fungsi lahan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, stabilitas angka sejak 2021 menandakan adanya upaya konsolidasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan tutupan hutan, antara lain: Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa, Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Peningkatan pengawasan kawasan konservasi serta, dan Penguatan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.

### Tujuan 16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 16, khususnya pada aspek penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan indikator 16.6.1(b), terjadi peningkatan yang konsisten pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 63,02 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 68,08 pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi menjadi 68,78 pada 2023, dan mencapai 69,02 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Indeks Lembaga Demokrasi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 63,85 dari capaian 70,8 di tahun 2020, namun pada tahun 2022 indeks ini meningkat menjadi 69,66, meskipun kembali stagnan di angka 67,53 pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas demokrasi mengalami fluktuasi, terdapat upaya untuk menjaga dan memperbaiki kinerja kelembagaan demokrasi di daerah. Secara umum, capaian indikator-indikator ini mencerminkan langkah positif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat institusi yang inklusif, efektif, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, damai, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian SDGs 17, khususnya melalui indikator rasio penerimaan pajak

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Capaian indikator 17.1.1(a) memperlihatkan tren positif dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020, rasio penerimaan pajak terhadap PDRB berada di angka 0,60 dan meningkat signifikan menjadi 0,71 pada tahun 2021. Kinerja tersebut berhasil dipertahankan pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio yang tetap stabil di angka 0,71. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,69, angka ini tetap menunjukkan efisiensi dan ketahanan fiskal daerah yang cukup baik.

Stabilitas rasio ini mengindikasikan upaya yang konsisten dalam memperkuat kapasitas institusi keuangan lokal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan daerah. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat posisi daerah dalam kemitraan global dan nasional untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

## 2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah terakhir dan transisi. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir sebagai existing condition, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun yang akan datang.

### 2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD, dan perkembangan neraca daerah.

#### 2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, secara khusus menguraikan perkembangan pendapatan daerah beserta rincian sumber-sumbernya, belanja daerah beserta rincian, serta pembiayaan daerah beserta dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok APBD dalam time *series* lima tahun dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah terakhir yang pelaksanaan kinerjanya dimulai pada Tahun 2020-2024.

Kinerja realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2020-2024 secara garis besar disajikan berdasarkan tingkat ketersediaan data berupa data realisasi APBD yang telah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD.

**Tabel II. 138**
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **I** | **PENDAPATAN** | **9.365.471.515.325** | **10.009.403.475.558** | **8.992.799.689.251** | **9.529.048.625.670** | **9.993.473.327.774** | 1,89 |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **3.890.209.264.433** | **4.469.113.381.188** | **4.865.959.663.141** | **5.183.999.557.070** | **5.375.772.310.935** | 8,50 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 3.362.622.269.609 | 3.846.736.206.985 | 4.304.408.133.491 | 4.643.444.800.691 | 4.815.250.272.748 | 9,47 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 36.925.738.354 | 38.393.202.133 | 44.123.975.319 | 43.691.978.727 | 311.808.984.452 | 157,89 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 115.022.553.678 | 115.551.932.611 | 135.416.485.452 | 134.625.075.430 | 136.080.962.805 | 4,54 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 375.638.702.791 | 468.432.039.458 | 382.011.068.878 | 362.147.702.220 | 112.632.090.929,87 | -16,96 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **5.399.732.629.887** | **5.426.146.349.398** | **4.096.755.656.038** | **4.332.408.701.241** | **4.607.941.482.306** | **-2,97** |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 272.130.329.571 | 342.218.564.517 | 370.281.320.124 | 300.683.356.808 | 367.902.367.000 | 9,38 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 2.349.993.034.000 | 2.389.264.771.373 | 2.340.040.525.000 | 2.528.731.264.500 | 2.666.244.873.049 | 3,28 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 2.773.109.266.316 | 2.718.050.528.881 | 1.386.433.810.914 | 1.431.521.335.933 | 1.554.821.078.257 | -9,78 |
| 1.2.4 | Dana Insentif Daerah | 4.500.000.000 | 24.505.833.000 | - | 54.571.497.000 | - | - |
| 1.2.5 | Insentif Fiskal | - | - | - | 16.901.247.000 | 18.973.164.000 | - |
| **1.3** | **Lain - lain Pendapatan yang Sah** | **75.529.621.005** | **114.143.744.972** | **30.084.370.072** | **12.730.367.241** | **9.759.534.533** | -25,88 |
| 1.3.1 | Hibah | 75.529.621.005 | 109.087.831.317 | 30.084.370.072 | 12.730.367.241 | 9.759.534.533 | -27,25 |
| 1.3.2 | Dana Penyesuaian | - | 5.055.913.655 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| **2** | **BELANJA** | **9.986.089.214.540** | **10.167.278.357.981** | **8.958.791.076.580** | **9.484.932.654.738** | **9.803.828.749.340** | **-0,21** |

| No. | Uraian | Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **6.183.511.903.579** | **6.857.353.136.963** | **5.469.900.491.664** | **5.878.274.978.127** | **6.617.522.134.804** | **2,68** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 3.090.728.322.975 | 3.150.808.679.546 | 3.021.164.476.315 | 3.334.595.367.224 | 3.791.498.138.530 | 5,48 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.386.238.190.089 | 2.182.638.535.516 | 2.207.814.014.152 | 2.136.800.929.402 | 2.082.611.349.730 | 13,21 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 2.476.741.949 | 10.130.133.771 | 2.481.726.342 | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - | 19.089.436.330 | 5.014.970.792 | -73,73 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 1.703.143.698.565 | 1.512.169.401.393 | 234.903.325.354 | 386.319.640.671 | 737.687.125.752 | 17,96 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 924.950.000 | 1.606.386.737 | 3.436.949.500 | 1.469.604.500 | 710.550.000 | 26,15 |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **1.195.023.369.928** | **1.459.719.789.007** | **1.100.866.806.729** | **951.163.583.896** | **1.284.274.501.375** | 4,75 |
| 2.2.1 | Belanja Modal | 1.195.023.369.928 | 1.459.719.789.007 | 1.100.866.806.729 | 951.163.583.896 | 1.284.274.501.375 | 4,75 |
| **2.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **267.767.739.486** | **124.260.826.404** | **43.860.368.898** | **6.386.615.620** | **1.179.338.000** | **-71,32** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 267.767.739.486 | 124.260.826.404 | 43.860.368.898 | 6.386.615.620 | 1.179.338.000 | -71,32 |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **2.339.786.201.547** | **1.725.944.605.605** | **2.344.263.409.297** | **2.649.107.477.094** | **1.900.852.775.161** | **-1,41** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 1.534.452.968.568 | 1.458.696.502.065 | 1.947.770.117.552 | 2.313.492.156.071 | 1.627.543.173.088 | 4,43 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 805.333.232.979 | 267.248.103.540 | 396.493.291.745 | 335.615.321.022 | 273.309.602.073 | -13,09 |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(620.617.699.215)** | **(157.874.882.423)** | **34.008.612.671** | **44.115.970.932** | **189.644.578.433** | **40,87** |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 72.064.281.794,49 | 388.460.295.868 | 219.428.919.962 | 119.559.610.837 | 27.297.659.973 | 68,21 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 937.145.602.574 | - | - | - | - | - |

| No. | Uraian | Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **1.009.209.884.368** | **388.460.295.868** | **219.428.919.962** | **119.559.610.838** | **27.297.659.973** | **-56,93** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | | 11.156.493.483 | 133.877.921.796 | 133.877.921.796 | 133.877.921.796 | **366,67** |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | | | | 2.500.000.000 | - | - |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | - |
| | Pengeluaran Pembiayaan \|Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0** | **11.156.493.483** | **133.877.921.796** | **136.377.921.796** | **133.877.921.796** | **366,68** |
| | **Pembiayaan Netto** | **1.009.209.884.368** | **377.303.802.385** | **85.550.998.166** | **(16.818.310.958)** | **(106.580.261.822)** | **68,53** |
| **3.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)** | **388.592.185.153** | **219.428.919.962** | **119.559.610.837** | **27.297.659.974** | **83.064.316.610** | **9,52** |

*Sumber : Bapenda, BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025, Diolah (Data Audited BPK).*

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020 – 2024 dari sisi realisasi pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari Rp. 9.365.471.515.325 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 9.993.473.327.774 pada Tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,89%. Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah selama periode 2020-2024 secara persentase pertumbuhan mempunyai pembentuk PAD yang berbeda-beda dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,50% dimana persentase Pertumbuhan yang paling tinggi berasal dari Retribusi Daerah sebesar 157,89 % sementara pertumbuhan yang paling rendah adalah lain-lain pendapatan yang sah sebesar -16,96%. Sementara Pajak daerah menunjukkan Peningkatan yang cukup besar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,47%. Secara umum persentase realisasi Pendapatan Asli daerah pada tahun 2024 terhadap pendapatan daerah sebesar 53,79% sementara persentase pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 46,11% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah Sulawesi Selatan semakin membaik sehingga pemerintah daerah lebih mandiri dan berinisiatif untuk menggali potensi baru.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait pendapatan pada periode ini adalah dinamika fluktuatif yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang mencerminkan respons fiskal terhadap kondisi nasional, kebijakan sektoral, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 9,36 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang hampir 41,5% dari total pendapatan, dengan dominasi dari Pajak Daerah. Tahun ini menandai awal dampak pandemi COVID-19, namun realisasi PAD tetap menunjukkan angka yang cukup tinggi, sementara Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi penopang utama keuangan daerah.

Tahun 2021 mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi Rp. 10,01 triliun. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi pasca awal pandemi dan adanya tambahan Dana Transfer, termasuk Dana Insentif Daerah serta hibah yang cukup signifikan. Meski pandemi masih berlangsung, adaptasi digitalisasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah menjadi faktor pendorong naiknya PAD. Pada tahun 2022, pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp.8,99 triliun. Penurunan paling mencolok terjadi pada Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai akibat dari peralihan skema penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang sebelumnya masih disalurkan melalui RKUD Pemerintah Provinsi, mulai pada tahun anggaran 2022 telah disalurkan langsung ke rekening sekolah, sehingga mempengaruhi nilai akumulasi pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD. Meski demikian, PAD tetap tumbuh seiring mulai pulihnya ekonomi dan meningkatnya kesadaran wajib pajak.

Tahun 2023 mencatatkan kenaikan pendapatan menjadi Rp. 9,52 triliun. Kinerja PAD terus membaik, sementara Dana Transfer juga mengalami sedikit pemulihan. Namun, terjadi penurunan tajam pada pos hibah, disebabkan oleh berakhirnya program-program dari Pemerintah Pusat seperti READSI dan IPDMIP, yang sebelumnya menyumbang cukup besar pada kategori Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.Memasuki tahun 2024, total pendapatan kembali naik signifikan menjadi Rp. 9,99 triliun. Pertumbuhan PAD mencapai puncaknya, didorong oleh relaksasi pajak daerah yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pendapatan Transfer juga meningkat, utamanya karena

bertambahnya jumlah pegawai PPPK yang secara langsung berpengaruh terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD selama periode ini cukup tinggi, yaitu sebesar 8,50%, jauh melampaui pertumbuhan rata-rata total pendapatan yang hanya 1,89%. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang mulai menurun terhadap dana transfer pusat dan meningkatnya kemandirian fiskal daerah, ditandai dengan kontribusi PAD yang sudah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Transfer dalam APBD.

Berkaitan dengan perkembangan belanja daerah, selama periode 2020-2024 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan belanja daerah tercatat tumbuh positif dengan capaian – 0,21 persen, dimana komponen alokasi belanja daerah yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada komponen belanja Modal yang rata-rata pertumbuhan mencapai 4,75 persen selama periode 2020-2024.

Dilihat dari struktur belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, nampaknya masih didominasi oleh alokasi belanja operasional. pada tahun 2024, alokasi belanja operasional mencapai 67,50 persen dari Rp 9,8 Trilyun realisasi total belanja daerah, selebihnya untuk belanja modal dialokasikan 13,10 persen, belanja tidak terduga sebesar 0,01 persen dan belanja transfer 19,39 persen. Fakta ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, terlebih lagi jika melihat persentase alokasi belanja modal terhadap realisasi belanja baru mencapai angka 13,10 persen, namun belanja modal ditahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 35,02 persen apabila dibandingkan belanja modal ditahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan penataan prioritas belanja yang cenderung untuk pemenuhan belanja pelayanan publik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri, belanja operasional setiap tahun juga mengalami peningkatan, yang disebabkan meningkatnya proporsi belanja pegawai akibat dari penerimaan CPNS dan PPPK yang menandakan tingginya kebutuhan pegawai, selain itu adanya penambahan alokasi untuk belanja hibah dalam rangka mendukung pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Pada komponen pembiayaan daerah, selama periode 2020-2024 secara rata-rata menunjukkan kecenderungan pembiayaan surplus, dimana pendapatan daerah lebih besar dibandingkan belanja daerah, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mencatat angka defisit sebesar Rp. 620,617 Milyar dan Rp. 157,874 Milyar. Dengan rata-rata pertumbuhan surplus APBD cenderung mengalami peningkatan, mengindikasikan pengelolaan alokasi belanja yang semakin efektif atau kemampuan meningkatkan pendapatan daerah yang semakin membaik.

Berkaitan dengan pembiayaan defisit, selama periode ini nampaknya pemerintah daerah Sulawesi Selatan telah mengambil langkah kebijakan ekspansif, dengan memperbesar alokasi belanja daerah untuk sektor-sektor ekonomi atau kegiatan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih akseleratif, khususnya dalam mendorong akselerasi kegiatan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

### 2.2.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pencatatan 2020-2024, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel II. 139**
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | 2020 (Juta) | 2021 (Juta) | 2022(Juta) | 2023 (Juta) | 2024 (Juta) | Rata-rata Pertumbuhan (persen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ASET** | | | | | | |
| 01.01 | Aset Lancar | 604.382,85 | 447.013,76 | 304.513,40 | 215.887,52 | 265.357,47 | -16,03 |
| 01.02 | Aset Tetap | 17.104.695,60 | 18.352.944,33 | 16.802.497,96 | 17.616.889,38 | 17.953.041,32 | 1,40 |
| 01.03 | Aset Lainnya | 409.759,04 | 347.374,86 | 412.608,50 | 453.407,66 | 381.823,27 | -0,43 |
| 01.04 | Investasi Jangka Panjang | 1.580.290,61 | 1.692.735,50 | 1.816.297,47 | 1.916.739,62 | 2.002.885,40 | 6,11 |
| | **JUMLAH ASET** | **19.636.742,69** | **20.902.452,51** | **19.335.917,21** | **20.202.924,20** | **20.603.107,56** | **1,36** |
| 2. | **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| 02.01 | Kewajiban Jangka Pendek | 995.300,34 | 1.121.351,71 | 1.222.180,14 | 1.709.104,01 | 1.661.460,49 | 14,68 |
| 02.02 | Kewajiban Jangka Panjang | 18.500,00 | 18.500,00 | 676.733,26 | 5.241.355,34 | 390.477,42 | 1034,99 |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **1.928.633,86** | **1.931.962,71** | **1.898.913,41** | **2.233.459,36** | **2.149.238,36** | 3,08 |
| 3. | **EKUITAS DANA** | **17.708.109,61** | **18.970.490,34** | **17.437.003,80** | **17.978.257,41** | **18.571.139,34** | **1,36** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **19.636.742,69** | **20.902.452,51** | **19,335,917,21** | **20.202.924,20** | **20.772.315,61** | **4,04** |

*Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025 (Data Audited BPK).*

#### 2.2.1.3. Aset Daerah

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2020-2024, Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 1,36 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi oleh Investasi jangka panjang lainnya yang mencapai 6,11 persen, kemudian aset tetap yang tumbuh 1,40 persen namun untuk aset lancar dan aset lainnya justru mengalami perlambatan yaitu aset lancar sebesar -16,03 persen dan aset lainnya sebesar -0,43 persen.

#### 2.2.1.4. Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Kewajiban daerah meningkat dengan rata-rata 3,08 persen. Semua komponen kewajiban daerah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada periode ini. Peningkatan terbesar ditunjukkan oleh kewajiban jangka panjang sebesar 1.034 persen dalam lima tahun tersebut. Sedangkan untuk kewajiban jangka pendek meningkat rata-rata 14,68 persen dalam lima tahun.

#### 2.2.1.5. Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Sulawesi Selatan selama periode 2020-2024, menunjukkan trend positif dengan pertumbuhan rata-rata 1,36 persen selama lima tahun tersebut. Berkat pertumbuhan ekuitas dana lancar, yang menggambarkan modal sendiri yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan tetap bertumbuh dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang sama-sama bertumbuh selama periode 2020-2024 tersebut.

### 2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiamana tergambar dalam APBD selama periode 2020-2024, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) Proporsi penggunaan anggaran dan (2) Hasil analisis pembiayaan daerah. Pada dua aspek ini dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

#### 2.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kebijakan pada sisi pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya daerah lainnya, khususnya pengelolaan sumberdaya alam daerah. Kebijakan dari sisi pendapatan daerah ini bukan hanya dapat dikreasikan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sangat tergantung kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sisi pendapatan ini, dua hal yang penting diperhatikan, yakni: (1) Upaya mengintensifkan pengelolaan pendapatan daerah pada yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi; dan (2) Melakukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik PAD maupun DBH pajak dan non pajak.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah, sedang dan perlu diterapkan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, antara lain: (1) Penguatan local taxing power, memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. (2) Mengoptimalkan pengelolaan obyek- obyek PAD potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan obyek-obyek PAD dan PAD Lainnya yang Sah, antara lain mengoptimalkan kinerja BUMD dan pengelolaan sumberdaya daerah lainnya. (3) Memperluas jangkauan kerjasama pemerintah daerah untuk sharing pembiayaan program-program pembangunan daerah yang bersifat strategis, seperti skim Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah tidak semata-mata terfokus pada peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan alokasi belanja daerah yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang.

#### 2.2.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu yang hal yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Jenis belanja terdiri atas: belanja operasional, meliputi belanja: (1) Belanja pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja Bunga, (4) Belanja Subsidi (5) Belanja Hibah dan (6) Belanja Bantuan Sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer meliputi (1) Belanja bagi hasil (2) Belanja Transfer. Alokasi belanja daerah tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik

untuk layanan publik maupun untuk penyelengaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

**Tabel II. 140**
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Prosentase |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (a)/(b) x 100% |
| 1 | **2020** | 3.090.728.322.975 | 9.986.089.214.540 | 30,95 |
| 2 | **2021** | 3.150.808.679.546 | 10.178.434.851.464 | 30,96 |
| 3 | **2022** | 3.021.164.476.315 | 9.092.668.998.376 | 33.23 |
| 4 | **2023** | 3.334.595.367.224 | 9.621.310.576.534 | 34.66 |
| 5 | **2024** | 3.791.498.138.530 | 9.937.706.671.136 | 38,15 |

Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025

Selama periode 2020-2024 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat. Alokasi belanja pada tahun 2020 mencapai 30,95 persen dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Pada tahun 2024, proporsi tersebut meningkat menjadi 38,15 persen. Peningkatan proporsi tersebut terutama didorong oleh peningkatan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang meningkat.

Dinamika proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2020-2024 ini merupakan gambaran kebijakan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah yang lebih mengarah pada upaya pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib layanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.2.3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir. Pada bagian ini akan dicermati kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, lebih mengarah pada pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Selanjutnya pada setiap kebijakan penganggaran tersebut, digambarkan komponen-komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pengeluaran pembiayaan kalau mencapai penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

**Tabel II. 141**
**Perhitungan Surplus/Defisit Riil Anggaran**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 ( Juta Rp) | 2021 ( Juta Rp) | 2022 ( Juta Rp) | 2023 ( Juta Rp) | 2024 ( Juta Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Realisasi Pendapatan Daerah | 9.365.471,51 | 10.009.403,47 | 8.992.799,68 | 9.529.048,62 | 9.993.473,32 |
| | **Di Kurangi Realisasi** : | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 9.986.089.21 | 10.167.278,35 | 8.958.791,07 | 9.484.932,65 | 9.803.828,75 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 11.156,49 | 133.877,92 | 136.377,92 | 133.877,92 |
| **Surplus/(Defisit) Riil** | | **(620.617,70)** | **(169.031,37)** | **(99.869,30)** | **(92.261,95)** | **55.766,65** |

Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025

Kondisi anggaran Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi defisit sejak tahun 2020 – 2023, kecuali pada tahun 2024 pada posisi surplus sebesar Rp.55,76 M. Pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.620,6 Milyar yang disebabkan belanja daerah lebih besar dari realisasi pendapatan daerah, namun mengalami penurunan defisit pada tiga tahun berikutnya hingga pada tahun 2023 posisi defisit sebesar Rp.92,2 Milyar. Pada tahun 2020, APBD Sulawesi Selatan mencapai defisit mencapai sebesar Rp. 620,6 Milyar yang disebabkan adanya rencana pinjaman pemerintah kepada PT SMI sebesar 1,4 Triliun lebih, dan pada tiga tahun berikutnya Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami defisit yang hingga tahun 2023 berada pada angka Rp. 92,2 Milyar, dikarenakan adanya pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman Namun di tahun 2024 APBD Sulawesi Selatan mencapai surplus sebesar Rp. 55,76 Milyar, yang menunjukkan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja daerah. Kebijakan pembiayaan pada periode 2020 - 2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara ekspansif mengakselerasi pembangunan daerah guna meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap tinggi dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan pembiayaan ini juga menggambarkan *effort* yang besar dari pemerintah daerah untuk lebih menguatkan peran Sulawesi Selatan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, tidak sekedar terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI), tetapi setara dengan kontributor utama perekonomian nasional di Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama ini.

**Tabel II. 142**
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Proporsi Dari Total Defisit Riil (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 7,14 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan | - | - | - | - | - |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 92,86 | - | - | - | - |

| No | Uraian | Proporsi Dari Total Defisit Riil (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - | - |

Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025

Selama periode 2020-2024, komposisi penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Komponen-komponen penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutupi defisit tidak nampak signifikan, kecuali pada tahun 2020 ini terdapat komponen penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah yang bersama-sama SiLPA menutup defisit pada tahun berkenaan.

Fakta ini mengindikasikan, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh pemerintah daerah bukan didasarkan pada sebuah kebijakan yang berorientasi ekspansif fiskal. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melebihi kemampuan fiskalnya untuk sebuah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih akseleratif dalam mendorong peluang-peluang ekonomi masyarakat secara luas.

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan, optimasi dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi sepenuhnya dan harus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh Provinsi Sulawesi Selatan selama ini, perlu lebih dicermati sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal, bukan persoalan teknis pencatatan dan pelaporan keuangan semata. Defisit anggaran harus bisa ditunjukkan keterkaitannya antara kebijakan perencanaan program pembangunan dengan kebijakan penganggaran daerah, sehingga melahirkan kebijakan umum anggaran berpijak secara nyata pada target-target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

**Tabel II. 143**
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp (Juta) | % dari SiLPA | Rp (Juta) | % dari SiLPA | Rp (Juta) | % dari SiLPA | Rp (Juta) | % dari SiLPA | Rp (Juta) | % dari SiLPA |
| 1. | Jumlah SiLPA | 72.064,28 | 100 | 388.460,29 | 100 | 219.428,91 | 100 | 119.559,61 | 100 | 27.297,66 | 100 |
| 2. | Pelampauan Penerimaan PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kegiatan Lanjutan | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

*Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2024*

### 2.2.3. Analisis Keuangan Daerah

### 2.2.3.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024. Berdasarkan rasio keuangan APBD tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayan daerah.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (fiscal space), serta rasio pajak (tax ratio). Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Di sisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung. Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020- 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/ dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar peleksanaan desentralisais fiskal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel II. 144**
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Total Pendapatan Transfer / Perimbangan (Rp) | Rasio Transfer terhadap Pendapatan Daerah |
|---|---|---|---|
| **2020** | 9.365.471.515.325 | 5.399.732.629.887 | 57,65 |
| **2021** | 10.009.403.475.558 | 5.426.146.349.398 | 54,21 |
| **2022** | 8.992.799.689.251 | 4.096.755.656.038 | 45,55 |
| **2023** | 9.529.048.625.670 | 4.332.408.701.241 | 45,46 |
| **2024** | 9.993.472.452.302 | 4.607.941.482.306 | 46,11 |

Sumber: BAPENDA Sulsel Tahun 2025

## 2. Rasio Fiskal Daerah

Ruang Fiskal Daerah Ruang fiskal (fiscal space) dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah atau secara sederhana dap at diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat untuk secara bebas dialokasikan sesuai kebijakan pemerintah daerah (diskresi) untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah. Ruang fiskal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

Pada Tahun 2020-2024 Kondisi ruang fiskal daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan trend fluktuatif yaitu pada Tahun 2020 capaiannya tercatat sebesar 36,56 Persen dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 46,44 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 50,63 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahah daerah yang implmemtasi dan pelaksanaanya dimulai Tahun 2017 dengan pengalihan beberapa urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi antara lain urusan pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, kehutanan dan kelautan.

Pengalihan tersebut berimplikasi pada pengalihan prasarana dan sarana dan pelimpahan pegawai negeri sipil yaitu guru SMA dan SMK maupun guru non PNS yang menyebabkan peningkatan secara signifikan pada belanja pegawai. Pengalihan urusan kewenangan pemerintahan tersebut menpengaruhi peningkatan alokasi pendapatan transfer dari pusat / dana perimbangan khususnya pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja gaji guru PNS tersebut dan peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik atau Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Sehubungan dengan hal tersebut untuk kedepannya perlu menentukan skala prioritas pembangunan untuk pengalokasian anggaran sesuai kelompok prioritas untuk menyelesaikan isu stratetgis dan permasalahan serta tantangan Pembangunan.

**Tabel II. 145**
**Ruang Fiskal Daerah**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Pendapatan Daerah | Pendapatan Hibah | Dana Alokasi Khusus | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Selisih | Ruang Fiskal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.365.471.515.325 | 75.529.621.005 | 2.773.109.266.316 | 3.090.728.322.975 | 2.476.741.949 | 3.423.627.563.080 | 36,56% |
| 2021 | 10.009.403.475.558 | 109.087.831.317 | 2.718.050.528.881 | 3.150.808.679.546 | 10.130.133.771 | 4.021.326.302.043 | 40,18% |
| 2022 | 8.992.799.689.251 | 30.084.370.072 | 1.386.433.810.914 | 3.021.164.476.315 | 2.481.726.342 | 4.552.635.305.608 | 50,63% |
| 2023 | 9.529.048.625.670 | 12.730.367.241 | 1.431.521.335.933 | 3.334.595.367.224 | 0 | 4.750.201.555.272 | 49,85% |
| 2024 | 9.993.472.452.302 | 9.759.534.533 | 1.554.821.078.257 | 3.791.498.138.530 | 0 | 4.637.393.700.982 | 46,40% |

*Sumber: BAPENDA & BKAD Sulsel Tahun 2025*

### 3. Rasio Pajak Daerah (Tax Ratio)

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (ekonomy), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di Provinsi Sulawesi Selatan akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait.

Rasio Pajak Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 yang semula 0,67 Persen menjadi 0,69 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tax rasio di Provinsi Sulawesi Selatan semakin meningkat dan kecenderungan tingkat kesadaran pajak semakin membaik dengan melihat trend peningkatan tersebut. Indikasi peningkatan angka tax rasio diantaranya berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pengampuh pendapatan serta unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi dan eksistensifikasi serta memberikan akses informasi dan kemudahan layanan transaksi seacara non tunai sehingga tingkat kesadaran dari pembayar pajak terus meningkat.

Tax Rasio sebesar 0,67 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistius sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah provinsi. Perhitungan tax rasio pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak air permukaan, pajak rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kerndaraan Bermotor sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat diperlukan untuk mendorong tax rasio yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan potensi daerah serta

sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mengetahui gambaran tax rasio pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel II. 146**
**Rasio Pajak (Tax Ratio)**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Pajak Daerah | Nilai PDRB | Tax Ratio |
|---|---|---|---|
| **2020** | 3.362.622.269.609,00 | 504.052.526.560.000 | 0,67 |
| **2021** | 3.846.736.206.985,26 | 544.857.139.630.000 | 0,71 |
| **2022** | 4.304.408.133.491,08 | 605.148.862.500.000 | 0,71 |
| **2023** | 4.643.444.800.691,78 | 652.574.052.400.000 | 0,71 |
| **2024** | 4.815.250.272.748,00 | 696.250.000.000.000 | 0,69 |

*Sumber: BAPENDA & BPS, data diolah*

### 4. Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 30,95 persen yang meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 38,67 persen. Peningkatannya disesuaikan dengan jumlah pegawai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambaran kondisi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 147**
**Rasio Belanja Pegawai**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Belanja Pegawai | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja |
|---|---|---|---|
| **2020** | 3.090.728.322.975 | 9.986.089.214.540 | 30,95 |
| **2021** | 3.150.808.679.546 | 10.167.278.357.981 | 30,98 |
| **2022** | 3.021.164.476.315 | 8.958.791.076.580 | 33,72 |
| **2023** | 3.334.595.367.224 | 9.484.932.654.738 | 35,15 |
| **2024** | 3.791.498.138.530 | 9.803.828.749.340 | 38,67 |

*Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025*

Berdasarkan Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, sehingga dengan kebijakan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2024 proporsi belanja pegawai diluar tunjangan guru masih mencapai 33,51 persen, sehingga Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan harus dapat menyesuaikan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diundangkan yakni paling lambat di tahun 2027.

**5. Rasio Belanja Modal**

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2020 berada pada angka 11,97 persen dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 13,10 persen dimana selama periode tersebut capaian tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 14,36 persen. Sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, yang berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang akan mempunyai dampak kedepan (forward lingkage) untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sektor swasta dan investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kelancaran distribusi dan peningkatan ekspor barang dan jasa.

Peningkatan belanja modal pada periode tersebut di prioritaskan pada belanja untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk peningkatan kondisi jalan yang semakin baik, pembangunan dan rehabilitasi infrasturktur irigasi, pembangunan stadion barombong, pembangunan sarana dan prasaran pelayanan publik disektor pendidikan dan kesehatan serta pembangunan kawasan center point of Indonesia. Namun demikian untuk kedepannya Pemerintah Provinsi juga mendorong belanja modal khususnya untuk pembangunan infrastruktur melalui bantuan keuangan kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana untuk mengimbangi kondisi mantap jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah.

Berikut untuk lebih jelasnya capaian kondisi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel II. 148**
**Rasio Belanja Modal**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Belanja Modal | Total Belanja | Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja |
|---|---|---|---|
| **2020** | 1.195.023.369.928 | 9.986.089.214.540 | 11,97 |
| **2021** | 1.459.719.789.007 | 10.167.278.357.981 | 14,36 |
| **2022** | 1.100.866.806.729 | 8.958.791.076.580 | 12,29 |
| **2023** | 951.163.583.896 | 9.484.932.654.737 | 10,03 |
| **2024** | 1.284.274.501.375 | 9.803.828.749.340 | 13,10 |

*Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025*

### 6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya. belanja perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

**Tabel II. 149**
**Rasio Belanja Daerah per Kapita**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Belanja | Jumlah Penduduk | Belanja Daerah per Kapita |
|---|---|---|---|
| **2020** | 9.986.089.214.540 | 9.073.509 | 1.100.576 |
| **2021** | 10.167.278.357.981 | 9.139.531 | 1.112.451 |
| **2022** | 8.958.791.076.580 | 9.225.747 | 971.064 |
| **2023** | 9.484.932.654.738 | 9.362.290 | 1.013.100 |
| **2024** | 9.803.828.749.340 | 9.463.390 | 1.035.974 |

*Sumber: Bappelitbangda Sulsel Tahun 2025*

### 2.2.3.2. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi Selatan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), nilai eksport dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024, dapat terlihat dominasi komponen rumah tangga sebesar 55,27 persen pada Tahun 2020, menurun menjadi 54,62 persen pada Tahun 2024 . Berdasarkan capaian tersebut Perekonomian Sulawesi Selatan menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah komponen PMTB, ekspor dan konsumsi pemerintah. Untuk komponen pembentukan PMTB pada Tahun 2020 sebesar Rp.198 Triliun lebih atau 39,45 persen meningkat menjadi Rp. 255 Triliun lebih atau 36,64 persen pada Tahun 2024 dari total PDRB. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel II. 150**
**Kontribusi PDRB menurut pengeluaran**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

| No | Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 278.594.012,06 | 291.310.156,70 | 321.248.967,27 | 349.916.907,68 | 380.351.650,38 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 7.913.775,35 | 8.013.492,17 | 9.072.729,65 | 10.417.789,85 | 12.703.929,35 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 49.049.825,78 | 53.469.944,51 | 53.099.868,32 | 55.092.665,55 | 59.783.041,89 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 198.850.094,50 | 211.613.905,02 | 226.106.916,78 | 246.718.869,33 | 255.144.256,56 |
| 5 | Perubahan Inventori | 676.785,14 | 382.970,37 | 1.754.577,34 | 214.650,28 | 432.267,99 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | 22.570.506,86 | 27.844.392,04 | 38.603.440,78 | 37.331.416,66 | 34.088.828,62 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 10.721.894,70 | 9.992.877,29 | 17.391.984,72 | 18.542.414,26 | 19.807.751,77 |
| 8 | Net Ekspor Antar Daerah | -42.880.578,43 | -37.784.843,90 | -27.345.652,92 | -28.146.532,13 | -26.443.458,25 |
| **Total PDRB** | | **504.052.526,56** | **544.857.139,63** | **605.148.862,50** | **652.574.052,40** | **696.252.764,78** |

*Sumber data : BPS Sulsel , Data diolah Tahun 2025*

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu 5 tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami penurunan dari 20,35 persen pada tahun 2020 menjadi 16,39 persen pada Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel II. 151**
**Kontribusi PDRB menurut pengeluaran**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Tahun | Konsumsi Pemerintah | Total Belanja APBD | Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah |
|---|---|---|---|
| **2020** | 49.049.825.780.000 | 9.986.089.214.540 | 20,35 |
| **2021** | 53.469.944.510.000 | 10.167.278.357.981 | 19,01 |
| **2022** | 53.099.868.320.000 | 8.958.791.076.580 | 16,87 |
| **2023** | 55.092.665.550.000 | 9.484.932.654.738 | 17,21 |
| **2024** | 59.783.041.890.000 | 9.803.828.749.340 | 16,39 |

*Sumber data : BPS Sulsel , Data diolah Tahun 2025*

Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 tahun terakhir yang belum mengalami peningkatan yang signifikan meskipun meningkat. Belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB seperti Tabel di bawah ini:

**Tabel II. 152**
**Kontribusi APBD terhadap PDRB**
**Pada Komponen Pembentukan PMTB Tahun 2020-2024**

| Tahun | Komponen PMTB | Total Belanja Modal | Share Belanja Modal terhadap Komponen PMTB |
|---|---|---|---|
| **2020** | 198.850.094.500.000 | 1.195.023.369.928 | 0,60 |
| **2021** | 211.613.905.020.000 | 1.459.719.789.007 | 0,69 |
| **2022** | 226.106.916.780.000 | 1.100.866.806.729 | 0,49 |
| **2023** | 246.718.869.330.000 | 951.163.583.896 | 0,39 |
| **2024** | 255.144.256.560.000 | 1.284.274.501.375 | 0,50 |

*Sumber: BPS Sulsel , Data diolah Tahun 2024*

### 2.2.4. Rasio Keuangan (Likuiditas. Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 akan dijelaskan sebagai berikut:

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 153**
**Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan**
**Tahun 2020-2024**

| Rasio Lancar (Tahun) | Kas | Utang Jangka Pendek | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **2020** | 388.596.810.192,67 | 995.300,340.000,00 | 39,04 |
| **2021** | 220.367.274.986,77 | 1.121.351.014.296,71 | 19,65 |
| **2022** | 120.000.547.643,51 | 1.222.180.144.962,31 | 9,82 |
| **2023** | 27.321.238.977,27 | 1.709.104.019.110,14 | 1,60 |
| **2024** | 83.169.983.807,57 | 1.661.460.497.649,98 | 5,01 |

Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2024 sebesar 9,95 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,82 persen Hal ini berarti pengaruh

hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2024 lebih tinggi dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 154**
**Rasio Total Hutang terhadap Aset**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| Rasio hutang Terhadap Aset (Tahun) | Total Kewajiban | Total Aset | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **2020** | 1.928.633.860.000 | 19.636.742.690.000 | 9,82 |
| **2021** | 1.931.962.201.592 | 20.902.452.544.526 | 9,24 |
| **2022** | 1.898.913.410.461 | 19.335.917.217.755 | 9,82 |
| **2023** | 2.233.459.362.813 | 20.211.716.777.331 | 11,05 |
| **2024** | 2.051.937.919.556,98 | 20.623.077.657.411 | 9,95 |

*Sumber: BKAD Sulsel Tahun 2025*

### 2.2.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil provinsi ke kabupaten/kota adalah mekanisme pembagian dana yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi tersebut yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, dan membantu daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta infrastruktur. Dana Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota bersumber dari dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Berikut disajikan realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 pada tabel berikut dibawah ini.

**Tabel II. 155**
**Realisasi Dana Bagi Hasil**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Bulan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur |
| 1 | Januari | 117.236.150.897 | | 105.698.403.695 | | 130.108.388.622 | | 121.999.545.090 | | 119.941.687.261 | |
| 2 | Februari | 92.603.279.072 | | 82.444.122.261 | | 104.609.851.564 | | 149.817.987.844 | | 109.700.679.562 | |
| 3 | Maret | 92.603.279.072 | | 87.619.258.027 | | 112.203.617.154 | | 116.697.346.725 | | 141.188.564.708 | |
| 4 | April | 91.979.639.659 | | 92.570.536.823 | | 140.647.499.034 | | 146.662.921.896 | | 148.022.217.682 | |
| 5 | Mei | 54.600.388.261 | | 112.392.203.678 | | 101.163.813.308 | | 121.913.162.336 | | 127.972.674.814 | |
| 6 | Juni | 73.035.672.150 | | 109.862.287.881 | | 107.274.777.072 | | 116.225.578.331 | | 17.042.423.362 | 120.406.597.243 |
| 7 | Juli | 90.613.212.066 | | 115.413.708.293 | | 150.765.470.147 | | 154.589.424.949 | | | 132.513.615.566 |
| 8 | Agustus | 79.356.304.130 | | | 94.375.940.495 | 19.800.889.188 | 91.448.408.226 | 127.324.835.385 | | | 160.870.333.008 |
| 9 | September | 92.288.106.682 | | | 108.746.543.960 | | 120.439.260.750 | 129.176.174.137 | | | 140.013.742.966 |
| 10 | Oktober | | 103.200.740.567 | | 126.670.862.390 | | 119.070.697.547 | | 162.597.701.256 | | 147.934.248.148 |
| 11 | November | | 97.219.013.559 | | 116.918.254.294 | | 159.871.313.834 | | 130.655.582.981 | | 135.289.878.411 |
| 12 | Desember | | 105.224.030.269 | | 140.346.513.993 | | 137.476.134.600 | | 170.380.328.938 | | 212.013.001.763 |
| | **Jumlah** | **784.316.031.989** | **305.643.784.395** | **706.000.520.658** | **587.058.115.132** | **866.574.306.089** | **628.305.814.957** | **1.184.406.976.693** | **463.633.613.175** | **663.868.247.389** | **1.049.041.417.105** |

*Sumber : BKAD Provinsi, 2025*

Realisasi dana bagi hasil Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten/Kota pada tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami peningkatan pada periode 2020 – 2023 namun menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2020 realisasi dana bagi hasil disalurkan sebesar Rp.784 Milyar untuk kurun waktu 9 Bulan dengan dana bagi hasil yang belum disalurkan sebesar Rp.305 Milyar untuk kurun waktu 3 bulan. Untuk tahun 2021 tercatat dana bagi

hasil yang disalurkan sebesar 706 Milyar untuk kurun waktu 7 bulan, meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 866 Milyar untuk kurun waktu 8 Bulan. Untuk Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten / Kota tercatat pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.184 Triliun untuk kurun waktu 9 bulan dengan dana bagi hasil yang belum disalurkan hanya sebesar Rp.463 Milyar untuk kurun waktu 3 bulan. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 663 Milyar untuk kurun waktu 6 bulan dan menyisakan dana bagi hasil kurang salur yang cukup besar yaitu Rp. 1.049 Triliun untuk kurun waktu 6 bulan.

### 2.2.6. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasari asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial tertentu daerah Sulawesi Selatan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas fiskal daerah yang dapat dialokasikan untuk alokasi belanja langsung daerah ke depan. Pada poin kapasitas fiskal riil ini, penganggaran sudah harus ditunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

#### 2.2.6.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat tertentu memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerahnya ke depan.

**Tabel II. 156**
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030**

| No | Indikator | Baseline 2024 | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,02 | 5,0 - 5,8 | 5,2 -6,5 | 5,4-7,8 | 5,6-7,5 | 6,2-8,2 | 6,3-8,5 |
| 2 | Tingkat Pengangguran (%) | 4,19 | 3,80-4,10 | 3,64-4,03 | 3,49-3,96 | 3,33-3,89 | 3,50-3,97 | 3,02-3,76 |
| 3 | Indeks Gini Ratio | 0,360 | 0,350 - 0,360 | 0,348 - 0,358 | 0,346 - 0,356 | 0.342 - 0,352 | 0,330 - 0,335 | 0,328 - 0,333 |
| 4 | PDRB Per Kapita (Rp juta) | 73,57 | 76,58 – 80,16 | 80,5-84,9 | 85,06 - 89,37 | 86,07 – 93,43 | 94,06 – 117,11 | 98,71 – 120,13 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,77 | 7,30-7,89 | 6,5 – 7,0 | 6,44 - 6,86 | 6,38-6,54 | 3,49-4,49 | 3,48-4,48 |
| 6 | Indeks Modal Manusia | N.A | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |

*Sumber: Proyeksi Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

Asumsi makro ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Sulawesi Selatan lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks gini ratio, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan indeks modal manusia (IMM). Keenam indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga Sulawesi Selatan tetap diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Sulawesi Selatan akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relatif peringkatnya secara nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Sulawesi Selatan juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomimasyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Sulawesi Selatan yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia

### 2.2.6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah.

#### 2.2.6.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Selama periode 2025-2030, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 10,402 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 12,317 Triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan peningkatan pendapatan transfer pada kelompok pendapatan

Transfer khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi tingkat rata-rata pertumbuhannya masih lebih kecil dibanding komponen PAD. Hal ini karena komponen DAU dan DAK tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat. Sedangkan PAD merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Sulawesi Selatan sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern, membuat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dalam memenuhi kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut terlihat pada proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2025-2030 diproyeksikan rata-rata sebesar 52,91 persen dibandingkan proporsi dari dana transfer yang mencapai rata-rata 47,01 persen dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 0,08 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2025-2030 kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah dengan rata-rata mencapai 83,88 persen.

   Dalam Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dengan memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, seperti:

   a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal (masa pajak selama satu tahun) dihitung berdasarkan potensi objek pajak pada akhir tahun 2024 dan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru selama 5 tahun terakhir. Prediksi perubahan jumlah objek tersebut hingga tahun 2030 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
      - Besaran tarif PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      - Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang (tunggakan) setiap tahunnya;
      - Prediksi pertumbuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari trend realisasi beberapa tahun terakhir;
      - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru;
      - Kebijakan Opsen sebesar 66 % kepada Kabupaten/Kota;
      - Kebijakan Penerapan Objek Pajak Baru untuk Pajak Kendaraan di atas air.
   b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru dan sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan potensi perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Sulawesi Selatan dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing, dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beberapa tahun terakhir;

d) Pajak Air Permukaan, diproyeksikan berdasarkan potensi konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang mengatur tata cara penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan, fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Air Permukaan beberapa tahun terakhir;

e) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi serta proporsi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total jumlah penduduk nasional. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen untuk mengalokasikan sebesar 50 persen penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.

f) Pajak Alat Berat, Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak ini diatur dengan rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan diberlakukannya Pajak Alat Berat di Sulawesi Selatan mulai tahun 2024, peraturan ini menjadi titik fokus perhatian para pemilik dan pengguna alat berat. Tarif Pajak Alat Berat ditetapkan sebesar 0,2% yang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Alat Berat dengan tarif Pajak Alat Berat.

g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB dihitung 25% dari besaran pajak terutang. Opsen MBLB ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak dari daerah kota/kabupaten.

2. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.

3. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berdasarkan arahan undang-undang No.1 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah telah memperhitungkan kebijakan Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang sebelumnya menggunakan skema bagi hasil pajak juga telah memperhitungkan pendapatan Opsen Pajak MBLB dari hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota.

4. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut. kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga.

Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah melalui dua Pola Pendekatan, yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Pola Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada. Sedangkan Pola Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali ataupun mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baru yang belum dipungut.

Penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada:

- Konsistensi atas MoU yang telah ditandatangani Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Kepala Bapenda Provinsi dengan masing-masing Kepala Bapenda Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB;
- Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penagihan tunggakan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dalam bentuk kegiatan door to door yang rencananya akan dilaksanakan selama 3 tahun.
- Pada retribusi pelayanan kesehatan mengalami penyesuaian tarif dan dengan melihat tren penerimaan BLUD kurun waktu 5 tahun terakhir.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan meningkat dengan asumsi kemandirian suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan itu sendiri serta didukung oleh peningkatan penyertaan modal yang nantinya akan mendongkrak penerimaan deviden hingga tahun 2027. Sementara di tahun 2028-2030 yang mempengaruhi peningkatan pendapatan secara signifikan bersumber dari adanya lahan Ex - PT. Vale yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi diproyeksikan sudah beroperasi dan menghasilkan sumber PAD yang baru.
- Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengakomodasi Objek Retribusi baru yang belum diatur dalam peraturan daerah ini.
- Melakukan revisi terhadap peraturan gubernur yang mengatur tentang tarif retribusi.

#### 2.2.6.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selama periode 2025-2030, mengalami pertumbuhan Belanja Daerah rata-rata sebesar 3,50%, hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak/non pajak, serta dana perimbangan. Untuk Tahun 2025 Belanja Daerah sebesar Rp 10.334 Triliun, seiring dengan tren peningkatan pendapatan maka Belanja Daerah pada Tahun 2030 menjadi Rp 12,267 Triliun. Proyeksi Kebutuhan belanja daerah sebagaimana tersebut di atas rata-rata didominasi oleh Belanja Operasi, menyusul Belanja Transfer, namun secara persentase pertumbuhan didominasi oleh belanja modal yaitu sebesar 20,29%.

Belanja Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp10.334.427.358.365 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 6.570.256.746.015 atau dengan jumlah persentase sebesar 63,5%, mengalami peningkatan rata-rata selama periode 2025-2030 sebesar 1,56% sehingga pada tahun 2030 belanja operasi menjadi sebesar Rp7.064.360.151.169 namun secara persentase dari total belanja pada tahun 2030 turun menjadi 57,58%. Belanja Operasi pada tahun 2025 didominasi oleh belanja pegawai sebesar 61,86% atau sebesar Rp4.046.739.420.531 dan pada tahun 2030 menjadi sebesar Rp4.461.126.473.011 atau 63,18% dari total Belanja Operasi. Komponen belanja Operasi yang juga dominan yaitu Belanja Barang dan Jasa dimana pada tahun 2025 yaitu sebesar 21,92% atau sebesar

Rp2.265.833.561.429, sedangkan pada tahun 2030 menjadi sebesar Rp1.951.349.384.899 atau 27,62%.

Selanjutnya komponen Belanja Daerah yang berikutnya adalah Belanja Modal, belanja modal selama periode 2025-2030 mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup besar yaitu 20,29%. Pada tahun 2025 Belanja Modal sebesar Rp1.491.074.471.477 atau 14,42% dari total Belanja Daerah, terus mengalami peningkatan setiap tahun sehingga pada tahun 2030 menjadi sebesar Rp3.380.747.869.903 atau 27,59% dari total Belanja Daerah.

Jenis Belanja Daerah selanjutnya adalah Belanja Tidak Terduga yang mengalami rata-rata penurunan pertumbuhan pada periode 2025-2030 sebesar -11,92%. Belanja Daerah yang terakhir adalah Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan juga mengalami rata-rata penurunan pertumbuhan pada periode 2025-2030 sebesar -3,68%.

### 2.2.6.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pada Tahun 2025 diproyeksikan Rp. 67,93 Milyar dan Tahun 2030 Rp. 50 Milyar. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah. Selain itu, pembiayaan alternatif dalam APBD, dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha disingkat KPBU yang merupakan suatu kerjasama antara pemerintah dan badan usaha/swasta dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik untuk kepentingan umum, yang bertujuan mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan nasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

1. Penerimaan Pembiayaan
   Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :
   a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berjalan, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional
   b) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
2. Pengeluaran Pembiayaan
   Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang pada Tahun 2025 diproyeksikan Rp. 134 Milyar bersama penyertaan modal sebesar Rp. 17

Milyar Dan Tahun 2030 diproyeksikan Rp. 50 Milyar untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

   Pemerintah Provinsi akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

   Berikut ini disajikan proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2025-2030.

**Tabel II. 157**
**Proyeksi Kerangka Pendanaan**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030**

| Uraian | BASELINE 2024 | Proyeksi (Rp) | | | | | | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **PENDAPATAN** | | | | | | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | 5.375.772.310.935,00 | 5.572.867.004.754,00 | 5.758.970.967.028,49 | 6.096.972.774.241,55 | 6.249.502.055.133,28 | 6.363.991.966.782,23 | 6.544.429.048.313,43 | 3,28 |
| Pendapatan Transfer | 4.607.941.482.306,00 | 4.822.137.793.000,00 | 5.226.045.838.300,00 | 5.435.758.155.145,65 | 5.609.030.297.326,30 | 5.647.479.509.499,75 | 5.763.521.215.972,35 | 3,66 |
| Lain - lain Pendapatan yang Sah | 9.759.534.533,00 | 7.358.244.000,00 | 8.998.280.880,00 | 9.178.246.497,60 | 9.453.593.892,53 | 9.642.665.770,38 | 9.835.519.085,79 | 6,26 |
| **Jumlah Pendapatan** | **9.993.473.327.774,00** | **10.402.363.041.754,00** | **10.994.015.086.208,50** | **11.541.909.175.884,80** | **11.867.985.946.352,10** | **12.021.114.142.052,40** | **12.317.785.783.371,60** | **3,45** |
| **BELANJA DAERAH** | | | | | | | | |
| Belanja Operasi | 6.617.522.134.804,00 | 6.570.256.746.015,00 | 6.321.649.238.848,00 | 6.120.108.283.441,00 | 6.641.102.925.090,00 | 6.834.228.011.778,00 | 7.064.360.151.169,00 | 1,56 |
| Belanja Modal | 1.284.274.501.375,00 | 1.491.074.471.477,00 | 2.547.385.429.287,00 | 3.112.820.249.970,00 | 3.265.205.258.963,00 | 3.314.208.367.974,00 | 3.380.747.869.903,00 | 20,29 |
| Belanja Tidak Terduga | 1.179.338.000,00 | 49.500.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | (11,92) |
| Belanja Transfer | 1.900.852.775.161,00 | 2.223.596.140.874,00 | 1.965.980.418.073,00 | 2.149.980.642.474,00 | 1.802.677.762.300,00 | 1.802.677.762.300,00 | 1.802.677.762.300,00 | (3,68) |
| **Jumlah Belanja** | **9.803.828.749.340,00** | **10.334.427.358.366,00** | **10.855.015.086.208,00** | **11.402.909.175.885,00** | **11.728.985.946.353,00** | **11.971.114.142.052,00** | **12.267.785.783.372,00** | **3,50** |
| **Surplus / Defisit** | **189.644.578.433,00** | **67.935.683.389,00** | **139.000.000.000,00** | **139.000.000.000,00** | **139.000.000.000,00** | **50.000.000.000,00** | **50.000.000.000,00** | **8,12** |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 27.297.659.973 | 83.064.316.611,00 | - | - | - | - | - | - |
| Pengeluaran | 133.877.921.796,00 | 151.000.000.000,00 | 139.000.000.000 | 139.000.000.000 | 139.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | **-14,4** |

| Uraian | BASELINE 2024 | Proyeksi (Rp) | | | | | | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Pembiayaan | | | | | | | | |
| **Pembiayaan Netto** | **(106.580.261.822,73)** | **(67.935.683.389)** | **(139.000.000.000)** | **(139.000.000.000)** | **(139.000.000.000)** | **(50.000.000.000)** | **(50.000.000.000)** | (8,12) |
| **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)** | **83.063.316.610,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |

*Sumber : Bapenda & BKAD Provinsi Sulsel, 2025*

### 2.2.7. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya seperti yang ditunjukkan kepada kerangka dibawah ini :

**Gambar II.9.**
**Kerangka Pendanaan Keuangan Daerah**

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :
   a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Belanja Fungsi Kesehatan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana tetap mengalokasikan 10 persen dari APBD;
   c. Belanja Infrastruktur pelayanan publik, paling rendah 40 persen dari total belanja daerah tidak termasuk belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; dan
   d. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

   Selain itu, prioritas pertama juga dialokasikan dalam mendukung prioritas nasional.
2. Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2025 – 2029, dan
3. Prioritas ketiga digunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Nilai kapasitas riil pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026–2030, pembagian alokasi anggaran kapasitas riil ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel II. 158**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**
**Provinsi Sulawesi Selatan untuk Mendanai Pembangunan Daerah**
**Tahun 2025 – 2030**

| No | Uraian | | Sesuai Permendagri 62 Tahun 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Proyeksi (Rp.) | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 5.572.867.004.754 | 5.758.970.967.028,49 | 6.096.972.774.241,55 | 6.249.502.055.133,28 | 6.363.991.966.782,23 | 6.544.429.048.313,43 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 2.919.993.953.000 | 3.129.571.015.410,00 | 3.252.011.708.401,05 | 3.367.665.404.013,43 | 3.384.953.321.998,22 | 3.403.201.347.603,02 |
| 3 | Dana Bagi Hasil | 306.507.794.000 | 346.284.335.880,00 | 353.210.022.597,60 | 363.742.122.823,58 | 367.379.544.051,82 | 374.727.134.932,85 |
| **Total Penerimaan** | | **8.763.506.943.928** | **9.234.826.318.318** | **9.702.194.505.240** | **9.980.909.581.970** | **10.116.324.832.832** | **10.399.939.547.839** |
| | | | | | | **Dikurangi** | |
| 4 | Belanja Pegawai | 4.046.739.420.531 | 4.018.174.207.584 | 4.186.663.490.758 | 4.285.486.521.902 | 4.372.124.980.616 | 4.461.126.473.011 |
| **Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan** | | **4.716.767.523.397** | **5.216.652.110.734** | **5.515.531.014.482** | **5.695.423.060.068** | **5.744.199.852.216** | **5.938.813.074.828** |

*Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025, Diolah*

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Sulawesi Selatan untuk periode 2025-2030 yang akan datang diproyeksikan meningkat dari 4.716 Trilyun pada tahun 2025 menjadi Rp 5,938 Trilyun pada tahun 2030. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreasitivitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah

Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan Perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, pemenuhan penerapan pelayanan dasar serta belanja yang menunjang pencapaian prioritas nasional. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah serta prioritas nasional. Prioritas II juga dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dalam pemenuhan pokok visi dan misi ini masuk kategori urusan wajib pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Untuk periode 2025-2030 yang datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Sulawesi Selatan akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama mencakup belanja untuk urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, serta belanja untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan

### 2.2.8. Pembiayaan Non Pemerintah

#### 2.2.8.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur bagi kepentingan publik. Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, seperti menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, atau BUMD. Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan sebagian atau seluruhnya berasal dari badan usaha, dengan tetap mempertimbangkan pembagian risiko di antara para pihak. Skema

KPBU memberikan sejumlah manfaat, antara lain tersedianya infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menjamin kesinambungan mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Selain itu, KPBU menjadi solusi atas keterbatasan pembiayaan dari pemerintah dengan melibatkan investasi sektor swasta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, pengembalian investasi badan usaha atas proyek infrastruktur dapat dilakukan melalui pembayaran dari pengguna layanan (user fee), pembayaran oleh PJPK melalui mekanisme ketersediaan layanan (availability payment), atau bentuk pembayaran lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kriteria proyek yang dapat dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan KPBU:

- Bersifat Infrastruktur Publik. Proyek yang dapat dibiayai melalui KPBU harus merupakan proyek penyediaan infrastruktur publik yang memiliki karakteristik pelayanan kepada masyarakat luas dan mendukung tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur ini harus masuk dalam kategori infrastruktur ekonomi atau sosial yang termasuk dalam daftar sektor KPBU.
- Memiliki Output yang Dapat Diukur. Proyek harus menghasilkan layanan atau infrastruktur dengan output yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Ini penting agar badan usaha dapat diberi pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan (availability payment) atau performa layanan tersebut.
- Layak Secara Teknis, Ekonomi, dan Finansial. Proyek KPBU wajib dinyatakan layak secara teknis, ekonomi, lingkungan, dan finansial. Artinya, proyek harus memiliki kelayakan dari sisi teknologi dan perencanaan, memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, serta memiliki skema pembiayaan yang menarik bagi investor.
- Memberikan Nilai Tambah dan Efisiensi. Salah satu kriteria utama proyek KPBU adalah adanya nilai tambah yang lebih tinggi apabila dilaksanakan melalui kemitraan dengan badan usaha, dibandingkan dengan metode pembiayaan konvensional (misalnya APBD/APBN). Aspek efisiensi biaya dan waktu serta keberlanjutan layanan menjadi bagian dari pertimbangan.
- Dukungan Hukum dan Kelembagaan. Proyek harus memiliki kepastian hukum, status lahan yang jelas, dan kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan kerja sama. Selain itu, pemerintah daerah atau lembaga pemrakarsa harus memiliki kelembagaan dan kapasitas yang memadai untuk menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).
- Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Publik dan Regulasi. Proyek tidak boleh menimbulkan konflik dengan kepentingan publik atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko sosial, lingkungan, dan pengadaan tanah juga harus dapat dimitigasi dengan baik agar tidak menghambat pelaksanaan proyek.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pelaksanaan kegiatan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) akan diarahkan untuk mempercepat realisasi program-program yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui skema KPBU dapat berasal dari inisiatif pemerintah (*solicited project*) seperti menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah, maupun berasal dari inisiatif badan usaha, baik swasta, BUMN, maupun BUMD (*unsolicited project*). Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, beberapa proyek yang tengah dirancang melalui

mekanisme KPBU antara lain pembangunan rel kereta api Makassar–Parepare, jalan layang tol dalam kota Makassar, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto Tahap II.

### 2.2.8.2 Obligasi Pemerintah Daerah

Dalam upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pemanfaatan skema pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada investor, sebagai sarana untuk memperoleh dana jangka menengah hingga panjang guna membiayai kegiatan pembangunan yang produktif. Penggunaan skema ini dinilai relevan untuk menjawab keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tanpa harus menunggu akumulasi anggaran secara penuh dalam APBD. Obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi, seperti infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, air bersih, dan sarana pendidikan. Proyek-proyek ini umumnya membutuhkan pendanaan besar dan tidak dapat didanai sekaligus melalui mekanisme anggaran tahunan. Oleh karena itu, obligasi daerah menjadi solusi pembiayaan yang memungkinkan pelaksanaan proyek secara lebih cepat dan terukur, dengan sistem pengembalian yang dirancang secara bertahap dan profesional.
Sebagai bentuk kepastian hukum dan penguatan tata kelola, pemanfaatan obligasi daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 yang mempertegas prosedur dan persyaratan pelaksanaannya. Regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penerbitan obligasi, mulai dari perencanaan proyek, proses persetujuan, hingga pengelolaan pembayaran kembali kepada investor.

Ada beberapa kriteria kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- Obligasi Daerah hanya dapat diterbitkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang bersifat produktif, yaitu kegiatan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial bagi masyarakat.
- Jenis kegiatan yang dibiayai harus memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan daerah secara langsung (misalnya melalui retribusi, sewa, atau jasa layanan), atau memberikan efisiensi pengeluaran, sehingga beban keuangan daerah dapat ditekan dalam jangka panjang.
- Setiap kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi harus tertuang secara eksplisit dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, serta dimasukkan dalam KUA-PPAS dan APBD.
- Kegiatan yang akan dibiayai tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, serta tata ruang.

### 2.2.8.3 Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen yang berfungsi sebagai sarana perdagangan sekaligus pembiayaan, yang memungkinkan komoditas pertanian yang disimpan dalam gudang dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, tanpa memerlukan agunan tambahan. Mekanisme ini memberikan peluang lebih luas bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan pelaku UMKM untuk memperoleh akses kredit. Selain itu, SRG juga berguna untuk menunda penjualan saat harga pasar rendah, sehingga membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Dengan kemudahan akses pembiayaan melalui Resi Gudang, petani dan pelaku usaha pertanian skala kecil dapat memanfaatkan sistem yang sederhana namun efektif ini.

Penerapan SRG, yang berlandaskan pada prinsip kelaikan gudang (warehouse ability), diharapkan mampu meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian, sekaligus membantu petani dalam merencanakan jadwal tanam dan pemasaran secara lebih strategis.
Implementasi SRG di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006 kemudian diubah oleh UU No.9 Tahun 2011 tentang resi gudang, dengan komoditas SRG meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 mengenai Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG), komoditinya adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai.
Resi Gudang juga bermanfaat bagi dunia perbankan, pelaku usaha dan pemerintah, dimana beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- Ikut menjaga kestabilan serta dapat mengendalikan harga komoditi.
- Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
- Adanya jaminan ketersediaan barang dan bahan baku industri khususnya
- pada agroindustri.
- Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan
- ketersediaan pangan nasional.
- Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi.
- Memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah.

#### 2.2.8.4 Sukuk

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaannya. Skema pembiayaan ini memungkinkan pendanaan proyek-proyek strategis yang bersifat produktif melalui mekanisme investasi syariah, yang dalam konteks pengelolaan keuangan negara, memberikan ruang optimalisasi peran APBN dalam pembangunan infrastruktur. Melalui penerbitan SBSN, pemerintah menyediakan alternatif pembiayaan jangka menengah hingga panjang dengan prinsip syariah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur prioritas. Kriteria proyek yang dapat dibiayai antara lain harus tercantum dalam rencana pembangunan nasional, memiliki kesiapan teknis dan legal, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi. Proyek juga harus dinyatakan layak dan siap oleh Kementerian Perencanaan/Bappenas untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Prioritas Proyek SBSN. Kegiatan yang dapat dibiayai mencakup infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek lainnya yang memenuhi ketentuan.

Proses pengusulan dan pelaksanaan pembiayaan SBSN melalui Kementerian Keuangan mencakup tahapan mulai dari penyampaian indikasi proyek oleh pemrakarsa, penetapan batas maksimal penerbitan, hingga pengalokasian anggaran proyek melalui APBN. Dana SBSN yang digunakan harus dikelola secara terpisah melalui Rekening Khusus SBSN, dengan pengawasan dan pelaporan yang ketat untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik. Dalam konteks daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, keterlibatan sebagai penerima manfaat dari proyek SBSN sangat dimungkinkan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti transportasi, irigasi, lingkungan hidup, dan sarana pendidikan atau kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemerintah

Daerah dapat berperan aktif dalam menyampaikan usulan proyek melalui Kementerian/Lembaga teknis terkait, serta mempersiapkan seluruh aspek kelayakan dan kesiapan proyek sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui pemanfaatan skema SBSN sebagai bagian dari pembiayaan inovatif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar Dana Transfer dan PAD. Dengan demikian, pembiayaan proyek melalui SBSN dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

### 2.2.8.5 Pinjaman Daerah

Pembangunan infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Salah satu unsur kunci dalam pembangunan infrastruktur yang optimal adalah tersedianya skema pembiayaan yang tepat, mulai dari tahap perencanaan (planning), pelaksanaan konstruksi (construction), hingga operasional dan pemeliharaan (operational and maintenance). Rancangan pembiayaan mencakup pemilihan instrumen keuangan dan bentuk pendanaan yang disusun berdasarkan proyeksi arus kas, baik arus kas keluar awal (initial cash outflow) selama tahap perencanaan hingga proyek siap beroperasi, maupun arus kas masuk dan keluar saat infrastruktur sudah berjalan (operational cash flow) untuk membiayai operasional dan perawatannya.

Struktur pembiayaan yang dirancang dengan baik dapat meminimalkan dua risiko utama dalam proyek infrastruktur, yaitu risiko konstruksi dan risiko ekonomi. Hal ini penting karena skema pembiayaan akan berpengaruh pada total biaya sepanjang siklus hidup proyek (life-cycle cost), yang pada akhirnya menentukan kelayakan finansial proyek tersebut. Selain itu, struktur pembiayaan yang kuat juga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan pembiayaan harus mempertimbangkan komponen investasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik khas proyek infrastruktur, yang seringkali berbeda dari proyek-proyek lainnya. Sebagai alternatif pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan melalui pinjaman dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menutup defisit APBD, pembiayaan pengeluaran, atau kekurangan kas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan belanja modal. Kedua, untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Ketiga, untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah. Dan keempat, untuk membiayai proyek infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

3. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5. Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

1. Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian.

#### 2.2.8.6 Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menerima hibah sebagai salah satu bentuk pembiayaan alternatif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Hibah Daerah didefinisikan sebagai pemberian yang bersifat sukarela dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, lembaga internasional, atau pihak lain, dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, yang tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan. Peraturan ini mengatur secara rinci proses perencanaan, penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat menerima hibah sepanjang memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hibah yang diterima harus tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dan dianggarkan secara eksplisit dalam APBD. Selain itu, hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa wajib memiliki nilai manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan berita acara serah terima serta dokumen pendukung lainnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, hibah dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan prioritas yang mendukung capaian target RPJMD dan tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari APBD. Termasuk di antaranya hibah dari lembaga internasional, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat sipil yang mendukung sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, infrastruktur dasar, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengoptimalkan peluang hibah ini dengan memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, termasuk penguatan peran perangkat daerah dalam menyusun proposal hibah dan memastikan kelayakan administratif serta teknis. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus menjamin bahwa penerimaan dan penggunaan hibah tetap mengacu pada prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, serta tunduk pada audit dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah pernyataan kondisi pembangunan Sulawesi Selatan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dasar identifikasi permasalahan memperhatikan data dan informasi kinerja pembangunan lima tahun sebelumnya berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, yang disajikan pada Sub bab 2,1, Gambaran Umum Kondisi Daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun kedepan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

**1. Kualitas pendidikan masih rendah dan layanan pendidikan belum merata**

Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kualitas dan pemerataan layanan. Kualitas pendidikan ditunjukkan oleh capaian literasi dan numerasi yang masih rendah. Pada tahun 2023, belum ada satu pun kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum, dengan hanya 31,61% satuan pendidikan yang memenuhi standar literasi dan 25,30% untuk numerasi. Rendahnya kualitas pendidikan juga tercermin dari rendahnya proporsi angkatan kerja lulusan menengah dan tinggi yang bekerja sesuai bidang keahliannya, yakni hanya 18,82%.

Kesenjangan akses pendidikan juga masih nyata. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 8,86 tahun, jauh di bawah Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,55 tahun. Proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi masih rendah, hanya 12,53%. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang PAUD baru mencapai 31,41%, sementara jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tergolong tinggi, khususnya pada usia 16–18 tahun yang mencapai 20,44%. Kondisi ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan rendahnya kualitas dan belum meratanya layanan pendidikan di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kontekstual. Tantangan utama muncul dari meningkatnya kebutuhan akan SDM yang kompetitif, transformasi sistem pendidikan nasional, serta pesatnya perkembangan industri digital dan pertumbuhan penduduk usia sekolah. Tekanan terhadap sistem pendidikan diperkuat oleh keterbatasan fiskal, disparitas wilayah perkotaan-perdesaan, serta belum meratanya distribusi guru dan fasilitas pendidikan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah sulit akses.

Kondisi layanan pendidikan masih menunjukkan kesenjangan nyata. Sarana prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet masih terbatas; distribusi tenaga pendidik belum merata; serta adaptasi terhadap pembelajaran digital masih rendah. Kelompok rentan, seperti anak penyandang disabilitas, juga menghadapi hambatan besar akibat minimnya sekolah inklusi, kekurangan guru pendidikan khusus, dan keterbatasan media pembelajaran yang aksesibel.

Permasalahan semakin kompleks dengan rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini dan remaja, tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), serta masih jauhnya keterhubungan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Rata-rata Lama Sekolah (8,86 tahun) masih tertinggal dibanding Harapan Lama Sekolah (13,55 tahun), sementara hanya 18,82% lulusan pendidikan menengah-tinggi bekerja sesuai bidang keahliannya. Hal ini berdampak pada lemahnya kompetensi generasi muda dalam keterampilan abad ke-21, terbatasnya daya saing tenaga kerja lokal, serta meluasnya kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah, yang pada akhirnya menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan transformasi pendidikan yang menyeluruh dan inklusif. Strategi prioritas antara lain: (1) meningkatkan kualitas layanan

pendidikan dengan menjamin pemerataan akses, terutama di daerah tertinggal; (2) memperbaiki distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; (3) memperluas pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh; (4) menyesuaikan kurikulum vokasional dengan kebutuhan pasar kerja; (5) memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri; serta (6) memperluas layanan pendidikan inklusi dengan membangun kapasitas guru dan infrastruktur yang ramah disabilitas. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**2. Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat**

Pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan mendasar dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Berbagai indikator kunci menunjukkan capaian yang belum optimal, baik secara nasional maupun antarwilayah di dalam provinsi.

Kondisi objektif ini dapat dilihat dari indikator kesehatan seperti usia harapan hidup Sulawesi Selatan yang berada di peringkat ke-20 dari 38 provinsi dan masih di bawah rata-rata nasional. Angka kematian ibu tercatat sebesar 134 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup, keduanya masih lebih tinggi dibanding target nasional. Prevalensi stunting juga menunjukkan kecenderungan meningkat dan mencapai 27,4% pada tahun 2023. Selain itu, terdapat 47.075 kasus TBC dengan tingkat keberhasilan pengobatan baru mencapai 87%, sementara cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional masih berada di angka 81,68%.

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Pendorong utama permasalahan ini antara lain adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, ketimpangan sosial-ekonomi, serta pola konsumsi dan gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, tingginya angka perkawinan anak, serta keterbatasan pendidikan reproduksi turut memperburuk kondisi kesehatan, khusunya perempuan dan anak. Keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dan infrastruktur layanan juga menjadi faktor signifikan yang menghambat akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tekanan-tekanan yang muncul dari kondisi tersebut tercermin pada terbatasnya akses sanitasi dan air bersih di daerah terpencil, kurangnya jumlah tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Permasalahan gizi seperti stunting, wasting, dan underweight juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, diperparah oleh tingginya kasus tuberkulosis (TBC) yang masih belum terkendali secara optimal.

Dampak dari permasalahan ini bukan hanya menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, tetapi juga membebani rumah tangga akibat tingginya biaya kesehatan, memperlebar kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial, serta berisiko menurunkan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan respon yang terintegrasi dan berkelanjutan. Prioritas kebijakan meliputi pemenuhan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau di wilayah strategis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan nonmedis, serta pemanfaatan teknologi seperti telemedicine untuk memperluas jangkauan layanan. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif, penguatan jaminan kesehatan universal, serta kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam perbaikan gizi keluarga dan penanganan TBC menjadi kunci dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan.

### 3. Keamanan dan Ketertiban Daerah serta Perwujudan Demokrasi Substansial belum sepenuhnya berjalan baik

Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil serta demokrasi yang substansial dan partisipatif. Permasalahan ini ditandai oleh belum meratanya akses terhadap perlindungan hukum, masih tingginya pelanggaran ketertiban umum, serta rendahnya literasi politik dan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Hal ini diperburuk oleh adanya ketimpangan sosial-ekonomi dan potensi konflik horizontal yang belum tertangani secara komprehensif.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus kejahatan mengalami tren fluktuatif dan meningkat sebesar 64,9%, dari 15.158 kasus pada tahun 2020 menjadi 23.359 kasus pada tahun 2024, meskipun tiga tahun terakhir menunjukkan sedikit penurunan. Selain itu, persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada tahun 2023 baru mencapai 62,8 persen, di bawah rata-rata nasional, mencerminkan rendahnya rasa aman publik di tingkat lokal.

Situasi ini dipengaruhi oleh ketidaksetaraan akses terhadap perlindungan dan layanan hukum, khususnya di daerah terpencil; masih terbatasnya literasi hukum masyarakat; lemahnya penegakan hukum yang tidak konsisten; serta tingginya pelanggaran ketertiban umum yang sering dipicu oleh ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik horizontal. Dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat mengurangi daya tarik investasi jangka panjang di wilayah ini.

Di sisi lain, perwujudan demokrasi substantif juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 masih berada dalam kategori "Sedang" dan berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya IDI ini mengindikasikan masih lemahnya partisipasi publik yang bermakna, rendahnya literasi dan pendidikan politik, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan politiknya.

Kondisi tersebut memerlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan budaya hukum dan sistem keamanan yang partisipatif dan adaptif, optimalisasi literasi hukum dan politik masyarakat melalui kurikulum dan kampanye publik, serta peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum. Peningkatan kualitas demokrasi dan stabilitas sosial akan menciptakan lingkungan yang lebih prediktif dan aman bagi investor, menurunkan risiko politik jangka panjang, serta mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

### 4. Kesadaran Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju Mengalami Pasang Surut dalam Kehidupan Masyarakat

Kerukunan antarumat beragama dan kekuatan budaya lokal merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, kohesi masyarakat, serta identitas daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan, kedua aspek ini masih menghadapi tantangan serius yang berpotensi menghambat proses pembangunan manusia seutuhnya dan memperlemah ketahanan sosial budaya.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) juga menunjukkan dinamika yang fluktuatif dari tahun ke tahun, mencerminkan kondisi kerentanan terhadap gesekan horizontal yang dapat dipicu oleh perbedaan agama dan kepercayaan. Toleransi Umat Beragama sebgai parameter Indeks Kerukunan Umat Beragama, pada tahun 2023 berada pada angka 77,03, masih berada di bawah ambang ideal sebesar 80, yang menunjukkan

bahwa harmoni sosial berbasis keberagaman nilai dan keyakinan belum sepenuhnya terbangun.

Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor mendasar. Pertama, terbatasnya ruang dan forum dialog antariman dan antarbudaya, terutama di tingkat akar rumput, menyebabkan lemahnya pemahaman lintas keyakinan. Kedua, pengaruh arus informasi digital dan media sosial yang tidak terfilter turut menyuburkan disinformasi, ujaran kebencian, serta memperkuat polarisasi pandangan keagamaan. Ketiga, belum optimalnya penanaman nilai-nilai ajaran agama sejak usia dini, baik melalui lingkungan keluarga, lembaga pendidikan formal, maupun jalur nonformal seperti pesantren, sekolah minggu, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Keempat, posisi geografis Sulawesi Selatan sebagai daerah transit antar pulau meningkatkan eksposur terhadap paham radikal, ekstremisme, dan intoleransi.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu melihat lembaga keagamaan dan pendidikan karakter sebagai garda terdepan dalam membentuk generasi yang toleran dan berkepribadian luhur. Pesantren, sebagai institusi yang mengintegrasikan pendidikan dan pengasuhan berbasis nilai agama, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pengajar, serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, penguatan kurikulum lokal berbasis nilai toleransi dan kearifan budaya lokal juga menjadi strategi penting dalam membentengi generasi muda dari pengaruh gaya hidup materialistik dan hedonistik.

Dalam aspek budaya, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 55,26 masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 57,13. Secara lebih rinci, dimensi ekspresi budaya dan ekonomi budaya menunjukkan nilai yang paling rendah dibanding dimensi lainnya, seperti pendidikan budaya dan warisan budaya. Hal ini menandakan masih rendahnya kapasitas pelaku budaya dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal dan terbatasnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan seni tradisional, adat istiadat, maupun ekspresi budaya lainnya.

Fenomena berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda, melemahnya pewarisan nilai kearifan lokal, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat, merupakan indikator kunci dari melemahnya vitalitas budaya lokal. Jika tren ini terus berlangsung, maka akan terjadi pemutusan transmisi nilai budaya antargenerasi yang sangat berisiko terhadap identitas budaya daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu merespons kondisi ini dengan strategi yang bersifat transformasional dan inklusif, yang mencakup optimalisasi tata kelola pemajuan kebudayaan melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku budaya local; pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif berbasis pelestarian budaya, agar warisan budaya memiliki nilai tambah secara ekonomi dan sosial; pemanfaatan teknologi informasi untuk dokumentasi, pelindungan, dan diseminasi budaya daerah secara lebih massif; penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, baik antarlevel pemerintahan maupun antara pemerintah dan masyarakat adat, seniman, budayawan, serta lembaga pendidikan ; serta revitalisasi lembaga-lembaga adat dan pendidikan budaya lokal sebagai bagian dari sistem pendidikan karakter di tingkat komunitas.

Melalui penguatan moderasi beragama dan ketahanan budaya daerah secara simultan, Provinsi Sulawesi Selatan akan memiliki landasan sosial dan kultural yang kuat untuk mendorong pembangunan manusia yang berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan.

**5. Belum optimalnya perwujudan keluarga dan generasi berkualitas, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial**

Pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sulawesi Selatan memerlukan fondasi sosial yang kuat, dimulai dari keluarga sebagai lingkungan awal pembentukan karakter dan kesejahteraan generasi. Meski Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 79,37 atau lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 77,64, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan keluarga secara menyeluruh. Masih terdapat persoalan mendasar yang menunjukkan kerentanan struktural, terutama menyangkut perlindungan anak, kualitas pemuda, dan keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan.

Salah satu tantangan krusial adalah masih tingginya angka perkawinan anak, yang mencapai 7,48 persen di Sulawesi Selatan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,94 persen. Fenomena ini bukan sekadar praktik sosial yang merugikan masa depan individu, tetapi juga mencerminkan tekanan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara efektif, seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan, dan lemahnya kontrol budaya terhadap hak-hak anak. Dalam jangka panjang, perkawinan anak berkontribusi terhadap meningkatnya risiko putus sekolah, kematian ibu muda, dan siklus kemiskinan antar generasi.

Lebih lanjut, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulawesi Selatan berada pada angka 60,74, masih di bawah capaian nasional yang mencapai 63,83. Rendahnya nilai ini ditopang oleh lemahnya kinerja pada beberapa dimensi penting, khususnya aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, yang menunjukkan kecenderungan menurun. Ketiga aspek ini seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk tumbuh secara utuh dalam lingkungan yang aman, edukatif, dan bermartabat. Sayangnya, keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya kualitas pengasuhan, dan akses yang terbatas terhadap layanan publik membuat banyak anak terjebak dalam lingkungan yang tidak mendukung tumbuh-kembang optimal.

Selain itu, derasnya arus informasi digital tanpa literasi yang memadai telah membuka ruang-ruang baru bagi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, termasuk melalui media sosial. Fenomena ini memperkuat urgensi untuk membangun sistem perlindungan anak yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Di sisi lain, bonus demografi yang dimiliki Sulawesi Selatan belum dimanfaatkan secara optimal. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memang menunjukkan capaian yang cukup baik pada domain pendidikan dan kesehatan, namun kontribusi pemuda dalam domain kesempatan kerja dan partisipasi kepemimpinan justru masih sangat rendah. Salah satu indikator konkret adalah rendahnya angka pemuda pelaku wirausaha, yang baru mencapai 0,25 persen, masih jauh di bawah capaian nasional. Hal ini mencerminkan masih lemahnya ekosistem kewirausahaan muda dan minimnya ruang pembinaan yang mendorong kreativitas serta inovasi anak muda. Dalam konteks ini, budaya hedonisme yang semakin menguat di kalangan pemuda justru menambah tantangan dalam pembentukan karakter yang produktif dan bertanggung jawab.

Partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan dinamika yang kompleks dalam lima tahun terakhir (2020–2024), mencerminkan tantangan dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi generasi muda. Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan serta kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan tren yang berfluktuasi dan belum konsisten.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, meskipun sempat mengalami peningkatan bertahap dari 2020 hingga 2023, justru menurun pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya kesadaran, minat, dan kapasitas pemuda dalam berorganisasi, serta keterbatasan dukungan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas, pendanaan, dan program berkelanjutan yang mampu menjangkau seluruh lapisan pemuda di 24 kabupaten/kota.

Di sisi lain, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri cenderung meningkat sepanjang periode tersebut, mengindikasikan adanya potensi kemandirian ekonomi yang perlu terus didorong melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan akses permodalan. Namun demikian, kurangnya integrasi lintas sektor dan keberlanjutan program menjadi hambatan dalam memperluas dampak pemberdayaan ekonomi pemuda secara menyeluruh.

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter dan nilai kebangsaan menunjukkan capaian yang cukup stabil dengan tingkat keaktifan organisasi mencapai 100%. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam konsistensi pembinaan kepramukaan, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas kegiatan yang adaptif terhadap isu-isu aktual kepemudaan.

Sementara itu, prestasi olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2024 yang mencatat perolehan medali tertinggi (154 medali) serta jumlah atlet berprestasi tertinggi (165 atlet). Meski demikian, fluktuasi capaian dari tahun ke tahun menandakan pentingnya perbaikan ekosistem pembinaan atlet muda, peningkatan intensitas kompetisi, serta penguatan sistem regenerasi atlet berbakat sejak usia dini.

Secara umum, problematika kepemudaan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada capaian positif, diperlukan strategi yang lebih terarah, integratif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda baik dalam organisasi sosial, kegiatan ekonomi, keolahragaan maupun pembinaan karakter, agar dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi

Kesetaraan gender dan inklusi sosial juga masih menjadi pekerjaan besar. Kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki semakin melebar, menandakan belum optimalnya perempuan sebagai subjek pembangunan. Sementara itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan ruang publik. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam prinsip keadilan, tetapi juga menghambat potensi kolektif daerah untuk berkembang secara inklusif.

Dengan demikian, pembangunan Sulawesi Selatan ke depan perlu menempatkan peningkatan kualitas keluarga, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan penguatan kesetaraan gender serta inklusi sosial sebagai prioritas utama. Intervensi yang dibutuhkan bukan hanya bersifat programatik, tetapi juga transformatif—melibatkan pendekatan lintas sektor, berbasis komunitas, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal yang adaptif. Hanya dengan cara inilah, cita-cita membangun generasi emas Sulawesi Selatan yang cerdas, berkarakter, dan tangguh dapat diwujudkan secara nyata.

### 6. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif dan Produktif

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dari sisi makro, tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian, pertumbuhan ini belum cukup inklusif, belum produktif secara merata, dan belum menghasilkan pemerataan kesejahteraan yang

signifikan. PDRB per kapita Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat sebesar Rp 73,75 juta, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp 78,62 juta, dan menempatkan Sulawesi Selatan pada urutan ke-16 dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini mencerminkan tantangan dalam pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk.

Secara spasial dan sektoral, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih menunjukkan pola ketimpangan. Konsentrasi aktivitas ekonomi dan investasi lebih dominan di wilayah perkotaan, sementara wilayah perdesaan dan kepulauan menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, sumber daya ekonomi, dan layanan publik dasar. Struktur ekonomi daerah pun masih bertumpu pada sektor-sektor bernilai tambah rendah seperti pertanian tradisional, perdagangan kecil, dan jasa informal. Transformasi ekonomi ke arah sektor bernilai tambah tinggi seperti industri pengolahan, pariwisata berkualitas, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif masih berjalan lambat.

Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga menjadi penghambat utama produktivitas daerah. Keterbatasan dalam pelatihan vokasional, minimnya kolaborasi riset dan inovasi, serta rendahnya kewirausahaan turut memperlambat proses transformasi ekonomi daerah. Rasio kewirausahaan Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 3,25%, masih berada di bawah rata-rata nasional (3,95%). Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal belum tergarap secara optimal.

Tekanan struktural ini berdampak langsung pada terbatasnya kesempatan kerja layak dan produktif, dominasi sektor informal, rendahnya upah riil, dan meningkatnya ketimpangan penguasaan aset antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini tercermin dalam Gini Rasio Sulawesi Selatan yang mencapai 0,360 pada tahun 2024, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan ke-10 tertinggi di Indonesia. Kesenjangan juga tampak antara kota dan desa, dengan Gini Rasio perkotaan mencapai 0,369 dibandingkan 0,330 di wilayah perdesaan. Ketimpangan ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok miskin dan rentan masih tertinggal.

Produktivitas sektor unggulan seperti pariwisata pun masih belum optimal. Walaupun terjadi peningkatan jumlah wisatawan domestik, namun lama tinggal (length of stay) dan belanja wisatawan masih rendah, menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap sektor lain. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kualitas SDM pariwisata, keterbatasan promosi, dan belum terintegrasinya pengembangan destinasi dengan teknologi digital.

Dampak dari kondisi ini bersifat multidimensional, meliputi meningkatnya risiko kemiskinan, melemahnya kohesi sosial, terbatasnya mobilitas ekonomi vertikal, serta rendahnya efektivitas kebijakan pembangunan dalam menanggulangi ketimpangan. Kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok sosial berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, diperlukan strategi transformasi ekonomi yang menekankan pada peningkatan produktivitas, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, serta penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal.

Langkah-langkah strategis yang dapat diambil antara lain: peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri; pengembangan UMKM melalui akses

pembiayaan, teknologi, dan pasar; pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas di wilayah tertinggal; penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah; serta penerapan kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan.

Dengan arah kebijakan yang tepat, sinergis, dan inklusif, Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

### 7. Integrasi Ekonomi Regional dan Global Masih Lemah

Posisi geostrategis Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di jantung Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat logistik dan hub perdagangan regional, bahkan nasional. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah belum ditetapkannya Pelabuhan Makassar sebagai pintu gerbang utama ekspor-impor nasional. Ketiadaan status pelabuhan strategis ekspor ini berdampak pada belum maksimalnya integrasi ekonomi Sulawesi Selatan dalam jaringan perdagangan global.

Data ekspor menunjukkan bahwa nilai ekspor Sulawesi Selatan pada periode Januari–Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 8,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini juga tercermin pada sisi volume ekspor yang mengalami kontraksi sebesar 15,23%. Salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah dominasi komoditas ekspor yang masih berupa bahan mentah serta tingginya sensitivitas harga terhadap dinamika global, seperti fluktuasi permintaan internasional dan kebijakan perdagangan global.

Dari sisi investasi, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 39,45%, maka pada tahun 2024 turun menjadi 36,65%, atau turun sebesar 2,8 persen poin. Hal ini mencerminkan belum optimalnya realisasi investasi produktif, khususnya pada sektor infrastruktur dan industri pengolahan, yang pada gilirannya berdampak terhadap efisiensi proses produksi dan distribusi barang, termasuk produk ekspor.

Selain faktor struktural tersebut, tantangan juga muncul dari sisi kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang masih terbatas dalam memahami prosedur ekspor dan akses pasar internasional. Minimnya literasi terkait perdagangan global menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam rantai nilai ekspor global.

Dalam rangka mendorong peningkatan kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain : Penguatan infrastruktur pendukung ekspor, khususnya pelabuhan dan kawasan industry; Peningkatan investasi produktif, terutama pada sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; Promosi investasi secara aktif melalui platform digital dan forum internasional guna menjangkau investor domestik dan asing; serta Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha, melalui pelatihan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan akses informasi pasar ekspor.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Sulawesi Selatan dalam sistem perdagangan global serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

### 8. Kapasitas Fiskal Daerah Masih Rendah

Meskipun Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah, berbagai permasalahan strategis masih perlu menjadi perhatian dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis-fiskal, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan utama adalah tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sebagaimana terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mampu mendominasi struktur pendapatan. Meskipun terjadi tren penurunan proporsi dana transfer dalam total pendapatan daerah, kontribusi PAD belum menunjukkan peningkatan yang signifikan untuk menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Ruang fiskal daerah juga masih terbatas, terutama akibat tingginya komponen belanja wajib dan mengikat, khususnya belanja pegawai. Walaupun dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan kapasitas fiskal, namun proporsi belanja pegawai yang masih melampaui ambang batas maksimal 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menandakan ketidakseimbangan dalam struktur belanja. Kondisi ini membatasi fleksibilitas fiskal dalam merespons kebutuhan pembangunan prioritas yang bersifat produktif dan strategis.

Optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak daerah juga masih menjadi tantangan. Rasio pajak daerah yang berada pada kisaran 0,67–0,71 persen mencerminkan belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya basis pajak, belum maksimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta rendahnya kesadaran pajak di masyarakat.

Selain itu, komposisi belanja daerah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Porsi belanja modal yang fluktuatif dan cenderung stagnan menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur dan aset produktif masih belum konsisten. Padahal, belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai motor ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

Lebih lanjut, tingkat belanja daerah per kapita yang relatif stagnan mengindikasikan adanya keterbatasan dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan publik secara merata. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, belanja per kapita yang tidak menunjukkan tren akseleratif belum mampu mencerminkan peningkatan kualitas belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan fiskal Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perbaikan secara kuantitatif, namun masih terdapat tantangan struktural terkait efisiensi alokasi anggaran, kemandirian fiskal, dan efektivitas belanja daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, seperti : penataan struktur belanja yang lebih produktif dan berorientasi hasil; penguatan kapasitas pendapatan asli daerah secara berkelanjutan; serta reformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

### 9. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan di Perdesaan

Pembangunan perdesaan di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih terlihat nyata, khususnya dalam hal akses

terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat perdesaan dan menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Indikasi belum optimalnya pembangunan perdesaan terlihat dari rendahnya Persentase Desa Mandiri yang baru mencapai 32,88 persen pada 2024, meskipun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Desa mandiri memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap daya saing daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dasar — yang tercermin dari penurunan kemantapan jalan provinsi menjadi 71,41% yang berpengaruh signifikan terhadap konektifitas antar kabupaten termasuk antar wilayah perdesaan dan perkotaan, serta penurunan rasio jaringan irigasi menjadi 18,08 poin yang berpengaruh signifikan terhadap produksi pertanian yang bertumpu di wilayah perdesaan. Keterbatasan akses terhadap air minum layak dan sanitasi di wilayah perdesaan juga turut membatasi kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, minimnya kerjasama antar desa menjadi faktor yang menghambat pengembangan ekonomi desa secara kolektif. Potensi untuk membangun sinergi dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan wisata, maupun infrastruktur masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar desa masih bergantung pada sektor pertanian, namun belum mampu mengelolanya secara maksimal akibat keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM.

Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat masih belum mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan, terlebih di tengah tantangan kapasitas kelembagaan desa yang masih lemah. Banyak desa kekurangan tenaga aparatur yang trampil dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan tata kelola pembangunan yang partisipatif.

Untuk itu, pembangunan perdesaan ke depan perlu menekankan pada: Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM desa, termasuk aparatur dan tenaga teknis; Penguatan peran LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM) sebagai mitra pembangunan; Sinergi lintas jenjang pemerintahan, mulai dari provinsi hingga desa, yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat lokal; Penguatan Bumdes secara kelembagaan dan legal, agar mampu mengakses pembiayaan, menjalin kemitraan, serta memperluas pasar produk lokal. Arah kebijakan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan desa, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

### 10. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi tantangan strategis dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Meski tren penurunan tercatat dalam beberapa tahun terakhir, kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat masih sangat rentan terhadap guncangan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,77 persen atau sekitar 711,77 ribu jiwa. Angka ini memang lebih rendah dari rata-rata nasional, namun dari sisi jumlah, Sulawesi Selatan masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Kawasan Sulawesi.

Fluktuasi angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir mencerminkan belum stabilnya pemulihan ekonomi masyarakat. Peningkatan kemiskinan pada tahun 2020–2021 sebagai dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih secara merata. Tahun 2023 misalnya, terjadi kembali peningkatan persentase penduduk miskin akibat inflasi dan gangguan

produksi pertanian akibat cuaca ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok rentan belum memiliki daya tahan yang cukup terhadap tekanan ekonomi dan lingkungan.

Ketimpangan kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih terasa nyata. Data menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan cenderung lebih dalam dan lebih parah dibandingkan di perkotaan. Di sisi lain, garis kemiskinan yang terus meningkat dari Rp362.031 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp467.991 pada 2024 mengindikasikan naiknya biaya hidup, yang turut menambah beban bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Sebagian masyarakat, seperti nelayan kecil, juga menghadapi kerentanan struktural. Meski telah terjadi penurunan jumlah nelayan miskin ekstrem dari 36.153 orang pada 2023 menjadi 28.664 orang pada 2024, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya intervensi seperti bantuan sarana perikanan dan asuransi nelayan perlu terus diperluas dan difokuskan.

Permasalahan kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, berbasis pemberdayaan, dan mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

### 11. Kesenjangan Kualitas dan Lemahnya Tatakelola Ketenagakerjaan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian positif dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 6,31% pada tahun 2020 menjadi 4,19% pada tahun 2024—lebih baik dibandingkan angka nasional yang pada tahun terakhir tercatat 4,91%. Jumlah penduduk bekerja meningkat signifikan dari 4 juta menjadi 4,68 juta orang, mencerminkan keberhasilan relatif dalam menjaga dinamika pasar kerja dan pemulihan pasca pandemi.

Namun, di balik angka-angka makro yang menjanjikan tersebut, tersembunyi persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yaitu kesenjangan kualitas tenaga kerja, rendahnya inklusivitas, dan lemahnya tata kelola ketenagakerjaan. Penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan kemajuan dalam kualitas pekerjaan, perlindungan sosial, maupun keberdayaan kelompok rentan di dunia kerja.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah tingginya pengangguran terdidik. TPT lulusan SMK dan diploma justru mengalami peningkatan, bahkan TPT diploma melonjak drastis menjadi 9,01% pada tahun 2024. Ini menandakan masih jauhnya kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Sistem pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika industri, sehingga lulusan tidak terserap secara optimal, atau bekerja di luar bidang keahliannya.

Di sisi lain, kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan juga menjadi tantangan tersendiri. Meski TPT perempuan sempat menurun, namun kembali meningkat dalam dua tahun terakhir dan tetap lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga masih tertinggal jauh. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang fleksibel, norma sosial, serta kurangnya ekosistem kerja ramah gender, memperkuat eksklusi perempuan dari pasar kerja produktif.

Masalah lainnya adalah masih rendahnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga 2024, hanya sekitar 47% dari total tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta aktif, yang berarti lebih dari 1,6 juta pekerja belum terlindungi. Mayoritas dari mereka berada di sektor informal, rentan terhadap risiko kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan masa tua tanpa perlindungan. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong perluasan kepesertaan belum mencakup seluruh pekerja rentan secara sistemik.

Di tingkat kelembagaan, tata kelola ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota juga menunjukkan penurunan. Jumlah daerah yang memiliki Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) aktif menurun drastis dari 23 kabupaten/kota pada 2020 menjadi hanya 11 pada 2024. Fluktuasi jumlah tenaga kerja bersertifikat dan rendahnya implementasi kerja layak di perusahaan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan kebijakan ketenagakerjaan masih lemah.

Meskipun ada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja di sektor perdagangan dan jasa, kualitas pekerjaan yang diciptakan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan daya saing global. Di sisi lain, mobilitas tenaga kerja luar negeri atau penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulsel masih tergolong kecil dan belum dikelola secara strategis, padahal ini bisa menjadi peluang kerja sekaligus peningkatan remitansi daerah.

Dengan demikian, masalah utama ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan bukan lagi hanya soal besarnya pengangguran, melainkan terletak pada kesenjangan kualitas tenaga kerja, rendahnya inklusivitas, dan lemahnya sistem perlindungan serta perencanaan tenaga kerja. Perbaikan ke depan harus diarahkan pada reformasi struktural di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan, penciptaan ekosistem kerja yang inklusif, serta penguatan tata kelola lintas sektor dan daerah.

### 12. Transformasi Digital yang Belum Merata dan Belum Optimal

Kemajuan teknologi global dan meningkatnya kebutuhan digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan telah mendorong semua wilayah untuk beradaptasi menuju era transformasi digital. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, dorongan terhadap digitalisasi menjadi semakin penting seiring tuntutan terhadap pelayanan publik yang efektif dan efisien, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, serta kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Namun demikian, transformasi digital di Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah. Data menunjukkan bahwa sekitar 37,12% desa di Sulsel masih mengalami *blank spot* atau tidak memiliki akses internet yang memadai. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan digital dasar, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun layanan administrasi kependudukan.

Indeks TIK (IP-TIK) Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,01**,** yang masih berada pada kategori sedang. Sementara itu, skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Sulsel tahun 2024 hanya mencapai 42,26**,** lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 43,34. Pilar *pemberdayaan* dalam IMDI yang hanya mencapai 24,27, mengindikasikan rendahnya keterampilan digital produktif yang dimiliki masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi digital. Hal ini memperkuat gambaran bahwa potensi ekonomi digital daerah belum tergarap secara optimal. Selain itu, kesenjangan digital antara wilayah desa-kota dan kelompok masyarakat kaya-miskin masih menjadi hambatan utama. Ketimpangan ini diperparah oleh masih terbatasnya keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dalam membangun ekosistem digital lokal, termasuk pengembangan startup dan inovasi berbasis teknologi. Padahal, sektor swasta memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah digital dan memperluas inklusi ekonomi.

Dalam aspek pelayanan publik, digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dan belum menjangkau seluruh sektor secara optimal. Cakupan internet di layanan dasar pun belum merata: 29% sekolah dan 5% puskesmas di Sulsel belum terhubung dengan internet. Hal ini menyebabkan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Rendahnya literasi digital masyarakat juga turut menghambat pemanfaatan teknologi secara produktif. Banyak masyarakat yang menggunakan teknologi hanya untuk konsumsi hiburan semata, belum sebagai alat pemberdayaan atau peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan literasi digital menjadi kunci dalam mendorong transformasi digital yang inklusif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada beberapa strategi utama, diantaranya peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur TIK harus menjadi prioritas, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), perlu dilakukan penguatan literasi digital dan pelatihan keterampilan digital berbasis kebutuhan lokal agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi) untuk membangun ekosistem inovasi dan ekonomi digital yang tangguh, dan dukungan terhadap pengembangan startup lokal dan UMKM berbasis digital juga menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Terakhir, transformasi digital juga harus didorong melalui perluasan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi layanan publik digital secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mendekatkan layanan kepada masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

Melalui arah kebijakan yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital yang merata dan optimal di Sulawesi Selatan bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan kebutuhan strategis untuk mencapai pelayanan publik yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

### 13. Tata kelola pemerintahan belum adaptif dan tangkas dalam merespons perubahan

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai kualitas pemerintahan yang adaptif, tangkas, dan berorientasi pelayanan publik. Meskipun terdapat kemajuan, akselerasi reformasi birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan berkinerja tinggi sebagaimana diharapkan masyarakat dan agenda nasional.

Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Selatan sebesar 7,56 poin, dari 74,21 (tahun 2023) menjadi 81,74. Meskipun cukup signifikan, perbaikan ini belum didukung oleh pencapaian indikator utama lain yang menjadi penopang akuntabilitas pemerintahan.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 masih berada pada kategori B dengan skor 69,02, hanya naik tipis 0,24 poin dari tahun sebelumnya, dan belum mencapai target internal pemerintah daerah untuk meraih predikat A. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di lingkungan birokrasi daerah.

Pembangunan Zona Integritas juga mengalami stagnasi. Hingga tahun 2024, tidak ada satu pun perangkat daerah maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menjadi cerminan lemahnya dorongan terhadap budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menunjukkan posisi yang relatif rendah. Pada tahun 2024, SPBE Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat ke-19

secara nasional, hanya lebih tinggi dari Sulawesi Barat di antara provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Sementara itu, Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai tertinggi menunjukkan selisih yang signifikan. Indeks Pelayanan Publik pun belum mencapai kategori prima, dan indeks inovasi daerah menempatkan Sulsel pada peringkat ke-16. Di sisi lain, indeks integritas nasional masih berada di bawah rata-rata nasional dan hanya tumbuh sebesar 0,15 poin selama tiga tahun terakhir.

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya responsif dan inklusif. Sistem yang ada masih cenderung birokratis, lamban dalam adaptasi teknologi, dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan masyarakat. Rendahnya daya dorong reformasi birokrasi berdampak pada turunnya kepercayaan publik, ketidakefisienan layanan publik, serta belum tercapainya prinsip-prinsip *good governance* secara menyeluruh.

Oleh karena itu, perlu strategi yang menyeluruh untuk membangun tata kelola yang tangkas dan responsif, melalui percepatan digitalisasi pemerintahan, penguatan integritas birokrasi, percepatan reformasi zona integritas, serta mendorong inovasi pelayanan publik yang berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat.

### 14. Kesenjangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah di Sulawesi Selatan

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal dan merata, sehingga menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mempercepat pembangunan antarwilayah, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Kesenjangan ini tercermin dalam berbagai aspek struktural, teknis, spasial, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Penurunan Indeks Infrastruktur Sulawesi Selatan menjadi 3,11 poin pada tahun 2024 menunjukkan menurunnya kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah. Salah satu faktor penyebab utama adalah masih rendahnya kemantapan jalan provinsi dan kabupaten/kota dibandingkan dengan jalan nasional. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap hambatan mobilitas barang dan orang, serta memperbesar disparitas antarwilayah, terutama di daerah terpencil, perdesaan, dan kepulauan.

Permasalahan juga terjadi pada infrastruktur pelayanan dasar, baik umum maupun sosial, yang belum memenuhi prinsip aksesibilitas dan inklusivitas. Sebagian besar fasilitas publik yang ada belum ramah disabilitas dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini menjadi hambatan nyata dalam menjamin kesetaraan akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

Selain itu, rasio jaringan irigasi yang menurun turut menjadi indikator penting dalam melemahnya layanan infrastruktur wilayah. Sekitar 41,64% lahan sawah belum terlayani jaringan irigasi, dan hanya 69% jaringan irigasi dalam kondisi baik, sisanya mengalami kerusakan sedang hingga berat. Penetapan lahan baku sawah yang meningkat oleh pemerintah tidak diimbangi dengan perluasan dan rehabilitasi jaringan irigasi fungsional. Akibatnya, produktivitas pertanian—khususnya tanaman pangan strategis—belum optimal untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional.

Permasalahan lain yang tak kalah signifikan adalah konektivitas wilayah yang belum terintegrasi antar moda transportasi. Terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandara, dan transportasi darat (angkutan umum kota dan desa) menjadi hambatan serius dalam memperlancar pergerakan logistik dan konektivitas antarwilayah. Kesenjangan ini diperparah oleh perubahan kebijakan terkait kewenangan pengelolaan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah, seperti pada pengelolaan

pelabuhan pengumpan regional, terminal penumpang, dan transportasi udara, yang menyebabkan fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Faktor geografis juga berperan penting, khususnya pada wilayah kepulauan dan pesisir yang infrastruktur dasarnya sangat terbatas. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang besar, namun belum optimal dimanfaatkan karena keterbatasan aksesibilitas fisik, layanan dasar, dan konektivitas.

Situasi tersebut berdampak luas terhadap terhambatnya mobilitas penduduk dan distribusi barang/jasa antarwilayah, rendahnya produktivitas pertanian dan pencapaian ketahanan pangan, meningkatnya ketimpangan wilayah dan sosial antar kelompok masyarakat, dan tidak terlayaninya kelompok rentan secara adil dan setara dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan harus didesain secara berkelanjutan, inklusif, dan spasial adaptif, mencakup aspek: a) Transportasi dan konektivitas wilayah terpencil dan kepulauan; b) Irigasi dan infrastruktur pertanian fungsional; c) Energi, air bersih, dan sanitasi yang merata; d) Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang ramah kelompok rentan; dan e) Digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasi yang menjangkau seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan infrastruktur sebagai prioritas strategis pembangunan daerah, tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penguatan integrasi wilayah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah secara menyeluruh.

### 15. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Transformasi menuju pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan biru di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan yang menjanjikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan implementatif yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan kedua pendekatan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Capaian Indeks Ekonomi Hijau meningkat dari 57,42 pada tahun 2020 menjadi 70,46 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan daerah. Namun, kemajuan tersebut masih ditopang secara dominan oleh pilar ekonomi, khususnya melalui peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan penyerapan tenaga kerja sektor industri. Sementara itu, pilar lingkungan masih tertinggal, ditunjukkan oleh rendahnya tutupan hutan dan tingginya emisi gas rumah kaca kumulatif. Di sisi sosial, indikator kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Provinsi Sulawesi Selatan juga mencatat capaian yang cukup tinggi dengan skor 80,86 pada tahun 2023, tertinggi secara nasional. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya ketimpangan antar pilar, yaitu Pilar Sosial 80,86, Pilar Ekonomi 52,00, dan Pilar Lingkungan 50,20.

Ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya penciptaan nilai tambah ekonomi dari sumber daya perairan serta belum kuatnya integritas ekosistem pesisir dan laut. Skor tinggi pada pilar sosial sebagian besar ditopang oleh konsumsi protein hewani (ikan), sedangkan skor rendah pada pilar ekonomi dan lingkungan mengindikasikan lemahnya hilirisasi sektor kelautan serta rendahnya penerapan praktik ramah lingkungan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur—yang menempati peringkat tinggi pada pilar ekonomi berkat keberhasilan hilirisasi produk perikanan dan pengembangan industri

berbasis kelautan, maka Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu memperkuat integrasi sektor kelautan dan perikanan dengan industri hilir dan inovasi berbasis keberlanjutan.

Tantangan dalam transisi menuju ekonomi hijau juga terlihat pada sektor energi. Meskipun proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer Sulawesi Selatan sempat mencapai 28,82% pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional, namun mengalami penurunan menjadi 27,33% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan kinerja sektor energi hijau akibat masih tingginya ketergantungan pada energi fosil, terbatasnya infrastruktur EBT, serta lemahnya kapasitas SDM di sektor energi berkelanjutan.

Secara umum, penerapan ekonomi hijau dan biru di Sulawesi Selatan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar, antara lain : belum optimalnya pemanfaatan dan hilirisasi sumber daya perairan; penurunan kualitas dan integritas ekosistem laut dan pesisir akibat tekanan eksploitasi; alih fungsi lahan dan hutan yang tinggi, berdampak pada menurunnya kualitas tutupan lahan dan kawasan lindung; belum seimbangnya alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung; rendahnya bauran EBT dan belum maksimalnya penurunan emisi GRK secara substansial; belum optimalnya pengelolaan sampah, minimnya penerapan ekonomi sirkular, dan terbatasnya regulasi serta dukungan insentif untuk pekerjaan hijau (*green jobs*); serta lemahnya integrasi lintas sektor dan peran dunia usaha, industri, dan masyarakat dalam mendukung agenda keberlanjutan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan integrasi ekonomi hijau dan biru dalam seluruh sektor pembangunan, diantaranya adalah a) Pilar ekonomi diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan berbasis lahan dan perairan yang berkelanjutan, rendah emisi, dan tangguh terhadap perubahan iklim; b) Hilirisasi komoditas diarahkan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan; c) Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan, energi hijau, dan industri biru; serta d) Mendorong integrasi kebijakan lintas sektor melalui pendekatan *hexahelix* yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan media. Dengan demikian, implementasi ekonomi hijau dan biru di Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing daerah di pasar global, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam, memperkuat inklusi sosial, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara struktural dan transformatif.

### 16. Tingginya Risiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan yang kompleks dalam memastikan ketahanan energi, air, dan pangan secara berkelanjutan. Tekanan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi kebutuhan layanan dasar tidak diimbangi dengan kapasitas penyediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Kondisi ini berdampak pada menurunnya ketahanan sektor-sektor vital tersebut, yang tercermin dari berbagai indikator.

Di sektor energi, konsumsi listrik per kapita pada tahun 2024 masih tergolong rendah dan didominasi oleh rumah tangga, dengan proporsi mencapai 46 persen. Rendahnya diversifikasi penggunaan energi dan belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan memperlihatkan lemahnya transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan. Kesenjangan akses energi masih terjadi, terutama di wilayah kepulauan dan terpencil yang belum tersentuh jaringan listrik atau sistem ketenagalistrikan skala kecil. Rendahnya peran aktif

pemerintah daerah dalam pengelolaan energi, serta minimnya edukasi efisiensi energi pada masyarakat, turut memperkuat permasalahan ini.

Sementara itu, di sektor air, hanya sekitar 25,4 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman melalui jaringan perpipaan. Dari 23 BUMD Air Minum di Sulawesi Selatan, hanya 12 yang berkategori sehat, sementara sisanya berada dalam kondisi kurang sehat atau sakit. Ketimpangan akses air bersih diperparah oleh kondisi sumber daya air yang kian terdegradasi, ditandai dengan 108 dari 148 Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis. Kualitas air juga menurun akibat pencemaran biologis dan kimiawi, serta belum optimalnya pengelolaan infrastruktur air baku dan jaringan distribusi. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber air non-perpipaan, seperti sumur atau mata air, yang belum tentu aman.

Ketahanan air yang lemah berdampak langsung pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi. Penurunan produktivitas lahan akibat degradasi sumber daya air, perubahan iklim, dan kerusakan infrastruktur irigasi menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan daerah. Selain itu, meningkatnya alih fungsi lahan, menurunnya kualitas tanah, dan terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana pertanian yang memadai turut memperlemah kemandirian pangan daerah.

Meskipun Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-4 nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan dengan skor 83,82 pada tahun 2024, masih terdapat celah yang perlu ditangani, seperti prevalensi kekurangan konsumsi pangan sebesar 6,99 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga semakin rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana yang merusak produktivitas lahan pertanian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja pembangunan di sektor energi, air, dan pangan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Maka dari itu, diperlukan intervensi strategis dan kolaboratif yang mengedepankan penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong ketahanan sumber daya secara menyeluruh dan berkeadilan.

### 17. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meskipun capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan secara agregat menunjukkan tren membaik—dengan nilai 75,69 pada tahun 2024 yang melampaui rata-rata nasional sebesar 73,07—namun secara substantif masih terdapat permasalahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nilai yang tinggi pada indikator IKLH belum mencerminkan keberhasilan menyeluruh karena dua dari tiga komponennya, yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air (IKA), masih berada pada kategori "sedang" hingga "kurang", menandakan lemahnya pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem.

Permasalahan utama terletak pada terus memburuknya kualitas dan daya dukung lahan, sebagaimana terlihat dari meningkatnya luas lahan kritis yang mencapai 474.754,55 hektare pada tahun 2024. Degradasi hutan dan alih fungsi kawasan lindung ke peruntukan non-hutan menjadi penyebab utama yang belum sepenuhnya tertangani. Sementara itu, menurunnya kualitas air permukaan disebabkan oleh terganggunya ekosistem hulu DAS, meningkatnya beban pencemaran limbah domestik, dan lemahnya pengendalian ruang di wilayah tangkapan air.

Kondisi ini diperparah oleh buruknya akses dan infrastruktur sanitasi aman. Hingga tahun 2024, hanya 10,88 persen penduduk Sulawesi Selatan yang memiliki akses terhadap sanitasi

layak sesuai standar aman. Capaian ini bahkan mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Selain faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan lumpur tinja secara aman, tantangan lainnya adalah minimnya ketersediaan fasilitas dasar seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)—yang bahkan belum dimiliki oleh 8 kabupaten—dan tidak optimalnya pemeliharaan IPAL domestik skala komunitas. Beberapa IPLT yang telah dibangun juga mengalami idle capacity tinggi akibat rendahnya pemanfaatan dan kurangnya integrasi layanan penyedotan lumpur tinja dengan sistem pengolahan.

Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah menunjukkan peningkatan tekanan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi mendorong peningkatan volume timbulan sampah, sementara fasilitas pengelolaan seperti TPA dan TPST berskala regional masih terbatas. Sebagian besar TPA telah mencapai kapasitas maksimum dan belum memenuhi prinsip sanitasi yang memadai. Pengelolaan sampah juga masih didominasi oleh pendekatan kumpul-angkut-buang tanpa didukung sistem daur ulang dan pengurangan sampah dari sumber. Lemahnya pengawasan, keterbatasan SDM teknis, dan belum efektifnya sinergi antar-OPD turut memperburuk efektivitas pengelolaan sampah.

Akar dari permasalahan ini terletak pada belum optimalnya integrasi kebijakan lingkungan dalam perencanaan pembangunan lintas sektor. Isu lingkungan masih dianggap sekunder dan belum menjadi landasan utama dalam penentuan arah kebijakan pembangunan wilayah. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, keterbatasan anggaran pengelolaan SDA, serta minimnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam konservasi lingkungan turut memperdalam kesenjangan antara capaian indikator makro dan kondisi riil di lapangan.

Apabila tidak ditangani secara sistemik, kondisi ini akan mempercepat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan, serta mengancam ketahanan air, pangan, dan energi jangka panjang. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola lingkungan harus menjadi agenda prioritas yang mencakup restorasi ekosistem kritis, penguatan regulasi pemanfaatan ruang, revitalisasi infrastruktur sanitasi dan persampahan, serta edukasi lingkungan berbasis komunitas.

### 18. Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam membangun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Letak geografis provinsi yang mencakup wilayah pesisir yang panjang, kawasan pegunungan, serta padatnya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan seperti Mamminasata, menjadikan daerah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi. Kerentanan ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang kian nyata dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki skor 162,99, yang menempatkannya dalam kategori risiko tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat dan sistem pendukung di daerah ini masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan kapasitas adaptasi yang terbatas. Pada tahun yang sama, tercatat 167 kejadian banjir yang berdampak terhadap lebih dari 7.200 jiwa serta merusak lebih dari 55.000 unit fasilitas publik, termasuk sekolah, rumah ibadah, layanan kesehatan, dan kantor pemerintahan.

Fenomena perubahan iklim telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan intensitas dan frekuensi bencana tersebut. Kenaikan suhu udara, ketidakpastian pola hujan, serta meningkatnya permukaan laut menyebabkan cuaca ekstrem, kekeringan, banjir bandang, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir seperti Takalar, Luwu Timur, dan Pangkep. Curah hujan yang tinggi diikuti oleh sistem drainase kota yang tidak memadai juga memicu banjir

berkepanjangan di kawasan urban, seperti Makassar dan sekitarnya. Di sisi lain, kekeringan menyebabkan penurunan debit air, yang berdampak pada produksi pangan dan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah pedalaman.

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri. Di balik tingginya risiko dan dampak bencana, terdapat berbagai akar persoalan yang saling terkait, seperti terbatasnya infrastruktur publik yang tahan bencana, lemahnya sistem peringatan dini dan manajemen risiko, serta minimnya pengarusutamaan aspek kebencanaan dan iklim dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Di samping itu, fragmentasi kelembagaan dan lemahnya integrasi kebijakan antar sektor turut memperburuk kapasitas adaptif daerah dalam merespons ancaman yang semakin nyata.

Dampak dari kondisi ini sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi**,** meningkatnya beban sosial, hingga kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas hidup masyarakat**,** khususnya kelompok rentan. Sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan menjadi yang paling terdampak, sehingga mengganggu upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Menghadapi situasi ini, arah penanganan strategis yang perlu ditempuh adalah memperkuat ketangguhan daerah secara sistemik melalui pendekatan pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat dan kelembagaan, mengembangkan sistem peringatan dini yang inklusif dan berbasis komunitas, serta memperkuat regulasi dan tata ruang yang berbasis risiko. Upaya mitigasi juga perlu dipercepat melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor utama seperti energi, transportasi, dan penggunaan lahan, termasuk melalui implementasi sistem angkutan umum massal rendah emisi di Kawasan Mamminasata.

Lebih jauh, edukasi dan kesadaran publik tentang risiko iklim serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan pengurangan risiko menjadi elemen penting dalam membangun daya lenting. Dengan langkah-langkah ini, Sulawesi Selatan dapat bergerak menuju arah pembangunan yang lebih adaptif, tangguh, dan berkelanjutan, demi melindungi kesejahteraan masyarakat kini dan generasi mendatang.

### 2.3.2. ISU STRATEGIS RPJMD 2025-2029

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan adalah kondisi yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan rencana pembangunan. Olehnya itu membutuhkan perhatian dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.

**1. Penguatan Fondasi Sosial dan Kualitas SDM dalam Menghadapi Bonus Demografi serta Tantangan Global**

Provinsi Sulawesi Selatan tengah berada pada momentum strategis untuk memanfaatkan bonus demografi yang ditandai oleh tren penurunan angka ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan pada tahun 2024 mencapai 44,78, yang mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia produktif. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan dasar yang merata, khususnya di wilayah perdesaan dan kepulauan. Ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah hinterland menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di tengah tekanan global akibat urbanisasi, transformasi digital, serta perubahan struktur penduduk dunia yang menua (aging population), Sulawesi Selatan menghadapi tantangan daya saing tenaga kerja yang masih rendah. Partisipasi pemuda dalam kewirausahaan juga

relatif terbatas, tercermin dari persentase wirausaha baru yang masih di bawah 3% angkatan kerja, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga lebih rendah (53% dibanding laki-laki 81%), menunjukkan masih kuatnya kesenjangan gender. Sektor-sektor unggulan daerah belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal karena keterbatasan kompetensi dan keterampilan. Ketidaksiapan talenta digital di tengah percepatan transformasi teknologi global menambah kompleksitas persoalan ini. Sementara itu, sistem pendidikan vokasional belum mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, terutama pada sektor-sektor berbasis industri dan teknologi.

Perubahan struktur demografi juga menuntut penguatan sistem perlindungan sosial. Meningkatnya jumlah lansia, disabilitas, dan anak-anak memerlukan respons kebijakan yang adaptif dalam bidang jaminan sosial, layanan kesehatan, serta ketahanan keluarga. Isu perlindungan anak juga menjadi tantangan penting. Angka kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih relatif tinggi, yang tidak hanya mengancam tumbuh kembang anak tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas generasi mendatang. Tanpa perlindungan yang memadai, bonus demografi dapat terdistorsi oleh tingginya jumlah anak yang rentan secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Ketahanan sosial masyarakat juga diuji oleh perubahan nilai dan tekanan sosial yang muncul akibat urbanisasi dan disrupsi budaya lokal.

Aglomerasi yang terjadi di wilayah Mamminasata telah menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan tekanan baru terhadap tata ruang dan daya dukung lingkungan. Urbanisasi yang tidak diiringi dengan perencanaan spasial yang terpadu dan berkelanjutan telah mendorong alih fungsi lahan, meningkatkan beban infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, transportasi), serta memicu potensi konflik sosial akibat persaingan ruang hidup dan kesempatan kerja.

Lebih jauh, migrasi penduduk dari desa ke kota memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kawasan industri di Bantaeng dan Luwu Timur yang tumbuh pesat menjadi magnet tenaga kerja produktif, namun juga memunculkan tantangan baru dalam aspek mobilitas, penyediaan perumahan, dan peningkatan kualitas layanan dasar.

Isu strategis ini menuntut intervensi kebijakan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data, untuk memastikan bahwa potensi demografi dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

### 2. Optimalisasi Stabilitas Sosial, Politik, dan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Daerah

Stabilitas sosial, politik, dan budaya merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di Provinsi Sulawesi Selatan kondisi ini belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka pelanggaran ketertiban umum, fluktuasi kasus kejahatan, serta rendahnya rasa aman masyarakat mencerminkan masih lemahnya sistem keamanan dan perlindungan hukum. Di sisi lain, kualitas demokrasi substantif masih berada pada kategori sedang, yang ditandai oleh rendahnya partisipasi publik yang bermakna, literasi politik yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan politik yang belum merata.

Situasi tersebut semakin kompleks dengan adanya pasang surut kesadaran moderasi beragama dan melemahnya ketahanan budaya lokal. Kerukunan antarumat beragama masih rentan terhadap gesekan horizontal, sementara arus informasi digital tanpa filter kerap memperkuat polarisasi, intoleransi, dan radikalisme. Di bidang budaya, melemahnya pewarisan nilai kearifan lokal, menurunnya vitalitas bahasa daerah, serta rendahnya

kontribusi ekonomi budaya menunjukkan rapuhnya fondasi identitas dan kohesi sosial masyarakat.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, risiko terjadinya konflik sosial, disintegrasi nilai, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin besar. Hal ini bukan hanya menghambat pembangunan manusia yang berkarakter, tetapi juga menurunkan daya tarik investasi dan mengurangi daya saing daerah. Oleh karena itu, penguatan stabilitas sosial, politik, dan budaya melalui penegakan hukum yang adil, peningkatan literasi politik dan hukum, penguatan moderasi beragama, serta revitalisasi kebudayaan lokal merupakan agenda strategis yang harus dijalankan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.

### 3. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi strategis dalam sistem ketahanan pangan nasional. Selain sebagai *lumbung pangan* utama Indonesia, provinsi ini juga berperan sebagai *hub logistik* Kawasan Timur Indonesia yang menopang distribusi komoditas pangan lintas wilayah. Posisi ini menjadikan ketahanan dan kedaulatan pangan Sulawesi Selatan tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan daerah, tetapi juga secara signifikan memengaruhi stabilitas pangan nasional. Namun demikian, peran strategis ini belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pangan daerah yang tangguh, adaptif, dan merata.

Permasalahan utama yang dihadapi mencakup tantangan struktural, ekologis, dan sosial-ekonomi yang kompleks. *Pertama*, tekanan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi ke sektor non-pertanian terus meningkat, terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengancam keberlanjutan produksi pangan dan mempersempit basis produksi komoditas strategis. Selain itu, sebagian besar lahan pertanian yang tersisa mengalami degradasi, keterbatasan akses irigasi, dan minim penerapan teknologi pertanian modern. *Kedua,* kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana semakin memperburuk situasi ketahanan pangan. Variabilitas cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta intrusi air laut berdampak langsung pada keberhasilan musim tanam, menurunkan produktivitas, dan memunculkan ketidakpastian pasokan pangan. Adaptasi terhadap perubahan iklim masih terbatas, baik dari sisi teknologi budidaya, kelembagaan petani, maupun sistem peringatan dini bencana. *Ketiga,* struktur pelaku utama produksi pangan yakni petani kecil masih didominasi oleh rumah tangga dengan kapasitas terbatas. Lebih dari 50 persen petani di Sulawesi Selatan merupakan petani kecil dengan keterbatasan dalam akses terhadap pembiayaan, teknologi, informasi pasar, dan kelembagaan usaha tani yang lemah. Ketimpangan daya saing ini menyebabkan rendahnya efisiensi produksi dan lemahnya posisi tawar dalam rantai pasok pangan. *Keempat*, akses dan distribusi pangan belum merata. Wilayah kepulauan, perdesaan terpencil, dan daerah pegunungan masih menghadapi kesenjangan pasokan dan harga pangan yang tinggi, akibat keterbatasan infrastruktur distribusi, logistik, dan rantai pasok yang belum efisien. Situasi ini turut berkontribusi terhadap kerentanan pangan rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. *Kelima*, dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat masih kurang beragam dan tidak bergizi seimbang. Rendahnya literasi gizi, terbatasnya ketersediaan pangan lokal bergizi, serta belum optimalnya edukasi publik menyebabkan permasalahan gizi ganda: stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro, hingga obesitas. Indeks Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan memang berada pada posisi keempat nasional (2024), namun tingginya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) serta rendahnya capaian skor Pola Pangan Harapan menunjukkan bahwa tantangan ketahanan

konsumsi pangan masih signifikan. *Keenam,* peran Sulawesi Selatan sebagai simpul logistik pangan nasional belum optimal. Sistem logistik belum terintegrasi, sarana penyimpanan dan pasca-panen seperti cold storage dan *distribution center* masih terbatas, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam manajemen stok dan distribusi pangan belum berjalan efektif.

Oleh karena itu, pembangunan sistem pangan Sulawesi Selatan perlu diarahkan pada transformasi menyeluruh, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup perlindungan dan optimalisasi lahan pangan berkelanjutan, disertai peningkatan produktivitas berbasis teknologi ramah lingkungan; penguatan kapasitas dan kelembagaan petani kecil, termasuk akses pembiayaan, perlindungan harga, dan integrasi dalam rantai nilai; pembangunan sistem logistik pangan yang terintegrasi dan berkeadilan wilayah, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar); diversifikasi konsumsi pangan dan penguatan ketahanan gizi, melalui peningkatan literasi gizi dan pemanfaatan pangan lokal; adaptasi sistem pangan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, termasuk sistem peringatan dini, konservasi sumber daya, dan pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*); peningkatan tata kelola pangan lintas sektor dan lintas wilayah, untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Harapannya, Sulawesi Selatan akan mampu mengokohkan perannya sebagai penyangga utama ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan petani serta keadilan konsumsi masyarakat

**4. Ketimpangan dan Kerentanan Struktur Ekonomi Daerah terhadap Krisis Iklim dan Dinamika Global**

Sulawesi Selatan menunjukkan tren pemulihan ekonomi pascapandemi dengan pertumbuhan mencapai 5,02% pada tahun 2024. Namun di balik capaian tersebut, struktur ekonomi daerah masih menghadapi dua tantangan mendasar yang saling terkait: tingginya ketimpangan pembangunan antarwilayah dan kerentanan terhadap guncangan eksternal, baik dari aspek iklim maupun dinamika global. Ketimpangan pendapatan per kapita dan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan seperti Makassar menandakan bahwa proses pertumbuhan belum berlangsung secara inklusif dan merata. Kondisi ini diperburuk oleh masih belum optimalnya pembangunan perdesaan sebagai basis penggerak ekonomi lokal yang terlihat dari persentase desa mandiri yang baru mencapai 32,88 persen pada 2024, ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer (pertanian dan perikanan) yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, krisis iklim, serta terbatasnya nilai tambah dan produktivitas sektor tersebut.

Di sisi lain, upaya industrialisasi dan hilirisasi belum menunjukkan hasil signifikan, dengan kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 13,02%. Kelemahan dalam integrasi ekonomi antarwilayah maupun dengan pasar global menambah kompleksitas permasalahan struktural. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia yang masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal, menyebabkan rendahnya daya saing daerah di tengah tuntutan transformasi menuju ekonomi hijau dan berbasis teknologi tinggi.

Tingginya tingkat inklusi keuangan secara agregat belum cukup untuk menjamin akses yang merata, terutama di wilayah terpencil yang masih tertinggal dari segi infrastruktur keuangan dan literasi masyarakat. Ketimpangan dalam akses pembiayaan turut memperlemah kapasitas ekonomi lokal dalam menghadapi tekanan eksternal maupun membangun kemandirian.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Sulawesi Selatan membutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga

memperkuat resiliensi struktur ekonomi, mendorong transformasi sektoral menuju nilai tambah yang lebih tinggi, mengatasi ketimpangan wilayah, serta memperkuat kualitas SDM dan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim dan tantangan global. Tanpa agenda transformasi yang terarah dan inklusif, daerah akan tetap berada dalam siklus pertumbuhan rendah, ketergantungan tinggi, dan ketimpangan yang kronis.

### 5. Optimalisasi Posisi Strategis Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam mendukung Pemerataan dan Akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), menjadi peluang besar yang harus direspons secara strategis oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu titik krusialnya adalah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penetapan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan memainkan peran vital sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan timur.

Sulawesi Selatan, dengan letak geografis yang sangat strategis dan memiliki faktor *endowmen* sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, seharusnya mampu mengambil peran sebagai *regional hub* utama dan episentrum pertumbuhan baru bagi KTI. Perekonomian Sulawesi Selatan berpotensi menjadi jangkar utama pembangunan di timur Indonesia dengan memperkuat nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat daya saing melalui iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, terdapat dua momentum penting yang harus dioptimalkan. Pertama, percepatan realisasi investasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam sebagai basis hilirisasi industri yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai ekspor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, posisi Sulawesi Selatan sebagai simpul penghubung logistik antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN dan kawasan KSN lainnya harus diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

Pengembangan wilayah berbasis poros konektivitas seperti Poros Selatan–Selatan, Selatan–Bagian Tengah, Selatan–Utara, Utara–Utara, dan Utara–Bagian Tengah, merupakan strategi spasial yang harus dioptimalkan untuk membentuk jaringan pusat-pusat pertumbuhan baru yang merata dan berbasis potensi lokal. Tiap poros memiliki kekuatan sektoral dan peran geopolitik-ekonomi yang strategis. Misalnya, Poros Selatan–Selatan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan kawasan pariwisata strategis Selayar-Takabonerate, mengusung potensi besar di bidang industri, pertanian, perikanan, pariwisata, serta tambang dan energi. Poros Selatan–Utara yang menghubungkan Mamminasata dengan Parepare berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi yang terintegrasi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), sekaligus mendukung peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas baru.

Namun demikian, pemanfaatan atas peluang tersebut masih belum optimal. Lemahnya integrasi perencanaan sektoral dan spasial, terbatasnya daya dukung infrastruktur, rendahnya daya saing kawasan, serta belum maksimalnya sinergi antar kabupaten/kota dan pelaku usaha menjadi tantangan utama dalam mendorong Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu perumusan kebijakan pembangunan wilayah berbasis koridor dan klaster ekonomi unggulan, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan infrastruktur strategis yang mendukung hilirisasi industri, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Seluruh upaya ini harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan peran Sulawesi Selatan dalam ekosistem pembangunan nasional, khususnya dalam konteks akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

### 6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif

Pemerintahan yang efektif dan tata kelola fiskal yang andal merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, responsif, dan berdaya saing. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan penting dalam reformasi birokrasi, ditandai dengan peningkatan indeks SPBE, capaian indeks reformasi hukum yang tinggi, serta penguatan pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, efektivitas birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya potensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rendahnya efisiensi pengelolaan aset daerah, serta terbatasnya inovasi pembiayaan alternatif. Belanja daerah juga belum cukup produktif dalam mendorong transformasi struktural ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan porsi belanja pegawai yang masih mendominasi dibandingkan belanja pembangunan.

Tekanan global dan nasional terhadap reformasi fiskal dan digitalisasi pemerintahan menuntut kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, tangkas, dan terbuka terhadap perubahan. Tantangan lain juga datang dari ketidakstabilan ekonomi makro, krisis lapangan pekerjaan, inflasi, serta ketertinggalan dalam transformasi digital hampir di seluruh sektor. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kemandirian fiskal melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah, serta mendorong efektivitas belanja publik yang berbasis kinerja.

Isu ini menuntut pendekatan integratif yang menghubungkan reformasi kelembagaan, digitalisasi pemerintahan, kemandirian fiskal, serta pelibatan masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pembangunan, guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendorong efisiensi pembangunan, serta memastikan pembangunan yang adil dan inklusif.

### 7. Kesiapan Daerah Menghadapi Disrupsi Teknologi dalam Agenda Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi digital di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan positif, terlihat dari meningkatnya Indeks Teknologi Digital Nasional (TDN) serta tumbuhnya ekosistem digital seperti startup dan layanan publik berbasis elektronik. Kecepatan internet yang memadai, meningkatnya tingkat konektivitas di sekolah dan puskesmas, serta digitalisasi layanan pemerintahan menunjukkan bahwa provinsi ini telah berada di jalur yang tepat dalam membangun infrastruktur digital yang mendukung transformasi.

Namun demikian, perkembangan ini belum dibarengi dengan kesiapan struktural dan kultural dalam menghadapi dampak disrupsi teknologi, terutama yang dipicu oleh

kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, big data, dan *internet of things* (IoT). Disrupsi teknologi telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial secara fundamental, termasuk menggeser jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan, menuntut keterampilan baru, serta menantang sistem layanan publik konvensional. Sementara itu, SDM di Sulawesi Selatan secara umum masih menghadapi kendala dalam hal literasi digital dan kesiapan kerja berbasis teknologi. Hal ini diperparah oleh kesenjangan akses digital di wilayah perdesaan dan kawasan tertinggal yang masih mengalami blank spot hingga 37,12%.

Dalam konteks pembangunan, disrupsi teknologi menjadi pisau bermata dua: di satu sisi membuka peluang baru dalam efisiensi, inovasi, dan perluasan layanan; namun di sisi lain dapat memperdalam ketimpangan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Ketiadaan kebijakan protektif terhadap pekerja terdampak otomatisasi, lemahnya regulasi etika dan perlindungan data pribadi, serta belum terintegrasinya sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja digital, menjadi tantangan serius yang perlu segera dijawab.

Secara nasional, arah transformasi digital diarahkan untuk mendorong efisiensi layanan publik, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Secara regional, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai simpul digital di kawasan timur Indonesia, serta sebagai wilayah penyangga bagi pertumbuhan Ibu Kota Negara (IKN), yang menuntut kesiapan teknologi dan SDM digital yang mumpuni.

Oleh karena itu, upaya transformasi digital Sulawesi Selatan harus difokuskan pada penutupan kesenjangan digital antardaerah, peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan masa depan (*future skills*), pengembangan ekosistem digital inklusif untuk UMKM, koperasi, dan sektor informal, perlindungan sosial terhadap dampak otomatisasi, serta penyusunan kerangka kebijakan dan regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi disruptif.

Dengan langkah tersebut, transformasi digital bukan hanya menjadi sarana modernisasi, tetapi juga instrumen utama dalam menciptakan pemerataan, keadilan sosial, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

### 8. Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Mengancam Ketahanan Sumber Daya Esensial dan Keberlanjutan Pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menghadapi peningkatan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang berimplikasi langsung pada penurunan kualitas ekosistem, keterbatasan pemanfaatan sumber daya esensial (air, energi, dan lahan), serta munculnya risiko ekologis yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Tekanan ini diperparah oleh pertumbuhan penduduk, pesatnya alih fungsi lahan untuk permukiman dan industri, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan lintas sektor dan wilayah.

Di sejumlah wilayah perkotaan dan metropolitan seperti Mamminasata, peningkatan kebutuhan akan energi, air bersih, dan infrastruktur dasar telah melampaui kapasitas layanan eksisting. Contohnya, daya dukung air di beberapa kawasan perkotaan telah menunjukkan tanda-tanda kritis, yang tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap air tanah dan air isi ulang. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan, tetapi juga mengindikasikan potensi kerusakan lingkungan jangka panjang seperti intrusi air laut, penurunan muka tanah, dan hilangnya fungsi kawasan resapan.

Di sisi lain, disrupsi iklim dan teknologi semakin mempercepat perubahan tata ruang dan penggunaan lahan yang tidak selaras dengan prinsip berkelanjutan. Praktik pemanfaatan

sumber daya alam yang belum mengedepankan prinsip konservasi dan rendah karbon juga menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Sementara itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi daerah perlu dilandaskan pada pertimbangan ekologis dan keterbatasan kapasitas lingkungan. Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan potensi SDA yang besar, tidak cukup hanya mengandalkan cadangan alamnya. Diperlukan dukungan sistemik dalam bentuk kebijakan pelestarian daya dukung lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau, dan penguatan sistem peringatan dini serta mitigasi risiko lingkungan.

Penanganan isu ini juga menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan daerah. Transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan harus didukung oleh pengembangan kapasitas SDM yang adaptif terhadap teknologi lingkungan, sistem pengelolaan air terpadu, serta pembangunan sistem informasi daya dukung-daya tampung yang terkini dan berbasis spasial.

Dengan demikian, fokus pada pemulihan dan penguatan daya dukung serta daya tampung lingkungan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah. Isu ini bersifat lintas sektor dan memerlukan pendekatan kolaboratif antar-pemangku kepentingan, lintas kewenangan wilayah, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk memastikan terwujudnya ketahanan sumber daya esensial dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

### 9. Meningkatnya Ancaman Perubahan Iklim dan Risiko Bencana terhadap Ketahanan Wilayah

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang kaya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan garis pantai sepanjang ±1.979 km, hutan tropis, cadangan air tanah, dan potensi energi baru terbarukan. Ekosistem pesisirnya yang terdiri dari mangrove, terumbu karang, dan padang lamun memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, pertanian, dan perikanan. Namun, potensi ini kini berada dalam tekanan serius akibat ancaman krisis lingkungan global yang kian nyata dan kompleks.

Dunia saat ini tengah menghadapi ***Triple Planetary Crisis***: perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, serta peningkatan limbah dan polusi. Ketiganya saling berkaitan dan memberikan tekanan kuat terhadap sistem alam dan sosial. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, peningkatan kejadian kekeringan dan banjir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dampak ini tidak hanya menjadi isu global, tetapi telah dirasakan nyata di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan, perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor-sektor kunci. Bencana banjir, kekeringan, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem telah mengganggu stabilitas wilayah, menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan, serta memicu kerentanan sosial-ekonomi. Posisi strategis provinsi sebagai lumbung pangan nasional terancam akibat meningkatnya kegagalan panen dan menurunnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang disebabkan oleh kenaikan suhu laut, perubahan arus, dan degradasi ekosistem pesisir.

Di sisi lain, resiliensi daerah terhadap perubahan iklim dan bencana masih rendah. Ketidaksesuaian peruntukan ruang di wilayah rawan bencana, ketimpangan kesiapsiagaan antarwilayah, belum optimalnya integrasi pengelolaan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan, dan lemahnya perlindungan kawasan pesisir menjadi hambatan utama.

Ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan pun semakin memperparah kondisi, terutama pada wilayah padat penduduk dan kawasan pesisir yang terdegradasi.

Krisis ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu dan perubahan curah hujan mendorong penyebaran penyakit berbasis vektor dan air, seperti malaria dan diare, serta memperbesar tekanan terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan ke depan tidak hanya harus memperkuat perlindungan ekosistem dan infrastruktur adaptif, tetapi juga mengedepankan **pendekatan inklusif, berbasis komunitas, dan lintas sektor** dalam upaya mitigasi dan adaptasi.

Dengan demikian, penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada semua level, mulai dari level komunitas, kabupaten/kota, hingga provinsi, adalah keniscayaan. Upaya ini harus ditopang oleh kebijakan daerah yang integratif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan global, selaras dengan komitmen nasional seperti Perjanjian Paris, target pengurangan emisi GRK, SDGs (khususnya Tujuan 13, 14, dan 15), serta pembangunan rendah karbon dan transisi energi bersih.

### 10. Penurunan Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengukur kapasitas suatu wilayah dalam menciptakan fondasi ekonomi yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan capaian IDSD sebesar 3,61 pada tahun 2024, yang masih berada di atas rata-rata nasional (3,43). Namun, penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,70 menjadi sinyal penting bahwa struktur fundamental daya saing daerah menghadapi tantangan serius yang perlu segera direspons secara strategis.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya struktur dan ketidakterpaduan antar pilar pengungkit daya saing daerah. Meskipun Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi domestik yang besar, tercermin dari skor ukuran pasar yang tinggi (4,71), potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat ketimpangan kinerja pilar-pilar lainnya. Pilar efisiensi pasar produk menunjukkan penurunan skor dari 2,61 menjadi 2,41, yang menggambarkan masih rendahnya daya saing pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar dan berinovasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya keterkaitan antarsektor dan belum terbangunnya rantai nilai yang terintegrasi, khususnya pada komoditas unggulan ekspor.

Masalah struktural lainnya adalah rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja. Skor 2,66 menandakan bahwa sistem ketenagakerjaan di daerah belum mampu merespons kebutuhan industri secara dinamis. Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan sektor produktif menyebabkan mismatch yang berdampak langsung pada produktivitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja melalui program pelatihan vokasi dan link and match.

Di sisi lain, sistem keuangan daerah juga belum inklusif dan responsif. Skor 2,80 mencerminkan keterbatasan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM, serta rendahnya literasi dan inklusi keuangan. Ketidaksiapan sistem keuangan ini menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan dunia usaha yang produktif dan berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, sektor-sektor strategis tidak mendapatkan dukungan modal yang cukup untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Kondisi ini diperumit oleh belum optimalnya kerja sama antarwilayah dan antar pelaku pembangunan. Kerja sama yang selama ini terjalin masih bersifat administratif dan belum diarahkan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kolaborasi multipihak.

Berbagai kelemahan ini menimbulkan dampak yang nyata. Potensi pasar domestik yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal karena tidak didukung oleh struktur produksi, tenaga kerja, dan sistem keuangan yang efisien. Turunnya kontribusi investasi produktif terhadap PDRB, dari 39,45% pada tahun 2020 menjadi 36,65% di tahun 2024, menandakan penurunan aktivitas investasi riil dan melemahnya fondasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menurun sebesar 8,09%, dan volumenya merosot hingga 15,23%. Hal ini disebabkan dominasi bahan mentah dalam komoditas ekspor dan belum berkembangnya industri pengolahan berbasis keunggulan daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah penanganan strategis perlu difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, penguatan efisiensi pasar melalui pengembangan industri pengolahan dan integrasi rantai nilai sektor unggulan. Kedua, revitalisasi sistem ketenagakerjaan daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penguatan keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, reformasi sistem keuangan daerah untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Keempat, optimalisasi kerja sama pembangunan yang bersifat produktif, kolaboratif, dan inovatif antar wilayah, pelaku usaha, dan institusi pengetahuan. Kelima, penguatan ketahanan sosial budaya melalui internalisasi nilai-nilai produktif, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, serta akselerasi transformasi digital yang inklusif.

Melalui pendekatan yang holistik dan lintas sektor dapat memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing daerah harus diarahkan pada perbaikan struktural yang menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan pasar produk dan tenaga kerja, penguatan sistem keuangan yang inklusif, hingga pembentukan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Langkah-langkah ini penting untuk menjadikan daya saing daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berdaya tahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

### 11. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Daerah yang Berbasis Keberlanjutan dan Berdaya Saing Global

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang sangat besar, meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, garam rakyat, pariwisata, hingga industri kreatif dan UKM. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diolah dan dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk hilirisasi industri yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.

Hilirisasi di sektor pertanian dan hortikultura, misalnya, masih terbatas pada pengolahan sederhana, belum berkembang menjadi industri pangan modern seperti tepung olahan, produk beku, atau minuman herbal siap saji. Demikian pula di sektor perkebunan dan perikanan, proses pengolahan masih menghadapi tantangan rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, dan lemahnya infrastruktur pendukung, khususnya di luar kota-kota utama.

Secara global, terdapat dorongan kuat menuju transisi industri hijau (*green industry*) dan *traceability* rantai pasok yang menuntut proses hilirisasi ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Namun, pemanfaatan SDA di tingkat lokal masih belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, serta menimbulkan risiko peningkatan limbah dan tekanan terhadap ekosistem, terutama di sektor industri pengolahan primer seperti sawit, kopi, dan produk perikanan.

Sementara itu, pada level nasional, dorongan untuk pengembangan teknologi dan penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas daerah dalam inovasi industri berbasis SDA. Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antarwilayah, lemahnya SDM dan teknologi pengolahan di tingkat lokal, serta belum berkembangnya pusat-pusat industri hilir di luar kota-kota utama seperti Makassar.

Secara regional, posisi Sulawesi Selatan yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan motor pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seharusnya menjadi peluang besar untuk mempercepat transformasi hilirisasi industri lokal. Namun integrasi ekonomi regional dan global masih lemah, ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita, belum meratanya manfaat SDA antarkelompok masyarakat, serta terbatasnya kapasitas koperasi, UMKM, dan wirausaha lokal dalam masuk ke rantai nilai industri global.

Olehnya itu, hilirisasi SDA di Sulawesi Selatan perlu didorong secara terintegrasi dan inklusif, melalui peningkatan produktivitas ekonomi lokal, penguatan kapasitas teknologi dan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur industri hilir lintas wilayah, pemanfaatan kawasan industri secara berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan komunitas lokal).

Isu strategis ini bersifat lintas sektor dan menjadi kunci bagi terwujudnya transformasi ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika global.

# BAB III

# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Gubernur Sulawesi Selatan terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2025–2045 dan wajib selaras dengan RPJMN. RPJMD menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra OPD dan RKPD serta menjadi acuan sektor non pemerintah.

## 3.1. VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1.1. Visi

Visi RPJMD merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan dapat terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, dan memberikan arah bagi perencanaan strategis selama lima tahun kedepan. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah, sesuai visi kepala daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi Misi yang diserahkan ke KPUD. Selain itu rumusan visi juga memperhatikan keselarasannya dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Rumusan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

**“Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER”**

MAJU adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang lebih berkembang dan meningkat pembangunannya serta merupakan lanjutan pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan pondasi kuat yang telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Ketersediaan infrastruktur semakin memadai dan menjangkau wilayah sulit akses, serta pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

BERKARAKTER, adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya etos kerja dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta kesesuaian antara perkataan dan perbuatan (taro ada taro gau).

Sulawesi Selatan yang berkarakter akan membentuk pembangunan yang mendepankan nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, kesesuaian antara kata dan perbuatan, adaptif, kompetitif dan berbasis kearifan lokal. Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memiliki daya saing yang tangguh dengan semangat pantang menyerah berdasarkan nilai-nilai luhur, seperti getteng (teguh), lempu (jujur),

ada tongeng (ucapan yang benar), temmapasilengeng (tidak memihak), berpikiran maju, memegang teguh akhlak, adab, dan sopan santun (bermoral).

Rumusan visi RPJMD ini telah selaras dan mendukung pencapaian visi RPJMN Tahun 2025-2029, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel keselarasan berikut. Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan jika seluruh provinsi juga mengupayakan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk Sulawesi Selatan yang lebih maju pada lima tahun kedepan. Keselarasan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan visi RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.1.**
**Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029**

| Visi RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 | Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 |
|---|---|
| Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 | Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter |

## 3.1.2. Misi

Misi dalam RPJMD ini dipahami sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029. Sejalan dengan transformasi yang menjadi pendekatan pembangunan nasional, dimana RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan Tahap Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi, maka upaya umum yang bersifat menggerakkan perubahan secara transformatif perlu dilakukan agar Sulawesi Selatan dapat berkontribusi signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 merupakan hasil reformulasi misi pasangan kepala daerah terpilih yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada KPUD tanpa mengurangi substansinya, dengan mempertimbangkan kaidah perumusan misi agar dapat diturunkan secara tepat ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Reformulasi rumusan misi dimaksud dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel III.2.**
**Reformulasi Misi berdasarkan Dokumen Visi Misi Pasangan Kepala Daerah yang diserahkan KPUD**

| Misi sesuai Dokumen Visi Misi | Reformulasi Misi |
|---|---|
| Misi 1. Memajukan layanan pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, dan kemasyarakatan berbasis kompetensi, berakhlak, dan berkearifan lokal | Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing |
| Misi 7. Memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan serta pelibatan kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas | |
| Misi 3. Melanjutkan hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta | |

| Misi sesuai Dokumen Visi Misi | Reformulasi Misi |
|---|---|
| sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing, berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan |
| Misi 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat, pedesaan, dan daerah 3T (Terluar, Termiskin dan Tertinggal) untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan, serta menangani gizi buruk dan stunting | |
| Misi 5. Mengembangkan desa mandiri sebagai pusat pertumbuhan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | |
| Misi 6. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani | Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani |
| Misi 5. Mendorong investasi padat karya dan berwawasan lingkungan | Misi 4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi |
| Misi 8. Memperkuat layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan menghadapi situasi bencana, berkeadilan, serta pengembangan pariwisata untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | |

Berdasarkan hasil reformulasi misi sebagaimana tabel diatas, maka rumusan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 berikut penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya saing**

Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan derajat kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata, untuk mewujudkan modal manusia Sulawesi Selatan yang unggul dan berdaya saing. Upaya transformasi layanan kesehatan dan pendidikan berbasis tenaga layanan kesehatan dan pendidikan yang kompeten, penggunaan teknologi modern, peningkatan infrastruktur dan layanan di daerah sulit akses, dan penyediaan layanan yang inklusif untuk kelompok rentan, menjadi upaya utama dalam misi ini.

Termasuk dalam misi ini adalah memperkuat kehidupan kemasyarakatan yang religius, harmonis dalam suasana damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, tanpa adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh. Upaya untuk mewujudkan kualitas keluarga, generasi muda yang berdaya saing, kompeten, dan berakhlak dalam bingkai kearifan lokal yang terpelihara, termasuk penguatan system perlindungan anak, juga menjadi muatan penting dalam misi ini. Misi ini memperkuat masyarakat yang berakhlak, religius dan berbudaya sebagai basis utama ketahanan sosial. Masyarakat tidak hanya berkembang secara material, tetapi juga memiliki integritas moral, spiritual, dan sosial yang tinggi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan berkelanjutan.

**Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan**

Misi ini mencakup upaya umum dalam mengembangkan hilirisasi ekonomi di Sulawesi Selatan meliputi hilirisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/manufaktur maupun pada industri ekstraktif dan pariwisata, termasuk

dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah. Upaya umum ini diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, menguatkan fiskal daerah, menguatkan integrasi ekonomi domestic dan global, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan berusaha, serta menguatkan swasembada pangan dan posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah sebagai bagian penting transformasi ekonomi Sulawesi Selatan, akan mendorong ekosistem usaha dan industri yang sehat dan produktif; pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata; serta penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Termasuk dalam misi ini adalah upaya umum pengembangan desa yang dirancang untuk menjadi sumber utama kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mendorong kemajuan tidak hanya di tingkat desa itu sendiri, tetapi juga di wilayah sekitarnya, upaya pengelolaan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan, pengembangan infrastruktur yang memungkinkan desa untuk berkembang dan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang terhubung dengan pasar yang lebih besar, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di desa, pengembangan sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan, dan pengembangan kerjasama desa.

**Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani**

Misi ini mencakup upaya umum untuk mewujudkan transformasi digital melalui berbagai upaya untuk mendorong pengembangan digitalisasi dan pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah, serta transformasi tatakelola pemerintahan melalui penguatan penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, inklusifitas dan kepatuhan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat. Termasuk dalam misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan literasi digital dan ketrampilan pemanfaatan teknologi digital dalam aktifitas sosial ekonomi masyarakat, penguatan digitalisasi layanan pembangunan dan pemerintahan, peningkatan kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital, penguatan infrastruktur teknologi dan digitalisasi pemerintahan dan layanan publik, penataan regulasi dan peningkatan kapasitas organisasi, penguatan integritas dan akuntabilitas, penerapan kultur pelayanan publik prima dan terintegrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan.

**Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.**

Misi ini mencakup upaya umum untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana yang adaptif, merata, berkelanjutan, dan berketahanan iklim yang merupakan elemen penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Termasuk dalam misi ini adalah upaya penyediaan infrastruktur yang fleksibel dan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan iklim dan faktor eksternal lainnya, pembangunan infrastruktur hijau yang rendah emisi karbon, layanan infrastruktur yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan, pengembangan system transportasi yang aksesibel dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektifitas wilayah, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di seluruh wilayah

di perkotaan, perdesaan, serta pesisir dan kepulauan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya kesenjangan.

Rumusan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini selaras dengan Misi RPJMN (Asta Cita), yang disajikan pada tabel keselarasan berikut.

**Tabel III.3.**
**Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMNasional (Asta Cita) Tahun 2025-2029**

| No | Misi RPJMD | Misi RPJMN /Asta Cita |
|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 |
| 1 | Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing | Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| | | Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas |
| | | Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |
| 2 | Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan | Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri |
| | | Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru |
| | | Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal |
| | | Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |
| 3 | Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani | Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan |
| 4 | Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan | Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong |

| No | Misi RPJMD | Misi RPJMN /Asta Cita |
|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 |
| | perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal |
| | | Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |

## 3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi *"Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter"*, diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari empat misi pembangunan daerah, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan tujuan dan sasaran disusun secara *logic* dan menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2025-2029 berdasarkan Misi RPJMD sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing, akan dicapai melalui 2 Tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia
2. Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Masyarakat terhadap Tantangan Pembangunan Global

Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan, akan dicapai melalui 1 Tujuan yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.

Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani, akan diwujudkan melalui 2 Tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Responsif

Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, diwujudkan melalui 1 Tujuan yaitu Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 17 sasaran pembangunan sebagai rangkaian kinerja untuk mencapai tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1, Meningkatnya Kualitas Modal Manusia, akan dicapai melalui perwujudan 2 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas-kesehatan secara merata
2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif

Tujuan 2, Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Masyarakat terhadap Tantangan Pembangunan Global, akan dicapai melalui perwujudan 3 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas demokrasi
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan
3. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas generasi muda dan kesetaraan gender

Tujuan 3, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, akan dicapai melalui perwujudan 5 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan
2. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global
3. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah
4. Meningkatnya pembangunan perdesaan
5. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

Tujuan 4, Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital, akan dicapai melalui perwujudan 2 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
2. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat

Tujuan 5, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Responsif, akan dicapai melalui perwujudan 3 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah

Tujuan 6, Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan yang Berkelanjutan, akan dicapai melalui perwujudan 2 Sasaran, yaitu :

1. Menguatnya kualitas infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran terhadap misi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.4.**
**Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan terhadap Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025-2029**

| MISI | TUJUAN | SASARAN | Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) |
|---|---|---|---|
| *-1* | *-2* | *-3* | *-4* |
| 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing | 1. Meningkatnya kualitas modal manusia | 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata | PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas |
| | | 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | |
| | 2. Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global | 3. Meningkatnya kualitas demokrasi | PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| | | 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan | PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |
| | | 5. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas generasi muda dan kesetaraan gender | PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas |
| 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan | 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif | 6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan | PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru |
| | | 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global | PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri |
| | | 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah | PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) |
|---|---|---|---|
| *-1* | *-2* | *-3* | *-4* |
| | | | Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal |
| | | 9. Meningkatnya pembangunan perdesaan | PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |
| | | 10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran | |
| 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani | 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital | 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi<br>12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat | PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan |
| | 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif | 13. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah<br>14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik<br>15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah | PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan |
| 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan | 16. Meningkatnya kualitas infrastruktur | PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal |
| | | 17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim | PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran pada akhir periode RPJMD Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.5.**
**Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 Berdasarkan Misi**

| MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Visi : SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER** | | | | | | | | | | |
| **Misi 1.** Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing | **T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia** | IT.1. Indeks Modal Manusia | Angka | n.a | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |
| | S. 1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata | IS.1.1.1 Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,83 | 73,95* | 74,06 | 74,33 | 74,6 | 74,87 | 75,14 |
| | S. 1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | IS.1.2.1 Rata rata lama sekolah | Tahun | 8,86 | 9,47 | 9,59-9,60 | 9,72 | 9,84-9,85 | 9,97-9,98 | 10,09-10,11 |
| | | IS.1.2.2 Harapan Lama sekolah | Tahun | 13,55 | 13,80-13,81 | 13,87-13,88 | 13,94-13,96 | 14,01-14,03 | 14,09-14,11 | 14,16-14,19 |
| | **T.2. Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global** | IT.2. Indeks Ketahanan Nasional | Angka | 2,87 | 3,04 | 3,09 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | 3,29 |
| | S. 2.1. Meningkatnya kualitas demokrasi | IS.2.1.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi | Angka | 76,43(2023) | 81.26 – 84.51 | 81,65 – 84.91 | 82.05 – 85.30 | 82,44 – 85,70 | 82.84 – 86.09 | 83.23 – 86,49 |
| | S. 2,2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan | IS.2.2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 79,04 | 79,34 – 79,35 | 79,52 – 79,73 | 79,96 – 80,11 | 80,40 – 80,49 | 80,83 –80,88 | 81,27 – 81,26 |

| MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | pemajuan kebudayaan | IS.2.2.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan | Skor | 55,26 (2023) | 56,43-56,51 | 56,99–57,11 | 57,55-57,71 | 58,12-58,31 | 58,68-58,92 | 59,24-59,52 |
| | S. 2.3. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender | IS.2.3.1. Indeks Perlindungan Anak | Angka | 60,74 (2023) | 61,37-62,48 | 61,97-63,48 | 62,58-64,49 | 63,19-65,49 | 63,8 – 66,50 | 64,41 – 67,51 |
| | | IS.2.3.2. Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 56,67 (2023) | 56,78* | 56,98* | 57,21* | 56,79-58,11 | 57,5 - 59 | 58,21-59,86 |
| | | IS.2.3.3. Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,366 (2023) | 0,348-0,344 | 0,336-0,331 | 0,324-0,317 | 0,312-0,304 | 0,301-0,291 | 0,289-0,278 |
| **Misi 2.** Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan | **T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif** | IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,02 | 5,0 - 5,8 | 5,2 -6,5 | 5,4-7,8 | 5,6-7,5 | 6,2-8,2 | 6,3-8,5 |
| | | IT.3.2.-Rasio Gini | Angka | 0,360 | 0,350 - 0,360 | 0,348 -0,358 | 0,346 -0,356 | 0.342 - 0,352 | 0,330 - 0,335 | 0,328 - 0,333 |
| | S.3.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan | IS.3.1.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | Persen | 13,02 | 13,05 | 13,61 | 14,17 | 14,73 | 15,26 | 15,85 |
| | | IS.3.1.2. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | Persen | 0.90 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,85 | 0,87 |
| | | IS.3.1.3. Indeks Ketahanan Pangan | Persen | 83,82 | 85,02 | 86,01 | 87 | 87,99 | 88,98 | 89,97 |
| | IS. 3.2. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global | IS.3.2.1. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB | Persen | 9,68 | 10,5* | 10,9* | 11,4 | 11,8* | 12,3 | 12,6* |

| MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | IS. 3.3. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah | IS. 3.2.2. Tingkat Inflasi (%) | Persen | 1,23 | 2,5-3,8 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 |
| | | IS. 3.3.1. Inklusi Keuangan | Persen | 75,02 | 80 | 85,03 | 90,33 | 92,65 | 95,38 | 95,61 |
| | IS.3.4. Meningkatnya pembangunan perdesaan | IS. 3.4.1. Persentase Desa Mandiri | Persen | 32,88 | 33,09 | 34,05 | 35,25 | 36,88 | 37,24 | 38,71 |
| | IS.3.5. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran | IS. 3.5.1. Tingkat Kemiskinan (%) | Persen | 7,77 | 7,30-7,89 | 6,5 – 7,0 | 6,44 - 6,86 | 6,38-6,54 | 3,49-4,49 | 3,48-4,48 |
| | | IS. 3.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,19 (Agst) | 3,80-4,10 | 3,64-4,03 | 3,49-3,96 | 3,33-3,89 | 3,50-3,97 | 3,02-3,76 |
| Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani | I.T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital | IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) | Nilai | 54,43 (2022) | 55,37 | 55,66 | 55,92 | 56,15 | 56,36 | 56,56 |
| | IS. 4.1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | IS.4.1.1. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN | Nilai | 59,93 (2022) | 61,66 | 62,12 | 62,54 | 62,92 | 63,26 | 63,58 |
| | IS. 4.2. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat | IS.4.2.1. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN | Nilai | 53,92 (2022) | 61,66 | 62,12 | 62,54 | 62,92 | 63,26 | 63,58 |

| MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | **T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, ~~dan~~ responsif** | IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 81,74 | 81,80 | 81,86 | 82 | 82,30 | 82,50 | 82,80 |
| | S. 5.1.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah | IS.5.1.1. Nilai SAKIP | Angka | 69,02 | 69,27 | 70,03 | 70,20 | 70,35 | 70,40 | 70,50 |
| | S.5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | IS.5.2.1. Indeks Pelayanan Publik | Poin | 4,12 | 4,41 | 4,44 | 4,48 | 4,51 | 4,55 | 4,59 |
| | S.5.3. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah | IS.5.3.1. Indeks Inovasi Daerah | Angka | 59,66 | 60 | 61,5 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| **Misi 4.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | **I.T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan** | IT.6.1. Indeks Wiliamson | Angka | n.a | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 |
| | | IT.6.2. Penurunan Intensitas Emisi GRK | persen | n.a | 29,70 | 33,46 | 37,22 | 40,98 | 44,73 | 48,49 |
| | S.6.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur | IS.6.1.1. Indeks Infrastruktur | Angka | 85,64 | 88,39 | 88,83 | 89,33 | 89,83 | 90,08 | 90,33 |
| | S.6,2. Meningkatya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim | IS.6.2.1. Indeks RIsiko Bencana | Poin | 140,76 | 135,46 | 134,20-133,12 | 132,94-130,79 | 131,69-128,45 | 130,43-126,12 | 129,17-123,78 |
| | | IS.6.2.2. IKLH | Angka | 75,69 | 77,6 | 77,82 | 78,03 | 78,25 | 78,46 | 78,67 |

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah sebagai tema pembangunan tahunan. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus pembangunan pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Tahapan pembangunan dimaksud disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III.6.**
**Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2025-2030**

| TAHAP I (2025) | TAHAP II (2026) | TAHAP III (2027) | TAHAP IV (2028) | TAHAP V (2029) | TAHAP VI (2030) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING | PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERAKHLAK DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF | AKSELERASI PEMBANGUNAN SDM, PELAYANAN PUBLIK, DAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN | PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH | PERWUJUDAN SDM BERKARAKTER DAN EKONOMI YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING | OPTIMALISASI SUMBER DAYA UNGGULAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING |

Dalam kerangka pencapaian misi melalui penataan tahapan pembangunan diatas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan. **Arah kebijakan pembangunan** merupakan pedoman strategis yang menetapkan fokus, prioritas, dan haluan pembangunan daerah pada periode tertentu, yang berfungsi sebagai acuan dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.7.**
**Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030**

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| **Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing** | | |
| **1.** Meningkatnya Kualitas Modal Manusia | 1 Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata | Penguatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, penguatan jaminan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat, pemerataan tenaga medis, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, |

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat serta peningkatan upaya promotif dan preventif di seluruh wilayah |
| | 2 Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang layak di seluruh wilayah, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik berkualitas, pengembangan sarana prasarana pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar dan mengajar, peningkatan pengelolaan pendidikan yang inklusif di semua jenjang, serta peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, dan pengembangan budaya baca masyarakat sejak dini |
| **2.** Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global | 3 Meningkatnya Kualitas Demokrasi | Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, perumusan kebijakan, dan pembangunan politik yang inklusif; penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, penguatan komunikasi public dan media, serta penguatan upaya mendorong keterbukaan informasi publik |
| | 4 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan | Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformative untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, penguatan ekosistem budaya, revitalisasi budaya dan serta pengembangan kehidupan budaya yang maju dan harmonis yang mengedepankan nilai-nilai kearifan local dan didukung oleh pengembangan teknologi |
| | 5 Meningkatnya perlindungan anak, kualitas generasi muda, dan kesetaraan gender | Peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak berbasis system, serta partisipasi, keterampilan dan kewirausahaan pemuda; peningkatan kesetaraan gender dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan; serta pemberdayaan dan perlindungan Perempuan, disabilitas, dan lansia serta kelompok rentan lainnya dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. |
| **Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan** | | |
| **3.** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif | 6 Meningkatnya produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna guna mewujudkan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis kawasan unggulan yang didukung inovasi teknologi dan tatakelola rantai pasok yang efisien, pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry |

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | termasuk hilirisasi berbasis SDA mineral, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengamanan cadangan pangan strategis guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, pengembangan ekosistem ekonomi syariah, peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan |
| | 7 Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global | Penguatan kerjasama antar daerah, lintas daerah dan negara, peningkatan promosi perdagangan, investasi dan daya saing produk daerah, serta peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai dan rantai pasok wilayah dan global serta pengembangan aglomerasi industry melalui peningkatan investasi di kawasan industry sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi |
| | 8 Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | Penguatan kapasitas fiskal daerah, penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, peningkatan daya beli masyarakat terutama masyarakat rentan, pengendalian inflasi, mendorong pembiayaan inovatif yang berkelanjutan, serta penguatan sinergi fiskal antara pemerintah daerah dan pusat |
| | 9 Meningkatnya pembangunan perdesaan | Penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa, peningkatan upaya pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas, pemerataan kawasan, penguatan dukungan peningkatan kawasan perdesaan termasuk kawasan perdesaan prioritas dan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan perkotaan kecil, peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial dan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dalam rangka perwujudan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi |
| | 10 Menurunnya kemiskinan dan pengangguran | Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan, perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi, serta pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi |

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri |
| **Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani** | | |
| 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital | 11 Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | Penguatan fasilitasi perluasan dan pemerataan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, penguatan regulasi dan tatakelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan mendorong kemitraan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur TIK |
| | 12 Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat | Peningkatan literasi dan ketrampilan digital masyarakat, pengintegrasian Pendidikan digital dalam kurikulum formal dan non formal, peningkatan kompetensi digital tenaga kerja dan ASN, serta penguatan ekosistem ekonomi digital |
| 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif | 13 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah | Penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas, serta penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara |
| | 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang prima, adaptif, dan inklusif melalui pemanfaatan layanan digital, penyederhanaan proses bisnis, penguatan kompetensi SDM, serta perluasan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat |
| | 15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah | Penguatan ekosistem dan kelembagaan inovasi daerah melalui institusionalisasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah, serta pengembangan fasilitasi, inkubasi, dan difusi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah |
| **Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | | |
| 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan | 16. Meningkatnya kualitas infrastruktur | Penguatan konektivitas dan layanan transportasi multi moda, peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik, penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar yang merata, peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pelayanan dasar yang berkelanjutan dan pertumbuhan wilayah yang inklusif. |
| | 17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim | Penguatan pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, pembangunan berketahanan iklim termasuk penguatan kerjasama dan kolaborasi multi pihak dalam pembiayaan pembangunan berketahanan iklim, penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana, |

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pembangunan lintas sektor, penguatan upaya pembangunan dan penyediaan infrastruktur tangguh iklim dan rendah karbon berbasis penyelenggaraan tata ruang berkualitas, serta pengembangan pembiayaan iklim dan kolaborasi multipihak |

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi misi pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan pula strategi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan rangkaian pendekatan terencana dan terpadu yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi pembangunan ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, dan disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

**Tabel III.8.**
**Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030**

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing** | **1.** Meningkatnya Kualitas Modal Manusia | 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, penguatan jaminan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat, pemerataan tenaga medis, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat serta peningkatan upaya promotif dan preventif di seluruh wilayah | 1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan termasuk pengembangan dan pembangunan rumah sakit regional dengan mekanisme tahun jamak (*multiyears*), serta fasilitasi pelayanan kesehatan bergerak dan digital bagi masyarakat yang tinggal jauh dan sulit akses dari pusat pelayanan kesehatan;<br>2. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan yang berkualitas;<br>3. Pemenuhan dan distribusi SDM tenaga kesehatan yang berkualitas termasuk kebutuhan spesifik tenaga medis di setiap wilayah serta peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan<br>4. Peningkatan kepesertaan aktif serta kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan di kab/Kota;<br>5. Penguatan pelayanan, sumber daya manusia dan tata kelola kesehatan;<br>6. Pemenuhan dan penguatan intervensi pencegahan stunting dan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat, pendamping keluarga, dan seluruh stakeholder lainnya dengan melibatkan Posyandu berbasis data akurat dan sesuai dengan kebutuhan;<br>7. Dukungan program pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukungnya<br>8. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan (lansia, |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan masyarakat kelompok rentan lainnya). |
| | | | | 9. Perluasan deteksi dini penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta peningkatan kesehatan jiwa; |
| | | | | 10. Peningkatan pengelolaan faktor risiko dan tata laksana penyakit termasuk inovasi teknologi kesehatan untuk perluasan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan; |
| | | | | 11. Perluasan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital; |
| | | | | 12. Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; |
| | | | | 13. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan; |
| | | | | 14. Perluasan cakupan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat; |
| | | | | 15. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; |
| | | | | 16. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor resiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negative bagi kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik; |
| | | | | 17. Penurunan kematian ibu dan anak; |
| | | | | 18. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 19. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria; |
| | | | | 20. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk; |
| | | 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang layak di seluruh wilayah, penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidik berkualitas, pengembangan sarana prasarana pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar dan mengajar, peningkatan pengelolaan pendidikan yang inklusif di semua jenjang, serta peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, dan pengembangan budaya baca masyarakat sejak dini | 1. Perluasan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan melalui implementasi pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital dan platform online, serta mendorong integrasi kurikulum yang berwawasan lingkungan dan berbasis kebutuhan industri, termasuk sektor industri hijau; |
| | | | | 2. Perluasan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh penduduk usia sekolah di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan; |
| | | | | 3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dalam rangka tercapainya proses belajar, mengajar yang efektif dan berkualitas. |
| | | | | 4. Pengembangan fasilitasi penyediaan layanan pendidikan 1 tahun pra sekolah (pendidikan anak usia dini) dengan melibatkan peran aktif pihak terkait secara holistik dan integrative, termasuk Integrasi layanan PAUD nonformal ke dalam kegiatan Posyandu melalui kegiatan stimulasi dini |
| | | | | 5. Penanganan anak tidak sekolah berbasis wilayah secara kolaboratif, termasuk pemberian beasiswa / bantuan pendidikan bagi siswa disabilitas dan siswa kurang mampu sebagai bagian upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 6. Pembangunan dan reviltalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan inklusif |
| | | | | 7. Pembangunan dan pengembangan sekolah unggulan melalui upaya afirmatif termasuk dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu Program Sekolah Rakyat; |
| | | | | 8. Pembangunan dan pengembangan sekolah lapang kejuruan dengan memanfaatkan potensi wilayah; |
| | | | | 9. Pembangunan dan pengembangan sekolah budaya dan pariwisata berbasis sejarah dan kearifan lokal |
| | | | | 10. Pembangunan dan pengembangan pusat laboratorium pendidkan vokasi *(Vocational Creative Hub);* |
| | | | | 11. Peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi yang berdaya saing unggul dan pengembangan kerja sama kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; |
| | | | | 12. Pengembangan ekosistem satuan pendidikan yang kompetitif, berdaya saing, kondusif, responsive, dan inklusif; |
| | | | | 13. Peningkatan kualitas akhlak siswa melalui pendidikan karakter, penguatan pendidikan keagamaan termasuk kualitas guru-guru agama; |
| | | | | 14. Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis |
| | | | | 15. Pengembangan sekolah khusus prestasi berbasis talenta; |
| | | | | 16. Peningkatan literasi dan kegemaran membaca di lingkungan pendidikan formal dan non formal |
| | | | | 17. Pengembangan minat dan budaya baca di masyarakat sejak dini |
| | | | | 18. Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industry yang berbasis sektor unggulan daerah; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 19. Peningkatan pendampingan super intensif dalam rangka peningkatan kapasitas potensi skolastik bagi siswa |
| | | | | 20. Penyediaan bantuan seragam dan penyedian sarana serta prasarana pembelajaran termasuk dukungan transportasi bagi peserta didik |
| | **2.** Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global | 3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi | Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, perumusan kebijakan, dan pembangunan politik yang inklusif; penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, penguatan komunikasi public dan media, serta penguatan upaya mendorong keterbukaan informasi publik; menguatkan kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta mendorong keterbukaan informasi publik | 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, kontributif dan partisipatif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan; |
| | | | | 2. Penguatan harmonisasi dan kolaborasi dengan Forkopimda dalam upaya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban; |
| | | | | 3. Penguatan wawasan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda; |
| | | | | 4. Penguatan kelembagaan politik yang akuntabel dan transparan |
| | | | | 5. Peningkatan literasi politik masyarakat |
| | | | | 6. Penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; |
| | | | | 7. Penyusunan dan penguatan penegakan produk hukum daerah yang mendukung pembangunan dan memperkuat otonomi daerah |
| | | | | 8. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan; |
| | | | | 9. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan serta pengawasan ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran aktif masyarakat, termasuk peran Posyandu. |
| | | 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan | Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformative untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter | 1. Penguatan identitas budaya berbasis kearifan lokal dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; |
| | | | | 2. Penguatan pendidikan keagamaan bagi generasi muda melalui jalur formal, non formal, dan informal; |
| | | | | 3. Pembinaan dan pengembangan pesantren dan wadah pendidikan keagamaan lainnya |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | bangsa, penguatan ekosistem budaya, revitalisasi budaya dan serta pengembangan kehidupan budaya yang maju dan harmonis yang mengedepankan nilai-nilai kearifan local, dan didukung oleh pengembangan teknologi | 4. Pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah |
| | | | | 5. Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan baik tingkat lokal, nasional dan global sesuai kebutuhan |
| | | | | 6. Penguatan dialog antar penganut agama dan penghayat kepercayaan; |
| | | | | 7. Optimalisasi tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif |
| | | | | 8. Pengarusutamaan budaya lokal sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai tambah |
| | | | | 9. Penguatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial budaya |
| | | | | 10. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme |
| | | | | 11. Pengintegrasian pendidikan agama dan karakter dalam kurikulum di semua jenjang Pendidikan, baik formal, non formal, maupun informal |
| | | | | 12. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter religius yang moderat dan toleran |
| | | | | 13. Pengintegrasian nilai-nilai budaya local dalam pendidikan karakter termasuk muatan local dalam kurikulum sekolah |
| | | | | 14. Penguatan ekosistem budaya berbasis *urban heritage, rural heritage,* pemanfaatan cagar budaya termasuk di kawasan karst dan revitalisasi budaya local dan budaya bahari, serta pengembangan teknologi tradisional berbasis budaya local termasuk teknologi tradisional Kapal Pinisi; |
| | | 5. Meningkatnya perlindungan anak, | Peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan | 1. Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | kualitas generasi muda dan kesetaraan gender | anak berbasis system, serta partisipasi, keterampilan dan kewirausahaan pemuda; peningkatan kesetaraan gender dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan; serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi | 2. Penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh Pemerintah dan Non Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;<br>3. Pengintegrasian GEDSI (Gender equity dissability, and social inclusion) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh sector;<br>4. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;<br>5. Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional, serta pemberian penghargaan pemuda berprestasi;<br>6. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda berbasis inovasi dan teknologi<br>7. Penguatan pelatihan dan pembinaan atlet yang terstruktur dan berkelanjutan, serta pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi;<br>8. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;<br>9. Fasilitasi pelaksanaan event-event olahraga prestasi dan olahraga masyarakat berskala regional dan nasional;<br>10. Peningkatan kompetensi sumber daya dan kompetensi keolahragaan untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;<br>11. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual bagi generasi muda<br>12. Pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga, termasuk Stadion Sudiang<br>13. Pembudayaan olahraga masyarakat sebagai bagian dari perilaku hidup sehat |
| | **3.** Meningkatnya | 6. Meningkatnya produktivitas | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna guna | 1. Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pertumbuhan ekonomi yang inklusif | Ekonomi dan Swasembada Pangan | mewujudkan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis kawasan unggulan yang didukung inovasi teknologi dan tatakelola rantai pasok yang efisien, pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi berbasis SDA mineral, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengamanan cadangan pangan strategis guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan | peternakan), kehutanan pada areal perhutanan social, dan perikanan yang berorientasi nilai tambah dan berbasis kawasan;<br>2. Pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah secara berkelanjutan yang diprioritaskan pada penerapan *agroforestry* dan a*grosilvofishery* dan jasa lingkungan berbasis pengembangan wilayah terpadu dan berkelanjutan;<br>3. Pengembangan sistem budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan secara berkelanjutan;<br>4. Pengembangan sentra perkebunan komoditas unggulan termasuk kopi dan kakao;<br>5. Pengembangan sentra perikanan termasuk perikanan budidaya dan rumput laut<br>6. Pengembangan kawasan sentra garam<br>7. Optimalisasi pembangunan infrastruktur jaringan (embung, bendung, sumur dalam, sumur dangkal, pompanisasi air permukaan) untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan;<br>8. Penyediaan sarana prasarana produksi dan alat mesin pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), serta benih unggul yang tersertifikasi;<br>9. Peningkatan kapasitas petani dalam budidaya, pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengelolaan pasca panen berbasis teknologi;<br>10. Peningkatan nilai tambah dan akses pasar hasil perikanan dan kelautan;<br>11. Peningkatan upaya pengembangan, penyediaan dan revitalisasi sarana, prasarana, penguatan kelembagaan, dan dukungan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | operasional lainnya untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan dan kelautan; |
| | | | | 12. Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyediaan sistem informasi manajemen dan jasa logistic ikan dari hulu sampai hilir, kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; |
| | | | | 13. Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut serta kawasan sentra garam; |
| | | | | 14. Pengembangan dan penguatan kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan; |
| | | | | 15. Peningkatan populasi dan produksi ternak melalui inseminasi buatan dan pengembangan kawasan peternakan serta pengembangan kemitraan, |
| | | | | 16. Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; |
| | | | | 17. Peningkatan produktivitas melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi bagi industri dan usaha kecil menengah; |
| | | | | 18. Peningkatan fasilitasi standarisasi, sertifikasi dan kualitas produk Koperasi, IKM dan UMKM; |
| | | | | 19. Mendukung pembentukan Koperasi desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Kabupaten /kota |
| | | | | 20. Mendorong dan mengembangkan alternatif pembiayaan bagi Koperasi, IKM dan UMKM; |
| | | | | 21. Peningkatan pengawasan barang beredar, barang yang dilarang beredar, dan barang yang diatur tata niaganya; |
| | | | | 22. Fasilitasi pengembangan kawasan industri prioritas nasional yaitu Kawasan Industri Takalar, Kawasan Industri Bantaeng, dan Kawasan Industri Hualy Luwu Timur serta pengembangan kawasan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | industry prioritas provinsi yaitu Kawasan industri Luwu dan Kawasan Industri Bone; |
| | | | | 23. Peningkatan kualitas sumber daya dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif; |
| | | | | 24. Pengembangan destinasi wisata yang saling terkoneksi antar wilayah dan berkelanjutan berbasis potensi unggulan daerah; |
| | | | | 25. Pengembangan ketersediaan pangan akuatik, pangan hewani, pangan lokal dan pangan nabati serta penganekaragaman konsumsi pangan; |
| | | | | 26. Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry, termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; |
| | | | | 27. Peningkatan rantai nilai yang mendukung pegembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM termasuk kelompok usaha perhutanan social (KUPS) dan koperasi berbasis penerapan ekonomi sirkuler; |
| | | | | 28. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaataan sumber daya alam potensial yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya lokal keberlanjutan |
| | | | | 29. Peningkatan fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan |
| | | | | 30. Peningkatan pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan |
| | | | | 31. Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industry berbasis sumber daya alam |
| | | | | 32. Fasilitasi penguatan kelembagaan petani, memperkuat kelembagaan penyuluhan; |
| | | | | 33. Pengembangan fasilitasi pembiayaan pertanian |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 34. Penguatan jaringan pasar produk pertanian |
| | | | | 35. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah |
| | | | | 36. Optimalisasi aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap |
| | | | | 37. Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang terintegrasi antar moda termasuk pengembangan *seaplane* untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas serta layanan medis darurat; |
| | | | | 38. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism) |
| | | | | 39. Mendorong program reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja., terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri |
| | | | | 40. Penguatan pembangunan ekosistem ekonomi biru pada satuan kerja pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota, melalui penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat sektor ekonomi, konservasi dan tata kelola yang efisien |
| | | | | 41. penguatan pondasi pendidikan lingkungan, ekonomi berbasis sumberdaya perikanan, perencanaan sertifikasi budidaya, perencanaan tata ruang digital mendukung konservasi, penyiapan regulasi, dan khusus pada daerah non pesisir melalui penyiapan infrastruktur; |
| | | | | 42. peningkatan literasi dan kesadaran jasa ekosistem perairan darat; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 43. perancangan sistem perlindungan sosial, penguatan ketahanan, keberlanjutan produksi dan wisata berbasis perairan darat, sistem rantai pasok input produksi, air dan energi; |
| | | | | 44. perencanaan zonasi dan penguatan data, mekanisme partisipasi integrasi pengelolaan perikanan dan konservasi berbasis masyarakat, dan penguatan relasi antar pemerintahan untuk pengelolaan perairan daratan; |
| | | | | 45. Pengembangan efektif supply management yang bertujuan menciptakan nilai rantai yang transparan dari produsen ke konsumen sehingga asal produk komoditas dan kualitas produk dapat terjaga dengan baik. |
| | | | | 46. Hilirisasi komoditas unggulan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, pertanian dan perkebunan) untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar pada PDRB Daerah |
| | | 7. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global | Penguatan kerjasama antar daerah, lintas daerah dan negara, peningkatan promosi perdagangan, investasi dan daya saing produk daerah, serta peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai dan rantai pasok wilayah dan global serta pengembangan aglomerasi industry melalui peningkatan investasi di kawasan industry sebagai pusat | 1. Peningkatan kualitas dan volume ekspor komoditas unggulan; |
| | | | | 2. Pengembangan kolaborasi dan penguatan jaringan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas produk unggulan daerah bernilai ekspor; |
| | | | | 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi dan efisiensi rantai distribusi produk komoditas unggulan daerah; |
| | | | | 4. Penguatan peran kelembagaan, pengembangan kemitraan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran produk Koperasi, IKM dan UMKM dalam skala nasional dan internasional; |
| | | | | 5. Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi | 6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi; |
| | | | | 7. Pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan hub/sentra kreatif yang didukung penguatan data ekonomi kreatif serta penguatan regulasi, kebijakan dan kelembagaan pengelolaan dan klaster kreatif; |
| | | | | 8. Penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan swasta dalam pengembangan infrastruktur logistik wilayah guna mendukung peningkatan nilai tambah produk; |
| | | | | 9. Peningkatan minat pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk berpartisipasi dalam pameran dagang regional, nasional dan internasional; |
| | | | | 10. Pengembangan infrastruktur energi dengan menjamin pasokan listrik dan energi yang memadai bagi industri |
| | | | | 11. Pengembangan kawasan industri dengan menyediakan fasilitas lengkap untuk menarik investasi besar |
| | | | | 12. Peningkatan cadangan dan produktivitas energi termasuk dukungan terhadap *North Hub Development Project Selat Makassar*; |
| | | | | 13. Penguatan industry transportasi laut, terutama di Kota Makassar |
| | | | | 14. Dukungan terhadap pengembangan kawasan industry Takalar, dan kawasan industry Bantaeng serta kawasan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang Sorowako; |
| | | | | 15. Peningkatan promosi investasi internasional ke negara mitra potensial |
| | | | | 1. Peningkatan pendapatan daerah melalui pelibatan pihak terkait; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | Penguatan kapasitas fiskal daerah, penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, peningkatan daya beli masyarakat terutama masyarakat rentan, pengendalian inflasi, mendorong pembiayaan inovatif yang berkelanjutan, serta penguatan sinergi fiskal antara pemerintah daerah dan pusat | 2. Pengembangan dukungan insentif fiscal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya;<br>3. Penguatan sektor ekonomi syariah dan integrasinya dalam system ekonomi syariah;<br>4. Pengembangan dan penguatan industri halal dan UMKM halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dilakukan melalui penguatan halal value chain dan promosi industri halal dalam negeri<br>5. Penguatan ekosistem halal dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal<br>6. Penguatan keuangan syariah melalui penguatan perbankan syariah dan sistem keuangan lainnya<br>7. Penguatan tata kelola dan literasi serta mengakselerasi bauran ZISWAF;<br>8. Pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder dan kabupaten/kota;<br>9. Peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, serta bantuan langsung;<br>10. Peningkatan daya tarik dan kemudahan investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur penunjang investasi<br>11. Optimalisasi system tata kelola dan digitalisasi potensi investasi daerah;<br>12. Optimalisasi kinerja BUMD dan BLUD; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 13. Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antardaerah serta penguatan kerjasama multipihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan; |
| | | | | 14. Penciptaan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan institusi syariah dalam menyediakan investasi dan inovasi |
| | | | | 15. Pemberian insentif pajak bagi investasi di sektor prioritas |
| | | 9. Meningkatnya pembangunan perdesaan | Penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa, peningkatan upaya pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas, pemerataan kawasan, penguatan dukungan peningkatan kawasan perdesaan termasuk kawasan perdesaan prioritas dan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan perkotaan kecil, peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial dan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dalam rangka perwujudan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | 1. Peningkatan peran dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, termasuk Posyandu dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat desa; |
| | | | | 2. Peningkatan peran, kompetensi dan profesionalisme Pemerintah Desa serta pemberian insentif sebagai stimulant dalam upaya mempercepat pembangunan desa; |
| | | | | 3. Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi desa untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih |
| | | | | 4. Fasilitasi pengembangan kerja sama desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, termasuk dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih |
| | | | | 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa |
| | | | | 6. Fasilitasi peningkatan konektifitas desa-kota, ketahanan sosial dan kualitas lingkungan perdesaan |
| | | | | 7. Mendorong optimalisasi penggunaan dana desa yang tepat sasaran, transparan, dan partisipatif untuk mendukung prioritas pembangunan desa |
| | | | | 8. Peningkatan cakupan pemenuhan infrastruktur layanan dasar perdesaan, dengan melibatkan peran aktif Posyandu; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 9. Pengembangan, peningkatan serta pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan termasuk dukungan peningkatan kawasan perdesaan prioritas, kawasan transmigrasi dan kawasan pulau pulau kecil serta pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya |
| | | | | 10. Pembangunan kawasan perkotaan kecil termasuk dukungan penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan |
| | | | | 11. Pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan karakteristik kota kecil; |
| | | | | 12. Pelibatan Posyandu dalam mengidentifikasi penyediaan rumah layak huni serta mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan sehat dan pemanfaatan pekarangan untuk pangan sehat. |
| | | 10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran | Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan, perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi, serta pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi | 1. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, melalui *basedata* yang digunakan secara nasional |
| | | | | 2. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi serta bantuan sosial terhadap masyarakat miskin, miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan penduduk lansia |
| | | | | 3. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu |
| | | | | 4. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantorng kemiskinan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri | 5. Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah |
| | | | | 6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana alam dan sosial |
| | | | | 7. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja melalui program reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja., terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industry |
| | | | | 8. Peningkatan layanan dan administrasi ketenagakerjaan berbasis system informasi ketenagakerjaan yang terpadu dan mudah diakses masyarakat |
| | | | | 9. Penguatan pengawasan perlindungan tenaga kerja dan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja rentan; |
| | | | | 10. Pengembangan program inkubasi dan akselerasi wirausaha, khususnya bagi pemuda dan perempuan yang disertai penyediaan akses permodalan, pelatihan manajerial dan pasar bagi wirausaha local berbasis digitalisasi UMKM dan penguatan platform pemasaran online |
| | | | | 11. Fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru |
| | | | | 12. Pengembangan kolaborasi dengan sekolah kejuruan dan memfasilitasi pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja untuk menghasilkan sumberdaya yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi; |
| | | | | 13. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program padat karya produktif di bidang infrastruktur, lingkungan, dan layanan sosial |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital | 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | Penguatan fasilitasi perluasan dan pemerataan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, penguatan regulasi dan tatakelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan mendorong kemitraan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur TIK | 1. Fasilitasi penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan |
| | | | | 2. Fasilitasi penerapan use case smart farming dan teknologi baru di sektor bisnis, khususnya di kawasan aglomerasi Mamminasata |
| | | | | 3. Fasilitasi pemberdayaan startup lokal |
| | | | | 4. Fasilitasi peningkatan adopsi teknologi digital di sektor pertanian dan perdagangan, dapat meliputi kegiatan mendorong pelaku usaha lokal ke platform e-commerce hingga peningkatan adopsi pembayaran digital bagi pelaku usaha lokal |
| | | | | 5. Fasilitasi pengembangan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok |
| | | | | 6. Mendorong penerapan kebijakan untuk mempermudah izin penggelaran jaringan infrastruktur telekomunikasi, seperti kebijakan right of way oleh pemerintah daerah |
| | | | | 7. Mendorong pengembangan jaringan 5G di kawasan prioritas, seperti Mamminasata melalui kerja sama dengan operator seluler |
| | | | | 8. Mendorong ketersediaan akses internet di sekolah-sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar dan akses konten pembelajaran online dan platform interaktif. |
| | | | | 9. Perluasan penyediaan akses internet gratis (Wi-Fi) di fasilitas publik/umum seperti di kantor pemerintahan, taman, perpustakaan, rumah sakit, hingga balai desa untuk memastikan akses internet yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. |
| | | 12 Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat | Peningkatan literasi dan ketrampilan digital masyarakat, pengintegrasian Pendidikan digital dalam kurikulum | 1. Peningkatan Literasi Digital Terpadu meliputi kemampuan teknis (mengoperasikan perangkat dan aplikasi), literasi informasi dan media (memverifikasi informasi, menghindari hoaks), keamanan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | formal dan non formal, peningkatan kompetensi digital tenaga kerja dan ASN, serta menguatkan ekosistem ekonomi digital | digital (melindungi data, privasi, identitas digital), etika digital (sopan santun, jejak digital), dan kewargaan digital (partisipasi aktif dan bertanggung jawab di ruang digital) |
| | | | | 2. Pengintegrasian pendidikan digital dalam kurikulum formal dan non formal untuk mendukung kebutuhan talenta digital di industri dan dunia usaha |
| | | | | 3. Mendorong penguasaan keterampilan digital dasar hingga tingkat lanjutan, kesempatan kerja bagi generasi muda dan masyarakat umum serta kelompok rentan lainnya seperti perempuan, masyarakat adat/ lokal termasuk di sektor ekonomi hijau |
| | | | | 4. Peningkatan kompetensi digital tenaga kerja dan ASN, |
| | | | | 5. Pengembangan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan platform ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan di berbagai sektor dan segmen masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perdagangan |
| | | | | 6. Fasilitasi penyediaan infrastruktur TIK di sekolah yang dapat dilakukan melalui pemberian layanan akses internet dan penggunaan platform/aplikasi digital di sekolah |
| | | | | 7. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan digital tingkat menengah dan lanjut bagi seluruh masyarakat |
| | | 14. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah | Penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital guna peningkatan kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan | 1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui penerapan SAKIP yang berkualitas |
| | | | | 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah |
| | | | | 3. Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | berintegritas serta penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara | 4. Pemanfataan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja |
| | | | | 5. Penguatan system perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi; |
| | | | | 6. Peningkatan transparansi dan akses informasi publik; |
| | | | | 7. Penguatan dan pengembangan zona integritas dan pencegahan korupsi; |
| | | | | 8. Peningkatan kualitas dan transparansi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; |
| | | | | 9. Penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah; |
| | | | | 10. Peningkatan optimalisasi dan pengamanan asset-asset pemerintah daerah melalui kerjasama pentahelix; |
| | | | | 11. Peningkatan kualitas fasilitas kerja, serta fasilitasi pemenuhan tempat tinggal khususnya bagi ASN yang belum memiliki rumah |
| | | | | 12. Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas dan terpadu serta pembentukan forum pengelola Kawasan Perkotaan Mamminasata |
| | | | | 13. Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | 14. Optimalisasi barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang | 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Peningkatan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan yang prima, adaptif, dan inklusif, perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi, penyederhanaan proses bisnis, | 1. Penguatan integritas dan peningkatan kompetensi serta kapasitas ASN untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik prima |
| | | | | 2. Peningkatan kemudahan akses dan pelayanan publik di seluruh lembaga penyedia layanan pemerintah provinsi |
| | | | | 3. Penguatan manejemen ASN melalaui penerapan merit system |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif | | penguatan kompetensi SDM, serta perluasan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat | 4. Pengimplementasian nilai-nilai keagamaan bagi ASN dalam pelaksanaan pekerjaan |
| | | | | 5. Optimalisasi digitalisasi layanan publik dan penguatan aspek pemerintahan digital |
| | | | | 6. Peningkatan kemudahan layanan melalui penggunaan teknologi digital dan penyederhanaan proses bisnis pelayanan, |
| | | | | 7. Peningkatan fasilitasi pelayanan perkara hukum strategis sesuai kewenangan |
| | | | | 8. Peningkatan kompetensi sumberdaya yang berorientasi pelayanan prima, |
| | | | | 9. Peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; |
| | | | | 10. Peningkatan penyediaan akses internet di seluruh kantor pemerintahan dan OPD. |
| | | | | 11. Peningkatan efektivitas penerapan manajemen SPBE di seluruh OPD Provinsi di Sulawesi Selatan, seperti pengelolaan data dan aset, arsitektur SPBE pemerintah, dan lain sebagainya dengan *cloud-based government* dan digitalisasi layanan publik |
| | | | | 12. Reformasi fiscal daerah dengan digitalisasi pajak, optimalisasi retribusi, dan pengurangan ketergantungan transfer daerah |
| | | | | 13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN bidang digital melalui pelatihan digital dalam mengantisipasi penerapan berbagai future emerging technologies pada layanan pemerintahan |
| | | | | 14. Meningkatkan pendapatan daerah dengan penguatan industry hijau dan optimalisasi jasa ekosistem |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 15. Peningkatan inklusivitas layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil, dengan memastikan akses dan kualitas layanan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan |
| | | 15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah | Penguatan ekosistem dan kelembagaan inovasi daerah melalui institusionalisasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah, serta pengembangan fasilitasi, inkubasi, dan difusi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah | 1. Pengembangan inovasi daerah melalui inkubasi program berbasis masalah lokal |
| | | | | 2. Penguatan peran perangkat daerah sebagai motor inovasi pembangunan |
| | | | | 3. Pengembangan pusat inovasi atau laboratorium inovasi daerah |
| | | | | 4. Pengembangan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas teknologi untuk pengembangan Solusi pembangunan |
| | 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan | 16. Meningkatnya kualitas infrastruktur | Penguatan konektivitas, udara, laut, jalan dan darat, penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar yang merata, peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan | 1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang masuk dalam kriteria LHR (lalu lintas harian rata-rata) tinggi, terisolir, dan rusak berat dengan mekanisme tahun jamak (*multiyears*); |
| | | | | 2. Mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada jalur-jalur utama transportasi barang dan jasa antar wilayah, kawasan strategis, kawasan wisata, kawasan industry yang terintegrasi dengan pelabuhan dan bandara serta perkantoran; |
| | | | | 3. Peningkatan penanganan kemacetan di wilayah perkotaan; |
| | | | | 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat, serta pengembangan terminal type B sebagai simpul transportasi; |
| | | | | 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi dengan mekanisme tahun jamak (*multiyears*), embung dan jaringannya, bendung dan jaringannya; |
| | | | | 6. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan air minum dan air bersih khususnya di wilayah pesisir, kepulauan dan sulit akses; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 7. Pembangunan dan pemeliharaan serta penyediaan operasional asset dan gedung pemerintah; |
| | | | | 8. Peningkatan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis; |
| | | | | 9. Peningkatan pengawasan dan ketaatan hukum terhadap tata ruang daerah; |
| | | | | 10. Pembangunan & peningkatan kualitas & kapasitas Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik; |
| | | | | 11. Peningkatan fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; |
| | | | | 12. Peningkatan, pengembangan dan penyediaan serta penguatan konektivitas udara, laut, jalan dan darat; |
| | | | | 13. Pelaksanaan reklamasi pada beberapa kawasan potensial di kabupaten/kota termasuk kota Makassar, terutama di Untia untuk mendukung penyediaan perumahan dan pemukiman serta pengembangan infratruktur; |
| | | | | 14. Peningkatan nilai tambah ekonomi untuk kawasan potensial pariwisata meliputi agrowisata, budaya, bahari, dan potensi lainnya |
| | | | | 15. Peningkatan akses listrik termasuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan di wilayah kepulauan dan sulit akses khususnya bagi rumah tangga kurang mampu; |
| | | | | 16. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman termasuk penanganan permukiman kumuh dan dukungan Program 3 Juta Rumah; |
| | | | | 17. Dukungan penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan dan wilayah 3T; |
| | | | | 18. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku, air bersih, dan air minum aman |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 19. Peningkatan akses sanitasi layak dan aman melalui pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah |
| | | | | 20. Pembangunan SPAM regional terintegrasi sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi |
| | | | | 21. Mendorong pengembangan bandara melalui sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kab/kota |
| | | | | 22. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan logistik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan pariwisata |
| | | | | 23. Peningkatan layanan perkotaan dan peningkatan kualitas wilayah untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya termasuk di kawasan perkotaan Mamminasata dan Kawasan Parepare |
| | | | | 24. Dukungan pembangunan perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui pembangunan kawasan perkotaan kecil; |
| | | | | 25. Penguatan konektivitas dan pengembangan serta integrasi transportasi massal dan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan TOD |
| | | 17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim | Penguatan pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, pembangunan berketahanan iklim termasuk penguatan kerjasama dan kolaborasi multi pihak dalam pembiayaan pembangunan berketahanan iklim, penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana, pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam | 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengelolaan Ekosistem berbasis DAS yang berketahanan iklim; |
| | | | | 2. Pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik vegetatif dan sipil teknis serta peningkatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat secara intensif |
| | | | | 3. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Bangunan Konservasi Tanah dan Air |
| | | | | 4. Pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan bagi masyarakat yang menjaga lingkungan; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | pembangunan lintas sektor, penguatan upaya pembangunan dan penyediaan infrastruktur tangguh iklim dan rendah karbon berbasis penyelenggaraan tata ruang berkualitas, serta pengembangan pembiayaan iklim dan kolaborasi multipihak | 5. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon (perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja; |
| | | | | 6. Peningkatan upaya pencegahan, penanganan dan pengendaian risiko bencana di daerah rawan bencana termasuk pencegahan dan penanganan bencana hidrometrologi di wilayah perkotaan; |
| | | | | 7. Peningkatan kualitas mitigasi bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; |
| | | | | 8. Penguatan Early Warning Systems untuk mencegah perluasan dampak bencana; |
| | | | | 9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana serta peningkatan kapasitas, ketahanan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan simulasi; |
| | | | | 10. Pengembangan dan penditribusian benih tanaman yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan berketahanan iklim; |
| | | | | 11. Pengembangan penggunaan teknologi irigasi yang hemat air pada wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan |
| | | | | 12. Pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; |
| | | | | 13. Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; |
| | | | | 14. Peningkatan pelaksanaan program serta menguatkan koordinasi dan kolaborasi pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP); |
| | | | | 15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan; |
| | | | | 16. Peningkatan penanganan sampah yang optimal dari hulu ke hilir termasuk pemanfaatan sampah sebagai sumber bahan bakar alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 17. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah yang adaptif terhadap bencana dan mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, utamanya penerapan sistem angkutan umum massal; |
| | | | | 18. Identifikasi dan pengembangan peluang pendanaan alternatif dan kerjasama pihak swsata dan parapihak lainnya dalam implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; |
| | | | | 19. Peningkatan pengawasan dan pengamanan Kawasan Lindung termasuk Kawasan Hutan |
| | | | | 20. Pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan kawasan hutan lestari dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial |
| | | | | 21. Penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi/kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) |
| | | | | 22. Fasilitasi peningkatan kolaborasi dalam mempertahankan kelestarian, optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati; |
| | | | | 23. Peningkatan implementasi Revolusi Hijau melalui pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan, adaptif terhadap bencana, berketahanan iklim secara berkelanjutan |
| | | | | 24. Revitalisasi dan rehabilitasi hutan, lahan dan terumbu karang untuk menjaga keseimbangan ekologi; |
| | | | | 25. Penyebarluasan data dan informasi terkait issu pengelolaan DAS dan Perubahan Iklim melalui media cetak dan elektronik |
| | | | | 26. Peningkatan dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan (EBT) |
| | | | | 27. Peningkatan dukungan dan pengembangan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan bernilai ekonomis dan inklusif |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 28. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam inovatif lingkungan, Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE , TAKE dan ALAKE) sebagai insentif untuk mendorong pengelolaan jasa lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender |
| | | | | 29. Pengembangan skema pembagian manfaat dalam implementasi nilai ekonomi karbom |
| | | | | 30. Implementasi skema agroforesti berbasis lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS); |
| | | | | 31. Pembangunan sabuk hijau pesisir (coastal greenbelt) di sepanjang wilayah terdampak abrasi dengan pendekatan rehabilitasi mangrove berbasis komunitas; |
| | | | | 32. Pengembangan infrastruktur adaptasi perubahan iklim berbasis rumah tangga di daerah rentan kekeringan; |
| | | | | 33. Penetapan zona perlindungan berbasis daya dukung ekosistem dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) |
| | | | | 34. Reformasi tata guna lahan berbasis daya dukung lingkungan; |
| | | | | 35. Penerapan Decentralized Wastewater Treatment Systems (DWTS) untuk menangani peningkatan beban pencemaran di sungai; |
| | | | | 36. Revitalisasi DAS kritis dengan riparian buffer zones, reforestrasi hulu sungai serta kolam retensi untuk mengurangi banjir dan longsor; |
| | | | | 37. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan terkait adaptasi perubahan iklim, simulasi evakuasi berkala dan Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah. |
| | | | | 38. Peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan; |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 39. Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil termasuk termasuk penguatan koservasi laut, sistem pengelolaan sampah pesisir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) utamanya di kabupaten Kepulauan Selayar dan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| | | | | 40. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, pengembangan dan implementasi pertanian raah iklim dan pencegahan pengendalian penyakit sensitive iklim serta penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim; |
| | | | | 41. Mengidentifikasi dan memetakan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) untuk memastikan bahwa kawasan yang tidak dapat dikonversi tergambar dengan jelas dan terlindungi |
| | | | | 42. Revitalitasi dan aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP) pada komoditas perkebunan, khususnya kakao dan kopi |

## 3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Program prioritas ini dihasilkan dari pengelompokan 45 Prioritas Gubernur yang tercantum dalam dokumen Visi dan Misi yang diserahkan ke KPUD. Olehnya itu, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

Pengelompokkan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.9.**
**Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029**

| No | 45 Prioritas Gubernur sesuai Dokumen KPUD | Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD |
|---|---|---|
| 1 | Melanjutkan Pemerataan Layanan Kesehatan (11) | 1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi |
| 2 | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis (12) | |
| 3 | Memperkuat Jaminan kesehatan secara Universal (13) | |
| 4 | Perbaikan kualitas gizi dan advokasi perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat untuk mencegah stunting dan gizi buruk (14) | |
| 5 | Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Semua Lapisan Masyarakat melalui Implementasi pendidikan jarak jauh serta penyediaan Bantuan Pendidikan untuk siswa kurang mampu (40) | |
| 6 | Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM serta pengembangan keterampilan kerja (35) | |
| 7 | Membangun kemitraan dan Pendidikan Vokasi (41) | |
| 8 | Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Keagamaan (39) | 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal |
| 9 | Peningkatan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor (37) | |
| 10 | Pelatihan, Pembinaan Atlet yang terstruktur, Peningkatan fasilitas olahraga yang berkualitas serta Pemberian penghargaan kepada Atlet berprestasi (42) | |
| 11 | Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Kreatif dan Inovatif (43) | |
| 12 | Peningkatan Sarana dan Prasarana pada destinasi wisata unggulan (5) | 3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru |
| 13 | Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat logistik (6) | |
| 14 | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi dan Cekdam (8) | |
| 15 | Peningkatan hasil produksi pertanian melalui Penerapan Teknologi Pertanian Modern menuju swasembada pangan nasional (17) | |
| 16 | Mendorong Pengembangan Sentra Industri Komoditas Unggulan Daerah (20) | |
| 17 | Menjaga Sulsel Sebagai Lumbung Ternak Nasional (23) | |
| 18 | Melanjutkan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (32) | |
| 19 | Pelatihan, Akses Modal, Pemasaran, dan Sertifikasi Halal untuk UMKM di Sulawesi Selatan (33) | |
| 20 | Pengembangan pemasaran produk Wisata dan ekonomi kreatif daerah (34) | |
| 21 | Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan Untuk Komoditas Unggulan Pertanian Sulawesi Selatan (18) | |
| 22 | Melanjutkan Program Mandiri Benih Andalan (15) | |
| 23 | Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (38) | |

| No | 45 Prioritas Gubernur sesuai Dokumen KPUD | Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD |
|---|---|---|
| 24 | Pengembangan daya saing ekonomi daerah di ranah global (31) | 4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing |
| 25 | Penguatan Jejaring dan Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar untuk Stabilisasi Harga dan Menekan Laju Inflasi (22) | |
| 26 | Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah (30) | |
| 27 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa untuk Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (45) | 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan |
| 28 | Peningkatan kesejahteraan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (21) | |
| 29 | Mendukung Pemanfaatan teknologi dan inovasi serta fasilitasi pengembangan startup (36) | 6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital |
| 30 | Peningkatan kapasitas Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (24) | |
| 31 | Peningkatan Partisipasi Publik melalui Optimalisasi Kehumasan dan Publikasi di Media Sosial dan Media Massa (25) | |
| 32 | Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah dengan Melanjutkan Penerapan e-Catalog dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (27) | |
| 33 | Pengembangan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan ASN (28) | |
| 34 | Penguatan karakter ASN BerAkhlak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (29) | |
| 35 | Penyusunan dan penegakan hukum yang mendukung pembangunan serta penguatan otonomi daerah (26) | |
| 36 | Melanjutkan Subsidi Penerbangan dan Angkutan Darat serta Mengembangkan Perhubungan Laut (9) | 7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan |
| 37 | Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan hingga Mencapai Kualitas Mantap (1) | |
| 38 | Mendukung pengembangan bandara dan pelabuhan di wilayah Pesisir Sulawesi Selatan (7) | |
| 39 | Memperkuat Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Infrastruktur dan Pertanian (44) | |
| 40 | Meningkatkan Akses Listrik di kepulauan dan Wilayah Pedesaan melalui Pengembangan Energi Terbarukan (2) | |
| 41 | Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Minum di Wilayah 3 (3) | |
| 42 | Melanjutkan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan Bagi korban bencana alam (4) | 8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. |
| 43 | Melanjutkan Program Penghijauan di Berbagai Daerah Kritis Seperti Pesisir Pantai, Lereng Gunung, dan Kawasan Strategis (16) | |
| 44 | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam (10) | |
| 45 | Program mitigasi dan adaptasi bencana serta konservasi lahan pertanian (19) | |

Delapan program prioritas pembangunan sebagaimana tabel diatas merupakan prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan 4 misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel kesesuaian berikut ini.

**Tabel III.10.**
**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah**

| No. | Misi Pembangunan Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|
| 1. | Misi-1 Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing | 1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi |
| | | 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal |
| 2. | Misi-2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan | 3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru |
| | | 4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing |
| | | 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan |
| 3. | Misi-3 Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani | 6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital |
| 4. | Misi-4 Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, angguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | 7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan |
| | | 8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. |

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III.11.**
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

| Prioritas Pembangunan Daerah | Prioritas Pembangunan Nasional |
|---|---|
| 1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi | Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) |
| | Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Prioritas Pembangunan Nasional |
|---|---|
| | penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas |
| 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal | Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |
| | Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas |
| 3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| 4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing | Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan | Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |
| 6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital | Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba |
| 7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan | Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. | Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III.12.**
**Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Misi - 1 Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya saing** | **T.1. Meningkatnya kualitas Modal Manusia** | | | **IT.1. Indeks Modal Manusia** | | |
| | | **S.1.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara Merata** | | **IS.1.1. Usia Harapan Hidup** | | |
| | | | Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | **Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** |
| | | | | 2. Persentase Capaian Upaya Kesehatan Masyarakat yang memenuhi Target | | |
| | | | | 3. Persentase Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Kelompok Sasaran | | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat) | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | | | Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan SDM kesehatan sesuai Standar Minimal | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | **S.1.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan** | | **IS.1.2.1. Rata rata lama sekolah** | | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | **Untuk Semua secara Merata dan Inklusif** | | **IS1.2.1. Harapan lama sekolah** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus | Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK, dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi minimal B | Program Pengelolaan Pendidikan | **Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** |
| | | | Meningkatnya layanan inklusif pada satuan pendidikan SMA/SMK | Persentase satuan pendidikan SMA/SMK yang menyediakan layanan inklusif | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Guru sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan menengah | Rasio Guru terhadap siswa pada satuan pendidikan menengah | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | | Persentase guru tersertifikasi pada satuan pendidikan menengah | | |
| | | | Meningkatnya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Seluruh Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB | Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Seluruh Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | | | Meningkatnya pengembangan dan pembinaan perpustakaan | Persentase perpustakaan terstandarisasi nasional | Program Pembinaan Perpustakaan | |
| | **T.2. Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global** | | | **IT.2. Indeks Ketahanan Nasional** | | |
| | | **S.2.1. Meningkatnya Kualitas Demokrasi** | | **IS.2.1.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi** | | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya pendidikan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan pendidikan Ideologi pancasila dan Karakter Bangsa | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | **Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** |
| | | | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase pengurus wilayah partai politik yang memperoleh pendidikan politik | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |
| | | | Menurunnya jumlah konflik baik antar masyarakat maupun antar kelompok masyarakat atau Orkemas | Persentase konflik yang tertangani | Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| | | | Layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM) | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | **S.2.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Pemajuan Kebudayaan** | | **IS.2.2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama** | | |
| | | | | **IS.2.2.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan** | | |
| | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Persentase ATHG bidang Ekososbud yang ditangani | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | **Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan,** |
| | | | Meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama | Persentase fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terimplementasi | Program Kesejahteraan Rakyat | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Program Pengembangan Kebudayaan | **demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** |
| | | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | |
| | | **S.2.3. Meningkatnya Perlindungan Anak, Kualitas Generasi Muda, dan Kesetaraan Gender** | | **IS.2.3.1. Indeks Perlindungan Anak** | | |
| | | | | **IS.2.3.2. Indeks Pembangunan Pemuda** | | |
| | | | | **IS.2.3.3. Indeks Ketimpangan Gender** | | |
| | | | Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif | Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | Program Pemenuhan Hak Anak | **Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perlakuan salah lainnya | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yg mendapatkan layanan komprehensif | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | | | Meningkatnya pembinaan pemuda dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan | Persentase pemuda yang dibina dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan sapras olahraga yang memenuhi standar, atlet | 1. Persentase ketersediaan sarpras olahraga yang memenuhi standar | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | potensial dan SDM keolahragaan yang berlisensi | 2. Peningkatan prestasi olahraga<br>3. Persentase tenaga keolahragaan yang berlisensi | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | 1. Persentase Anggaran Responsif Gender di Tingkat Pemerintah Provinsi | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | | 2. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi | | |
| | | | | | | |
| **Misi - 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan** | **T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif** | | | **IT.3.1. Pertumbuhan Ekonomi**<br>**IT.3.2. Rasio Gini** | | |
| | | **S.3.1. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan** | | **IS.3.1.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB**<br>**IS.3.1.2. Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%)**<br>**IS.3.1.3. Indeks Ketahanan Pangan** | | |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase pertumbuhan jumlah industri | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | **Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam** |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | Persentase UKM menjalin kemitraan | Program Pengembangan UMKM | **lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** |
| | | | Meningkatnya koperasi yang diberikan fasilitasi Pendidikan dan latihan | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif | 1. Persentase SDM Sektor Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
| | | | | 2. Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pelatihan | | |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase peningkatan kunjungan wisata wisman dan wisnus | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | | | Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman | 1. Tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKG 2.400 Kkal per kapita per hari | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| | | | | 2.Tingkat Ketersediaan Protein energi berdasarkan AKG 63 gram perkapita per hari | | |
| | | | Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi | Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi (%) | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian | Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian | Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman | Persentase luas serangan OPT yang tertangani | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | | | Meningkatnya kinerja penyuluhan pertanian | Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya | Program Penyuluh Pertanian | |
| | | | Meningkatnya populasi ternak | Persentase peningkatan populasi ternak | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana peternakan | Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | | | Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular strategis | Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Produksi Perikanan Budidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | | | Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | |
| | | | Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi | Produksi Olahan Hasil Perikanan | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | | | | Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan) | | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | standar mutu keamanan hasil perikanan | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan laut dan sumberdayanya melalui pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil | Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | |
| | | **S.3.2. Meningkatnya Integrasi Ekonomi Regional dan Global** | | **IS.3.2. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB** | | |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai ekspor perdagangan | Progam Pengembangan ekspor | **Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Persentase peningkatan ketersediaan data industri yang akurat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | |
| | | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | **S.3.3. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah** | | **IS.3.3.1.Tingkat Inflasi**<br>**IS.3.3.2. Inklusi Keuangan** | | |
| | | | Meningkatnya kelancaran dan distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | **Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** |
| | | | Meningkatnya investasi daerah | Persentase realisasi investasi daerah terhadap potensi investasi | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| | | | Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD | Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) | Program Perekonomian dan Pembangunan | |
| | | | Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah | Persentase peningkatan pajak daerah | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | **S.3.4. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan** | | **IS.3.4. Persentase Desa Mandiri** | | |
| | | | Meningkatnya Usaha ekonomi Desa | Persentase Bumdes berkategori maju | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | **Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** |
| | | | Meningkatnya pemberdayan kelembagaan Masyarakat Desa | Persentase Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatannya | | |
| | | | Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang memilki pemerintahan yang baik | Program Administrasi Pemerintahan Desa | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | **S.3.5. Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran** | | **IS.3.5.1. Tingkat Kemiskinan**<br>**IS.3.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka** | | |
| | | | Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan | Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | **Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** |
| | | | Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | | Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di dalam panti kewenangan provinsi | Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelendangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di dalam panti kewenangan provinsi | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial | Persentase korban bencana alam dan sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi | Program Penanganan Bencana | |
| | | | Meningkatnya produktivitas dan keterampilan/ kompetensi tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih mendapatkan pekerjaan | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Penempatan tenaga kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | | | | | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Misi - 3 Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani** | **T.4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital** | | | **IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional** | | |
| | | **S.4.1. Meningkatnya Jangkauan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi** | | **IS.4.1. Nilai Pilar Infrastruktur Indeks TDN** | | |
| | | | Meningkatnya kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak terkait | Persentase wilayah *blank spot* yang tertangani melalui kemitraan dan kerjasama dengan pihak terkait | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | **Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** |
| | | **S.4.2. Meningkatnya Ketrampilan Digital Masyarakat** | | **IS.4.2. Nilai Pilar Masyarakat Indeks TDN** | | |
| | | | Meningkatnya literasi digital masyarakat | Persentase masyarakat yang meningkat level keterampilan digitalnya | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | **Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | **T.5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Responsif** | | | **IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi** | | |
| | | **S.5.1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah~~an~~ Daerah** | | **IS.5.1. Nilai SAKIP** | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | **Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** |
| | | | Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah | | |
| | | | Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap prioritas pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | | |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI dan APIP | Program Penyelenggaraan Pengawasan | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | Program Penataan Organisasi | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | Persentase Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD | Program Pengelolaan barang Milik Daerah | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah | Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | | Meningkatnya penyelesaian penanganan permasalahan hukum | Persentese bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa | Level maturitas UKPBJ | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | | | Meningkatnya kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti | Persentase Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | |
| | | **S.5.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | | **IS.5.2. Indeks Pelayanan Publik** | | |
| | | | Tercapainya kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik | Persentase capaian kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik | Program Kepegawaian Daerah | **Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** |
| | | | Meningkatnya mutu pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan) | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk | Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk skala provinsi | Program Pendaftaran Penduduk | |
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan sipil | Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil skala provinsi | Program Pencatatan Sipil | |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data administrasi Kependudukan Skala Provinsi | Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |
| | | **S.5.3. Meningkatnya Inovasi Pembangunan Daerah** | | **IS.5.3. Indeks Inovasi Daerah** | | |
| | | | Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah | Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | Program Penelitian Dan Pengembangan | **Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** |
| | | | Meningkatnya Perangkat daerah yang menghasilkan inovasi | Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi | | |
| | | | | | | |
| **Misi 4 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh** | **T.6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan** | | | **IT.6.1. Indeks Williamson** | | |
| | | | | **IT.6.2, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | | **S.6.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur** | | **IS.6.1. Indeks Infrastruktur** | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya | Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | **Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.** |
| | | | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan provinsi untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah. | Persentase penanganan jalan kewenangan Provinsi | Program Penyelenggaraan Jalan | |
| | | | Meningkatnya akses listrik dan pemenuhan ketersediaan daya listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | |
| | | | Meningkatnya rasio konektifitas darat | Konektifitas Darat | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | |
| | | | | Persentase fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi | | |
| | | | Meningkatnya jumlah kunjungan kapal | Persentase layanan kunjungan kapal | Program Pengelolaan Pelayaran | |
| | | | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | Persentase peningkatan Rumah Korban Bencana Skala Provinsi yang tertangani | Program Pengembangan Perumahan | |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan | Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum | |
| | | | Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata | Persentase penataan bangunan gedung kewenangan Provinsi (%) | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | | | Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | |
| | | | Meningkatnya cakupan layanan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi Teknis yang tertangani Kewenangan Provinsi (%) | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | |
| | | | Meningkatnya akses rumah tangga tehadap air siap minum perpipaan | Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | | **S.6.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Ketangguhan Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim** | | **IS.6.2.1. Indeks Resiko Bencana**<br>**IS.6.2.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | |
| | | | Meningkatnya jumlah energi yang dihasilkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | **Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** |
| | | | Meningkatnya kawasan kumuh yang tertangani | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Tertangani | Program Kawasan Permukiman | |
| | | | Terselenggaranya pengelolaan hutan dan lahan secara lestari dan berkelanjutan | Persentase efektifitas pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan | Program Pengelolaan Hutan | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Perangkat Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat bidang kehutanan | Persentase peningkatan produk hasil hutan oleh kelompok bidang kehutanan | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan persampahan | 1. Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah | Program Pengelolaan Sampah | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan persampahan | 2. Persentase timbulan sampah yang terkelola | Program Pengelolaan Sampah | |
| | | | Menurunnya pencemaran lingkungan hidup | Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan pada media air, udara, dan air laut | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Urusan kebencanaan | Persentase kebencanaan yang tertangani | Program Penanggulangan Bencana | |

## 3.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

### 3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional

Kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengamanatkan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang akan diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dengan menetapkan sasaran, tema dan arah kebijakan pembangunan wilayah.

Pembangunan wilayah pada RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung pencapaian target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan tercapainya Indeks Modal Manusia sebesar 0,59, penurunan kemiskinan sebesar 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem menuju 8 persen.

Sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan wilayah, maka RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan highlight intervensi umum dan highlight intervensi khusus sebagai penjabaran peran pemerintah provinsi lingkup Pulau Sulawesi dalam pencapaian rencana jangka menengah untuk mengurangi kesenjangan wilayah yang diarahkan menjadi "Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA" melalui perspektif pembangunan kewilayahan dan pendekatan wilayah dengan sasaran pembangunan yang telah telah ditetapkan termasuk sasaran pembangunan terhadap provinsi provinsi di dalamnya.

**Gambar III.1**
**Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

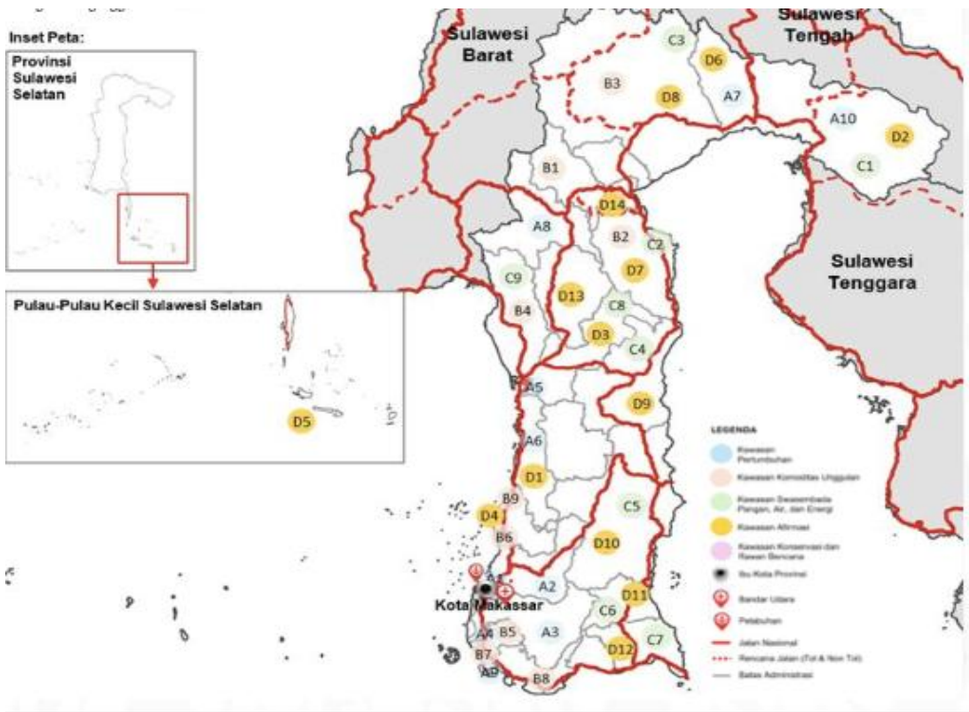


*Sumber: Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029*

Perspektif pembangunan kewilayahan difokuskan pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hirarki dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem *Online Singe*

*Submission* (OSS), serta pengendalian pemanfaatan ruang; penyediaan data dan informasi geospasial; pertanahan; pemenuhan layanan dasar; penyediaan infrastruktur dasar; dan penguatan otonomi dan keuangan daerah.

Sedangkan pendekatan pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas, berkelanjutan dan pemerataan pembangunan, untuk mengurangi ketimpangan melalui pengembangan pusat pusat pertumbuhan serta pembangunan daerah afirmasi dan perdesaan. Prioritas pembangunan daerah afirmasi dan perdesaan di Sulawesi Selatan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

**Gambar III.2**
**Alur pikir pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Mendukung Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM**

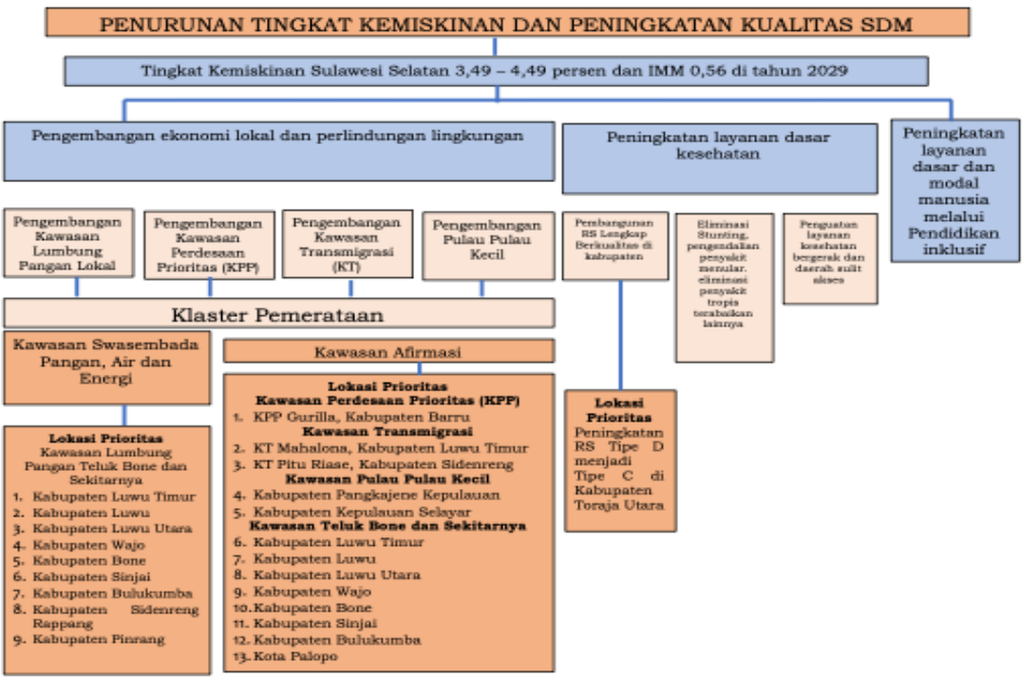


*Sumber: PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 diolah, Tahun 2025*

Selain itu peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan dan pusat pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

**Gambar III.3**
**Alur pikir pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

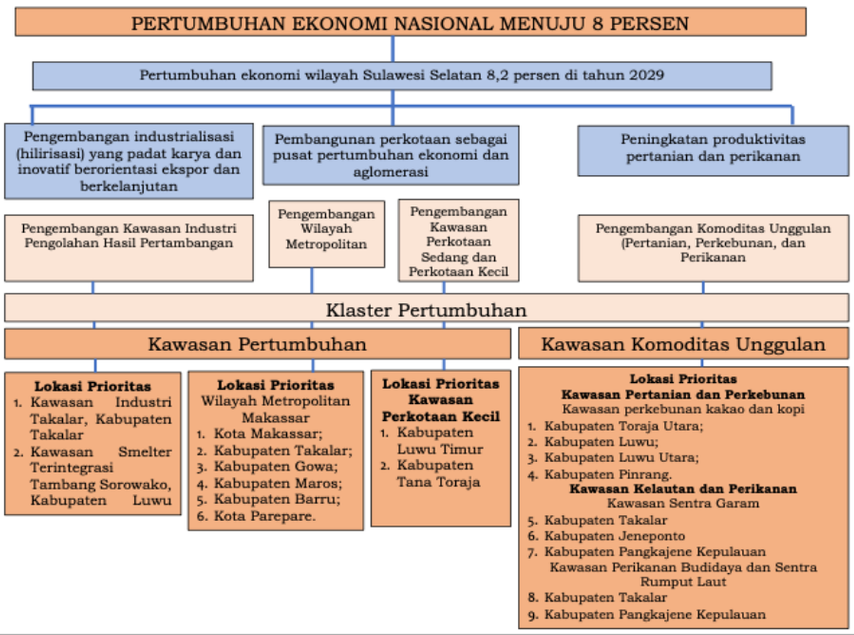


*Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 diolah, Tahun 2025*

### 3.3.2. Sasaran, Tema, dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan yang diarahkan sebagai berikut. Kawasan Makassar (Takalar, Gowa, Makassar, Maros, dan Pangkajene Kepulauan) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin. Kawasan Bulukumba (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan. Kawasan Watampone (Bone, Soppeng, dan Wajo) diarahkan sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kawasan Palopo (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone, Pusat Pertumbuhan Industri Pengolahan SDA Mineral, serta Pusat Pariwisata Budaya. Kawasan Parepare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Enrekang) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan berbasis pertumbuhan ekonomi hijau mendukung IKN.

**Gambar III.4**
**Tema Pembangunan Wilayah Berdasarkan Kawasan Pembangunan Sulawesi Selatan**

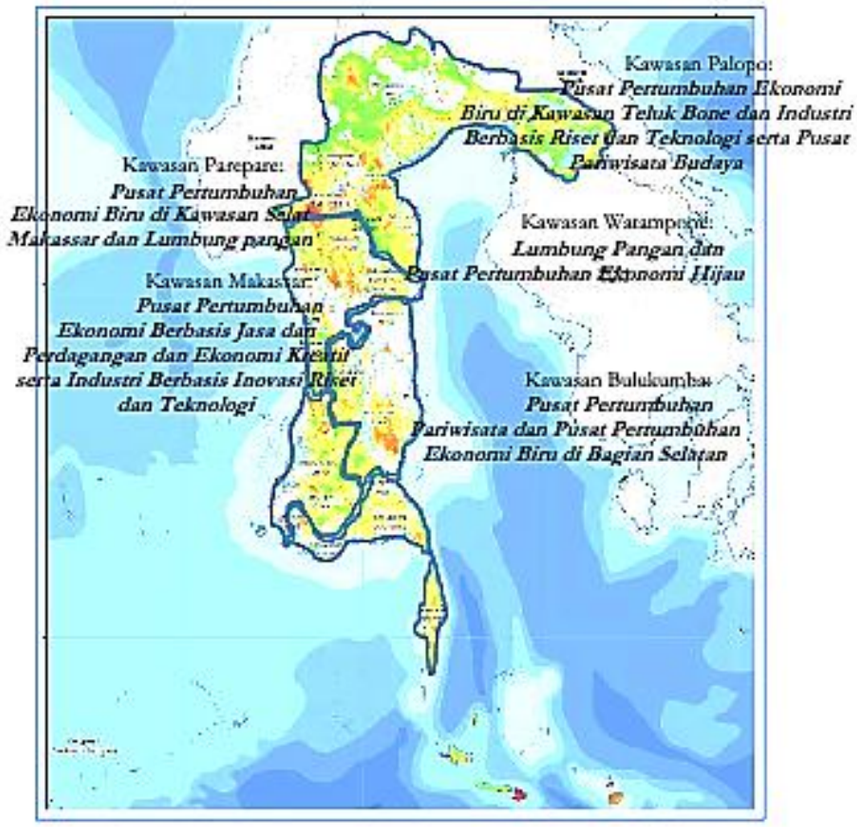


*Sumber: Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045*

Sebagaimana kebijakan pembangunan wilayah yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan dan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

## 1. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Makassar

Pembangunan Kawasan Makassar diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi. Kawasan Makassar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berbasis ekonomi biru yang didukung oleh letak geografis kawasan sebagai bagian dari kawasan Selat Makassar, sehingga sasaran pembangunan wilayah Kawasan Makassar Tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut.

**Tabel III.13.**
**Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Makassar**
**Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030**

| Kabupaten/Kota | Tahun | Makassar | Takalar | Gowa | Maros | Pangkajene Kepulauan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 2025 | 5,73 | 4,52 | 5,56 | 4,05 | 5,19 |
| | 2029 | 8,13 | 6,92 | 7,96 | 6,45 | 7,59 |
| | 2030 | 8,43 | 7,22 | 8,26 | 6,75 | 7,89 |
| PDRB per kapita (Rp. Juta) | 2025 | 175,46 | 44,27 | 39,87 | 72,01 | 101,36 |
| | 2029 | 233,71 | 56,35 | 52,77 | 90,04 | 132,32 |
| | 2030 | 253,41 | 60,41 | 57,13 | 96,11 | 142,76 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2025 | 9,62 | 3,75 | 3,82 | 4,25 | 3,90 |
| | 2029 | 9,26 | 3,39 | 3,46 | 3,89 | 3,54 |
| | 2030 | 9,16 | 3,29 | 3,36 | 3,79 | 3,44 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 2025 | 3,62-3,03 | 7,16–6,57 | 6,60–6,01 | 8,09-7,05 | 11,52-10,93 |
| | 2029 | 3,15-2,15 | 5,73-4,73 | 5,47-4,47 | 7,15-6,15 | 9,16-8,16 |
| | 2030 | 3,03-2,13 | 5,20–4,59 | 5,13–4,31 | 6,88-6,06 | 8,49-7,88 |
| Rasio Gini | 2025 | 0,366 | 0,379 | 0,320 | 0,343 | 0,311 |
| | 2029 | 0,341 | 0,354 | 0,295 | 0,318 | 0,286 |
| | 2030 | 0,334 | 0,347 | 0,288 | 0,311 | 0,279 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2025 | 85,46 | 72,37 | 74,03 | 74,36 | 74,25 |
| | 2029 | 86,56 | 73,85 | 75,61 | 75,88 | 76,22 |
| | 2030 | 86,83 | 74,22 | 76,03 | 76,26 | 76,69 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 2025 | 32,46 | 28,76 | 22,52 | 13,53 | 38,38 |
| | 2029 | 42,13 | 39,10 | 33,86 | 17,55 | 47,51 |
| | 2030 | 44,60 | 41,77 | 36,75 | 18,97 | 49,85 |

*Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Makassar yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

**Pertama**, peningkatan akses dan layanan Pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau yang diarahkan pada pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak,

khususnya penguatan intervensi spesifik stunting yang diprioritaskan pada kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan, antara lain kabupaten Takalar, dan Maros.

**Kedua**, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga termasuk pembangunan Stadion Sudiang di kota Makassar, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya termasuk di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep) yang diprioritaskan pada kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik yang diprioritaskan;

**Ketiga**, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas di kabupaten Maros, Gowa, Takalar dan Pangkajene dan Kepulauan termasuk pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan di kabupaten Maros, dan kabupaten Gowa. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap di kabupaten Takalar dan kabupaten Pangkajene Kepulauan, pengembangan pangan akuatik (blue food), khususnya pengembangan budidaya komoditas unggulan utamanya udang, nila dan rumput laut termasuk pembangunan sentra perikanan dan rumput laut yang mencakup hilirisasi, teknologi, dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur kawasan budidaya di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Gowa dan Takalar. Selain itu diarahkan juga pada pengembangan kawasan sentra garam melalui dukungan terhadap pengembangan korporasi petambak garam, pengembangan garam industry terintegrasi serta penguatan sarana dan prasarana industry garam di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry garam dan produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja diproritaskan pada kota Makassar,

kabupaten Maros, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan kabupaten Takalar. Selain itu dilakukan upaya penguatan logistic, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Takalar, kabupaten Maros, dan kabupaten Pangkajene Kepulauan, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Takalar, kabupaten Maros, dan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta kota Makassar. Sebagai dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Takalar diarahkan pada dukungan program fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan rantai pasok sektor industry prioritas melalui fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk pendukung konektivitas kawasan industry dengan lokasi bahan baku, serta peningkatan investasi kawasan yang didukung oleh penyediaan dan peningkatan tenaga kerja serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry.

Selain itu pengembangan kawasan Makassar, juga diprioritaskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi termasuk pengembangan *seaplane* yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat utamanya di kawasan UNESCO Global GeoPark sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya yang diprioritaskan pada kota Makassar, kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan;

**Keempat**, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, dukungan dan fasilitasi penguatan industry transportasi laut yang diarahkan pada pengembangan industry galangan kapal di kota Makassar, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi di kota Makassar, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi di kota Makassar termasuk dukungan terhadap pembangunan North Hub Development Project Selat Makassar serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang diprioritaskan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Gowa, Takalar dan kota Makassar.

**Kelima**, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Selain itu peningkatan pembangunan perdesaan di Kawasan Pembangunan Makassar juga diarahkan untuk mendukung pembangunan pada kawasan pulau pulau kecil utamanya di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui dukungan pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi

tenaga listrik, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan serta penguatan konektivitas laut, termasuk dukungan pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local di kabupaten Takalar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan.

**Keenam**, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Makassar sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan MAMMINASATA dan Kawasan Metropolitan Makassar DSK diarahkan pada dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata, fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan, fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah khususnya pengembangan pariwisata antar kawasan pembangunan di kabupaten Takalar dan Gowa yang terhubung dengan Kawasan Pembangunan Bulukumba dan Sekitarnya serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Makassar juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

**Ketujuh**, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan di Kawasan Makassar sebagai bagian dari Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar DSK diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman yang diprioritaskan pada pengembangan SPAM Regional Mamminasata di kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa, dan kabupaten Takalar, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional yang diprioritaskan pada penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pasrtisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik termasuk di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diprioritaskan pada kota Makassar dan kabupaten Maros serta kabupaten Pangkajene Kepulauan, fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital

dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi transportasi darat, laut dan udara yang diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa penyelenggaraan layanan kereta api lintas Makassar-Parepare, pengembangan angkutan umum massal perkotaan yang diprioritaskan pada kota Makassar, kabupaten Takalar dan kabupaten Gowa, pembangunan dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu melalui pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan bandar udara perairan *(sea plane*) yang diprioritaskan di Kota Makassar, dan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dukungan pengembangan jaringan bandara terpadu di kota Makassar dan kabupaten Maros, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta penguatan konektivitas darat dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

**Kedelapan**, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan, yang diprioritaskan pada kota Makassar, kabupaten Gowa, dan kabupaten Maros, konservasi sumber daya air di kota Makassar, pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Kota Makassar, kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan kabupaten Takalar. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

## 2. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Bulukumba

Kawasan pembangunan Bulukumba diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan. Peluang kontribusi ekonomi kawasan pembangunan Bulukumba sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru bersumber dari letak geografi yang terletak di Laut Flores dan Teluk Bone serta merupakan bagian dari kawasan andalan Bulukumba-Watampone, untuk itu sasaran pembangunan Kawasan Bulukumba sebagai berikut.

**Tabel III.14.**
**Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Bulukumba**
**Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030**

| Kabupaten/Kota | Tahun | Jeneponto | Bantaeng | Bulukumba | Sinjai | Kepulauan Selayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 2025 | 6,19 | 4,50 | 4,81 | 5,35 | 3,50 |
| | 2029 | 8,59 | 6,90 | 7,21 | 7,75 | 5,90 |
| | 2030 | 8,89 | 7,20 | 7,51 | 8,05 | 6,20 |
| PDRB per kapita (Rp. Juta) | 2025 | 33,09 | 68,43 | 46,62 | 62,23 | 60,49 |
| | 2029 | 44,84 | 87,03 | 59,98 | 81,71 | 74,07 |
| | 2030 | 48,83 | 93,30 | 64,49 | 88,29 | 78,66 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2025 | 2,38 | 2,48 | 2,14 | 1,43 | 1,96 |
| | 2029 | 2,02 | 2,12 | 1,78 | 1,07 | 1,60 |
| | 2030 | 1,92 | 2,02 | 1,68 | 0,97 | 1,50 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 2025 | 11,21-10,62 | 7,60–7,01 | 6,15–5,56 | 6,92-6,33 | 10,26–9,67 |
| | 2029 | 7,31-6,31 | 6,97-5,97 | 4,88-3,88 | 5,48-4,48 | 8,67-7,67 |
| | 2030 | 5,96-5,35 | 6,80–5,94 | 4,60–3,84 | 5,07-4,46 | 8,28–7,53 |
| Rasio Gini | 2025 | 0,298 | 0,243 | 0,323 | 0,281 | 0,323 |
| | 2029 | 0,273 | 0,218 | 0,298 | 0,256 | 0,298 |
| | 2030 | 0,266 | 0,211 | 0,291 | 0,249 | 0,291 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2025 | 69,86 | 72,62 | 74,88 | 72,11 | 72,38 |
| | 2029 | 71,78 | 74,78 | 77,12 | 73,50 | 74,39 |
| | 2030 | 72,16 | 75,26 | 77,67 | 73,81 | 74,90 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 2025 | 28,49 | 59,32 | 35,68 | 24,54 | 23,66 |
| | 2029 | 40,14 | 66,82 | 45,49 | 40,53 | 37,97 |
| | 2030 | 43,01 | 68,60 | 47,95 | 44,04 | 41,27 |

*Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Bulukumba yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui:

**Pertama**, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital termasuk pembangunan RS lengkap berkualitas serta pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, penguatan upaya eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, utamanya pada

kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Bulukumba.

**Kedua**, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan local social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan, pemanfaatan cagar budaya di kabupaten Sinjai, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Bulukumba, serta revitalisasi budaya bahari, dan pengembangan teknologi tradisional Kapal Phinisi diprioritaskan di kabupaten Bulukumba yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik;

**Ketiga**, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas guna mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya di kabupaten Sinjai, Bantaeng, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kabupaten Bulukumba serta pengembangan komoditas perkebunan unggulan termasuk pengembangan komoditas kelapa di kabupaten Kepulauan Selayar, pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan di kabupaten Jeneponto, serta pengembangan pangan local dan nabati di kabupaten Sinjai dan kabupaten Bulukumba, Selain itu, pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap di kabupaten Bulukumba, Sinjai dan kabupaten Kepulauan Selayar, pengembangan pangan akuatik (blue food), khususnya pengembangan budidaya komoditas unggulan utamanya udang, nila dan rumput laut termasuk pembangunan sentra perikanan dan rumput laut yang mencakup hilirisasi, teknologi, dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur kawasan budidaya di kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, dan Kepulauan Selayar, pengembangan kawasan sentra garam melalui dukungan terhadap pengembangan korporasi petambak garam, pengembangan garam industry terintegrasi serta penguatan sarana dan prasarana industry garam di kabupaten Kepulauan Selayar.

Sedangkan pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry garam dan produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh

penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja diproritaskan pada kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto dan Kepulauan Selayar. Selain itu dilakukan upaya penguatan logistic, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Sinjai, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Sinjai dan kabupaten Kepulauan Selayar serta kabupaten Bulukumba. Sebagai dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Bantaeng diarahkan pada dukungan program fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan rantai pasok sektor industry prioritas melalui fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk pendukung konektivitas kawasan industry dengan lokasi bahan baku, serta peningkatan investasi kawasan yang didukung oleh penyediaan dan peningkatan tenaga kerja serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry.

Selain itu pengembangan kawasan Bulukumba, juga diprioritaskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi termasuk pengembangan *seaplane* yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat yang diprioritaskan pada kabupaten Kepulauan Selayar, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Sinjai sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik;

**Keempat**, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi di kabupaten Jeneponto dan kabupaten Bantaeng serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual di kabupaten Bulukumba dan kabupaten Bantaeng.

**Kelima**, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Selain itu peningkatan pembangunan perdesaan di Kawasan Pembangunan Bulukumba, juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di Kawasan Swasembada pangan, air dan energi kawasan Teluk Bone DSK melalui penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di kabupaten Sinjai dan Bulukumba yang juga ditetapkan

sebagai kawasan afirmasi melalui pemerataan kawasan di kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, yang diprioritaskan pada pengembangan pelabuhan Sinjai dan fasilitas pelabuhan Larea-rea serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan. Selain itu kedua kawasan tersebut di Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya juga ditetapkan lokasi prioritas di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan afirmasi kawasan pulau pulau Kecil Sulawesi Selatan melalui melalui dukungan pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan serta penguatan konektivitas laut, termasuk dukungan pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local di kabupaten Jeneponto, kabupaten Bantaeng, kabupaten Sinjai dan kabupaten Kepulauan Selayar.

**Keenam**, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Bulukumba juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan khususnya pengembangan pariwisata antar kawasan pembangunan di kabupaten Jeneponto yang terhubung dengan Kawasan Pembangunan Makassar dan Sekitarnya. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Bulukumba juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

**Ketujuh**, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik termasuk di wilayah pesisir dan pulau pulau, fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM serta

peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi transportasi darat, laut dan udara yang diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi, pengembangan angkutan umum massal, pembangunan dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu melalui pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan bandar udara perairan *(sea plane*) yang diprioritaskan di kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta penguatan konektivitas darat dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kedelapan**, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir di kabupaten Jeneponto, kabupaten Kepulauan Selayar, dan kabupaten Sinjai dan kabupaten Bantaeng serta pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diprioritaskan di kabupaten Sinjai dan kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

### 3. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Watampone

Kawasan Pembangunan Watampone diarahkan menjadi Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Peran Kawasan Watampone sebagai lumbung pangan tidak hanya sebagai lumbung pangan regional namun juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan IKN. Secara geografis Kawasan Watampone merupakan bagian dari Kawasan Teluk Bone, dan akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau, sehingga sasaran pembangunan wilayah Kawasan WatamponeTahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut.

**Tabel III.15.**
**Sasaran Pembangunan Kabupaten di Kawasan Watampone**
**Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030**

| Kabupaten/Kota | Tahun | Bone | Soppeng | Wajo |
|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 2025 | 5,71 | 4,24 | 4,77 |
| | 2029 | 8,11 | 6,94 | 7,17 |
| | 2030 | 8,41 | 6,94 | 7,47 |
| | 2025 | 63,69 | 70,11 | 69,89 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | Bone | Soppeng | Wajo |
|---|---|---|---|---|
| PDRB per kapita (Rp. Juta) | 2029 | 84,78 | 88,29 | 89,82 |
| | 2030 | 91,91 | 94,41 | 96,53 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2025 | 2,19 | 3,24 | 2,22 |
| | 2029 | 1,83 | 2,88 | 1,86 |
| | 2030 | 1,73 | 2,78 | 1,76 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 2025 | 8,73-8,14 | 6,47–5,88 | 6,60–6,01 |
| | 2029 | 8,21-7,21 | 5,33-4,33 | 4,85-3,85 |
| | 2030 | 8,07-7,19 | 5,05–4,44 | 4,43–3,82 |
| Rasio Gini | 2025 | 0,380 | 0,375 | 0,363 |
| | 2029 | 0,355 | 0,350 | 0,338 |
| | 2030 | 0,348 | 0,343 | 0,331 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2025 | 71,20 | 73,17 | 74,43 |
| | 2029 | 73,13 | 75,26 | 76,49 |
| | 2030 | 73,57 | 75,76 | 76,90 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 2025 | 27,07 | 27,51 | 10,60 |
| | 2029 | 41,16 | 38,14 | 11,79 |
| | 2030 | 44,33 | 40,84 | 15,44 |

*Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Watampone yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

**Pertama**, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau yang diarahkan pada pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, penguatan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dan penurunan kematian ibu dan anak, serta pencegahan dan penurunan stunting pada kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Soppeng.

**Kedua**, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada

pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pemanfaatan cagar budaya di kabupaten Bone yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik.

**Ketiga**, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas guna mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya di kabupaten Bone dan kabupaten Wajo, pengembangan kawasan sentra produksi pangan pertanian tanaman pangan di kabupaten Bone dan kabupaten Wajo serta kabupaten Soppeng, dan pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan di kabupaten Bone, serta pengembangan pangan local dan nabati di kabupaten Wajo. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diprioritaskan pada pengembangan pangan akuatik (*blue food*) khususnya pengembangan budidaya komoditas unggulan utamanya udang, nila dan rumput laut termasuk pembangunan sentra perikanan dan rumput laut yang mencakup hilirisasi, teknologi, dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur kawasan budidaya di kabupaten Wajo, Soppeng dan kabupaten Bone termasuk pengembangan produktivitas perikanan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan di kabupaten Bone. Selain itu pengembangan kawasan Watampone, juga diprioritaskan pada percepatan hilirisasi industry berbasis SDA unggulan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya serta penguataan industry padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan berorientasi ekspor serta aglomerasi industry dan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang diproritaskan di kabupaten Wajo, penguatan logistic, dan pemasaran kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk pertanian khususnya pertanian tanaman pangan yang diprioritaskan pada kabupaten Bone, kabupaten Wajo dan kabupaten Soppeng. Selain itu, pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat;

**Keempat**, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual di kabupaten Bone, kabupaten Soppeng dan kabupaten Wajo.

**Kelima**, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka

pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Selain itu untuk peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan Teluk Bone DSK berupa pemerataan pembangunan kawasan melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi termasuk pengembangan bandar udara Arung Palakka di kabupaten Bone, serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan di kabupaten Bone dan kabupaten Wajo serta perluasam pemanfaatan *biofuel* teruama di kabupaten Bone. Sedangkan dukungan terhadap pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk pembangunan Daerah Irigasi Gilireng di kabupaten Wajo, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut terutama di kabupaten Bone dan kabupaten Wajo dan Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan.

**Keenam**, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Watampone juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; serta penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Watampone juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

**Ketujuh**, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman yang diprioritaskan pada pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir di kabupaten Wajo, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan

infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa fasilitasi dan dukungan peningkatan dan pengembangan kapasitas bandar udara di kabupaten Bone, pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kedelapan**, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir khususnya pada kawasan Danau Tempe di kabupaten Bone, kabupaten Wajo dan kabupaten Soppeng serta pengelolaan kawasan konservasi perairan di kabupaten Bone. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

### 4. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Palopo

Kawasan pembangunan Palopo diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya, untuk itu sasaran pembangunan wilayah Kawasan PalopoTahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel III.16.**
**Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo**
**Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030**

| Kabupaten/Kota | Tahun | Palopo | Luwu | Luwu Utara | Luwu Timur | Tana Toraja | Toraja Utara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 2025 | 4,59 | 5,23 | 4,48 | 3,57 | 5,39 | 4,67 |
| | 2029 | 6,99 | 6,93 | 6,88 | 6,27 | 7,79 | 7,07 |
| | 2030 | 7,29 | 7,23 | 7,18 | 6,27 | 8,09 | 7,37 |
| PDRB per kapita (Rp. Juta) | 2025 | 59,25 | 62,44 | 60,92 | 100,65 | 36,61 | 49,96 |
| | 2029 | 75,61 | 79,52 | 77,44 | 123,59 | 48,14 | 63,95 |
| | 2030 | 81,11 | 85,72 | 83,01 | 131,34 | 52,03 | 68,66 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2025 | 7,55 | 4,05 | 2,30 | 4,49 | 3,89 | 2,44 |
| | 2029 | 7,19 | 3,69 | 1,94 | 4,13 | 3,53 | 1,99 |
| | 2030 | 7,09 | 3,59 | 1,84 | 4,03 | 3,43 | 1,89 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | Palopo | Luwu | Luwu Utara | Luwu Timur | Tana Toraja | Toraja Utara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Kemiskinan (%) | 2025 | 7,17-6,58 | 11,16–10,57 | 10,50–9,91 | 6,47-5,88 | 9,44-8,85 | 10,32-9,73 |
| | 2029 | 6,20-5,20 | 9,41-8,41 | 8,48-7,47 | 5,56-4,56 | 8,67-7,67 | 7,57-6,57 |
| | 2030 | 5,93-5,13 | 8,91–8,30 | 7,97–7,36 | 5,29-4,49 | 8,46-7,85 | 6,66-6,05 |
| Rasio Gini | 2025 | 0,327 | 0,313 | 0,266 | 0,344 | 0,314 | 0,310 |
| | 2029 | 0,302 | 0,288 | 0,241 | 0,319 | 0,289 | 0,285 |
| | 2030 | 0,295 | 0,281 | 0,234 | 0,312 | 0,282 | 0,278 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2025 | 81,50 | 74,28 | 74,44 | 76,72 | 72,37 | 72,73 |
| | 2029 | 82,73 | 76,14 | 76,44 | 78,04 | 74,53 | 74,79 |
| | 2030 | 83,04 | 76,54 | 76,90 | 78,38 | 75,09 | 75,27 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 2025 | 18,76 | 20,77 | 10,15 | 2,11 | 39,28 | 29,72 |
| | 2029 | 28,51 | 31,07 | 24,13 | 4,17 | 51,20 | 41,99 |
| | 2030 | 31,24 | 33,87 | 27,60 | 4,88 | 53,86 | 44,71 |

*Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Palopo yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

**Pertama**, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, termasuk peningkatan RS Tipe D menjadi Tipe C di kabupaten Toraja Utara, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, penguatan upaya eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, utamanya pada kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan, antara lain kabupaten Tana Toraja, dan Luwu Utara.

**Kedua**, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter

bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pemanfaatan cagar budaya yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik.

**Ketiga**, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak termasuk pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan pada kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, termasuk pengembangan sentra perkebunan terutama kopi di kabupaten Toraja Utara dan kakao di kabupaten Luwu dan Luwu Utara, serta pengembangan pangan local dan nabati yang diprioritaskan di kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru termasuk pengembangan pangan akuatik (*blue food*) diprioritaskan pada peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut yang diprioritaskan di kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Timur, pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, penguatan logistic, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistic, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan di kabupaten Luwu, dan kabupaten Luwu Utara, serta kota Palopo.

Sedangkan pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja diproritaskan pada kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu Timur. Sebagai dukungan terhadap pengembangan Kawasan Sorowako sebagai Kawasan Strategis Nasional diarahkan pada dukungan pengembangan kawasan smelter terintegrasi tambang Sorowako melalui pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang Sorowako di kabupaten Luwu Timur, termasuk pengembangan kawasan Industri *Indonesia Huali Industry Park* (IHIP), berupa tata kelola industry nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dekarbonisasi industry dan ekonomi sirkuler di industry nikel yang sejalan dengan peta jalan, dan hilirisasi industry berbasis nikel, serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry dukungan program fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan rantai pasok sektor industry prioritas melalui fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur

termasuk pendukung konektivitas kawasan industry dengan lokasi bahan baku, serta peningkatan investasi kawasan yang didukung oleh penyediaan dan peningkatan tenaga kerja serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry. Selain itu pengembangan kawasan Palopo dan Sekitarnya juga diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

**Keempat**, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta penguatan swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

**Kelima**, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan di Kawasan Pembangunan Palopo dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan transmigrasi Mahalona melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistic, dukungan pengembangan ekonom, redistribusi asset transmigrasi dan penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil di kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya berupa pemerataan pembangunan kawasan melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo. Selain itu peningkatan kemandirian perdesaan juga diarahkan pada pembangunan perkotaan non wilayah Metropolitan di kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Tana Toraja melalui pembangunan kawasan perkotaan kecil termasuk penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan terintegrasi dan terpadu di kabupaten Tana Toraja, dan pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako di kabupaten Luwu Timur.

**Keenam**, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas

tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Palopo dan Sekitarnya juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; dan penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan Kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Palopo juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

**Ketujuh**, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman, penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS yang diprioritaskan di kabupaten Luwu, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa dukungan pengembangan bandar udara di kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu Timur, dan kabupaten Luwu, pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kedelapan**, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir yang diprioritaskan pada kabupaten Luwu Utara dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu Timur, serta kota Palopo. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi

serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

### 5. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Parepare

Kawasan Parepare diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN. Oleh karena itu, sasaran pembangunan wilayah Kawasan Parepare Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel III.17.**
**Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare**
**Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030**

| Kabupaten/Kota | Tahun | Parepare | Barru | Sidenreng Rappang | Pinrang | Enrekang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 2025 | 5,29 | 5,11 | 4,25 | 5,89 | 4,54 |
| | 2029 | 7,69 | 7,51 | 6,65 | 8,29 | 7,15 |
| | 2030 | 7,99 | 7,81 | 6,95 | 8,59 | 7,45 |
| PDRB per kapita (Rp. Juta) | 2025 | 65,25 | 54,94 | 61,83 | 66,47 | 46,05 |
| | 2029 | 85,49 | 77,10 | 83,31 | 96,73 | 63,54 |
| | 2030 | 92,32 | 77,10 | 83,31 | 96,73 | 63,54 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2025 | 5,14 | 6,33 | 2,93 | 3,03 | 1,42 |
| | 2029 | 4,78 | 5,97 | 2,57 | 2,67 | 1,06 |
| | 2030 | 4,68 | 5,87 | 2,47 | 2,57 | 0.96 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 2025 | 4,84-4,25 | 7,65-7,05 | 4,60-4,01 | 7,67-7,08 | 9,98-9,39 |
| | 2029 | 3,98-2,98 | 6,91-5,91 | 3,86-2,86 | 7,37-6,37 | 8,81-7,81 |
| | 2030 | 3,62-2,80 | 6,75-6,14 | 3,57-2,75 | 7,29-6,31 | 8,42-7,81 |
| Rasio Gini | 2025 | 0,370 | 0,304 | 0,313 | 0,293 | 0,336 |
| | 2029 | 0,345 | 0,279 | 0,288 | 0,268 | 0,311 |
| | 2030 | 0,338 | 0,272 | 0,281 | 0,261 | 0,304 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2025 | 81,26 | 74,92 | 75,10 | 75,83 | 76,20 |
| | 2029 | 82,69 | 76,74 | 76,47 | 77,63 | 77,78 |
| | 2030 | 83,02 | 77,13 | 76,79 | 78,04 | 78,12 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 2025 | 14,46 | 36,56 | 11,94 | 29,56 | 22,87 |
| | 2029 | 23,36 | 47,28 | 17,92 | 38,42 | 33,24 |
| | 2030 | 25,92 | 49,83 | 25,05 | 40,83 | 35,95 |

*Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Parepare dan Sekitarnya yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

**Pertama**, peningkatan akses dan layanan Pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit

akses, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, penguatan eliminasi penyakit tropis terabaikan serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, utamanya pada kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya diatas rata rata provinsi Sulawesi Selatan, antara lain kabupaten Enrekang, Barru, dan kota Parepare.

**Kedua,** peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage dan rural heritage, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan serta pemanfaatan cagar budaya diprioritaskan di kabupaten Barru dan kota Parepare yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik.

**Ketiga,** hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak termasuk pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan di kabupaten Sidenreng Rappang, kabupaten Enrekang, dan kabupaten Pinrang. Pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya termasuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan pengembangan pangan local dan nabati yang diprioritaskan di kabupaten Pinrang, dan kabupaten Sidenreng Rappang, kabupaten Enrekang, kabupaten Barru dan kabupaten Pinrang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian melalui peningkatan produktivitas pertanian yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sedangkan pengembangan kawasan sentra perkebunan kakao di kabupaten Pinrang, diarahkan pada hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, implementasi pertanian rendah karbon dan peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru termasuk pengembangan pangan akuatik (*blue food*) diprioritaskan pada peningkatan produktivitas

perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut yang diprioritaskan di kabupaten Pinrang pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, penguatan logistic, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistic, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan di kabupaten Barru, dan kabupaten Pinrang.

Selain itu pengembangan kawasan Parepare dan Sekitarnya, juga diprioritaskan pada dukungan Sedangkan pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja diproritaskan pada kabupaten Barru, kabupaten Pinrang dan kota Parepare. Selain itu pengembangan kawasan Parepare dan Sekitarnya juga diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

**Keempat**, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta penguatan swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual

**Kelima**, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Sedangkan peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan di Kawasan Parepare dan Sekitarnya yang diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan perdesaan prioritas Agrowisata Guriila di kabupaten Barru melalui dukungan penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas desa, pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local, peningkatan kapasitas tata kelola desa, serta peningkatan ketahanan social dan lingkungan perdesaan, pengembangan kawasan transmigrasi Pitu Riase di kabupaten Sidenreng Rappang melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistic, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi asset transmigrasi, dan

penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil serta pengembangan kawasan sembada pangan, air dan energi kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya di kabupaten Enrekang berupa pemerataan kawasan melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi. Selain itu peningkatan kemandirian perdesaan di Kawasan Pembangunan Parepare dan Sekitarnya juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan serta penguatan konektivitas laut, termasuk dukungan pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local.

**Keenam,** transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Parepare dan Sekitarnya juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; dan penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur wilayah, perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan kerjasama antar daerah dan multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Parepare dan Sekitarnya juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

**Ketujuh,** peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman melalui pengembangan SPAM regional terintegrasi hulu ke hilir yang diprioritaskan di kabupaten Sidenreng Rappang dan kabupaten Enrekang; penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kedelapan**, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir yang diprioritaskan pada kota Parepare, kabupaten Pinrang, dan kabupaten Sidenreng Rappang, serta pengelolaan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di kabupaten Barru. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon, yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

**Tabel III.18.**
**Arah Pembangunan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| **KAWASAN PEMBANGUNAN MAKASSAR** | | | | |
| I | **Makassar** | **Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui<br>• dukungan pembangunan terminal tipe A dan pengembangan terminal tipe B,<br>• dukungan pengembangan jaringan bandara terpadu pada Bandara Sultan Hasanuddin;<br>• peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat,<br>• dukungan penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA,<br>• dukungan terhadap PSN dalam kerangka konektivitas dan kawasan berupa pembangunan dan pengembangan Makassar New Port;<br>• dukungan pembangunan jalan tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata *Bypass* ) serta<br>• pengembangan pelabuhan pengumpan regional dan pembangunan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane); |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui:<br>• penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penanganan permukiman kumuh;<br>• peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan SPAM Regional Mamminasata terintegrasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional;<br>• penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R;<br>• dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>• dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM;<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional (PSN) dalam kerangka swasembada energi berupa pembangunan jaringan gas perkotaan. |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya, termasuk di pesisir dan pulau pulau kecil Kota Makassar termasuk pembangunan PLTSa;<br>▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan;<br>▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | • peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Dukungan pembangunan pada kawasan pulau pulau kecil melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah,<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik;<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;<br>▪ pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;<br>▪ penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan;<br>▪ penguatan konektivitas laut termasuk dukungan pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah,<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta<br>▪ pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga termasuk pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga di Kawasan Olahraga Sudiang dan Kawasan Olahraga Mattoangin |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, melalui<br>• pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | • peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil,<br>• pengendalian daya rusak air, dan<br>• peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan |
| | | | | Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau- pulau kecil Kota Makassar |
| | | | | **KPU - 04 - Konservasi Sumber Daya Air**, melalui Pengendalian daya rusak air |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui<br>• penguatan industri transportasi laut,<br>• dukungan pengembangan industry produk olahan hasil laut,<br>• fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,<br>• penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>• jaminan ketersediaan bahan baku,<br>• peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high tecnology*.<br>• Peningkatan investasi di Kawasan Industri Makassar |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>• Pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>• Fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>• Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>• peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>• fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>• dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;<br>• peningkatan produktivitas pertanaian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>• Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi termasuk pemanfaatan *seaplane;*<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui<br>• Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>• Penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | | Fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi termasuk dukungan terhadap pembangunan North Hub Development Project Selat Makassar |
| | | | | Dukungan dan fasilitasi penguatan industri transportasi laut termasuk dukungan pengembangan industry galangan kapal di Kota Makassar |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah, melalui<br>• pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta<br>• penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Failitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | | | |
| **2** | **Maros** | **Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui<br>• dukungan pembangunan terminal Tipe A Mandai yang terintegrasi dengan stasiun KA;<br>• dukungan terhadap PSN dalam kerangka konektivitas dan kawasan yaitu penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare;<br>• dukungan pembangunan jalan tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata *Bypass*);<br>• pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pengembangan terminal tipe B sebagai simpul transportasi;<br>• peningkatan dan preservasi jalan daerah; serta<br>• dukungan pengembangan jaringan bandara terpadu pada Bandara Sultan Hasanuddin. |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui:<br>• Pembangunan SPAM Regional Mamminasata yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional,<br>• penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan,<br>• dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya;<br>▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan;<br>▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui:<br>▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital;<br>▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui dukungan:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local. |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya termasuk pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep) melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage; dan<br>• diversifikasi atraksi pariwisata pada Kawasan Karst Geopark Maros-Pangkep |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir;<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan; |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, kehutanan dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui<br>• dukungan pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut,<br>• fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,<br>• penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir,<br>• jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya;<br>• peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*; dan<br>• Dukungan peningkatan investasi di Kawasan Industri Maros. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>• peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>• pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan,<br>• pengembangan pangan hewani,<br>• fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>• pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya;<br>• penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>• peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>• fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>• dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;<br>• peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>• Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani**, melalui pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah, melalui<br>▪ pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta<br>▪ penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Failitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | | | |
| **3** | **Gowa** | **Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui :<br>▪ pengembangan terminal Tipe B;<br>▪ dukungan pembangunan jalan tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata *Bypas*);<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat; serta<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui<br>• Dukungan pembangunan SPAM Regional Mamminasata terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional,<br>• penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan,<br>• dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya;<br>▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan;<br>▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui:<br>▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak;<br>▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan<br>▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>▪ pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agrarian<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir;<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana;<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional (PSN) dalam kerangka swasembada air yaitu Bendungan Karalloe |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan; |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui :<br>• dukungan penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>• dukungan dan fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku; dan<br>• dukungan peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya.<br>• peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high tecnology*. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>• peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi termasuk rehabilitasi DI kampili dan DI Kelara Karalloe;<br>• pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani,<br>• fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>• pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya;<br>• penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>• fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>• peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>• dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional dalam kerangka swasembada air berupa pembangunan bendungan Karalloe. |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata;<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani**, melalui pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui<br>• Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>• Penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah, melalui<br>▪ pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta<br>• penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |
| | | | | Fasilitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | | | |
| **4** | **Takalar** | **Kawasan Wilayah Metropolitan** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara)** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | **Makassar dan Sekitarnya** | **dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | ▪ pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane);<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat;<br>▪ dukungan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpul, dan<br>▪ dukungan pembangunan jalan tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata *Bypass* ); serta<br>▪ pengembangan terminal Tipe B |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui:<br>• penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman,<br>• penanganan permukiman kumuh;<br>• peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan SPAM Regional Mamminasata terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional;<br>• penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R;<br>• dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>• dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM. |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan;<br>▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional (PSN) dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agrarian; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya, melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, melalui |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | • pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat,<br>• peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil,<br>• pengendalian daya rusak air, dan<br>• peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui<br>• penguatan industri transportasi laut,<br>• pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut,<br>• fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,<br>• penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir,<br>• jaminan ketersediaan bahan baku,<br>• peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*;<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka hilirisasi, industrialisasi dan transformasi digital yaitu Kawasan Industri Takalar, berupa dukungan pengembangan dan peningkatan investasi. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian dan dukungan peningkatan jaringan irigasi termasuk rehabilitasi DI Kampili;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan akuatik;<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan; dan<br>▪ peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional (PSN) dalam kerangka swasembada air berupa pembangunan Bendungan Pamukkulu;<br>▪ Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)** melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penguatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui<br>• Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>• Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>• Penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah, melalui<br>▪ pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta<br>▪ penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Fasilitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Industri Takalar** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, kehutanan dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui<br>• dukungan pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut,<br>• fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,<br>• penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir,<br>• jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya;<br>• peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*; dan<br>• Dukungan pengembangan Kawasan Industri Takalar, melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan industry, fasilitasi peningkatan investasi kawasan, pengembangan kemitraan usaha dan pengembangan rantai pasok industri prioritas, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan** | | Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut melalui |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | **Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut** | | ▪ dukungan pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut;<br>▪ dukungan hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia;<br>▪ dukungan pengembangan input produksi rumput laut; serta<br>▪ dukungan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut. |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Sentra Garam** | | Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui:<br>▪ dukungan dan fasilitasi pengembangan korporasi petambak garam;<br>▪ dukungan dan fasilitasi pengembangan garam industri terintegrasi; serta dukungan penguatan sarana dan prasarana industri garam. |
| | | | | |
| **5** | **Pangkajene Kepulauan** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar dan pengembangan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM transportasi melalui:<br>▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar undara perairan (*seaplane*);<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pengembangan simpul transportasi; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ dukungan terhadap PSN dalam kerangka konektivitas dan kawasan yaitu penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan cakupan layanan, keberfungsian, kualitas infrastruktur SPALD;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM. |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya;<br>▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan;<br>▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | | **KPU - 06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS**, melalui penguatan regulasi dan lembaga pengelola, kolaborasi multi sektor, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman, penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui:<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | **KPU - 02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses**, melalui:<br>▪ pengembangan layanan unggulan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi; serta<br>▪ penyediaan dan optimalisasi sarana rumah sakit |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agrarian;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya termasuk pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep) melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage; dan<br>• diversifikasi atraksi pariwisata pada Kawasan Karst Geopark Maros-Pangkep |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;<br>▪ pengendalian daya rusak air; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, kehutanan dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui<br>• penguatan industri transportasi laut,<br>• pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut,<br>• fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,<br>• penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir,<br>• jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya;<br>• peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • Dukungan peningkatan investasi di Kawasan Industri Pangkajene dan Kepulauan. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>• peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>• pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan,<br>• pengembangan pangan hewani,<br>• fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>• pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya;<br>• penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>• peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>• fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>• dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;<br>• peningkatan produktivitas pertanaian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani**, melalui pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui:<br>▪ Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ Penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah, melalui<br>▪ pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta<br>▪ penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Failitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut melalui:<br>▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut;<br>▪ hilirisasi komoditas unggulan perikanan dan rumput laut;<br>▪ peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia; pengembangan input produksi rumput laut; dan<br>▪ pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut. |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Sentra Garam** | | Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui:<br>▪ dukungan dan fasilitasi pengembangan korporasi petambak garam;<br>▪ dukungan dan fasilitasi pengembangan garam industri terintegrasi; serta<br>▪ dukungan penguatan sarana dan prasarana industri garam. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulsel** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka** | Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kawasan Pulau Pulau Kecil Sulawesi Selatan, melalui:<br>▪ pemenuhan SPAM yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir;<br>▪ penguatan konektivitas laut;<br>▪ pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta<br>▪ penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan |
| **KAWASAN PEMBANGUNAN PAREPARE** | | | | |
| **I** | **Parepare** | **Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui:<br>▪ dukungan terhadap PSN dalam kerangka konektivitas dan kawasan berupa penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA;<br>▪ dukungan pengembangan terminal tipe A;<br>▪ dukungan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpul termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane);<br>▪ dukungan pembangunan jalan tol lintas Makassar-Parepare-Palopo; dan<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan SPAM Regional Ajatappareng yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R;<br>▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM. |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya;<br>▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan;<br>▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan serta pengembangan teknologi tradisional melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>• pemanfaatan cagar budaya prioritas; dan<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan;<br>▪ pengendalian daya rusak air; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui<br>• penguatan industri transportasi laut,<br>• pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut,<br>• fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,<br>• penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir,<br>• jaminan ketersediaan bahan baku,<br>• peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*;<br>• Dukungan pengembangan dan peningkatan investasi di Kawasan Industri Parepare;<br>• Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian dan dukungan peningkatan jaringan irigasi;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan akuatik;<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan; dan<br>▪ peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui<br>• Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>• Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>• Penguatan ekosisitem kuliner |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah melalui:<br>▪ pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*); serta<br>▪ penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |
| | | | | Failitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan;<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| **7** | **Barru** | **Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui:<br>▪ dukungan terhadap PSN dalam kerangka konektivitas dan kawasan berupa penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ dukungan pengembangan terminal tipe A dan pengembangan terminal Tipe B;<br>▪ dukungan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpul serta pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane);<br>▪ dukungan pembangunan jalan tol lintas Makassar-Parepare-Palopo;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan SPAM Regional Ajatappareng yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R;<br>▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar dan Sekitarnya yang berkelanjutan melalui:<br>▪ dukungan peningkatan layanan perkotaan yang layak huni, inlusif dan berbudaya;<br>▪ peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta dukungan pembentukan forum pengelola Wilayah Metropolitan Makasar. |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agrarian;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal,** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | pengembangan teknologi tradisional serta dan pemanfaatan cagar budaya melalui:<br>• pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>• pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>• peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan<br>• pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir;<br>▪ pengendalian daya rusak air; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Dukungan penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui:<br>▪ dukungan dan fasilitasi pengembangan industri produk olahan hasil laut; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | ▪ dukungan penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ dukungan dan fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ fasilitasi peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ dukungan peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*;<br>▪ Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ dukungan dan pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya;<br>▪ dukungan penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ dukungan peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; dan<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan produktivitas pertanaian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata;<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)** melalui dukungan peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penguatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>• Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>• Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>• Penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui:<br>▪ Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata;<br>▪ fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah, melalui<br>▪ pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta<br>• penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan |
| | | | | Fasilitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Agrowisata Gurilla, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan;<br>▪ peningkatan aksesibilitas desa;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local;<br>▪ pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local;<br>▪ fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas tata kelola desa berbasis digitalisasi dan peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan perdesaan |
| | | | | |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| 8 | **Pinrang** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah; serta<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi, dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan regional;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ peningkatan konektivitas ketenagalistrikan; dan<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui:<br>▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui dukungan:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta<br>▪ pengendalian banjir, dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan failitasi:<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah;<br>▪ Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani;<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, dan rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan; dan<br>▪ peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata;<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani**, melalui dukungan dan failitasi:<br>▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani;<br>▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta<br>▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan;<br>▪ penguatan kapasitas SDM; serta<br>▪ penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan |
| | | | | **KPU - 07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya**, melalui:<br>▪ pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian;<br>▪ pendukung peningkatan produksi pertanian;<br>▪ penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani;<br>▪ fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan;<br>▪ serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang** | Pengembangan sentra perkebunan kakao melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor;<br>▪ implementasi pertanian rendah karbon; dan<br>▪ peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung;<br>▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | | | |
| **9** | **Sidenreng Rappang** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara)** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat: serta<br>▪ pengembangan konektivitas darat terintegrasi berbasis simpul transportasi |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum (SPAM) yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi (SPALD) dengan sistem regional Ajatappareng;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui:<br>▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak;<br>▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya,<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir;<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya;<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil; dan<br>▪ pengembangan industri kecil dan menengah. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian disertai rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar;<br>▪ pengembangan koperasi; serta<br>▪ rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata;<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | | **KPU - 07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya**, melalui:<br>▪ pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani;<br>▪ fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta<br>▪ pemberian sarana pasca panen |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ Penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Transmigrasi Pitu Riase** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, melalui dukungan dan fasilitasii:<br>▪ pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik;<br>▪ pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;<br>▪ redistribusi aset (tanah) transmigrasi;<br>▪ penataan persebaran penduduk; dan<br>▪ penyediaan tenaga terampil. |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | | | |
| **10** | **Enrekang** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi; dan<br>▪ peningkatan keselamatan angkutan darat; serta<br>▪ pengembangan konektivitas darat terintegrasi berbasis simpul transportasi |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM Regional Ajatappareng yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui dukungan dan fasilitasi peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya,<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan serta<br>▪ pengembangan teknologi tradisional. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir;<br>▪ pengendalian daya rusak air; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri komoditas unggulan wilayah;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan wilayah; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani;<br>▪ stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan budidaya;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan usaha perikanan budidaya;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan budidaya;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| **KAWASAN PEMBANGUNAN PALOPO** | | | | |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| 11 | **Luwu Timur** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui:<br>▪ fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi,<br>▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi; dan<br>▪ dukungan dan fasilitasi penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan. |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum dan sanitasi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan kawasan permukiman pendukung kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako;<br>▪ pemberian bantuan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya,<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan serta<br>▪ pengembangan teknologi tradisional |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology;<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka hilirisasi, industrialisasi dan transformasi digital yaitu Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park., berupa dukungan pengembangan dan peningkatan investasi;<br>▪ Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan,<br>▪ penguatan kapasitas SDM, serta<br>▪ penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui<br>• Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>• Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>• Penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>• Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>• Penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan;<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;<br>▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Pertumbuhan-Kawasan Perkotaan Kecil** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, melalui:<br>▪ fasilitasi penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi berdasarkan karakteriktik perkotaan;;<br>▪ penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi;<br>▪ fasilitasi pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan S,elter Terintegrasi Tambang Sorowako; |
| | | **Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;<br>▪ pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih serta pengolahan persampahandan limbah);<br>▪ peningkatan investasi kawasan;<br>▪ pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; dan<br>▪ penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM |
| | | **Kawasan Pertumbuhan-** | | Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako, melalui dukungan dan fasilitasi: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | **Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako** | | ▪ penguatan tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi;<br>▪ Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen *Net Zero Emissions (NZE)* nasional; dan<br>▪ Hilirisasi industri berbasis mineral penting, terutama nikel |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Transmigrasi Mahalona** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kab. Luwu Timur, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik,<br>▪ pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta<br>▪ penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi terutama peningkatan fasilitas pelabuhan Lampia; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| | | | | |
| **12** | **Tana Toraja** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ pengembangan jaringan bandara terpadu termasuk pengembangan angkutan udara perintis penumpang yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ fasilitasi pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah; serta<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi, dan peningkatan keselamatan angkutan darat |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ dukungan dan fasilitasi pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM kabupaten yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman;<br>▪ fasilitasi pemberian bantuan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui dukungan:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan pemanfaatan cagar budaya serta pengembangan teknologi tradisional melalui:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir, dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir komoditas unggulan;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah;<br>▪ Integrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui dukungan dan fasilitasi: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani;<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai nilai produk pertanian dan perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan usaha pertanian dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan budidaya dan pertanian;<br>▪ peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata;<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui dukungan dan fasilitasi: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Pertumbuhan-Kawasan Perkotaan Kecil** | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;<br>▪ penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi berdasarkan karakteristik kawasan perkotaan;<br>▪ penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | |
| 13 | **Toraja Utara** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat melalui:<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi; |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ dukungan dan fasilitasi pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM kabupaten yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman;<br>▪ fasilitasi pemberian bantuan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | • pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak, termasuk peningkatan RS Tipe D menjadi Tipe C;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan,<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui:<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan pemanfaatan cagar budaya serta pengembangan teknologi tradisional melalui:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | ▪ penguatan tata kelola data warisan budaya,<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan serta<br>▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir, dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir komoditas unggulan;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani;<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai nilai produk pertanian dan perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan usaha pertanian dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan budidaya dan pertanian;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan** | Pengembangan sentra perkebunan kopi melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | **Perkebunan Kakao dan Kopi** | **dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | ▪ Kerjasama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional;<br>▪ implementasi pertanian rendah karbon; dan<br>▪ peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif |
| | | | | |
| **14** | **Luwu** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat;<br>▪ fasilitasi pengembangan transportasi local yang terintegrasi dengan simpul transportasi. |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | **KPU - 06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola;<br>▪ kolaborasi multi sektor;<br>▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman;<br>▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui dukungan:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya; dan<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high tecnology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan kapasitas SDM; serta<br>▪ penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalu dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan;serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan sentra perkebunan kakao melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor<br>▪ implementasi pertanian rendah karbon; dan<br>▪ peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana, pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| | | | | |
| **15** | **Luwu Utara** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat melalui:<br>▪ fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi,;<br>▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu;<br>▪ fasilitasi pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum dan sanitasi;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui dukungan:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan. |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka swasembada pangan, yaitu pembangunan bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Baliase |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani,** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani,<br>▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan<br>▪ penanggulangan penyakit ternak |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan;<br>serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, serta usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| | | | | |
| **16** | **Palopo** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat melalui:<br>▪ dukungan pengembangan terminal tipe A;<br>▪ dukungan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpul termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane); dan<br>▪ dukungan pembangunan jalan tol lintas Makassar-Parepare-Palopo;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya; dan<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high tecnology. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan;serta<br>sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat,** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | ▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| | | | | |
| **KAWASAN BULUKUMBA** | | | | |
| **17** | **Jeneponto** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat melalui:<br>▪ fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi,<br>▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat. |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya; dan<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high tecnology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani,<br>▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta<br>▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalu dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan;serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Komoditas Unggulan-Kawasan Sentra Garam** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan korporasi petambak garam;<br>▪ pengembangan garam industri terintegrasi; serta<br>▪ dukungan penguatan sarana dan prasarana industri garam. |
| | | | | |
| **18** | **Sinjai** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat melalui:<br>▪ fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat. |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum dan sanitasi;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | • peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan; dan<br>▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis rural heritage |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, serta usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| | | | | |
| **19** | **Bulukumba** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat melalui:<br>▪ fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi,<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat. |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisonal Kapal Phinisi;<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high tecnology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang** | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | ▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, serta usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | |
| **20** | **Kepulauan Selayar** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar undara perairan (*seaplane*);<br>▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandar udara terpadu;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah; serta<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pengembangan unit pelayanan bergerak dan digital;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | **KPU - 02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses**, melalui:<br>▪ pengembangan layanan unggulan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetenlsi; serta<br>▪ penyediaan dan optimalisasi sarana rumah sakit |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani,** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani,<br>▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta<br>▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulsel** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kawasan Pulau Pulau Kecil Sulawesi Selatan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan kebutuhan air minum aman dan layak melalui pembangunan SPAM terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik;<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir;<br>▪ penguatan konektivitas laut; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta<br>▪ penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan |
| | | | | |
| 21 | **Bantaeng** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar undara perairan (*seaplane*);<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi; serta<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat,** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya, melalui dukungan dan fasilitasi: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | ▪ revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisonal Kapal Phinisi;<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | | ▪ Penguatan kerukunan umat beragama;<br>▪ peningkatan ketangguhan keluarga;<br>▪ peningkatan kualitas perlindungan anak;<br>▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif;<br>▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;<br>▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;<br>▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga. |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | ▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology;<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka hilirisasi, industrialisasi dan transformasi digital yaitu Kawasan Industri Bantaeng |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | | | |
| **KAWASAN WATAMPONE** | | | | |
| **22** | **Wajo** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar undara perairan (*seaplane*);<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah; serta<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman;<br>▪ peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui: |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;<br>▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka swasembada air berupa pembangunan Bendungan Paseloreng. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya,** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian;<br>▪ penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani;<br>▪ fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan;<br>▪ penguatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola; dan<br>▪ kapasitas kelembagaan nelayan |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, serta usaha kelautan dan perikanan; dan<br>▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi; serta<br>▪ diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan |
| | | | | |
| **23** | **Bone** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar undara perairan (*seaplane*);<br>▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandar udara terpadu;<br>▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh;<br>▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pengembangan unit pelayanan bergerak dan digital;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria;<br>• eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan<br>• fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisonal Kapal Phinisi;<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional;<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut;<br>▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology. |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi,<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani,<br>▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas;<br>▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |
| | | | | **KPU - 07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya,** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian;<br>▪ penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani;<br>▪ fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen |
| | | | | **KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan;<br>▪ penguatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola; dan<br>▪ kapasitas kelembagaan nelayan |
| | | | | **KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani,** melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani,<br>▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta<br>▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktifitas lahan pertanian;<br>▪ peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan;<br>▪ peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan;<br>▪ pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;<br>▪ modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta<br>▪ pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |
| | | **Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya** | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian;<br>▪ modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia;<br>▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pertanian;<br>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;<br>▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan,<br>▪ penguatan dan tata kelola perikanan budidaya;<br>▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;<br>▪ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;<br>▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, serta usaha kelautan dan perikanan; dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |
| | | **Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK** | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar;<br>▪ peningkatan konektivitas dan layanan transportasi terutama pengembangan bandar udara Arung Palakka; serta<br>▪ diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan dan perluasan pemanfaatan biofuel terutama pengembangan bioetanol |
| | | | | |
| **24** | **Soppeng** | | **7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan** | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah;<br>▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi;<br>▪ peningkatan keselamatan angkutan darat;<br>▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi;<br>▪ pengembangan konektivitas darat terintegrasi berbasis simpul transportasi |
| | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;<br>▪ penanganan permukiman kumuh; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten;<br>▪ pemenuhan kebutuhan air baku;<br>▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;<br>▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU;<br>▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;<br>▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan;<br>▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | **1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi** | Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui<br>• pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan layanan kesehatan bergerak;<br>• peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan;<br>• peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta<br>• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. |
| | | | | Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui:<br>• penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria; |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies;,<br>• penguatan intervensi spesifk stunting;<br>• peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan;<br>• peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana;<br>• pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa;<br>• pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular;<br>• pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik;<br>• penyehatan lingkungan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui<br>• pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi,<br>• penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis,<br>• penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | • fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. |
| | | | **5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan** | Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui<br>• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek,<br>• dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran;<br>• integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;<br>• penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien;<br>• penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan<br>• dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | | | Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui<br>▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah;<br>▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik,<br>▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah;<br>▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria;<br>▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local |
| | | | **2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal** | Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional,<br>▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;<br>▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local;<br>▪ penguatan tata kelola data warisan budaya;<br>▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan |
| | | | **8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi** | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui:<br>▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;<br>▪ peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan;<br>▪ pengendalian daya rusak air; dan<br>▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |
| | | | | Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui:<br>▪ pengelolaan keanekaragaman hayati;<br>▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan;<br>▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup;<br>▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi;<br>▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah;<br>▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor;<br>▪ penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | **3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru** | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri komoditas unggulan wilayah;<br>▪ jaminan ketersediaan bahan baku;<br>▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan wilayah; dan<br>▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi;<br>▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan;<br>▪ pengembangan pangan hewani;<br>▪ stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya;<br>▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan budidaya;<br>▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan usaha perikanan budidaya;<br>▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan budidaya;<br>▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas |
| | | | | Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui:<br>• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;<br>• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata<br>• pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan<br>• pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 |
| | | | **4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing** | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi:<br>▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif;<br>▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik;<br>▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya;<br>▪ penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan<br>▪ penguatan ekosisitem kuliner |
| | | | **6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital** | Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui:<br>▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital;<br>▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;<br>▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta<br>▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah |
| | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui:<br>▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public;<br>▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta<br>▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| | | | | Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah |

*SUMBER: RPJMN 2025-2029_Lampiran I dan Lampiran IV dan RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041*

# BAB IV

# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1. Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari gubernur dan wakil gubernur terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan.

Pada RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat 165 program perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahuh kedepan. Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel 4.1 yang sudah memuat target/asumsi program hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

**Tabel V.1**
**PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 3.559.519.571.176,57 | | 3.505.172.549.402,00 | | 3.585.269.501.719,00 | | 3.709.377.832.342,00 | | 3.738.502.931.052,00 | | 3.765.882.838.862,00 | | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 2.598.737.478.959,57 | | 2.581.029.984.899,00 | | 2.663.184.228.085,00 | | 2.703.301.494.318,00 | | 2.732.746.187.236,00 | | 2.767.963.040.046,00 | | |
| Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 2.598.737.478.959,57 | 100 | 2.581.029.984.899,00 | 100 | 2.663.184.228.085,00 | 100 | 2.703.301.494.318,00 | 100 | 2.732.746.187.236,00 | 100 | 2.767.963.040.046,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 960.782.092.217,00 | | 918.555.300.963,00 | | 916.498.010.094,00 | | 1.005.626.338.024,00 | | 1.005.306.743.816,00 | | 997.469.798.816,00 | | |
| Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus | Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK, dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Minimal B (%) | 78,28 | 78,28 | 960.782.092.217,00 | 78,78 | 918.555.300.963,00 | 79,28 | 916.498.010.094,00 | 79,78 | 1.005.626.338.024,00 | 80,28 | 1.005.306.743.816,00 | 80,78 | 997.469.798.816,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas (PHTC); Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah,Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karies profesional. |
| Meningkatnya layanan inklusif pada satuan pendidikan SMA/SMK | Persentase satuan pendidikan SMA/SMK yang menyediakan layanan inklusif (%) | 16,15 | 17,15 | | 18,15 | | 19,15 | | 20,15 | | 21,15 | | 21,15 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | - | | 3.550.000.000,00 | | 3.550.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Seluruh Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB | Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Seluruh Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB (%) | 100 | 100 | - | 100 | 3.550.000.000,00 | 100 | 3.550.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | - | | 612.263.540,00 | | 612.263.540,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Guru sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan menengah | Persentase guru tersertifikasi pada satuan pendidikan menengah (%) | 0 | 54,58 | - | 55,33 | 612.263.540,00 | 56,08 | 612.263.540,00 | 56,83 | 50.000.000,00 | 57,58 | 50.000.000,00 | 58,33 | 50.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| | Rasio Guru terhadap siswa pada satuan pendidikan menengah (Rasio) | 1:13 | 1:13 | | 1:13 | | 1:13 | | 1:13 | | 1:13 | | 1:13 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | - | | 1.275.000.000,00 | | 1.275.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat | Persentase satuan pendidikan yang memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (%) | 94 | 96 | - | 96 | 1.275.000.000,00 | 97 | 1.275.000.000,00 | 97 | 50.000.000,00 | 98 | 50.000.000,00 | 98 | 50.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |
| 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | - | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Meningkatnya penerapan Bahasa dan Sastra pada satuan pendidikan | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Diterapkan pada Satuan Pendidikan (%) | 75 | 75 | - | 75 | 150.000.000,00 | 75 | 150.000.000,00 | 75 | 50.000.000,00 | 75 | 50.000.000,00 | 75 | 50.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan | |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 1.096.758.630.111,20 | | 1.050.611.953.891,00 | | 1.145.450.680.222,00 | | 1.303.592.402.438,00 | | 1.361.395.083.101,00 | | 1.369.713.698.538,00 | | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 762.583.501.599,20 | | 602.974.621.814,00 | | 697.813.348.145,00 | | 830.266.495.761,00 | | 920.352.319.324,00 | | 959.188.392.011,00 | | |
| Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk menunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 762.583.501.599,20 | 100 | 602.974.621.814,00 | 100 | 697.813.348.145,00 | 100 | 830.266.495.761,00 | 100 | 920.352.319.324,00 | 100 | 959.188.392.011,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 332.567.920.126,00 | | 442.544.572.677,00 | | 442.544.572.677,00 | | 465.911.972.977,00 | | 433.490.436.677,00 | | 402.826.746.727,00 | | |
| Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Capaian Upaya Kesehatan Masyarakat yang memenuhi Target (%) | 40,41 | 60 | 332.567.920.126,00 | 65 | 442.544.572.677,00 | 70 | 442.544.572.677,00 | 75 | 465.911.972.977,00 | 80 | 433.490.436.677,00 | 85 | 402.826.746.727,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | Penurunan Kematian Ibu dan anak, Pencegahan dan penurunan stunting, Penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan gratis, |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna (%) | 49,87 | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | Penuntasan TBC, Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis, Investasi pelayanan Kesehatan primer, Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses. |
| | Persentase Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Kelompok Sasaran (%) | 91 | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 1.181.740.386,00 | | 2.092.759.400,00 | | 2.092.759.400,00 | | 2.283.933.700,00 | | 2.362.327.100,00 | | 2.448.559.800,00 | | |
| Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan SDM Kesehatan sesuai standar minimal (%) | 86 | 86 | 1.181.740.386,00 | 89 | 2.092.759.400,00 | 92 | 2.092.759.400,00 | 95 | 2.283.933.700,00 | 98 | 2.362.327.100,00 | 100 | 2.448.559.800,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | Pencegahan dan penurunan stunting, Investasi pelayanan Kesehatan primer, Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan. |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | - | | 0 | | 0 | | 730.000.000,00 | | 790.000.000,00 | | 850.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar | Persentase Sediaan Farmasi, Alkes, Makanan dan Minuman sesuai standar (%) | 83 | 85 | - | 87 | 0 | 90 | 0 | 93 | 730.000.000,00 | 95 | 790.000.000,00 | 100 | 850.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | 425.468.000,00 | | 3.000.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | | 4.400.000.000,00 | | 4.400.000.000,00 | | 4.400.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat) (%) | 79,2 | 81 | 425.468.000,00 | 83 | 3.000.000.000,00 | 85 | 3.000.000.000,00 | 87 | 4.400.000.000,00 | 89 | 4.400.000.000,00 | 92 | 4.400.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 1.053.518.348.746,15 | | 2.024.684.181.842,00 | | 2.048.938.153.696,00 | | 2.071.506.653.493,00 | | 2.200.047.359.750,00 | | 2.393.050.445.619,00 | | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 122.578.448.103,15 | | 105.540.384.769,00 | | 129.925.066.576,00 | | 136.583.188.233,00 | | 138.734.596.174,00 | | 141.489.557.387,00 | | |
| Terpenuhinya Layanan penunjang perangkat daerah yang mendukung tugas dan fungsi | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 57.532.300.387,15 | 100 | 56.562.550.689,00 | 100 | 59.221.458.228,00 | 100 | 64.148.778.821,00 | 100 | 65.204.438.944,00 | 100 | 66.541.664.239,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 65.046.147.716,00 | 100 | 48.977.834.080,00 | 100 | 70.703.608.348,00 | 100 | 72.434.409.412,00 | 100 | 73.530.157.230,00 | 100 | 74.947.893.148,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 161.513.410.623,00 | | 437.980.289.098,00 | | 437.980.289.098,00 | | 357.000.000.000,00 | | 402.000.000.000,00 | | 422.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya cakupan layanan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi Teknis yang tertangani Kewenangan Provinsi (%) | 54 | 55 | 161.513.410.623,00 | 57 | 437.980.289.098,00 | 59 | 437.980.289.098,00 | 61 | 357.000.000.000,00 | 63 | 402.000.000.000,00 | 65 | 422.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | 80.540.880.800,00 | | 51.000.000.000,00 | | 51.000.000.000,00 | | 100.000.000.000,00 | | 100.000.000.000,00 | | 100.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan | Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 34,88 | 45 | 80.540.880.800,00 | 45 | 51.000.000.000,00 | 50 | 51.000.000.000,00 | 50 | 100.000.000.000,00 | 53,61 | 100.000.000.000,00 | 55 | 100.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir. |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | 44.142.800,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | |
| Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan sampah secara terpadu (%) | 3 | 3 | 44.142.800,00 | 4 | 20.000.000,00 | 4 | 20.000.000,00 | 8 | 60.000.000,00 | 8 | 60.000.000,00 | 8 | 60.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | 59.587.200,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 10,88 | 11,03 | 59.587.200,00 | 12,8 | 20.000.000,00 | 12,9 | 20.000.000,00 | 13,08 | 60.000.000,00 | 13,17 | 60.000.000,00 | 13,26 | 60.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | 13.672.088.557,00 | | 119.155.489.000,00 | | 119.024.779.000,00 | | 140.000.000.000,00 | | 85.000.000.000,00 | | 75.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata | Persentase penataan bangunan gedung kewenangan Provinsi (%) | 75 | 100 | 13.672.088.557,00 | 85 | 119.155.489.000,00 | 87 | 119.024.779.000,00 | 90 | 140.000.000.000,00 | 100 | 85.000.000.000,00 | 100 | 75.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | 35.096.868.221,00 | | 69.348.709.520,00 | | 69.348.709.520,00 | | 51.500.000.000,00 | | 150.000.000.000,00 | | 150.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya | Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi (%) | 68 | 71 | 35.096.868.221,00 | 79 | 69.348.709.520,00 | 79 | 69.348.709.520,00 | 86 | 51.500.000.000,00 | 86 | 150.000.000.000,00 | 100 | 150.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | 638.389.057.892,00 | | 1.240.448.916.405,00 | | 1.240.448.916.402,00 | | 1.283.833.072.160,00 | | 1.321.722.370.476,00 | | 1.501.970.495.132,00 | | |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan provinsi untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah | Persentase penanganan jalan kewenangan Provinsi (%) | 100 | 81,26 | 638.389.057.892,00 | 89,48 | 1.240.448.916.405,00 | 86,74 | 1.240.448.916.402,00 | 87,94 | 1.283.833.072.160,00 | 92,66 | 1.321.722.370.476,00 | 95,23 | 1.501.970.495.132,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | 495.825.100,00 | | 670.393.050,00 | | 670.393.100,00 | | 670.393.100,00 | | 670.393.100,00 | | 670.393.100,00 | | |
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi | Persentase Kegiatan Konstruksi yang terlaksana sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan (%) | 100 | 100 | 495.825.100,00 | 100 | 670.393.050,00 | 100 | 670.393.100,00 | 100 | 670.393.100,00 | 100 | 670.393.100,00 | 100 | 670.393.100,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | 1.128.039.450,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 1.800.000.000,00 | | 1.800.000.000,00 | | 1.800.000.000,00 | | |
| Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (%) | 55 | 70 | 1.128.039.450,00 | 60 | 500.000.000,00 | 65 | 500.000.000,00 | 70 | 1.800.000.000,00 | 78 | 1.800.000.000,00 | 90 | 1.800.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 52.867.175.166,00 | | 39.091.034.780,00 | | 40.088.326.610,00 | | 38.969.348.282,00 | | 40.310.023.925,00 | | 41.118.048.128,00 | | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 16.930.641.370,00 | | 14.845.564.284,00 | | 15.842.856.114,00 | | 19.445.348.282,00 | | 19.841.023.925,00 | | 20.344.048.128,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 16.930.641.370,00 | 100 | 14.845.564.284,00 | 100 | 15.842.856.114,00 | 100 | 19.445.348.282,00 | 100 | 19.841.023.925,00 | 100 | 20.344.048.128,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 1.508.542.950,00 | | 1.501.283.250,00 | | 1.501.283.250,00 | | 3.027.000.000,00 | | 3.117.000.000,00 | | 3.314.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya jumlah rumah layak huni | Persentase Peningkatan rumah korban bencana skala provinsi yang tertangani (%) | 11,63 | 16 | 1.508.542.950,00 | 21,21 | 1.501.283.250,00 | 25 | 1.501.283.250,00 | 15 | 3.027.000.000,00 | 4,35 | 3.117.000.000,00 | 4,17 | 3.314.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 25.058.668.100,00 | | 10.437.078.300,00 | | 10.437.078.300,00 | | 5.097.000.000,00 | | 5.877.000.000,00 | | 5.910.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kawasan kumuh yang tertangani | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Tertangani (%) | 0 | 2,6 | 25.058.668.100,00 | 5,79 | 10.437.078.300,00 | 11,59 | 10.437.078.300,00 | 17,38 | 5.097.000.000,00 | 23,18 | 5.877.000.000,00 | 28,97 | 5.910.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU. |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | 9.318.134.646,00 | | 12.307.108.946,00 | | 12.307.108.946,00 | | 10.675.000.000,00 | | 10.675.000.000,00 | | 10.675.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan | Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Permendagri 18/2020) (%) | 48,25 | 48,57 | 9.318.134.646,00 | 48,49 | 12.307.108.946,00 | 48,61 | 12.307.108.946,00 | 48,73 | 10.675.000.000,00 | 48,85 | 10.675.000.000,00 | 48,97 | 10.675.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU. |
| 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 51.188.100,00 | | 0 | | 0 | | 725.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 875.000.000,00 | | |
| Meningkatnya jumlah permukiman tertata | Persentase Pengembang Perumahan dengan Tingkat Kualifikasi Menengah yang Tersertifikasi dan Teregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%) | 21,55 | 28,02 | 51.188.100,00 | 34,48 | 0 | 40,95 | 0 | 47,41 | 725.000.000,00 | 53,88 | 800.000.000,00 | 60,34 | 875.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 55.776.123.038,00 | | 55.438.228.352,00 | | 59.254.154.536,00 | | 72.774.397.958,00 | | 73.886.932.756,00 | | 75.443.929.683,00 | | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 53.241.002.938,00 | | 49.950.898.852,00 | | 53.766.825.036,00 | | 68.469.107.258,00 | | 69.581.642.056,00 | | 71.138.638.983,00 | | |
| Terpenuhinya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 45.017.994.616,00 | 100 | 42.108.940.646,00 | 100 | 44.637.956.176,00 | 100 | 58.633.480.634,00 | 100 | 59.563.009.218,00 | 100 | 60.883.771.041,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah (BPBD) | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 8.223.008.322,00 | 100 | 7.841.958.206,00 | 100 | 9.128.868.860,00 | 100 | 9.835.626.624,00 | 100 | 10.018.632.838,00 | 100 | 10.254.867.942,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 1.823.814.900,00 | | 2.801.261.900,00 | | 2.801.261.900,00 | | 1.594.980.700,00 | | 1.594.980.700,00 | | 1.594.980.700,00 | | |
| Layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM) | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (%) | 100 | 100 | 1.823.814.900,00 | 100 | 2.801.261.900,00 | 100 | 2.801.261.900,00 | 100 | 1.594.980.700,00 | 100 | 1.594.980.700,00 | 100 | 1.594.980.700,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | 703.620.000,00 | | 2.685.766.600,00 | | 2.685.766.600,00 | | 2.700.310.000,00 | | 2.700.310.000,00 | | 2.700.310.000,00 | | |
| Meningkatnya pelayanan urusan kebencanan | Persentase urusan kebencanaan yang tertangani (%) | 100 | 100 | 703.620.000,00 | 100 | 2.685.766.600,00 | 100 | 2.685.766.600,00 | 100 | 2.700.310.000,00 | 100 | 2.700.310.000,00 | 100 | 2.700.310.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | 7.685.200,00 | | 301.000,00 | | 301.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi | Cakupan Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi (%) | 100 | 100 | 7.685.200,00 | 100 | 301.000,00 | 100 | 301.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 51.929.579.712,00 | | 66.781.737.167,00 | | 70.129.482.987,00 | | 89.314.945.966,00 | | 90.665.548.071,00 | | 92.315.132.277,00 | | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 43.408.888.493,00 | | 39.510.642.692,00 | | 42.858.388.512,00 | | 48.667.945.966,00 | | 50.018.548.071,00 | | 51.668.132.277,00 | | |
| Terpenuhinya Layanan Penunjang Perangkat Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 43.408.888.493,00 | 100 | 39.510.642.692,00 | 100 | 42.858.388.512,00 | 100 | 48.667.945.966,00 | 100 | 50.018.548.071,00 | 100 | 51.668.132.277,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | 221.867.100,00 | | 206.406.000,00 | | 206.406.000,00 | | 2.300.000.000,00 | | 2.300.000.000,00 | | 2.300.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas (%) | 100 | 5,37 | 221.867.100,00 | 6,43 | 206.406.000,00 | 6,43 | 206.406.000,00 | 31,35 | 2.300.000.000,00 | 31,35 | 2.300.000.000,00 | 31,35 | 2.300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |
| 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | 65.937.000,00 | | 0 | | 0 | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | |
| Tertanganinya Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel yang menjadi korban tindak kekerasan | Persentase penanganan Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel yang menjadi korban tindak kekerasan (%) | 100 | 100 | 65.937.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12.000.000,00 | 100 | 12.000.000,00 | 100 | 12.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 3.474.344.819,00 | | 3.670.508.099,00 | | 3.670.508.099,00 | | 5.300.000.000,00 | | 5.300.000.000,00 | | 5.300.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di dalam panti kewenangan provinsi | Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, tuna sosial serta PMKS lainnya yang dilayani didalam panti kewenangan provinsi (%) | 100 | 5,5 | 3.474.344.819,00 | 14,73 | 3.670.508.099,00 | 14,73 | 3.670.508.099,00 | 19,52 | 5.300.000.000,00 | 19,52 | 5.300.000.000,00 | 19,52 | 5.300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | 2.858.815.200,00 | | 21.505.653.276,00 | | 21.505.653.276,00 | | 30.400.000.000,00 | | 30.400.000.000,00 | | 30.400.000.000,00 | | |
| Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan | Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%) | 100 | 0,03 | 2.858.815.200,00 | 7,66 | 21.505.653.276,00 | 7,66 | 21.505.653.276,00 | 11,48 | 30.400.000.000,00 | 11,48 | 30.400.000.000,00 | 11,48 | 30.400.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | 1.899.727.100,00 | | 1.888.527.100,00 | | 1.888.527.100,00 | | 2.600.000.000,00 | | 2.600.000.000,00 | | 2.600.000.000,00 | | |
| Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial | Persentase korban bencana alam dan sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi (%) | 100 | 100 | 1.899.727.100,00 | 100 | 1.888.527.100,00 | 100 | 1.888.527.100,00 | 100 | 2.600.000.000,00 | 100 | 2.600.000.000,00 | 100 | 2.600.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | - | | 0 | | 0 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | |
| Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Persentase TMPN yang terkelola dengan baik (%) | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.000.000,00 | 100 | 35.000.000,00 | 100 | 35.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial | |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 30.232.674.281,00 | | 25.490.174.534,00 | | 27.961.894.731,00 | | 31.044.735.444,00 | | 32.059.071.561,00 | | 33.251.614.378,00 | | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 29.319.125.331,00 | | 24.615.633.834,00 | | 27.087.354.031,00 | | 29.834.735.444,00 | | 30.849.071.561,00 | | 32.041.614.378,00 | | |
| Layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 29.319.125.331,00 | 100 | 24.615.633.834,00 | 100 | 27.087.354.031,00 | 100 | 29.834.735.444,00 | 100 | 30.849.071.561,00 | 100 | 32.041.614.378,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | 19.600.000,00 | | 7.354.620,00 | | 7.354.620,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | |
| Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam mengelola tenaga kerja di tingkat perusahaan dan tingkat daerah | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) | 45,83 | 75 | 19.600.000,00 | 87 | 7.354.620,00 | 89 | 7.354.620,00 | 90 | 20.000.000,00 | 92 | 20.000.000,00 | 94 | 20.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | 113.696.550,00 | | 141.490.000,00 | | 141.490.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Meningkatnya produktivitas dan keterampilan/kompetensi tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih mendapatkan pekerjaan (%) | 63,5 | 65 | 113.696.550,00 | 66 | 141.490.000,00 | 67 | 141.490.000,00 | 68 | 250.000.000,00 | 69 | 250.000.000,00 | 70 | 250.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| | Persentase produktivitas tenaga kerja yang dilatih (metode kerja, pengelolaan keuangan, penataan tempat kerja) | | 80 | | 82 | | 84 | | 86 | | 88 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | 437.632.400,00 | | 448.044.080,00 | | 448.044.080,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pelayanan Penempatan tenaga kerja | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Dalam dan Luar Negeri (%) | 71,9 | 72 | 437.632.400,00 | 73 | 448.044.080,00 | 74 | 448.044.080,00 | 75 | 500.000.000,00 | 76 | 500.000.000,00 | 77 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | 175.800.000,00 | | 144.152.000,00 | | 144.152.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | |
| Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam rangka terwujud kelangsungan berusaha dan bekerja | Persentase Perusahaan yang menerapkan Sarana Hubungan Industrial (%) | 9,71 | 9,71 | 175.800.000,00 | 9,76 | 144.152.000,00 | 9,81 | 144.152.000,00 | 9,86 | 200.000.000,00 | 9,91 | 200.000.000,00 | 10 | 200.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |
| 2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | 166.820.000,00 | | 133.500.000,00 | | 133.500.000,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum ketenagakerjaan di perusahaan | Persentase Kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan (%) | 7,22 | 7,3 | 166.820.000,00 | 7,3 | 133.500.000,00 | 7,36 | 133.500.000,00 | 7,36 | 240.000.000,00 | 7,4 | 240.000.000,00 | 7,46 | 240.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja | |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 11.795.345.552,00 | | 10.993.208.963,00 | | 11.724.401.539,00 | | 13.707.880.975,00 | | 14.003.756.918,00 | | 14.364.052.685,00 | | |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 10.756.638.808,00 | | 9.202.224.963,00 | | 9.933.417.539,00 | | 11.757.880.975,00 | | 12.053.756.918,00 | | 12.414.052.685,00 | | |
| Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | - | 95 | 10.756.638.808,00 | 96 | 9.202.224.963,00 | 97 | 9.933.417.539,00 | 98 | 11.757.880.975,00 | 99 | 12.053.756.918,00 | 100 | 12.414.052.685,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | - | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender di Tingkat Pemerintah Provinsi (%) | 37 | 38 | - | 39 | 500.000.000,00 | 40 | 500.000.000,00 | 41 | 500.000.000,00 | 42 | 500.000.000,00 | 43 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarisasi (%) | 7,3 | 12,04 | | 17,07 | | 21,95 | | 24,39 | | 26,83 | | 26,83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | 570.146.666,00 | | 465.984.000,00 | | 465.984.000,00 | | 550.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 90 | 90 | 570.146.666,00 | 90 | 465.984.000,00 | 95 | 465.984.000,00 | 95 | 550.000.000,00 | 95 | 550.000.000,00 | 95 | 550.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | 295.272.078,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Terstandarisasi (%) | 50 | 54,16 | 295.272.078,00 | 62,5 | 300.000.000,00 | 70,83 | 300.000.000,00 | 79,17 | 300.000.000,00 | 87,5 | 300.000.000,00 | 87,5 | 300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data dan Informasi Gender | Persentase Data dan Informasi Gender yang Terupdate di Tingkat Provinsi (%) | 0 | 49 | - | 53 | 25.000.000,00 | 60,2 | 25.000.000,00 | 66 | 100.000.000,00 | 72,82 | 100.000.000,00 | 72,82 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | 104.272.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pemenuhan hak anak secara Komprehensif | Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (%) | 91,67 | 100 | 104.272.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | 69.016.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Perlakuan Salah Lainnya | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 90 | 90 | 69.016.000,00 | 91 | 200.000.000,00 | 92 | 200.000.000,00 | 93 | 200.000.000,00 | 94 | 200.000.000,00 | 95 | 200.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 28.876.027.665,00 | | 17.034.780.679,00 | | 18.258.971.796,00 | | 23.455.518.119,00 | | 24.589.091.297,00 | | 25.198.070.643,00 | | |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 19.036.195.413,00 | | 15.737.036.129,00 | | 16.961.227.246,00 | | 19.905.518.119,00 | | 20.409.091.297,00 | | 21.018.070.643,00 | | |
| Terpenuhinya layanan perangkat daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 90 | 19.036.195.413,00 | 90 | 15.737.036.129,00 | 90 | 16.961.227.246,00 | 90 | 19.905.518.119,00 | 90 | 20.409.091.297,00 | 90 | 21.018.070.643,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan | |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | | - | | 59.111.750,00 | | 59.111.750,00 | | 1.365.000.000,00 | | 1.995.000.000,00 | | 1.995.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan pendukung kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase peningkatan sarana dan prasarana ketersediaan pangan (%) | 0 | 0 | - | 0,78 | 59.111.750,00 | 0,79 | 59.111.750,00 | 2,33 | 1.365.000.000,00 | 3,31 | 1.995.000.000,00 | 3,42 | 1.995.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan | |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 3.661.908.828,00 | | 1.080.982.600,00 | | 1.080.982.600,00 | | 2.000.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman | Tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKG 2.400 Kkal per kapita per hari (Kkal/Kapita/Hari) | 3.835 | 4.129 | 3.661.908.828,00 | 4.275 | 1.080.982.600,00 | 4.554 | 1.080.982.600,00 | 4.633 | 2.000.000.000,00 | 4.725 | 2.000.000.000,00 | 4.731 | 2.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan | |
| | Tingkat Ketersediaan Protein energi berdasarkan AKG 63 gram per kapita per hari (Gram/Kapita/Hari) | 128 | 132 | | 135 | | 139 | | 142 | | 146 | | 150 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan | |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 6.108.340.224,00 | | 102.061.000,00 | | 102.061.000,00 | | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 | | |
| Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi | Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi (%) | 98,71 | 95,18 | 6.108.340.224,00 | 95,82 | 102.061.000,00 | 96,46 | 102.061.000,00 | 97,11 | 110.000.000,00 | 97,75 | 110.000.000,00 | 97,75 | 110.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan | |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 69.583.200,00 | | 55.589.200,00 | | 55.589.200,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) | 100 | 100 | 69.583.200,00 | 100 | 55.589.200,00 | 100 | 55.589.200,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan | |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | 54.480.215.808,50 | | 14.730.883.000,00 | | 14.730.883.000,00 | | 30.622.000.000,00 | | 667.000.000,00 | | 716.000.000,00 | | |
| 2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | 54.300.636.958,50 | | 14.689.539.200,00 | | 14.689.539.200,00 | | 30.196.000.000,00 | | 215.000.000,00 | | 237.000.000,00 | | |
| Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%) | 100 | 100 | 54.300.636.958,50 | 100 | 14.689.539.200,00 | 100 | 14.689.539.200,00 | 100 | 30.196.000.000,00 | 100 | 215.000.000,00 | 100 | 237.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | 17.935.450,00 | | 0 | | 0 | | - | | - | | - | | |
| Meningkatnya layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reforma Agraria | Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 17.935.450,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | - | | 41.343.800,00 | | 41.343.800,00 | | 120.000.000,00 | | 130.000.000,00 | | 140.000.000,00 | | |
| Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi | Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi dan Ganti Rugi (Angka) | 0 | 0 | - | 1 | 41.343.800,00 | 1 | 41.343.800,00 | 1 | 120.000.000,00 | 1 | 130.000.000,00 | 1 | 140.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan | |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | 161.643.400,00 | | 0 | | 0 | | 76.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 84.000.000,00 | | |
| Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | 100 | 100 | 161.643.400,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 76.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 84.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan | |
| 2.10.14 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN | | | | - | | | | | | 115.000.000,00 | | 121.000.000,00 | | 127.500.000,00 | | |
| Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi | Persentase aparat kelembagaan pertanahan yang dibina (%) | 0 | 0 | - | 0 | | 100 | | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 121.000.000,00 | 100 | 127.500.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan | |
| 2.10.17 - PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | | | | - | | | | | | 115.000.000,00 | | 121.000.000,00 | | 127.500.000,00 | | |
| Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi | Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%) | 5 | 100 | - | 100 | | 100 | | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 121.000.000,00 | 100 | 127.500.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan | |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 149.732.566.012,00 | | 133.007.813.149,00 | | 158.572.778.251,00 | | 164.451.459.600,00 | | 198.688.198.285,00 | | 203.652.345.679,00 | | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 149.574.651.962,00 | | 132.609.899.099,00 | | 158.174.864.201,00 | | 164.010.128.950,00 | | 168.271.867.635,00 | | 173.482.345.679,00 | | |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis perangkat daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 149.574.651.962,00 | 100 | 132.609.899.099,00 | 100 | 158.174.864.201,00 | 100 | 164.010.128.950,00 | 100 | 168.271.867.635,00 | 100 | 173.482.345.679,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Pemenuhan dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup (%) | 53 | 0 | - | 24,24 | 25.000.000,00 | 24,24 | 25.000.000,00 | 24,24 | 10.000.000,00 | 27,27 | 10.000.000,00 | 30,3 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 125.811.550,00 | | 225.811.550,00 | | 225.811.550,00 | | 246.330.650,00 | | 246.330.650,00 | | 0 | | |
| Menurunnya pencemaran lingkungan hidup | Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan pada media air, udara dan air laut (%) | 0 | 70,12 | 125.811.550,00 | 70,5 | 225.811.550,00 | 71,1 | 225.811.550,00 | 71,55 | 246.330.650,00 | 72,13 | 246.330.650,00 | 0 | 0 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | Peningkatan pengelolaan kualitas air Sungai dan danau. |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 32.102.500,00 | | 32.102.500,00 | | 32.102.500,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Terpeliharanya keanekaragamana hayari flora endemik sulawesi selatan | Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi) (%) | 0 | 68,75 | 32.102.500,00 | 68,75 | 32.102.500,00 | 75 | 32.102.500,00 | 83,33 | 100.000.000,00 | 91,67 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan | Persentase Limbah B3 Terkelola Lanjut (%) | 78 | 0 | - | 58,25 | 10.000.000,00 | 59,25 | 10.000.000,00 | 60,25 | 10.000.000,00 | 61,25 | 10.000.000,00 | 61,25 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan lingkungan hidup | Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH (%) | 28 | 0 | - | 32 | 25.000.000,00 | 32 | 25.000.000,00 | 34 | 10.000.000,00 | 36 | 10.000.000,00 | 38 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya perlindungan hak MHA dan pelestarian kearifan lokal MHA dalam pengelolaan lingkungan | Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%) | 5 | 0 | - | 20 | 10.000.000,00 | 20 | 10.000.000,00 | 20 | 10.000.000,00 | 20 | 10.000.000,00 | 20 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Peningkatan penggerak peduli lingkungan | Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam peduli lingkungan hidup (%) | 49 | 0 | - | 17,6 | 10.000.000,00 | 18,9 | 10.000.000,00 | 20,3 | 10.000.000,00 | 21,6 | 10.000.000,00 | 21,6 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Memperkuat hubungan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan | Cakupan penghargaan lingkungan hidup (%) | 49 | 0 | - | 12 | 10.000.000,00 | 16 | 10.000.000,00 | 20 | 10.000.000,00 | 24 | 10.000.000,00 | 28 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Penanganan pengaduan lingkunan hidup | Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) | 60 | 0 | - | 100 | 25.000.000,00 | 100 | 25.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 30.000.000.000,00 | | 30.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pengelolaan persampahan | Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah (%) | 0 | 0 | - | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 25.000.000,00 | 8 | 30.000.000.000,00 | 8 | 30.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| | Persentase timbulan sampah yang terkelola (%) | 0 | 0 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup | |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 10.049.764.871,59 | | 9.073.021.491,00 | | 9.789.330.435,00 | | 15.924.591.056,00 | | 11.244.679.809,00 | | 11.626.332.742,00 | | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 9.619.998.871,59 | | 8.248.359.894,00 | | 8.964.668.838,00 | | 10.428.005.396,00 | | 10.714.764.866,00 | | 11.062.172.052,00 | | |
| Terpenuhinya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 9.619.998.871,59 | 100 | 8.248.359.894,00 | 100 | 8.964.668.838,00 | 100 | 10.428.005.396,00 | 100 | 10.714.764.866,00 | 100 | 11.062.172.052,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | 361.110.200,00 | | 361.110.200,00 | | 361.110.200,00 | | 366.585.660,00 | | 384.914.943,00 | | 404.160.690,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (%) | 60,75 | 61 | 361.110.200,00 | 62 | 361.110.200,00 | 63 | 361.110.200,00 | 64 | 366.585.660,00 | 65 | 384.914.943,00 | 66 | 404.160.690,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | 18.070.600,00 | | 18.070.600,00 | | 18.070.600,00 | | 40.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil Skala Provinsi (%) | 70,85 | 71 | 18.070.600,00 | 72 | 18.070.600,00 | 73 | 18.070.600,00 | 74 | 40.000.000,00 | 75 | 50.000.000,00 | 76 | 60.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 19.715.200,00 | | 414.610.797,00 | | 414.610.797,00 | | 5.040.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data administrasi Kependudukan Skala Provinsi | Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi (%) | 100 | 100 | 19.715.200,00 | 100 | 414.610.797,00 | 100 | 414.610.797,00 | 100 | 5.040.000.000,00 | 100 | 45.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | 30.870.000,00 | | 30.870.000,00 | | 30.870.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas penyajian Profil Kependudukan | Persentase Pengolahan Data Administrasi Kependudukan (%) | 100 | 100 | 30.870.000,00 | 100 | 30.870.000,00 | 100 | 30.870.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 26.683.468.715,00 | | 31.044.572.098,00 | | 32.105.335.073,00 | | 59.936.765.956,00 | | 60.371.317.060,00 | | 60.893.357.053,00 | | |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 14.930.345.958,00 | | 12.863.912.975,00 | | 13.924.675.950,00 | | 15.984.765.956,00 | | 16.419.317.060,00 | | 16.941.357.053,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 0 | 100 | 14.930.345.958,00 | 100 | 12.863.912.975,00 | 100 | 13.924.675.950,00 | 100 | 15.984.765.956,00 | 100 | 16.419.317.060,00 | 100 | 16.941.357.053,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA | | | | 805.800,00 | | 805.800,00 | | 805.800,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Peningkatan Kinerja pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Memiliki Peraturan Desa tentang Penataan Kelembagaan Desa dan Desa Adat (%) | 0 | 2,64 | 805.800,00 | 2,64 | 805.800,00 | 5,29 | 805.800,00 | 7,94 | 10.000.000,00 | 10,59 | 10.000.000,00 | 10,59 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | 1.611.600,00 | | 1.611.600,00 | | 1.611.600,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | |
| Peningkatan kerjasama Desa | Persentase Desa yang Melaksanakan Kerja Sama (%) | 0,44 | 1,19 | 1.611.600,00 | 1,63 | 1.611.600,00 | 2,07 | 1.611.600,00 | 2,51 | 400.000.000,00 | 2,95 | 400.000.000,00 | 2,95 | 400.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 4.001.296.600,00 | | 6.960.886.300,00 | | 6.960.886.300,00 | | 32.792.000.000,00 | | 32.792.000.000,00 | | 32.792.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Memiliki Adminstrasi Pemerintahan yang Baik (%) | 0,53 | 0,66 | 4.001.296.600,00 | 0,79 | 6.960.886.300,00 | 0,92 | 6.960.886.300,00 | 1,05 | 32.792.000.000,00 | 1,19 | 32.792.000.000,00 | 1,32 | 32.792.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 7.749.408.757,00 | | 11.217.355.423,00 | | 11.217.355.423,00 | | 10.750.000.000,00 | | 10.750.000.000,00 | | 10.750.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Usaha ekonomi Desa | Persentase Bumdes berkategori maju (%) | 2,25 | 4,1 | 7.749.408.757,00 | 5,96 | 805.800,00 | 7,81 | 805.800,00 | 9,66 | 1.800.000.000,00 | 11,52 | 1.800.000.000,00 | 13,37 | 1.800.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | |
| Meningkatnya pemberdayan kelembagaan Masyarakat Desa | Persentase Desa yang difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatannya (%) | 0 | 3,53 | | 7,06 | 11.216.549.623,00 | 10,59 | 11.216.549.623,00 | 14,12 | 8.950.000.000,00 | 17,65 | 8.950.000.000,00 | 17,65 | 8.950.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 199.817.200,00 | | 254.817.200,00 | | 254.817.200,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | - | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan GDPK 5 Pilar (%) | - | 50 | - | 62,5 | 15.000.000,00 | 83 | 15.000.000,00 | 91,67 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | - | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana | Persentase Kebutuhan KB yang tidak Terpenuhi (%) | 12 | 12 | - | 11,8 | 30.000.000,00 | 11,5 | 30.000.000,00 | 11,2 | 100.000.000,00 | 11 | 100.000.000,00 | 10,7 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 199.817.200,00 | | 209.817.200,00 | | 209.817.200,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Upaya Pembangunan Keluarga | Persentase Peningkatan Kelompok Pembelajaran Keluarga (%) | - | 5,14 | 199.817.200,00 | 8,21 | 209.817.200,00 | 11,28 | 209.817.200,00 | 14,35 | 200.000.000,00 | 17,42 | 200.000.000,00 | 17,42 | 200.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 61.212.882.540,00 | | 129.009.206.520,00 | | 137.500.764.545,00 | | 151.963.046.613,00 | | 159.104.821.754,00 | | 160.685.787.929,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 35.532.041.706,00 | | 33.347.545.893,00 | | 41.839.103.918,00 | | 42.725.071.513,00 | | 43.650.846.654,00 | | 44.831.661.554,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 35.532.041.706,00 | 100 | 33.347.545.893,00 | 100 | 41.839.103.918,00 | 100 | 42.725.071.513,00 | 100 | 43.650.846.654,00 | 100 | 44.831.661.554,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan | |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 22.540.313.700,00 | | 41.487.836.000,00 | | 41.487.836.000,00 | | 89.233.375.300,00 | | 95.449.375.300,00 | | 95.449.375.300,00 | | |
| Meningkatnya rasio konektifitas darat | Rasio Konektivitas Darat (Rasio) | 0 | 0,25 | 22.540.313.700,00 | 0,27 | 41.487.836.000,00 | 0,3 | 41.487.836.000,00 | 0,32 | 89.233.375.300,00 | 0,35 | 95.449.375.300,00 | 0,45 | 95.449.375.300,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan | |
| | Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan provinsi (%) | 0,8 | 1 | | 1,25 | | 1,5 | | 1,75 | | 2 | | 2,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan | |
| 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | 3.135.927.334,00 | | 54.169.224.827,00 | | 54.169.224.827,00 | | 20.000.000.000,00 | | 20.000.000.000,00 | | 20.400.151.275,00 | | |
| Meningkatnya jumlah kunjungan kapal | Persentase layanan kunjungan kapal (%) | 0 | 80 | 3.135.927.334,00 | 85 | 54.169.224.827,00 | 90 | 54.169.224.827,00 | 95 | 20.000.000.000,00 | 100 | 20.000.000.000,00 | 100 | 20.400.151.275,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan | |
| 2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | 4.599.800,00 | | 4.599.800,00 | | 4.599.800,00 | | 4.599.800,00 | | 4.599.800,00 | | 4.599.800,00 | | |
| Meningkatnya pengelolaan perlintasan Kereta Api | Jumlah Dokumen perkeretaapian yang tersusun (Dokumen) | 1 | 1 | 4.599.800,00 | 1 | 4.599.800,00 | 1 | 4.599.800,00 | 1 | 4.599.800,00 | 1 | 4.599.800,00 | 1 | 4.599.800,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan | |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 35.035.462.196,00 | | 31.121.729.219,00 | | 34.534.262.089,00 | | 37.122.879.595,00 | | 37.603.678.696,00 | | 38.182.779.865,00 | | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 17.130.575.807,00 | | 15.356.035.133,00 | | 18.768.568.003,00 | | 19.161.064.838,00 | | 19.548.170.197,00 | | 20.032.640.688,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 17.130.575.807,00 | 100 | 15.356.035.133,00 | 100 | 18.768.568.003,00 | 100 | 19.161.064.838,00 | 100 | 19.548.170.197,00 | 100 | 20.032.640.688,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika | |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 8.285.894.140,00 | | 8.287.551.361,00 | | 8.287.551.361,00 | | 8.365.022.625,00 | | 8.365.022.625,00 | | 8.365.022.625,00 | | |
| Meningkatnya literasi digital masyarakat | Persentase masyarakat yang meningkat level keterampilan digitalnya (%) | 57,10 | 58 | 8.285.894.140,00 | 59 | 8.287.551.361,00 | 60 | 8.287.551.361,00 | 61 | 8.365.022.625,00 | 62 | 8.365.022.625,00 | 63 | 8.365.022.625,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika | Transformasi digital layanan public prioritas. |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | 9.618.992.249,00 | | 7.478.142.725,00 | | 7.478.142.725,00 | | 9.596.792.132,00 | | 9.690.485.874,00 | | 9.785.116.552,00 | | |
| Meningkatnya kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak terkait | Persentase wilayah blank spot yang tertangani melalui kemitraan dan kerjasama dengan pihak terkait (%) | 100 | 100 | 9.618.992.249,00 | 100 | 7.478.142.725,00 | 100 | 7.478.142.725,00 | 100 | 9.596.792.132,00 | 100 | 9.690.485.874,00 | 100 | 9.785.116.552,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika | Transformasi digital layanan public prioritas. |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Terintegrasinya aplikasi perangkat daerah | Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi (%) | 37,21 | 39 | | 41 | | 43 | | 45 | | 47 | | 50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika | |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 18.207.495.871,00 | | 17.095.169.777,00 | | 20.729.203.334,00 | | 62.028.665.528,00 | | 60.429.764.282,00 | | 60.872.578.484,00 | | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 15.901.306.535,00 | | 12.758.039.701,00 | | 16.392.073.258,00 | | 16.598.665.528,00 | | 16.949.764.282,00 | | 17.392.578.484,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 15.901.306.535,00 | 100 | 12.758.039.701,00 | 100 | 16.392.073.258,00 | 100 | 16.598.665.528,00 | 100 | 16.949.764.282,00 | 100 | 17.392.578.484,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | - | | 0 | | 0 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 0 | 32% | - | 35% | 0 | 37% | 0 | 38% | 10.000.000,00 | 38% | 10.000.000,00 | 40% | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | - | | 39.676.900,00 | | 39.676.900,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 0 | 20% | - | 22% | 39.676.900,00 | 24% | 39.676.900,00 | 25% | 10.000.000,00 | 27% | 10.000.000,00 | 28% | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | - | | 0 | | 0 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 0 | 50% | - | 55% | 0 | 57% | 0 | 59% | 10.000.000,00 | 63% | 10.000.000,00 | 65% | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 5.400.000,00 | | 251.053.500,00 | | 251.053.500,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya koperasi yang diberikan fasilitasi Pendidikan dan latihan | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 0 | 5% | 5.400.000,00 | 10% | 251.053.500,00 | 15% | 251.053.500,00 | 20% | 100.000.000,00 | 25% | 100.000.000,00 | 30% | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 119.550.000,00 | | 119.490.000,00 | | 119.490.000,00 | | 150.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | |
| Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 0 | 15% | 119.550.000,00 | 16% | 119.490.000,00 | 17% | 119.490.000,00 | 18% | 150.000.000,00 | 20% | 200.000.000,00 | 22% | 200.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | Pengembangan koperasi sektor produksi. |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 1.298.029.072,00 | | 1.173.198.124,00 | | 1.173.198.124,00 | | 12.300.000.000,00 | | 12.300.000.000,00 | | 12.300.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) | 0 | 5% | 1.298.029.072,00 | 7% | 1.173.198.124,00 | 10% | 1.173.198.124,00 | 12% | 12.300.000.000,00 | 15% | 12.300.000.000,00 | 20% | 12.300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 883.210.264,00 | | 2.753.711.552,00 | | 2.753.711.552,00 | | 32.850.000.000,00 | | 30.850.000.000,00 | | 30.850.000.000,00 | | |
| Meningkatnya daya saing UMKM | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk) | 2.344 | 2.344 | 883.210.264,00 | 2.344 | 2.753.711.552,00 | 2.600 | 2.753.711.552,00 | 2.600 | 32.850.000.000,00 | 2.600 | 30.850.000.000,00 | 2.600 | 30.850.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| | Persentase UKM menjalin kemitraan (%) | 0 | 3% | | 5% | | 7% | | 10% | | 12% | | 15% | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 15.716.821.982,00 | | 13.539.528.117,00 | | 16.046.745.276,00 | | 17.286.979.090,00 | | 17.802.991.687,00 | | 18.423.118.348,00 | | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 15.538.821.982,00 | | 13.393.919.917,00 | | 15.901.137.076,00 | | 16.736.979.090,00 | | 17.252.991.687,00 | | 17.873.118.348,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 15.538.821.982,00 | 100 | 13.393.919.917,00 | 100 | 15.901.137.076,00 | 100 | 16.736.979.090,00 | 100 | 17.252.991.687,00 | 100 | 17.873.118.348,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal | |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 18.000.000,00 | | 23.264.400,00 | | 23.264.400,00 | | 70.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | |
| Meningkatknya investasi Daerah | Persentase meningkatnya berinvestasi (%) | -14,65 | 15,5 | 18.000.000,00 | 1,81 | 23.264.400,00 | 2,37 | 23.264.400,00 | 2,89 | 70.000.000,00 | 3,37 | 70.000.000,00 | 3,4 | 70.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal | |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | - | | 0 | | 0 | | 120.000.000,00 | | 120.000.000,00 | | 120.000.000,00 | | |
| Meningkatnya promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang berinvetasi (%) | 0 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 120.000.000,00 | 100 | 120.000.000,00 | 100 | 120.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal | |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 160.000.000,00 | | 0 | | 0 | | 160.000.000,00 | | 160.000.000,00 | | 160.000.000,00 | | |
| Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 100 | 100 | 160.000.000,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 160.000.000,00 | 100 | 160.000.000,00 | 100 | 160.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal | |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | - | | 32.343.800,00 | | 32.343.800,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatknya investasi Daerah | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 60 | 100 | | 100 | 32.343.800,00 | 100 | 32.343.800,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal | |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | - | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 87 | 100 | - | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal | |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 44.594.950.630,00 | | 36.393.561.737,00 | | 39.265.210.099,00 | | 39.405.241.653,00 | | 39.911.508.929,00 | | 40.513.935.664,00 | | |
| 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 16.977.765.980,00 | | 15.320.132.087,00 | | 18.191.780.449,00 | | 18.796.049.503,00 | | 19.271.528.654,00 | | 19.852.877.858,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 16.977.765.980,00 | 100 | 15.320.132.087,00 | 100 | 18.191.780.449,00 | 100 | 18.796.049.503,00 | 100 | 19.271.528.654,00 | 100 | 19.852.877.858,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | 300.000.000,00 | | 0 | | 0 | | 485.762.500,00 | | 516.550.625,00 | | 537.628.156,00 | | |
| Meningkatnya pembinaan pemuda dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan | Persentase pemuda yang dibina dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan (%) | 7,33 | 7,34 | 300.000.000,00 | 7,35 | 0 | 7,36 | 0 | 7,37 | 485.762.500,00 | 7,38 | 516.550.625,00 | 7,39 | 537.628.156,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | 27.167.184.650,00 | | 20.973.429.650,00 | | 20.973.429.650,00 | | 20.023.429.650,00 | | 20.023.429.650,00 | | 20.023.429.650,00 | | |
| Meningkatnya ketersediaan sapras olahraga yang memenuhi standar, atlet potensial dan SDM keolahragaan yang berlisensi | Peningkatan prestasi olahraga (Medali) | 145 | 50 | 27.167.184.650,00 | 55 | 20.973.429.650,00 | 65 | 20.973.429.650,00 | 85 | 20.023.429.650,00 | 90 | 20.023.429.650,00 | 95 | 20.023.429.650,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga. |
| | Persentase ketersediaan sarpras olahraga yang memenuhi standar (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | |
| | Persentase tenaga keolahragaan berlisensi (%) | 33,35 | 33,35 | | 36,37 | | 39,34 | | 41,65 | | 43,98 | | 46,13 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | 150.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pembinaan kepramukaan | Persentase kader pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya (%) | 0 | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 62.435.200,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 62.435.200,00 | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase metadata statistik sektoral yang sesuai standar (%) | 15,87 | 18 | 62.435.200,00 | 21 | 300.000.000,00 | 24 | 300.000.000,00 | 27 | 100.000.000,00 | 30 | 100.000.000,00 | 33 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik | |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 1.673.000,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 1.673.000,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | 2.154.600,00 | | |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%) | 32,79 | 33 | 1.673.000,00 | 34 | 2.154.600,00 | 35 | 2.154.600,00 | 36 | 2.154.600,00 | 37 | 2.154.600,00 | 38 | 2.154.600,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian | |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 27.574.699.045,00 | | 25.743.711.360,00 | | 29.012.663.720,00 | | 30.287.490.340,00 | | 31.231.218.236,00 | | 32.361.042.606,00 | | |
| 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 19.234.649.044,61 | | 16.940.028.780,00 | | 20.208.981.140,00 | | 20.699.427.240,00 | | 21.231.349.376,00 | | 21.881.864.901,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 19.234.649.044,61 | 100 | 16.940.028.780,00 | 100 | 20.208.981.140,00 | 100 | 20.699.427.240,00 | 100 | 21.231.349.376,00 | 100 | 21.881.864.901,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan | |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | 1.800.000.000,39 | | 1.854.440.000,00 | | 1.854.440.000,00 | | 1.854.541.800,00 | | 1.873.087.218,00 | | 1.891.818.091,00 | | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi (%) | 1,65 | 1,92 | 1.800.000.000,39 | 2,88 | 1.854.440.000,00 | 4,6 | 1.854.440.000,00 | 6,4 | 1.854.541.800,00 | 8,6 | 1.873.087.218,00 | 11,2 | 1.891.818.091,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan | Pemanfaatan Khazanah budaya dan pengembangan Kawasan pemajuan kebudayaan. |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | - | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan (%) | 6,41 | 6,41 | - | 8 | 4.000.000,00 | 8,3 | 4.000.000,00 | 8,8 | 100.000.000,00 | 9,2 | 100.000.000,00 | 9,6 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan | |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | - | | 5.986.480,00 | | 5.986.480,00 | | 71.980.531,00 | | 86.376.637,00 | | 103.651.965,00 | | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Persentase Lembaga Sejarah Yang Difasilitasi (%) | 3,89 | 3,89 | - | 5 | 5.986.480,00 | 5,6 | 5.986.480,00 | 6,1 | 71.980.531,00 | 6,7 | 86.376.637,00 | 7,2 | 103.651.965,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan | |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | 750.000.000,00 | | 1.138.305.600,00 | | 1.138.305.600,00 | | 1.596.046.464,00 | | 1.915.255.757,00 | | 2.298.306.908,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 0,39 | 0,39 | 750.000.000,00 | 0,78 | 1.138.305.600,00 | 1,17 | 1.138.305.600,00 | 1,55 | 1.596.046.464,00 | 1,94 | 1.915.255.757,00 | 2,33 | 2.298.306.908,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan | Pemanfaatan Khazanah budaya dan pengembangan Kawasan pemajuan kebudayaan. |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | 5.790.050.000,00 | | 5.800.950.500,00 | | 5.800.950.500,00 | | 5.965.494.305,00 | | 6.025.149.248,00 | | 6.085.400.741,00 | | |
| Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Peningkatan Kunjungan Ke Museum (%) | 10 | 20 | 5.790.050.000,00 | 30 | 5.800.950.500,00 | 40 | 5.800.950.500,00 | 50 | 5.965.494.305,00 | 60 | 6.025.149.248,00 | 70 | 6.085.400.741,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan | |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | 31.703.243.154,00 | | 28.452.872.559,00 | | 34.441.053.941,00 | | 35.254.789.920,00 | | 36.147.015.962,00 | | 37.228.660.838,00 | | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 30.574.104.154,00 | | 27.356.943.559,00 | | 33.345.124.941,00 | | 33.995.650.703,00 | | 34.876.585.352,00 | | 35.958.230.228,00 | | |
| Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 30.574.104.154,00 | 100 | 27.356.943.559,00 | 100 | 33.345.124.941,00 | 100 | 33.995.650.703,00 | 100 | 34.876.585.352,00 | 100 | 35.958.230.228,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan | |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | 1.120.934.000,00 | | 1.070.929.000,00 | | 1.070.929.000,00 | | 1.129.139.217,00 | | 1.140.430.610,00 | | 1.140.430.610,00 | | |
| Meningkatnya pengembangan dan pembinaan perpustakaan | Persentase Perpustakaan Terstandarisasi Nasional (%) | 0 | 70 | 1.120.934.000,00 | 70 | 1.070.929.000,00 | 75 | 1.070.929.000,00 | 80 | 1.129.139.217,00 | 90 | 1.140.430.610,00 | 100 | 1.140.430.610,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan | |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | 8.205.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Terlestarikannya warisan budaya bangsa melalui preservasi koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan (%) | 100 | 100 | 8.205.000,00 | 100 | 25.000.000,00 | 100 | 25.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan | |
| 2.23.04 - PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN | | | | - | | | | | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi | Persentase perpustakaan yang terakreditasi (%) | 100 | 100 | - | 100 | | 100 | | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan | |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | 41.497.000,00 | | 33.182.400,00 | | 33.182.400,00 | | 275.000.000,00 | | 275.000.000,00 | | 275.000.000,00 | | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | 41.497.000,00 | | 33.182.400,00 | | 33.182.400,00 | | 125.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | |
| Terlaksananya tertib arsip sesuai standar di seluruh kabupaten/kota | Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan arsip secara baku (%) | 100 | 100 | 41.497.000,00 | 100 | 33.182.400,00 | 100 | 33.182.400,00 | 100 | 125.000.000,00 | 100 | 125.000.000,00 | 100 | 125.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kab/Kota | Persentase lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kab/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan | |
| Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku berbasis IT pada perangkat daerah Provinsi | Persentase pengelolaan arsip berbasis IT (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan | |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | - | | 0 | | 0 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| Meningkatnya arsip yang diamankan dan dilestarikan sesuai kewenangan provinsi | Persentase arsip yang diamankan dan dilestarikan sesuai kewenangan provinsi (%) | 0 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan | |
| 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | - | | 0 | | 0 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| Meningkatnya ketertiban pemberian izin penggunaan arsip | Persentase pemberian perizinan sesuai SOP (%) | 0 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan | |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 85.730.091.036,00 | | 80.783.454.312,00 | | 83.032.704.778,00 | | 165.859.434.201,00 | | 166.764.353.413,00 | | 167.887.075.657,00 | | |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 35.989.847.752,00 | | 31.081.056.312,00 | | 33.330.306.778,00 | | 39.856.994.201,00 | | 40.761.913.413,00 | | 41.884.635.657,00 | | |
| Terpenuhinya Layanan penunjang perangat daerah yang mendukung tugas dan fungsi | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 35.989.847.752,00 | 100 | 31.081.056.312,00 | 100 | 33.330.306.778,00 | 100 | 39.856.994.201,00 | 100 | 40.761.913.413,00 | 100 | 41.884.635.657,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | |
| 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | 15.832.830.800,00 | | 5.651.892.184,00 | | 5.651.892.184,00 | | 51.002.440.000,00 | | 51.002.440.000,00 | | 51.002.440.000,00 | | |
| Meningkatnya perlindungan laut dan sumberdayanya melalui pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil | Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan (%) | 68,05 | 97,6 | 15.832.830.800,00 | 99,66 | 5.651.892.184,00 | 99,67 | 5.651.892.184,00 | 99,67 | 51.002.440.000,00 | 99,67 | 51.002.440.000,00 | 99,67 | 51.002.440.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | Pembangunan pangan akuatik (blue food). |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | 22.450.433.975,00 | | 37.548.972.400,00 | | 37.548.972.400,00 | | 50.000.000.000,00 | | 50.000.000.000,00 | | 50.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 511.356,4 | 521.583,6 | 22.450.433.975,00 | 532.015,2 | 37.548.972.400,00 | 542.655,5 | 37.548.972.400,00 | 553.508,6 | 50.000.000.000,00 | 564.578,7 | 50.000.000.000,00 | 575.870,3 | 50.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | 9.841.571.459,00 | | 5.031.469.216,00 | | 5.031.469.216,00 | | 20.000.000.000,00 | | 20.000.000.000,00 | | 20.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 4.31.231,8 | 492.8496 | 9.841.571.459,00 | 5.177.477,8 | 5.031.469.216,00 | 5.440.121 | 5.031.469.216,00 | 5.715.345,10 | 20.000.000.000,00 | 6.004.465 | 20.000.000.000,00 | 6.308.367,4 | 20.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 1.163.714.850,00 | | 907.505.500,00 | | 907.505.500,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%) | 100 | 100 | 1.163.714.850,00 | 100 | 907.505.500,00 | 100 | 907.505.500,00 | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | Pembangunan pangan akuatik (blue food). |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | 451.692.200,00 | | 562.558.700,00 | | 562.558.700,00 | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | 4.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan | Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan) Trilyun Rp (Rp) | 0 | 32,03 | 451.692.200,00 | 33,2 | 562.558.700,00 | 34,42 | 562.558.700,00 | 35,68 | 4.000.000.000,00 | 37 | 4.000.000.000,00 | 38,39 | 4.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | |
| | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan (%) | 0 | 80 | | 85 | | 87,5 | | 90 | | 95 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | |
| | Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) | 6.963,2 | 7,311,4 | | 7,676,9 | | 8,060,8 | | 8.463,8 | | 8,887 | | 9,331,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan | |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 1.900.000.000,00 | | 17.081.220.999,00 | | 17.081.220.999,00 | | 27.048.000.000,00 | | 23.094.400.000,00 | | 24.244.480.000,00 | | |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | - | | 15.023.880.000,00 | | 15.023.880.000,00 | | 22.556.000.000,00 | | 18.084.000.000,00 | | 18.612.000.000,00 | | |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase peningkatan kunjungan wisata wisman dan wisnus (%) | 0,1 | 0,43 | - | 0,57 | 15.023.880.000,00 | 0,71 | 15.023.880.000,00 | 0,85 | 22.556.000.000,00 | 1 | 18.084.000.000,00 | 1,14 | 18.612.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata | Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas. |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | - | | 380.841.000,00 | | 380.841.000,00 | | 1.728.000.000,00 | | 2.073.600.000,00 | | 2.488.320.000,00 | | |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Capaian Kunjungan wisata (%) | 13,36 | 2,68 | - | 3,38 | 380.841.000,00 | 3,88 | 380.841.000,00 | 4,38 | 1.728.000.000,00 | 4,88 | 2.073.600.000,00 | 5,38 | 2.488.320.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata | |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | - | | 166.499.999,00 | | 166.499.999,00 | | 864.000.000,00 | | 1.036.800.000,00 | | 1.244.160.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) | 18,75 | 11,76 | - | 17,65 | 166.499.999,00 | 23,53 | 166.499.999,00 | 29,41 | 864.000.000,00 | 35,29 | 1.036.800.000,00 | 41,18 | 1.244.160.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata | Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas. |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | 1.900.000.000,00 | | 1.510.000.000,00 | | 1.510.000.000,00 | | 1.900.000.000,00 | | 1.900.000.000,00 | | 1.900.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM Sektor Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan (%) | 1,36 | 6,3 | 1.900.000.000,00 | 8 | 1.510.000.000,00 | 9,9 | 1.510.000.000,00 | 11,7 | 1.900.000.000,00 | 13,6 | 1.900.000.000,00 | 15,5 | 1.900.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata | |
| | Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan (%) | 10 | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata | |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 277.962.197.179,00 | | 295.564.753.230,00 | | 303.302.196.489,00 | | 324.671.941.710,00 | | 327.789.779.822,00 | | 331.750.195.755,00 | | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 126.187.514.879,00 | | 125.643.649.572,00 | | 133.381.092.831,00 | | 146.452.816.620,00 | | 149.545.654.732,00 | | 153.506.070.665,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 0 | 100 | 103.305.860.151,00 | 100 | 105.738.789.574,00 | 100 | 112.016.028.114,00 | 100 | 121.296.579.058,00 | 100 | 123.805.227.300,00 | 100 | 127.035.018.314,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Peternakan) | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 22.881.654.728,00 | 100 | 19.904.859.998,00 | 100 | 21.365.064.717,00 | 100 | 25.156.237.562,00 | 100 | 25.740.427.432,00 | 100 | 26.471.052.351,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 120.527.713.010,00 | | 125.648.977.068,00 | | 125.648.977.068,00 | | 116.922.463.900,00 | | 116.947.463.900,00 | | 116.947.463.900,00 | | |
| Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian | Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian (%) | 0 | 4 | 120.217.007.910,00 | 2 | 119.148.929.424,00 | 6 | 119.148.929.424,00 | 7 | 115.650.000.000,00 | 8 | 115.675.000.000,00 | 9 | 115.675.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan (KKSP)/ Lumbung lainnya, Pembangunan Pangan lokal dan nabati, Pembangunan |
| Meningkatnya populasi ternak | Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%) | 2,25 | 4,3 | 310.705.100,00 | 4,5 | 6.500.047.644,00 | 4,7 | 6.500.047.644,00 | 4,9 | 1.272.463.900,00 | 5,1 | 1.272.463.900,00 | 5,3 | 1.272.463.900,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 29.820.359.790,00 | | 41.506.167.590,00 | | 41.506.167.590,00 | | 58.763.456.790,00 | | 58.763.456.790,00 | | 58.763.456.790,00 | | |
| Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian | Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian (%) | 0 | 2 | 15.629.647.000,00 | 1 | 16.061.813.800,00 | 3 | 16.061.813.800,00 | 3,5 | 44.629.647.000,00 | 3,6 | 44.629.647.000,00 | 3,7 | 44.629.647.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan (KKSP)/ Lumbung lainnya, Pembangunan Pangan lokal dan nabati, Pembangunan Pangan hewani. |
| Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana peternakan | Persentase Kelompok Ternak yang difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas (%) | 25 | 25 | 14.190.712.790,00 | 25 | 25.444.353.790,00 | 25 | 25.444.353.790,00 | 25 | 14.133.809.790,00 | 25 | 14.133.809.790,00 | 25 | 14.133.809.790,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 347.004.700,00 | | 389.686.300,00 | | 389.686.300,00 | | 347.320.800,00 | | 347.320.800,00 | | 347.320.800,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular strategis | Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%) | 0 | 70 | 347.004.700,00 | 70 | 389.686.300,00 | 70 | 389.686.300,00 | 70 | 347.320.800,00 | 70 | 347.320.800,00 | 70 | 347.320.800,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 256.040.600,00 | | 234.020.600,00 | | 234.020.600,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman | Persentase luas serangan OPT yang tertangani (%) | 0 | 60 | 256.040.600,00 | 65 | 234.020.600,00 | 76 | 234.020.600,00 | 78 | 1.000.000.000,00 | 79 | 1.000.000.000,00 | 80 | 1.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 823.564.200,00 | | 2.142.252.100,00 | | 2.142.252.100,00 | | 1.185.883.600,00 | | 1.185.883.600,00 | | 1.185.883.600,00 | | |
| Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian | Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya (%) | 0 | 10 | 814.380.600,00 | 11 | 2.133.068.500,00 | 12 | 2.133.068.500,00 | 13 | 1.176.700.000,00 | 14 | 1.176.700.000,00 | 15 | 1.176.700.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| Meningkatnya kinerja penyuluh peternakan | Persentase Kelompok Tani Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan (%) | 16,67 | 16,67 | 9.183.600,00 | 33,35 | 9.183.600,00 | 50 | 9.183.600,00 | 66,67 | 9.183.600,00 | 83,33 | 9.183.600,00 | 100 | 9.183.600,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian | |
| 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | 15.606.528.605,00 | | 6.989.303.495,92 | | 6.989.303.495,92 | | 7.612.935.000,00 | | 7.828.935.000,00 | | 7.828.935.000,00 | | |
| 3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | 4.836.324.205,00 | | 5.236.890.000,00 | | 5.236.890.000,00 | | 4.304.935.000,00 | | 4.304.935.000,00 | | 4.304.935.000,00 | | |
| Terselenggaranya pengelolaan hutan dan lahan secara lestari dan berkelanjutan | Persentase efektifitas pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan (%) | 79,99 | 80,03 | 4.836.324.205,00 | 80,02 | 5.236.890.000,00 | 80,02 | 5.236.890.000,00 | 80,02 | 4.304.935.000,00 | 80,02 | 4.304.935.000,00 | 80,02 | 4.304.935.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan | |
| 3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terpeliharanya habitat flora dan fauna pada kawasan eksositem bernilai penting seko rongkong | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting dilindungi (%) | 0 | 0 | - | 0,01 | 10.000.000,00 | 0,01 | 10.000.000,00 | 0,01 | 10.000.000,00 | 0,01 | 10.000.000,00 | 0,01 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan | |
| 3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | 10.770.204.400,00 | | 1.732.413.495,92 | | 1.732.413.495,92 | | 3.288.000.000,00 | | 3.504.000.000,00 | | 3.504.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat bidang kehutanan | Persentase peningkatan produk hasil hutan oleh kelompok bidang kehutanan (%) | 0 | 58,33 | 10.770.204.400,00 | 66,67 | 1.732.413.495,92 | 75 | 1.732.413.495,92 | 83,33 | 3.288.000.000,00 | 91,67 | 3.504.000.000,00 | 100 | 3.504.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya perlindungan Daerah Aliran Sungai | Jumlah DAS yang dipulihkan/ dipertahankan (%) | 0 | 0 | - | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan | |
| 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | 22.985.135.458,00 | | 51.334.365.447,00 | | 42.839.943.717,00 | | 107.548.186.604,00 | | 88.993.632.258,00 | | 93.147.243.073,00 | | |
| 3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 19.574.121.558,00 | | 27.156.254.757,00 | | 18.661.833.027,00 | | 20.858.184.875,00 | | 21.470.588.755,00 | | 22.204.400.489,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja pemerintah daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 19.574.121.558,00 | 100 | 27.156.254.757,00 | 100 | 18.661.833.027,00 | 100 | 20.858.184.875,00 | 100 | 21.470.588.755,00 | 100 | 22.204.400.489,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | |
| 3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | 88.084.700,00 | | 71.880.600,00 | | 71.880.600,00 | | 540.000.000,00 | | 560.000.000,00 | | 616.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pengendalian dan pengawasan air Tanah | Persentase badan usaha pengguna air tanah yang berbasis konservasi (%) | 0 | 1,09 | 88.084.700,00 | 1,31 | 71.880.600,00 | 1,6 | 71.880.600,00 | 1,95 | 540.000.000,00 | 2,41 | 560.000.000,00 | 2,45 | 616.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | |
| 3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | 141.929.900,00 | | 2.492.725.610,00 | | 2.492.725.610,00 | | 2.100.900.395,00 | | 1.465.990.435,00 | | 1.537.589.477,00 | | |
| Meningkatnya Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi aspek administrasi, teknis, finansial dan lingkungan | Persentase pengusahaan pertambangan yang memenuhi aspek administrasi, teknis, finansial dan lingkungan (%) | 0 | 5,5 | 141.929.900,00 | 6 | 2.492.725.610,00 | 6,5 | 2.492.725.610,00 | 7 | 2.100.900.395,00 | 7,5 | 1.465.990.435,00 | 7,5 | 1.537.589.477,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | |
| 3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | 948.047.500,00 | | 4.480.844.000,00 | | 4.480.844.000,00 | | 16.224.000.000,00 | | 16.600.000.000,00 | | 16.636.000.000,00 | | |
| Meningkatnya jumlah energi yang dihasilkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT (kWh) | 0 | 5,76 | 948.047.500,00 | 6,33 | 4.480.844.000,00 | 245,49 | 4.480.844.000,00 | 246,81 | 16.224.000.000,00 | 247,05 | 16.600.000.000,00 | 247,05 | 16.636.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | |
| 3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | 2.232.951.800,00 | | 17.132.660.480,00 | | 17.132.660.480,00 | | 67.825.101.334,00 | | 48.897.053.068,00 | | 52.153.253.107,00 | | |
| Meningkatnya akses listrik dan pemenuhan ketersediaan daya listrik | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik Yang Memenuhi Aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) (%) | 99,87 | 99,89 | 2.232.951.800,00 | 99,91 | 17.132.660.480,00 | 99,93 | 17.132.660.480,00 | 99,94 | 67.825.101.334,00 | 99,97 | 48.897.053.068,00 | 100 | 52.153.253.107,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 34.211.048.697,41 | | 27.717.363.168,00 | | 29.121.800.727,00 | | 43.297.808.460,00 | | 44.401.430.912,00 | | 45.707.608.898,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 31.972.925.327,41 | | 23.183.161.898,00 | | 24.587.599.457,00 | | 34.702.808.460,00 | | 35.261.930.912,00 | | 35.969.158.898,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 31.972.925.327,41 | 100 | 23.183.161.898,00 | 100 | 24.587.599.457,00 | 100 | 34.702.808.460,00 | 100 | 35.261.930.912,00 | 100 | 35.969.158.898,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | 21.583.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 605.000.000,00 | | 665.500.000,00 | | 732.050.000,00 | | |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Persentase) | 100 | 100 | 21.583.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 605.000.000,00 | 100 | 665.500.000,00 | 100 | 732.050.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 92.862.750,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 605.000.000,00 | | 665.500.000,00 | | 732.050.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi dagang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 100 | 100 | 92.862.750,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 605.000.000,00 | 100 | 665.500.000,00 | 100 | 732.050.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 1.229.890.000,00 | | 3.025.000.000,00 | | 3.025.000.000,00 | | 3.150.000.000,00 | | 3.150.000.000,00 | | 3.150.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kelancaran dan distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%) | 100 | 100 | 1.229.890.000,00 | 100 | 3.025.000.000,00 | 100 | 3.025.000.000,00 | 100 | 3.150.000.000,00 | 100 | 3.150.000.000,00 | 100 | 3.150.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | 275.000.000,00 | | 275.000.000,00 | | 275.000.000,00 | | 1.815.000.000,00 | | 1.996.500.000,00 | | 2.196.150.000,00 | | |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai ekspor perdagangan (U$) | 1.722.364.398,00 | 927.980.000,00 | 275.000.000,00 | 2.173.586.837,00 | 275.000.000,00 | 2.173.586.837,00 | 275.000.000,00 | 2.173.586.837,00 | 1.815.000.000,00 | 2.173.586.837,00 | 1.996.500.000,00 | 2.173.586.837,00 | 2.196.150.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 618.787.620,00 | | 1.059.201.270,00 | | 1.059.201.270,00 | | 1.815.000.000,00 | | 1.996.500.000,00 | | 2.196.150.000,00 | | |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk (%) | 100 | 100 | 618.787.620,00 | 100 | 1.059.201.270,00 | 100 | 1.059.201.270,00 | 100 | 1.815.000.000,00 | 100 | 1.996.500.000,00 | 100 | 2.196.150.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | - | | 0 | | 0 | | 605.000.000,00 | | 665.500.000,00 | | 732.050.000,00 | | |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase produk UMKM dalam negeri yang termanfaatkan (%) | 100 | 0 | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 605.000.000,00 | 100 | 665.500.000,00 | 100 | 732.050.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan | |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 12.441.332.431,00 | | 22.367.274.488,00 | | 22.367.274.488,00 | | 15.479.530.700,00 | | 15.636.830.700,00 | | 15.809.860.700,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 11.799.277.431,00 | | 21.312.274.488,00 | | 21.312.274.488,00 | | 13.906.530.700,00 | | 13.906.530.700,00 | | 13.906.530.700,00 | | |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase pertumbuhan jumlah industri (Persentase) | 9 | 9 | 11.799.277.431,00 | 9 | 21.312.274.488,00 | 9 | 21.312.274.488,00 | 9 | 13.906.530.700,00 | 9 | 13.906.530.700,00 | 9 | 13.906.530.700,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian | |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | 591.110.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.210.000.000,00 | | 1.331.000.000,00 | | 1.464.100.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri (%) | 5 | 5 | 591.110.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.000.000.000,00 | 5 | 1.210.000.000,00 | 5 | 1.331.000.000,00 | 5 | 1.464.100.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian | |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | 50.945.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 363.000.000,00 | | 399.300.000,00 | | 439.230.000,00 | | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Persentase peningkatan ketersediaan data industri yang akurat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) (%) | 6 | 6 | 50.945.000,00 | 6 | 55.000.000,00 | 6 | 55.000.000,00 | 6 | 363.000.000,00 | 6 | 399.300.000,00 | 6 | 439.230.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian | |
| 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | 56.991.750,00 | | 96.000.000,00 | | 96.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | |
| 3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 10.771.800,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Tersedianya Usulan Lahan yang siap pakai | Persentase Usulan Satuan Pemukiman per kawasan | 49,385 | 20 | 10.771.800,00 | 30 | 1.000.000,00 | 30 | 1.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi | |
| 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 25.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Tersedianya rumah dan lahan Siap Terima Penempatan (STP) | Persentase Luas Lahan yang dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana (%) | 90,34 | 41,18 | 25.000.000,00 | 46,18 | 30.000.000,00 | 51,18 | 30.000.000,00 | 56,18 | 30.000.000,00 | 61,18 | 30.000.000,00 | 66,18 | 30.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi | |
| 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 21.219.950,00 | | 65.000.000,00 | | 65.000.000,00 | | 960.000.000,00 | | 960.000.000,00 | | 960.000.000,00 | | |
| Meningkatnya infrastruktur dan sumber daya manusia di Satuan Pemukiman | Persentase kawasan yang ditingkatkan Infrastrukturnya (%) | 0 | 30 | 21.219.950,00 | 30 | 65.000.000,00 | 30 | 65.000.000,00 | 40 | 960.000.000,00 | 40 | 960.000.000,00 | 40 | 960.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi | |
| | Persentase Satuan Pemukiman yang dibina | 0 | 6,25 | | 6,25 | | 6,25 | | 6,25 | | 6,25 | | 6,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi | |
| | | | | 311.998.749.229,42 | | 293.695.988.652,00 | | 331.742.186.912,00 | | 346.091.876.338,00 | | 345.956.220.326,00 | | 351.799.615.556,00 | | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 228.265.789.651,00 | | 182.938.898.308,00 | | 220.985.096.568,00 | | 224.303.340.373,00 | | 226.683.063.012,00 | | 229.598.944.060,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 228.265.789.651,00 | 100 | 182.938.898.308,00 | 100 | 220.985.096.568,00 | 100 | 224.303.340.373,00 | 100 | 226.683.063.012,00 | 100 | 229.598.944.060,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | 37.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah | Persentase fasilitasi penataan organisasi (%) | 100 | 100 | 37.000.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 100 | 12.500.000,00 | 100 | 12.500.000,00 | 100 | 12.500.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah | Nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Angka) | 10,95 | 11 | | 11,05 | 120.000.000,00 | 11,1 | 120.000.000,00 | 11,15 | 31.250.000,00 | 11,2 | 31.250.000,00 | 11,2 | 31.250.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| Meningatnya efektivitas kelembagaan dan ANJAB | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil ANJAB secara efektif (%) | 100 | 100 | | 100 | 20.000.000,00 | 100 | 20.000.000,00 | 100 | 6.250.000,00 | 100 | 6.250.000,00 | 100 | 6.250.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | 20.211.400,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti | Persentase Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah (%) | 100 | 100 | 20.211.400,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 78.565.409.378,42 | | 101.896.435.444,00 | | 101.896.435.444,00 | | 112.803.203.865,00 | | 110.287.825.214,00 | | 113.215.339.396,00 | | |
| Meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama | Persentase fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terimplementasi (%) | 100 | 100 | 78.565.409.378,42 | 100 | 101.896.435.444,00 | 100 | 101.896.435.444,00 | 100 | 112.803.203.865,00 | 100 | 110.287.825.214,00 | 100 | 113.215.339.396,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | 3.315.575.300,00 | | 7.040.332.100,00 | | 7.040.332.100,00 | | 7.040.332.100,00 | | 7.040.332.100,00 | | 7.040.332.100,00 | | |
| Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan | Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 3.315.575.300,00 | 100 | 388.756.800,00 | 100 | 388.756.800,00 | 100 | 388.756.800,00 | 100 | 388.756.800,00 | 100 | 388.756.800,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| Meningkatnya penyelesaian penanganan permasalahan hukum | Persentese bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani (%) | 100 | 100 | | 100 | 6.651.575.300,00 | 100 | 6.651.575.300,00 | 100 | 6.651.575.300,00 | 100 | 6.651.575.300,00 | 100 | 6.651.575.300,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | 617.586.800,00 | | 595.000.000,00 | | 595.000.000,00 | | 595.000.000,00 | | 595.000.000,00 | | 595.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD | Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (%) | 100 | 100 | 617.586.800,00 | 100 | 595.000.000,00 | 100 | 595.000.000,00 | 100 | 595.000.000,00 | 100 | 595.000.000,00 | 100 | 595.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | 819.752.600,00 | | 575.322.800,00 | | 575.322.800,00 | | 850.000.000,00 | | 850.000.000,00 | | 850.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa | Level Maturitas UKPBJ (Level) | 3 | 3 | 819.752.600,00 | 3 | 575.322.800,00 | 3 | 575.322.800,00 | 3 | 850.000.000,00 | 3 | 850.000.000,00 | 3 | 850.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | 357.424.100,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian pembangunan yang diimplementasikan (%) | 100 | 100 | 357.424.100,00 | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah | |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | 277.458.666.916,00 | | 320.000.000.000,00 | | 340.949.512.287,00 | | 360.843.046.152,00 | | 380.297.429.703,00 | | 401.862.648.058,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 156.658.302.485,00 | | 119.537.923.439,00 | | 120.658.543.957,00 | | 121.552.077.822,00 | | 122.006.461.373,00 | | 122.571.679.728,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 156.658.302.485,00 | 100 | 119.537.923.439,00 | 100 | 120.658.543.957,00 | 100 | 121.552.077.822,00 | 100 | 122.006.461.373,00 | 100 | 122.571.679.728,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 120.800.364.431,00 | | 200.462.076.561,00 | | 220.290.968.330,00 | | 239.290.968.330,00 | | 258.290.968.330,00 | | 279.290.968.330,00 | | |
| Terfasilitasinya kinerja DPRD | Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%) | 100 | 100 | 120.800.364.431,00 | 100 | 200.462.076.561,00 | 100 | 220.290.968.330,00 | 100 | 239.290.968.330,00 | 100 | 258.290.968.330,00 | 100 | 279.290.968.330,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD | |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | 40.284.897.192,40 | | 35.419.951.156,00 | | 38.289.601.509,00 | | 43.821.345.069,00 | | 44.968.000.246,00 | | 46.352.115.574,00 | | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 33.962.047.160,40 | | 28.785.126.342,00 | | 31.654.776.695,00 | | 37.186.520.255,00 | | 38.333.175.432,00 | | 39.717.290.760,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 33.962.047.160,40 | 100 | 28.785.126.342,00 | 100 | 31.654.776.695,00 | 100 | 37.186.520.255,00 | 100 | 38.333.175.432,00 | 100 | 39.717.290.760,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan | |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 5.717.190.782,00 | | 2.804.524.814,00 | | 2.804.524.814,00 | | 2.804.524.814,00 | | 2.804.524.814,00 | | 2.804.524.814,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | 100 | 5.717.190.782,00 | 100 | 2.804.524.814,00 | 100 | 2.804.524.814,00 | 100 | 2.804.524.814,00 | 100 | 2.804.524.814,00 | 100 | 2.804.524.814,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan | |
| Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Rata rata capaian kinerja program pembangunan daerah (%) | 94,11 | 95 | | 96 | | 96,25 | | 96,5 | | 96,75 | | 97 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan | |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 605.659.250,00 | | 3.830.300.000,00 | | 3.830.300.000,00 | | 3.830.300.000,00 | | 3.830.300.000,00 | | 3.830.300.000,00 | | |
| Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap prioritas pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 100 | 100 | 605.659.250,00 | 100 | 3.830.300.000,00 | 100 | 3.830.300.000,00 | 100 | 3.830.300.000,00 | 100 | 3.830.300.000,00 | 100 | 3.830.300.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan | |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan | |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan | |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | 2.602.847.646.192,96 | | 2.201.018.266.108,08 | | 2.401.677.985.590,08 | | 2.029.943.296.121,00 | | 2.032.687.385.655,00 | | 2.036.868.655.014,00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 178.162.886.988,97 | | 181.501.192.468,00 | | 198.160.687.602,00 | | 194.728.878.256,00 | | 197.472.967.793,00 | | 201.654.237.150,00 | | |
| Terlaksananya Layanan Penunjang Perangkat Daerah (BKAD) | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 26.304.845.547,97 | 100 | 23.960.290.796,00 | 100 | 25.770.460.954,00 | 100 | 26.871.515.560,00 | 100 | 27.591.759.812,00 | 100 | 28.479.847.768,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan | |
| Terlaksananya Layanan penunjang perangkat daerah (BAPENDA) | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 151.858.041.441,00 | 100 | 157.540.901.672,00 | 100 | 172.390.226.648,00 | 100 | 167.857.362.696,00 | 100 | 169.881.207.981,00 | 100 | 173.174.389.382,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan | |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 2.394.628.016.498,99 | | 1.989.447.863.343,08 | | 2.173.448.087.691,08 | | 1.826.145.207.568,00 | | 1.826.145.207.565,00 | | 1.826.145.207.567,00 | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah | Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini) | 100 | 100 | 2.394.296.913.098,99 | 100 | 1.989.116.759.943,08 | 100 | 2.173.116.984.291,08 | 100 | 1.825.814.104.168,00 | 100 | 1.825.814.104.165,00 | 100 | 1.825.814.104.167,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan | |
| Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Bapenda) | Persentase Target Pendapatan Perangkat Daerah Yang Terealisasi (%) | 100 | 100 | 331.103.400,00 | 100 | 331.103.400,00 | 100 | 331.103.400,00 | 100 | 331.103.400,00 | 100 | 331.103.400,00 | 100 | 331.103.400,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan | |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 1.206.771.905,00 | | 1.219.231.905,00 | | 1.219.231.905,00 | | 1.219.231.905,00 | | 1.219.231.905,00 | | 1.219.231.905,00 | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | Persentase Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD (%) | 0 | 80 | 1.206.771.905,00 | 81 | 1.219.231.905,00 | 82 | 1.219.231.905,00 | 83 | 1.219.231.905,00 | 84 | 1.219.231.905,00 | 85 | 1.219.231.905,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan | |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 28.849.970.800,00 | | 28.849.978.392,00 | | 28.849.978.392,00 | | 7.849.978.392,00 | | 7.849.978.392,00 | | 7.849.978.392,00 | | |
| Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%) | 100 | 100 | 28.849.970.800,00 | 100 | 28.849.978.392,00 | 100 | 28.849.978.392,00 | 100 | 7.849.978.392,00 | 100 | 7.849.978.392,00 | 100 | 7.849.978.392,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan | |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | 26.870.551.323,00 | | 34.663.963.134,00 | | 36.836.553.526,00 | | 27.918.531.278,00 | | 28.784.741.415,00 | | 29.823.414.543,00 | | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 23.945.844.373,00 | | 19.968.953.334,00 | | 22.141.543.726,00 | | 24.993.531.278,00 | | 25.859.741.415,00 | | 26.898.414.543,00 | | |
| Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 23.945.844.373,00 | 100 | 19.968.953.334,00 | 100 | 22.141.543.726,00 | 100 | 24.993.531.278,00 | 100 | 25.859.741.415,00 | 100 | 26.898.414.543,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian | |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 2.924.706.950,00 | | 14.695.009.800,00 | | 14.695.009.800,00 | | 2.925.000.000,00 | | 2.925.000.000,00 | | 2.925.000.000,00 | | |
| Tercapainya kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik | Persentase capaian kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik (%) | 90 | 90 | 2.924.706.950,00 | 91 | 14.695.009.800,00 | 92 | 14.695.009.800,00 | 93 | 2.925.000.000,00 | 94 | 2.925.000.000,00 | 95 | 2.925.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian | |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 22.931.388.171,00 | | 19.804.496.224,00 | | 21.643.533.524,00 | | 27.037.549.564,00 | | 27.755.244.234,00 | | 28.611.002.931,00 | | |
| 5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 22.751.388.171,00 | | 19.118.707.225,00 | | 20.887.034.525,00 | | 23.181.215.564,00 | | 23.898.910.234,00 | | 24.754.668.931,00 | | |
| Terpenuhinya Layanan penunjang perangat daerah yang mendukung tugas dan fungsi | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 22.751.388.171,00 | 100 | 19.118.707.225,00 | 100 | 20.887.034.525,00 | 100 | 23.181.215.564,00 | 100 | 23.898.910.234,00 | 100 | 24.754.668.931,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 180.000.000,00 | | 685.788.999,00 | | 756.498.999,00 | | 3.856.334.000,00 | | 3.856.334.000,00 | | 3.856.334.000,00 | | |
| Meningkatnya mutu pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan) (%) | 100 | 100 | 180.000.000,00 | 100 | 685.788.999,00 | 100 | 756.498.999,00 | 100 | 3.856.334.000,00 | 100 | 3.856.334.000,00 | 100 | 3.856.334.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan | |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 3.273.294.100,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 1.150.000.000,00 | | 1.150.000.000,00 | | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 3.273.294.100,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 1.150.000.000,00 | | 1.150.000.000,00 | | |
| Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah | Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (%) | 30,77 | 32 | 3.273.294.100,00 | 34 | 150.000.000,00 | 35 | 150.000.000,00 | 38 | 150.000.000,00 | 40 | 1.150.000.000,00 | 42 | 1.150.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan | |
| Meningkatnya Perangkat daerah yang menghasilkan inovasi | Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi (%) | 36 | 38 | | 20 | | 21 | | 22 | | 32 | | 34 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan | |
| 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | 17.631.697.137,00 | | 13.999.662.017,00 | | 19.207.521.636,00 | | 19.588.641.386,00 | | 19.876.406.592,00 | | 20.252.596.588,00 | | |
| 5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 17.236.899.211,00 | | 13.344.531.017,00 | | 18.552.390.636,00 | | 19.268.641.386,00 | | 19.556.406.592,00 | | 19.932.596.588,00 | | |
| Meningkatnya Layanan Penunjang perangkat daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 17.236.899.211,00 | 100 | 13.344.531.017,00 | 100 | 18.552.390.636,00 | 100 | 19.268.641.386,00 | 100 | 19.556.406.592,00 | 100 | 19.932.596.588,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung | |
| 5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | 394.797.926,00 | | 655.131.000,00 | | 655.131.000,00 | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | 320.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Pelayanan Badan Penghubung Daerah | Persentase Pelayanan Badan Penghubung Daerah (%) | 88 | 88 | 394.797.926,00 | 89 | 655.131.000,00 | 90 | 655.131.000,00 | 91 | 320.000.000,00 | 92 | 320.000.000,00 | 93 | 320.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung | |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | 89.064.198.294,80 | | 84.664.954.141,00 | | 87.989.749.615,00 | | 115.250.158.590,00 | | 117.411.810.550,00 | | 119.831.800.065,00 | | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 37.859.519.894,80 | | 34.752.703.041,00 | | 38.077.498.515,00 | | 41.375.659.873,00 | | 42.697.340.926,00 | | 44.260.560.117,00 | | |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 37.859.519.894,80 | 100 | 34.752.703.041,00 | 100 | 38.077.498.515,00 | 100 | 41.375.659.873,00 | 100 | 42.697.340.926,00 | 100 | 44.260.560.117,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah | |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 17.857.992.200,00 | | 33.142.231.700,00 | | 33.142.231.700,00 | | 52.598.574.308,00 | | 53.254.275.838,00 | | 53.923.091.398,00 | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota (%) | 55,5 | 57,17 | 17.857.992.200,00 | 58,88 | 33.142.231.700,00 | 60,65 | 33.142.231.700,00 | 62,47 | 52.598.574.308,00 | 64,34 | 53.254.275.838,00 | 66,27 | 53.923.091.398,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah | |
| | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PDTT & Dumas (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP (%) | 62,57 | 62,57 | | 64,45 | | 66,38 | | 68,37 | | 70,43 | | 72,54 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah | |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | 33.346.686.200,00 | | 16.770.019.400,00 | | 16.770.019.400,00 | | 21.275.924.409,00 | | 21.460.193.786,00 | | 21.648.148.550,00 | | |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Pendampingan Pengawasan | Indeks Kepuasan Terhadap Pendampingan dan Asistensi (Indeks) | 93,28 | 93,28 | 33.346.686.200,00 | 94,21 | 16.770.019.400,00 | 96,1 | 16.770.019.400,00 | 98,02 | 21.275.924.409,00 | 99,98 | 21.460.193.786,00 | 100 | 21.648.148.550,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah | |
| | Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap hasil Rekomendasi Pengawasan (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah | |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 74.602.475.980,00 | | 84.563.996.799,00 | | 85.198.134.793,00 | | 67.018.886.212,00 | | 67.278.393.495,00 | | 67.587.611.339,00 | | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 8.875.886.450,00 | | 7.502.807.499,00 | | 8.136.945.493,00 | | 9.463.580.102,00 | | 9.723.087.385,00 | | 10.032.305.229,00 | | |
| Terpenuhinya Layanan penunjang perangat daerah yang mendukung tugas dan fungsi | Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%) | 100 | 100 | 8.875.886.450,00 | 100 | 7.502.807.499,00 | 100 | 8.136.945.493,00 | 100 | 9.463.580.102,00 | 100 | 9.723.087.385,00 | 100 | 10.032.305.229,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | 7.134.806.190,00 | | 6.250.000.000,00 | | 6.250.000.000,00 | | 6.250.306.110,00 | | 6.250.306.110,00 | | 6.250.306.110,00 | | |
| Meningkatkan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa | Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan pendidikan Ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%) | 29 | 33 | 7.134.806.190,00 | 42 | 6.250.000.000,00 | 50 | 6.250.000.000,00 | 67 | 6.250.306.110,00 | 83 | 6.250.306.110,00 | 100 | 6.250.306.110,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | 24.117.014.890,00 | | 24.250.000.000,00 | | 24.250.000.000,00 | | 24.700.000.000,00 | | 24.700.000.000,00 | | 24.700.000.000,00 | | |
| Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase pengurus wilayah partai politik yang memperoleh pendidikan politik (%) | 45 | 50 | 24.117.014.890,00 | 60 | 24.250.000.000,00 | 70 | 24.250.000.000,00 | 80 | 24.700.000.000,00 | 90 | 24.700.000.000,00 | 100 | 24.700.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | Penguatan karakter dan jati diri bangsa. |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | 3.823.100,00 | | 5.000.000.000,00 | | 5.000.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | 16,24 | 16,8 | 3.823.100,00 | 17 | 5.000.000.000,00 | 17,5 | 5.000.000.000,00 | 18 | 5.000.000,00 | 18,5 | 5.000.000,00 | 19 | 5.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | Penguatan karakter dan jati diri bangsa. |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 517.126.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Persentase ATHG bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang ditangani (%) | 100 | 100 | 517.126.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | 33.953.819.350,00 | | 41.061.189.300,00 | | 41.061.189.300,00 | | 26.100.000.000,00 | | 26.100.000.000,00 | | 26.100.000.000,00 | | |
| Menurunnya jumlah konflik baik antar masyarakat maupun antar kelompok masyarakat atau Orkemas | Persentase konflik yang tertangani (%) | 100 | 100 | 33.953.819.350,00 | 100 | 41.061.189.300,00 | 100 | 41.061.189.300,00 | 100 | 26.100.000.000,00 | 100 | 26.100.000.000,00 | 100 | 26.100.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | **10.334.427.358.366,00** | | **10.855.015.086.208,00** | | **11.402.909.175.885,00** | | **11.728.985.946.353,00** | | **11.971.114.142.052,00** | | **12.267.785.783.372,00** | | |

## 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelanggaraan Pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang ditargetkan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD.

Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat.

### 4.2.1 INDIKATOR MAKRO

Indikator makro merupakan variable utama yang digunakan yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan. Indikator makro digunakan oleh pemerintah untuk menilai kinerja ekonomi dalam membuat kebijakan dan menargetkan arah ekonomi di masa depan dan membantu memahami Kesehatan ekonomi, tren, dan perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah. Penetapan indicator makro Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya dan tantangan Pembangunan kedepan serta kemampuan daerah, sebagaimana tertuang dalam table berikut :

**Tabel IV.2.**
**Indikator Makro**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2030**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,02 | 5,0 - 5,8 | 5,2 -6,5 | 5,4-7,8 | 5,6-7,5 | 6,2-8,2 | 6,3-8,5 | |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,19 (Agst) | 3,80-4,10 | 3,64-4,03 | 3,49-3,96 | 3,33-3,89 | 3,50-3,97 | 3,02-3,76 | |
| 3. | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,77 | 7,30-7,89 | 6,5 – 7,0 | 6,44 - 6,86 | 6,38-6,54 | 3,49-4,49 | 3,48-4,48 | |
| 4. | Rasio gini | Angka | 0,360 | 0,350 - 0,360 | 0,348 - 0,358 | 0,346 - 0,356 | 0.342 - 0,352 | 0,330 - 0,335 | 0,328 - 0,333 | |
| 5. | Penurunan Intensitas Emisi GRK | persen | n.a | 29,70 | 33,46 | 37,22 | 40,98 | 44,73 | 48,49 | |
| 6. | PDRB per kapita (Rp. Juta) | (Rp. Juta) | 73,57 | 76,58 – 80,16 | 80,5-84,9 | 85,06 - 89,37 | 86,07 – 93,43 | 94,06 – 117,11 | 98,71 – 120,13 | |
| 7. | Kontribusi PDRB Provinsi | persen | 3,07 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | |
| 8. | Indeks Modal Manusia | angka | n.a | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | |
| 9. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 75,69 | 77,60 | 77,81 | 78,02 | 78,23 | 78,44 | 78,67 | |

*Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025*

### 4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan indicator utama dari pemerintah daerah yang dipilih dari indicator tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta menggambarkan Visi RPJMD 2025 – 2029 "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter", sebagaimana tertuang dalam table berikut :

**Tabel IV.3.**
**Indikator Kinerja Utama**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2030**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1. | Indeks Modal Manusia | angka | n.a | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | |
| 2. | Indeks Ketahanan Nasional | Angka | 2,87 | 3,04 | 3,09 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | 3,29 | |
| 3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,02 | 5,0 - 5,8 | 5,2 -6,5 | 5,4-7,8 | 5,6-7,5 | 6,2-8,2 | 6,3-8,5 | |
| 4. | Rasio Gini | Angka | 0,360 | 0,350 - 0,360 | 0,348 - 0,358 | 0,346 - 0,356 | 0.342 - 0,352 | 0,330 - 0,335 | 0,328 - 0,333 | |
| 5. | Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) | Nilai | 54,43 (2022) | 55,37 | 55,66 | 55,92 | 56,15 | 56,36 | 56,56 | |
| 6. | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 81,74 | 81,80 | 81,86 | 82 | 82,30 | 82,50 | 82,80 | |
| 7. | Indeks Wiliamson | Angka | n.a | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | |
| 8. | IKLH | Angka | 75,69 | 77,61 | 77,82 | 78,03 | 78,25 | 78,46 | 78,67 | |
| 9. | Penurunan Intensitas Emisi GRK | persen | n.a | 29,70 | 33,46 | 37,22 | 40,98 | 44,73 | 48,49 | |

*Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025*

### 4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahaan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) yang memuat Indikator tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, IUP (Indikator Utama Pembangunan) aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Indikator SPM sebagaimana yang termuat pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta proyeksi penetapan target indikator kinerja daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada table-tabel berikut

**Tabel IV.4.**
**Indikator Kinerja Daerah**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | |
| | **Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan** | | | | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Pangan | Persen | 83,82 | 85,02 | 86,01 | 87 | 87,99 | 88,98 | 89,97 | Non IUP |
| | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) | Persen | 6,99 | 6,87 | 6,52 | 6,18 | 5,83 | 4,8001 | 4,8001 | IUP |
| | Konsumsi Listrik per Kapita | kWh | 912,6 | 1.015 | 1.285 | 1.555 | 1.825 | 2. 095 | 2365 | IUP |
| | Intensitas Energi Primer | SBM/Rp miliar | n.a | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | IUP |
| | Kapasitas Air Baku | m3/Detik | 14.985 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | IUP |
| | **Lingkungan Hidup Berkualitas** | | | | | | | | | |
| | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Angka | n.a | 0,537 | 0,542 | 0,546 | 0,551 | 0,560 | 0,561 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 75,69 | 77,60 | 77,81 | 78,02 | 78,23 | 78,44 | 78,67 | IUP |
| | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persen | 10,88 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | IUP |
| | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | Persen | 11,19* | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | IUP |
| | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Persen | 3,27 | 63 | 72 | 81 | 92 | 100 | 100 | IUP |
| | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan | Persen | 38,38 | 42,01 | 44,71 | 47,88 | 50,75 | 54 | 56,21 | IUP |
| | Timbulan Sampah yang Didaur Ulang di Fasilitas Pengolahan Sampah | Persen | 8,72 (2023) | 9,22 | 9,47 | 9,72 | 9,97 | 10,22 | 10,47 | IUP |
| | **Risilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** | | | | | | | | | |
| | Penurunan Intensitas emisi GRK (%) | persen | n.a | 29,70 | 33,46 | 37,22 | 40,98 | 44,73 | 48,49 | Indikator tujuan |
| | Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | | | | | | | | | IUP |
| | a. Kumulatif | Persen | 3,07 | 6,53 | 7,12 | 7,78 | 8,51 | 9,27 | 10,08 | |
| | b. Tahunan | Persen | n.a | 12,82 | 14,45 | 16,36 | 18,53 | 20,1 | 22,16 | |
| | Indeks Risiko Bencana | Poin | 140,76 | 135,46 | 134,20-133,12 | 132,94-130,79 | 131,69-128,45 | 130,43-126,12 | 129,17 – 123,78 | IUP |
| | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | Non IUP |
| | **Demografi** | | | | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | Non IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Rasio Penduduk (Rasio jenis Kelamin) | Jiwa | 98,75 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,75 | 98,74 | Non IUP |
| | Kepadatan Peduduk | Jiwa/ Km2 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 220 | Non IUP |
| | | | | | | | | | | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| | **Kesejahteraan Ekonomi** | | | | | | | | | |
| | PDRB per kapita (Rp. Juta) | (Rp. Juta) | 73,57 | 76,58 – 80,16 | 80,5-84,9 | 85,06 - 89,37 | 86,07 – 93,43 | 94,06 – 117,11 | 98,71 – 120,13 | Indikator Makro |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,02 | 5,0 - 5,8 | 5,2 -6,5 | 5,4-7,8 | 5,6-7,5 | 6,2-8,2 | 6,3-8,5 | Indikator Tujuan |
| | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,77 | 7,30-7,89 | 6,5 – 7,0 | 6,44 - 6,86 | 6,38-6,54 | 3,49-4,49 | 3,48-4,48 | Indikator Sasaran |
| | Pendapatan per kapita | (Rp. Juta) | 73,57 | 78,23 – 80,16 | 80,5-84,9 | 85,06 - 89,37 | 86,07 – 93,43 | 94,06 – 98,21 | 98,71 – 102,13 | Non IUP |
| | Rasio Gini | Persen | 0,360 | 0,350 - 0,360 | 0,348 - 0,358 | 0,346 -0,356 | 0.342 - 0,352 | 0,330 - 0,335 | 0,328 - 0,333 | Indikator Tujuan |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,19 (Agst) | 3,80-4,10 | 3,64-4,03 | 3,49-3,96 | 3,33-3,89 | 3,50-3,97 | 3,02-3,76 | Indikator Sasaran |
| | Indeks Modal Manusia | Angka | n.a | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | Indikator Tujuan |
| | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | persen | 3,07 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | Indikator Makro |
| | Indeks Wiliamson | Angka | n.a | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | Indikator Tujuan |
| | **Kesehatan Untuk Semua** | | | | | | | | | |
| | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,83 | 73,95* | 74,06 | 74,33 | 74,6 | 74,87 | 75,14 | IUP |
| | Prevalensi Stunting | Persen | 23.3 | 21,78 | 20,37 | 19.05 | 17.8 | 16.65 | 15.57 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | Angka | 134 | 133 | 129 | 118 | 107 | 96 | 86 | IUP |
| | Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis | Persen | 66,6 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 90 | IUP |
| | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis | Persen | 83 (2023) | 91,54 | 92.74 | 92,90 | 93,03 | 93,15 | 93,55 | IUP |
| | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | Persen | 83 (2023) | 98 | 98,10 | 98,18 | 98,28 | 98,37 | 98,46 | IUP |
| | **Pendidikan Berkualitas Yang Merata** | | | | | | | | | |
| | Persentase satuan Pendidikan yg mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | | | | | | | | | IUP |
| | i) Literasi membaca | Persen | 39,09 | 42 – 43,50 | 44,1 – 45,90 | 45,50 – 47,60 | 46,60 – 48,90 | 46,69 – 49,19 | 47,20 – 50 | |
| | ii) Numerasi | Persen | 36,00 | 38,00 – 39,00 | 39,30 – 40,50 | 40,30 – 42,00 | 41,10 – 43,30 | 41,18 – 43,68 | 42,00 –45,00 | |
| | Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk | | | | | | | | | IUP |
| | i) Literasi membaca | Persen | 0,00 (2023) | 8,33-12,50 | 12,50-17,71 | 16,67-22,92 | 20,83-28,12 | 25 – 33,33 | 29,17– 38,54 | |
| | ii) Numerasi | Persen | 0,00 (2023) | 0,00-4,17 | 1.04 – 5.21 | 2.09 – 6.25 | 3.13 – 7.29 | 4,17 – 8,33 | 5.21 – 9.37 | |
| | Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | Tahun | 8,86 | 9,47 | 9,59-9,60 | 9,72 | 9,84-9,85 | 9,97-9,98 | 10,09-10,11 | IUP |
| | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,55 | 13,80-13,81 | 13,87-13,88 | 13,94-13,96 | 14,01-14,03 | 14,09-14,11 | 14,16-14,19 | IUP |
| | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi | Persen | 70,20 | 76,58 | 77,91 | 79,24 | 80,57 | 81,90 | 83,23 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi | | | | | | | | | |
| | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Persen | 12,53 | 12,68 | 12,80 | 12,91 | 13,03 | 13,15 | 13,26 | IUP |
| | **Perlindungan Sosial Adiptif** | | | | | | | | | |
| | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Persen | 52,08 | 62,93 | 71,65 | 77,12 | 85,33 | 99 | 99 | IUP |
| | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal | Persen | n.a | 20 | 21,78 | 23,57 | 25,36 | 27,15 | 28,93 | IUP |
| | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang menangani Bidang Ketenagakerjaan | orang | n.a | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | IUP |
| | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | unit | 2 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | IUP |
| | **Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju** | | | | | | | | | |
| | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 79,04 | 79,34 – 79,35 | 79,52 – 79,73 | 79,96 – 80,11 | 80,40 – 80,49 | 80,83 –80,88 | 81,27 – 81,26 | IUP |
| | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 55,26 (2023) | 56,43-56,51 | 56,99–57,11 | 57,55-57,71 | 58,12-58,31 | 58,68-58,92 | 59,24-59,52 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif** | | | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Angka | 79,37 (2023) | 80,03* | 80,05* | 80,07* | 80,09* | 80,11* | 80,15* | IUP |
| | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,366 (2023) | 0,348-0,344 | 0,336-0,331 | 0,324-0,317 | 0,312-0,304 | 0,301-0,291 | 0,289-0,278 | IUP |
| | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 93,19 (2023) | 93,22* | 93,25* | 93,28* | 93,31* | 93,35* | 93,40* | Non IUP |
| | Indeks Perlindungan Anak | Angka | 60,74 (2023) | 61,37-62,48 | 61,97-63,48 | 62,58-64,49 | 63,19-65,49 | 63,8 – 66,50 | 64,41 – 67,51 | IUP |
| | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 56,67 (2023) | 56,78* | 56,98* | 57,21* | 56,79-58,11 | 57,5 - 59 | 58,21-59,86 | IUP |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| | **Daya Saing Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | |
| | Angka Ketergantungan Penduduk | Angka | 44,78 | 45* | 45,29* | 45,44* | 45,67* | 45,88* | 46* | Non IUP |
| | **Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi** | | | | | | | | | |
| | Rasio PDRB Industri Pengolahan | Persen | 13,02 | 13,05 | 13,61 | 14,17 | 14,73 | 15,26 | 15,85 | IUP |
| | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Persen | 1,36 | 1,51 | 1,56 | 1,62 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | IUP |
| | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Ribu orang | 12.487* | 78,22 | 84,09 | 89,95 | 95,82 | 101,69 | 107,56 | IUP |
| | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif | Persen | n.a | 2,68 | 2,69 | 2,71 | 2,73 | 2,75 | 2,77 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi | Unit | n.a | 10,24 | 10,42 | 10,59 | 10,77 | 10,95 | 11,13 | IUP |
| | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi | Persen | 3,92 | 4,15 | 4,41 | 4,69 | 4,99 | 5,22 | 5,45 | IUP |
| | Rasio Kewirausahaan Provinsi | Persen | 3,50 | 3,56 | 3,59 | 3,73 | 3,88 | 4,02 | 4,17 | IUP |
| | Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB | Persen | 0.90 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | IUP |
| | Return on Assets (ROA) BUMD | Persen | n.a | 0,97 | 1,20 | 1.43 | 1.67 | 1,9 | 2,1 | IUP |
| | Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen | 4,07 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | IUP |
| | Nilai Tukar Petani Pangan | Persen | 117,87 | 120,23 | 122,63 | 125,08 | 127,59 | 130,14 | 132,74 | IUP |
| | Nilai Tukar Nelayan | Persen | 111,92 | 112 | 112,75 | 113,5 | 114,25 | 115 | 115,75 | IUP |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 67,38 | 68,22 | 69,06 | 69,90 | 70,74 | 71,58 | 72,42 | Non IUP |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 52,68 | 54,3 | 54,82 | 55,34 | 55,86 | 56,38 | 56,9 | IUP |
| | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal | Persen | n.a | 39 | 41,56 | 44,13 | 46.69 | 49,25 | 52,36 | IUP |
| | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 59,66 | 60 | 61,5 | 62 | 63 | 64 | 65 | Indikator Sasaran |
| | Indeks Kapabilitas Inovasi | Angka | 3,7 (2023) | 3,8 | 3,82-3,85 | 3,85-3,9 | 3,87-3,95 | 3,9 – 4,0 | 3,93 – 4,05 | IUP |
| | **Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru** | | | | | | | | | |
| | Indeks Ekonomi Hijau | Persen | 70,46 (2023) | 72,5 | 74,41 | 75,92 | 77,36 | 78,80 | 80,26 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Indeks Ekonomi Biru | Skor | 80,86 (data tahun 2023) | 82,02* | 84,06 | 96,8 | 109,56 | 122,3 | 128,5 | Indikator Tujuan |
| | Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer | Persen | 27,33 | 35,80 | 41,61 | 47,41 | 52,22 | 59,02 – 60,57 | 64,82 | IUP |
| | **Transformasi Digital** | | | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) | Angka | 6,01 (2023) | 6,05 | 6,08 | 6,17 | 6,25 | 6,9 | 6,11 | IUP |
| | Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) | Nilai | 54,43 (2022) | 55,37 | 55,66 | 55,92 | 56,15 | 56,36 | 56,56 | Indikator Tujuan |
| | Nilai Pilar Infrastruktur ITDN | Nilai | 59,93 (2022) | 61,66 | 62,12 | 62,54 | 62,92 | 63,26 | 63,58 | Indikator Sasaran |
| | Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN | Nilai | 53,92 (2022) | 61,66 | 62,12 | 62,54 | 62,92 | 63,26 | 63,58 | Indikator Sasaran |
| | **Integrasi Ekoomi Domestik dan Global** | | | | | | | | | |
| | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi | Persen | n.a | 8,67 | 8,5 | 8,33 | 8,16 | 7.99 | 7,82 | IUP |
| | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | Persen | 36,65 | 38,07 | 38,12 | 38,17 | 38,23 | 38,28 | 38,33 | IUP |
| | Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB | Persen | 9,68 | 10,5* | 10,9* | 11,4 | 11,8* | 12,3 | 12,6* | IUP |
| | **Perkotaan dan Perdesaan Sebagi Pusat Pertumbuhan ekonomi** | | | | | | | | | |
| | Indeks Infrastruktur | Angka | 85,64 | 88,39 | 88,83 | 89,33 | 89,83 | 90,08 | 90,33 | Indikator Sasaran |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | Persen | 71,86 | 77,5 | 80,08 | 82,67 | 85,26 | 87,85 | 90,43 | IUP |
| | Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap Nasional | Persen | n.a | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | IUP |
| | Persentase Desa Mandiri | Persen | 32,88 | 33,09 | 34,05 | 35,25 | 36,88 | 37,24 | 38,71 | IUP |
| | **Stabilitas Ekonomi Makro** | | | | | | | | | |
| | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | Persen | 0,69 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | IUP |
| | Tingkat Inflasi | Persen | 1,23 | 2,5-3,8 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | 1,6 – 3,7 | IUP |
| | Total dana pihak ketiga terhdap PDRB (%) | Persen | 19,7 | 23,54 | 25,44 | 27,34 | 29,25 | 31,15 | 33,05 | IUP |
| | Aset Dana Pensiun terhadap PDRB | Persen | n.a | 0,13 | 0,30 | 0,47 | 0,65 | 0,82 | 0,99 | IUP |
| | Nilai Transaksi Saham Per Kapita | Nilai | n.a | 2.718.532,8 | 4.419.347,6 | 6.120.162,4 | 7.820.977,2 | 9.521.792 | 11.222.606,8 | IUP |
| | Total kredit terhdap PDRB | Persen | n.a | 24,2 | 26 | 27,8 | 29,6 | 31,04 | 32,75 | IUP |
| | Inklusi keuangan | Persen | 75,02 | 94,46 | 94,93 | 90,33 | 92,65 | 96,35 | 97,61 | IUP |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| | **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif** | | | | | | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 81,74 | 81,80 | 81,86 | 82 | 82,30 | 82,50 | 82,80 | Indikator Tujuan |
| | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 98,16 | 98,16 | 98,17 | 98,19 | 98,21 | 98,23 | 98,25 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Nilai SAKIP | Angka | 69,02 | 69,27 | 70,03 | 70,20 | 70,35 | 70,40 | 70,50 | Indikator Sasaran |
| | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 3,94 | 4,01 | 4,05 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,25 | IUP |
| | Indeks Pelayanan Publik | Poin | 4,12 | 4,41 | 4,44 | 4,48 | 4,51 | 4,55 | 4,59 | IUP |
| | Indeks Integritas Nasional (Indeks Integritas Provinsi) | Angka | 71,53 | 73,95 | 74,70 | 75,46 | 76,22 | 76,98 | 77,73 | IUP |
| | **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial** | | | | | | | | | |
| | Persentase Penegakan Hukum Perarutan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IUP |
| | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | Persen | n.a | 64,53 | 65,4 | 66,27 | 67,14 | 68,01 | 68,88 | IUP |
| | Indeks Demokrasi Indonesia | Angka | 76,43(2023) | 81.26 – 84.51 | 81,65 – 84.91 | 82.05 – 85.30 | 82,44 – 85,70 | 82.84 – 86.09 | 83.23 – 86,49 | IUP |
| | **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan** | | | | | | | | | |
| | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,7 (2023) | 3,45 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,49 | 3,50 | Sasaran Visi |
| | Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti | Persen | n.a | 60 | 61,25 | 62,5 | 63,75 | 65 | 66,25 | IUP |
| | Indeks Ketahanan Nasional | Angka | 2,92 | 3,04 | 3,09 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | 3,29 | IUP |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| **INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)** | | | | | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | |
| | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah | % | 86,81 | 87,31 | 87,81 | 88,31 | 88,81 | 89,31 | 89,81 | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pedidika khusus | % | 85,20 | 85,50 | 85,80 | 86,1 | 86,4 | 86,7 | 87,00 | |
| | **KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | /1000 Penduduk | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | |
| | Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang di Layani oleh Jaringan Irigasi. | Angka | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,589 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | |
| | Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | % | 0 | 0 | 6,45 | 12,9 | 13,16 | 15,74 | 18,32 | |
| | Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional | Angka | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | |
| | Rasio Kemantapan Jalan | % | 71,42 | 71,65 | 76,59 | 80,04 | 80,11 | 80,18 | 80,25 | |
| | Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Wilayah Provinsi yag dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | |
| | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni | % | 0 | 11,63 | 13,16 | 15,15 | 10,00 | 11,11 | 12,50 | |
| | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani | % | 4,46 | 5,21 | 7,81 | 10,41 | 13,02 | 15,63 | 18,23 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU | % | 48,25 | 48,37 | 48,49 | 48,61 | 48,73 | 48,85 | 48,97 | |
| | **KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai degan dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Penanganan Pra Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **SOSIAL** | | | | | | | | | |
| | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | |
| | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 45,83 | 75 | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | |
| | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | 17,27 | 17,29 | 17,31 | 17,33 | 17,35 | 17,37 | 17,39 | |
| | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | Belum Rilis BPS | 83.200.000 | 83.400.000 | 83.600.000 | 83.800.000 | 83.900.000 | 84.100.000 | |
| | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 88,45 | 88,65 | 88,85 | 89,05 | 90,85 | 92,85 | 94,85 | |
| | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | % | 71,86 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
| | Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-Undangan bidang ketenagakerjaan | % | 91,48 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | |
| | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | % | 3,67 | 3,54 | 3,21 | 3,04 | 3,04 | 2,95 | 2,85 | |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan. Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | % | 21,33 | 20,84 | 20,23 | 20,07 | 19,86 | 19,57 | 19,32 | |
| | **PANGAN** | | | | | | | | | |
| | Persentase Cadangan Pangan | % | 23,12 | 27,29 | 28,65 | 30,09 | 31,59 | 33,17 | 34,83 | |
| | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum yang selesai tepat waktu | % | 66,66% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota | % | Menunggu Perhitungan Balai Kereta Api | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| | Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | Angka | 75,69 | 77,61 | 77,82 | 78,03 | 78,25 | 78,46 | 78,67 | |
| | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin | Persen | 71,53 | 71.53 | 71.53 | 71.53 | 71.53 | 71.53 | 71.53 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | |
| | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | |
| | Penyajian data kepedudukan skala Provinsi dalam satu tahun | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Pemanfaatan data Kependudukan | Persentase | 21,05 | 26,31 | 31,58 | 36,84 | 42,10 | 47.37 | 52,63 | |
| | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |
| | Persentase pengentasan desa tertinggal | % | 6.09 | 5.21 | 4.33 | 3.45 | 2.57 | 1.69 | 0.81 | |
| | Persentase peningkatan status desa mandiri | % | 32.88 | 33.58 | 34.28 | 34.98 | 35.68 | 36.38 | 37.08 | |
| | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | |
| | TFR ( Angka Kelahiran Total) | Nilai | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,10 | |
| | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) | % | 59,70 | 59,95 | 60,2 | 60,45 | 60,7 | 60,95 | 61,2 | |
| | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | % | 12 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10 | 9,6 | |
| | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| | Rasio Konektivitas Provinsi | Rasio | 0.69 | 0.04* | 0.22* | 0.41* | 0.67* | 0.89* | 1.00* | |
| | V/C Ratio di Jalan Provinsi | % | 0.47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disedia kan oleh Dinas Kominfo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 21,62 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | % | 96,45 | 96,50 | 97 | 97,50 | 98 | 98,50 | 99 | |
| | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 31% | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | |
| | Meingkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Persen | 5% | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan investasi di provinsi | Persen | | 15,47 | 1,81 | 2,37 | 2,89 | 3,37 | 4,01 | |
| | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata | % | 6,60 | 6,62 | 6,64 | 6,66 | 6,68 | 6,70 | 6,72 | |
| | Peningkatan Prestasi Olahraga | Medali | 154 | 50 | 55 | 65 | 85 | 90 | 95 | Medali ditargetkan dari even olahraga tingkat nasional yang pelaksanaannya beragam |
| | **STATISTIK** | | | | | | | | | |
| | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | |
| | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 50,01 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| | Telestarikannya Cagar Budaya | Persen (%) | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | |
| | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 74,46 | 74,69 | 74,81 | 74,93 | 75,00 | 75,50 | 75,90 | |
| | Indeks Pembangunan Literasi masyarakat | Indeks | 88,24 | 88,88 | 89.00 | 89,50 | 89,70 | 89,90 | 90,10 | |
| | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | |
| | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan pasal 59 UU No.43 ahun 2009 tentang Kearsipan) | Persen | 49,72 | 52,26 | 54,80 | 57,34 | 59,88 | 62,42 | 65,00 | |
| | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat. | Persen | 66,66 | 67,06 | 67,46 | 67,86 | 68,26 | 68,66 | 69,06 | |
| **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | |
| | **KELAUTAN PERIKANAN** | | | | | | | | | |
| | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KPP) | Ton | 4.869.692.2 | 5,499,143.5 | 5,759,539.1 | 6.033.823 | 6.320.920.9 | 6.622.152.3 | 6.937.721.5 | |
| | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | % | 46,33 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| | Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan macanegara per kebangsaan | Persen (%) | | 2,68 | 3,38 | 3,88 | 4,83 | 4,88 | 5,38 | |
| | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | Persen (%) | 2 | 2,15 | 2,85 | 3,35 | 3,85 | 4,35 | 4,85 | |
| | Tingkat Hunian Akomodasi | Persen (%) | 49,64 | 51,89 | 54,14 | 56,39 | 58,64 | 60,89 | 63,14 | |
| | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Persen (%) | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,50 | |
| | **PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| | Produksi Pertanian per hektar per tahun<br>- Padi<br>- Jagung | Ton | <br>4.818.429<br>1.530.607 | <br>4.914.798<br>1.561.219 | <br>5.013.094<br>1.592.444 | <br>5.113.355<br>1.624.292 | <br>5.215.623<br>1.656.778 | <br>5.319.935<br>1.689.914 | <br>5.426.334<br>1.723.712 | |
| | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | **KEHUTANAN** | | | | | | | | | |
| | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persen | 28.76 | 29,03 | 29,29 | 29,55 | 29,80 | 30,05 | 30,30 | |
| | Persentase Kerusakan hutan per tahun (deforestrasi) | Persen | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
| | Persentase Luas Lahan kritis yang direhabilitasi | Persen | 0,05 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **ENERGI SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | | |
| | Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Desa yang Teraliri Listrik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan nilai ekpor non migas | % | -12,92 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| | Persentase Komiditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | % | 38,11 | 38,11 | 38,15 | 38,2 | 38,25 | 38,3 | 38,35 | |
| | Tertib Berlaku | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Kinerja realisasi Pupuk | % | 73,28 | 73,28 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | |
| | Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | % | 73,24 | 73,25 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | |
| | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | % | 30 | 30,1 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| | Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi | % | 4,8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan | % | 105,36 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | | | | | | | | | |
| | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pangawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| | Persentase Jumlah Hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| | Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini | % | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | |
| | **PERENCANAAN DAN KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 5,20 | 5,10 | 5 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | |
| | Rasio PAD | % | 53,79 | 52,55 | 52,57 | 52,66 | 52,94 | 53,13 | 52,55 | |
| | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | % | 60,21 | 60,20 | 60,19 | 60,18 | 60,17 | 60,16 | 60,15 | |
| | Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,225 | 3,235 | 3,245 | 3,245 | 3,264 | 3,274 | 3,284 | |
| | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | 3,24 | 3,34 | 3,44 | 3,54 | 3,65 | 3,76 | 3,76 | |
| | **PENGADAAN** | | | | | | | | | |
| | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 85,57 | 85,60 | 86 | 86,65 | 87 | 87,70 | 90 | |
| | Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan | % | 41,12 | 42,15 | 43,50 | 44,65 | 45,70 | 47,80 | 50 | |
| | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | % | 98,31 | 98,39 | 98,42 | 98,52 | 98,60 | 98,80 | 99 | |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | |
| | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) | % | 79,92 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | |
| | Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) | % | 28,94 | 29,50 | 30,00 | 30,50 | 31,00 | 31,50 | 32,00 | |
| | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) | % | 70,11 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | 79,00 | 80,00 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **MANAJEMEN KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| | Budget execuation; Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 5,20 | 5,10 | 5 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | |
| | Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | |
| | Assets Management | Data | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| | Cash Management: Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | % | 2,95 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | |
| | **TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK** | | | | | | | | | |
| | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline servive delivery units*) | % | 95,29 | 95,30 | 95,31 | 95,32 | 95,33 | 95,34 | 95,35 | |
| | Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

*Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025*
*Ket. * masih dalam tahapan exercise*

**Tabel IV.5.**
**Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal**

| Jenis Pelayanan Dasar | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Bidang Pendidikan** | | | | | | | | | | |
| Pendidikan Menengah | Persentase warga Negara usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah | % | 86,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | % | 61,28 | 67,17 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | |
| Pendidikan Khusus | Persentase Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus | % | 85,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | % | 53,21 | 53,94 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| **Bidang Kesehatan** | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau bepotensi bencana provinsi | Persentase penduduk yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Jenis Pelayanan Dasar | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi | Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | |
| Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kabupaten/ Kota | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kabupaten/ Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fasilitasi penyediaan rumah yang layak | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Jenis Pelayanan Dasar | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi | Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | | | | | | | | | |
| **Bidang Trantibumilinmas** | | | | | | | | | | |
| Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Bidang Sosial** | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Persentase Warga Negara Lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Jenis Pelayanan Dasar | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Persentase Warga Negara korban bencana korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

*Sumber: OPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025*

**Tabel IV.6.**
**Indikator *Sustainable Development Goals***
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030**

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang. dari 1,25 dolar Amerika per hari.** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim. | Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) | Persen | NA | 0 | 0 | - | - | - | - | Bappelitbangda |
| **1.2** | **Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | RKPD, Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. | Persen | 7.77 | 7,30-7,89 | 6,5-7,0 | 6,44-6,86 | 6,38-6,54 | 3,49-4,49 | 3,48-4,48 | Bappelitbangda |
| **1.3** | **Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori | "Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor | Persen | 33.15 | 33.25 | 33.35 | 33.45 | 33.55 | 33.65 | 33.75 | Dinas Sosial |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. | BNPB: Data korban bencana yang terdampak yang mengungsi. " | | | | | | | | | |
| 1.3.1.(b) | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk data estimasi populasi jumlah pekerja | Persen | 32.09 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| **1.4** | **Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.** | | | | | | | | | | |
| 1.4.2* | Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. | Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk | Rumah Milik (%) | 88.25 | 90.43 | 91.69 | 92.95 | 94.21 | 95.47 | 96.73 | Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | | | Rumah Sewa/ Kontrak (%) | 2.09 | 1.98 | 1.87 | 1.76 | 1.65 | 1.54 | 1.43 | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **1.5** | **Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.** | | | | | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | Meninggal: 73 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Hilang: 0 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | | | | Terdampak: 9.086 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp | 135,250,570,000 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1.a** | **Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.** | | | | | | | | | | |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Persen | Pendidikan 33,78 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | Kesehatan 9,96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | Sosial 0,52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | |
| **TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN** | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Dinas Ketahanan Pangan<br>BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) | Persen | 6.99 | 6.82 | 6.18 | 5.54 | 4.9 | 4.26 | 3.62 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau | Dinas Ketahanan Pangan | Persen | 2,82 | 2.42 | 2.02 | 1.62 | 1.22 | 0.82 | 0.42 | Dinas Ketahanan Pangan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita. | Dinas Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) | Persen | 23.3 | 21.78 | 20.37 | 19.05 | 17.8 | 16.65 | 15.57 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2* | "Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe." | Dinas Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) | Persen | 9,1 ( SKI 2023) | 7.95 | 7.43 | 6.95 | 6.5 | 6.08 | 5.68 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.3* | Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. | Dinas Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) | Persen | 7.4 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(a) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH). | Dinas Ketahanan Pangan | Poin | 87.74 | 88.51 | 89.34 | 90.63 | 91.91 | 93.2 | 94.48 | Dinas Ketahanan Pangan |
| **2.4** | **Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memper- kuat kapasitas adaptasi ter- hadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas** | | | | | | | | | | |
| 2.4.1* | Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)/ | Persen | 49.37 | 49.64 | 49.66 | 49.67 | 49.68 | 49.69 | 49.7 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Agricultural Integrated Survey (AGRIS). | | | | | | | | | |
| 2.4.1(a) | Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Persen | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| **TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA** | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Dinas Kesehatan BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). | Kematian per 100.000 kelahiran hidup | 134 | 133 | 129 | 118 | 107 | 96 | 86 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya | Badan Pusat Statistik (BPS) | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; | | Persen | 98.69 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | (b) di fasilitas Kesehatan | | Persen | 96.26 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| **3.2** | **Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000."** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1* | "(a) Angka Kematian Balita (AKBa); | Dinas Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) | Kematian per 1000 kelahiran hidup | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | Dinas Kesehatan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup." | | Kematian per 1000 kelahiran hidup | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) | Kematian per 1000 kelahiran hidup | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | Dinas Kesehatan |
| **3.3** | **Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1* | Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi. | Dinas Kesehatan | kasus baru per 1000 pendudukti dak terinfeksi | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2* | "Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk." | Dinas Kesehatan | kasus baru 100.000 penduduk | 324 | 326 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Dinas Kesehatan | Per 1000 Penduduk | 0.21 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | Dinas Kesehatan | Kabupaten /Kota | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.4* | Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. | Dinas Kesehatan | per 100.000 Penduduk | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | terhadap penyakit tropis yang terabaikan | | | | | | | | | | |
| | (a) Filariasis | | orang | 52 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| | (b) Kusta | | persen | 84.4 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 3.3.5(a) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | Dinas Kesehatan | Kab/Kota | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5(b) | Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi | Dinas Kesehatan | 4 Kab./kota | 2 kab./kota | 2 kab./kota | 3kab./kota | 3kab./kota | 3kab./kota | 3kab./kota | 3kab./kota | Dinas Kesehatan |
| **3.4** | **Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.** | | | | | | | | | | |
| 3.4.1(a) | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. | Dinas Kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) | Persen | 11.28 | 12.4 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Dinas Kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) | Persen | 32,15 | 32,11 | 32,07 | 32,05 | 32,01 | 32 | 31,68 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Dinas Kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) | Persen | 29.79 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.2* | Kematian akibat bunuh diri (incidence rate). | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri | Jiwa | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **3.6** | **Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas."** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3.6.1* | Kematian akibat kecelakaan lalu lintas | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri | Jiwa | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **3.7** | **Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.** | | | | | | | | | | |
| 3.7.2(a) | Total Fertility Rate (TFR). | 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 2. BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). | Jumlah anak per WUS 15-49 tahun | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **3.8** | **Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang** | | | | | | | | | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet Need Pelayanan Kesehatan. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | 5,34 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Kesehatan |
| **3.a** | **Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | 24,66 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Kesehatan |
| **3.b** | **Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.** | | | | | | | | | |
| 3.b.1* | Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. | "Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Kesehatan Indonesia (SKI). BPS: Susenas)" | 1. DPT3 satuannya % | 64 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 90 | Dinas Kesehatan |
| | | | 2. Campak satuannya % | 87 | 85 | 88 | 91 | 93 | 95 | 95 | |
| | | | 3. PCV2 satuannya % | 63 | 65 | 71 | 77 | 84 | 90 | 90 | |
| 3.b.3* | Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. | Dinas Kesehatan | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| **3.c** | **Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.** | | | | | | | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Dinas Kesehatan | Per 1.000 penduduk | 0,52 per 1.000 penduduk | 0,52 per 1.000 penduduk | 0,53 per 1.000 penduduk | 0,53 per 1.000 penduduk | 0,54 per 1.000 penduduk | 0,55 per 1.000 penduduk | 0,56 per 1.000 penduduk | Dinas Kesehatan |
| **TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS** | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4.1.2* | Tingkat penyelesaian pendidikan | Dinas Pendidikan BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. | Persen | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | jenjang SD/sederajat, | | | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | SMP/sederajat, | | | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | dan SMA/sederajat | | | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| 4.1.2.(a) | Angka anak tidak sekolah usia | Dinas Pendidikan BPS:Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. | Persen | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | Usia 7-12 tahun | | | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | Usia 13-15 tahun | | | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | Usia 16-18 tahun | | | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| **4.2** | **Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.** | | | | | | | | | | |
| 4.2.2* | Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. | Dinas Pendidikan BPS:Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Pendidikan |
| **4.3** | **Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.** | | | | | | | | | | |
| 4.3.1* | Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. | Dinas Pendidikan BPS:Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Kor. | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Pendidikan |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi (PT) | Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Pendidikan |
| **4.4** | **Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4.4.1.(a) | Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Pendidikan |
| **4.5** | **Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.** | | | | | | | | | | |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Dinas Pendidikan Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Pendidikan |
| **4.6** | **Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.** | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Pendidikan |
| **4.c** | **Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.** | | | | | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Dinas Pendidikan Data Pokok Pendidikan, Pusat | Persen | 97.9 | 98.05 | 98.2 | 98.35 | 98.5 | 98.65 | 98.8 | Dinas Pendidikan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Data dan Statistik Pendidikan. | | | | | | | | | |
| **TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER** | | | | | | | | | | | |
| **5.3** | **Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.** | | | | | | | | | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. | Persen | 8.09 | 8,02 | 7,98 | 7,62 | 7,54 | 7,48 | 7,46 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **5.5** | **Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.** | | | | | | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | (a) parlemen tingkat pusat | | Persen | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | |
| | (b) pemerintah daerah | | Persen | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). | Persen | 55,10 | 55,23 | 55,56 | 55,75 | 55,98 | 56,03 | 56,45 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **5.b** | **Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Bappelitbangda |
| **TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK** | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua** | | | | | | | | | | |
| 6.1.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan / akses air minum yang dikelola secara aman. | Dinas Kesehatan : Susveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Bappelitbangda | Persen | 15.31 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42.5 | Dinas Kesehatan |
| **6.2** | **Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan."** | | | | | | | | | | |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman | Dinas Kesehatan, BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Bappelitbangda | Persen | 10.88 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun | | Persen | 85.66 | 85.8 | 85.94 | 86.08 | 86.22 | 86.36 | 86.5 | |
| **6.3** | **Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.** | | | | | | | | | | |
| 6.3.1(a) | Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman. | Kementerian Lingkungan Hidup | Persen | 88.31 | 88.69 | 89.05 | 89.38 | 89.99 | 89.99 | 90.27 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi SIMPEL dan melaporkannya secara berkala. | | | | | | | | | |
| 6.3.2(a) | Indeks Kualitas Air (IKA). | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Indeks | 58.51 | 75.42 | 75.62 | 75.82 | 76.02 | 76.22 | 76.42 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **6.6** | **Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air, tanah dan danau** | | | | | | | | | | |
| 6.6.1(a) | Indeks Kualitas Lahan. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Indeks | 56.52 | 71.74 | 71.81 | 71.88 | 71.95 | 72.02 | 72.09 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU** | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.** | | | | | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | Dinas Energi Sumber Daya Mineral | persen | 99.65 | 99.66 | 99.67 | 99.68 | 99.69 | 99.7 | 99.71 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
| 7.1.1(a) | Konsumsi listrik per kapita. | Dinas Energi Sumber Daya Mineral | kwh / kapita | 922.7 | 930.7 | 939.7 | 949.7 | 959.7 | 969.7 | 979.7 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
| 7.1.2(b) | Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk | Dinas Energi Sumber Daya Mineral Badan Pusat Statistik: | persen | 95.37 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | memasak terhadap total rumah tangga. | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) | | | | | | | | | |
| **7.2** | **Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.** | | | | | | | | | | |
| 7.2.1(a) | Bauran energi terbarukan (dari energi primer). | Dinas Energi Sumber Daya Mineral | persen | 27.33 | 27.34 | 27.37 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 27.83 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
| **TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | **Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.** | | | | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita | Badan Pusat Statistik | Persen | 3,950 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Bappelitbangda |
| 8.1.1.(a) | PDRB per Kapita | Badan Pusat Statistik | juta | 73,57 | 76,58-80,16 | 80,5-84,9 | 85,06-89,37 | 86,07-93,43 | 94,06-117,11 | 98,71-120,13 | Bappelitbangda |
| **8.2** | **Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya."** | | | | | | | | | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk data estimasi populasi jumlah pekerja | Persen | NA | 1.32 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **8.3** | **Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.** | | | | | | | | | | |
| 8.3.1(a) | Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal. | Dinas Koperasi | Persen | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | Dinas Koperasi |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin | Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| **8.5** | **Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.** | | | | | | | | | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam kerja. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Rp | NA | 15900 | 16200 | 16400 | 16600 | 16800 | 17000 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Persen | 4.19 | 3,80-4,10 | 3,64-4,03 | 3,49-3,96 | 3,33-3,89 | 3,50-3,97 | 3,02-3,76 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | Dinas Tenaga Kerja Dan | Persen | 7.93 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.8 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | | | | | | | | | |
| **8.6** | **Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.** | | | | | | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Persen | 21.65 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| **8.7** | **Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.** | | | | | | | | | | |
| 8.7.1.(a) | Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | Badan Pusat Statistik | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, DP3A, Bappelibangda |
| **8.8** | **Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.** | | | | | | | | | | |
| 8.8.1.(a) | Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Persen | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) | | | | | | | | | |
| **8.9** | **Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.** | | | | | | | | | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional) | Persen | 1,36 | 1,38 | 1,4 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 1,5 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |
| | Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB. | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional) | Persen | 1,49 | 11,03 | 3,31 | 3,85 | 3,09 | 3,59 | 3,57 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |
| 8.9.1(a) | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Badan Pusat Statistik | Ribu Orang | 12.487 | 78,22 | 84,09 | 89,95 | 95,82 | 101,69 | 107,56 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |
| 8.9.1(b) | Jumlah perjalanan wisatawan nusantara. | Dinas Kebudayaan dan | Orang | 36,518,290 | 37,248,655 | 37,979,020 | 38,709,385 | 39,439,750 | 40,170,115 | 40,900,480 | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Kepariwisataan Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) | | | | | | | | | |
| **8.10** | **Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.** | | | | | | | | | | |
| 8.10.1(b) | Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. | Dinas Koperasi | Persen | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 | Dinas Koperasi |
| **TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR** | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.** | | | | | | | | | | |
| 9.1.1(a) | Kondisi mantap jalan Provinsi | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | Persen | 71.42 | 71.65 | 76.59 | 80.04 | 80.11 | 80.18 | 80.25 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. | Dinas Perhubungan Badan Pusat Statistik (BPS) | Orang | 15,146,369.00 | 15,512,000.00 | 16,266,000.00 | 16,266,000.00 | 17,079,000.00 | 17,933,000.00 | 18,830,000.00 | Dinas Perhubungan |
| | | | ton | 11,351,853 | 11,522,131.00 | 11,694,963.00 | 11,870,387.00 | 12,048,443.00 | 12,229,170.00 | 12,412,603.00 | |
| 9.1.2(a) | Jumlah bandara. | Dinas Perhubungan Badan Pusat Statistik (BPS) | lokasi | . 8 Lokasi | . 8 Lokasi | . 8 Lokasi | . 8 Lokasi | . 9 Lokasi | . 9 Lokasi | . 9 Lokasi | Dinas Perhubungan |
| 9.1.2(b) | Jumlah pelabuhan penyeberangan. | Dinas Perhubungan. | Lokasi | 13 Lokasi | 13 Lokasi | 13 Lokasi | 13 Lokasi | 13 Lokasi | . 14 Lokasi | . 14Lokasi | Dinas Perhubungan |
| **9.2** | **Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 9.2.1* | Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita | Badan Pusat Statistik (BPS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Rasio PDRB industri pengolahan | | Persen | 13,02 | 13,05 | 13,61 | 14,17 | 14,73 | 15,26 | 15,85 | |
| | Rasio nilai tambah industri pengolahan per kapita | | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| 9.2.1(a) | Pertumbuhan PDRB industri pengolahan. | Badan Pusat Statistik (BPS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persen | 4.19 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Persen | 16.7 | 18.62 | 18.82 | 19.02 | 19.22 | 19.42 | 19.62 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| **9.3** | **Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.** | | | | | | | | | | |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. | Badan Pusat Statistik (BPS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persen | 30.26 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **9.b** | **Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.** | | | | | | | | | | |
| 9.b.1(a) | Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persen | 13.22 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN** | | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.** | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.(a) | Rasio Gini | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | 0,360 | 0,350-0,360 | 0,348-0,358 | 0,346-0,356 | 0,342-0,352 | 0,330-0,335 | 0,328-0,333 | Bappelitbangda |
| 10.1.1.(b) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | 7.77 | 7,30-7,89 | 6,85-7,08 | 6,64-6,86 | 6,38-6,54 | 5,60-6,1 | 5,35-5,96 | Bappelitbangda |
| 10.1.1.(c) | Jumlah Desa Tertinggal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa." | Desa | 138 | 118 | 98 | 78 | 58 | 38 | 18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri | Dinas Pemberdayaan | Desa | 745 | 761 | 777 | 793 | 809 | 825 | 841 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Masyarakat dan Desa Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa." | | | | | | | | | |
| **10.2** | **Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.** | | | | | | | | | | |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Bappelitbangda |
| **10.3** | **Menjamin kesempatan yang samadan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.** | | | | | | | | | | |
| 10.3.1(a) | Indeks aspek Kebebasan. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS) | nilai | NA | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 10.3.1(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | "Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui: 1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan; | Jumlah Kebijakan | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Biro Hukum |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 2. Laporan dan Kajian Mitra;<br>3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi" | | | | | | | | | |
| **10.4** | **Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.** | | | | | | | | | | |
| 10.4.1.(b) | Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Persen | 32.09 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 10.7.2.(b) | Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi. | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): Laporan administratif | Orang | 1386 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| **TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| **11.1** | **Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.** | | | | | | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Persen | 71.86 | 77.5 | 80.08 | 82.67 | 85.26 | 87.85 | 90.43 | Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **11.2** | **Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.** | | | | | | | | | | |
| 11.2.1(a) | Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi Publik (Penduduk SulSel 9,4 juta jiwa). | Dinas Perhubungan BPS: Susenas (Modul Ketahanan Sosial). | Persen | 11.6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | Dinas Perhubungan |
| 11.2.1(b) | Persentase penduduk terlayani transportasi umum.(Penduduk SulSel 9,4 Juta Jiwa). | Dinas Perhubungan Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | 11.6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | Dinas Perhubungan |
| **11.5** | **Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.** | | | | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | Meninggal: 73 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Hilang: 0 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | | | | Terdampak: 9.086 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| **11.6** | **Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.** | | | | | | | | | | |
| 11.6.1(b) | Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. | Bappelitbangda BPS: Susenas KOR; | Persen | 2023 : 12,48, 2024 : belum selesai verifikasi di SIPSN | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Bappelitbangda, Dinas SDA Cipta Karya |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 11.6.2(b) | Indeks Kualitas Udara. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal PPKL. | Point | 90.17 | 79.57 | 79.87 | 80.17 | 80.47 | 80.77 | 81.07 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **11.7** | **Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan maudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas** | | | | | | | | | | |
| 11.7.2.(a) | Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Bappelitbangda |
| **11.b** | **Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030."** | | | | | | | | | | |
| 11.b.2* | Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kab/Kota | NA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB** | | | | | | | | | | | |
| **12.4** | **Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 12.4.2* | (a) Libah B3 yang dihasilkan per kapita | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Ton | 0.0035 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0039 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya. | | Persen | 57.25 | 58,50 | 59.67 | 60.78 | 61.83 | 62.83 | 63.77 | |
| **12.5** | **Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.** | | | | | | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah. | Bappelitbangda | Persen | 8,97* | 9.22 | 9.47 | 9.72 | 9.97 | 10.22 | 10.47 | Bappelitbangda |
| **TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM** | | | | | | | | | | | |
| **13.1** | **Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara** | | | | | | | | | | |
| 13.1.1(a) | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jiwa | Meninggal: 73 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Hilang: 0 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| | | | | Terdampak: 9.086 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |
| 13.1.3* | Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kab/Kota | NA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **13.2** | **Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 13.2.2* | Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGNSMART Online). | TonCO2eq | 34,994.89 | 35,494.89 | 35,994.89 | 36,494.89 | 36,994.89 | 37,494.89 | 37,994.89 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 13.2.2(b) | Persentase Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | Bappelitbangda | Persen | NA | 29.7 | 33,46 | 37,222 | 40,98 | 44,73 | 48,49 | Bappelitbangda |
| **TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN** | | | | | | | | | | | |
| **14.1** | **Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.** | | | | | | | | | | |
| 14.1.1(a) | Presentase penurunan sampah terbuang ke laut. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Persen | belum ada data | 6.25 | 7.03 | 9.38 | 10.94 | 11.25 | 12.50 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **14.2** | **Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif** | | | | | | | | | | |
| 14.2.1* | Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan. | Dinas Kelautan dan Perikanan | kegiatan | belum ada data | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **14.4** | **Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.** | | | | | | | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Persen | 55.01 | 56.11 | 57.23 | 58.38 | 59.55 | 60.74 | 61.95 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **14.5** | **Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.** | | | | | | | | | | |
| 14.5.1* | Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Ha | 578,435.53 | 816,529.08 | 827,901.68 | 829,561.67 | 833,868.11 | 833,932.29 | 834,175.03 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **14.6** | **Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO) pada tahun 2020.** | | | | | | | | | | |
| 14.6.1(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Persen | 48.97 | 51.42 | 53.99 | 59.39 | 65.33 | 78.39 | 94.07 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **14.7** | **Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan.** | | | | | | | | | | |
| 14.7.1(a) | Persentase kontri-busi perikanan ter-hadap Produk Do-mestik Regional Bruto (PDRB). | Dinas Kelautan dan Perikanan Badan Pusat Statistik | Persen | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **14.b** | **Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.** | | | | | | | | | | |
| 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil | Dinas Kelautan dan Perikanan | regulasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 14.b.1(a) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Orang | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN** | | | | | | | | | | | |
| **15.1** | **Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.** | | | | | | | | | | |
| 15.1.1* | Proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan. | "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik | Persen | 32.73 | 32.77 | 33.66 | 34.35 | 35.04 | 36.05 | 36.94 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." | | | | | | | | | |
| **15.2** | **Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global** | | | | | | | | | | |
| 15.2.1(a) | Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Unit | 4 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH** | | | | | | | | | | | |
| **16.1** | **Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.** | | | | | | | | | | |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Bappelitbangda |
| **16.2** | **Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.** | | | | | | | | | | |
| 16.2.2* | Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persen | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,090 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **16.3** | **Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.** | | | | | | | | | | |
| 16.3.1(b) | Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi | "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Biro Hukum |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Sistem Informasi Database Bantuan Hukum." | | | | | | | | | |
| **16.6** | **Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.** | | | | | | | | | | |
| 16.6.1* | Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap anggaran yang disetujui | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Persen | 95,34 | 95,35 | 95,36 | 95,37 | 95,38 | 95,39 | 95,4 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 16.6.1(a) | Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini (WTP). | "Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi" | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 16.6.1(b) | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B | "Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi" | Persen | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Biro Organisai dan Tata laksana |
| 16.6.1.(c) | Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B | "Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi." | Persen | 40 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | Biro Organisai dan Tata laksana |
| 16.6.2(a) | Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. | Ombudsman RI | jumlah | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | Biro Organisai dan Tata laksana |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **16.7** | **Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.** | | | | | | | | | | |
| 16.7.1(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisi Pemilihan Umum (KPU) | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | | Persen | 16 | 16 | 16 | 16,03 | 16,05 | 16,05 | 16,2 | |
| | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | | Persen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,58 | |
| 16.7.2(a) | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS) | Indeks | NA | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.7.2(b) | Indeks Aspek Kebebasan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS) | Indeks | NA | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.7.2.(c) | Indeks Aspek Kesetaraan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS) | Indeks | NA | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **16.9** | **Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.** | | | | | | | | | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS): | Persen | NA | PM | PM | PM | PM | PM | PM | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);" | | | | | | | | | |
| 16.9.1(b) | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor | Persen | 98.31 | 98.31 | 98.41 | 98.51 | 98.61 | 98.71 | 98.81 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **TUJUAN 17 KEMINTRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN** | | | | | | | | | | | |
| **17.1** | **Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.** | | | | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya. | Badan Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik | Persen | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | Badan Pendapatan Daerah |
| 17.1.1(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. | Badan Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik | Persen | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | Badan Pendapatan Daerah |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Badan Pendapatan Daerah | Persen | 60.94 | 60.34 | 53.77 | 53.78 | 53.84 | 53.03 | 53.09 | Badan Pendapatan Daerah |
| **17.6** | **Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global** | | | | | | | | | | |

| Kode Indikator (3) | Nama Indikator SDGs (4) | Sumber Data (5) | Satuan (6) | Angka Dasar *(Baseline)* (7) | Target Pencapaian (8) | | | | | | Instansi Pelaksana (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 17.6.1(a) | Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga | Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Pusat Statistik (data jumlah rumah tangga. | Persen | 37.83 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **17.8** | **Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi** | | | | | | | | | | |
| 17.8.1* | Persentase pengguna internet | Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase | 70.1 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **17.17** | **Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.** | | | | | | | | | | |
| 17.17.1.(b) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Biro Pemerintahan | Mou/PKS | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Biro Pemerintahan |
| **17:18** | **Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.** | | | | | | | | | | |
| 17.19.2(b) | "Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)." | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Data Registrasi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |

*Sumber: OPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025*

# BAB V

# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan untuk mencapai Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

Visi Sulawesi Selatan yang Maju dan Berkarakter akan diwujudkan melalui 4 Misi pembangunan yaitu 1) Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing, 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan , 3) Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani, dan 4) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. Dalam rangka operasionalisasi 4 Misi dimaksud, ditetapkan 6 tujuan dan 17 sasaran, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah yang akan menjadi tema pembangunan tahunan sebagai berikut :1) Tahap 1 di Tahun 2025 merupakan tahap Peningkatan Perekonomian Daerah Dan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Tahap 2 di Tahun 2026 merupakan tahap Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berakhlak Dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Tahap 3 di Tahun 2027 merupakan tahap Akselerasi Pembangunan Sdm, Pelayanan Publik, Dan Infrastruktur Untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, 4) Tahap 4 di Tahun 2028 merupakan tahap Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Daya Saing Daerah, dan 5) Tahap 5 di Tahun 2029 merupakan tahap Perwujudan Sdm Berkarakter Dan Ekonomi Yang Tangguh Dan Berdaya Saing. Dalam kerangka pencapaian misi melalui penataan tahapan pembangunan tersebut, dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai pedoman umum dalam menetapkan arahan dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai selama periode lima tahun,sekaligus sebagai jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan implementatif di lapangan.

Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025-2029 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025-2029, dan untuk mengoptimalkan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

### 1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan perlu adanya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaanya, serta kesesuaian perencanaan dengan ketersediaan pendanaan dan pemanfataannya secara optimal. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan

dalam Renstra Perangkat Daerah. Program pembangunan perangkat daerah memedomani program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provnsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029. Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD. Rumusan Tujuan Perangkat Daerah wajib memperhatikan Sasaran RPJMD, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah merupakan operasionalisasi Arah Kebijakan RPJMD.

RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama kurun waktu berlakunya RPJMD 2025-2029, termasuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Pokok 2030 sebagai masa transisi pembangunan. Dalam hal terjadi dinamika pembangunan yang tidak terantisipasi pada saat penyusunan RPJMD, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi kedaruratan, fluktuasi ekonomi, atau keterbatasan kapasitas fiskal daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dan pagu anggaran program perangkat daerah pada RKPD. Penyesuaian tersebut wajib dilakukan secara terukur, argumentasi kebijakan yang memadai, serta tidak menyimpang dari arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah secara substansial.

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Sulawesi Selatan.

**2. Pendanaan Pembangunan**

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan untuk peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

**3. Mitigasi Fiskal**

Dalam rangka menyikapi perubahan kebijakan fiskal, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya mitigasi fiskal untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian, baik yang disebabkan oleh guncangan eksternal (seperti krisis global, pandemi, konflik geopolitik) maupun masalah domestik (seperti inflasi tinggi, pengangguran, atau defisit anggaran). Mitigasi fiskal daerah yang perlu diperhatikan dan dapat dilakukan diantaranya adalah : 1) Mitigasi Dampak Krisis dan Perlambatan Ekonomi, melalui refocusing dan realokasi APBD untuk belanja yang lebih produktif dan pro-rakyat 2) Penguatan Jaring Pengaman Sosial, 3) Mitigasi Tekanan Pendapatan Daerah, melalui relaksasi pajak daerah dan diversifikasi sumber PAD dari sektor-sektor baru, 4) Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah, melalui penyusunan kebijakan cadangan dana fiskal dan optimalisasi kerjasama dengan swasta (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur agar tidak membebani APBD, dan 5) Kebijakan antisipatif terhadap krisis pangan dan energi, melalui penyediaan anggaran untuk subsidi pupul tambahan daerah dan bantuan benih bagi petani

saat terjadi inflasi pangan dan pengembangan lumbung pangan daerah untuk mengantisipasi gejolak harga.

Mitigasi fiskal yang dilakukan harus memperhatikan 1) Sinkronisasi dengan APBN, 2) Kebijakan berbasis data dan prioritas, terutama kelompok rentan, dan 3) Pengendalian defisit fiskal daerah, agar ruang fiskal tetap aman.

**4. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian pada tahap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, termasuk menyusun rekomendasi penyesuaian kebijakan. Implementasi pengendalian tersebut melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem berbasis digital dalam periode pembangunan 2025–2029. Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesdi Selatan juga dilakukan dengan berbasis Manajemen Risiko pada proses pengendalian tahunan. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat. Dengan demikian, pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawei Selatan bersama dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan setra Perangkat Daerah lainnya dan hasil akhirnya di laporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyatr Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dipublikasikan sebagai wujud dari akuntabiltas kinerja pembangunan daerah. Evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan pada tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMD untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan selama periode 5 tahun.

**5. Pengarusutamaan Pembangunan**

Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pada Pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, dan Pemabngunan Berketahanan Iklim

**6. Mekanisme Perubahan RPJMD**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJMD dapat dimutakhirkan sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan, dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD.

**7. Komunikasi Publik**

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi

masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

**8. Masa Transisi**

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, RPJMD Tahun 2025-2029 memuat rencana Tahun 2030 sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum disusunnya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2030–2034, khususnya terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keselarasannya dengan Rancangan RKP Tahun 2030 jika RKP 2030 belum ditetapkan.

**9. Sistem insentif**

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya, dilakukan melalui pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi non pemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

**10. Manajemen Risiko**

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dilaksankan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan serta menghdapai ketidakpastian yang mungkin timbul, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan manajemen risiko pembangunan.

Manajemen risiko dimaksud meliputi proses indentifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, serta pemantauan risiko pada setiap misi, sasaran, dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen target pembangunan, tetapi juga dilengkapi instrument pengelolaan risiko yang akan memandu pemerintah daerah daalam melukakan penyesuaian kebijakan apabila terjadi perubahan situasi strategis. Manajemen risiko ini sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan menjadi bagian integral dari sikulus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Makassar, .....

**Gubernur Sulawesi Selatan,**

**Andi Sudirman Sulaiman**

PEMERINTAH PROVINSI
**SULAWESI SELATAN**